

EMHA

Ainun Nadjib



Surat kepada
Kanjeng Nabi

Surat kepada
Kanjeng Nabi

MIZAN PUSTAKA: KRONIK ZAMAN BARU adalah salah satu lini produk (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan buku-buku bertema umum dan luas yang merekam informasi dan pemikiran mutakhir serta penting bagi masyarakat Indonesia.

Surat kepada Kanjeng Nabi

EMHA
Ainun Nadjib

SURAT KEPADA KANJENG NABI
© copyright Emha Ainun Nadjib, 2015

Proofreader: Ine Ufiyatiputri

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Edisi Kesatu
November 1996
Juni 1997
November 1998

Edisi Kedua
Juni 2015

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan
PT Mizan Pustaka
Anggota IKAPI
Jln. Cinambo No. 135 (Cisaranten Wetan),
Ujungberung, Bandung 40294
Telp. (022) 7834310 – Faks. (022) 7834311
e-mail: kronik@mizan.com
<http://www.mizan.com>
facebook: Penerbit Mizan
twitter: @penerbitmizan

Desain sampul: Dodi Rosadi

Digitalisasi: Ibn' Maxum

ISBN 978-979-433-888-9

E-book ini didistribusikan oleh
Mizan Digital Publishing (MDP)
Jln. T. B. Simatupang Kv. 20,
Jakarta 12560 - Indonesia
Phone: +62-21-78842005 — Fax.: +62-21-78842009
website: www.mizan.com
e-mail: mizandigitalpublishing@mizan.com
twitter: @mizandotcom
facebook: mizan digital publishing

Pengantar Penerbit

Ada lima belas buku kumpulan esai. Ada satu buku novel. Ada satu buku kumpulan cerita pendek. Ada sepuluh naskah drama yang pernah ditulis. Ada tujuh buku kumpulan puisi. Ada satu buku kumpulan proisi. Ada satu buku terjemahan suluk Cirebonan. Ada satu kaset “Kado Muhammad”, yang semuanya itu merupakan karya Cak Nun—panggilan akrab Mas Emha Ainun Nadjib—dan beberapa di antaranya merupakan karya Cak Nun bersama para sahabatnya, saat *Surat kepada Kanjeng Nabi* ini diterbitkan sebagai buku yang kedelapan (setelah *Dari Pojok Sejarah* [1985]; *Suluk Pesisiran* [1989]; *Seribu Masjid, Satu Jumlahnya* [1990]; *Secangkir Kopi Jon Pakir* [1992]; *Markesot Bertutur* [1993]; *Markesot Bertutur Lagi* [1994]; dan *Opini Plesetan* [1995]) oleh Penerbit Mizan.

Jika kita bertanya, sudah berapa meterkah panjang “kreativitas” Cak Nun dalam berkarya di dunia tulis-menulis? Tentu tak mudah mengukurnya. Ini disebabkan ada banyak karya yang tak terekam atau terdokumentasikan yang kemungkinan besar lebih punya “gereget” ketimbang yang sudah dipublikasikan. Juga, kita tak dapat mengukur “kreativitas” hanya dari yang tampak. Yang tak tampak pun perlu diperhitungkan juga.

Surat kepada Kanjeng Nabi ini lahir dari “kreativitas” Cak Nun yang lain, yang rajin menulis di pelbagai koran dan majalah apa pun. Hampir semua tulisan yang tampil di sini berasal dari koran-koran lokal yang wilayah peredaran nasionalnya tentu tak seberapa jauh apabila dibandingkan dengan—misalnya—wilayah peredaran *Kompas* atau *Republika*. Bahkan, beberapa koran kemungkinan besar tak bisa menjangkau wilayah yang lebih luas dari seputar wilayah provinsinya.

Dengan begitu bisa dipastikan bahwa tulisan-tulisan Cak Nun yang terkumpul dalam buku ini belum banyak dibaca oleh masyarakat Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya. Lebih-lebih lagi kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Tulisan Cak Nun terbanyak diambil dari koran-koran lokal yang beredar di Yogyakarta—*Yogya Post*, *Bernas*, *Masa Kini* (sekarang sudah tidak ada), dan *Minggu Pagi*. Kemudian baru korannya Jawa Tengah—*Suara Merdeka* dan *Wawasan*. Selanjutnya, tulisan lainnya diambil dari koran yang beredar di Surabaya (*Surabaya Post*, *Surya*, dan *Jawa Pos*), di Jakarta (koran *Suara Karya*, *Pelita*, *Berita Buana*, *Suara Pembaruan*, dan majalah *Gatra*, *Amanah*, serta *Editor*), dan di Bandung (tabloid *Salam*).

Dalam kesempatan ini, Penerbit Mizan ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemimpin Redaksi Harian *Jawa Pos* yang telah memberikan izin pemuatan untuk dua berita yang disajikan dalam buku ini.

Sementara itu, pengumpulan seluruh bahan dalam buku ini berasal dari dua sumber. Sumber *pertama* adalah lemari-lemari Cak Nun di Kasihan, Bantul. Secara khusus perlu disampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Sdr. Pating yang telah bersusah payah mengeluarkan seluruh perbendaharaan tulisan Cak Nun, kemudian membantu memilih dan memilah-milahkan, serta sekaligus mengfotokopikan semuanya.

Sumber *kedua* berasal dari budi baik seorang santri Krapyak, Sdr. Ahmad Dawawin. Waktu itu, Penerbit Mizan sedang menggarap edisi kedua *Markesot Bertutur* (yang akhirnya pada tahun 1994 terbit dengan judul *Markesot Bertutur Lagi*). Kemudian, Mas Ahmad Dawawin

menuturkan bahwa dia masih menyimpan banyak tulisan “Seri Markesot” itu dan sejumlah besar tulisan Cak Nun yang belum pernah diterbitkan menjadi buku. Akhirnya, Mas Ahmad Dawawin mengirimkan sebanyak tujuh bundel koleksinya ke Penerbit Mizan. Bahkan, satu bundel telah disusunnya dengan rapi (walaupun belum diurutkan secara sistematis) dan dijuduli “Surat kepada Kanjeng Nabi”.

“Surat kepada Kanjeng Nabi” sendiri merupakan tulisan lepas Cak Nun di *Surabaya Post* untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad Saw. pada tahun 1992. Dalam tulisan tersebut Cak Nun menyampaikan “kondisi” umat sekaligus mengungkapkan rasa cinta dan kekagumannya kepada Junjungannya itu.

Ah, Muhammad, Muhammad. Betapa kami mencintaimu. Betapa hidupmu bertaburan emas permata kemuliaan, sehingga luapan cinta kami tak bisa dibendung oleh apa pun. Dan jika seandainya cinta kami ini sungguh-sungguh, betapa tak bisa dibandingkan, karena hanya satu tingkat belaka di bawah mesranya cinta kita bersama kepada Allah.

Akan tetapi, tampaknya cinta kami tidaklah sebesar itu kepadamu. Cinta kami tidaklah seindah yang bisa kami ungkapkan dengan kata, kalimat, rebana, dan kasidah-kasidah. Dalam sehari-hari kehidupan kami, kami lebih tertarik kepada hal-hal yang lain.

.....

Seperti juga kalau kami bersembahyang sujud kepada Allah, kebanyakan dari kami melakukannya karena kewajiban, tidak karena kebutuhan kerinduan, atau cinta yang meluap-luap. Kalau kami berdoa, doa kami berfokus pada kepentingan pribadi kami masing-masing.

Sesungguhnya kami belum mencapai mutu kepribadian yang mencukupi untuk disebut sahabatmu, Muhammad. Kami men-

cintaimu, namun kami belum benar-benar mengikutimu. Kami masih takut dan terus-menerus bergantung pada kekuasaan-kekuasaan kecil di sekitar kami. Kami kecut kepada atasan. Kami menunduk kepada benda-benda. Kami bersujud kepada uang, dan begitu banyak hal yang picisan.

Berlandaskan isi “surat” tersebutlah, akhirnya tulisan Cak Nun ini dipakai sebagai “ancangan”. Maksudnya, kurang lebih, adalah suatu “pengambilan langkah awal untuk mencapai tujuan” atau “cara khusus dalam mengambil langkah awal untuk mencapai tujuan”.

Apa “cara khusus” dan “tujuan” yang hendak dicapai? Tak mudah menjabarkannya. Tetapi yang jelas, bila tulisan-tulisan yang terkumpul dalam buku ini ada yang dapat menggulirkan pikiran pembaca untuk terus menggelinding dan tidak mandek, itu sudah cukup.

Awal November 1996

Penerbit Mizan

Anugerah Adam Malik untuk Emha

(Jawa Pos, 5 September 1991)

Penyair Emha Ainun Nadjib yang di-“cekal” di wilayah Jawa Tengah, nanti malam (5 September 1991) akan menerima penghargaan Anugerah Adam Malik di Bidang Kesusastraan. “Tentunya saya bersyukur. Tapi, saya tidak tahu kenapa saya yang dipilih. Padahal, saya merasa belum berbuat banyak untuk dunia kesusastraan,” katanya kepada *Jawa Pos*.

Upacara penerimaan Anugerah Adam Malik itu sendiri akan berlangsung malam ini di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. Pemberian anugerah terhadap beberapa tokoh hasil seleksi lima orang juri, masing-masing H. Rosihan Anwar, Adiyatman, Lasmi Jahardi, Wiratmo Soekito, dan Amy Priyono, merupakan penganugerahan yang kelima kalinya.

Menurut Sekretaris II Yayasan Adam Malik, Ny. Ratna Tarigan, tahun ini ada lima orang yang akan mendapat penghargaan dari yayasan yang dipimpin oleh janda Adam Malik ini. Dia membenarkan bahwa Emha merupakan salah seorang yang akan menerima penghargaan. “Sedangkan yang lain, saya tidak mau menyebutkan. Kami ingin bikin kejutan tentang itu,” katanya saat dihubungi melalui telepon kemarin.

Dikatakannya juga bahwa pemberian Anugerah Adam Malik Bidang Kesusastraan ini merupakan yang pertama kalinya. Selain bidang itu, akan diberikan anugerah di bidang kebudayaan, lingkungan hidup, dan kependudukan. “Kalau Anda ingin tahu kenapa Emha yang dipilih, tanya saja kepada Pak Rosihan sebagai ketua dewan juri,” tegasnya.

Emha berpendapat bahwa penghargaan Yayasan Adam Malik di Bidang Kesusastraan ini merupakan salah satu versi penilaian atas sepak terjangnya. Mungkin, lanjutnya, versi lain dari yayasan lain tidak akan punya alasan untuk memberikan hadiah seperti itu. “Atau malah memberi saya penghargaan di bidang perdukunan, misalnya,” ujarnya bercanda.

Dia sendiri sebetulnya tidak pernah menduga akan mendapat penghargaan seperti itu. Bahkan, dia sempat bingung kenapa Yayasan Adam Malik memilih dirinya. “Saya tidak pernah punya cita-cita mendapat penghargaan. Cita-cita saya hanyalah bekerja sampai tarikan napas terakhir. Soal penghargaan, pengakuan, honor, dan sebagainya itu hanya akibat ilmiah dan etis dari kerja,” tambah kolumnis yang baru saja sukses menggelar drama kolosal *Lautan Jilbab* di Surabaya ini.

Di bidang kesusastraan, saat ini dia memang sedang mempunyai obsesi untuk menerjuninya secara lebih serius. Karena itu, yang menjadi angan-angannya sekarang adalah bagaimana dia mempunyai waktu luang yang begitu banyak untuk menulis karya sastra yang lebih serius dan sublim.

Karena itu, lanjutnya, ketika ruang geraknya dibatasi di wilayah Jawa Tengah, dia pun tidak merasa risau. Dan dia tampaknya memang punya prinsip untuk mensyukuri semua hal yang menimpa dirinya. “Pokoknya semua itu saya syukuri saja. Bagi saya tak ada musibah, karena setiap yang disebut musibah harus dikhalifahi menjadi rezeki. Jadi, setiap saat kita mensyukuri nikmat-Nya,” katanya menyinggung masalah “cekal” yang menimpa dirinya.

Seperti diketahui, akibat ceramahnya di salah satu forum diskusi di Semarang, Emha oleh Pemda Jateng dibatasi ruang geraknya karena dianggap telah mempersoalkan Pancasila.

Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan dia juga menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan ICMI, karena kecewa bahwa lembaga tersebut tidak mampu ikut mengatasi masalah penderitaan penduduk Kedung Ombo.

Emha tampaknya memang juga tidak banyak terpengaruh dengan pembatasan gerak yang dilakukan Pemda Jateng itu. Dia masih tetap saja mempunyai banyak kesibukan. Bahkan, pada pekan ini dia sibuk mondar-mandir Yogyakarta-Borobudur. Senin pekan ini, misalnya, dia *shooting* wawancara dengan BBC di Borobudur.

Hari berikutnya, di tempat yang sama, dia bersama dengan kru TV NHK Jepang dan TVRI Pusat untuk pembuatan film *Mistery of Borobudur*. Untuk yang disebut terakhir itu, kata Emha, dia diminta memandu eksplorasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan film tersebut. []

pustaka-indo.blogspot.com

Genggamlah Tanah agar Jadi Emas

A nugerah Adam Malik yang saya terima beberapa waktu lalu (tepatnya, 5 September 1991—ed.) cukup mengagetkan saya sendiri. Lumayan juga saya masih dianggap sastrawan, meskipun jumlah puisi saya sudah ratusan dan saya membacakan puisi di depan orang banyak rata-rata dua kali seminggu. Sebenarnya ini bahan untuk *nyombong* sedikit: coba cari penyair di dunia ini yang baca sajak se-sering saya. Tetapi, insya Allah saya *nyombong* cukup tiga menit, sesudah itu merasa nol lagi.

Saya ini belum sastrawan, saya masih “dendam” untuk pada suatu saat bisa melahirkan—atas izin Allah—karya sastra yang serius dan “besar”.

Tetapi secara khusus, anugerah ini mencerminkan bahwa di Indonesia objektivitas masih hidup, kejernihan dan keadilan pandangan masih ada yang memelihara. Tidak semua pihak bersikap objektif, mau benarnya sendiri, dan bertindak sewenang-wenang kepada orang yang berbeda pendapat dengannya.

Saya tidak pernah mendapat penghargaan resmi dan institusional seperti ini. Penghargaan yang saya terima selama ini tecermin dari frekuensi perhatian masyarakat dan lembaga-lembaga sosial terhadap

kegiatan saya yang membuat saya benar-benar “tak punya waktu untuk diri sendiri” selama bertahun-tahun.

Sebenarnya ada dua format. *Pertama*, sastra sebagai karya sastra itu sendiri, baik yang dipublikasikan di media massa atau yang dibukukan. *Kedua*, sastra sebagai metode. Saya menjalani tugas-tugas sosial, budaya, politik, dan keagamaan selama ini, sebenarnya dengan “disiplin sastra”. Tanpa bantuan sastra, langkah komunikasi saya akan sangat terbatas. Dengan sastra, di samping saya dapat menemukan berbagai format komunikasi, saya juga tetap bisa memelihara pandangan terhadap dimensi-dimensi kedalaman manusia dan masyarakat, yang biasa diperdangkal oleh mata pandang parsial: ekonomi, politik, dan terutama kekuasaan praktis.

Mungkin memang perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah “perjuangan objektivitas”. Itu dimensi “keadilan” dalam konteks ilmu. Selama ini di negara kita, orang yang perlu dihargai malah dicurigai dan dibuang-buang, sementara banyak orang yang sebenarnya merugikan negara dan bangsa malah mendapat fasilitas dan posisi yang berlebihan. Mata kita ini rabun, baik mata ilmu, mata budaya, dan apalagi mata politik kita.

Insy Allah dalam dua-tiga tahun mendatang bisa lahir karya sastra saya yang lebih berbobot dibanding sekarang. Sekarang ini merupakan era kulminasi dari kebobrokan peradaban. Potensi kesastraan dalam diri orang-orang berbakat masih sedang “*umup*”. Diperlukan waktu untuk “matang”, kemudian mengendap dan menetes kelahirannya.

Kejadian apa saja harus diolah untuk memacu kreativitas. Gembira, ya harus kreatif; sedih, ya kreatif. Bebas, ya kreatif; kena cekal, ya kreatif. Kaya, ya kreatif; miskin, ya kreatif. Semua adalah rahmat Allah bagi saya. Tidak ada musibah, semua rezeki. Dengan syarat, kita menggali ilmu dari Allah untuk mengkhalifahinya. Maksud saya: Menggenggam tanah menjadi emas.

—Emha Ainun Nadjib

Emha di Mata Kuntowijoyo

(Jawa Pos, 10 September 1991)

Sosok Emha bukanlah sekadar seorang penyair. Emha sebagai budayawan maupun sebagai pribadi adalah cermin dari sensibilitas atau cara masyarakat merasakan sesuatu. Terutama lapisan masyarakat generasi muda saat ini. “Dalam diri Emha terwakili suatu sensibilitas pemuda. Yaitu, pemuda yang kritis, suka protes, tapi sekaligus religius,” kata budayawan Kuntowijoyo yang juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim ini.

Karya-karya sastra Emha juga menunjukkan hal itu. Di dalamnya kita dapat menemukan diri Emha sebagai seorang anak muda aktivis sosial yang sekaligus punya kecenderungan mistik. Sebuah kecenderungan yang saat itu ada pada lapisan generasi muda yang sadar. Kiprah Emha yang dia tunjukkan selama ini lebih mewakili tipologi generasi semacam itu.

Menurut Kunto, hal semacam itu tidak tecermin pada diri sastrawan generasi Taufiq Ismail. Meski kemudian Taufiq juga tumbuh menjadi seperti apa yang dicerminkan Emha, dia tidak sejak semula mempunyai kecenderungan mistik tersebut. Tantangan yang dihadapi generasi Taufiq Ismail yang berupa realitas politik, menjadikan generasi tersebut berbeda dengan generasi yang sekarang diwakili Emha ini.

Dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi generasi sekarang ini bukan lagi realitas politik, melainkan lebih berupa tantangan-tantangan yang bersifat sistemik dan kultural. Kini, mereka tidak lagi menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut pertentangan antara partai-partai politik, tetapi menghadapi persoalan seperti arus kapitalisme dan semacamnya.

“Orang Indonesia secara keseluruhan kini memang menghadapi sistem dunia yang baru. Pemuda-pemuda sekarang merasa bahwa dirinya tidak lagi menghadapi PDI, PPP, dan Golkar, tetapi menghadapi seluruh sistem dunia dan kebudayaan dunia. Mereka menghadapi eksploitasi ekonomi, dehumanisasi budaya, dan semacamnya. Nah, dalam menghadapi eksploitasi ekonomi itu, lahirlah aktivisme sosial. Sedangkan dalam menghadapi dehumanisasi budaya, muncullah sastra-sastra sufistik itu. Emha mewakili generasi ini,” jelasnya.

Tetapi untuk memahami sosok Emha secara keseluruhan, kita bisa melihat Emha sebagai pribadi maupun sebagai *public figure*. Dalam karya-karya sastranya telah tecermin pula sejumlah pikiran, persepsi, dan emosi yang tidak terwakili di tempat-tempat lain. Karya-karya sastranya tersebut merupakan ekspresi dari semua itu, yang tidak tecermin dalam ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya, maupun pada tingkah lakunya.

Yang menarik, lanjut Kunto, karya-karya sastra Emha itu dilandasi kesadaran keagamaannya. Yakni, kesadaran keagamaan yang kemudian dimunculkan untuk bereaksi terhadap dunia luar. Misalnya, bagaimana Emha dalam melihat masalah kemiskinan, keadilan, masyarakat, maupun kekuasaan. “Melalui medium puisi buah tangannya, dia merefleksikan kesadaran keagamaannya tersebut,” tambahnya.

Kecenderungan itu, menurut Kunto, akhirnya juga mewarnai tipologi sastra yang dihasilkan. Tulisan-tulisan dalam bentuk esai, tulisan-tulisan pendek, maupun tanya-jawab yang dia tulis di koran selalu mencerminkan kecenderungan itu. Dan dengan kecenderungan yang demikian pula, maka warna puisi Emha pada hakikatnya juga bersumber dari kesadaran tersebut.

Akibatnya, lanjut Kunto, warna yang sangat kental melekat pada puisi-puisi karya Emha ini hakikatnya adalah puisi-metafora. Artinya, ia berbicara dengan metafora atau perumpamaan-perumpamaan. Cara berpikir metafora inilah yang melekat pada diri Emha. Dan cara berpikir demikian adalah cara berpikir Islam yang tradisional.

Dikatakan bahwa gaya berpikir metafora ini tecermin juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dipaparkan kisah-kisah umat masa lalu, perbandingan-perbandingan antara orang yang kuat imannya dan yang tidak—yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai sarang laba-laba yang mudah rusak—dan semacamnya. Jadi, Al-Quran sendiri merupakan pegangan hidup umat Islam yang penuh dengan metafora.

Namun, sebenarnya dalam Al-Quran tidak saja mengandung metafora. Di dalamnya juga terungkap bahasa lain, yaitu bahasa ilmu atau bahasa empirik. Perintah agar manusia mau melihat bagian-bagian dari alam, merupakan salah satu contoh dari bahasa ilmu itu. “Ruparupanya Emha lebih dekat dengan bahasa metafora dalam karya-karyanya, ketimbang bahasa ilmu. Dan karena itu, dalam memahami Emha pertama-tama kita harus melihatnya sebagai penyair ketimbang ilmuwan,” tutur sejarahwan yang juga dikenal sebagai penulis novel *Khotbah di Atas Bukit* ini.

Ditambahkan bahwa kalaupun Emha membuat analisis-analisis tentang realitas kehidupan yang ada sekarang, itu pun melalui metafora-metafora. Baik itu yang tecermin dalam tulisan-tulisannya, naskah-naskah dramanya, maupun esai-esainya. “Tapi, justru inilah sebenarnya yang membuat menarik dalam diri Emha. Sebab, tulisan-tulisan yang hanya menggunakan analisis ilmiah, akan terasa kering. Berbeda dengan tulisan yang diwarnai dengan bahasa-bahasa metafora seperti yang dilakukan Emha selama ini,” jelasnya.

Lantas di mana posisi sastra-sastra Emha dalam peta perkembangan sastra Indonesia? Dalam hal ini sebenarnya bisa dilihat dengan berbagai macam cara. Bisa dilihat melalui nilai intrinsik yang terungkap dalam karya-karya tersebut. Apakah karya tersebut bersifat sufistik

atau sosial. Dalam konteks ini, Kunto melihat bahwa karya-karya sastra Emha bisa dikategorikan sebagai kedua-duanya. “Saya lebih suka menyebutnya dengan sastra profetik (*nubuwwah*),” tambah Kunto.

Kalau kita mau melihatnya dari dimensi simbol-simbol yang dikemukakan, lanjut Kunto, barangkali kita bisa mengatakan bahwa puisi-puisi Emha ini lebih dekat dengan lirik. Puisi-puisi dia tidak termasuk puisi yang sulit. Ungkapan-ungkapan perasaan dan pemikirannya disampaikan dengan bahasa lugas. Puisi-puisinya lebih mencerminkan suasana yang diolah berdasarkan subjektivisme dia. Dan ini dituturkan dengan cara yang jelas.

Ini berbeda dengan karya-karya Sutardji Calzoum Bachri. Ketika Sutardji berusaha mengungkapkan kerinduan dan kegemarannya kepada Tuhan, dia ungkapkan dengan *ngeong*-nya seekor kucing. Semacam ini sebenarnya metafora juga. Tetapi cara pengungkapannya tidak dengan cara lugas, jelas, dan mudah dipahami awam. “Pemakaian bahasa yang lugas dalam puisi-puisi Emha menjadikan ia lebih komunikatif. Kalau kita membaca puisi Emha, tidak akan banyak kesulitan,” jelas Kunto.

Dalam posisinya yang demikian, menurut Kunto, Emha memang telah memiliki tempat yang tersendiri dalam dunia sastra maupun dalam masyarakat secara umum. Cuma yang dikhawatirkan Kunto adalah, mampukah dia bertahan dalam posisi yang demikian. Begitu pula mampukah Emha menjadi cermin lapisan generasi muda yang aktivis sosial sekaligus religius dan sufistik. Dan mampukah Emha mempertahankan dirinya sebagai bagian dari sensibilitas masyarakat masa kini.

Sebab, lanjut Kunto, Emha sekarang barulah sosok manusia muda. Kecenderungan sekarang, ketika seorang sosok itu beranjak tua, dia akan menjadi akomodatif dan tidak lagi mampu menyatakan protes-protesnya. Sosok Rendra yang sempat membaca puisi bersama konglomerat dan para pejabat merupakan salah satu contohnya. “Karena itu, yang barangkali perlu disadari oleh Emha adalah bahwa perubahan

tidaklah bisa diatasi dengan sendirian. Ia memerlukan gerakan-gerakan kolektif,” tambahnya.

Kunto menambahkan, “Mungkin Emha bisa saja keluar dari ICMI dan berjuang dengan caranya sendiri. Tapi, mungkin yang perlu dijaga adalah bagaimana dia tetap menyadari perlunya membangun kesadaran kolektif yang berbentuk kesadaran politik, sosial, dan budaya. Dan hanya dengan kesadaran kolektif itu, sebuah perubahan dunia bisa berlangsung.”[]

Isi Buku

Pengantar Penerbit — 5

Anugerah Adam Malik untuk Emha — 9

Genggamlah Tanah agar Jadi Emas — 13

Emha di Mata Kuntowijoyo — 15

Surat kepada Kanjeng Nabi: Sebuah Ancangan — 27

Surat Pertama Ihwal “The Philosophy of Angop”:

Masalah-Masalah Sosial — 33

1. Sakit Jiwa Sosial — 35
2. Orang-Orang Kalah — 38
3. Untung Tuhan Tak Pernah Bingung — 41
4. Flu Nasional — 44
5. *The Hidden Generation* alias Jaka Pingit — 47
6. Anak-Anak Siapa Itu? — 50
7. Anak-Anak Ketidakpastian — 53
8. Jangan Sodorkan Ketakutan — 56
9. *Aids, No! Free Sex, Yes* — 58
10. Film X^{1000} (Pangkat Seribu) — 61
11. *The Philosophy of Angop* — 64

12. Coba Kalau Anda Berani! — 67
13. Aurat — 70
14. Dehumanisasi Wanita, Kuda Liar Industrialisme,
dan Kemunafikan Pembangunan — 74
15. Oom-Oom di Malam Tahun Baru — 80
16. Materialisasi Manusia — 83
17. Bunuh Diri sebagai Puncak Kritik Sosial — 87
18. Memungut yang Dibuang Orang — 94
19. Tentang Dosa Global — 97
20. Budaya Superfisial — 101
21. Divergensi Geniusitas — 104
22. Irigasi Kesejahteraan — 107
23. Lapisan Ozon Spiritual — 110
24. Antara Etos Kerja dan Etos Hasil — 113
25. “Demonstration Effects” — 118
26. Keadilan Nisbi — 121
27. Imunitas Kultural — 124
28. Musik Bangdut — 128
29. Pengemis dan Perampok — 130
30. Gemblak — 133
31. Pahlawan Konkret — 139
32. Jojajan ... Jojajan ... — 142
33. Jajan Itu “Pencarian” — 145
34. Desa Benyamin S — 150
35. Posisi Ekosistem Keraton Yogya — 154

Surat Kedua Ihwal “The Nation of Jathilan”:

Masalah-Masalah Seni dan Budaya — 157

1. Realitas Sejarah sebagai Aktor — 159
2. Filosofi dan Norma Budaya “Kulonuwun” — 161
3. Budaya Kota Yogya: Anak Pingit dan Anak Liar — 164
4. Nyepi, *Masterpiece* Religio-Kultural Masyarakat Bali — 170
5. Jual-Beli Suasana — 173

6. Kerja Sama *Rock-Dangdut* — 176
7. “The Nation of Jathilan” — 179
8. Teater Desa — 182
9. Teater Menggugat Pajak — 186
10. *Security Approach* terhadap Teater — 189
11. Menggempur Lalat — 192
12. Kita Ini Sama-Sama Lemah — 194
13. Humor, Antara Estetika dan Kosmetika — 198
14. Plesetan yang Diketoprakkan, Ketoprak yang Diplesetkan — 203
15. Manusia Ria Jenaka — 208
16. Rasa Bangga di “Depan” Teve — 211
17. Indonesiaku Rumahku — 214
18. Musik Mantra dan *Hizib* (1) — 217
19. Musik Mantra dan *Hizib* (2): Menyingkirkan Badai ... — 220
20. Musik Mantra dan *Hizib* (3): Kaki Kambing yang Kelima — 224
21. Musik Mantra dan *Hizib* (4): Orang Gila dan Tukang Sihir — 227
22. Musik Mantra dan *Hizib* (5): Musik Mantra atau Musik Dimantrai — 229
23. Modal-Mokal Seni Islam — 232
24. Ki Sunan dan Ki Juru — 236
25. Nyoo Lay Wa yang Malang — 239
26. Mengembalikan Manusia ke Alam, kemudian ke Tuhan — 242
27. Inisiatif-Inisiatif Kebudayaan Muslim — 248
28. Pusat Kebudayaan Muhammadiyah — 254

Surat Ketiga Ihwal Rahasia Air Mata Bang Ali:

Masalah-Masalah Politik dan Ekonomi — 259

1. Demokrasi dan “Egomania” — 261
2. Filosofi dan Empirisme 1990-1991 — 263
3. Pemilu Ban Bin Bun — 269
4. Keterbukaan di “Dunia Alkisah” — 272

5. Tingkat-Tingkat Kearifan Politik di Dalam Masyarakat Kita — 277
6. Islam, Demokrasi, dan Sektarian — 283
7. Bukan “Kartu Kuning” bagi Keterbukaan Demokrasi Kita — 287
8. ICMI, Ratu Adil, Takhayul — 293
9. Luar-Dalam, Atas-Bawah ICMI — 297
10. Makan Nasi Jangan Dihirup, Minum Kopi Jangan Dikunyah — 302
11. Asal Saya Tetap Boleh Jadi Ontoseno — 308
12. Rahasia Air Mata Bang Ali — 312
13. Habibie — 316
14. Kiai Sahal, “Ahlan Wa Sahlan” — 319
15. Melempari Bumi, Memantul ke Langit — 323
16. Gus Dur, Pelindung Minoritas — 326
17. Gus Dur “Can Do Wrong” — 329
18. Rapat Akbar dan Shalawat Badar — 333
19. Islam Pasca-NU-Muhammadiyah — 336
20. NU dan Adu Jangkrik — 339
21. Debirokratisasi Pendidikan — 342
22. Pendidikan Lokomotif — 345
23. Maniak Profesionalisme dan Teknokratisme — 348
24. Bank Samiun — 353
25. Mencegah Keresahan Sosial (Si Komo 1) — 356
26. Akhlak Lembaga Ekonomi (Si Komo 2) — 359
27. Menatar Diri Sendiri (Si Komo 3) — 362
28. Bumi Tuhan — 365
29. Boleh Merah Boleh Putih Asal Hitam — 369
30. Globalisasi dan Manusia Komprehensif — 372

**Surat Keempat Ihwal “Mengendarai” Al-Quran, Melintasi
Tujuh Langit: Masalah-Masalah Agama — 377**

1. Agama, Nasi, dan Kebodohan — 379
2. Agama dan Perubahan Sosial — 383

3. Manusia Mengisap, Tuhan Menghisab — 389
4. Besok Pagi atau Semenit Lagi: Kita Mati — 392
5. *Wadh-dhuheee* — 395
6. Binar-Binar Cahaya MTQ — 398
7. “Mengendarai” Al-Quran, Melintasi Tujuh Langit — 404
8. Manajemen Dakwah — 408
9. Audio-Visual, Sami‘ Bashir — 412
10. Dari Majelis Kebudayaan ke MTQ ke Islamic Center — 415
11. Di Mana Pusat Bumi? Di Yogya, Eh Jombang — 422
12. Alat Pendingin dan Pemanas — 425
13. Ayat yang Mengurusi Wanita — 428
14. Estetika Ramadhan — 434
15. Puasa, Arak, dan Kekuasaan — 438
16. Puasa Hayawani — 443
17. Palestina, 2010 — 446
18. Seandainya Allah pun Berlebaran — 450
19. Muatan Mudik: Kebahagiaan — 454
20. Idul Fitri dan Rentenir — 457
21. Kepompong Ramadhan dan Kupu-Kupu Idul Fitri — 461
22. Nabi Musa, Gunung Kelud, Idul Fitri, dan Dunia Baru — 465
23. Hanya yang Fitri yang Kupanggili — 472
24. Idul Fitri, “Mandi Besar” Manusia dan Kebudayaan — 476
25. Kepantasan untuk Dimaafkan — 481
26. Pertobatan dan Kemuliaan — 485
27. Antara Manusia Memiliki dan Manusia Dipinjami — 488
28. Antara Kambing dan “Kambing” — 494

Sumber Tulisan — 499

Surat kepada Kanjeng Nabi: Sebuah Ancangan

Umat Islam di muka bumi, dari abad ke abad, dari era ke era, serta dari periode ke periode kehidupannya, telah ribuan kali atau bahkan ratusan ribu kali—atau entahlah berapa persisnya—memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad Saw., yang mereka junjung tinggi dan mereka dekap intim dalam hati karena kemuliaannya.

Setiap masyarakat Muslim, setiap kelompok, serta setiap orang mengagung-agungkannya ratusan ribu kali. Muhammad tidak menjadi lapuk oleh panas hujan segala zaman. Muhammad dipelihara namanya di zaman orang bertani, serta di zaman ultramodern ketika kekuatan alat informasi dan komunikasi dijadikan “dewa”.

Muhammad tidak pernah disebut “kuno”, meski kita punya Mercedes paling mutakhir, superkomputer, serta segala jenis teknologi yang paling dibangga-banggakan. Muhammad tidak pernah dikategorikan sebagai manusia masa silam dengan muatan nilai-nilai dekaden, meski kita telah memiliki apa pun yang melambangkan pencapaian-pencapaian kontemporer.

Tak Pernah Mati

Muhammad senantiasa hadir kembali. Muhammad senantiasa lahir dan lahir kembali: memunculkan “diri”-nya dalam setiap konteks pemikiran, manifestasi peradaban dan kebudayaan, serta dalam setiap produk dan ungkapan kemajuan.

Muhammad tidak pernah mati, kecuali darah daging dan tulang belulangnyanya telah *manunggal* dengan tanah. Badan Muhammad telah ber-*tauhid* dengan hakikatnya, yakni tanah itu. Muhammad yang hidup sekarang bukan lagi jasmani itu, karena telah ditransformasikan ke dalam wujud-wujud yang lebih lembut dan hakiki.

Setiap transformasi selalu berlangsung dengan pengurangan, penambahan, perubahan, dan pergeseran. Darah daging Muhammad tidak terbawa sampai kepada kita sekarang, apalagi ke Negeri Allah yang hakiki kelak.

Muhammad yang abadi, yang mengabadi, atau yang menjadi keabadian, dan hari-hari ini melintasi kehidupan kita terbuat dari segala yang dilakukannya semasa jasmaninya hidup. Wajah Muhammad kini terdiri dari seluruh nilai perilakunya dulu. Cahaya wajah itu terbuat dari sujud-sujud sembahyangnya.

Badannya terbikin dari amal bajik selama terlibat menghancurkan kebudayaan Jahiliyah. Kaki dan tangannya dirakit dari pahala dan jasa sosial yang kelak menolongnya memperoleh tempat paling khusus di Surga *Jannatunna'im*.

Demikian juga kita kelak. Daging kita akan rapuh, kulit mengeriput, rambut memutih, dan seluruh badan kita akan musnah menjadi debu material yang hina. “Badan” dan identitas kita selanjutnya dibentuk oleh sistem *assembling* dari pilihan-pilihan kelakuan kita, dari kepribadian dan sikap sosial kita, dari barang-barang yang kita amalkan atau kita korup, dari segala sesuatu yang kita Islamkan atau kita curi.

Teologi Islam telah memandu kita bagaimana memilih *assembling* diri masa depan yang terbaik dan termulia. Filosofi Islam membimbing kita untuk merancang jenis kemakhlukan macam apa kita akan men-

jadi kelak. Dan kosmologi Islam memberi pilihan kepada kita, apakah kita akan merekayasa diri menjadi benda setingkat debu, menjadi energi yang gentayangan jadi hantu dan klenik, atau menjadi api dan kayu bakar penyiksa diri sendiri, atau *alhamdulillah* kita lulus menempuh transformasi dari materi ke energi ke cahaya.

Jika kita menjadi cahaya—karena bersih dari tindak korupsi ekonomi, penindasan politik, kecurangan sosial, penyelewengan hukum serta maksiat kebudayaan—maka *insya Allah* itulah yang bernama *tauhid*. Menyatu dengan Allah: *Allâh nûrussamâwâti walardh*.

Allah itu cahaya langit dan bumi. Bukan Allah mencahayai atau menyinari langit dan bumi. Kita bergabung menjadi *Muhammad autentik, Muhammad hakiki: Nur Muhammad*. Cahaya yang terpuji. Asal-usul inisiatif penciptaan oleh Allah.

Cahaya *cikal-bakal* yang pada abad ke-13 dimanifestasikan melalui seorang laki-laki yang progresif menentang arus, menjajakan *tauhid* di tengah-tengah berhala, yang bersedia menggenggam pedang untuk mempertahankan diri dan menegakkan nilai, dan yang bersedia tidur beralaskan daun kurma. Yang kalau kelaparan, dia merasa *pekewuh* untuk meminta sehingga mengganjal perutnya dengan batu, dan yang punya *bargaining power* untuk berkuasa, tetapi memilih hidup melarat.

Ah, Muhammad, Muhammad. Betapa kami mencintaimu. Betapa hidupmu bertaburan emas permata kemuliaan, sehingga luapan cinta kami tak bisa dibendung oleh apa pun. Dan jika seandainya cinta kami ini sungguh-sungguh, betapa tak bisa dibandingkan, karena hanya satu tingkat belaka di bawah mesranya cinta kita bersama kepada Allah.

Akan tetapi, tampaknya cinta kami tidaklah sebesar itu kepadamu. Cinta kami tidaklah seindah yang bisa kami ungkapkan dengan kata, kalimat, rebana, dan kasidah-kasidah. Dalam sehari-hari kehidupan kami, kami lebih tertarik kepada hal-hal yang lain.

Kami tentu akan datang ke acara peringatan kelahiranmu di kampung kami masing-masing, tetapi pada saat itu nanti wajah kami

tidaklah seceria seperti tatkala kami datang ke toko-toko serba-ada, ke bioskop, ke pasar malam, ke tempat-tempat rekreasi.

Kami mengirim *shalawat* kepadamu seperti yang dianjurkan oleh Allah—karena Dia sendiri beserta para malaikat-Nya juga memberikan *shalawat* kepadamu. Namun, pada umumnya itu hanya karena kami membutuhkan keselamatan diri kami sendiri.

Seperti juga kalau kami bersembahyang sujud kepada Allah, kebanyakan dari kami melakukannya karena kewajiban, tidak karena kebutuhan kerinduan, atau cinta yang meluap-luap. Kalau kami berdoa, doa kami berfokus pada kepentingan pribadi kami masing-masing.

Sesungguhnya kami belum mencapai mutu kepribadian yang mencukupi untuk disebut sebagai sahabatmu, Muhammad. Kami mencintaimu, tetapi kami belum benar-benar mengikutimu. Kami masih takut dan terus-menerus bergantung pada kekuasaan-kekuasaan kecil di sekitar kami. Kami kecut kepada atasan. Kami menunduk kepada benda-benda. Kami bersujud kepada uang, dan begitu banyak hal yang picisan.

Setiap tahun kami memperingati hari kelahiranmu. Telah beribu-ribu kali umatmu melakukan peringatan itu, dan masing-masing kami rata-rata memperingati kelahiranmu tiga puluh kali. Tetapi lihatlah: kami jalan di tempat. Tidak cukup ada peningkatan penghayatan. Tak terlihat *output* personal maupun sosial dari proses permenungan tentang kekonsistenan. Acara peningkatan Maulidmu pada kami mengalami involusi, bahkan mungkin degradasi dan distorsi.

Negarawan Agung

Zaman telah mengubah kami, kami telah mengubah zaman, tetapi kualitas percintaan kami kepadamu tidak kunjung meningkat. Kami telah lalui berbagai era, perkembangan dan kemajuan. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi kami semakin dahsyat, tetapi tak diikuti dahsyatnya perwujudan cinta kami kepadamu.

Kami semakin pandai, tetapi kami tidak semakin bersujud. Kami semakin pintar, tetapi kami tidak semakin berislam. Kami semakin maju, tetapi kami tidak semakin beriman. Kami semakin berkembang, tetapi kami tidak semakin berihsan. Sel-sel memuai. Dedaunan memuai. Pohon-pohon memuai. Namun, kesadaran kami tidak. Keinsafan kami tidak. Cinta dan internalisasi ketuhanan kami tidak.

Kami masih primitif dalam hal akhlak—substansi utama ajaranmu. Padahal, kami tak usah belajar soal akhlak, karena tidak menjadi naluri manusia; berbeda dengan saudara kami kaum Jin yang ilmu tak usah belajar, tetapi akhlak harus belajar. Akhlak kaum Jin banyak yang lebih bagus daripada kami.

Sebab kami masih bisa menjual iman dengan harga beberapa ribu rupiah. Kami bisa menggadaikan Islam seharga emblem nama dan segumpal kekuasaan. Kami bisa memperdagangkan nilai Tuhan seharga jabatan kecil yang masa berlakunya sangat sementara. Kami bisa memukul saudara kami sendiri, bisa menipu, meliciki, mencurangi, menindas, dan mengisap, hanya untuk beberapa lembar uang.

Padahal, kami mengaku sebagai pengikutnya, ya Muhammad. Padahal, engkau adalah pekerja amat keras dibanding kepemalasan kami. Padahal, engkau adalah negarawan agung dibanding ketikusan politik kami. Padahal, engkau adalah ilmuwan ulung dibanding kepandaian semu kami. Padahal, engkau adalah seniman anggun dibanding *vulgar*-nya kebudayaan kami.

Padahal, engkau adalah pendekar mumpuni dibanding kepengecutan kami. Padahal, engkau adalah *strateeg* dahsyat dibanding berulang-ulangnya keterjebakan kami oleh sistem Abu Jahal kontemporer.

Padahal, engkau adalah *mujahid* yang tak mengenal putus asa dibanding deretan kekalahan-kekalahan kami. Padahal, engkau adalah pejuang yang sedemikian gagah perkasa terhadap godaan benda emas dibanding kekaguman tolol kami terhadap hal yang sama.

Padahal, engkau adalah moralis kelas utama dibanding kemunafikan kami. Padahal, engkau adalah panglima kehidupan yang tak terban-

dingkan dibanding keprajuritan dan keserdaduan kepribadian kami. Padahal, engkau adalah pembebas kemanusiaan.

Padahal, engkau adalah pembimbing kemuliaan. Padahal, engkau adalah penyelamat nilai kemanusiaan. Padahal, engkau adalah organisator dan manajer yang penuh keunggulan dibanding ketidaktertataan keumatan kami.

Padahal, engkau adalah manusia yang sukses menjadi nabi dan nabi yang sukses menjadi manusia, di hadapan kami. Padahal, engkau adalah liberator budak-budak, sementara kami adalah budak-budak yang tak pernah merasa, menyadari, dan tak pernah mengakui, bahwa kami adalah budak-budak.

Sementara kami adalah budak-budak—dalam sangat banyak konteks—yang sesudah berbincang tentang perbudakan, segera mencari kalimat-kalimat, retorika, dan nada yang sedemikian indahnya sehingga bisa membuat kami tidak lagi menyimpulkan bahwa kami adalah budak-budak.

Di negeri kami ini, umatmu berjumlah terbanyak dari penduduknya. Di negeri ini, kami punya Muhammadiyah, punya NU, Persis, punya ulama-ulama dan MUI, ICMI, punya bank, punya HMI, PMII, IMM, Anshor, Pemuda Muhammadiyah, IPM, PII, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, kelompok-kelompok studi Islam intensif, yayasan-yayasan, mubalig-mubalig, budayawan, dan seniman, cendekiawan, dan apa saja.

Yang tak kami punya hanyalah kesediaan, keberanian, dan kerelaan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti jejakmu. []

Surat Pertama

Ihwal “The Philosophy of Angop”



Masalah-Masalah
Sosial

Sakit Jiwa Sosial

Kalau orang sakit panas, mungkin bisa dicarikan terapi dengan acuan dari Nabi Ibrahim. Kalau *stres*, berkaca pada Ayyub. Soal-soal pencernaan, *nempil* sedikit ke Muhammad. Atau, banyak komplikasi fisis yang sumbernya dari terpotongnya hubungan antara manusia modern dan manajemen cinta serta kesehatan model Isa dan Daud.

Adapun yang paling gampang, tentu saja kalau kita terkena santet atau tenung. Lebih gampang lagi, apabila seorang pasien menginsafi bahwa dia bukanlah pasien, melainkan dokter atau dukun atas dirinya sendiri.

Di dalam segala filosofi ilmu ketabiban, kesehatan, dan kesembuhan, dapat kita katakan bahwa pihak pertama adalah Allah, dan pihak kedua si penderita; sedangkan dokter, psikiater, atau Mas Dukun tak lebih dari pihak ketiga, yang tidak dimiliki oleh hampir semua orang yang pada keadaan tertentu berduyun-duyun mendaftarkan dirinya menjadi pasien yang membuat seorang pelayan disebut dokter, seorang pembantu disebut psikiater, dan seorang buruh disebut dukun.

Makhluk yang bernama kesehatan atau kesembuhan telah diklaim dan dikapling sebagai milik khusus dan hak khusus serta otoritas khusus para dokter, psikiater, dan dukun. Makhluk itu menjadi komoditi

dunia profesional, sementara masyarakat tak punya posisi lain kecuali konsumen dari komoditi itu.

Padahal, produsen utama dari kesehatan dan kesembuhan pada hakikatnya adalah orang yang sedang digauli oleh suatu penyakit itu sendiri. Adapun “Produsen Agung”-nya tentu saja Allah sang pemilik segala *‘arsy* dan *awang-uwung*.

Terus terang saja itulah yang secara rutin menjadi bahan pusingnya kepala Mas Dukun. Orang memandangnya sebagai juru penyembuh: orang berdatangan untuk *pasrah bongkokan* sambil melontarkan kalimat penyekutu Tuhan: “Saya yakin hanya Mas Dukun yang bisa menyembuhkan saya”

Gampang sekali orang menomorsatukan yang nomor dua. Gampang sekali orang menuhankan yang bukan Tuhan.

Kalau problem yang dibawa seseorang itu bersifat praktis—misalnya, penyakit fisik ala kadarnya atau santet atau semacam kesurupan—Mas Dukun bisa tanpa banyak *cingcong* menanganinya.

Tetapi, kalau yang disodorkan kepadanya adalah efek dari penyakit-penyakit sosial, disinformasi tentang pemahaman-pemahaman hidup, atau mungkin salah kuda-kuda mental, intelektual atau spiritual, maka Mas Dukun harus mereformasikan berbagai *mismanagement* tatanan nilai dalam dunia kesadaran dan kebawahsadaran orang tersebut.

Penyakit-penyakit semacam ini bukan main kompleks, luas, dan ruwetnya. Terkadang ada orang yang memang tak sanggup lagi untuk memahami apa yang ditanggungnya. Lebih-lebih lagi merumuskan keruwetan-keruwetannya. Kebiasaan yang tinggal hanyalah menatap semacam kegelapan. Dan kegelapan itu adalah dirinya sendiri: dirinya gelap, sementara *mripat* pandangannya juga buta sedemikian rupa.

Tetapi kadang kala tidak sedikit anak-anak muda mendatangi Mas Dukun untuk menyodorkan sesuatu yang sesungguhnya sama sekali bukan problem. Dia berkata tentang buntu, kosong, bingung, *depressed*, tetapi setelah digali bersama apa gerangan itu semua—ternyata bahwa faktor-faktor itu sebenarnya tidak cukup potensial untuk menin-

das mental mereka apabila saja terlatih untuk mendayagunakan akal sehat dan pengetahuan tentang pokok-pokok nilai kehidupan.

Seorang anak muda gagah ganteng, datang untuk mengungkapkan kebingungannya dan menangis, serta merasa buntu dan tak berarti—hanya karena dulu orangtuanya kaya sekarang melarat, sehingga dia tak bisa kuliah. Itu bukan problem. Itu keringkahan![]

Orang-Orang Kalah

Tak ada orang menang, melainkan hanya orang kalah yang mendatangi Mas Dukun.

Orang kalah. Orang yang dikalahkan. Oleh siapa?

Oleh orang lain. Oleh kehidupan, yang tikaman pisaunya amat menyakitkan. Oleh kekuasaan, yang datang dari luar dirinya.

Oleh bermacam-macam kekuasaan: kegagalan mencapai cita-cita, kengerian terhadap ketidakmenentuan hari depan, istri yang menyeleweng, suami yang kejam, orangtua yang memperlakukannya, raksasa bisu yang menggusur tanahnya, sistem-sistem dalam putaran sejarah yang membuatnya tidak saja gagal memperoleh kelayakan hidup, tetapi bahkan menenggelamkannya ke garis minus kehidupan.

Garis minus kehidupan itu bisa berupa kefakiran ekonomi, hilangnya pilihan-pilihan untuk melangkah, atau ketertekanan psikologis yang membuat seseorang tak lagi menggenggam dirinya sendiri dalam kekuasaannya.

Orang-orang kalah terkatung-katung—tidak saja—dalam ketiadaan harapan, tetapi bahkan dalam kepungan ancaman-ancaman.

Mas Dukun sering bertanya: Kenapa engkau lari kepadaku? Apakah engkau berpikir aku memiliki sesuatu untuk sanggup membebaskanmu dari kurungan itu?

Sebagian orang kalah menjawab: Kami tidak mencari pahlawan, Mas Dukun, melainkan sekadar haus terhadap sahabat. Kami tidak menuntut agar dipindahkan dari kekalahan ke kemenangan, tetapi setidaknya kami mempunyai sahabat di dalam kekalahan.

Mas Dukun lama-lama menjadi tahu: ada banyak “keranjang sampah” bagi “manusia sampah” yang dikalahkan—tetapi tidak cukup.

Ada ahli kejiwaan untuk yang memerlukannya. Ada kiai-kiai saleh dan bijak. Ada organisasi bantuan hukum. Tetapi, mereka sesungguhnya bukanlah pihak yang paling nomor satu mengemban kewajiban untuk menampung mereka.

Di *file* kategori mana engkau menyimpan kenyataan di mana ribuan penduduk yang beragama Islam—yang tanah *dusunn*nya dibeli secara paksa dengan harga yang tak memadai—ditolong dan ditemani tidak oleh seorang kiai atau ulama atau lembaga Islam mana pun, melainkan oleh seorang Romo? Bahkan, Romo ini pula yang mengantarkan mereka keliling mencari mubalig bagi acara keislaman mereka?

Jumlah orang-orang kalah semakin membengkak saja dari hari ke hari.

Dan jumlah itu semakin tak terkirakan lagi tatkala kita mengetahui bahwa orang-orang yang mengalahkan pun—bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan atas orang lain pun—sesungguhnya adalah juga orang-orang kalah.

Mas Dukun sering berkata kepada sahabat-sahabatnya itu: “Tuhan tidak pernah memintamu untuk menang melawan orang lain. Yang diminta oleh-Nya adalah kemenangan melawan diri sendiri.”

Mas Dukun berusaha melawan kenyataan filosofi populer yang berlaku di mana-mana.

Dunia membuka lapangan kompetisi agar seseorang mengalahkan lainnya. Dengan kata lain: agar seseorang menjadi pemenang, sementara lainnya menjadi orang kalah.

Betapa tidak membahagiakan dunia semacam itu! Betapa setiap keindahan dalam kemenangan semacam itu sesungguhnya palsu!

Kemenangan dan keindahan yang didapatkan oleh seorang kades yang berhasil tidak memperhatikan kesejahteraan penduduknya, bahkan menguras kekayaan penduduk itu untuk perutnya sendiri?

Mas Dukun berkata: “Halal untuk kalah melawan raksasa, tapi haram menyerah kepada nafsu untuk tak mempertahankan kebenaran.”[]

pustaka-indo.blogspot.com

Untung Tuhan Tak Pernah Bingung

Pembangunan senantiasa harus disertai oleh sejumlah orang yang harus “ngalah”, misalnya harus merelakan desa dan rumah mereka untuk pendirian bendungan, pabrik, *real estate*, dan sebagainya. Itu terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi hampir di setiap negara berkembang, bahkan pun dulu di Jepang.

Jumlah orang “ngalah” bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Nasib mereka juga macam-macam. Ada yang dengan sendirinya sadar harus “ngalah” demi kesejahteraan makro, namun banyak jua yang tak rela untuk “ngalah” karena yang mereka alami sebenarnya adalah eksploitasi atau pemerasan.

Kita amat sering mendengar atau melihat atau bahkan mengalami sendiri masalah seperti itu: bukan saja penduduk itu memperoleh ganti rugi yang standar harganya ditentukan secara sepihak, tapi juga masih harus menanggung ganda kerugian karena banyaknya oknum yang masih juga menyunati uang yang sudah tak memadai itu.

Acapkali pembangunan memang dibagi “rata”: ada yang dapat jatah kemenangan, lainnya dapat jatah kekalahan. Ada yang memperoleh keuntungan dan kemewahan, ada yang mengalami kebangkrutan paksa dan kesengsaraan. Para penduduk adalah rakyat biasa yang tidak punya kekuatan apa pun dibanding segala pranata dan modal

skala besar pembangunan, perusahaan asing yang raksasa, birokrasi, dan militer. Agak jarang kita mendengar berita di mana birokrasi kekuasaan dan militer meletakkan diri sebagai anak dari rakyat yang berposisi sebagai ibu, yang notabene toh menyusui mereka dengan uang pajaknya.

Akan tetapi di sebuah kota industri cukup besar di Pulau Jawa, hari-hari ini sedang berlangsung sebuah pergulatan unik antara kekuatan penduduk yang terancam penggusuran melawan intervensi resmi yang mengancam nasib dan hak asasi mereka. Para penduduk ini mengundang seorang kiai aneh yang kemudian tinggal bersama mereka dan merawat ketenangan hati dan keberanian para penduduk.

Sebaliknya pihak calon penggusur juga merekrut sekumpulan agamawan untuk melakukan “yasinan” dan model-model tarekat lainnya supaya penduduk pindah. Kedua belah pihak menggunakan Tuhan sebagai “backing” kepentingan mereka. Untung saja Tuhan tak pernah bingung.

Tak tahu bagaimana akhir drama ini nanti. Allah Mahatahu apa yang terbaik untuk dipilih, baik dalam perhitungan jangka pendek maupun jangka panjang, baik dalam perspektif duniawi ataupun ukhrawi.

Saya jadi teringat ketika nyantri di Pondok Gontor. Pak Kiai bermaksud melebarkan wilayah pembangunan pondok, sehingga dibutuhkan kerelaan banyak penduduk untuk bersedia pindah ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pengurus pesantren.

Pak Kiai menyadari persis bahwa mereka punya hak seratus persen untuk tak beranjak *senyari* pun dari tanah mereka. Dengan demikian yang Pak Kiai lakukan adalah pendekatan dengan penyadaran dan kearifan, sementara disediakan bukan saja ganti rugi, melainkan juga semacam bonus bagi pengorbanan mereka jika bersedia pindah. Tapi, toh mereka tak mau pindah. Sehingga kami ribuan santri dikerahkan tiap malam untuk berdoa dengan ucapan khusus tentang keperluan itu. Akhirnya sesudah beberapa bulan, Allah yang memberi keputusan

para penduduk itu mengemukakan kerelaan kerja samanya demi pembangunan yang berfungsi lebih luas dan berjangka jauh.[]

Flu Nasional

Sepanjang hari Kamis kemarin udara Yogya sangat *ngrekes*. Kalau angin bertiup, ia tak sekadar menyapu kulit dan membungkus tubuh, tetapi langsung juga menelusup di antara sel-sel, bahkan saya rasakan ada yang menggerombol di antara tulang dan daging. Bahkan, masya Allah(!), ada juga yang menyentuh seputar jantung hati nurani saya, sehingga seluruh sukma dan jiwa terasa *krekes-krekes*.

Tatkala Maghrib tiba, saya yakin angin itu tidak berdiri sendiri: ada faktor X yang menunggangi punggungnya atau setidaknya memengaruhi sepak terjangnya. Dengan kata lain, angin itu mengalami suatu keterpengaruhan oleh makhluk-makhluk tertentu.

Dan ketika hari makin merunduk ke keharibaan malam, saya memperoleh keyakinan bahwa angin *ngrekes* ini tidaklah hanya di Yogya, tetapi berlangsung nasional di seantero negeri.

Saya mandi, dan alangkah dinginnya! Di sana-sini terasa gatal karena kulit saya sensitif terhadap keterpengaruhan dingin. Kencing hampir lima menit sekali. Jaket tebal terasa seperti kaus biasa. Sedemikian rupa sehingga ketika tengah malam tiba, saya memperoleh kesimpulan bahwa ini bukan sekadar angin jahat, sebab apa yang saya alami sesungguhnya adalah *nervous* mental. Seluruh jiwa dan akal sehat saya *ngrekes*. Mata batin saya melihat gamblang bahwa yang

melindungi saya sebenarnya adalah atmosfer influenza nonmedis, suatu *krekes* intelektual dan politis.

Sungguh aneh. Soalnya ‘kan saya sama sekali bukan pegawai negeri, tak punya NIP, tak punya pakaian seragam, dan tidak terletak pada bagian mana pun dari hierarki birokrasi.

Lebih aneh lagi karena para tetangga yang pegawai negeri di sekitar saya malah tak tampak mengalami keterpengaruhan flu nasional. Saya yang seandainya tidur melulu di atas *pyan* rumah selama satu Pelita berturut-turut tak akan dipecat oleh siapa pun, kok malah sedemikian serius mengalami *krekes* nasional.

Akhirnya, sesudah shalat Tahajud sambil menggigil, saya wawancarai diri saya sendiri. Terutama hati nurani dan akal sehat saya. Dengan teknik interogasi tertentu, saya jajaki seberapa jauh ia mengalami keterpengaruhan atau jangan-jangan keterlibatan dalam sesuatu hal yang bertentangan dengan hakikat dan tugasnya.

Dan saya temukanlah bahwa nurani dan akal sehat itu sungguh-sungguh hampir pingsan oleh keterpengaruhan terhadap isu keterpengaruhan. Demamnya makin menjadi-jadi karena ia juga amat terpengaruh oleh “litsus” yang saya selenggarakan.

“Bos ...!” hati nurani saya berkata dengan gemetar. “Saya sangat terpengaruh oleh keterpengaruhan yang bos pengaruhi kepada potensi keterpengaruhan saya. Padahal karena keterpengaruhan itu lantas saya sedemikian terpengaruh oleh ketakutan atas keterpengaruhan. Saya akhirnya dipengaruhi secara total oleh keterpengaruhan saya bahwa lama-lama saya akan terpengaruh untuk sama sekali menjadi keterpengaruhan itu sendiri”

“Kamu ini omong apa!?” saya membentakinya.

Sementara itu, akal sehat saya mogok bicara. Membisu terhadap semua pertanyaan. Paling jauh bilang *no comment*.

“Omongan saya *mbulet*, ya Bos?” kata hati nurani saya lanjut, “Amunilah saya”

“Dengar!” bentak saya lagi. “Kamu tidak saya larang untuk terpengaruh oleh kepentingan saya. Bahkan, kamu *wajib terpengaruh* oleh

garis haluan saya. Yang terlarang adalah jangan sampai ada ucapan, pemikiran, atau sebersit gagasan pun yang mencerminkan keterpengaruhan oleh aspirasi G-30-S!”

“Wah, maaf, ya Bos ...! Itu relatif, dan kriterianya sangat tak menentu dan bisa sangat subjektif, tergantung siapa yang memegang peluit. Kalau hal itu diterapkan sungguh-sungguh di segala level dan konteks, ada berapa juta orang terjaring oleh ‘litsus’, Bos”

“Jangan *mbacot* kamu,” saya hampir memekik di telinga hati nurani saya. “Kalau sekali lagi kamu omong seenaknya, kamu akan saya pecat, kamu akan telantar seperti jutaan saudara-saudaramu!”

Pucatlah hati nurani saya.

Tetapi, mendadak terdengar suara tertawa akal sehat saya yang sejak tadi bungkam. “Tapi saya tidak dimutasi ‘kan, Bos?” ujarinya. “Soal keterpengaruhan ini ‘kan tak ada urusannya dengan akal sehat, tak ada hubungannya dengan epistemologi, makna kata, kebenaran kata, atau hakikat kata. Ini ‘kan masalah politik. Akal sehat dilarang ikut campur, sebab sudah ada aparatnya sendiri. Ya, Bos?”

“*Shut up!*” terpaksa saya bentak dia pakai bahasa Inggris. Sok intelektual dia![]

The Hidden Generation alias Jaka Pingit

Sambil mendengarkan para pendekar ilmu sosial bersidang, dalam situasi “rasa jarak” antara pergelutan butir-butir ilmu sosial dan cakrawala yang hendak disentuhnya, saya berbisik kepada Aswab Mahasin, salah seorang *pentholan* HIPHOP. “Kang, di zaman ini benar-benar akan lahir angkatan atau tidak, sih?”

“Ya!” jawab orang asli Salatiga ini spontan. Kemudian, saya terus mengejarnya, dan kami menggeluti tema itu dengan kegairahan dan gereget yang saya rasakan khusus.

Sebagian di antara obrolan bisik-bisik itu tak akan saya tuliskan di sini atau di mana pun, sebab Anda akan menertawakan saya dan tak memercayainya.

Tetapi, jelas bahwa informasi dari *kawaskitaan* ilmu-ilmu sosial baku makin banyak menemukan persentuhan-persentuhan menarik dengan hasil detektor keilmuan nonkonvensional, atau sebutlah—ilmu suprarasional.

Sejak lama orang berbicara tentang kemungkinan lahirnya Angkatan 90-an yang ‘arsy wawasan, jenis pilihan perilaku, dan pusat-pusat keprihatinannya sama sekali berbeda dengan Angkatan 66 dan Angkatan 45, tetapi pada sebagian dimensinya mirip Angkatan 28—umpama-

nya perhatian yang mendalam terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia maupun hak asasi “alam”.

Itu dalam skala “kecil”. Sementara itu akan juga mungkin muncul pergerakan yang lebih mondial di mana generasi muda akan semakin menemukan kemampuannya untuk menjadi subjek sejarah. Gejalanya masih kontroversial dan transparan. Peradaban penghubung abad ke-20 masih menyodorkan kecemasan tentang situasi “kebebalan mas-sal”, tetapi pada saat yang sama sering kali kita terkaget-kaget oleh munculnya *gereget* baru dan aneh dari sementara generasi muda.

Dalam skala “lokal”—misalnya, dalam konstelasi pelaku-pelaku keilmuan sosial yang sebagian tecermin melalui konstelasi seminar HIPIS—Anda yang “waskita” tentu menjumpai bahwa para pakar senior itu diam-diam sedang *diinjen* atawa *didingkik* oleh tidak sedikit anak-anak muda yang wawasan keilmuan sosialnya tidak—secara formal—kalah dibanding para suhunya.

“Kulturalisme” di tubuh HIPIS masih belum memungkinkan di-bukanya pintu untuk memberi kesempatan kepada anak-anak muda tampil; karena pada dasarnya “zaman” memang masih menamai mereka sebagai generasi tersembunyi: *The Hidden Generation*.

Kaum paranormal menyebut mereka *Jaka Pingit*.

Sudah sesekali nongol lintasan-lintasan dari Pendekar Siluman itu, dan oleh “dunia normal” permunculan itu sekadar dianggap barang aneh, “privilese takdir”, atau apa pun namanya. Secara main-main disebut juga koin *gendheng* dan *wali*. Menteri Sarwono menyebutnya “gejala manusia hari depan”. Letaknya masih “di luar lingkaran”, “anti-teori”, dan seterusnya. Padahal mereka itu normal, telah merupakan lingkaran yang makin membengkak dan membengkak, tidak *gendheng*. Hanya saja “tabung-tabung” acuan pengetahuan resmi sampai sejauh ini masih belum sanggup mengakomodasikan atau mengidentifikasi-kannya.

Dulu pernah saya tulis tentang “api berkobar dari kedalaman bumi”. Kemudian, orang mengembangkannya: Wisanggeni, pemuda yang

berapi, yang menyala. Gunung Kelud meletus bersamaan dengan gerhana matahari: Wisanggeni mengisyaratkan bakal kehadirannya.

Pada saat yang sama, watak generasi atau angkatan transparan itu bertipologi “air”: bedakan dengan Angkatan Malari atau Angkatan 66, juga Angkatan 45, yang berwatak “logam”, “batu”, sehingga menawarkan benturan atau anarki.

Angkatan yang akan lahir itu dilatih oleh “ilmu air”-nya Nabi Khidir yang mengejawantahkan melalui sistem-sistem. Berita-berita paranormal itu dengan gamblang Anda temukan rasionalitasnya dalam kerangka kacamata ilmu “biasa”.

Gunung Kelud meletus: kebangkitan dari Timur. Kata orang, “timur” itu *muda*. Itu berarti ganda: kebangkitan anak-anak muda. Juga kebangkitan pemahaman-pemahaman keilmuan yang “diremajakan”. Kebangkitan timur atau anak muda itu menginfrastrukturi munculnya Jaka Pingit dalam format personal. Jaka Pingit yang memiliki api, tetapi sanggup berdemokrasi dan lentur bagaikan air.

Dan pemahaman keilmuan yang diremajakan: bukanlah HIPIS sibuk mencemaskan lahirnya ilmu sosial timur, ilmu sosial pribumi, ilmu sosial domestik, ilmu sosial yang “kita”?

Asyik juga mengotak-atik “angka buntutan” zaman, ya?[]

Anak-Anak Siapa Itu?

Yogyakarta menepuk air di dulang, tepercik ke tampangnya sendiri —sebagai kota budaya dan kota cendekiawan. Bahkan, seandainya ia sekadar “kota biasa”-pun, sungguh kejadian itu telah sangat memermalukannya.

Sekelompok mahasiswa menyelenggarakan simposium ilmiah. Mendatangkan rekan-rekan se-Indonesia dan mengundang sejumlah pakar, termasuk beberapa menteri. Ketika sesudah hari kedua terdengar separuh peserta *walkout* gara-gara dua menteri hanya diwakili, di sana-sini orang bergumam—“Eh, punya keberanian juga rupanya mahasiswa sekarang. Mereka selalu menginvestasikan progresivitas dan rasa melawan”—meskipun belum jelas apakah tindakan itu terkait dengan soal militansi, terobosan kultural atau semacam bentuk ketegaran untuk bersikap demokratis dan egaliter.

Kemudian, pada hari ketiga, hadir menteri ngetop yang suka menyebut dirinya sendiri “kaya orang bego”. Cakep wajahnya dan lemah lembut perangnya, tetapi keanggunan *katuranggan* itu tidak cukup untuk membatalkan hadirnya dampratan-dampratan macam “babi-babi penguasa” atau dibacakannya sajak-sajak ekstravulgar yang sangat menampar bukan saja etika forum akademis, melainkan bahkan terasa menusuk bagi lalu lintas pergaulan budaya sehari-hari pun.

Anak-anak siapakah mereka itu? Buah getir berulat dari pohon sejarah macam apakah ia? Bagaimanakah cara yang paling adil, objektif, dan arif untuk menjelaskan kejadian itu? Bagi aktivitas dan peran ilmu-ilmu sosial, percikan air itu tak lain adalah pertanyaan kepada dirinya sendiri: kamera-kamera cap apa yang bisa diandalkan untuk memotretnya?

Kaum akademis, meskipun urusan formalnya terhadap etika dan budaya hanya sejauh mempelajarinya secara ilmiah, tentulah merasa berang—“Ada yang namanya etika komunitas akademikus: mahasiswa itu tidak melanggarnya, karena mungkin memang tidak mengetahuinya. Atau, persisnya: kurang terdidik untuk mengetahuinya.”

Para *strateeg* oposisi menggerutu—“Ini defisit nasional bagi kredibilitas peran sosial-politik mahasiswa. Peristiwa itu menimbulkan kesan bahwa para birokrat itu sedemikian arif dan para mahasiswa sedemikian kampungan.”

Para penjaga gawang demokrasi menepis: “Demokrasi tidak sama dan sebangun dengan kebebasan yang liar. Demokrasi bukan ketidaksopanan dan ketidakberadaban, meskipun bukan demokrasi yang menyediakan *filter* bagi seseorang untuk berlari-lari telanjang di jalan.”

Kaum pemerhati kejiwaan manusia dan budaya masyarakat dan negara menggeling-gelengkan kepala—“Mereka hanyalah anak-anak yang lapar eksistensi, tetapi tak memiliki artikulasi untuk mengaktualisasikan diri. Hanya itulah cara yang mereka kenal untuk setidaknya merasa bahwa diri mereka ada. Mereka dibesarkan oleh berbagai tekanan yang mengimpit dari berbagai arah. Dunia akademis yang mereka hirup semakin mendorong mereka untuk menjadi manusia fakultatif dan eksklusif. Atmosfer kekuasaan politik telah sedemikian jauh memasukkan tangan panjangnya yang membuat mereka hanya kenal mekanisme instruksional dan indoktrinatif. Sementara, metabolisme lingkungan sosial mereka secara pasti menjauhkan mereka dari naluri untuk berbudaya, dalam hubungannya dengan distorsi etika, semakin miskinnya tradisi bahasa budaya—yang harus dibeda-

kan dari bahasa ilmu dan bahasa politik, atau apalagi bahasa militer.”

Sejumlah mahasiswa generasi pendahulu meratap—“Begitu cepatnya degradasi ini terjadi di kalangan mahasiswa. Teman-teman kita ini bukan saja semakin sempit daya ungkap intelektualnya. Juga bukan saja makin tidak mengetahui apa yang disebut kemenangan dalam bermasyarakat, sehingga yang mereka andalkan hanya kepuasan-kepuasan superfisial dan temporer lewat memaki-maki. Lebih dari itu, mereka adalah anak-anak muda yang begitu terbelakang dalam soal “strategi untuk menyejarah”, dan muara dari semua olahnya itu sangat memelas: berebut foto bersama dengan Pak Menteri sambil titip salam buat Pak Harto untuk *ngenger* masa depan.”

Adapun “Pak Bego” sendiri berdesis penuh duka: “Kalau Anda berhadapan dengan menteri yang sempit, nasib Anda akan lain. Tapi, saya tetap bertahan di sini meskipun disebut ‘babi-babi penguasa’, karena sebagai masyarakat kita memang masih sedang belajar berdemokrasi. Karena itu, jangan larang saya untuk mengkritik mahasiswa. Dan saya menyampaikan kritik itu secara proporsional dan memperhatikan etika, meskipun yang saya peroleh dari Anda adalah lontaran yang tidak berkeadaban.”

Untunglah, saya tahu persis bahwa apa yang terjadi adalah “nila setitik merusak susu sebelanga”. Bahasa birokrasinya: itu ulah oknum. Artinya, itu sama sekali bukan gambaran umum dari generasi mahasiswa hari ini. Pak Rektor UGM dan Yogyakarta menanggung malu besar, tetapi beliau juga tahu persis bahwa anak-anaknya yang cerdas dan progresif itu sekadar “kecolongan”. Secara sejarah, nila setitik memang merusak susu sebelanga. Tetapi, dalam objektivitas ilmu, nila setitik adalah nila setitik, dan susu sebelanga adalah susu sebelanga.[]

Anak-Anak Ketidakpastian

Di tengah kesibukan-kesibukan *workshop* penumbuhan dan pembinaan kemampuan kreativitas seni di kalangan kaum muda Muslimin dan Muslimah yang amat menguras tenaga dan terkadang memancing rasa putus asa—karena dalam soal ini umat Islam sangat kurang memiliki infrastruktur—seorang kawan mengeluh.

“Di Jakarta sekarang ini,” katanya, “makin berkembang gerakan teologi Islam tertentu yang memfatwakan bahwa kesenian, terutama musik dan seni rupa, itu haram hukumnya.”

“Sekarang ini?” saya kaget.

“Ya!” jawab kawan kita itu.

“Di zaman modern ini?”

“Ya!”

“Di zaman sesudah lebih dua puluh tahun di negeri ini diumumkan orang secara gencar sesuatu yang menyangkut pembaruan pemikiran Islam?”

“Ya!”

“Di zaman kebangkitan Islam ini?”

“Ya!”

“Setelah hampir seabad Muhammadiyah organisasi modern itu hidup?”

“Ya!”

“Setelah Nahdlatul Ulama memelopori berbagai cara berpikir yang sedemikian maju dan terbuka?”

“Ya!”

“Pada saat Ketua NU mengecam habis sektarianisme?”

“Mungkin justru karena itu!”

Tak habis-habis saya bertanya. Tak habis-habis saya heran. Terlebih-lebih karena gerakan suprakonservatif itu justru laku keras di kalangan mahasiswa sebuah universitas sangat terkemuka, bahkan bisa disebut universitas nomor satu di Jakarta dan di Indonesia.

“Ribuan pengikutnya,” sambung kawan itu lebih lanjut.

“Ribuan pengikutnya?”

“Dan makin lama makin membengkak. Bahkan, merambah ke seantero metropolitan sebab mereka menguasai jaringan di sekolah-sekolah menengah.”

“Jadi, itu yang berlangsung di kota pelopor modernisasi? Itu yang terjadi di tengah-tengah, Eros Djarot, umpamanya, sibuk mencari anak-anak muda Islam yang berminat belajar seni ekspresi audio-visual karena bidang itu memiliki posisi strategis dalam persaingan syiar kebudayaan di mana Islam tidak bisa tidak harus terjun berperang?”

“Ya!”

“Jadi, itu yang berlangsung ketika kita semua mulai menyepakati betapa pentingnya untuk tak menyerah menjadi objek dari produk-produk seni budaya non-Islami, dan mengupayakan kemampuan untuk menjadi subjek rekayasa kebudayaan?”

“Ya!”

“Jadi, seni itu haram?”

“Ya!”

“Melukis itu haram?”

“Ya!”

“Memetik gitar itu haram?”

“Ya!”

“Meniup seruling itu haram?”

“Ya!”

“Menabuh beduk itu haram?”

“Ya!”

“Apa tidak tergantung memetik gitar untuk apa? Apa tidak tergantung meniup seruling itu membawa diri dan pendengarnya tergetar rasa keilahiannya atau tidak? Apa tidak tergantung menabuh beduk itu untuk konstruksi kultural ataukah destruksi sosial?”

“Tanyakan kepada mereka!”

“Jadi, bisa sedemikian sempitnya akal budi umat Islam menjelang abad ke-21 ini?”

“Ya!”

“Kenapa bisa terjadi?”

“Karena terlalu lama berlangsung ketidakpastian hidup, ketidakamanan ruhani, ketidakmenentuan politik dan sosial ekonomi. Anak-anak manusia merasa hilang. Mereka memerlukan pegangan kepastian. Dan karena yang dijumpainya pasti hanyalah norma-norma pada taraf itu, ya mereka memegangnya erat-erat tanpa *reserve*, tanpa akal, tanpa logika. Mereka menyangka bahwa jenis fiqih tolol macam itu adalah Tuhan”[]

Jangan Sodorkan Ketakutan

Setelah habis-habisan dihajar musim kering, penduduk salah satu desa di Pegunungan Seribu, untuk sementara boleh lega. Sebab, udara mulai basah, dan langit yang menutup cakrawala pandang mereka mulai dihiasi awan.

Tetapi di tengah pertanda alam bakal turunnya hujan, penduduk desa itu tiba-tiba merasa cemas dan takut. Pasalnya, mereka kehabisan bibit, baik bibit ketela, padi, maupun palawija lainnya.

Sebenarnya, cukup banyak penduduk desa itu yang menyimpan bibit padi. Hanya sayangnya, terdiri dari varietas lokal yang tidak direstui. Mereka merasa lebih aman bilang benih padinya habis ketimbang harus ketakutan kena teror tuduhan macam-macam.

Mereka bilang habis bibitnya, dalam rangka menyelamatkan diri dari rasa takut dituduh tidak *manut*. Soalnya, untuk musim tanam ini, jenis bibitnya sudah ditentukan, caranya membeli sudah ditentukan (bisa utang dulu melalui fasilitas kredit bank), bahkan sampai tanggal penyemaian bibit pun sudah ditentukan.

Rasa takut ternyata mirip makhluk aneh, yang suka mampir di tempat orang-orang tak berdaya. Lagi-lagi, setelah mereka patuh dengan ketentuan tadi, para penduduk desa itu memasuki situasi takut kedua. Yaitu, jangan-jangan gagal panen.

Dan itulah yang terjadi (demikian memang kisah ini memilih plot-nya sendiri). Apa yang mereka takutkan, justru benar-benar menimpa. Panen gagal, atau boleh juga disebut “belum berhasil”. Ada penduduk yang dulu ketika menanam padi jenis lokal dapat memanen hampir satu ton, sekarang satu kuintal pun tak kesampaian.

Apa boleh buat. Mereka tidak diperkenankan menyesal atau mengutuk siapa pun, kecuali nasib jelek. Mereka pun—entah benar entah tidak, tetapi yang jelas karena belenggu rasa takut—berpendapat bahwa kegagalan panen merupakan bagian dari hidup ini. Jadi, harus dijalani.

Akan tetapi malangnya, menghindari dari takut justru dihadap kembali oleh makhluk aneh yang bernama “takut” itu. Begitu panen gagal dan belum sempat membenahi jiwa yang loyo dan semangat yang *semplah*, mereka dihadapkan pada ketakutan ketiga. Mereka didatangi petugas bank yang memiliki jaringan birokrasi yang kuat sampai ke desa-desa kecil. Tentu saja jawaban mereka senada: “Kami tak panen. Jadi, belum bisa mengangsur pinjaman.”

Jika saja petugas bank yang perkasa itu tidak mau ambil peduli nasib petani yang malang tadi, bisa diduga bagaimana akibatnya. Mungkin saja sisa-sisa terakhir kekayaan mereka bakal tergadaikan. Dalam kisah ini, jangan tanyakan misalnya, apa yang akan mereka perbuat berkenaan dengan pendidikan anak-anak mereka. Itu namanya kita menyodorkan ketakutan keempat, kelima, dan seterusnya.[]

Aids, No! Free Sex, Yes

Ketika tulisan ini Anda baca, saya tidak tahu apakah situasi di Dolly—“supermarket industri daging satu ons” itu—sudah kembali normal. Maksud saya, apakah degradasi pasar sudah terlalui, para pelanggan sudah mulai memiliki keberanian untuk menghina Tuhan kembali, sehingga dengan demikian para prostitut alias pelacur atawa wanita tunasusila telah habis hari-hari cutinya.

Sebentar dulu. Apakah sebaiknya kita biasakan memakai juga istilah LTS (Lelaki Tuna Susila)? Ataukah, kita teruskan anggapan bahwa kaum lelaki yang ngetap oli (Dolly = *Dodolan barang sing digawe ngetap oli*) adalah justru manusia susila—umpamanya karena mereka datang untuk menyampaikan uang, menyalurkan rezeki bagi orang lain, sambil meningkatkan devisa negara?

AIDS makin menyebar ke pelosok-pelosok bumi. Rock Hudson, Freddy Mercury, bersama ratusan ribu manusia ambang abad ke-21, menjadi korban era awal dari “menyebarnya kuman-kuman tak teratasi di istana Fir’aun”. Dan “kamar mandi Fir’aun” itu kini telah meluber sampai ke Denpasar dan Dolly Surabaya. Kiai Yasin Hasan Abdullah dari Pasuruan membuat parodi: “Dengarkanlah Menparpostel, kita harus meng-

ucapkan *Ahlan wa sahlan* kepada Belanda yang datang membawa AIDS”

Vokalis Queen itu mengimbau sehari sebelum kematiannya: “Kini, hendaknya Anda bergabung bersama saya, bersama dokter-dokter saya, dan semua orang untuk bekerja sama berjuang melawan penyakit terkutuk itu”—didahului oleh berbagai yayasan dan gerakan-gerakan, yang antara lain dipelopori oleh Elizabeth Taylor, yang juga melakukan perjuangan yang sama. Pangsa pasar kondom melejit, anak-anak sekolah di Amerika Serikat masing-masing diberi jatah “plembungan”. Pun di Indonesia; ribuan kondom disebar khusus untuk mengantisipasi globalisasi AIDS.

Mereka mengutuk AIDS. Mereka memerangi AIDS. Tetapi tidak dan bukan prostitusi, tidak dan bukan seks bebas, tidak dan bukan sodomi, tidak dan bukan *anal sex*. Mereka mau api, tetapi menolak terbakar. Sikap budaya modern berteriak: “Silakan melacur, silakan berseks bebas, silakan bersodomi, silakan melakukan penyelewengan-penyelewengan seks dalam bentuk dan pada level apa pun—tetapi hindarkan AIDS!” Berbagai jenis kreativitas manusia supramodern yang merupakan sumber AIDS itu memiliki landasan untuk tetap diperhatikan, untuk tidak diperangi. Landasan itu bernama dan berbunyi demokrasi. Demi demokrasi, demi kebebasan individu, demi kemerdekaan yang “tidak mengerti bagaimana menemukan *cahaya*”, umat manusia boleh bunuh diri, mendadak atau perlahan-lahan.

Betapa lucunya manusia. Kita hanya mengejar yang enak, bukan yang baik. Itulah bentuk egosentrisme kemanusiaan kontemporer yang insya Allah akan menghancurkan dirinya sendiri.

Li kulli da’in dawâ’. Setiap penyakit ada obatnya. Tetapi, berapa tahun lagikah para dokter canggih di muka bumi bisa menjamin bahwa penangkal AIDS akan ditemukan?

Di puncak setiap permasalahan, di ujung setiap *chaos* dan problem—pada bidang apa pun dalam kehidupan—manusia selalu yakin

bahwa manusia akan selalu memiliki daya resistensi dan kreativitas untuk pada akhirnya menemukan jalan keluar. Marilah kita tunggu bagaimana kehebatan manusia dan kemurahan Tuhan kelak membebaskan umat manusia dari AIDS. Marilah kita tunggu betapa gagahnya Amerika menghancurkan Irak serta negara mana pun yang tidak subordinatif terhadapnya, dan kira-kira betapa gagahnya pula mereka akan menghancurkan AIDS. Marilah kita tunggu bagaimana pembangunan Indonesia mengatasi ironi AIDS, justru ketika sedang sibuk-sibuknya menjual potensi kepariwisataan apa saja dalam proyek VIY '91 untuk meningkatkan devisa negara, di samping “menyerap darah rakyat” melalui SDSB.

Marilah kita tunggu bagaimana sofistikasi ilmu dan teknologi kira-kira para Fir'aun modern melayani “subversi-subversi antisihir yang datang dari langit”-nya AIDS itu!—sebelum akhirnya Musa merintis suatu perubahan besar-besaran.

Peradaban seks bebas adalah pengkhianatan terhadap manajemen Allah atas alam. Sodomi adalah penyelewengan *maqam* dalam tradisi-tradisi yang diskenario Tuhan. Pelacuran adalah kefakiran yang akhirnya dinikmati sebagai kekufuran.

Kita semua tahu mengkhianati itu, penyelewengan dan kekufuran itu, tak hanya terjadi di bidang seks. Dan AIDS, penyakit yang sampai hari ini harus disebut tak tersembuhkan itu, hanyalah salah satu jenis di antara berjenis-jenis penyakit kemanusiaan dan sejarah yang juga “tak tersembuhkan”.

Pernahkah engkau berjumpa dengan AIDS nonbiologis? Pernahkah engkau menyaksikan AIDS pada level kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, praktik hukum—atau tidak pada bidangnya, tetapi pada struktur dan sistemnya?[]

Film X^{1000} (Pangkat Seribu)

Di Yogya pernah ada diskusi tentang musik *ndangdut*. Panitia (Teknik Geologi UGM) punya maksud besar; “mengembalikan citra *ndangdut* pada proporsi yang sebenarnya”. Yang dimaksud bukan segi musikalnya, melainkan kecenderungan budaya yang menyertai pergolakan jenis musik ramuan Timur-Barat ini. Singkat kata, goyang pinggul, goyang “barang”, erotisme, rangsang-rangsang seksual yang amat menonjol disodorkan oleh joget *ndangdut*.

Pokoknya banyak orang yang berang gara-gara budaya musik yang lama-lama bisa jadi “proyek maksiat” ini. Banyak orangtua cemas; untuk begitu-begitu tak usah ke *niteclub* atau *disco* dengan biaya mahal, tetapi cukup datang ke alun-alun waktu *ndangdut* dipertunjukkan. Apalagi pentas kasidah, Nasyida Ria misalnya, yang syairnya penuh nasihat agama, juga tak jarang pergelarangannya dipakai sebagai arena *gensot* yang memabukkan dan bisa “menumpahkan air” hidup. Alhasil, kabarnya telah terjadi proses pendangkalan kebudayaan lewat *ndangdut*. Maka, citranya mesti dikembalikan. Setidaknya demikian diskusi itu mengimbau.

Pertama-tama perlu diketahui bahwa semua orang, terutama lelaki, pasti suka melihat goyang pinggul kostum minim penyanyi yang bahe-nol. Ketua Majelis Ulama atau apa pun dia, pasti terangsang, karena

dia normal. Cuma persoalannya ada faktor-faktor lain di dalam diri manusia; umpamanya kesadaran tentang baik dan buruk, sikap terhadap hukum moral, serta mungkin gairah untuk memelihara kesehatan mental masyarakat, termasuk dirinya. Hal-hal itu yang membikin seseorang tak memilih kesenangan dengan menonton erotisme badan *semok* (seksi dan montok), tetapi berpihak pada kesadarannya yang lain. Jadi, kalau ada larangan terhadap rangsang seksual seperti itu, tak berarti tukang-larangnya itu tak suka.

Hidup memang tak hanya terdiri dari senang dan tak senang. Ketika berbagai hasil teknologi modern diaplikasi untuk memenuhi kesejahteraan yang lebih meningkat pada kehidupan manusia, maka dalam beberapa hal kita sering terjebak. Misalnya, oleh makin timbulnya ketergantungan kita atas perangkat-perangkat teknologi itu; pada gilirannya menyeret kita juga pada ketergantungan yang sama terhadap inovasi-inovasi perilaku budaya yang sifatnya fisikal-teknologis (begitu istilah menterengnya).

Katakanlah begini: bersamaan dengan usaha gigih manusia meningkatkan produk teknologi untuk memudahkan kehidupan, maka teknologi seks juga tak mau ketinggalan. Pabrik-pabrik segera bikin alat-alat persetubuhan sintetis, vagina sintetis, zakar sintetis, serta segala macam perangkat untuk itu, yang diperhitungkan sematangmatangnya semua seginya, termasuk pengaturan temperatur, kemampuan goyang, juga pilihan-pilihan warnanya.

Kalau sahabat-sahabat melancong ke kota-kota di negara-negara “maju”, maka silakan memperoleh alat itu seperti kalau hendak beli potlot atau saputangan. Silakan termangu-mangu (malu-malu seneng) menyaksikan peragaan “tombak” dan “lubang” tiruan di etalase-etallase. Itu semua sudah menjadi komoditi biasa, menjadi industri tak kecil dan terang-terangan; artinya sudah mencerminkan sikap masyarakatnya terhadap kelayakan masturbasi-kreatif atau kebutuhan terhadap “penemuan kepuasan baru” yang bisa macam-macam.

Itu soal peralatan. Akan halnya perilaku budaya seksnya, tak juga ketinggalan. Untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih prima di

dalam persetubuhan, mestilah diciptakan berbagai pola, posisi, dan cara bersanggama. Ada buku petunjuk untuk itu. Ada *textbook*-nya. Ada kepustakaan yang sifatnya industrial; film-film *blue*. Atau, biasa juga disebut *X-movie*. Mungkin Anda pernah menyaksikan, bukan? Bagaimana perempuan tak puas main di satu tempat, bagaimana perlu juga meningkatkan kreativitas dengan bermain sama babi, anjing, kuda, belut. Bagaimana dibutuhkan juga variasi panggung; di ranjang, di kursi, di atas kompor dapur, di padang, di batu-batu, di gua, dalam air, bahkan terkadang juga (maaf) di tempat ibadah.

Peningkatan kreativitas seks makin diusahakan, sehingga *X-movie* saja tak cukup. Kini ada *XX-movie*, *XXX-movie*, *XXXX-movie*, dan kalau kelak kita sudah mampu main seks melawan batang pohon, lubang tikus, *gendruwo*, atau kalau sudah benar-benar spektakuler-fantastis-magis-absurd dan *unspeakable*, maka akan jadilah “X pangkat seribu *movie*”.

Pada saat kita akan sudah sempurna menjadi binatang.

Namun, itu tak terjadi di Indonesia. Tujuan negara kita jelas; menciptakan manusia seutuhnya. Sebagai masyarakat, kita tahu bagaimana agar tak terseret pelahan-lahan dan tak terasa menuju proses pembinatangan. Kita mengerti, seks umpamanya, kebahagiaannya tidak terletak pada perkembangan pola-pola fisiknya, tetapi pada kekusutan dan rahasia ruhnya.

Kecuali, kalau pada pemegang kendali politik kebudayaan kita sekadar orang-orang yang cuma butuh komisi dan negosiasi industri dengan modal besar, atau orang-orang yang tak cukup mengerti keputusan-keputusan apa yang menguntungkan atau merugikan moral budaya masyarakat. Atau, orang-orang yang merasa berfungsi hanya selama 5-10 tahun, dan tak ingat bahwa hari depan sejarah yang jauh amat ditentukan oleh hari ini.[]

The Philosophy of Angop

Menurut beberapa teman, *angop* atau menguap, ialah kegiatan menyerap oksigen. Saya tak bisa menerangkannya. Tetapi pada kondisi biologis tertentu, sesudah kerja keras dalam jangka waktu tertentu—misalnya—manusia selalu memerlukan penyeimbangan kembali kesehatan fisiknya. Kegiatan hidup sesungguhnya adalah mengakumulasikan sejumlah “kelelahan” yang menindih. Makin letih, makin perlu *angop*. Itu pun tak bisa terlalu lama, sebab sesudah sekian kali *angop*, akhirnya kita harus “kalah” dan berangkat “mati sebentar”.

Tampaknya itu tradisi alam: pagi berangkat ke siang, siang menuju sore, sore digantikan malam, dan malam menemui pagi. Ketukan iramanya boleh berbeda, tetapi hakikat pergantian “kreasi-rekreasi” itu harus terjadi.

Oleh karena itu, masyarakat, mengalirnya sejarah, senantiasa juga membutuhkan *angop-angop*. Agar kesehatan kehidupan tetap terpelihara: kesehatan dalam arti proses dari “tahap adanya sakit” menuju “tahap menjadi sehat”. Proses dari tidur ke jaga, dari mati ke hidup kembali, dan seterusnya.

Saya teringat di suatu forum, para pakar yang mempersoalkan mengapa dewasa ini kultur seks meningkat sedemikian rupa. Mengapa pasaran pornografi menjarah makin banyak media massa komunikasi

cetak maupun audiovisual. Mengapa semakin banyak wilayah kebudayaan masyarakat yang dijarah oleh gejala, perilaku, dan orientasi yang bermuara di “ideologi” seks.

Tatkala sebuah masyarakat makin menurun kesanggupannya untuk menjawab problem-problemnya, tatkala persoalan-persoalan politik, ekonomi, hukum, serta yang lebih kompleks dan menyeluruh dari itu memberikan tekanan-tekanan pada kehidupan masyarakat tanpa bisa dielakkan—maka senantiasa ada tiga “makhluk” yang terlahir dari situasi itu.

Pertama, antisipasi kemanusiaan pada tingkat paling lemah, verbal, dan picisan. Yakni, membengkaknya kebudayaan seks, kebudayaan klenik, serta budaya irasionalitas lain, umpamanya judi (SDSB dan lain-lain).

Kedua, permunculan secara agak “terasing” gejala spiritualisasi segmen tertentu dari kehidupan masyarakat. Misalnya, meningkatnya kegiatan keagamaan, mistik, atau bentuk-bentuk religiositas lainnya.

Ketiga, moderasi antara keduanya, racikan antara pelarian-pelarian dangkal dan kerinduan spiritual yang murni.

Ketiga gejala itu biasanya muncul bersamaan, serta bisa terjadi sekaligus pada satu subjek yang sama—baik subjek personal maupun sosial. Jadinya tampak rancu, *splits*, atau mendua. Kalau orang merasa terlalu banyak korupsi, dia bisa *angop* dengan cara naik haji atau mensponsori pengajian. Demikian juga dalam skala kemasyarakatan: kita tak bisa mengelakkan—misalnya—wisata seks, dan untuk itu kita *angop* memimpikan wisata spiritual.

Dengan kata lain, meningkatnya budaya seks, budaya spiritual, serta moderasi antara keduanya—menunjukkan berlangsungnya suatu tekanan. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, tekanan itu lebih verbal dan tampak pada mekanisme sosial. Untuk negara-negara maju, tekanan itu biasanya datang dari “dalam”, tekanan yang berlangsung intrinsik; umpamanya kegagalan kemanusiaan itu sendiri, yang tecermin dari *muspra*-nya berbagai hasil pembangunan.

Ketika saya menulis ini semalam, Radio Geronimo sedang menunggu dan “menodong” saya untuk geguyon dan nyanyi dalam acara *Kedai 24* mereka, di mana tokoh seperti Sri Sultan, Pak Kusnadi mantan Rektor UGM, dan lain-lain pernah memperoleh todongan yang sama.

Tampaknya acara *Kedai 24* ini tergolong “makhluk jenis ketiga” yang saya sebut di atas: pemuda-pemuda kreatif Geronimo ini mencoba memodifikasi suatu metode *angop* yang tidak terjerumus ke budaya dangkal-seks-judi-klenik, meskipun juga tidak atau belum diorientasikan ke pencarian spiritual yang lebih mendalam.

Sebegini banyak soal hidup yang menggelisahkan dan memerlukan jawaban serta jalan keluar. Ketika kita letih dalam “festival ketidak-sanggupan” menjawabnya, kita memerlukan sedikit *angop*, bikin ventilasi, jendela untuk kesumpekan jiwa kita.[]

Coba Kalau Anda Berani!

Sangat mengagumkan bagi saya takaran daya juang generasi muda wanita mutakhir dewasa ini, setidaknya sebagian dari mereka. Mengagumkan. Menakjubkan. Sebab daya juang yang saya maksudkan itu dimuati oleh tingkat pengorbanan yang tak main-main.

Ketika seorang sutradara film mengumumkan bahwa dia membutuhkan pemeran wanita remaja pendatang baru—sebab dia tak bersedia bikin film sekadar dengan mengandalkan “bintang top”—maka bertaburanlah lamaran seperti bintang-bintang dan perplanetan menaburi langit. Ratusan jumlahnya, bukan sekadar puluhan. Itu baru untuk satu pengumuman lowongan. Padahal, dunia film senantiasa terbuka untuk itu dan ada banyak sutradara yang siap menampung.

Ada yang pakai strategi seperti ketika Marlon Brando datang melamar jadi Don Corleon untuk film *The Godfather*. Si aktor pembela kaum Indian itu datang ke studio film sudah dengan kostum Don Corleon lengkap dengan seluruh penampilan aktingnya serta spesifikasi vokal yang dia pilih. Maka, dia langsung diterima—sebab ide dan kreativitas yang tecermin melampaui imaji sang sutradara itu sendiri.

Cewek-cewek generasi muda Pancasila itu pun datang ke studio film dengan kostum yang menantang setengah, dua per tiga, atau

setidaknya seperempat telanjang. Plus cara berlungkok, cara memandang serta cara menggerakkan bibir dan lidah dalam berbicara. Sedemikian rupa keberanian dan pengorbanan mereka sehingga saya gatal untuk memberi label bahwa mereka inilah salah satu contoh *Generasi Tinggal Landas*. Yaitu, suatu generasi yang berani meninggalkan landasan nilai-nilai kehidupannya.

Yang banyak di antara mereka sekadar kirim surat lamaran, dilampiri foto-foto diri yang 90% merangsang, dalam pose-pose yang *ke-mempit*. Ketakjuban saya kian menjadi-jadi karena banyak di antara mereka adalah siswi-siswi SMA atau SMP. Dan lagi di mana dia berfoto begitu dan siapa gerakan yang membidikkan kamera

Terjadi suatu regenerasi yang efektif. Suatu proses penggantian tongkat estafet yang penuh dinamika. Mereka tentu mengikuti jejak kepemimpinan kakak generasinya, misalnya para bintang film atau musik setengah pop yang suka datang ke kantor sebuah majalah, menawarkan diri untuk diwawancarai, dibawa masuk studio untuk cepat atau pelan-pelan mencopoti lembar demi lembar pakaiannya hingga bisa telanjang sama sekali. Tentu saja yang dinikmati pembaca lewat majalah hanya sekitar 30 persen dari realitas di studio—tapi dokumentasi di album *top secret* sungguh-sungguh menggambarkan betapa cewek-cewek muda modern itu memiliki semangat kemajuan yang besar.

Mereka tergolong “wanita karier”, yang tarif *bargaining power*-nya sangat tinggi, daya determinasi dan penetrasi lapangannya mengagumkan. Mungkin *textbook* mereka antara lain adalah tayangan album *Rich and Famous* di RCTI.

Kalau yang menghadapi *glasnost* cewek-cewek modern itu tingkat mentalitasnya setaraf saya atau Anda, mungkin bursa saham kita kacau konstelasinya. Itulah sebabnya sutradara yang saya kisahkan ini tiap saat sibuk membantingi kartu-kartu *iman*. Juga tukang-tukang foto di studio majalah itu mengeluh pada saya: “Wah, Mas, banyak dosa saya! Kalau shalat malam saya sering menangis”

Banyak orang berani jadi presiden, menteri, gali, atau petinju. Tetapi, keberanian membuka pakaian dan tampil di pentas komunikasi *modern body exhibition*, hanya dimiliki oleh *young women generation* itu. Coba kalau Anda berani, buktikan di hadapan saya!

Dan hitunglah pengorbanan pribadi mereka di hadapan orangtua, masyarakat, Tuhan, dirinya sendiri[]

Aurat

Tak banyak hal yang lebih menyejukkan hati dibanding—misalnya—beristrikan seorang wanita berjilbab. Ada beberapa unsur pokok dari “kekisruhan psikologis kaum lelaki” yang rasanya bisa diamankan oleh sepotong kain yang menelungkupi kepala wanita. Pada zaman setengah modern, keabsahan untuk liberal biasanya dipersembahkan hanya bagi ego lelaki; sementara di “kampung” sosialitas lelaki biasanya malah superkonservatif. Lelaki merasa sedemikian ngeri untuk tak disetiai, justru karena dia menikmati peluang yang sedemikian luasnya dalam sistem budaya untuk tidak setia.

Urutan syarat istri ideal mungkin adalah berpendidikan, rasional, mandiri, cukup cerdas, berkepribadian, setia, dan cantik. Tetapi yang terakhir itu ditaruh di urutan pertama, demikian seterusnya. Adapun soal berpendidikan atau tidak, oleh tipe lelaki tertentu, boleh ditaruh di urutan terakhir: sebab baginya wanita sebaiknya disimpan, di-imbu, diperam sebagaimana mangga dalam gentong. Maka, wanita cantik berjilbab itu ibarat susu indah bergizi. Kalau berjilbab saja tanpa cantik, nanti ada kawan usil bilang, “itu orang merusak jilbab sebelanga”. Kecuali, jika kita adalah seorang ideolog yang progresif-revolusioner, yang melihat jilbab sebagai ornamen revivalisme Islam, di sisi jilbab-

jilbab lain yang berupa iman agama, pilihan ilmu sosial, kerangka ideologi, atau militansi politik.

Akan tetapi, tema kita ini bukan bagaimana lelaki memilih istri ideal, melainkan upaya mencari arti dan letak “lelaki” dan “wanita” dalam titik tolak setiap rekayasa kebudayaan. Ruh itu netral, tak lelaki tak wanita. Ruh punya sub-subdimensi, sebagiannya mengartikulasi sebagai “gundukan wanita”, sebagian lain sebagai “tonjolan lelaki”. Mereka itu manifestasi, tetapi sumber manifestasi itu sendiri “satu dan sama”.

Maka, setiap pertarungan antara wanita dan lelaki—di rumah tangga, di sistem sosial, di manajemen perusahaan, di bumi, dan di surga—adalah suatu pertarungan untuk menjadi satu kembali. Kalau wanita menyublimasi diri ke sumber, maka dia temukan dirinya sebagai “juga lelaki”, atau suatu keutuhan yang tak lagi wanita atau lelaki. Juga bagi lelaki. Kejantanan, umpamanya, memang diwakili oleh “manifestasi” lelaki, tetapi tak bisa disebut harkat lelaki, seperti juga kebetinaan bukanlah harkat wanita. Pun keberanian dan kepengecutan, kemanjaan dan keperkasaan, sesumbar dan tangis, tak bisa dimonopoli oleh salah satu darinya.

Jadinya, kalau emansipasi lelaki atau emansipasi wanita mengacu hanya pada bentukan “lelaki” dan “wanita”, maka itu bernama primordialisme. Rujukan universallah yang memungkinkan perjuangan itu tak terjebak oleh emosi pergulatan semu, oleh primordialisme-lelaki, dan primordialisme-wanita. Wanita bukan “sepenuhnya wanita” dan mereka bukan dua gumpal stereotip yang berlawanan. Wanita bisa—dalam fungsi sosial—merupakan “lelaki” yang jantan perkasa, lelaki merupakan ibu anggun lembut pengayom. Atau, wanita bisa berupa jagoan atau gacoan yang garang, dan lelaki berupa babon pemalas dan kolokan.

Karena lelaki-wanita itu satu ruh, tetapi beda manifestasi, maka sepak terjang mereka dilandaskan pada satu ruh, tetapi dikelola menurut perbedaan manifestasi. Kalau proporsi ini “dilanggar”, wanita mengucapkan kejantananannya dengan binaraga dan lelaki melampias-

kan kelembutannya dengan artikulasi banci. Dengan memakai tanda budaya lelaki, wanita merasa sedang beremansipasi. Dengan memakai hiasan wanita, lelaki merasa merebut perlambang yang semula dimonopoli wanita. Kalau buruh wanita dipekerjakan sampai larut malam, maka hal seperti itu disebut eksploitasi, sementara kalau jam kerjanya lebih sedikit dari lelaki disebut diskriminasi.

Dalam mis-manajemen begituan, letak jilbab menjadi kurang begitu jelas. Jilbab sering diklaim sebagai contoh betapa lelaki Islam merendahkan seorang wanita. Sementara sebagian pemakai jilbab menyatakan jilbab adalah cara wanita melindungi harkatnya dari otoritas kultural kaum lelaki. Dengan memakai jilbab, Hajjah Vonny merasa bisa ambil jarak budaya dan politis dari kekuasaan pria. Dia melindungi ke-“wanitaan”-nya; sebuah “nasionalisme oposan wanita” di hadapan “rezim lelaki”.

Di banyak tempat, penari-penari menghentikan keseniannya sejak pakai jilbab. “Kenapa tak bikin tari jilbab?” “O, tidak. Wanita itu aurat. Kami menolak *show* di hadapan lelaki.” *What do you mean by show. Sweet heart?* Tampil di panggung seni? Berdiri di depan papan tulis ruang kuliah? Jalan-jalan di depan Asrama Cowok? Kapan saja engkau tampil di depan lelaki, maka itu selalu adalah pertunjukan bagi setiap hidung belang atau jerawatan. Jadi, simpanlah dirimu di gudang atau atap rumah.

Dengan yang dia sangka konsep aurat, dia mengukuhkan primordialisme kewanitaannya. Dia seolah meneguhkan diri sebagai tubuh dan keindahan yang wajib dia lindungi. Padahal, kalau kewanitaan adalah itu, biar disembunyikan di balik kain lapis sepuluh dan di penjara di tembok kimiawi Roma, lelaki tetap bisa memfantasikannya. “Kalau *gua* fantasi *elu*, mau lari ke mana!”

Kalau itu eksistensi wanita, percayalah apa yang di balik kerudung dan jilbab jauh lebih indah—bagi “*rontgen* lelaki”—dibanding gambar polos Bo Derek.

Jadi, mari bicara sederhana tentang memperkaya dimensi pergaulan antara wanita dan lelaki. Kalau Dono ngobrol sama Dini, maka

yang dihadapinya dia tidak hanya Dini sebagai wanita, tetapi juga Dini sebagai sebuah pribadi, sebagai—mungkin—pemikir, sebagai penghobi rujak cingur dan Gombloh, sebagai pengagum Asmuni, atau berpuluh sebagai lainnya, yang semua itu tak seksis, tak berkonteks wanita atau lelaki.

Namun, umumnya lelaki memang bangsat. Tradisi dan naluri budayanya terampil sekali untuk cepat-cepat melihat wanita sebagai terutama faktor seksual. Gerakan Emansipasi Wanita jadi tersipu-sipu dan serbasalah. Padahal, kemanusiaan begitu luas.[]

Dehumanisasi Wanita, Kuda Liar Industrialisme, dan Kemunafikan Pembangunan

Sesungguhnya yang lebih kita butuhkan bukanlah diskusi untuk merumuskan mengapa sedemikian jauh kaum wanita dieksploitasi (dan mengeksploitasi) kewanitaannya serta direduksi (dan mereduksi) hakikat kemakhlukannya oleh dinamika “industrialisme”.

Kita telah memiliki terlalu banyak pakar untuk dengan mudah mengungkapkannya. Atau, bahkan barangkali kita tidak terlalu perlu ahli-ahli untuk mengungkapkannya sebab hal semacam itu cukup gamblang dipersepsi hanya dengan naluri dan *common sense* setiap orang.

Yang jauh lebih urgen didiskusikan adalah mengapa pada makin banyak lapisan masyarakat kita tidak terdapat kesadaran, tekad, dan kesungguhan untuk menanggulangnya. Mengapa kebudayaan dan manusia kita tenang-tenang saja membiarkan—bahkan memacu proses bunuh diri kemanusiaan (yang perlahan-lahan dan memang “enak”) ini.

Mungkin ini pertanyaan pragmatis. Tetapi mungkin juga menyangkut problem paling mendalam dan mendasar dari realitas kemanusiaan, filosofi, moralitas, religi, juga manajemen sistem-sistem pengatur dinamika peradaban sebuah masyarakat.

Target kegelisahan kita hari ini mestinya tidak pada “kenapa hal itu terjadi”, tetapi pada “ada tidaknya kesediaan untuk mengatasi”. Titik berat kecemasan kultural kita hari ini tidak pada bagaimana menghimpun informasi, pengetahuan, ilmu, dan analisis terhadap realitas tersebut, tetapi pada pertanyaan kenapa ada semacam “kematian” dalam kesadaran pikiran dan hati nurani masyarakat kita untuk tidak cukup serius “tergetar” oleh malapetaka peradaban ini. Mengapa kegelisahan tentang masalah ini berlangsung lokal belaka, baik secara sosiologis maupun psikologis.

Namun, baiklah. Saya mencoba memasukinya melalui tiga pintu: dehumanisasi wanita, “kuda liar” industrialisme, serta kemunafikan pembangunan.

Saya tidak tahu bagaimana sebutan-sebutan ilmiah akademisnya. Sebut saja dua kemungkinan: manusia dengan *gerak pasang*, serta manusia dengan *gerak surut*. Atau, manusia dengan *dinamika plus* serta manusia dengan *dinamika minus*.

Yang kedua dulu—“surut” atau “minus”—ialah suatu posisi di mana manusia menyurutkan, mengurangi, atau melokalisasi dirinya dari keutuhannya sebagai manusia menjadi atau menuju “lingkar primordialitas” tertentu, baik karena fungsi, profesi, ras, atau *gender*.

Manusia menjadi “belum tentu” manusia karena dia adalah pria, wanita, anak Bugis, insinyur, birokrat, santri, atau maling. Mereka tidak bisa mengelakkan, atau justru membutuhkan primordialitas ini karena sosialitas manusia memerlukan tatanan, aturan nilai, pembagian kerja, serta identifikasi lokal lainnya masing-masing.

Akan tetapi, dinamika minus atau gerak surut ini justru merupakan cara dan saluran untuk mengolah kemungkinan yang pertama: yakni gerak pasang atau dinamika plus.

Hakikat kewanitaan seorang manusia bisa merupakan sumber bagi peningkatan derajat kemanusiaannya, umpamanya melalui bakat kearifan dan kelembutan yang melebihi pria. Dengan menyadari kebugis-

an atau kejawaannya, seorang manusia bisa justru menemukan jalan untuk mempertinggi kualitas kemanusiaannya. Serta dengan menjadi seorang insinyur, seniman, atau santri, juga dengan kedudukan sebagai birokrat, pemimpin, menteri, atau lurah, bisa justru terbuka peluang bagi manusia pelakunya untuk memperjuangkan nilai plus bagi derajat kemanusiaannya.

Oleh karena itu, meskipun menjadi wanita, menjadi penyair, pastor, pedagang kamper, atau tukang cukur, merupakan gerak penyempitan kemanusiaan—belum tentu merupakan proses dehumanisasi.

Itulah bedanya dengan apabila kita berbicara tentang betapa wanita harus (diharuskan, mengharuskan diri, diseret, menyeret diri) menjadi seorang penari *striptease*, penyanyi dangdut yang sengaja menyodorkan betis dan pahanya untuk diusap ramai-ramai oleh penonton, atau segala macam profesi wanita lainnya yang “ideologi bisnis”-nya memang adalah memancing sensualitas dan seksualitas.

Karena dimensi kewanitaan yang disosialisasikan terbatas hanya pada kedangkalan kebinatangan, maka posisi “surut” atau “minus”-nya sebagai wanita membuat kemanusiaannya terkikis. Dalam bahasa kesenian, dia kehilangan misteri sehingga rendah mutunya. Dalam bahasa agama, robek penutup auratnya, atau nilai rahasia keagungan ilahiahnya, sehingga kemakhlukannya sebagai manusia merosot ke tingkat batu bata. Dan efek sosial budayanya adalah menyempitnya cakrawala keindahan pergaulan, menurunnya moralitas lingkungan, serta kacaunya hakikat dan struktur nilai kemanusiaannya itu sendiri.

Sangat ironis bahwa justru di tengah peradaban ilmu yang telah sedemikian tinggi dan luas, serta di tengah kecanggihan teknologi untuk menciptakan sangat banyak kemudahan bagi upaya penyejahteraan manusia—justru dalam modus-modus budaya hiburan modern, kaum wanita justru dipandang dan diperlakukan tidak hanya *tidak sebagai manusia*, bahkan juga *tidak sebagai wanita*, melainkan sebagai segumpal benda lunak yang begitu murah harganya.

Saya tidak menyebut “industrialisasi”, melainkan “industrialisme”, karena mekanisme industri beserta seluruh kontribusi, pengaruh dan arah rekayasanya terhadap nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat manusia telah menjadi substansi kebudayaan dan peradaban yang sedang berlangsung. Tidak saya katakan bahwa kita telah menjadi “manusia industrial”, tetapi jelas kita adalah masyarakat konsumen yang wajah kita dilukisi sedemikian rupa oleh hasil-hasil industri.

Juga saya menyebutnya “kuda liar”, karena proses industrialisasi dan realitas industrialisme dalam masyarakat kita berlangsung hampir sama sekali tanpa kendali dari dimensi-dimensi lain yang tersedia dalam perspektif kemanusiaan kita. Bahkan, tidak sekadar tanpa kendali: terbukti kita tidak pernah cukup sungguh-sungguh mendayagunakan dimensi-dimensi nilai lain untuk mengantisipasi gejala-gejala industrialisme.

Kita punya kecenderungan mental untuk tak bersedia menjadi medan perang antara—umpamanya—materialisme dan spiritualisme, agama dan takhayul, konsumtivisme dan kewajiban kebutuhan, hedonisme dan konsep puasa, atau antara eksplorasi dan eksploitasi seks yang pada akhirnya *disoriented* dengan batas sehat kesejahteraan dan keindahan seks.

Yang kita lakukan adalah mendamaikan mereka. Kita menyangka bahwa terus-menerus kita akan bisa tenang-tenang saja melakukan dua pekerjaan yang akan membunuh salah satunya. Di satu pihak kita omong besar tentang pembangunan manusia seutuhnya atau mengembangkan nilai moralitas dan agama, di lain pihak kita mendirikan *niteclub*, pentas aurat, serta segala macam modus untuk memanjakan keliaran seksual kita.

Dengan demikian, saya telah mulai berbicara pula tentang kemunafikan pembangunan. Kemunafikan yang saya maksudkan bukan hanya

kemunafikan manusia-manusianya, melainkan juga kemunafikan ideologi dan sistem-sistemnya.

Kitalah yang mencanangkan pembangunan manusia seutuhnya dan kita pulalah pakar dan pendekar pemecah-mecah hakikat kemanusiaan. Kitalah yang dengan seribu buku merumuskan dan merekomendasikan rumusan-rumusan paling indah tentang budi pekerti, moralitas dan keindahan makhluk Tuhan, kemudian kita pulalah yang menyusun proposal proyek, SK, DIP, juklak-juknis perusakan manusia, penjerumusan generasi muda ke dalam jurang neraka dunia.

Pertanyaan amat besar bagi umat manusia abad ini ialah seberapa jauh mereka sanggup mempertanyakan kembali hubungan antara nilai-nilai ilmu dengan agama dan realitas sosial, serta dengan dirinya sendiri.

Mengapa meningkatnya ilmu, pengetahuan, metodologi, wawasan, tidak identik dengan meningkatnya kualitas kejiwaan manusia?

Mengapa meluasnya arena pendidikan beserta makin mencanggihnya kurikulum dan sistem sosialisasinya tidak paralel dengan matangnya kepribadian, dewasanya mentalitas dan moralitas, serta dengan komitmen manusia itu sendiri terhadap kesejahteraan dan keselamatan yang sejati?

Mengapa membengkaknya jumlah sarjana, merambahnya jumlah informasi ilmu serta segala inovasi dan invensi ilmiah, tidak otomatis berarti menjadi sempurna pula pengetahuan dan keinsafan manusia terhadap pengetahuan diri sendiri, *sangkan paran* dan cakrawala kebahagiaan hidup yang sesungguhnya?

Mengapa makin mendalamnya pemahaman nilai-nilai agama serta meluasnya gairah ketuhanan tidak indikatif terhadap terkontrolnya sistem-sistem manajemen hidup—personal maupun institusional—dari kecenderungan menelurkan modus-modus dehumanisasi? Bukankah agama adalah sumber yang paling memiliki kesanggupan untuk menjelaskan humanisme, bahkan ke cakrawala yang lebih luas dan langit yang lebih tinggi?

Mengapa kesepakatan nasional tentang Demokrasi Pancasila, tentang manusia Indonesia seutuhnya, tentang jargon kultural edukatif, serta segala macam yang tiap saat bisa kita dengarkan di radio dan televisi serta media massa cetak, ditandai justru oleh represi kekuasaan, memfungsikan ekonomi, sekularisasi perilaku masyarakat, pendirian *niteclub*, penerbitan tabloid buka aurat, bursa keperawanan, dan sebagainya?

Gampang kita menjawabnya: Itu soal kemunafikan. Tetapi, bagaimanakah caranya mengejar jejak kaki kemunafikan? Di fakultas mana kemunafikan menarik untuk menjadi subjek penelitian? Pada disiplin ilmu apa tersedia metodologi untuk menelitinya? Di dalam ideologi pendidikan formal sebelah mana terdapat komitmen terhadap selamatnya kehidupan dari rongrongan kemunafikan?

Di sebelah mana dari lingkungan hidup kita terdapat tanah tandus bagi kemunafikan? Diri kita sendiri ini, birokrasi kenegaraan kita ini, tata nilai pergaulan sosial kita ini, bahkan halaman, beranda, dan kedalaman rumah-rumah ibadah kita ini, adalah justru tanah yang cukup subur bagi kemunafikan.[]

Oom-Oom di Malam Tahun Baru

Seperti juga bagi Anda, Tahun Baru dan Hari Raya atau hari-hari penting lainnya selalu merupakan momentum spesial bagi saya, melebihi hari ulang tahun saya sendiri.

Kalau Idul Fitri menjelang, kalau keriuhan pergantian tahun mulai membayang, mulailah saya masuk ke bilik persembunyian. Bengong sendirian, *kethap-kethip* memandangi atap. Kalau saya seorang resi, saya akan bilang bahwa saya sedang bersemadi. Kalau saya kiai, saya katakan saya berzikir. Tetapi karena saya hanya saya, maka ya hanya *kethap-kethip* itu.

Pada hari Idul Fitri, jarang warung buka. Pada pergantian tahun, warung-warung cepat habis dan restoran-restoran membuka acara khusus. Maka, saya siapkan saja makanan dan minuman tertentu di kulkas. Tetapi berhubung kulkasnya tidak ada, maka ya saya tidak menyimpan makanan apa-apa.

Namun, tahun baru 1992 ini lain dari yang lain. Saya tak bisa sembunyi karena rombongan tamu demi tamu mengalir *menarapidanai* saya, meskipun itu semua mengisyrakatkan rezeki besar yang akan menyongsong saya. Rezeki dari timur dan barat, sebab rombongan tamu saya itu berasal dari Madura, Surabaya, Jombang, Sepanjang, dan Jakarta.

Pada jam-jam menjelang tengah malam pergantian tahun, tinggalah si Jakarta dengan jeep Katana-nya. Program saya untuk *kethap-kethip* gagal karena beliau mengajak saya keluar.

“Ke mana?” tanya saya.

“Nostalgia dan masokhisme,” jawabnya. Dia dulu memang lama di Yogya, menjadi salah seorang “Menteri Malioboro” yang dipresideni oleh penyair Umbu Landu Paranggi di tahun ’70-an.

“Ingin saya membelah keramaian Malioboro atau alun-alun atau mana saja yang dulu menyakiti hati saya,” dia meneruskan. “Pacar saya direbut cowok lain yang punya motor, sehingga saya selalu marah, cemburu, dan sakit hati setiap melihat cowok-cowok berboncengan di Malioboro!”

Dia kemudian memaki-maki wanita. Makiannya klasik: bahwa cewek itu *mata-bensinan*. Di tahun ’70-an kalau yang menggodanya lelaki jalan kaki, wanita mencibir. Kalau yang *suit-suit* pakai motor, wajah wanita mengekspresikan mimik yang menanti dan meminta. Tetapi di era ’90-an kalau digoda lelaki bermotor, wanita sudah mulai mencibir. Kalau yang berbunyi adalah klakson mobil, gadis-gadis langsung sopan dan menjadi Siti Nurbaya kontemporer yang justru mendambakan Datuk Maringgih.

“Mereka pikir saya senang,” protesnya. “Kalau mereka merespons klakson mobil saya, saya malah tersinggung, karena sebenarnya bukan saya yang mereka maui, melainkan mobil saya.”

Tetapi kemudian terbukti dia salah sangka. Beratus-ratus cewek diboncengkan motor atau digandeng oleh cowok-cowok tanpa seorang pun peduli kepada kami yang bermobil.

“Cewek-cewek Yogya sekarang goblok-goblok!” makinya lagi. “Ada dua lelaki ganteng, punya pekerjaan tetap, gaji besar, pakai mobil, mereka malah pilih pemuda-pemuda yang tak jelas juntrungan masa depannya! Itu pun tangan cewek-cewek itu mendekap terlalu erat dan dadanya menempel ketat!”

Saya senyum-senyum. Tampaknya ini juga sebuah *dzikir*. “Bukan soal bensin, motor, atau mobil,” kata saya, “melainkan soal usia. *Ente* ngacalah sesekali. Kita ini sudah oom-oom”

Kami akhirnya terdampar di sebuah warung nasi goreng. Dan saya sukses menggiringnya untuk ketakutan berdekatan dengan keramaian tahun baru.

Tahun baru Masehi makin dianggap dan memang berlaku internasional, meskipun ia hanya sebuah versi seperti halnya Tahun Baru Jawa atau Islam. Apa kata akal sehat Anda?

Terompet memekik-mekik, ratusan ribu liter bensin dibeli dan dihabiskan tidak untuk produktivitas dan kreativitas. Penyiar-penyiar teve matanya begitu sempit melihat hidup sehingga hanya sibuk dengan “Ramai atau tidak di sana? Ada jenis hiburan apa? Hujan deras, ya?” Satu Januari itu titik macam apa dalam peta metabolisme natur, budaya, nilai-nilai, sejarah, dan nasib mereka, sehingga Tahun Baru menjadi sedemikian penting? Kalau “tahun baru” saya adalah setiap bulan purnama, karena *katuranggan* nabi saya adalah Nabi Yusuf

“Ente sendiri yang goblok! Ente sudah terlempar *out of culture*. Bangsa kita ini diam-diam punya kesedihan yang mendalam. Mereka butuh hiburan, dan hura-hura macam itulah satu-satunya hiburan yang mereka kenal. Ente jangan ajak seluruh bangsa ini kesepian seperti ente!” tiba-tiba kawan saya memaki.[]

Materialisasi Manusia

Sarasehan yang dihadiri oleh doktor bule itu jelas akan berlangsung hingga pagi. Salah seorang hadirin, yang ternyata adalah mantan mahasiswa studi Islam di sebuah universitas mancanegara, bercerita tentang salah seorang dosennya.

“Dia seorang ilmuwan yang tak ada duanya,” demikian dia memulai kisahnya. “Mungkin Tuhan menciptakan hanya satu itu saja di seantero negeri selama satu abad yang kita alami. Otaknya sangat cemerlang, ketajaman pandangannya prima, rambahan keputakaannya tak terlawan, kerajinan akademisnya dahsyat, daya pembaruan pemikirannya belum ada yang bisa menandingi Tetapi, itulah pada akhirnya yang justru membuat kekecewaan saya memuncak tanpa bisa saya halangi!”

Diceritakannya bahwa ketika itu selama lebih dua tahun, dia menjadi mahasiswanya bersama sekitar empat puluh rekan dari tanah air. Apa yang lebih ideal dan membanggakan dibanding menjadi murid dari seorang tokoh prolif yang tak ada duanya ini? Dialah pendekar segala pendekar di bidangnya. Dialah master segala master di lingkarannya.

“Namun, sungguh saya tidak pernah menyangka, memimpikan pun tidak, bahwa ternyata dia memiliki subjektivitas yang begitu tinggi sebagai ilmuwan.”

“Bagaimana maksud Anda?” seorang hadirin lain bertanya.

“Di dalam peta pemikiran-pemikirannya, dia telah memilih salah satu aliran secara intelektual dan suatu sikap secara politik. Pandangan dan penilaiannya terhadap mahasiswanya didasarkan pada pilihan ini. Kalau dalam karya tulis mahasiswa terkandung pemikiran dan sikap yang tidak klop dengan pilihannya, maka dia akan diberi nilai buruk. Sebaliknya, siapa saja yang karyanya menunjukkan kecenderungan aliran yang sama dengannya, maka langsung diberi nilai baik.

“Jadi beliau sama sekali tidak mengemban objektivitas akademis, kebenaran ilmiah dan keadilan demokrasi ilmu. Mestinya, apa pun aliran pemikiran yang dicenderung oleh mahasiswa, tidak menjadi kriteria penilaian. Sebab yang dipakai untuk menentukan bagus-tidaknya suatu karya tulis adalah standar-standar akademis dan ilmiah murni yang berdasarkan kebenaran universal. Dan sejak hari pertama saya mengikuti kelas beliau, saya selalu punya keyakinan bahwa ilmuwan besar macam beliau pastilah akan dengan sendirinya menjalankan prinsip adil dan benar semacam itu.

“Tapi, ternyata tidak. Saya mungkin tidak kaget dan tidak terlalu pusing seandainya yang berlaku seperti itu adalah dosen-dosen yang saya jumpai pada kebanyakan gejala di kampus-kampus. Tetapi sungguh saya pening; bagaimana mungkin itu terjadi pada manusia unggul macam beliau? Selama ini saya menganggap beliau bukan sekadar sebagai cendekiawan mumpuni, melainkan juga pemimpin intelektual, bahkan teladan dalam hal moral dan spiritual. Ternyata, saya bagaikan tersandung batu besar dan jatuh terjerembap.”

Padahal, menurut si empunya kisah ini, mahasiswa yang menjadi korban ketidakadilan akademis ini, alias yang pemikiran dan sikapnya tidak sealign dengan sang dosen, adalah mayoritas, hampir 90 persen dari keseluruhan.

“Terpaksa kami melakukan kompromi-kompromi tertentu,” lanjutnya dengan nada prihatin. “Sebab bagaimanapun, kami jauh-jauh ke luar negeri tidak terutama untuk melakukan perjuangan politik atau

nilai, melainkan, maaf, untuk menempuh proses karier dan demi menyenangkan orangtua kami di rumah. Kami tidak mau menghancurkan masa depan kami dengan sejumlah kalimat yang tak disukai oleh dosen kami.”

“Dahsyat!” celetuk salah seorang.

“Di kalangan kaum akademis dan di mana ukuran-ukuran keilmuan objektif diberlakukan, beliau sanggup berbuat tidak jernih semacam itu. Apalagi di wilayah kehidupan lain yang jauh dari tradisi ilmiah,” sahut yang lain.

“Itu ‘kan suatu jenis korupsi!” lainnya teriak.

Kemudian, kisah berlanjut dengan pemaparan sejumlah adegan tentang tokoh yang sama yang oleh forum dipandang logis karena ada referensi semacam yang diceritakan itu.

Referensi itu membukakan semacam spektrum mata pandang baru dalam menilai kembali tokoh tersebut.

“Coba perhatikan,” berkata mantan mahasiswa itu, “aliran pemikiran beliau tergolong sayap kecenderungan yang secara politis-ideologis sangat klop dengan jenis kekuasaan politik yang berlaku di sini. Kalau kita amati alur dan substansi pemikiran-pemikiran beliau dari era ke era, tampak semacam benang merah subordinasi terhadap hegemoni kekuasaan. Di tahap awal wataknya sekadar moderat dan merangsangkan liberalisasi, dan itu pasti diterima oleh sejarah karena indikatif terhadap keseluruhan proses demokratisasi. Tapi pada tahap berikutnya, semakin tampak bahwa pilihan aliran itu bukan hanya steril dan tidak kritis terhadap kekuasaan, melainkan sudah merupakan dukungan kultural, yang hanya orang-orang bermata tajam saja yang bisa menangkapnya”

“Apa itu bukan sangka buruk?” Kang Guru memotong.

“Maaf, Kang Guru, saya justru menjadi sukar untuk tidak percaya terhadap berbagai berita lain tentang tokoh ini. Bahwa ternyata dia juga punya ambisi serius untuk menjadi pemimpin formal, punya obsesi materialisme dan hedonisme. Maaf, rumah, mobil, dan kekayaan beliau sekarang ini sangat terkait erat dengan subordinasi pemikiran-

nya itu. *Masya Allah*. Padahal, sebagai ilmuwan saja sudah agung rasanya, dan beliau sudah dengan sendirinya memperoleh kedudukan mulia sebagai pemimpin bangsa, tak usah menjadi menteri atau jenis pemimpin kelas menengah kota seperti yang diupayakannya selama ini. Dan lagi, untuk apa hedonisme itu! Beliau bukan potongan untuk itu, tak cocok pakai mobil dan rumah mewah, *ndak* bisa minum wiski atau nyanyi di karaoke. Beliau tampak anggun justru kalau memilih gaya hidup sederhana”

“Sangka buruk!” teriak Kang Guru lagi.[]

Bunuh Diri sebagai Puncak Kritik Sosial

Mungkin bunuh diri adalah peristiwa besar, mungkin juga peristiwa kecil. Itu bergantung pada seberapa berat kita, juga si pelaku bunuh diri itu menakar arti kehidupan.

Orang nekat mati karena pasti dia salah persepsi terhadap dunia kematian. Susahnya, kesalahpahaman atas dunia maut, pasti berlandaskan kesalahpahaman terhadap kehidupan.

Lebih susah lagi karena kita tidak makin punya institusi kependidikan atau informasi kebudayaan lainnya, yang bisa menyodorkan kepada kita data tentang kematian. Bahkan, tidak pula data tentang kehidupan. Yang tersedia di *file* kesejarahan kita hanyalah data tentang apa yang kita sangka, atau kita anggap sebagai kehidupan. Antara lain terdiri dari statistik pendapatan, grafik kesejahteraan, jumlah uang pensiun, berita-berita kaku dan mati dari perpustakaan akademik, daftar *niteclub* dan kaset-kaset, *gross family product*, atau media informasi dengan suprateknologi yang memaparkan 10 persen realitas, serta terpaksa menyembunyikan 90 persen sisanya.

Yang disebut kematian dan kehidupan terletak tidak terutama pada fakta itu, tetapi pada cara kita melihatnya. Semakin membengkaknya taraf kemampuan komputerisasi dan berbagai jenis sofistikasi persepsi atas data, bisa jadi hanya paralel dengan meningkatnya kadar penyakit

jiwa dan penyakit biologis masyarakat modern. Siapa tahu malah berbanding terbalik dengan progresi kepaahaman kita atas kehidupan sedemikian rupa, sehingga kalau ada berita bunuh diri yang menderas, sebagai pemeluk agama kita menyiapkan kutukan-kutukan. Sebagai pengamat sosial, kita menyediakan simplifikasi analisis, dan sebagai kepala daerah tempat orang bunuh diri, kita persiapkan reduksi dan manipulasi.

Tidak Matang

Kasus bunuh diri segera kita kotak dalam bingkai teori psikologi sosial tentang ketidakmatangan mental atau keterdesakan ekonomi. Tetapi, secara keseluruhan baik kita para pengutuk, para penilai, maupun para pelaku bunuh diri itu sesungguhnya terlibat dalam ketidakpahaman global tentang makna-makna paling substantif dari kehidupan dan kematian. Sejak dahulu mata kuliah tentang itu membeku. Kematian adalah berhentinya fungsi jantung. Artinya, yang kita pahami hanyalah kematian jantung. Kita tidak peduli kepada seribu kematian lainnya yang berlangsung dalam kehidupan. Kematian otak, kematian akal, kematian moral, kematian ruhani, serta kematian fungsi-fungsi sesungguhnya dari Allah yang dimaksudkan-Nya sebagai kehidupan—yang bahkan justru kita praktikkan dalam berbagai pasal cita-cita pribadi, pembangunan, dan sistem sejarah.

Seorang pemuda remaja menenteng kaleng Baygon dan berkata kepada ayahnya: “Pokoknya kalau Bapak tidak membelikan motor, saya punya Baygon ...!”

Pemuda yang lain naik pohon tinggi-tinggi mem-*blackmail* orangtuanya untuk sebentar lagi menjatuhkan dirinya kalau tak dituruti kehendaknya. Polisi datang, menerapkan suatu bentuk terapi menodong pemuda itu dengan pistol dan berteriak: “Turun atau tidak!” Dan sang remaja melorot ketakutan.

Kematian tak begitu penting bagi dua remaja itu selain sebagai alat dari takhayul di otaknya tentang “kehidupan”, yakni sepeda motor

atau benda aneh lainnya yang merupakan jimat pemompa kepercayaan diri dan rasa hidup anak muda modern. Remaja kita itu sangat takut mati, karena mereka juga sangat takut hidup. Hidup bagi mereka bukan seberkas nilai di kedalaman akal dan batin, melainkan “memiliki benda tertentu”. Nyawa mereka tidak terletak tak pada hakikat ruh dan kesadaran diri, tetapi pada benda-benda.

Maut begitu dekat dengan keseharian diri setiap orang—sehingga sejumlah teman kita terpeleset ke jurang itu dengan amat gampang pada suatu hari. Maut begitu dekat dan kurang penting, karena yang kita hidupi adalah juga tradisi untuk tidak secara proporsional menghargai kehidupan.

Tarif Rendah

Dalam banyak hal kita bahkan berpihak kepada kematian. Pilihan hampir setiap individu untuk merasa bisa hidup dengan pemilihan berhala-berhala, adalah contoh betapa manusia modern memberi tarif yang sangat rendah terhadap kehidupan. Dilanggarnya kemerdekaan dan demokrasi dalam sistem-sistem sosial yang kita anut, di mana untuk selembur uang dan segumpal emblem spekulasi pramomentum regenerasi kekuasaan seseorang bisa meniupkan kematian-kematian nilai tertentu yang kolektif dalam kehidupan masyarakat—adalah bukti betapa tidak sanggupnya kita semua menghargai kehidupan.

Maka, meningkatnya jumlah orang bunuh diri bisa jadi sekadar “asap dari api”. Ia merupakan *outlet* sosial yang paling wadak dari gejala bunuh diri kolektif dalam berbagai dimensi nilai hidup yang kita selenggarakan beramai-ramai.

Allah berkata kepada ruh orang yang bunuh diri: “He, soal mati-hidup itu urusan-Ku. Kenapa kau mengambil hak-Ku dan mendahului keputusan-Ku?”

Si terdakwa menjawab: “Hamba justru menyeberang ke wilayah kehidupan yang lebih sejati. Hamba berpindah dari tempat di mana kehidupan dibuat menangis oleh kesengsaraanku, oleh ketimpangan

kesejahteraan yang membuatku tidak lagi merasa bahwa itu adalah kehidupan. Wahai, Paduka! Kalau tak seorang pun mendengar pekikan lapar kami, kehidupankah itu namanya? Kalau seseorang membuat kursi singgasana antarpulau dan lainnya makan tanah, kehidupankah itu namanya? Kalau orang-orang yang kami beri kewenangan untuk memperhatikan perut, napas, dan pendidikan kami, malah merampas tanah kami, membuntu napas kami, dan memperbodoh akal kami, kehidupankah itu namanya? Barangkali memang hanya hamba yang mengambil keputusan bunuh diri ini pada saat hamba tak mampu lagi menyangga semua itu. Namun, Engkau Mahatahu bahwa kawan-kawan kami yang masih tinggal di sana sesungguhnya telah dibunuh oleh yang kami sebut kehidupan”

Tentu saja kalimat itu hanya “dramatisasi”. Mungkin saja kita tak bisa membantah bahwa kasus-kasus bunuh diri itu sebenarnya masalah “sepele” saja. Seorang anak kecil mati menggantung diri menirukan adegan semacam itu di layar teve. Ibu-ibu mencekik bayinya. Bapak membakar anaknya. Orang memotong-motong badan sesama manusia. Mereka adalah orang-orang yang paling “dimabukkan” oleh atmosfer massal di manusia, masyarakat, dan mungkin negara, dan institusi-institusi pendidikan gagal untuk memberi harga yang pantas kepada kehidupan.

Penghargaan kita terhadap kehidupan tecermin dari pola keinginan hidup sehari-hari, cita-cita hari depan, pilihan perabot-perabot hidup, dilaksanakan tidaknya empati sosial, cinta kasih kolektif, demokratisasi, hukum, dan moralitas. Untuk kasus kita, *setting* orang bunuh diri bukan karena hal-hal semacam kekeringan ruhani seperti yang terjadi di negara-negara maju. Teman-teman kita yang nekat bunuh diri barangkali justru “telah meruhani”, telah merasa secara naluriah bahwa yang namanya kehidupan hanya tinggal di wilayah ruhani, sebab di wilayah fisik-biologis kehidupan telah terbelengkalai sedemikian rupa. Dalam *frame* ini, orang bunuh diri bisa jadi karena justru mengejar kehidupan.

Konsep *harakiri* orang Jepang sama sekali bermakna terbalik dari paham tentang bunuh diri. Orang Jepang ber-*harakiri* justru untuk mempertahankan kehidupan. Bagi mereka, kehidupan adalah terus digenggamnya keyakinan, meskipun pada akhirnya cara mempertahankan keyakinan itu justru dengan memisahkan nyawa dari badan. Kalau dia tak *harakiri*, matilah keyakinannya.

Kita di sini membedakan antara nyawa, sukma, jiwa, ruh, bahkan juga *nafs* yang berjumlah 36 dan tidak terikat oleh mati-hidup secara biologis. Juga tidak terikat oleh skala ruang dan waktu. Dalam terminologi itu, kehidupan dan kematian sama sekali berbeda dengan yang dipahami oleh konsep baku tentang hidup-mati. Sudah barang tentu sedulur-sedulur kita yang bunuh diri di Gunung Kidul dan lain-lain itu tidak mati atas pertimbangan “ontologis intelektual” semacam itu. Tetapi, jangan lupa sukma memiliki pengetahuannya sendiri dan menjalankan lakunya sendiri di mana badan hanya pelayan dari paham dan kehendaknya. Sudah lama sang sukma tak kerasan dan ingin lari dari kehidupan yang tidak hidup baginya, dari kehidupan yang toh mementaskan banyak kematian.

Tetapi masya Allah, terlalu banyak orang bunuh diri.

Tak hanya atas pelaku bunuh diri itu sendiri kita meratap. Melainkan untuk bangunan-bangunan “kehidupan” kita yang melahirkan orang-orang bunuh diri.

Sungguh terlalu banyak jumlah orang bunuh diri, untuk sebuah zaman di mana sebuah bangsa sedang bersukaria menyongsong suatu era yang bernama Tinggal Landas. Untuk sebuah dekade sejarah di mana sekumpulan masyarakat sedang dipuji-puji oleh sejumlah tetangganya serta sedang memuji dirinya sendiri sebagai bangsa yang telah berhasil membangun. Untuk suatu potret modernitas transisi abad ke-20-21, di mana sukses kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial terpancar oleh bukti tidak adanya kritik-kritik atas hal sebaliknya yang mungkin terjadi.

Barangkali saja kehidupan memang memiliki watak dan gayanya sendiri: manusia hidup dalam berbagai perbedaan, pertentangan, bah-

kan ketimpangan. Seolah-olah Tuhan sengaja menakdirkan seseorang menjadi kaya raya, sementara yang lain melarat, semelarat-melaratnya. Seseorang bisa memiliki sekaligus ratusan perusahaan, yang diperoleh secara wajar, profesional, maupun melalui bocoran-bocoran birokratisisme dan nepotisme, sehingga setiap saat bisa disewanya seribu pesawat untuk dinaikinya sendirian. Sementara seorang yang lain membeli ratusan map dan kertas surat lamaran kerja yang bertahun-tahun tak diterima oleh kantor perusahaan mana pun. Atau, membanting tulang daging sehari penuh untuk beberapa ratus rupiah.

Kritik Sosial

Jika ada status iklim kebudayaan umum yang membuat penghuni semua strata sosial membutuhkan ventilasi-ventilasi psikologis untuk melonggarkan sejumlah penyakit jiwanya yang menekan-nekan dan mendesak-desak—seseorang yang pertama bisa membeli musik, judi, minuman keras, wanita, atau naik haji: sementara seseorang yang kedua tak memiliki apa pun untuk membeli hiburan apa pun, sehingga pada momentum tertentu tak ingin dia bertemu dengan dirinya sendiri. Bunuh diri.

Bahkan, ketika sejumlah pakar ilmu sosial bingung mengapa kasus pemerkosaan justru lebih banyak terjadi di pelosok-pelosok, wilayah desa, kecamatan dan kabupaten—dan bukannya di kota-kota besar di mana sekularisme dan liberalisme budaya hidup subur—kita barangkali bisa menyumbangkan jawaban. Bahwa di kota-kota besar orang tak perlu memerkosa, karena telah tersedia tiga peluang untuk menghindarkan perkosaan. *Pertama*, untuk apa memerkosa kalau persetujuan bisa diselenggarakan secara rela sama rela. *Kedua*, untuk apa memerkosa kalau di banyak tempat kita bisa membeli wanita, dengan kelas tarif yang persuasif terhadap masyarakat menengah bawah ke atas. Dan *ketiga*, gumpalan ruang di kota besar lebih memungkinkan penghuninya memperoleh distribusi fasilitas untuk “menghindarkan perkosaan”.

Demi Allah, orang-orang itu membunuh diri buat kita semua. Tindakan bunuh diri mereka adalah puncak kritik sosial yang mereka bisa lakukan. Banyak mahasiswa membakar diri atau mogok makan untuk protes. Orang-orang lugu ini melakukan pola yang sama, tetapi secara naluriah. Mereka bersedia membunuh diri dan siap dihakimi Allah dan kutukan sesama manusia di dunia, demi supaya kita mau belajar menghargai kehidupan.[]

Memungut yang Dibuang Orang

Dari Jombang saya membaca terbitan tak resmi, dari a sampai z dan dari *alif* hingga *ya*, yang memuat informasi dan persembahan-persembahan untuk rakyat jelata. Kalau koran atau majalah biasanya memakai jargon “Untuk Membangun Manusia Indonesia Seluruhnya” atau “Demi Pembangunan”, maka penerbitan yang bernama *Jelata* ini menggunakan idiom “kesederajatan, kepedulian, ketauhidan”. Rubrikasi dan pemilihan tema maupun cara pandang pemuatannya memang sangat mengacu pada makna tiga kata tersebut.

Di dalam penerbitan kecil semacam itu pasti tidak akan bisa kita jumpai tulisan tentang Mode Rambut 1992, Kontes Gus Trendy dan Yuk Trendiyah, atau Perada Montor Menyun. Justru karena itu maka ia tidak bisa dan memang tidak bermaksud mengambil posisi “industrial”. Ia “hanya” teri—sebagaimana eksistensi rakyat jelata itu sendiri—dan “melarang dirinya” untuk menjadi kakap.

Ia merupakan sebuah “penerbitan sunyi”. Suatu arus kecil yang mencoba tidak mengalir searah dengan arus besar. Kekecilan dan kesunyiannya persis sama dengan hati nurani setiap manusia. Hati kecil jauh di lubuk batin.

Setiap orang bekerja keras menempuh cita-cita, mencari nafkah, menumpuk harta dan kekuasaan, lalu-lalang ke sana-kemari bagi

melupakan apa pun, kecuali kepentingan dirinya sendiri. Tetapi, suara sunyi dari dalam hati kecil atau hati nuraninya sendiri akan jauh lebih kekal dari segala gegap gempita harta dan kekuasaan.

Suara sunyi itu akan tetap menyapanya sampai manusia menjadi tua, dan sunyi hati nurani itu justru akan terdengar keras suaranya pada saat-saat manusia menjelang mati. Yakni, tatkala manusia secara terlambat mulai menyadari bahwa seluruh yang dibangun di dunia ini ternyata tidak penting. Karena yang kekal abadi adalah panggilan-panggilan sunyi dari dalam diri mereka sendiri itu—yang selama berpuluh-puluh tahun tidak begitu dia perhatikan.

Tampaknya suara sunyi semacam itulah yang coba diwakili oleh penerbitan yang saya kisahkan ini. Sebagai orang Jombang, saya *matur kasuwun* kepadanya.

Selama ini, kalau saya ingin hura-hura memanjakan nafsu kedunian dan naluri-naluri dangkal, Jombang sudah makin menyediakan institusinya. Kalau saya ingin ikut berjaya dengan uang dan kekuasaan, saya tinggal ikut putaran sistemnya. Tetapi, bagian manakah dari sistem dan institusi-institusi sosial di Jombang yang bisa memenuhi suara hati nurani kejelataan saya? Maka saya bersyukur, penerbitan kecil ini sadar untuk ikut “menjaga keselamatan zaman”. Memelihara akal sehat, *membahureksoi* garis yang membedakan ini benar itu salah, ini baik itu buruk, ini rakus itu santun, serta ini adil itu ngawur.

Ia memaparkan kisah orang-orang kecil. Rakyat jelata. Memotret problem dan ketegaran antisipasinya di tengah kereta zaman yang mengaku akan memperbaiki nasib mereka. Namun, dalam praktiknya justru meninggalkan mereka, bahkan dalam sejumlah hal memperburuk nasib mereka. Ia menuturkan ironi-ironi antara pernyataan para pemimpin dan kenyataan di lapangan. Itu semua sebagai salah satu modus refleksi dari kerja sosial konkret mereka bersama segmen masyarakat yang paling lemah dan paling dilemahkan, yang mereka temani untuk menyelenggarakan kehidupan yang “manusiawi”.

Betapapun sempit jangkauan penerbitan itu, betapapun kecil “tubuh”-nya, tetapi bukankah memang demikian yang namanya “hati”?

Ia tersembunyi di dalam tubuh dan mata tak pernah bisa memandangnya. Dan jikapun mata bisa menatapnya, hanya mata batin yang bisa menemukan kandungan ruhani dari gumpalan hati.

Inisiatif pengabdian sosial yang swasta penuh semacam ini ibarat memungut puntung rokok. Di tengah sistem nilai sejarah yang menyelenggarakan penggumpalan kekuasaan dan modal serta elitisasi dan hedonisasi kelas sosial budaya, selalu ada “puntung rokok yang di buang” di tepi jalan atau di bak sampah. Ada puntung-puntung rokok ekonomi, puntung rokok politik, dan puntung rokok hukum, bahkan puntung rokok sosial budaya. Baik karena sistem yang salah maupun karena para tikus-oknum yang menggerogoti bangunan sistem itu.[]

Tentang Dosa Global

Dan barang siapa mendambakan pertemuan dengan-Nya, hendaklah dia (siapa pun) himpun perbuatan baik

(Al-Quran)

Semakin banyak pihak yang berani menyatakan sikap tentang SDSB, kumpulan aktivis masjid itu semakin rajin pula menyelenggarakan silaturahmi dan diskusi untuk merundingkan soal apa saja yang sebaiknya mereka sikapi.

SDSB sudah disikapi, meskipun tidak dilanjutkan sampai tujuannya tercapai, misalnya dengan mencari sebanyak mungkin metode-metode *nahi munkar*.

Perlukah ada seorang kiai atau santri yang mogok makan sampai SDSB benar-benar dibubarkan? Terserah. Asal jangan mogok makan model Yogya: mogok makan nasi, tetapi tetap makan yang lain ditambah minum dan merokok. Padahal, mogok makan itu sasarannya adalah kelaparan, sakit, dan mati. Kematian karena tak makan akan merupakan suatu *political pressure* untuk memaksakan perubahan keputusan di tangan penguasa. Kalau mogok makan, tetapi tetap sehat walafiat, maka tak ada alasan yang bisa memaksakan perubahan keputusan.

Namun, mengapa hanya mengurus SDSB? 'Kan banyak sekali masalah lain yang tak kalah besar, penting, dan mendasar. Misalnya, kemiskinan struktural, kebebasan pers, independensi kampus, kemerdekaan melaksanakan syariat agama baik pada skala individual maupun sosial. Dan masih banyak lagi.

“Tapi yang penting, sebagai generasi muda Islam kita harus konsisten dan *istiqamah* dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita,” kata salah seorang. “Kita harus terus-menerus mengadakan proses purifikasi kemusliman kita. Jangan sampai kehidupan kita dicampuri oleh hal-hal yang haram, makruh, atau *syubhat*.”

Mereka mencontohkan, kalau memang SDSB haram, ya jangan nonton siaran olahraga yang dibiayai SDSB. Pokoknya, jangan bersentuhan dengan apa pun yang berbau SDSB.

Diskusi itu penuh semangat dan kekhusyukan.

Namun, akhirnya mereka seperti terjebak dalam lingkaran setan yang sangat sukar ditemukan jalan keluarnya. Seseorang melontarkan pertanyaan: “Kalau saya menjadi satpam atau tukang parkir di lokalisasi WTS, apa hukumnya? Menjaga keamanan lingkungan ‘kan perbuatan baik. Tapi, apakah saya juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan maksiat orang-orang yang saya jaga kendaraannya? Bukankah dengan menjaga kendaraannya berarti saya terlihat dalam proses pengamanan perbuatan zina mereka?”

Disusul pertanyaan lain. “Kalau saya menyewakan kamar hotel, lantas dipakai untuk berbuat mesum oleh tamu, apakah saya ikut berdosa? Bukankah saya berposisi menyediakan fasilitas untuk perbuatan *munkar*? Bukankah *income* yang saya peroleh adalah uang pembayaran orang berzina?”

Ditambah lagi. “Kalau mau diurus-urus, mana ada uang yang sungguh-sungguh halal? Bukankah segala sesuatu dalam hidup kita sekarang ini merupakan bagian dari suatu putaran sistem dalam struktur yang sepenuhnya mengandung keterkaitan-keterkaitan? Siapa yang bisa menjamin bahwa uang yang kita terima ini halal?”

Dan makin menjadi-jadi. “Kalau beli soto atau sate di warung, perlukah kita tanya dulu kepada penjualnya apakah dia menyembelih ayam dan kambing itu dengan bacaan *basmalah*? Kalau tidak, berarti selama ini kita makan bangkai.”

Meloncat ke tema-tema yang lebih luas. “Tiap hari kita shalat di masjid ini. Listriknya terang benderang. Siapakah yang menemukan teknologi cahaya ini? Kita menyebutnya orang kafir. Siapa yang memungkinkan masjid kita ini punya kaca mengkilat, tegel, tikar, karpet, jam, pengeras suara, dan lain-lain? Pasti Muslimkah mereka? Apakah barang-barang itu tidak kita beli dari pasar industri besar yang secara struktural membunuh usahawan-usahawan rakyat kecil? Seberapa kadar kebaikan dari masjid kita ini dan seberapa kadar dosa struktural dan sistematikanya? Apalagi biaya pembangunan masjid kita ini dulu berasal dari orang yang kita tidak tahu persis dari mana dan dengan proses yang bagaimana dia memperoleh uangnya.”

Pertanyaan demi pertanyaan bersusul-susulan.

Jadi, bagaimanakah kita menentukan persisnya batas pahala dan dosa kita, dalam format global dan interrelatif dari hidup ini?

Bahkan, kemudian seseorang berkata dengan nada yang agak tinggi: “Apa kira-kira yang akan ditanyakan oleh para malaikat kelak kepada para ulama? Tentang ibadah pribadinya, pasti. Kelakuannya sehari-hari, tentu. Tetapi tidak mengharuskan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Hei, kalian ulama yang telah dengan gagah berani menjadi pemimpin umat! Apa yang kau lakukan terhadap begitu banyaknya pencatutan dan korupsi? Apa yang kau perbuat atas menderasnya penyalahgunaan kekuasaan di hampir segala lapisan? Apa yang kau lakukan terhadap masalah ketidakadilan politik dan ekonomi, masalah penggusuran, penyelewengan hukum, dan bertumpuk-tumpuknya manipulasi atas nilai-nilai Tuhanmu?”

Lainnya menyahut, mungkin ulama kita akan menjawab: “Wahai malaikat, itu urusan negara, bukan urusan agama.” Lantas malaikat berkata: “Kalau kenyataan-kenyataan hidup yang paling konkret dari manusia itu urusan negara, lantas agama mengurus apa? Adakah Tuhan menurunkan nabi-nabi khusus untuk menyampaikan agama dan nabi-nabi lain untuk menyampaikan negara? Atau, mungkin ada

dua Tuhan, yang satu mengamanatkan agama dan lainnya mengamanatkan negara? Kalau demikian, pantaslah engkau berani menjadi ulama, sebab memang hampir tak ada yang kau urus.”

Dan akhirnya salah seorang nyeletuk dengan wajah termangu-mangu dari sebuah pojok: “Semoga Thomas Alva Edison masuk surga. Semoga para *inventor* ilmu dan teknologi, yang memungkinkan kita punya radio dan teve, pengeras suara dan pesawat, komputer dan apa pun yang tak terkirakan besar jasanya kepada peradaban umat manusia, dibukakan pintu surga oleh tangan kasih-Nya.”[]

Budaya Superfisial

Salah satu jenis watak budaya masyarakat kita dewasa ini bisa kita jumpai melalui *term* budaya superfisial. Yakni, suatu kecenderungan perilaku yang sangat memperhatikan faktor “luaran”, “dangkal”, atau “permukaan”. Maka, disebut juga “budaya eksoterik” atau “budaya superfisial”, bergantung pada titik berat gejala dan kasusnya.

Contohnya bisa kita ambil dari gejala “ringan” seperti cara berpakaian atau musik pop, hingga gejala “berat” seperti dunia pendidikan, politik, maupun “wajah” kehidupan beragama.

Sejak zaman Majapahit sampai sinetron TV modern, selalu kita ungkapkan “kecantikan batin lebih penting dibanding kecantikan wajah”. Dengan kata lain, keindahan esoterik lebih unggul dibanding keindahan eksoterik. Padahal, kebanyakan gagasan kebudayaan serta teknokrasi hidup kita cenderung melakukan yang sebaliknya. Tak akan kita pilih wajah wanita tidak ayu menjadi kover majalah religius. Tak akan kita sibuk mencari “wanita ayu batin”, karena lebih percaya kepada wanita ayu wajah, tak peduli apakah dia seorang *call girl*, asalkan foto kover itu dia dandani dengan jilbab.

Mode-mode pakaian wanita tidak dimaksudkan untuk menutupi tubuh, tetapi justru untuk menonjolkannya. Maka, pakaian lebih berfungsi sebagai “penegasan penelanjangan” dan melawan hakikat

pakaian itu sendiri. Pengertian “aurat” tak hanya pada kulit dan warna, tetapi juga terutama bentuk dan garis tubuh. Pakaian wanita banyak yang justru menegaskan garis dan bentuk tubuh tersebut.

Sembilan puluh persen barang-barang yang dijual di toko-toko adalah alat-alat budaya yang dimaksudkan memperindah dandanan luar. Tak hanya pakaian, tetapi juga gejala peralatan mejeng, rumah tangga mentereng, gengsi, pamer kelas, hedonisme, dan sebagainya. Ideologi industrialisme modern memang tidak menjual sesuatu yang “lucu” seperti kualitas kemanusiaan, kemuliaan, atau kearifan, melainkan menjajakan *prejengan-prejengan* luar yang dangkal.

Sering kali kita beli motor, mobil, komputer, atau alat-alat modern lain, tidak berfungsi untuk menunjang kehidupan, melainkan untuk *make up* penampilan budaya kita. Ketika seseorang mendirikan rumah yang amat besar dan mewah seperti istana pangeran, dalam beberapa hal dia antimodernitas. *Pertama*, rumah itu terlalu kecil bagi “selera”-nya, tetapi terlalu besar bagi hakikat keperluannya. *Kedua*, tidak hemat, tidak efisien, superfisial, dan artifisial. Setiap yang berlebih-lebihan itu tidak modern, karena tidak objektif terhadap realitas kemanusiaan. Setiap yang dicari-cari itu takhayul dan bodoh, karena tidak bersikap ilmiah terhadap kenyataan. Seorang dosen yang turun dari mobil dan menyuruh sopirnya membawakan tas kecilnya telah bersikap tidak ilmiah terhadap kemampuannya. Padahal, makin meningkat kelas sosial manusia “modern”, dia makin tak bisa membawa tas sendiri, tak bisa membuka pintu di hotel, tak bisa menalikan tali sepatunya, tak bisa menyikat giginya, dan kelak tak bisa cebok sendiri waktu buang air besar.

Perkembangan musik atau kesenian pada umumnya sangat mencerminkan kecenderungan budaya superfisial. Syair-syair lagu di TV sangat menghina ideologi pencerdasan bangsa dan membokongi meningkatnya jumlah sekolah dan universitas serta makin membludaknya penerbitan buku-buku dan media massa.

Sementara sekolah-sekolah dan universitas-universitas juga tidak mengurikulumkan relung eksoterik dunia kemanusiaan seperti kebaikan

an, keluhuran, cinta sosial; melainkan sekadar mengajarkan keterampilan untuk egois dalam menyerap segala sumber daya sejarah untuk karier diri mereka sendiri.

Kita juga makin gegap gempita membangun kota-kota kecantikan wajah, dan memang terasa lucu untuk membangun kota keindahan batin. Keseluruhan strategi kebudayaan kita maupun kebudayaan politik kita juga bertitik berat pada perjuangan pemilikan, kekuasaan, serta penumpukan hal-hal betapa dahsyat dan mengerikannya *ceausescu syndrome*.

Untuk itu telah berlangsung arus balik yang ternyata superfisial. Misalnya, gairah keagamaan yang sibuk menonjolkan bahkan memaksa-maksakan segi syariat belaka, komunitas jilbab yang malah menjadi eksklusif dan puritanistik, gejala neokonservatisme keagamaan, hingga bagaimana seorang pelawak atau seorang wanita yang “cantik dan ngetop” dipilih untuk menjadi mubalig daripada wanita-wanita lain yang sebenarnya lebih berkualifikasi untuk konteks tablig. Kita sibuk dan terpukau oleh pemunculan yang eksoterik dan superfisial.

Akan tetapi, kita memang digiring ke arah itu oleh “konglomerat penentu sejarah”, dan kita memang mau dan senang. Bahkan, prakiraan cuaca pun sekarang berlaku berdasarkan petunjuk “bapak”. Maksud saya, mekanisme cuaca dipengaruhi oleh perubahan ekosistem, dan ekosistem dipengaruhi oleh budaya pembangunan, pabrik kimia, polusi, pengancam ozon, dan seterusnya. Dan pembangunan itu berjalan atas petunjuk “bapak”.

Ya, Jadi, terserah ente mau bagaimana?[]

Divergensi Geniusitas

Seorang wartawan mengantarkan seorang “anak minggat” ke rumah seorang tokoh (informal) masyarakat yang hari itu sedang sibuk menangani suatu kasus yang menyangkut Koperasi Pedagang Kaki Lima.

Setelah beberapa menit melakukan basa-basi seperti lazimnya orang menerima tamu, si wartawan menjadi gagap. Sulit dia menemukan kalimat untuk menjelaskan maksud kedatangannya—karena kasus si anak minggat itu memang unik. Lebih tidak gampang lagi menjelaskan mengapa kasus ini diajukan kepada si tuan rumah dan bukan—misalnya—ke Lembaga Penampungan Anak Minggat, ke lembaga-lembaga pembinaan sosial formal yang dimiliki oleh pemerintah.

Namun, setelah si wartawan mengemukakan beberapa kalimat yang berputar-putar, sang tuan rumah tiba-tiba langsung bertanya kepada anak itu: “Minggat, ya?”

“Ya!” jawab si minggat.

“Sudah berapa lama?”

“Tiga bulan lebih!”

Tuan rumah kita tertawa.

“Bagus!” ujarnya, “kamu sudah lulus!”

Wartawan kita jadi bengong. Seolah-olah si tuan rumah telah mengetahui semua komplikasi persoalan yang dibawanya, dan segala sesuatunya tiba-tiba saja menjadi begitu gampang.

“Silakan tidur di sini sejak malam ini,” kata si tuan rumah lagi, “segera sesudah saya selesai dengan urusan Bapak-Bapak kaki lima ini nanti kita rancang tahap-tahap langkah yang bisa secepatnya kita laksanakan.”

Wartawan kita menyandarkan punggungnya di kursi, menarik napas rileks panjang-panjang dan menyulut sebatang rokok.

Susah dunia ini. Ada “manusia rumah”. Ada “orang-orang usiran”, baik yang terlempar dari tanah dusunnya yang dijadikan waduk pembangunan, atau terdepak dari rumah hak-hak politik dan hukumnya. Sementara ada juga orang, seperti yang dibawanya ini, yang mengusirkan diri dari rumah dan keluarganya.

Orang-orang mempertahankan tanahnya karena merasa di situlah rumah sejatinya. Sementara orang lain yang meninggalkan rumahnya justru mencari “rumah sejati” bagi hati nurani dan idealismenya.

Adapun, siapakah anak minggat yang diurusnya ini?

Mungkin sekadar anak nakal. Manja. Emosional. Belum punya kesanggupan untuk mengendapkan persoalan yang menimpanya. Kurang sabar. Kurang memiliki ketahanan mental untuk menampung pukulan yang menimpanya, misalnya dari orangtuanya sendiri.

Tetapi jelas dia cerdas. Bahkan, sangat cerdas. Ketertataan pemikiran dan wawasannya, juga artikulasi ungkapannya, terlalu tinggi untuk usia 17 tahunnya. Dia antiteori: tidaklah demikian produk dari tradisi atau kesalahkaprahan modernitas masyarakat kita. Bukan “geniusitas” macam ini yang bisa direspons atau apalagi dilahirkan oleh sistem pendidikan dan situasi tidak demokratis sekolah-sekolah kita.

Dia berkali-kali juara kelas, tetapi makin tak kerasan sekolah. Dia punya prestasi ekstrakurikuler yang bertumpuk-tumpuk terutama di bidang kesenian.

Dia “tak bisa” bergaul dengan anak-anak sebayanya. Sistem persekolahan terlalu konservatif untuk mengakomodasikan gejala kepri-

badian dan geniusitasnya. Juga orangtua dan keluarganya terlalu lugu dan tradisional untuk mampu memahaminya.

Di mata keluarga dan sekolah, dia adalah “anak kurang ajar, suka membantah, kelakuannya kacau, nilai pendidikan moralnya rendah”.

Mata siapakah yang bisa melihatnya? Rumah siapakah yang menampungnya? Uang siapakah yang membiayainya?[]

Irigasi Kesejahteraan

Semakin sering saya memimpikan betapa bahagia rakyat di dunia apabila terdapat satu gelintir saja pemimpin yang bertipe “negarawan-pujangga”.

Mungkin mencari nafkah masih susah payah. Mungkin tumpukan utang tidak kunjung merendah. Mungkin sistem “irigasi” hak, kesejahteraan hidup dan hiburan, tetap agak jual mahal untuk melewati rumah kita.

Akan tetapi, setidaknya ada “klangenan” tentang sesuatu yang bisa dikenang di hati. Ada satu-dua ornamen kenyataan yang lumayan enak untuk digumam-gumamkan dalam batin dan direngeng-rengengkan di bibir.

Setidaknya itu semua bisa kita daya gunakan untuk mempertahankan kepercayaan terhadap hidup ini: bahwa pernah ada keadilan, pernah ada nabi-nabi yang santun, pernah ada bagian yang menyejukkan dari sejarah. Bahkan, di tengah pusaran gelombang duka-derita, keringat dan dosa yang tak pernah makin mengering: kita tetap bisa membaca sajak-sajak yang mengingatkan kasih Tuhan. Kita tetap bisa mendengar dan berjumpa dengan karya-karya budaya yang menyejukkan. Dan kita tetap punya keindahan yang memancar dari—yang di atas saya sebut—negarawan-negarawan pujangga.

Tidak untuk “menipu diri”, tetapi sekadar melakukan percintaan diam-diam dengan cinta nurani dan kejernihan akal budi, di tengah terkurasnya waktu dan perhatian kita oleh klenik kebendaan, etalase konsumsi, peperangan, derita manusia oleh pembangunan sepihak, atau oleh segala deraan kesengsaraan manusia sepanjang pagi, sampai malam.

Puisi-puisi, lagu-lagu batin, dan cahaya para negarawan-pujangga adalah bidadari kecil yang mengunjungi kita pada saat-saat menjelang tidur, sesudah kita terkapar dan terlelahkan oleh kekejaman dunia ini.

Namun, sudah terlalu lama kita tidak pernah berpapasan dengan jenis manusia semacam itu.

Di sepanjang jalanan yang kita tempuh, kita lebih sering bertemu dengan makhluk-makhluk yang dihidupkan, yang lebih banyak menyumbangkan kegetiran. Sedemikian rupa sehingga teknologi mentalis terancang yang dewasa ini kita selenggarakan adalah kesanggupan untuk tersenyum dan tertawa tanpa dilandasi oleh alasan apa pun.

Apakah sedemikian putus asa saya menatap kehidupan?

Tidak. Kita tidak pernah berputus asa, karena di samping kemampuan untuk tertawa tanpa sebab, keistimewaan kita yang lebih adalah mengakali potensi keputusan sehingga menjadi seolah-olah bukan keputusan.

Kita punya gudang besar berisi metode-metode budaya untuk menghidupi kebahagiaan maupun penderitaan. Kita sanggup tetap hidup dalam situasi seperti apa pun. Karena itu, kita tidak terlalu membutuhkan revolusi dan tak terlampau serius menangani perubahan-perubahan.

Akan tetapi, kegetiran hati adalah juga makhluk Allah yang absah eksistensinya. Kita tidak terlalu diperkenankan untuk menggusurnya dengan metode budaya apa pun. Kegetiran adalah tetap kegetiran. Duka adalah duka. Ia punya hak atas ruang dan waktu.

Di koran pagi kemarin saya membaca pernyataan Kepala Negara kita yang cukup indah—pada level kata. Beliau wanti-wanti kepada

rakyatnya tentang masalah kekosongan kehidupan etik, moral, dan spiritual. Tentang kemakmuran materi yang tak menjamin kebahagiaan ruhani.

Kegetiran batin saya menuntut hak eksistensinya. Jika negarawan-pujangga mengucapkan kalimat ini, dia memerlukan landasan, bukti, dan konsistensi empiris.[]

Lapisan Ozon Spiritual

Ada sepasang gelandangan setengah tua sedang asyik bergandeng tangan di tepi jalan, tiba-tiba diseruduk oleh motor dari belakang. Mereka terpental dan terserak ke aspal. Si wanita pingsan, si laki-laki luka parah wajahnya.

Seorang teman saya berlari berusaha membantu. Orang-orang bengong saja di kejauhan. Mobil-mobil yang distop kebetulan tak ada yang sempat berhenti, sehingga teman saya itu membecakkan korban ke rumah sakit.

Menurut pendapat Anda, mengapa orang segan menolong orang celaka?

“Mungkin karena *wegah* urusan.”

“Repot kalau jadi saksi di pengadilan.”

“Kenapa begitu?”

“Karena ada atmosfer ketidakpastian hukum.”

Mungkin itu benar, tetapi terasa terlalu “menuduh”. Kita perlu lebih objektif menilai masalah itu.

“Sangat merepotkan untuk terseret-seret oleh proses peradilan. Juga secara psikologis ada perasaan umum bahwa pengadilan tidak cukup membuat rakyat merasa *at home*, karena mungkin belum sungguh-sungguh merupakan Rumah Keadilan.”

Pada suatu hari, teman saya itu mengalami kecelakaan. Orang-orang cepat mengerubunginya. Tetapi, ternyata bukan untuk menolong, melainkan untuk merampoki uang dan apa saja yang ada di kantong dan tubuhnya. Baru se usai “kenduri” ada satu-dua orang menolongnya. Anda punya pendapat soal itu?

“Rasa kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kesadaran etik telah di-KO oleh kelaparan ekonomi, kerakusan egoistik, dan keterpecahan sosial.”

“Itu simtoma dari semacam rasa sinisme bawah sadar dari kejiwaan masyarakat. Sinisme terhadap ketidakadilan dan ketidakpastian. Karena mereka tidak cukup menghirup udara keadilan dan kepastian, maka secara naluriah mereka juga tak perlu merasa harus bersikap adil.”

“Menurut saya itu kegagalan yang serius dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tingkat tertentu dari ketidaksertaan sosial ekonomi telah meminta ongkos melunturnya kualitas mental dan moral manusia.”

Ketika teman saya membawa gelandangan tadi masuk rumah sakit, ditanya oleh petugas: “Siapa yang menanggung pasien ini?” Teman saya yang getir menyaksikan si korban itu *kejet-kejet*, menjawab spontan: “Tuhan!” Apakah itu tergolong “ongkos” yang Anda maksud?

“Ya! Ongkos penurunan nilai kemanusiaan itu bukan sekadar terjadi secara personal, tapi juga institusional.”

Ada ongkos lain menurut Anda?

“Ada banyak. Misalnya saja soal kesungguhan hidup dan sikap sosial. Kalau tiap hari kita dikelilingi ancaman egoisme, ketidakadilan dan ketidakpastian, maka secara psikologis kita tak merasa ada gunanya untuk bersungguh-sungguh membangun kehidupan, untuk jujur dan mengembangkan diri. Contoh lain misalnya menyangkut *elan kerja* dan *etos kerja*. Kalau birokrasi kita diperalat untuk kepentingan pribadi atau egoisme kelas kekuasaan, kita merasa sia-sia untuk kerja keras mengembangkan karier. Yang kita kembangkan hanya modal untuk menyogok atau menjilat. Kalau sistem tak menjamin mekanisme

yang rasional dari peningkatan karier, maka kualitas produksi setiap pekerjaan kita akan mandul”

Dengan jujur saya kemukakan bahwa Anda telah mengatakan yang sebenarnya ingin saya katakan. Terus terang kadang-kadang “elan kreatif” saya untuk mengemukakan dan mengerjakan kejujuran dan keadilan—memang menurun gara-gara atmosfer semacam itu. Lapisan *ozon spiritual* kita memang makin robek-robek.[]

Antara Etos Kerja dan Etos Hasil

Dua tahun terakhir ini saya banyak berurusan dengan anak-anak muda yang tak bisa meneruskan sekolah, tetapi juga belum bisa segera memperoleh lapangan kerja. Mereka adalah generasi mutakhir bangsa kita, calon penerus “perjuangan” kita-kita yang sudah tua.

Bersama saudara saya dan satu dua “teman seperjuangan” saya mondar-mandir Yogya-Jombang untuk itu. Di Yogya, dalam keterlibatan kelompok berkesenian, penghuninya adalah anak-anak muda semacam itu. Ada beberapa pemuda desa kami yang ikut ke Yogya, untuk suatu usaha meningkatkan kehidupan dan penghidupan. Di desa kami sendiri, Mentoro, Jombang, kami menyelenggarakan usaha-usaha sosial yang belum benar-benar memperoleh perimbangan pembangunan semacam ini, maka desa adalah tempat paling “subur” bagi anak-anak muda “di persimpangan jalan” semacam itu.

Krisis Sejarah

Dalam struktur makro masyarakat nasional kita, mayoritas penduduk desa tergolong kelas bawah, atau paling jauh ada satu-dua *lower-middle*. Namun, dalam struktur mikro masyarakat desa itu sendiri, ada tatanan tersendiri, ada variabel khas, serta ada sifat-sifat tertentu

yang meskipun diakibatkan oleh sistem-makro, harus diperhitungkan juga secara lokal. Artinya, di antara lapisan bawah itu masih ada kelas-kelas lagi, terutama secara ekonomi. Paling banyak anak-anak muda tak tamat SD: itu betul-betul *lowest*. Sekian lainnya tak tamat SMP dan sekian lagi beruntung mengecap bangku SMA. Ini kelas ekonomi yang berbeda-beda. Iklim sosial budayanya relatif sama, tetapi selalu ada faktor-faktor tidak kecil yang membedakan perilaku sosial budaya mereka, ekspresi hidup, pola konsumsi mereka, dan seterusnya.

Ini di Mentoro. Sedangkan di Yogyakarta, yang saya libati langsung adalah golongan *low class* untuk struktur makro. Ada satu-dua *lower-middle*, bahkan terkadang ada golongan yang *nyelonong* dari *upper-middle* atau *high class* sekalipun—karena suatu krisis sosial tertentu.

Akan tetapi, pada semuanya itu ada suatu paralel. Ada suatu benang merah yang mempertemukan kondisi mereka yang diakibatkan oleh semacam krisis sejajar. Artinya, krisis yang ditimbulkan oleh bagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengonstruksi sejarah kemasyarakatan kita. Dalam hal ini, yang menonjol dari “kebijaksanaan” itu adalah kebelum-merataan pembangunan ekonomi, kebelum-seimbangan antara frekuensi peningkatan ekonomi dengan tawaran konsumsi-konsumsi yang dibawa serta oleh peningkatan ekonomi makro tersebut.

Dari sudut lain, hal terakhir itu, bisa kita sebut sebagai timpangnya penerapan teknologi sebagai perangkat inovasi kesejarahan dengan posisinya sebagai pedagang mimpi, artinya iming-iming konsumsi. Hal ini “didukung” oleh lembaga-lembaga pendidikan yang umumnya tidak mampu memberi landasan pengetahuan dan kesadaran kepada anak muda kita, agar bisa menghadapi keadaan tersebut secara sehat.

Kita semua sudah tahu bahwa kurikulum pendidikan formal kita hampir selalu tidak mengusahakan integritas yang runtut dengan permasalahan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, dengan mengemukakan hal tersebut tak berarti saya semata-

mata menyalahkan para pengajar, karena sepanjang pengetahuan saya: bahkan banyak sekali mahasiswa tingkat tinggi yang hidup di tengah pusaran pusat perubahan dan perkembangan masyarakat modern ini, tidak cukup mengetahui seluk-beluk perubahan dan permasalahan yang dikandung oleh masyarakatnya. Mereka bahkan tak sedikit yang juga menjadi “pasien” dari apa yang di atas saya sebut sebagai krisis sejarah.

Generasi Barang Jadi

Bahwa krisis tersebut menyebabkan anak-anak muda kita punya sikap mental konsumtif—itu sudah lama kita ketahui bersama. Tetapi, yang tidak selalu kita insafi barangkali adalah detail dari dimensi-dimensi intrinsik sikap mental konsumtif itu: menyangkut bertumbuhnya kecenderungan tertentu dalam soal etos kerja, etos hasil yang seringkali memaksa kita untuk berpikir lebih kompleks ketika menyelenggarakan usaha-usaha pengembangan masyarakat. Masalah ini lebih ruwet dari yang sering dicoba atasi secara parsial dan sporadis dengan acuan-acuan “kemauan berwiraswasta”, “penanggulangan kenakalan remaja”, “pengarahan dan penataran”, atau apalagi igauan-igauan nasional kita tentang “ketahanan nasional mental spiritual” atau “segera kita *taking off* menuju masyarakat adil makmur”, dan seterusnya.

Anak-anak muda kita dewasa ini dibesarkan oleh suatu iklim lingkungan yang sangat mendorong mereka untuk ingin cepat-cepat menikmati hasil. Yang disebut hasil, juga dipersempit pada pemilikan materialistik.

Kerja bagi mereka (sadar atau tak sadar) benar-benar hanya suatu cara untuk mencapai hasil. Maksud saya, yang mereka cintai hanya hasil. Mereka tidak sekaligus mencintai kerja tersebut, maka kalau ada kemungkinan mereka bisa menikmati “hasil” tanpa kerja apa-apa, maka jadilah.

Semangat melakukan suatu pekerjaan, proses mencintai dan mengerjakan pekerjaan yang baik, kenikmatan ruhani selama mengerjakan

sesuatu, tidak pernah dihitung sebagai suatu hasil. Impian-impian mereka terutama hanya di sekitar *enjoying* konsumsi-konsumsi. Ini termasuk sikap mereka terhadap sekolah: yang utama bukan usaha mencintai proses mencari ilmu, tapi semata-mata memfungsikan status sekolah untuk investasi kerja, artinya untuk investasi hasil. Selesai sekolah, mereka dapat hasil satu: status. Kemudian masuk kerja untuk hasil yang lain: kekayaan. Ini rumus pokok karakter kesejarahan masa kini kita.

Kita hanya siap menerima hasil. Dan kalau bisa muati cepat-cepat. Maka, dengan sekolah yang penting ijazah. Kalau kerja gampang korupsi. Kalau tak kerja, gampang, jadi gali atau pencuri. Kita hanya siap menerima barang jadi.

To Have? To Be? To Do?

Hal-hal seperti itu yang saya maksudkan dengan etos kerja dan etos hasil. Tentu saja gairah terhadap hasil juga harus prima. Tetapi, kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang benar-benar mencapai kemajuan kalau etos hasil berperan amat dominan. Kita bisa kehilangan dinamika, tradisi kreatif, intensitas mencintai proses kerja, disiplin dalam proses kerja, stamina, dan elan.

Dalam dimensi yang lebih mendalam, kita juga bisa kehilangan ruhani sebagai bangsa. Kita menjadi rangka-rangka patung, robot-robot yang rakus uang dan segala materi. Yang terpenting dari semua: bahwa dengan mendominasi etos hasil, sesungguhnya hasil yang kita capai juga tidak maksimal. Etos kerja justru yang menawarkan berbagai kemungkinan hasil. Kita jangan dulu memperdebatkan hal itu, tetapi silakan buktikan dalam suatu jangka waktu.

Dalam keterlibatan saya di Yogya dan Mentoro, Jombang, maka masalah sikap mental ini yang merupakan problem utama bagi semua proses pengembangan masyarakat. Karena itu, meskipun untuk menangani masalah-masalah masyarakat itu kita lakukan usaha-usaha sosial-ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meng-*iguh*-kan (menyisih-

kan) permodalan dan sebagainya, yang lebih utama lagi ternyata adalah usaha untuk memproses perubahan sikap mental. Fasilitas-fasilitas segera membikin manja, maka ia harus disertai dengan semacam forum pengembangan wawasan, forum penyadaran, dan seterusnya, yang sifatnya kualitatif.

Banyak ahli menggelisahkan bahwa masyarakat kita cenderung punya orientasi untuk *to have*, memiliki, *nduwe*; dan menawarkan orientasi *to be*, untuk menjadi, suatu acuan eksistensial. Padahal, masyarakat kita juga sibuk *to be*, karena kita begitu menyembah status. Kita mungkin perlu juga imbauan orientasi yang menyangkut etos kerja: yakni *to do*. Berbuat sesuatu.

Namun, semuanya juga mesti disempurnakan, entah dengan cara ditingkatkan atau disaring. Maksud saya: punya apa? jadi apa? mengerjakan apa?[]

“Demonstration Effects”

Paruh kedua dekade tahun 1970-an merupakan saat-saat di mana sejumlah kalangan sibuk “mengejek” pegawai negeri. Mungkin karena semangat lahirnya Orde Baru, juga karena konsepsi-filosofis berdirinya Golkar, pada mulanya berpusat pada “profesionalisme nasionalistik”, tetapi kemudian terpeleset—atau setidaknya dianggap terpeleset—pada birokratisme yang menjengkelkan. Bahkan, pada beberapa sisi disifati pula oleh neofeodalisme, otoriterisme, dan “loyalisme” buta.

Ini soal perbedaan pendapat. Bisa memang demikian, bisa tidak. Tergantung kerangka persepsi yang digunakan. Tetapi di kalangan tertentu itu, pegawai negeri—alias Korpri—memang *babak bundas* citranya. Mereka menjadi objek karikaturisasi budaya negara.

Ketika semua tim canggih dari Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain gagal dalam menaklukkan *gajah mengamuk*, tim Indonesia gampang saja menanganinya. Mereka mendatangi gajah itu, membisikkan sesuatu, dan langsung gajah itu loyo, menangis ter-sedu-sedu sambil berguling-guling di tanah. Para wartawan kagum: “Bagaimana metode yang Tuan lakukan?” Jubir tim kita menjawab bahwa itu sangat bersahaja. Mereka bisikkan ke telinga gajah itu: “Mulai besok pagi kamu diterima menjadi anggota Korpri.”

Seorang ibu menangis-nangis di depan psikiater. “Tiga anak saya, Pak. Yang pertama alhamdulillah, meskipun agak *sisoprin* (maksudnya: skizofrenia), dia bisa kerja di pabrik tempe. Yang kedua lumayan, agak idiot memang, tapi bisa jadi tukang ojek. Tapi yang ketiga itu lho, Pak, masya Allah! Malu saya untuk mengungkapkannya, Pak.”

“Lho, kenapa toh, Bu?” sang psikiater heran.

“Dia itu pegawai negeri!” sang ibu tersedu-sedu.

Anda tahu sampai sedemikian jauh pegawai negeri di-*adhul-adhul*. Itu dianggap nomor-nomor *masterpiece* dari himpunan *Mati Ketawa Cara Indonesia*.

Namun, ketika menginjak tahun delapan puluhan, pencitraan itu mereda. Menjadi pegawai negeri justru merupakan pilihan utama setiap orang dan pasal ujian setiap mertua kepada calon menantunya. Meskipun abad ke-21 adalah abad kemandirian, abad kaum wira-swastawan, “pasar” pegawai negeri tetap menempati ranking pertama.

Pasal *intrakurikuler*-nya jelas: Jaminan hidup. Keamanan ekonomi sampai hari tua. Pasal *ekstrakurikuler*-nya makin lama juga makin cemerlang. Walaupun secara rasional dan matematis gaji tak mencukupi, secara irasional toh terbukti para pegawai negeri itu bisa punya rumah mewah, mobil *gonta-ganti*, serta objekkan di sana-sini. Otoritas birokrasi adalah modal yang tiada taranya. Gaji tak seberapa, tetapi terobosannya! Sampai-sampai para pemain PSSI jadi tak kebagian kemampuan untuk melakukan umpan-umpan terobosan.

Sampai ada yang namanya *demonstration effects*. Ini khas budaya masyarakat negara berkembang. Secara global mentalnya masih OKB (Orang Kaya Baru). Konsentrasi produktifnya dua puluh lima persen, kekhusyukan konsumtifnya tujuh puluh lima persen. Kalau teman sekantor beli BMW, lainnya sebisa mungkin BMW juga. Juga jenis-jenis konsumsi lainnya. Pokoknya di kantor selalu ada *cokromanggilingan* konsumsi. Tetapi, dengan catatan, daerah seperti DIY tidak cukup subur untuk tingkat demikian. Yogya tergolong minus untuk mampu menerapkan *shared poverty* sekelas—misalnya—Jawa Timur.

Gelombang ini membuat “korpriisme” justru makin bergengsi dan tingkat penawarannya tinggi. Kalangan yang dulu mengejek mereka, kini tampak *bodo*.[]

Keadilan Nisbi

A langkah peliknya makhluk yang bernama keadilan: ia sungguh-sungguh persoalan yang “mustahil” bagi manusia.

Nalar dan rumus tentang keadilan berlaku hanya dalam batas rentang waktu tertentu. Di luar skala waktu itu, hakikat keadilan pudar. Padahal, manusia dan hidup ini berupa “kesementaraan”. Keadilan yang sungguh-sungguh hanya keadilan nisbi. Keadilan relatif. Keadilan dengan catatan kaki. *A footnote justice.*

Ketika seorang pemuda memerkosa adik kandungnya, sekaligus ibu kandung dan ibu tirinya—tak ada keraguan lagi dia wajib dihukum sekeras-kerasnya setakaran dengan kebiadabannya. Dasar penghukumannya adalah suatu skala waktu tat kala dia memerkosa. Hukum formal tidak merelevansikan dirinya terhadap skala waktu di belakang atau di depan momen-momen peristiwa pemerkosaan itu.

Padahal, peristiwa perkosaan itu tidak berdiri sendiri dalam proses sejarah. Ia bagian dari suatu keseluruhan. Ia munculkan dari suatu proses. Ia buih dari suatu komplikasi gelombang.

Sesungguhnya hukum harus minta tolong kepada ilmu. Ilmu harus bergulat melawan asumsi-asumsi terhadap realitas. Dan kemudian, agar ilmu sungguh-sungguh menjadi ilmu, ia harus tahu bagaimana

lolos dari relativitas asumsi-asumsi itu dan membawa keluar kesimpulan yang jernih dan objektif terhadap apa yang terjadi.

Mengapa pemuda itu memerkosa? Karena ada akumulasi dorongan nafsu seks. Mengapa terakumulasi? Karena ada atmosfer iming-iming. Mengapa sampai tertumpuk? Karena tidak “dikredit”. Mengapa tak “dicipil”? Karena setiap cicilan memerlukan biaya, peluang sosial, dan *communication skill*.

Mengapa sang pemuda tak punya biaya? Karena dia anak orang miskin. Mengapa miskin? Mungkin karena dia malas bekerja, mungkin karena lapangan kerja makin sempit, mungkin karena ada ketidakadilan sosial.

Mengapa dia tak punya peluang sosial untuk mencipil pemenuhan nafsu seks? Seorang *kawula alit* seperti itu amat kecil kansnya untuk memperoleh pacar. Kelas sosialnya tidak subur untuk ide romantisme sensual. Modalnya terlalu lemah.

Mengapa tak “beli” eceran saja? Dia tak punya fasilitas untuk itu. Dengan kata lain, sang pemerkosa ini “tidak diuntungkan” oleh posisi sosial ekonominya untuk bisa menjadi pengkredit cinta. Dia tak punya keselamatan seperti seorang pegawai, pengusaha, atau setidaknya seorang mahasiswa anak orang yang lumayan ekonominya—yang relatif lebih punya peluang dan fasilitas untuk “ngetap oli” secara berirama sehingga tak usah tertumpuk dan lantas meledak.

Mengapa dia sampai sedemikian tak bermoral sehingga memerkosa ibu kandung dan adik kandungnya sendiri? Hidup-tidaknya moralitas di dalam dirinya tidak 100 persen bergantung pada dirinya sendiri. Bagi—misalnya—seorang sarjana yang punya pekerjaan tetap dan gaji lumayan—meskipun moralnya sama dengan si pemuda—kemungkinan besar tak akan melakukan pemerkosaan tolol seperti itu. Sebab tingkat intelektualitas dan pengetahuan hidupnya membawa dia ke suatu pemenuhan seks yang agak lebih canggih dan “beradab”.

Dari keseluruhan asumsi ini, bisa kita pastikan bahwa si pemuda pemerkosa itu sungguh-sungguh tidak berdiri sendiri sebagai terdakwa dalam perbuatannya. Yang ikut menanggung mungkin lingkungannya,

iming-iming budaya seks yang tiba kepadanya, orangtuanya, ketidakadilan ekonomi, negara, dan seterusnya.

Jadi, hukuman kepadanya bersumber dari suatu keadilan relatif. Kita mengandaikan bahwa tidak ada apa-apa yang berlangsung di belakang dan sebelum pemerkosaan itu. Seandainya peristiwa perkosaan itu berlangsung dalam jumlah waktu lima jam—misalnya—maka keadilan yang diterapkan kepadanya hanya terbatas dalam skala lima jam itu. Seandainya skalanya diubah menjadi sepuluh tahun misalnya, akan lain soalnya. Apalagi skalanya dunia akhirat.[]

Imunitas Kultural

*Sang Tuan akhirnya percaya bahwa ia seorang tuan.
Si Budak akhirnya percaya bahwa ia seorang budak.
Padahal mereka manusia.*

(Kiai Sudrun)

Di Yogya ada kampung yang diiris oleh sebuah sungai. Orang menyebut sungai itu sebagai “WC Terpanjang se-Asia Tenggara” karena penduduk di sepanjang pinggiran sungai itu membangun tempat buang air besar yang berderet-deret.

Tak selamanya air memenuhi sungai. Sehingga tak selamanya pula *the tinja* bisa langsung diangkut oleh arus air sehingga berlomba seperti tatkala Abu Nawas dulu melakukannya dengan Khalifah Harun Al-Rasyid.

Maka, kalau air surut, tak ada aliran air yang membawa pergi aroma produksi rutin manusia—salah satu *sunnatullah* alias hukum alam yang setia memelihara kesehatan badan manusia.

(Maksud saya, buang air besar itu hukumnya wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, setidaknya sehari sekali. Kalau hajat itu tak dipenuhi, sakitlah manusia. Meskipun di tengah sidang Kabinet Terbatas dan Darurat, kalau sang hajat kasih order, harus saat itu juga dipenuhi. Buang air besar itu posisinya sama dengan kewajiban terbitnya matahari setiap pagi, sel-sel memperkembangkan diri, tetumbuhan memuai meninggi, atau manusia hamba Allah memanifestasikan perbuatan baik dengan akal sehat dan hati nurani).

Alhasil sang aroma akan terakumulasikan dan mewarnai atmosfer. Kalau Anda melintasi tepian sungai itu, dalam beberapa menit peninglah kepala Anda, sebab ada rangsangan-rangsangan ekstrakurikuler yang overdosis terhadap kerja saraf-saraf Anda.

Akan tetapi, para penduduk yang telah terbiasa dengan situasi lokal semacam itu, imun sudah hidungnya, kebal sudah saraf pembauannya. Kalau Anda tinggal di sana barang seminggu, insya Allah imunitas itu akan Anda peroleh juga.

Artinya, sesudah jangka waktu tertentu, Anda tak lagi membaui aroma itu. Dan sesudah sang waktu berlangsung lebih memanjang lagi dalam metabolisme pengalaman hidup Anda, pada akhirnya Anda akan percaya bahwa di sekitar sungai itu memang tak ada bau busuk apa pun yang perlu Anda cemaskan.

Adapun yang ingin saya tuliskan di sini ialah bahwa imunitas semacam itu tak hanya dialami oleh hidung dan saraf-saraf biologis. Melainkan bisa dialami juga oleh saraf-saraf psikis, spiritual, mental, bahkan intelektual dan kultural.

Misalkan saya ini putra seorang camat. Semua pegawai di kantor kecamatan bukan saja sangat sopan dan hormat kepada saya, melainkan bahkan saya bisa menyuruh-nyuruh mereka. Bahkan, saya juga bisa berbuat banyak hal kepada lurah-lurah bawahan ayah saya.

Mungkin saya tidak tahu bahwa penghormatan mereka kepada saya disebabkan pamrih-pamrih tertentu kepada ayah saya, sehingga orang menyebutnya sebagai menjilat. Tetapi, yang penting pada akhirnya saya yakin bahwa segala sesuatunya memang wajar demikian. Saya percaya bahwa karena saya adalah putra camat, maka semua bawahan ayah saya adalah juga bawahan saya, meskipun tidak dalam semua soal. Saya percaya bahwa saya bukan rakyat biasa sebagaimana rakyat pada umumnya. Saya adalah orang spesial dan sewajarnya

memperoleh perlakuan spesial. Dan bagi saya yang namanya birokrasi memang demikian. *Nothing wrong with it.*

Nilai-nilai yang terbangun adalah pengertian dan kesadaran seseorang bergantung pada jenis informasi dan pengalaman yang diterimanya. Kalau saya dikurung dalam sebuah kompleks taman bonsai, maka bagi saya pohon beringin memang hanya satu-dua meter tingginya. Kalau orang bilang pohon beringin itu besar dan setinggi rumah, maka saya akan merasa itu aneh dan tidak benar.

Kalau pemahaman dan pengalaman hidup saya hanya ada informasi bahwa mencari kerja itu harus menggunakan uang pelicin, maka yang selain itu saya anggap tidak wajar. Kalau dalam lalu lintas uang selalu ada “talang bocor” alias ada pencatutan sistemik, maka bagi saya itulah yang wajar dan benar.

Kalau pegawai-pegawai teras di tingkat kota madya atau kabupaten terkena *demonstration effects* khas manusia Negeri Dunia Ketiga dalam bentuk perlombaan beli mobil BMW dan rumah-rumah luks, dan referensi itu mendominasi wilayah kesadaran saya, maka bawah sadar dan atas sadar saya akan selalu mengatakan bahwa “memang demikianlah kehidupan”.

Pada sisi lain barangkali saya memperoleh juga informasi ideal dan konseptual tentang apa yang wajar dan apa yang tak wajar atau apa yang benar dan apa yang tak benar—saya akan mendidik diri saya untuk memilih di antara dua: mau *ideal* atau mau *realistis*. Kalau saya mengikuti arus, saya realistis. Kalau saya melawan arus, saya idealis dan utopis.

“Tuhan” saya adalah segala sesuatu yang saya anggap realistis, karena saya adalah manusia biasa, yang berpijak di bumi dan hidup “normal” di dunia biasa-biasa saja. Yang selain itu, saya sebut gila.

Sampai tingkat atau stadium yang saya yakin tak bisa disebut tidak parah, bangsa kita telah mengalami imunitas terhadap problem-prob-

lem korupsi, pencatutan, manipulasi, pembocoran, penyelewengan, kemunafikan, dan sebagainya.

Standar nilai kita tentang moralitas, kejujuran, kebenaran, keadilan, atau segala sesuatu yang pada saat-saat tertentu kita sadari sebagai yang terbaik untuk kehidupan telah mengalami penurunan yang serius.

Dosa, kecurangan, kepura-puraan, adalah barang jamak dan rutin dalam kehidupan kita. Sedemikian rupa sehingga kita tak lagi merasa berdosa, curang, dan pura-pura. Bahkan, kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita tak berdosa, curang, dan berpura-pura.

Saya jadi sedikit paham mengapa agama mengharamkan *Ilmu Ke-bal*. Kekebalan membuat kita tak bisa menangis. Tak bisa merasakan sakit. Tahu-tahu kanker sudah merambahi seluruh tubuh.[]

Musik Bangdut

Koran dan media massa lain selalu tak kekurangan “pangan”, seperti halnya ayam kampung tak akan mati kelaparan. Selalu ada saja peristiwa di antara manusia baik yang berskala lokal, nasional, maupun internasional, yang menjadi “nafkah” para pekerja media massa.

Akan tetapi, hampir selama satu tahun belakangan ini “nafkah” mereka amat dahsyat. “Semangka” mereka selalu sebesar gunung anakan. Belum selesai satu kasus, telah muncul kasus berikutnya. Besar-besar semuanya. Itu pun berlangsung dalam atmosfer “pers yang relatif tertutup”: bayangkan apabila pemerintah negeri kita sudah tak lagi suka sakit gatal atau sakit jantung oleh mekanisme pers bebas ... seberapa banyak hal yang bisa diungkap yang selama ini rakyat tak mengetahuinya: penyelewengan, korupsi, manipulasi, yang selama ini diungkap ala kadarnya sekadar untuk kosmetika demokrasi.

Peristiwa-peristiwa dahsyat itu akan tidak berhenti dan ada kemungkinan—bagi pers nasional kita—akan mencapai salah satu puncaknya nanti tahun 1991. Entah peristiwa apa itu, silakan berunding dengan tetangga Anda masing-masing.

Akan tetapi, jika Anda mempergunjingkannya, jika Anda menganalisis suatu kasus, dengan kerangka metode apa pun serta menghasilkan teori atau skenario atau versi apa pun—semuanya itu harus tetap mengandalkan “uang tak terduga”.

Maksud saya, Anda jangan terlalu mantap dengan kesimpulan yang dihasilkan. Harus ada kesediaan untuk pada suatu hari mengakui ternyata persoalan jauh lebih dahsyat daripada itu, atau sebaliknya *jebule ming rebutan balung*.

Jangan terlalu percaya kepada kecerdasan Anda sendiri, sebab senantiasa jauh lebih banyak yang tidak kita ketahui dibanding yang kita ketahui. “Siluman zaman” selalu lebih *complicated* dibanding kecanggihan otak kita. Kata orang setan itu beranak terus tanpa pernah mati—dan percayalah bahwa segala keberengsekan hidup ini, terutama di bidang politik, saya bisa bilang identik dengan yang disebut setan itu.

Yang lebih merupakan informasi dari informasi sebuah peristiwa biasanya justru adalah informasi di belakang informasi itu sendiri—di mana kaum wartawan dihadang oleh berpuluh tembok kendala untuk bisa mengungkapkannya.

Jangankan soal Krisis Teluk yang bermuara pada kata-kata mutiara “dalamnya laut bisa diduga, hati orang siapa tahu”. Sedangkan soal kalender porno saja umpamanya, jika pada suatu hari koran ribut menggunjingkannya, Anda tetap harus memperhitungkan secara “ekstrakurikuler” bahwa substansi persoalannya sebenarnya bukan itu.

Kalau Anda sedikit ikut bergidik, misalnya masalah “litsus” dan “keterpengaruhan”, tahukah kita apa pokok soal sesungguhnya? Mengapa ia dilahirkan dan untuk arah mana ia diwabahkan? Bahkan, petugas-petugas eselon wilayahnya belum tentu mengerti apa yang sesungguhnya mereka laksanakan.

Dari hari-hari ini kita semua sedang riuh rendah mendendangkan Musik Bangdut. Maksud saya: Bank Duta

Semua koran dan majalah meliputnya. Macam-macam dimensi permasalahannya serta ilustrasinya. Tetapi, tak akan sebuah media massa pun memancing pendapat kita tentang misalnya—adakah urusannya musik Bangdut itu dengan Golkar dan Pemilu '92?

Pengetahuan kita tak sampai 24 persen[]

Pengemis dan Perampok

“**I**nilah penyakit bangsa Jawa yang belum sembuh sampai kira-kira satu abad lagi. Tolong kata-kataku berikut ini kalian pakai sebagai teropong untuk melihat sendiri keadaan-keadaan di sekitar kalian dan di dalam diri kalian sendiri,” tutur Kang Guru.

“Di bidang kesejahteraan ekonomi, kesiapan utama mereka adalah tirakat seprihatin-prihatinnya atau kaya serakus-rakusnya. Untuk itu, mereka belajar bagaimana merampok, mencuri, atau mengutil; kemudian kalau sudah tak ada peluang untuk itu mereka akan mengemis. Atau sebaliknya, mereka mengemis-ngemis dulu, dan kalau sudah terbuka kesempatan, mereka akan mulai praktik mencuri dengan cara yang amat halus maupun yang terang-terangan, hina, dan memalukan.”

Semua yang mendengarkan seperti ditikam-tikam dadanya.

“Di bidang kekuasaan dan politik, mereka hanya siap membawahkan atau dibawah, alias menekan atau ditekan, *atawa* menindas atau ditindas. Sangat sukar bagi mereka untuk mengambil posisi egaliter dan demokratis.”

Siapa tidak tersinggung mendengarnya? Harga diri manusia mana yang tidak merasa direndahkan oleh pernyataan semacam ini?

“Di bidang mental dan psikologi, mereka terlalu gampang terpeleset untuk sombong pada situasi tertentu dan minder pada situasi yang lain. Manusia Jawa punya kecenderungan untuk terombang-ambing antara angkuh dan kurang percaya diri; meskipun mungkin itu berlangsung hanya diam-diam dalam diri mereka.

“Bayangkan, betapa indah ketika tiga kecenderungan itu bergabung dan bekerja sama membangun ciri kepribadian”

“Sebentar, Kang Guru!” salah seorang memotong dengan suara keras. “Apa yang Kang Guru tuturkan itu adalah pernyataan yang sangat serius. Kang Guru harus mempertanggungjawabkannya. Pertama, apakah Kang Guru seorang pakar yang punya keabsahan untuk menyatakan seperti itu? Apakah Kang Guru sudah mengadakan penelitian? Apa metodologi yang Kang Guru pakai? Di negeri ini ada ribuan doktor dan profesor cendekia, dan belum pernah seumur hidup saya mendengar pernyataan yang menghinakan semacam itu!”

“Kata-kata Kang Guru itu sangat membahayakan!” sambung seorang yang lain. “Itu contoh dari sikap yang tidak bisa menghargai sesama bangsa sendiri. Itu bisa meresahkan ketenteraman bersama. Dan seandainya pernyataan Kang Guru itu benar, mestinya Kang Guru punya kearifan untuk tidak usah mengemukakannya secara eksplisit seperti itu. Kita tidak boleh asbun!”

Kang Guru tertawa mendengar protes itu. Namun, matanya tetap menyala-nyala dan dia menjawab: “Dua tanggapan kalian ini secara tepat menggambarkan lanjutan dari pernyataan saya. Sikap kedua kalian adalah contoh konkret dari apa yang saya kemukakan.”

“Kau ...!” Kang Guru menunjuk penanggap pertama, “tidak pernah percaya kepada diri sendiri, tidak yakin bahwa kalian bisa berpendapat sendiri, bisa mengadakan pengamatan sosial sendiri, bisa menilai, dan menyimpulkan sendiri. Bahwa ternyata kesimpulanmu salah, itu kasus yang sama saja dengan yang terjadi pada para dokter dan profesor. Mereka juga sangat mungkin salah, dan memang tidak dilarang untuk salah. Setiap penilaian boleh dilakukan, setiap pendapat sunnah untuk dinyatakan, kemudian terserah kepada orang yang mendengar-

kannya, apakah menyikapinya secara dewasa dan matang, ataukah menelannya bulat-bulat tanpa mengunyahnya”

“Dan kau,” katanya kepada penanggap kedua, “sangat potensial untuk menjadi penguasa yang kerja utamanya membungkam mulut orang dengan alasan yang mewah-mewah tentang ketenteraman sosial. Kau sangat berbakat untuk menjadi penguasa yang sukanya menutup-nutupi kenyataan dengan bungkus yang dihias-hias.

“Tapi, kali ini kau belum bisa menjadi penguasa yang sukses seperti itu, sebab kau belum memiliki otoritas konkret, belum punya senjata dan alat-alat produksi kekuasaan sejarah. Dan kalau sampai beberapa tahun lagi kau belum juga punya itu semua, maka siap-siaplah menjadi manusia dengan mental pengemis. Demikianlah memang jenis mental kalian. Tadi kau merendah-rendahkan tamu kotor kita ini, sekarang kau sangka dia utusan Nabi Khidhir ...!”[]

Gemblak

Ketika saya belajar di pesantren, lebih 20 tahun silam, sempat sekali saya diperkosa. Saya lari terbirit-birit, kemudian termangu lama sekali di kamar mandi. Untunglah tindak kriminal senior saya itu belum begitu jauh. Sebentar saja rasa *shock* yang saya alami. Sesudahnya secara mental saya merasa gagah, dan secara sosial saya merasa dibukakan pintu untuk memungkinkan tumbuhnya daya berontak di dalam diri saya terhadap segala hal di pesantren yang selama ini saya terima secara baku.

Misalnya, saya jadi tahu segala ilmu itu relatif, kedewasaan manusia tak usah diagung-agungkan, dan saya boleh melawan apa yang menurut akal saya memang perlu dilawan. Bahkan, pesantren bukan kerajaan para malaikat, bahwa guru dan kaum senior bukan nabi yang *ma'shum* atau terpelihara dari kesalahan dan kejahatan, bahwa kosmos, semesta, dan dunia ini terletak di dalam diri saya sendiri. Juga bahwa kalau selama di pesantren, kami dilarang membeli sate di warung sebelah, tidaklah berarti sate itu haram secara agama. Dan yang terpenting dari semua itu: Sang Pemerkosa tidak pernah sah lagi mengungkapkan satu biji kata kebenaran pun di depan saya.

Sebelum di pesantren, ada setahun saya bersekolah dasar di desa, di mana pesantren bersemayam. Dan waktu satu tahun lumayan cukup

bagi saya untuk sedikit membaui atmosfer *gemblakan*—sebut: homoseksualitas—yang memang menjadi tradisi di wilayah tersebut.

Anak-anak lelaki belasan tahun yang cantik dan manis dipelihara oleh para warok, dimandiin sampai mengkilap kulitnya, dikasih pakaian rapi, rambutnya diminyaki sampai klimis, dikasih jam di tangannya, dan digandeng ke mana-mana. Tentu saja saya tak punya data tentang detail dari pergemblakan regional itu. Tetapi, jelas warok bertindak sebagai lelaki dan si gemblak mungil itu sebagai wanita.

Berbagai referensi sejarah pribadi saya—dari gemblak hingga perkosaan—membuat saya lebih merasa hidup selama di pesantren. Anda tahu di pesantren itu para santri hanya boleh omong bahasa Arab atau Inggris. Boleh juga bahasa Jepang dan Polandia, tetapi jangan satu kata Indonesia pun—apalagi bahasa daerah—pernah Anda ucapkan. *Jasus*, atau intel, beredar di mana-mana—jangan-jangan Anda sendiri adalah Sang Jasus itu. Satu kata bahasa Indonesia dari mulut Anda, berarti Anda menyapu gedung pertemuan. Dua kata, Anda mesti menimbakan sekian puluh santri. Dan sampai tiga kata: botaklah kepala Anda. Itu bagus. “Kami,” kata Pak Kiai, “tak memberi kalian ilmu, melainkan sekadar alat untuk mencari ilmu. Ilmu tak bisa diberikan. Ilmu hanya bisa dicari dan ditemukan sendiri.”

Mengapa saya ceritakan soal itu? Untuk memberi bandingan bahwa kalau Anda sampai mencuri atau berkelahi: hukumannya tak hanya berbotak ria dan diarak keliling pesantren, tetapi “gulung tikar, angkat koper”, alias *Go (to hell) home*.

Dan “berkat” kasus pemerkosaan itu, saya menjadi tidak lagi segan-segan untuk berkelahi. Sekilas saja ada seorang yang menampakkan “rasa senang” kepada saya, langsung saya terjang dengan loncatan kaki—seberapa besar pun dia. Dan *Qismul Amn*, Departemen Pertahanan dan Keamanan Pesantren, sama sekali tidak bisa mempersalahkan saya kecuali otak mereka kudisan. Perkelahian seseram apa pun tetap kalah besar substansinya dibanding pemerkosaan. Sejak saat itu, saya sungguh-sungguh jihad fisabilillah mempertahankan harkat kemanu-

siaan saya. Kalau perlu saya sangu batu atau sebungkus *rawe*, yang amat bikin gatal itu.

Memang kemudian saya *kicked out* dari pesantren, tetapi sama sekali bukan karena pemerkosaan, melainkan karena kami berdemonstrasi. Saya tidak membenci kaum homoseksual, gemblak, atau *mairil*. Saya hanya benci kepada konsep banci itu sendiri. Saya mencoba memahami, meskipun ketika diperkosa di pesantren: rasa terhinia saya terletak pada posisi saya yang dianggap *layyin*—begitu istilah di pesantren—yang kira-kira berarti lemah, *klemak-klemek*, “anak putri”.

Di Yogya, kemudian saya malah punya cukup banyak kaum *layyin*. Di antara sekian yang pernah menyatakan cinta kepada saya adalah kaum wadam. Ada satu yang istimewa, mantan hakim, yang pada ulang tahunnya menjelaskan panjang lebar dan rasional ilmiah tentang dirinya; sekarang dia menjadi ustadz dan tangan kanan seorang kiai di sebuah pesantren di Yogya Utara.

Di Yogya itu pula, di salah satu bagian dari Indonesia yang modern dan makin gegap gempita perubahan-perubahan perilaku budaya masyarakatnya, saya makin harus sanggup menjawab berbagai pertanyaan tentang apa dan siapa sesungguhnya mereka ini. Kita tidak bisa berhenti memasrahkannya kepada klise kutukan kepada “kaum Luth” yang malang. Di dunia yang mengelus-elus prinsip demokrasi dan maniak kebebasan pribadi; kaum Luth itu makin gencar memperjuangkan eksistensi sosialnya. Mereka ingin diakui sebagai gejala yang sah dari kehidupan. Mereka ingin diakomodasikan tidak saja oleh undang-undang, tetapi juga oleh kebudayaan dan kemanusiaan.

Siapakah kaum wadam? Seperti juga siapakah sebenarnya lelaki dan siapakah perempuan? Tidak subjektifkah pandangan bahwa percintaan dan persenggamaan lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan adalah “kelainan”?

Ilmu psikologi berusaha menerangkannya dan agama—selama ini—hanya dimintai fatwa segi hukumnya. Apakah agama tidak punya ilmu yang sanggup menjelaskan hal-hal tersebut? Apakah orang menjalani syariat agama sekadar untuk mengerjakan peraturan dan tidak

untuk mencari ilmu? Kalau hanya “aturan”—sehingga dibedakan dengan ilmu—maka agama apa pun janganlah menyebut diri sebagai *nûr*, sebagai cahaya, sebagai penyuluh.

Celaknya saya bukan pakar agama maupun psikologi. Jadi, susahlah bagaimana menjawab pertanyaan saya sendiri. Bisakah kaum Luth itu sendiri menjelaskan sikap sesungguhnya mereka. Dan kaum *layyin*, para wadam? Berkenankah kaum homoseksual menjelaskan fenomena mereka, dan bukan sekadar menuntut hak? Apakah Anda menuntut saya untuk memakai metode empiris dalam meriset dunia Anda?

Kabarnya ada yang bernama *ruh*. Itu semacam nukleolus dan kemakhlukan manusia. Kabarnya pula ruh itu nongender. Tak pria tak wanita. Ruh itu titik persambungan kita dengan Allah. Dan Allah itu sendiri bukan lelaki bukan perempuan. Pantas si Semar, “tuhan”-nya orang Jawa, juga tak pria tak wanita. Allah Mahamerdeka dari genderisme.

Dimensi agak luar dan nukleolus itu bernama *psiche*. Pada dimensi ini mulai ada “friksi”, ada anasir yang kita anggap kelelakian, ada anasir kewanitaan, ada juga anasir netral atau variabel-variabel lain yang kabur identifikasinya.

Tatkala dimensi *psiche* itu dirakit dengan suku cadang *bios*, maka kelelakian atau keperempuan muncul serta lebih “melembaga”. Saya disebut lelaki tulen hanya karena saya punya segumpal alat produksi dan sepucuk senapan biologis.

Namun, lantas ada rakitan-rakitan yang *mogol* atau *disorganized*. Tubuh lelaki tulen, tetapi mental dan naluri wanita. Atau, tubuh wanita tulen, tetapi kecenderungan watak nge-*tomboi*. Lebih *mogol* lagi kalau alat vital kelelakian terlalu mungil, atau malah rangkap. Namun, jelas ada beda yang serius antara “lelaki” dengan “kelelakian” dan “wanita” dengan “kewanitaan”. Selama ini belum pernah kita merumuskannya secara jernih dan adil; kita hanya menyerahkannya kepada tradisi budaya. Misalnya keberanian, kegagahan, sportivitas, dianggap mewakili unsur kelelakian. Sementara kepengecutan, kelembekan, atau kelicikan, dianggap merupakan unsur kewanitaan. Orang yang tidak

fair, kita sebut tidak jantan. Jelas ini subjektivitas dari superioritas budaya kaum lelaki. Para ahli bahasa, para pakar psikologi, dan kebudayaan, perlu bekerja membenahi ketidakadilan ini.

Kalau kita kembalikan ke perspektif *psiche*: kita menjumpai bahwa setiap lelaki juga memiliki unsur kewanitaannya, juga setiap wanita memiliki unsur kekelakian. Kelakian dan kewanitaannya adalah potensi yang merupakan manifestasi dari ruh. Penyuburan atau penguburan potensi itu tergantung mekanisme budaya sejarah.

Berkata seorang kiai: “Di zaman Fir’aun, setiap anak lelaki dibunuh. Di zaman Fir’aun modern, lelaki tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah kekelakian, kejantanan.” Anda bisa jumpai itu tak hanya dalam mekanisme “politik besar”, tetapi juga dalam hubungan sosial sehari-hari.

Gaya *dance* dalam *performing art* tertentu cenderung kefeminin-femininan. Kalau Anda memasuki “kelas sosial” tinggi atau menengah tertentu, salah satu simbol ungkap budaya yang terpenting yang harus Anda ikuti adalah lagak-lagu kewanita-wanitaannya.

Bersamaan dengan itu, gejala budaya homoseksualitas juga meningkat. Apa yang saya ingin kemukakan adalah bahwa fenomena kewadanan dan homoseksualitas—pada suatu saat—dipahami tidak terutama oleh kodrat, tetapi oleh dorongan atau rangsang-rangsang kultural. Tadi kita sebut kekelakian dan kewanitaannya itu potensi: persoalannya apakah ia dikembangkan proporsional atau justru dirakit berdasarkan ide surealisme campur aduk budaya manusia modern yang makin tidak mengenal siapa dirinya.

Jadi, tingkat hak dan keabsahan kultural bagi kewadanan atau homoseksualitas yang kodrati dengan yang karena dirangsang oleh lingkungan budaya, amat berbeda. Kalau kita nafsu banget pengen nge-homo karena atmosfer lingkungan, kita harus “mencuci”-nya dan mempertanyakan relevansinya. Tetapi, kalau memang karena sungguh-sungguh kodrat, itu namanya darurat.

Namanya saja darurat: itu “fenomena sempalan”. Kita dilarang makan babi, tetapi pada suatu hari di tengah hutan belantara kita kelaparan dan hanya ada babi, ya gimana lagi.[]

Pahlawan Konkret

Pahlawan menjadi seorang pahlawan karena dia telah memperbuat sesuatu. Tetapi, ada jenis pahlawan yang menjadi pahlawan justru karena dia tidak memperbuat sesuatu.

Seandainya dulu Tuhan menciptakan tidak hanya satu manusia lelaki pertama, melainkan dua—katakanlah *Adam* dan *Odom*—ada kemungkinan Odom menjadi pahlawan pertama dalam sejarah kemanusiaan karena dia *tidak* memakan buah kuldi.

Ketika Adam tergoda dan mencuri itu buah, Odom sedang tidur ngorok. Tidur itu cukup baginya untuk membuatnya menjadi seorang pahlawan, yang diperkenankan oleh Tuhan untuk tetap tinggal di surga, sementara Adam tercampak di bumi yang sunyi. Dan kita semua seandainya diberi kesempatan untuk memilih hendak menjadi anak turun siapa—tampaknya akan beramai-ramai mendaftarkan diri jadi turunan Odom. Daripada berjuang di bumi sebagai jenis makhluk yang suka bermusuhan, menipu, dan menumpahkan darah, mending tidur saja di surga. Nanti kalau bangun, main gaple atau *uro-uro*.

Terkadang sejarah manusia tiba pada suatu kondisi minimal di mana perbuatan baik bukan hanya tak diperlombakan, melainkan juga diremehkan dan diejek. Orang yang bersikeras berbuat baik akan disebut “sok pahlawan”. Udara dirasuki kuman tertentu yang membuat

setiap orang yang menghirupnya menjadi *gendheng*. Kalau ada satu-dua orang yang punya dayaantisipasi tinggi terhadap atmosfer *kegendhengan*, mereka akan justru dituduh *gendheng*.

Ketika itu, kriteria kepahlawanan menjadi kabur. Nilai tak menentu. Standarnya bisa digeser-geser atau dibolak-balik. Keburukan berpakaian kebaikan, kejahatan berpakaian kemuliaan, sementara kebaikan dan kemuliaan tak sempat mengurus wajahnya. Maling adalah orang yang paling seru berteriak “Maling!” Koruptor memperingatkan masyarakat tentang bahaya korupsi. Hukum dilanggar terutama oleh ahli-ahlinya. Lembaga yang paling tak berbudaya adalah yang mengelola kebudayaan. Orang memilih enak tak enak daripada baik dan tak baik. Orang menyembah kenyamanan dan menomorsatukan keluhuran. Tatanan ekonomi dipenuhi oleh monster dan kehevanan. Kemanusiaan dan agama merupakan permainan gundu pada saat-saat senggang. Para pengemis budiman duduk termangu-mangu di depan taman makam pahlawan, sambil bergumam kepada dirinya sendiri: “Apakah pada suatu saat kelak akan ada ralat sejarah dan makam-makam tertentu terpaksa dibongkar agar kebenaran bisa diletakkan pada tempatnya ...?”

Pada saat seperti itu, kita menatap seorang tukang bakso penjaja makanan-makanan kecil, tukang sol sepatu, atau manusia-manusia “kecil” sejenis itu—terasa betapa tinggi harkat kepahlawanan mereka atas kehidupan, lebih dari orang-orang besar yang selalu kita sebut namanya melalui koran dan televisi.

Si penjual bakso melata di gang-gang kampung hampir semalaman. Membunyikan “ting-ting-ting ...” kepada orang-orang yang hampir serentak berangkat tidur. Tindakan ekonomi yang bodoh, suatu demonstrasi keyakinan yang mutlak terhadap rezeki Allah.

Kalau dia memiliki cukup mentalitas maling, tak akan tahan dia berkeliling berjam-jam hanya untuk seribu dua ribu rupiah yang di pagi hari dia persembahkan kepada istri dan anaknya. Setiap kali dia berhenti mendorong gerobaknya, memandang setiap jendela yang terbuka sambil mengharapakan akan ada suara yang memesan bakso-

nya. Kemudian ketika suara itu tak muncul, betapa dia kecewa, dan entah beribu kali dia dilempari kekecewaan semacam itu. Dia menerimanya dengan ikhlas, sehingga tubuhnya tetap sehat untuk tetap terus berjualan.

Menjadi tukang bakso tidaklah cukup sama sekali untuk membuat seorang menjadi pahlawan. Tetapi, memilih berjualan bakso daripada maling atau mencopet atau mengemis, adalah sebuah kepahlawanan kemanusiaan yang tinggi.

Tukang bakso menjadi pahlawan karena dia pasti tidak melakukan korupsi dan merugikan rakyat banyak dan negara. Dia relatif tidak terlibat dalam tatanan struktur riba dan pengisapan. Dia juga tidak menuntut dihormati seperti seorang pejabat koruptor yang setiap bawahannya menundukkan muka dan membungkukkan badan. Dia juga tidak merasa pahlawan seperti banyak relawan sosial yang menjual kemiskinan rakyat. Tukang bakso itu menjadi pahlawan justru karena dia tidak melakukan banyak sekali dosa dan pengkhianatan yang secara sistemik atau personal dilakukan oleh sangat banyak orang di sekitarnya.

Seorang tukang bakso memberi pelajaran kepada orang-orang yang mampu berpikir bahwa selama ini yang kita abdi adalah ketinggian materi, hedonisme, posisi feodal, atau nilai-nilai lainnya. Kita tidak menomorsatukan kejujuran, kemuliaan, dan kebaikan. Tradisi budaya kita sehari-hari adalah *ngapurancang* kepada seorang bapak meskipun kita ketahui banyak melakukan pengkhianatan moral, sementara kepada seorang tukang bakso kita selalu *melihat ke bawah*.[]

Jojajan ... Jojajan ...

Para orangtua, ketika momong anak-anak mereka, suka “membahasakan” bunyi kereta api dengan ucapan “Tuiiii! Jojajan Jojajan Jojajan”

Sesungguhnya itu adalah pola mobilisasi orangtua kepada anaknya. Mobilisasi itu dilakukan untuk dua sisi kepentingan: pendidikan, tetapi juga kekuasaan.

Anda boleh menyebutnya sebagai politik kebudayaan, atau juga politik perekonomian. Bahkan, banyak dimensi lainnya juga.

Anak-anak dibiasakan untuk jangan suka jajan di luar, sebab di rumah telah tersedia makanan. Jajan ya jajan, tetapi sekadarnya saja. Maka, bunyi sepur itu merupakan politik kebudayaan yang mempersiapkan tradisi dan kepribadian tertentu dari sang anak.

Kebiasaan tidak jajan juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi orangtua. Celaka kalau anak suka jajan, sementara gaji pas-pasan. Apalagi kalau jajannya aneka warna: tidak hanya permen atau makanan kecil, tetapi yang mahal-mahal berdasarkan arus konsumtivisme dan hedonisme. Kalau anak-anak, sudah telanjur termanjakan oleh kebiasaan jajan yang aneh-aneh dan mahal-mahal, maka pada suatu hari bapak terpaksa melakukan korupsi demi “cinta”-nya kepada sang anak.

Pada era modern ini, di sekitar kita sudah jarang terdengar musik “jojajan ... jojajan” Pesatnya perkembangan teknologi membuat kereta api bukan lagi suatu *luxury*, suatu kemewahan pemandangan yang menarik hati anak-anak.

Dan ketika *Yogya Post* menyelenggarakan Seminar “Mengapa Pria Suka Jajan”, tiba-tiba kita tersadarkan bahwa ternyata yang suka jajan bukanlah anak-anak, melainkan para orangtua.

Gejala kaum tua jajan ini mungkin telah sedemikian seriusnya sehingga *Yogya Post* merasa perlu menyeminarkannya. Tempat-tempat jajan—dari makanan sampai seks—memang telah menjadi “sendi kehidupan modern” sehingga memang tersedia fasilitasnya di mana-mana.

Dalam seminar itu terungkap bahwa dunia prostitusi sesungguhnya paralel dengan dunia penindasan politik (hubungan antara kekuasaan negara dan rakyat), dengan dunia perusakan alam (hubungan antara manusia dan alam); padahal Allah mengajarkan bahwa semestinya antara manusia dan alam, antara pengusaha dan rakyat, serta antara pria dan wanita—mestilah dilangsungkan mekanisme kooperatif, selain menyelamatkan dan memberi manfaat. Seperti demikian Sang Khaliq yang berposisi “pria” bersikap terhadap makhluk yang berposisi “wanita”.

Maka, kalau para pria jajan mengeksploitasi wanita yang sebagai daging, tentu terjadi bersamaan dengan umat manusia yang melanggar ekosistem, serta sama dengan penguasa yang memerkosakan rakyatnya. Dengan demikian, terapi bagaimana mengurangi kebiasaan jajan kaum lelaki, harus bersifat makro dan komprehensif, terkait dengan seluruh gejala nilai dalam politik, perekonomian, hukum, dan kebudayaan.

Persoalannya, sekarang: dalam motivasi apa *Yogya Post* menyelenggarakan seminar ini?

Jika di baliknya terkandung maksud untuk secara makro menyembuhkan “penyakit prostitusi seksual, prostitusi politik, serta prostitusi ekologis”—maka alangkah mulia *Yogya Post*.

Akan tetapi, kalau tema seminar itu dipilih hanya karena mem-persuasikan diri terhadap arus “pasar kebudayaan”, remehlah *Yogya Post*.

The answer, my friend, is blowing in the wind[]

Jajan Itu “Pencarian”

Sangat sedikit orang yang tak suka jajan. Sejak masa kanak-kanak, ketika kita mulai masuk sekolah, salah satu kenikmatan utama dalam “budaya sekolah” adalah jajan. Orangtua “wajib” memberi *sangu* kepada kita, karena kebiasaan jajan itu sudah merupakan kebudayaan.

Kemudian kita menjadi besar, dan sesekali terperenyak menyadari betapa masyarakat kita ternyata tergolong jenis makhluk Tuhan yang dihinggapai “jajan mania”. Warung-warung mungkin saja memiliki omzet yang membuatnya terletak di baris-baris awal skala perputaran uang dalam perekonomian kita.

Sering kali kalau melintas di jalanan dan menjumpai orang berjualan makanan di mana-mana, terpikir di benak kita: “bangsa kita ini, kayaknya, kerjanya makan melulu”

Kalau sesekali pergi ke luar negeri, menghayati kehidupan di sana beberapa lama, yang paling tajam terasa adalah kita tidak bisa *mat-matan* di warung. Ada sih *coffee shop*, *bar*, *pub*, atau kios-kios *snack* dan *soft drink* di pojok sana-sini, tetapi “budaya makan minum” di luar Indonesia tetap saja kalah hangat dibanding yang kita miliki di negeri sendiri.

Terkadang, pikiran ini sampai juga pada semacam asumsi, jangan-jangan kreativitas bangsa kita yang paling konkret adalah di bidang makanan. Dari satu bahan mentah, ketela misalnya, bisa diciptakan puluhan jenis makanan. Kelak kalau kebudayaan kita sudah benar-benar industrial, yang kita cemaskan ialah apa masih bisa cari *wedang sekoteng* atau kopi *nasgithel*. Sebab, makin tinggi tingkat budaya sebuah warung, semakin encer kandungan teh dan kopinya. Perubahan dari warung ke restoran adalah pengeceran bahan minuman, penghambaran, dan deintensifikasi kenikmatan.

Pandai Berepigon

Di bidang-bidang selain makanan, kita baru pandai berepigon, meniru, meneruskan, atau menanganpanjangi kreativitas *sedulur-sedulur* kita yang kreatif di luar negeri. Industri pesawat IPTN mungkin bisa mengagumkan, tetapi secara keseluruhan itu bukan kreativitas sendiri. Habibie memang menyumbangkan sistem sayap pesawat, misalnya pada Airbus 300-600 yang membuatnya lebih *safe* waktu *landing*, tetapi itu parsial. Di bidang industri mobil, orang Jawa terkenal justru bukan bagaimana berinovasi menciptakan sistem otomotif baru, melainkan mengolah kembali barang yang sudah rongsokan, dibikin bisa jalan kembali.

Akan tetapi di bidang makanan, jangan coba-coba melawan bangsa Indonesia. Dari yang paling elite hingga yang paling proletar, makanan dikreativisasi. Kita bisa menyiapkan multimenu yang setan dan jin pun mungkin turut mengeluarkan air liur. Namun, pada saat lain kita juga siap makan eceng gondok, dan pepaya mentah, atau kalau perlu—ketika *ndadi*—kita makan kaca dan silet.

Maka, tradisi jajan adalah bagian yang memang sangat hidup dari dialektika kreatif bidang budaya makan itu.

Mengapa Jajan?

Meskipun jarang, sebaiknya Anda memang pergi jajan. Sama dengan kalau Anda membuat rumah, Anda buka sebagian dindingnya untuk dijadikan pintu dan jendela.

Mengapa jajan? Karena manusia memang “di-set up” oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dinamis. Makanan utama manusia sesungguhnya adalah kemungkinan. Rumah, lemari es, meja makan, ranjang tidur, lebih menunjukkan diri sebagai kepastian. Maka, penghuninya merasa haus akan sesuatu yang lain, yakni kemungkinan di luar rumah.

Allah konsisten pula. Dia ciptakan gairah di dada manusia untuk “menguak langit”, untuk memandang ke luar jendela, dan mungkin untuk beranjak ke luar pintu. Pada saat yang sama, Dia sodorkan beribu fasilitas di luar rumah itu, dan Dia izinkan pula untuk menikmati sampai batas tertentu. “Makanlah dan minumlah,” demikian firman-Nya, “hanya saja, jangan berlebihan”.

Kata-kata Allah ini diungkapkan tidak terutama sebagai peristiwa hukum, tetapi juga berkonteks kesehatan dan keselamatan hidup. Artinya, dalam perintah dan larangan Tuhan, yang terpenting bukan boleh dan tidak bolehnya, melainkan petunjuk tentang keselamatan dan ketidakselamatan.

Allah membukakan kebebasan bagi manusia, karena kebebasanlah satu-satunya medan dan cara bagi manusia untuk mempelajari dan menerima keterbatasan. Makan dan minumlah, tetapi kemerdekaan untuk makan dan minum itu sudah tidak kita butuhkan sesudah kita habiskan dua piring nasi. Kita menjadi mengerti, keterbatasan adalah justru sasaran yang hendak dicapai kemerdekaan. Dan itulah satu-satunya metode penyelamatan hidup manusia.

Kalau kemerdekaan tak bermakna keterbatasan, apakah Anda akan makan dua puluh piring sehari? Karena api keinginan di dalam diri kita memang siap makan beribu-ribu piring nasi, beribu-ribu hektare tanah, bermiliar-miliar uang, kedudukan abadi, serta apa saja. Namun,

guru kita bukanlah keinginan, melainkan kapasitas perut yang *pra-saja*.

Perut tidak meminta macam-macam, ia hanya memerlukan sejumlah unsur yang diperlukan bagi kesehatan tubuh, lidah kita saja, baik lidah di mulut maupun “lidah budaya” yang menyandera dan menyeret kita untuk pergi ke bermacam-macam warung untuk mendapatkan berjenis-jenis makanan dan minuman. Sedangkan perut tidak pernah membedakan *gethuk* dengan *hamburger*.

Api Kehendak

Kalau kemerdekaan bukan merupakan pelajaran yang arif tentang batasan-batasan, apakah Anda ingin diri dan hidup Anda terbakar api kehendak? Sebab, kita semua ini ingin menjadi presiden sekaligus konglomerat sekaligus pakar ilmu sekaligus seniman besar sekaligus nabi: api keinginan sanggup melahap semua yang bisa dilibatkan dalam lingkaran keinginan.

Anda inginnya tidak segera mati, bukan? Kapan mau dipanggil Tuhan? Nanti pada usia 60 tahun? Kita jawab: “*Mbok*, ya 65.” Oke, 65. Kita *ngenyang* lagi: “Ya, syukur kalau 70.” Baiklah 70. Kita bermanja lagi: “Saya akan sangat berterima kasih kalau bisa hidup sampai usia 80 tahun, syukur-syukur 100 tahun, atau entah berapa sehingga bisa masuk buku rekor dunia sebagai orang tertua, serta bisa menikmati hidup sepuas-puasnya. Lebih *sip* lagi kalau pada usia seabad, saya masih belum kempong, masih belum impoten, dan belum keriput”

“Api” itu sesungguhnya selalu punya naluri untuk menjilat hingga ke kosmos tak terhingga. Ia memiliki hakikat untuk menemukan kembali sumbernya, yaitu cahaya.

Orang pergi jajan, orang ingin variasi, orang ingin tampil beda, orang ingin sesuatu yang lain, orang ingin penemuan, inovasi, invensi, dan seterusnya—pada hakikatnya karena sukma manusia itu bergerak mencari sumbernya.

Namun, “jajan” yang kita perbincangkan ini “jajan” yang mentradisi dalam kehidupan masyarakat hanya disadari sebatas konteksnya sebagai kebudayaan sehari-hari yang “ringan”, dan “permukaan”. Jajan hanya dijalani, dihayati, dan dipahami sebagai “peristiwa rekreasi” dan “peristiwa makanan”.

Jajan dilakukan manusia—sesungguhnya—sebagai peristiwa kejiwaan, tetapi jiwa manusia tak bisa mengambil jarak dari dirinya sendiri, sehingga peristiwa itu tidak disadari sebagai peristiwa kejiwaan.

Memang, peradaban manusia berulang-ulang mengalami degradasi dari ruh ke filosofi dan akhirnya ke materi. Penurunan derajat dari “laku” ke “makanan”. Tetapi, Anda tak usah pusing. Kalau mau pergi jajan, ya jajan saja![]

Desa Benyamin S

Ini yang namanya agen pembangunan. Mubalig kemajuan. Makelar modernisasi. Pembawa ide-ide baru, gagasan-gagasan *gres*. Kalau toh tidak dicetuskan sendiri, ya setidaknya-tidaknya *kulakan* di kota lantas dibawa ke desa.

Dalam suatu rapat warga di balai desa, Kang Guru mengusulkan: “Desa kita harus punya slogan kehidupan yang khas. Kota-kota sudah maju, desa tak boleh ketinggalan. Justru orientasi utama pembangunan nasional itu adalah kemajuan pedesaan. Lha, kita orang-orang desa tak usah menunggu *dawuh* dari kota. Kita harus bisa kreatif mengejar ketertinggalan kita. Syukur melampaui desa-desa lain dalam persaingan menuju masa depan yang gemilang, adil, makmur, merata, *gemah ripah loh jinawi, ing ngarso sung tulada, ing madyo mangun karso tut*”

“Bagus, bagus, Kang Guru!” Pak Kades memotong. Terpaksa, karena tampaknya kalimat-kalimat Kang Guru tak ada tanda-tanda akan berakhir. “Itu usulan sangat bagus. Tetapi, tolong segera kemukakan apa usulan yang Kang Guru maksudkan!”

Pertemuan itu menjadi hening sesaat.

Semua orang sudah hafal. Kang Guru ini kalau sudah omong, tak habis-habis. Sebaliknya kalau sudah diam, seluruh dirinya ikut diam

berkepanjangan. Tak ada yang bisa memancingnya omong barang seucapan. Bahkan, tak ada yang sanggup membuatnya tersenyum barang sesungguh. Pokoknya, Kang Guru ini sejenis keledai. Kalau dia mau jalan, ya jalan. Kalau dia mau berhenti biar Tuannya mencambuknya sampai habis sepuluh *pecut*, ya tetap diam saja. Nanti kalau si Tuan sudah putus asa dan duduk *menggeh-menggeh*, mendadak saja dia jalan sendiri.

Lha kalau ada rapat warga begini, pas giliran Kang Guru kambuh penyakit omongnya, semua jadi susah. Kang Guru *nerocos* seperti orang kesurupan, tetapi lima menit kemudian lupa dan seolah-olah tidak tahu bahwa barusan dia omong macam-macam.

Salah seorang tetangganya nyeletuk: “Mau usul apa lagi itu! *Wong* dia kerja bakti saja sering malas. Kalau pas hari Minggu ada-ada saja alasannya. Terkadang pura-pura belum selesai *wiridan*. Terkadang mengaku tidak berani melakukan apa-apa karena pas hari nahas Rasul”

“Begini!” Tiba-tiba, terdengar suara Kang Guru keras sekali. Seluruh ruangan terkesiap. “Semarang Kota Atlas! Solo Berseri! Yogya Berhati Nyaman! Klaten Bersinar! Sleman Sembada! Lha, desa kita apa? Apa”

O, itu rupanya yang dia usulkan. Bikin slogan.

“Saya pikir,” berkata seorang anak muda terpelajar yang kebetulan pulang dari kota kuliahnya dan ikut rapat warga. “Saya pikir Kang Guru akan mengusulkan ide-ide kreatif. Misalnya, bagaimana membuat semacam UB. Usaha Bersama, atau Koperasi Simpan-Pinjam dengan sistem *collective snowing ball* atau gimana gitu. Mengatasi anak-anak yatim. Menolong keluarga-keluarga yang fakir. Menggalang lingkaran kebersamaan ekonomi antarwarga yang mencoba melepaskan mereka dari sindrom kaya makin kaya, miskin makin miskin. Pokoknya, usaha-usaha swadaya masyarakat yang sungguh-sungguh milik rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebab, kabarnya Kang Guru tergolong manusia langka yang selalu punya gagasan-gagasan indah”

Akan tetapi, ternyata usulan Kang Guru tidak ditanggapi dingin baik oleh hadirin maupun oleh Pak Kades sendiri dan pamong-pamong lain. Pembicaraan rapat segera terhanyut pada topik itu dan makin lama makin melupakan tujuan-tujuan semula yang sebenarnya lebih konkret.

“Ini baru usulan konkret!” Pak Kades terperenyak. Matanya berbinar-binar. “Ya, ya! Kenapa tidak dari dulu-dulu kita punya pikiran begitu? Saudara, sebenarnya sering juga terlintas-lintas di pikiran saya untuk itu meskipun samar-samar sekali. Bayangkan nanti kalau kita sudah punya slogan yang pas. Pak Camat pasti akan kaget dan sedikit malu. Lha *wong* kecamatan saja belum punya, kok. Nanti kita tulis di papan-papan dan dipasang di semua sudut desa, pertama-tama yang dia baca adalah slogan kita. Dia akan merasa iri, dan nanti pasti akan bikin juga di desanya sendiri. Percayalah Saudara-Saudara, nanti semua desa akan meniru kita!”

Seluruh ruangan menjadi penuh suara. Semua warga *bergemere-mang*. Bahkan, di sana-sini tampak orang-orang pada merenung. Tentu sedang mencari ide. Pak Lurah sendiri kelihatan betul matanya agak menerawang. Cari inspirasi. Memang bukan hak para gubernur, bupati, atau wali kota saja untuk merenung. Slogan-slogan yang terpampang di setiap kota, sesungguhnya adalah hasil renungan mendalam para pemimpin. Bermalam-malam mereka mengkhususkan waktu untuk itu, tanpa boleh diganggu oleh anak istrinya. Kalau buntu, baru mereka minta tolong para stafnya untuk juga merenung. Atau, sebagian yang lain melakukan shalat Istikharah untuk memohon petunjuk Allah Swt. mengenai slogan apa yang paling tepat bagi wilayahnya.

Namun, si anak muda itu menggerundel kepada temannya. “Kok, kita sibuk dengan slogan-slogan. Dari dulu begitu-begitu terus. Padahal, slogan biasanya berhenti sebagai slogan”

“Ah, nggak selalu!” tanggap temannya. “Buktinya Surabaya, Solo, dan tempat-tempat lain, sungguh-sungguh melaksanakan slogannya meskipun tidak sempurna betul.”

“Slogan tentang kebersihan, misalnya? Kebersihan fisik ‘kan yang dimaksud? Kenyamanan, ketenteraman, kesehatan, yang toh bermakna fisik juga? Padahal, kebersihan dan kesehatan itu luas. Bagaimana kehidupan bisa disebut bersih dan sehat kalau ekonomi rakyat kecil masih seperti raja, kalau sistem bocor sana-sini, kalau korupsi, suap, monopoli, nepotisme”

Suara anak muda itu mendadak terhenti oleh suara sangat keras dari Kang Guru. “Pak Kades!!! Saya sudah temukan ide. Slogan desa kita adalah *Benyamin S. Bersih, nyaman, indah. S-nya terserah. Mau sumringah, sembodo*”

“Sableng!” celetuk si anak muda.[]

Posisi Ekosistem Keraton Yogya

Pentingkah pertanyaan seperti ini: “Mengapa keraton Yogya dipilih didirikan di lokasi tempat mana ia berdiri sekarang? Mengapa tidak satu kilometer di sebelah utara atau sisi baratnya, misalnya? Atau, mengapa tidak didirikan di lereng Gunung Merapi, umpamanya, agar lebih romantis? Apa dasar pertimbangan yang dipakai untuk memilih tempat itu? Kebetulan saja? Karena selera? Sebab adanya jatah tanah memang hanya di situ? Atau, ada semacam perhitungan ekologis (ekosistemik) tertentu, yang meskipun mungkin kita sebut tradisional karena berbeda dengan ilmu lingkungan hidup era modern?”

Penting pulakah Anda menanyakan mengapa Tuhan, melalui Nabi Ibrahim, menentukan Ka'bah didirikan di tempat itu? Adakah karena kebetulan saja kampung Ibrahim memang di situ? Mengapa pula Tuhan menentukan Ibrahim lahir di negeri dan tanah itu, dan tidak di Timor Timur misalnya? Bahkan, mengapa pula seluruh nabi hanya muncul di Timur Tengah? Mengapa tak dibagi: Cina punya satu nabi, India punya satu nabi, Jawa punya satu nabi, dan seterusnya?

Ini pertanyaan bukan untuk “menggugat” Tuhan, melainkan justru untuk membuka pintu rahasia ilmu dan kehendak-Nya.

Allah tidaklah main-main ketika menciptakan makhluk-makhluk-Nya. Bahkan, seekor nyamuk pun Dia ciptakan dengan konsep dan keilmuan yang jelas. Dia menyuruh kita bersembahyang dengan bahasa Arab, tentu dengan landasan ilmu, meskipun sekian abad para antropolog dan ilmuwan bahasa belum mampu menguaknya.

Pangeran Mangkubumi memilih lokasi itu untuk mendirikan Keraton Ngayogyakarta ningrat pun tidak tanpa ilmu. Temuilah biksu-biksu tertentu di Thailand atau Tibet, dengarkan apa uraian mereka tentang tanah di selatan Gunung Merapi. Mari jernihkan kembali garis dari keraton ke Tugu dan puncak Gunung Merapi: garis itu kini justru menjadi “garis industrialisasi dan konsumtivisme”.

Ditanam beringin dan sawo kecil. Disusun garis-garis, arah-arah, bentuk-bentuk. Semua bukan tanpa pertimbangan dan perhitungan. Bahkan, halaman sekitar Candi Prambanan sebaiknya Anda biarkan tak berumput, kalau ingin memasuki medan makna transformasi spiritual yang disediakan oleh “arsitek”-nya dulu.

Pada masa modern, orang membangun rumah, menentukan lalu lintas angin, letak pintu dan jendela, konstelasi ruangan-ruangan dengan pertimbangan kenyamanan modern menarik garis otonomi dari dimensi-dimensi kosmologis yang sesungguhnya terkait dan metabolistik satu sama lain. Kalau Anda menatap seorang tua berdiri di sisi daun jendela rumah *real estate*, dengan seorang tua berdiri di sisi daun jendela rumah “murni Jawa”—Insya Allah, kalau Anda masih memiliki kepekaan psikokosmologis, akan terasa sesuatu yang sangat berbeda.

Bahkan, masih mampukah Anda merasakan beda antara ranjang atau dipan yang ada *longan*-nya dan yang tidak?

Pada masa modern, kita tidak mengembangkan ilmu untuk mengadakan perjalanan ke dalam diri sendiri. Perjalanan ke dalam ruang batin, yang pada masa silam merupakan acuan dasar dari segala macam konsepsi budaya, termasuk konsepsi arsitektur. Kosmos batiniah manusia modern tak menentu banggunya, bagaikan *omah suwung*, dan oleh karena itu sangat digemari para setan dan Iblis, yang akhirnya

berpesta pora mengendalikan budaya manusia, politik manusia, hukum manusia, dan bahkan alternatif selera keilmuan manusia.

Maka, inilah pentingnya kita bertanya dan mencoba menjawab kembali: Mengapa Keraton Yogya berdiri di situ? Apa hubungannya dengan kosmologi modernitas yang kini secara dahsyat mendera? Bahkan, apa jenis resistensinya terhadap letusan Gunung Merapi?[]

Surat Kedua

Ihwal “The Nation of Jathilan”



Masalah–Masalah Seni
dan Budaya

Realitas Sejarah sebagai Aktor

Selalu ada gejala transparan dalam keberlangsungan sejarah. Biasanya kita sebut arus bawah. Atau, mungkin Anda bisa memakai istilah—misalnya—*software* dari realitas. Perangkat lunak kenyataan.

Dalam dunia teater atau sandiwara, Anda harus peka terhadap apa yang tersimpan di balik sorot mata dan mimik wajah seseorang aktor, agar Anda bisa menjadi juri yang baik yang mampu mencandra substansi makna dari yang diaktikan oleh aktor tersebut.

Realitas sosial adalah juga aktor. Anda “dilarang” terlalu lugu menghadapi, memahami, dan menilainya. Anda harus punya “mata rangkap” untuk menangkap sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat.

Kalau membaca koran, menghadapi pola-pola informasi, mendengarkan pidato atau pernyataan, bahkan juga tatkala suatu peristiwa seolah-olah terpampang secara utuh di hadapan Anda: tetap harus disediakan mata rangkap itu.

Maka, betapa beratnya tugas ilmu pengetahuan. Betapa beratnya tugas “mata sejarah”. Betapa beratnya tugas pengamat. Betapa ilmu harus sangat dan senantiasa dinamis, harus sangat dan senantiasa mengembangkan cakrawalanya agar ia tidak “ditipu” oleh siluman-siluman realitas.

Peristiwa sehari-hari di kampung saja susah sekali melihatnya secara jernih. Pertengkaran antartetangga saja tidak gampang menyikapinya secara objektif. Apalagi menilai dan menyikapi perpolitikan nasional, perang teluk, tata dunia baru, serta segala informasi yang tiap hari mengepung kita.

Dan dekade sejarah yang kini sedang kita jalani adalah suatu fase zaman yang disebut orang “era informasi”.

Dari perspektif terurai di atas, kita menjadi tahu bahwa kemajuan teknologi informasi pada akhirnya tidak terutama terletak pada pencanggihan perangkat-perangkat informasi itu sendiri, tetapi terletak pada bagaimana daya kritis manusianya, pada mutu kita semua sebagai “makhluk informasi”.

Jadi, jauh lebih penting daripada mempelajari teknologi informasi, adalah meningkatkan kesanggupan untuk mengelola arus informasi itu dalam diri kita.

Sekali lagi: dalam komunitas kampung saja kita bisa keliru harus menyetujui siapa, harus memuji pihak mana, harus “mengutuk” si Palijo atau Pardikem. Apalagi peta-peta yang lebih besar dan lebih luas. Kita bisa keliru menilai yang salah penduduk atau gubernur atau konglomerat atau keseluruhan sistem yang berlaku. Kita bisa keliru menjunjung pihak yang semestinya dihukum, dan menghukum pihak yang semestinya didukung.

Dalam kasus hukum di negeri ini, terutama yang berkonteks politik, tanah atau hak asasi, kita sering terkurung dalam kekeliruan semacam itu.[]

Filosofi dan Norma Budaya

“Kulonuwun”

Ke dalam kubu-kubu perkampungan suku primitif pun, kita tidak bisa masuk begitu saja sebelum mengekspresikan—entah melalui simbol apa—keinginan untuk diterima.

“Kulonuwun” merupakan konsep pergaulan sosial yang telah ditemukan dan dikenal sejak manusia menjumpai dirinya hidup bersama orang lain. Konsep itu tidak memerlukan proses modernisasi atau era-era kesadaran budaya yang muluk-muluk untuk dilahirkan.

Ia adalah modus, adalah tali penghubung antarmanusia, yang terkait satu sama lain berdasarkan adanya kebutuhan, keinginan, cinta kasih atau mungkin permusuhan, antara kedua pihak.

Sebagai filosofi, sebagai gagasan, sebagai bentuk etika dan norma, “kulonuwun” bisa ditemukan oleh manusia cukup dengan menggunakan nalurinya ditambah sedikit potensi akal budinya.

Namun, jumlah manusia semakin lama semakin membengkak. Lingkaran komunitas yang terbentuk juga semakin luas, serta—dengan sendirinya—ruwet. Pergesekan pertalian dan perbenturan antarkepentingan manusia menimbulkan komplikasi masalah yang semakin lama semakin memerlukan jalan keluar.

Maka dari tahap ke tahap sejarah umat manusia, semakin berkembanglah filosofi, moralitas, dan norma “kulonuwun”.

Agama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing hidup manusia, firman-firman yang diturunkan dari zaman ke zaman, secara implisit maupun eksplisit memuat ajaran-ajaran tentang “kulonuwun”. Al-Quran umpamanya, sangat banyak mengandung ayat yang secara gamblang menuntun bagaimana seharusnya seseorang “berkulonuwun” ke wilayah orang lain.

Tentu saja firman bersifat universal, sehingga setiap lingkaran komunitas manusia selalu mencoba menerjemahkan ajaran-ajaran universal itu ke dalam format-format kultural setempat. Pedoman universal itu dikerjasamakan dengan khazanah filosofi autentik yang dimiliki oleh kebudayaan masing-masing.

Betapa ragamnya kemudian—kita saksikan—pola-pola kultur “kulonuwun”, bergantung pada skala konteksnya. “Kulonuwun” antar-tetangga berbeda dengan “kulonuwun” dalam konteks birokrasi, konteks politik, dan lain-lain. Bahkan, “kulonuwun tetangga” saja pun berbeda antara masyarakat suatu tempat dan masyarakat yang lain.

Apalagi sesudah ada “negara”: modus “kulonuwun” menjadi semakin ruwet dan ketat. Kita tidak bisa melompati pagar ke kebun penduduk Brunei Darussalam. Berjualan rokok itu tak menyalahi hukum, tetapi kalau kita berjualan rokok di Malaysia tanpa memenuhi norma-norma “kulonuwun” antarnegara, kita akan disebut “pendatang haram”.

Sangat panjang kalau ini kita uraikan satu per satu. Tetapi yang penting, untunglah negara kita ini luasnya bukan main, sehingga kita bisa mengembara bertahun-tahun jalan kaki dengan lumayan bebas. Asal kita membawa KTP, kita bisa meloncat ke Pulau Lombok, numpang tidur di gardu kamling sebuah dusun, atau ke Irian Jaya, ikut *nggandul* pohon bersama suku-suku terasing.

Kecuali ke Kedungombo, Boyolali, Jawa Tengah.

Anda tidak bisa tiba-tiba saja pergi ke tempat itu, turun dari kendaraan, naik ojek, mampir beli kopi dan rokok, numpang sembahyang di musala

Anda harus ke Semarang dulu. Menemui Pak Ismail, Gubernur Jawa Tengah, untuk mengucapkan “kulonuwun”. Itu pun belum tentu telinga Anda akan mendengar jawaban “Monggooooo!”

Kedungombo memang aneh.[]

Budaya Kota Yogya: Anak Pingit dan Anak Liar

Pergeseran-pergeseran pola perilaku sosial budaya kaum muda Kota Yogya dewasa ini, kalau mau diamati dan dicermati sungguh-sungguh tentu memerlukan multimetode dalam sejumlah upaya penelitian. Manusia, masyarakat, dan sejarah, pada hakikatnya senantiasa berlalu dari pengetahuan kita dengan hanya meninggalkan satu-dua jejak, yang sedikit saja kita pahami dan sadari, sebagaimana ombak dan gelombang berganti bentuk setiap detik.

Ilmu-ilmu sosial “harus” tidak terlalu dipercaya, apalagi “ilmu sosial koran” yang sifat utamanya adalah “melancong”, melihat sekilas-lintas, memandang ala kadarnya. Demi kebenaran realitas, demikianlah sebenarnya sosok kualitas dari apa yang coba saya tuliskan ini. Jadi, jangan terlalu dijadikan pegangan.

Apalagi saya hanya “minta tolong” kepada gejala-gejala sosial budaya yang rasanya tak cukup punya kepantasan untuk dijadikan titik tolak suatu usaha pencermatan. Misalnya saja saya bermaksud berangkat dari kenyataan bagaimana anak-anak muda Yogya berlalu lintas dua-tiga tahun terakhir ini.

Lalu, bagaimana mahasiswa dan pelajar mendaftarkan diri menjadi konsumen utama bertumbuhnya *pub* atau lomba-lomba budaya artifisial dan superfisial sekaligus—mungkin kontes *kliwir*, lomba memalsu-

kan diri menjadi seolah-olah penyanyi, kontes kostum hitam-putih *trendy*, dan sebagainya, meskipun belum sampai pada tingkat lomba aroma ketiak atau kontes menghitung jumlah bulu hidung.

Namun, harus tidak kita lupakan juga refleksi kulturalisme melalui jenis-jenis gerakan politik mahasiswa, model-model budaya pemelukan agama dari sayap paling kanan hingga paling kiri, atau juga kaitannya dengan naif dan tololnya modus-modus acara budaya kaum muda ditayangkan teve, termasuk “sukses”-nya arus global deintelektualisasi dan depolitisasi.

Garis-Garis Curam di Jalanan

Barangkali Anda sudah tahu betapa kacau dan uniknya lalu lintas jalanan Kota Yogya dewasa ini. Kalau Anda mengamati dan mengalaminya sampai tingkat intensitas dan jangka waktu yang memadai, Anda akan menemukan sebuah *angle* untuk uraian Anda tentang psikologi sosial.

Di jalanan Kota Yogya, Anda berpapasan dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran etika, dengan psikologi kekuasaan, dengan egoisme, atau intoleransi sosial, dengan keliaran, atau terkadang kenakalan dan keputusasaan.

Saya yakin tidak ada frekuensi pelanggaran lalu lintas melebihi yang terjadi di Yogya. Lampu merah diterobos adalah pemandangan lazim. Para pengendara motor menggoreskan garis-garis curam meliuk-liuk: mereka penggemar slalom dan mempraktikkannya di tengah keriuhan lalu lintas.

Bus-bus menjadi priyagung yang berhenti kapan saja mau berhenti dan meletakkan pantatnya di depan puluhan kendaraan lain di mana saja ia mau. Motor dan becak melintas ke arah kanan dulu baru—kalau ingat—memberi tanda. Yang berlangsung dalam “film lalu lintas” adalah irama-irama pribadi, bukan kerja sama dan solidaritas kolektif.

Yang mobil atau motornya jalan pelan tidak merasa harus meletakkan diri di tepian; mereka adalah mandor yang onggang-onggang dan

merokok santai di tengah para buruh yang bekerja keras. Meskipun pukul 03.00 dini hari, Anda jangan sekali-kali merasa aman untuk melajukan kendaraan melintasi lampu hijau, karena sangat mungkin ada motor atau mobil menyilang, yang sering kali bahkan tanpa lampu.

Mereka adalah pembalap-pembalap dengan “kesadaran gas” dan amat sedikit membawa di otaknya “kesadaran rem”. Juga tanpa perspektif ke depan; meskipun di depannya belum jelas bagaimana keadaan, meskipun muncul dari tingkungan atau gang sempit, gas tetap saja menjadi “panglima”. Tentu saja di samping keliaran dan kenekatan, itu adalah cermin ketololan. Itu sama sekali bukan keberanian, melainkan kebodohan.

Kemudian, amatilah para pelamun. Orang-orang melintaskan badannya di jalan raya, sementara pikiran dan hatinya mungkin di angka-angka utang atau entah apa. Para pelamun khas Yogya ini terdiri dari pengendara itu sendiri, para penyeberang jalan, becak, sepeda, atau pejalan kaki di pinggir jalan.

Sungguh, cukup bagi Anda mengamati jalanan Yogya untuk menemukan pantulan-pantulan dari sakit jiwa sosial masyarakat kita. Semula saya “menuduh” bahwa pelaku utama kekacauan komunitas jalanan itu adalah anak-anak muda. Tetapi itu tidak benar, karena egosentrisisme, psikologi kekuasaan dan rendahnya koperasi sosial itu juga diselenggarakan oleh mobil-mobil pelat merah, pengendara-pengendara yang membuat Anda hampir sakit jantung, tetapi urung marah sesudah melihat bahwa si oknum itu ternyata sudah tua dan berwajah memelas. Bahkan sekarang, jika malam sudah larut, pelanggar itu juga motor atau mobil polisi

Pergeseran Perilaku Sosial Budaya

Dari jalanan Yogya, kita telah coba menemukan beberapa indikator terpenting dari substansi dan pola-pola perilaku sosial budaya kaum muda kota itu. Tentu saja itu bukan “harga mati”, karena realitas sosial selalu bersifat “cair”.

Namun, sempat teruraikan atau tidak dalam tulisan ini karena terbatasnya ruangan, kita bisa memproyeksikannya sendiri-sendiri atau menemukan paralel-paralel antara dunia lalu lintas dan wilayah-wilayah kehidupan kaum muda lainnya.

Misalnya, cerminan lalu lintas mengenai rendahnya moral sosial atau etika lingkungan: kita bisa temukan hal yang sama pada pola-pola pergaulan baik pada skala keluarga, lingkungan kampung, maupun keterkaitan urusan antarmanusia dan kelompok masyarakat yang lebih luas.

Kita lihat tumbuhnya kelompok-kelompok kecil mahasiswa, yayasan, dan LSM-LSM “pemula” di kalangan kaum muda, sebenarnya merupakan antitesis dari arus umum di mana kepedulian sosial sangat rendah.

Sekolah dan universitas hanya mengajarkan kepandaian, informasi, dan keterampilan mengejar kepentingan pribadi. Contoh-contoh soal dari ketidakteladanan kaum birokrat, pamer kemewahan di teve dan jalan-jalan protokol, tidak mendidik kaum muda untuk peka menghubungkan dunia glamor dan angkuh itu dengan keterhinaan orang kecil dan miskin.

Saya tidak menyimpulkan bahwa di kalangan kaum muda Yogya itu etika sosial makin rendah. Mungkin sekadar potret realitas di mana modernitas kita memang semakin tidak acuh terhadap dimensi etika dan moralitas.

Pada kondisi seperti itu, kaum muda selalu berada pada posisi transisional, sehingga apa yang tampak sebagai dekadensi moral dan etika bisa jadi sekadar merupakan tahap berlangsungnya transformasi nilai etika yang belum tiba pada kesepakatan baru. *Shaf* kosong pada masa transisional itu tentu saja diisi oleh “setan”; egosentrisisme dan sebagainya itu.

Dalam pada itu, yang paling memprihatinkan adalah suburnya dorongan psikologis untuk berkuasa. Ini terjadi di setiap lapisan dan lekuk-lekuk realitas sosial, bahkan menelusup ke dalam saraf naluri, cara berpikir, dan kesadaran.

State, militerisme, dan otoritarianisme telah menjadi referensi utama pendidikan lingkungan kaum muda kita. Seorang anak muda tidak pernah kenal peluru, tetapi naluri pelakunya bisa saja cenderung “menembakkan peluru” dalam setiap keterlibatannya.

Di dalam pergaulan, di dalam berorganisasi, di dalam berdagang, mereka ditradisikan “memakai lars sepatu untuk menginjak”. Bukan salah bunda mengandung, karena yang melahirkan mereka memang bapak generasi yang tidak sadar apa yang mereka sejarahkan.

Anak Pingit dan Anak Liar

Berlangsungnya proses deintelektualisasi (yang digantikan oleh pendidikan hedonisme dan konsumtivisme), serta proses depolitisasi (yang malah diisi oleh pendidikan untuk berkuasa), menciptakan kaum muda dengan kepribadian ganda. Di satu pihak mereka adalah anak pingit, anak mami yang manja dan tergantung. Namun di lain pihak, mereka sekaligus juga anak liar yang rendah etikanya dan bodoh secara sosial.

Keterpingitan memiliki “kapling”-nya sendiri dalam peta perilaku sosial budaya mereka, sementara kapling lainnya dipakai untuk melampiaskan *nature* keliaran, yang pada mulanya berupa hakikat kebebasan, kemerdekaan, dan kreativitas.

Karena mereka dilarang untuk kreatif dan eksperimental di bidang-bidang yang kualitatif dan relevan, untuk itu kecerdasan dan eksperimen mereka dipentaskan di jalanan, di tempat-tempat hiburan—tetapi tanpa muatan kualitas, selain teratas pada kreativitas lomba kepalsuan, lomba reka-reka, dan lain-lain yang memperlakukan kegagahan ilmu dan etos modernitas yang telanjur merasa diri maju.

Kaum muda itu bagai komunitas *mudatstsirun*: orang-orang berselimut, atau kaum yang terselimuti. Oleh apa? Oleh banyak segi pendidikan ketidakcerdasan, ketergantungan, tetapi ironinya juga keberkuasaan.

Pantas Tuhan bilang, “Qum!” Berdirilah. Mandirilah. Mandiri pemikiran, mandiri sikap, mandiri pilihan, mandiri politik, mandiri ekonomi, mandiri budaya, mandiri kewiraswastaan. Hanya dengan itu, mereka punya perangkat untuk memenuhi amanat “Fa-andzir!” Berilah peringatan. Lakukan kontrol sosial. Beroposisilah terhadap kezaliman dan kepalsuan.[]

Nyepi, *Masterpiece* Religio-Kultural Masyarakat Bali

Luar biasa. Hari Raya Nyepi masyarakat Bali bersambungan momentum dan ritmenya dengan Bulan Ramadhan kaum Muslim.

Jika kedua-duanya sungguh-sungguh hidup di dalam batin diri dan batin kehidupan kita, alangkah agungnya!

Akan tetapi, bagaimana mungkin Nyepi dituliskan? Bagaimana mungkin ia ditanggapi, dinilai, dianalisis, diagung-agungkan, kalau semua itu harus menggunakan kata-kata?

Seharusnya boks ruangan di koran Anda ini tak berisi apa pun, kecuali kekosongan. Pernahkah Anda “membaca” buku “nyepi”, 5.000 halaman, yang seluruh lembarannya tak berisi apa pun, kecuali warna putih kertasnya?

“Membaca” jugakah Anda ketika sastrawan Danarto menuliskan resensi tentang buku tersebut—juga dengan kosong? Tanpa satu biji huruf pun?

Danarto, juga kita semua, tentulah tak akan sanggup menemukan kata apa pun yang bisa mewakili “nyepi”, kosong. Apalagi ini kata kerja: “nyepi”. Bukan kata benda “sepi”.

Kekosongan, sepi, sunyi, apalagi “nyepi” hanya bisa diwakili oleh dirinya sendiri, tidak bisa digantikan oleh simbol atau metafora budaya komunikasi apa pun. Ia sudah utuh. “Nyepi” sudah utuh.

Akan tetapi, kita barangkali bisa mencicipinya jika memang belum mungkin untuk memasukinya atau bisa “menjadi nyepi” itu sendiri. Barangkali kita bisa mencoba dengan bahasa wadak, kita mengucapkan sesuatu untuk mengingat-ingat pengenalan dan persentuhan kita dengannya.

Di sisi lain bisa juga kita melihatnya sebagai unsur budaya suatu masyarakat. Memang, siapa pun yang telah bergaul dengan kedalaman hidup serta dengan khazanah tentang prestasi-prestasi budaya masyarakat di muka bumi—akan tak bisa tak mengucapkan pengakuan bahwa Nyepi adalah karya emas, karya agung dari proses panjang internalisasi kultural masyarakat Bali. Nyepi adalah *masterpiece* budaya-religi mereka.

Banyak di antara kita mungkin tidak merupakan bagian langsung dari “dunia Nyepi”. Tetapi pada posisi itu, mungkin kita tetap bisa mencoba memberi empati, apresiasi, dan peran serta untuk berbahagia meskipun dari luar pagar.

Bisakah Anda membayangkan Bali pada hari-hari Nyepi?

Sebuah kehidupan tanpa suara, tanpa aktivitas keduniaan apa pun, kecuali sebagian yang alamiah sifatnya. Ketahanan dan ketabahan macam apakah yang diperlukan oleh para pelakunya? Kenikmatan dan rahasia apakah yang dikenyam oleh mereka?

Betapa menggiurkan!

Aktivitas puasanya kaum Muslim berada dalam nuansa, kualitas, dan “kesunyian” yang semacam itu pula. Saya menduga sesungguhnya perjalanan mereka berada pada lorong batiniah yang sama meskipun sebagai “metode”—puasa dan “Nyepi” memang berbeda.

Betapa indahnya apabila para “resi” masyarakat kita, para pujangga, ulama, cerdik-cendekia, serta guru kebudayaan kita, pada momentum Nyepi dan puasa yang indah dan agung ini: membisikkan ke

telinga jiwa kita semua syair-syair ilahiah yang bisa mengantarkan
“jiwa Nyepi” kita ke pangkuan kemesraan-Nya.[]

Jual-Beli Suasana

Kalau di larut malam Anda duduk-duduk santai di salah satu dari makin banyak *pub* di Yogya, minum, merokok, mendengarkan suara menggemaskan penyanyinya, sehingga lelah fisik dan *buneg* pikiran Anda menguap—mungkin Anda teringat Profesor Doktor Umar Kayam yang selama bertahun-tahun tak lelah-lelahnya berbincang tentang transformasi budaya.

Pub adalah pilihan baru tempat *nglaras* dan *klangenan*. Mungkin ia transformasi dari *lesehan*, tradisi santai menjadi “kelelawar malam”. Seperti halnya transformasi dari warung ke restoran, dari gerobak ke mobil, dari *blangkon* ke topi koboi, atau dari ketoprak ke film.

Kita mengembangkan pola-pola konsumsi dan rekreasi, entah dengan kesinambungan atau keterpenggalan, entah secara historis atau ahistoris, entah menyelenggarakan *change* dengan atau tanpa *continuity*.

Proses transformasi itu dilangsungkan bisa karena memang kita sungguh-sungguh perlu mengembangkan diri. Tetapi bisa juga karena latah, memanjakan naluri epigonisme budaya, mengejar pseudo-gengsi, atau bisa jadi untuk menutupi rasa inferioritas etnik di tengah apa yang kita sangka supremasi dunia budaya internasional.

Yang jelas proses transformasi budaya itu tidak harus merupakan peralihan dari tradisionalitas menuju modernitas. Bisa jadi yang berlangsung malah sebaliknya. Kalau Anda sekeluarga masuk restoran ultramodern hedonistik yang meminta biaya satu atau dua juta untuk sekali makan malam beberapa mulut dan perut—pasti itu bukan modernitas. Karena yang terjadi adalah asli pemborosan, tidak efisien, bahkan mungkin mengindikasikan skizofrenia kultural—yakni, suatu penyakit jiwa kelas yang tak kepalang tanggung.

Kalau Anda masuk disko atau *niteclub*, membayar uang masuk yang cukup mahal, menyewa *hostess* untuk ngobrol karena Anda orang kesepian, membeli minuman yang harganya dua kali lipat normal—maka dalam perspektif nilai modernitas hal itu adalah kebodohan. Gemerlap lelampuan dan gegap gempita musik serta dinamika jogging Anda juga tidak merupakan tanda modernitas, karena modern dan tidak modern itu terletak pada sikap mental dan sikap hidup. Yakni, sikap yang melahirkan rekayasa budaya yang sesehat-sehatnya secara fisik maupun kejiwaan. Orang modern adalah orang yang paling mengerti kewajaran manfaat dan ketidakmubaziran.

Belum lagi kalau kita dengarkan kaum spiritualis bicara: “Anda masuk diskotek untuk mendengarkan bunyi musik yang menggedor-gedor telinga dan dada Anda, dengan maksud agar jiwa Anda yang kosong bisa terisi sebab Anda sendiri tak punya fenomena untuk mengisinya, di samping Anda memang tak melatih kesanggupan untuk mendengarkan suara sunyi”

Padahal, Anda masuk disko sekadar untuk memotivasi keperluan berolahraga dan *refreshing*.

Kita masuk *pub*, diskotek, *niteclub*, restoran yang bermacam-macam pola akomodasinya—mungkin untuk “membeli suasana”. Yang mahal bukan makanan dan minumannya, melainkan suasananya.

Seorang teman saya memprotes: “Kalau kelak kita berangkat tinggal landas, kita pergi ke suasana teknologis dan industrial, kita menuju budaya perkotaan dan akhirnya meninggalkan segala macam yang bau tradisi ... lantas di mana saya cari teh *ginasthel*, dagelan dalam

Gito, ngobrol tentang nomor buntut. Memang bisa saja di tempat-tempat modern dijual teh kopi *mat-matan* dan diperdengarkan wayang kulit, tetapi suasana budayanya sudah lain sama sekali”

Memang payah teman kita itu. Orang beramai-ramai beli kemajuan, dia cari ketertinggalan. Orang beli masa depan, dia cari masa silam.

Pada masa depan kita nanti, akan masih adakah masa silam?[]

Kerja Sama *Rock*-Dangdut

Kita heran, di Gunung Kidul, juga Kulonprogo, Yogya, frekuensi orang bunuh diri cukup tinggi. Tetapi ternyata, kaum muda masyarakat itu adalah pelahap musik *rock*, lebih dari dangdut atau jenis musik lainnya. Padahal, musik *rock* sejauh ini kita duga merupakan simbol konsumsi budaya kelas menengah ke atas yang punya tingkat kelayakan ekonomi berlipat-lipat, dibanding orang Gunung Kidul yang hidup dari tanah terjal dan batu-batu.

Akan tetapi, mungkin bisa kita bilang bahwa itu justru paralel. Masyarakat Gunung Kidul terlalu lama berada dalam situasi *desperate*: menyangga semacam akumulasi tingkat keputusasaan hidup yang serius, sehingga jiwa mereka—di bawah sadar—memekik-mekik. Dan, tidakkah musik *rock* sangat mengakomodasikan pekikan-pekikan?

Pekikan. Entakan. Jeritan. Dan, pecahnya suara (vokal pemusik *rock* wajib serak atau pecah) seolah-olah karena ia harus menyuarakan atau memanifestasikan adanya keterpecahan-keterpecahan hidup—berbagai skala *broken situation*—dari mana jenis musik itu lahir. Wilayah kosmos psikologis pekikan-pekikan itu bersambungan, atau sekurang-kurangnya bersentuhan dengan suasana-suasana histeris. Kita tahu, orang menjadi histeris bukan hanya karena tekanan-tekanan

dari kesedihan, keputusan, dan ketidakmenentuan yang terlalu berkepanjangan.

Jadi, barangkali tak usah mengagetkan bahwa musik *rock* menabur-nabur dan menusuk-nusuk, atau justru bangkit dari kekumuhan, kemelaratan, dan kejelataan. Setidak-tidaknya, demikianlah salah satu gejala yang mungkin khas Indonesia.

Musik *rock* bekerja sama dengan dangdut yang memenuhi sejumlah “produk” psikologis lain dari *social desperation*. Lihatlah betapa *rock* dan dangdut sama-sama mewakili keperluan umum untuk menyelenggarakan eskapisme kecil-kecilan, pelarian ke dunia mimpi, pentas hipokrisi, agar jiwa tak patah oleh idealisme yang tak bisa diwujudkan atau impian yang tak bisa direalisasikan. Penyanyi dangdut berfatwa, jangan berjudi, jangan berzina, jangan mabuk, sambil menggoreng nafsu kaum lelaki dengan garis-garis lekukan aurat yang digesekkan ke mimpi-mimpi normal mereka. Di satu pihak, kaum lelaki bereaksi: “Tentu saja saya mabuk terus, *lha wong* rangsangan seks tak tanggung-tanggung” Tetapi, ada juga reaksi lain: “Toh, ada perimbangan antara ajakan zina melalui gerak dan larangan zina melalui lirik lagu. Itu namanya teologi *mizan*. Teologi neraca” Mirip dengan orang merasa tak aman dengan koruptor atau dosa-dosanya, lantas mencari ventilasi psikologis dengan naik haji atau aktif tablig, yang akbar maupun yang tidak akbar.

Mungkin juga musik *rock* lebih menarik sejumlah kaum muda, tidak hanya karena takhayul gengsinya, melainkan diam-diam karena lirik musik *rock* yang ada sejauh ini lebih dekat pada kejujuran dan kemurnian.

Yang jelas, eksistensi musik *rock* dan musik dangdut dalam psikososilogi masyarakat tidak lagi *kategorial*: mereka menemukan wilayah-wilayah pertemuan yang tak disangka-sangka dalam jiwa masyarakat. Juga tak bisa lagi dinilai dengan pendekatan kelas: mereka, masing-masing dan bersama-sama, telah melakukan semacam proses globalisasi dalam menggejalakan dirinya.

Pada era tat kala musik *rock* dianggap “musik gedongan” dan dangdut dibilang “musik jalanan”, yang terjadi sebenarnya mungkin sekadar suatu jenis hipokrisi. Sejak semula, mental masyarakat kita *tend to be dangdut*, hanya saja lapisan-lapisan gengsi sosial dan topeng kelas menutupinya. Kalau diwawancarai kita tak mungkin bilang suka dangdut. Itu menjatuhkan harga diri modern kita. Jadi, di “etalase” kita pasang musik *rock*, tetapi dalam kamar numpuk kaset dangdut. Lama-lama, setelah makin banyak orang tak malu berdangdut ria, kita pun perlahan-lahan melepas topeng *rock* kita.

Siapa tahu yang terjadi di Gunung Kidul dan Kulonprogo itu juga demikian. Kalau Mas Sapto Rahardjo tanya, tentu saya jawab senang musik *rock* dong. Atau, kalau metode penelitiannya berdasarkan statistik animo penonton musik, kita bisa menduga Gunung Kidul sedang memasuki era yang kita-kita di kota-kota besar sudah lewati. “Komet” *rock* sedang melanda mereka, tetapi perlahan-lahan mereka akan menyublimasikan diri pada tahun-tahun mendatang, untuk lebih objektif menyikapi *rock* dan dangdut.

Kalau pemuda dusun saya pulang dari Jakarta, dia tampil sangat ke Jakarta-Jakartaan. Ngomongnya, gaya jalannya, lagak lagu tubuhnya, pakaiannya, bahkan caranya buang air. Tetapi, saya tahu, ketika hidup di Jakarta dia sangat “nasionalistik” dan sangat menggenggam identitas aslinya.

Tiga tahun yang lalu, saya nonton pertunjukan musik *rock* karya anak-anak muda Wates Kulonprogo. Teman di samping saya prihatin: Kok pada latah *mBarat* begini anak-anak dusun?

Saya katakan: Siapa bilang mereka *mBarat*? Justru Indonesia banget. Jawa banget. Melayu banget. Tradisi budaya yang permanen tidak terletak pada musik *rock* mereka malam ini, tetapi pada tradisi kelatahan mereka. Tradisi kaget dan terbelalak oleh meteor dan komet yang lewat sesaat.[]

“The Nation of Jathilan”

*“Kalau kau ingin jadi harimau,
kemampuanmu akan hanya sebatas mengamuk,
tapi betapa gampang meranjaumu dan
menggiringmu masuk kandang”*

(Syaikh Jangkung
kepada Raden Mas Kalong, muridnya)

Anda tentu kenal musik *kothekan*. Yakni, pola dasar musikal dari berbagai jenis musik tradisional kita seperti yang terdapat pada *kuda lumping*, *jaran kepeng*, *reog*, *jathilan*, bahkan juga *musik lesung* yang dibunyikan ibu-ibu kita dahulu kalau menyongsong gerhana.

Pada masa muda, saya sering terlibat dalam aktivitas *Teater Rakyat*. Yang dimaksud teater rakyat di sini adalah satu kategori yang dibedakan dengan *Teater Tradisional* dan *Teater Modern*.

Teater modern jelas pakai bahasa Indonesia, disiplin dramatikalnya terutama mengacu pada ilmu drama Barat, orientasi utamanya juga estetika teaterikal. Teater tradisional itu wayang, ketoprak, ludruk, randai, lenong, tayub, dan seterusnya.

Adapun teater rakyat, berangkat dari suatu “ideologi” yang mengkritikan bahwa teater rakyat haruslah sungguh-sungguh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perspektif ini secara empirik, teater modern dan teater tradisional “dianggap” tidak lagi murni dari-oleh-untuk rakyat. Mungkin sudah berubah menjadi teater propaganda, teater estetika eksklusif yang rakyat umum tak peduli, atau teater pembangunan yang belum tentu untuk rakyat. Maka, diperlukan suatu fenomena baru yang melahirkan teater yang segala sesuatunya milik rakyat. Pelaku-pelaku pentasnya juga bisa siapa saja, tidak perlu orang

berbakat, karena ternyata sampai taraf tertentu semua orang berbakat main drama. *Wong* main drama sungguh-sungguh dalam kehidupan nyata saja sudah terbiasa di segala lapisan dan urusan, dalam skala lokal maupun nasional. Apalagi cuma main-main di panggung.

Benar tidaknya asumsi itu silakan diperdebatkan. Yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman dalam berbagai *workshop* teater rakyat di berbagai daerah, termasuk juga di pedalaman Filipina menjelang bangkitnya *people power*. Atau, juga di Nederland dan Jerman yang melibatkan perutusan dari negeri-negeri Dunia Ketiga.

Bedanya orang Filipina, Malaysia, Thailand, Brasil, Nigeria, atau bangsa-bangsa lain dengan orang Indonesia—terutama Jawa—antara lain tecermin pada hasil musik tatkala kita meminta mereka untuk berimprovisasi.

Ya, itu tadi. Ciptaan *ajeg* orang Indonesia adalah *kothekan*. Silakan pakai alat musik apa saja—batu, kayu, panci, sendok, drum, gitar, atau apa saja—selalu akhirnya menghasilkan *beat kothekan*. Biar dia rakyat biasa, ibu rumah tangga, tukang cat, karyawan bengkel, dosen, guru, polisi hutan, atau siapa saja, selalu secara naluriah bekerja sama menciptakan *ensemble of kothekan*.

Kothekan adalah suatu komposisi musik yang amat bersahaja dan kurang bergantung pada gelombang nada. Adalah suatu repetisi dan akumulasi bunyi yang sesudah jangka waktu tertentu merangsang *in trance*. Sekurang-kurangnya mendorong munculnya getaran *imagi* tertentu pada setiap yang terlibat di dalamnya.

Dan para *jathil* itu, ujung-ujungnya, adalah *ndadi*. Di Marikina, pinggiran Manila, bersama Adi Kurdi, Djoko Quartanty, Yasso Winarno, dan lain-lain saya sempat *ndadi* dan makan *plenthong* listrik dan silet.

Saya kemudian cemas. Sebab *ndadi* itu satu substansi dengan *amuck*: kosakata bahasa Belanda dan Inggris yang diambil dari empirisme historis bangsa kita, yang kaum petani sesungguhnya tidak pernah *memberontak* melawan Kompeni, melainkan hanya mengamuk. Memang di Filipina itu saya hanya pura-pura *ndandi*, tetapi saya tetap merasakan bahwa jauh di dalam jiwa saya memiliki potensi untuk mengamuk.

Kalau saya boleh berkata jujur, *kothe kan* itu melambangkan kondisi komunitas yang sampai tingkat tertentu belum cukup memiliki organisasi rasional. Infrastruktur dan mentalitas kebudayaan mereka masih alamiah, terkadang setingkat tumbuh-tumbuhan, pada saat lain mirip hewan. Kalau pada suatu saat sebagai masyarakat rakyat atau umat mereka memerlukan pengorganisasian dan manajemen kekuatan, konsep, strategi, dan taktik untuk melawan suatu kekuatan besar yang terorganisasi dan termanajemen rapi—mereka tidak siap.

Mereka hanya siap sesekali mengamuk. Terlepas tidaknya mereka dari kekuasaan atau penindasan oleh kekuatan di luar diri mereka, sangat bergantung pada “kebaikan hati alam” atau dialektika sejarah di mana mereka berposisi pasif.

Dalam situasi tertekan yang terus-menerus dan merasa utopis untuk mampu mengatasinya, mereka sibuk berperang satu sama lain, saling mencurigai, iri, dengki, menyikut kiri-kanan, melahap siapa saja yang bisa dilahap. Orang yang mengamuk dalam musik *kothe kan* itu kesadarannya tertimbun, matanya setengah buta, akalunya berfungsi setengah-tengah, tetapi jauh di dasar hati mereka menangis dan merintih-rintih.

Rintihan itu kita tutupi dengan bir, joget dangdut, pengajian eskapistik, lagak, kesombongan, atau halusinasi.[]

Teater Desa

Akhir-akhir ini di wilayah Yogya diselenggarakan beberapa *workshop* atau lokakarya “teater rakyat” atau lazim juga disebut “teater pengembangan masyarakat”. Di daerah Bantul ditangani oleh KTRI (Kelompok Teater Rakyat Indonesia) dan di Glagah Wates ditangani oleh Pusat Kateketik dan Teater Arena. Hampir semua landasan berpikir dan orientasi sosialnya sama dengan yang pada Ramadhan yang lalu diselenggarakan oleh Jamaah Salahudin UGM Yogya.

Ini merupakan gejala sosial baru yang makin luas jangkauannya dan makin tinggi frekuensinya. Ia belum benar-benar bisa disebut sebagai—katakanlah—fenomena baru dalam usaha kelompok masyarakat tertentu dalam mengubah dan memperbaiki proses sejarahnya. Akan tetapi, sudah mencerminkan bahwa dunia kesenian bersungguh-sungguh berusaha menemukan kembali interaksinya dengan bidang-bidang nonkesenian yang jauh lebih luas dan realistis dibanding sekadar gegap gempita estetika dan romantisme keindahan.

Sementara kegiatan perteateran (modern) mengalami semacam ketidakmenentuan gerak dan kualitas, justru muncul di balik itu wajah baru perteateran, sikap baru dan “harga diri” baru. Yakni, suatu langkah yang tak lagi terlalu bergantung pada *performance oriented*, tetapi

juga mengusahakan pola kontribusi sosial yang mungkin lebih realistis. Muncul “etos” baru di mana pekerja teater membebaskan diri dari “maniak pencapaian estetik”, dan lebih menumpahkan energi kreativitasnya kepada proses kemasyarakatan yang lebih luas. Oleh karena itu, lokakarya-lokakarya tersebut lebih menemukan dirinya terutama sebagai peristiwa kesenian, tetapi lebih sebagai peristiwa kebudayaan, peristiwa sosial, bahkan mungkin juga semacam peristiwa politik—setidaknya memang demikian muatan kualitatifnya.

Banyak hal yang bisa diungkap darinya. Akan tetapi, dalam refleksi kita kali ini, saya ingin memaparkan beberapa dimensi pokok. Alasan saya mungkin masih sangat lemah: ialah karena kegiatan ini merupakan ungkapan iktikad baik para pekerja kesenian tertentu untuk menyumbangkan sesuatu kepada usaha-usaha masyarakat luas dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan kesejarahannya.

Kesenian memiliki hak (dan kewajiban) yang sama seperti ilmu pengetahuan dan agama untuk mengontribusikan dirinya kepada usaha memperbaiki dan memperindah kehidupan manusia.

Usaha memperbaiki dan memperindah kehidupan itu, dewasa ini, berhadapan dengan berlangsungnya struktur-struktur persoalan yang membelit dan mengarahkan kehidupan ke dalam keadaan yang sebaliknya. Secara khusus, struktur persoalan tersebut—seperti telah diketahui oleh khalayak ramai dan telah ditulis beribu kali—meletakkan pihak yang disebut “rakyat” atau “masyarakat” (yang rumusannya memang masih bisa diperdebatkan) sebagai pihak pelengkap penderita. Dalam proses sosial, ekonomi, politik, dan hukum, mereka biasanya diberi gelar sebagai—misalnya—kaum tertindas, *the oppressed*, *mustadh'afin*, objek, *ma'fulun bih*, dan seterusnya.

Sudah pasti hal ini tak perlu kita panjang-lebarkan uraiannya. Yang kita perlukan dalam refleksi ini ialah—umpamanya—“teater pengembangan masyarakat” itu berarti kegiatan teater yang mencoba menyumbangkan dirinya kepada proses agar masyarakat mampu meningkatkan daya-subjeknya dalam sejarahnya sendiri.

Dalam hal itu, teater bersifat multidimensional. Ia adalah teater sebagai teater, tetapi sekaligus juga teater sebagai semacam metode pengembangan, metode memperoleh kesadaran baru, metode pembebasan diri, dan metode perubahan.

Maka, dalam proses oleh teater yang dilangsungkan dalam lokakarya tersebut lebih ditekankan tidak pada penumbuhan keterampilan berkesenian, tetapi lebih pada panggilan manusia kreatif dan manusia mandiri. Sesudah itu baru diolah dimensi sosialnya, yakni pembangkitan manusia demokratis, manusia egaliter. Dan semua itu diletakkan dalam perspektif persoalan masyarakat yang luas, dari estetika sampai pertanian dan politik. Sistem pelaksanaannya mengutamakan *sharing*, dialog “mengajari” atau “mengajarkan”, dan keterampilan serta sikap-sikap sosialnya. Lebih andragonis daripada paedagogis.

Proses semacam itu akan diproyeksikan oleh para peserta ke lapangan komunitas masing-masing, dan diharapkan itu bisa merupakan rintisan—betapapun kecilnya—usaha bagaimana kita semua sebagai subjek, mampu bernegosiasi di bidang apa pun, tetapi juga memelihara sikap demokrasi dan keadilan bersama.

Menjelang akhir lokakarya, para peserta masuk bergaul dengan rakyat di dusun-dusun. Berdialog dan bersama-sama merumuskan apa saja yang menjadi persoalan kehidupan mereka: dari soal birokrasi politik di desa, soal padi Insus, penembakan misterius, atau apa pun yang menjadi realitas rakyat dusun.

Mereka lantas mengungkapkannya dalam bentuk-bentuk pentas teater yang sederhana. Disuguhkan kepada rakyat dusun itu pula, yakni yang merupakan sumber tema-tema drama tersebut. Pada kesempatan khusus biasanya bahkan mereka berlatih bersama-sama para penduduk, kemudian menciptakan pentas drama bersama pula.

Pentas rakyat itu sangat penting, tetapi terlebih penting lagi adalah proses selama teater itu mereka olah: di mana mereka bisa saling mengingatkan kembali problem-problem yang mereka derita, lantas berusaha mengungkapkannya, sambil mencari apa-apa saja yang kira-kira bisa mereka lakukan untuk mencoba mengatasinya.

Kegiatan perteateran semacam itu tentu saja “kalah gengsi” dibandingkan dengan teater-teater kota yang megah yang tema-temanya juga “mendunia”. Orang desa memang dekat kepada gengsi, tetapi lebih dekat lagi—bahkan tak berjarak—dengan realitas mereka sendiri.[]

Teater Menggugat Pajak

Perkenalkan saya kali ini mengungkapkan nyanyian ratapan para pekerja teater, para kreator seni “serius” dan nonpop, di Yogya. Ratapan mereka sudah tidak berupa tangis dan rintihan lagi, sebab derita yang mereka sangga sudah terlalu lama. Sudah “imun” dan rasanya seperti bukan derita lagi. Ibarat penduduk yang hidup di samping sederetan WC umum: mereka sudah hafal betul bau busuk itu, sehingga lama-lama tak terasa.

Sesungguhnya wajar proses menuju imunitas semacam itu bagi manusia dalam menghadapi apa pun dan di bidang yang bermacam-macam. Tetapi, yang menjadi keprihatinan adalah suatu keadaan ketika lama-lama mereka tak sadar lagi bahwa mereka dikepung oleh WC. Kesadaran objektif mereka tentang WC menurun dan mungkin lenyap.

Derita mereka itu begini.

Teater, atau kesenian pada umumnya, bukan sekadar urusan kebudayaan masyarakat. Ia juga terkait—dan bahkan dikuasai—oleh mekanisme politik dan birokrasi. Kreativitas teater adalah bagian dari aktivitas kenegaraan.

Keterkaitan politiknya begini. Kalau ada orang *ngelindur* dalam tidurnya, tak perlu minta izin pihak keamanan. Tetapi kalau mau

pentas teater, harus pakai izin. Sebab, negara kita masih membutuhkan ke-pura-puraan berdemokrasi— demi stabilitas pembangunan dan seterusnya. Di dalam negeri yang sungguh-sungguh demokratis, pentas teater atau koran terbit tak perlu izin. Kalau pentas itu ngawur, masyarakat sudah punya kapasitas dan mekanisme untuk mengontrolnya. Kalau koran ngawur, masyarakat akan memberedelnya. Kalau masyarakat juga memberedel, itu sah.

Adapun karena masyarakat Indonesia memang dipanggang untuk jangan sampai sungguh-sungguh dewasa supaya bisa tetap terkuasai dan dimobilisasi, maka mereka terus dianggap tak pernah punya kedewasaan untuk sanggup memiliki mekanisme kontrol, melainkan pihak yang dikontrol.

Karya-karya seni juga hanyalah pihak yang dikontrol. Padahal, hakikat karya seni justru adalah pengontrol perjalanan sejarah, kebudayaan, dan peradaban. John F. Kennedy saja bilang puisilah yang mengontrol kotornya dunia politik.

Para pekerja teater itu tentu maklum bahwa ini negara berkembang, sehingga masih dibutuhkan konsensus tertentu di mana setiap pendapat dan kreativitas masih harus dipersuasifkan terhadap kepentingan-kepentingan “nasional”. Jadi, mereka bersedia *ngalah* kalau teater hanya dihadapi dengan *security approach*.

Cuma yang menjadi bahan derita mereka adalah tidak *qualified*-nya para pengontrol karya seni itu yang tersedia dalam birokrasi keamanan negara kita. Mestinya polisi membuat satu tim yang terdiri dari—setidaknya—seorang dari pihak kepolisian dan militer, seorang kritikus seni, seorang sosiolog, seorang budayawan, atau dilengkapi dengan berbagai pakar yang bisa memperhitungkan apakah karya seni tertentu berbahaya atau tidak. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang sepanjang pendidikannya tak pernah mengenal karya seni dan ilmu sosial ditugasi untuk mengontrol karya seni. Inilah derita tanpa akhir para kreator seni. Susahnya, para pekerja seni itu lama-lama menganggap hal itu sebagai “suratan takdir”, padahal itu “suratan pemerintah”.

Derita yang lain adalah hubungannya dengan birokrasi pajak. Bagaimana mungkin pentas teater—kecuali Gandrik dan Koma—diharuskan membayar pajak? Itu tidak Pancasila, karena tidak ada rasionalitas ekonominya.

Kalau motor dan mesin tik para teaterawan yang digadaikan bisa diambil kembali sesudah pentas, itu sudah alhamdulillah.

Oleh karena itu, sangat mengharukan ada anggota DPRD Kodya Yogya mengusulkan agar pentas teater dibebaskan dari pajak.

Fenomena pajak, di muka bumi ini, lahir dari akal sehat dan nalar manusia, juga solidaritas sosial, distribusi antara anggota masyarakat. Tingkat “komoditi” perteatran Indonesia pada umumnya masih sedemikian rendah. Agak kurang “waras” kalau kita membebani jualan rugi itu dengan kewajiban pajak. Justru kita harus punya kearifan kenegarawanan yang sanggup menggagas bahwa karya seni sesungguhnya justru lebih pantas dan berhak untuk menagih pajak dari pemerintah yang selama ini telah mereka bantu memelihara sehatnya kebudayaan dan kemanusiaan.[]

Security Approach terhadap Teater

Pada suatu hari, Azwar AN, seorang tokoh teater Yogya, datang ke rumah saya dan menawarkan apakah Arisan Teater Himpunan Teater Yogya bisa berpentas di Patangpuluhan, kampung domisili saya. Saya langsung bilang, “Bisa!”, tetapi kita perlu jawaban dari pengurus Pemuda Kampung serta para birokrat di sana, Pak RT, dan seterusnya.

Beberapa tokoh teater lain, mungkin karena friksi psikologis-politis dari masa silam menyindir mengapa saya “menerima” Azwar dan HTY. Saya menjawab, “Semua manusia saya terima, termasuk orang yang ingin berbuat jahat kepada saya. Perbuatan jahat adalah urusan pribadi dia, dan saya hanya berdoa semoga kejahatan itu tidak menyentuh saya. Azwar tidak saya rasakan hendak berbuat jahat dengan usulnya itu. Tetapi pada prinsipnya, saya tidak menolak siapa pun—maka tidak seorang manusia pun di muka bumi ini akan lulus.”

Maka, persiapan arisan teater dilakukan. Sangat menggembarakan respons dari kelompok pemuka Patangpuluhan. Persoalannya tinggal menghadap ke Pak RT. Kemudian itu dilakukan dan tahap yang harus dilakukan oleh Panitia HTY adalah—seperti instruksi Pak RT—membuat surat resmi, proposal, serta dengan syarat jangan melibatkan pemuda-pemudi kampung terutama untuk kegiatan yang bernama teater.

Kemudian kalau semua itu sudah dipenuhi, pihak keamanan yang akan mempertimbangkan boleh pentas arisan atau tidak. Sementara itu, panitia harus bersiap-siap bahwa biasanya sesudah proposal diminta, juga naskah-naskah yang akan dipentaskan.

Setelah semua konteks urutan itu saya dengar kembali, saya mengusulkan agar arisan di Patangpuluhan itu dibatalkan saja. Alternatif lain yang saya tawarkan ialah mencoba menjajaki kemungkinan berpentas di kampus, sebab di sana situasinya relatif masih lebih rasional. Serta relatif masih agak longgar dari penyakit psikologisme politik, birokratisme feodal, di samping juga menghindarkan kesenian dari tangan *security approach* yang sudah amat ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan banyak isi pidato Presiden Soeharto, Menteri Moerdiono, Sarwono Kusumoatmaja, Rudini, dan lain-lain.

Menjadi rakyat itu makin lama makin repot. Tiap hari ditatar tentang proses mencerdaskan bangsa, tetapi pada saat yang sama dipasang sistem-sistem yang menghalangi tumbuhnya kreativitas. Dari pusat pemerintahan kita dipameri peluang keterbukaan dan debirokratisasi. Tetapi, kita bersebelahan rumah—bahkan dikepung—dengan ketertutupan dan “agama” birokrasi yang tanpa nalar datang dari aparat tetangga kita.

Tiap saat kita dioyak-oyak disuruh mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, tetapi begitu akan menyelenggarakan aktivitas yang menginternalisasikan makna kemerdekaan, kok palang pintu banyak dan ruwet. Setiap membaca koran dan mendengarkan radio, kita dikejar-kejar untuk meningkatkan etos kemandirian dan etos kerja setinggi-tingginya. Tetapi kalau itu dilakukan, maka bukannya disiram, melainkan malah digaleng-galengi.

Kalau orang naik motor dengan knalpot terbuka dan mengganggu ketenteraman lingkungan, tak perlu minta izin dan biarkan saja. Namun, kalau mau meningkatkan kecerdasan bangsa, malah buru-buru dicurigai seperti akan mencopet. Untuk melakukan pungli, menyele-wengkan kewenangan, melakukan ketidaksetiaan terhadap nasib rakyat dan terhadap tanggung jawab kepejabatatan, atau untuk mengang-

gur, berhura-hura, *nothing to do*, tidak dilarang. Tetapi kalau berkreasi untuk kemajuan spiritual bangsa, malah sukarnya bukan main.

Kita semua ini makin tolol saja.[]

Menggempur Lalat

Sesudah 11 hari pentas—dari rencana 14 hari—Teater Koma Jakarta mendadak dilarang melanjutkan pemanggungan “Suksesi”. Semula penanggung jawab pementasan ini sekadar diajak omong baik-baik oleh pihak polda setempat, ditanya mengapa memilih tema itu, bagaimana reaksi penonton sesudah pertunjukan, dan seterusnya. Mendadak distop. Para pekerja teater itu belingsatan dan jungkir balik seperti pengendara sepeda yang tiba-tiba ada batang bambu menyilang di depannya.

Sebenarnya soal pelarangan karya seni itu sesuatu yang jamak. Dulu Rendra beberapa kali dilarang. Juga Teater Dinasti. Saya sendiri dalam soal pemanggungan termasuk dianggap kurang bermutu dan tak berbahaya untuk dilarang. Dengan demikian, salah satu hal yang saya pelajari adalah bagaimana menciptakan karya yang kira-kira dilarang. Tetapi kok, gagal terus. Mungkin karena naluri saya ialah memproduksi sesuatu yang telah saya perhitungkan bisa lolos dari ranjau politik.

Saya bahkan menyodorkan diri untuk disensor, bahkan silakan sepenuhnya menyeleksi karya saya. Harus ditemukan format komunikasi sedemikian rupa sehingga orang yang akan menyensor terlupa atau tak ingat bahwa semestinya dia menyensor. Setiap manusia kreatif

memiliki ilmu mengendarai cahaya. Kalau cahaya masih bisa dihambat, ya mengendarai udara. Kalau udara bisa distop, ya mengendarai gelombang. Kalau gelombang bisa disadap, ya mengendarai kesunyian. Kesunyian, yang bisa mempersatukan seribu jiwa dan kesadaran menjadi satu titik, yang bebas dari hukum-hukum fisika, tidak mungkin dihalangi oleh teknologi penyensoran yang secanggih apa pun, kecuali *'ainullah*. Bahkan, dalam situasi tertentu, seorang seniman bisa hadir justru dengan cara tidak hadir. Bisa pentas dengan cara tak berpentas.

Teater Koma bagaikan *ulo marani gepuk*. Judul pentasnya saja “Suksesi”. Ini menjelang Pemilu. Ini negara berkembang. Ini masyarakat yang mualaf demokrasi. Ini kekuasaan yang meneteskan ekonomi pertumbuhan dan keharusan stabilitas politik untuk itu. Ini bahkan bisa jadi lebih sempit dari itu: ada suatu “intensitas” pergerakan kekuatan-kekuatan tertentu, ada gajah-gajah yang berdesakan, dan semut atau kambing atau lalat bisa terlindas di kaki mereka atau dikibaskan oleh belalai mereka.

Seandainya tak terdengar ada larangan terhadap pentas seni pun sesungguhnya hakikat situasi nasional kita adalah larangan-larangan. Pers pakai SIUPP, puisi dan drama pakai izin polisi, kemerdekaan berpendapat masih dianaktirikan demi ini, demi itu. Namun, kita adalah masyarakat lugu yang terlalu cepat percaya kepada isu keterbukaan, demokratisasi, atau apa pun yang merupakan kosmetika politik.

Akan tetapi, sesungguhnya ini semua juga dagelan. Untuk apa repot-repot sama seniman. Seandainya ada seratus Teater Koma, ada seratus Gandrik, seratus Bengkel Teater, atau seratus kali seminggu saya *nyonthong* di depan forum: gajah-gajah tidak akan bergeming satu sentimeter pun dari kuda-kuda kakinya.

Pak keamanan, *mbok ya* biarkan saja seniman-seniman itu *peta-kilan*. Tak akan berpengaruh apa-apa. Mungkin bisa jadi ombak, tak akan menciptakan gelombang. Nanti kalau dilarang-larang, kami-kami para seniman ini jadi merasa besar dan GR. []

Kita Ini Sama-Sama Lemah

Dari pesisir Lamongan Utara yang *memble* oleh polusi petrokimia di laut lahan kenelayanan mereka, juga oleh tak gampangya lagi kesempatan menjadi “pendatang haram” di Malaysia atau Singapura, segera sampai saya di tepian Kota Medan.

Berkumpul di sana para “pemandu masyarakat” dari Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, dan sekitar Medan sendiri untuk tiga minggu *workshop* Teater Pengembangan Masyarakat. Apaan itu?

Dengan terbodoh-bodoh saya ditugasi berbicara tentang hal yang pasti mereka lebih tahu dan lebih mengalami dibanding saya—yakni, soal-soal kemiskinan struktural, kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, dan seterusnya; meskipun kemudian kami sama-sama menawarkan “teater yang kita butuhkan hari ini”.

Ngapain teater?

Tidak *ngapain-ngapain*. Hanya ada satu soal; ada sesuatu yang pasti harus diubah. Misalnya, ada kelompok masyarakat tertentu yang akan mungkin memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan hidupnya—ekonominya, inisiatif sosialnya, hasrat politiknya, citra kebudayaannya. Ada hukum tatanan tertentu yang membuat kelompok semacam itu tetap terkunci pada keterpojokannya.

Dibutuhkan perubahan. Dibutuhkan berbagai inisiatif dan terobosan. Orang-orang besar akan berkata—mengenai hal itu—tentang, mungkin, perombakan sistem politik, membenahi kembali manajemen pembangunan ekonomi, atau segala hal yang dibayangkan kuncinya berada di “balairung kerajaan”. Orang-orang lain mungkin berkata juga tentang proses penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap problem-problemnya sendiri, kemudian proses saling menolong sesama orang lemah sambil terus-menerus “mencari ilmu” bagaimana metode-metode tolong-menolong itu. Maka, orang-orang lain berbicara tentang kemungkinan koperasi-koperasi kecil, penumbuhan keterampilan, kejamaah baru antar-orang kecil, atau segala sesuatu yang menyangkut bagaimana orang-orang kecil mengantisipasi zamannya. Banyak orang lain bahkan tidak sekadar berbicara, tetapi melakukannya; meskipun beberapa dari yang banyak itu juga ada yang bersikap dan berlaku eksploitatif justru terhadap kemiskinan orang kecil.

Lantas mengapa teater?

Beberapa tahun yang lalu saya pernah menuliskan suatu “bombasme” mengenai “Sastra yang Membebaskan”, dan orang bertanya apakah sastra bisa berbuat sesuatu untuk perubahan sosial; apakah para sastrawan akan membagi-bagi uang dan beras kepada orang-orang miskin di seantero Nusantara?

Kalau hanya kepada beberapa orang miskin dan lemah, seorang sastrawan—yang tidak kaya raya—bisa saja dan mungkin sudah “menyantuni”. Sastrawan mungkin juga bisa nge-Bob Geldof mencari dana untuk kaum miskin. Tetapi, yang dimaksud sebenarnya hanyalah bahwa dunia kesusastraan itu bisa saja melakukan beberapa hal. *Pertama*, suasana solidaritas terhadap problem-problem orang lemah. *Kedua*, karya sastra bisa ikut menyosialisasi ide-ide solidaritas terhadap orang lemah serta ide-ide untuk perubahan-perubahan yang memang diperlukan.

Juga teater. Apa yang saya jumpai di Medan itu ialah melatih para pelatih teater di berbagai dusun di wilayah-wilayah orang lemah,

untuk menumbuhkan kehidupan teater. Tidak untuk “menjadi Rendra atau Putu Wijaya”, tidak untuk “karier teater”, juga tidak untuk “estetisme kota modern”. Melainkan teater sebagai pengantar, sebagai metode untuk memproses kesadaran sosial, kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran kebudayaan, kesadaran terhadap segala yang menyangkut problem-problem mereka sendiri. Pada tahap berikutnya, teater membawa mereka untuk selalu mendiskusikan problem-problem itu, melacak kemungkinan jalan keluarnya—di samping dengan teater mereka memperoleh model ungkap yang diperlukan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka sendiri.

Teater, seperti juga sastra, hanya salah satu jalan. Salah satu komponen. Dan bukan utama. Ia *supporter* saja terhadap kunci-kunci sosial lain yang lebih substansial. Di samping itu, kesenian memang paling memberi kemungkinan di mana “rakyat” dan “umat” bisa berbicara. Sebab selama ini rakyat atau umat selalu diletakkan sebagai “pihak yang butuh informasi”, bukannya pihak yang justru paling menjadi sumber informasi.

Maka, ketika kemudian saya ke Lampung, diam-diam saya selalu merintis kemungkinan itu di wilayah-wilayah yang saya lihat relevan. Maka kemudian, ketika saya—oleh Unit Keruhanian Islam Universitas Jayabaya Jakarta—diundang untuk membaca puisi mempamunkasi parade *reading*-nya Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, Leon Agusta, Hamid Jabbar, Abdul Hamid WM, dan Syu'bah Asa, saya merasakan bahwa “aspirasi kaum terpojok” semacam itu pulalah yang mendorong dan mewarnai berbagai suasana *poetry reading* malam itu—sehingga saya, dari jatah 20 menit, disuruh berkepanjangan membaca sajak-sajak “nakal” sampai sejam lebih.

Maka, ketika sehari sesudahnya saya berada di Ajibarang, Purwokerto, tempat “kebudayaan tempe bongkreng” yang barusan meminta korban 20-an orang, yang saya jumpai ada keluhan dan keputusan yang sama. Maka kemudian yang saya tawarkan adalah alternatif yang sama. (Saya berpikir untuk tak lagi bersedia melakukan “ceramah”, dan itu akan saya uraikan kemudian).

“Tempe bongkreng sekarang dilarang sama sekali,” kata salah seorang, “dan itu berarti sekian orang kehilangan mata pencarian. Padahal, sebenarnya penduduk tahu jenis-jenis tempe bongkreng yang beracun dan tak beracun. Sesungguhnya itu kelalaian teknis. Tetapi, tindakan yang kami terima sekarang ialah penyembuhan borok dengan cara memotong seluruh kaki”

Seorang guru sekolah menengah Muhammadiyah mengeluh: “Sebenarnya untuk apa, sih kita payah-payah memikirkan masyarakat? Kami sendiri begini lemah, setengah mati mengasapi dapur ...”—sambil dipaparkan skema sosial ekonomi penduduk di sekitarnya.

Saya hanya bisa mengemukakan kepada *al-mukarram ustadz* itu: “Siapa bilang kita ini kuat?”

Kita bukan orang yang kuat yang hendak menolong orang yang lemah. Kita ini orang-orang lemah, karena itu kita membutuhkan persatuan dan organisasi di antara orang-orang lemah. Kita semua ini adalah orang-orang lemah yang tidak saling bergandengan tangan, tidak berorganisasi, tidak berjamaah, kecuali ketika melaksanakan fiqh di masjid. Kita ini orang-orang lemah yang bukan hanya sekadar tidak mampu melawan kelemahan kita, melainkan bahkan makin lama makin tidak tahu kelemahan-kelemahan kita sendiri. Sebab, yang selama ini kita kembangkan bukanlah pengetahuan tentang kelemahan kita dan pengetahuan bagaimana mengatasinya. Yang kita kembangkan hanyalah kekuatan untuk bergaul riang dengan kelemahan-kelemahan kita

Ah, alangkah panjang *ngudarasa* soal ini sebenarnya[]

Humor, Antara Estetika dan Kosmetika

Semua humor itu plesetan. Plesetan, di luar humor, bisa bernama penyelewengan hukum, kemunafikan sikap perilaku, atau tragedi politik.

Humor, juga humor-plesetan, itu kasus estetika. Radius “hak” humor hanya dalam wilayah konteks *estetika*. Adapun dalam *etika* dan *saintika*, atau jika humor dan plesetan menjadi watak dunia etika dan saintika: destruksi hasilnya.

Jelasnya: dalam urusan etika (baik-buruk) dan saintika (benar-salah), humor dan plesetan hanya berfungsi kosmetik. Ibarat badan saintika itu anatomi tulang belulang, etika itu daging dan kulit, estetika itu bedak pupur belaka. 4 x 4 itu 16, jangan diplesetkan menjadi sama dengan terserah “petunjuk bapak”. Itu hakiki saintika.

Kedaulatan rakyat, demokrasi, hak asasi, itu bukan humor dan jangan diplesetkan, kecuali sekadar untuk hiasan, rumbai, atau instrumen pelentur dan penyegar dalam susah payah proses mewujudkannya. Hak perut untuk diisi makanan, hak darah untuk beredar, hak akal untuk mencerap dan merumuskan, hak mulut untuk mengungkap, hak kaki dan tangan untuk bekerja, hak nurani untuk memperindah kehidupan—itu sangat serius, bukan humor, bukan dagelan dan tidak “berkewajiban” untuk diplesetkan.

Hal estetika sendiri, tentu tak usah kita jelas-jelaskan betapa pentingnya bagi kehidupan. Kalau kita menyuguhkan nasi dengan menaruhnya dalam botol, pasti “tidak lucu”. Juga kalau naik bus kota sambil menciumi foto pacar sampai basah-basah itu kertas foto: tidak salah menurut saintika dan etika, tetapi “tidak lucu” menurut estetika.

Serius

Humor itu serius sebagai dan dalam dirinya sendiri. Humor itu sungguh-sungguh sebagai kesenian hidup. Jika humor diterapkan sebagai prinsip dalam kebenaran ilmu, tata negara, peribadahan, pergaulan rakyat-negara, manusia, Tuhan, dan sebagainya, ia merusak, seperti melipat-lipat kaca.

Di dalam kesenian, juga humor dan plesetan, surealisme atau ekspresionisme-liberal boleh—atau bahkan disarankan—untuk diterapkan. Hidung boleh dilebih-panjangkan, kepala silakan ditambah-besarkan, kaki dibengkok-bengkokkan, dan wajah dipeletot-peletotkan; sebab fenomena itu berada dalam wilayah kemungkinan inovasi estetik. Dan itu hanya berlaku sebagai estetika. Tidak sebagai etika atau saintika.

Maka, data tentang kemiskinan dilarang untuk ditambah atau dikurangi. Fakta tentang korupsi, penindasan, pemelaran, tak boleh dikesalkan atau dibesarkan. Fakta kehidupan, realitas manusia, kenyataan sejarah, bisa dihumorkan, tetapi bukan humor.

Gejala plesetan yang membengkok tahun-tahun terakhir ini sesungguhnya terbatas pada jenis plesetan verbal: *“Abdurrahman wahing ... wahing pon wage kliwon ... bumbu masak kliwoon ... bumbu landu paranggi penyair sumba ... sumba ainun najib ... kasihan najib rakyat kita ... kita purnamasari ... saridin mbahmu!”*

Adapun hampir seluruh teknik humor sebenarnya adalah plesetan. Plesetan logika. Plesetan asosiasi. Plesetan pemahaman. Plesetan atas plesetan. Yang terakhir ini, maksudnya: ketika orang sudah terbiasa dan mulai “imun” terhadap tradisi plesetan, justru diberi yang tidak

plesetan, artinya plesetan diplesetankan ke sungguh-sungguh. Alhasil, metode komunikasi untuk memproduksi tawa selalu melalui plesetan, karena asal-usul tawa berasal dari segala sesuatu yang tak terduga, yang melenceng dari kerangka asosiasi baku. Hampir semua pelawak memplesetkan wajahnya.

Kemungkinan

Humor selalu berdenyut di antara kutub kemungkinan sebagai ketahanan budaya dan pelarian psikis. Kadarnya saja yang naik-turun. Estetika humor membuat manusia lebih kerasan hidup, lebih resisten terhadap penderitaan, lebih memperoleh kesegaran dan keindahan. Tetapi, segala kesegaran dan keindahan, bahkan apa saja pengalaman manusia dalam hidup, selalu bisa memabukkan, menjerumuskan, menjebak. Tidak hanya wiski yang bikin teler. Air biasa juga bisa, asal kita minum satu drum aspal.

Jadi, bahwa tradisi humor pada saat tertentu hanya merupakan jenis eskapisme psikologis dari masyarakat,antisipasi kita ada dua macam. Kalau bisa, sebarkan kesadaran beserta tekniknya agar jangan terhenti sebagai pelarian. Kalau tak bisa, ya *ndak* apa-apa. Masih untung ada humor untuk tempat pelarian. Habisnya mau lari ke mana rakyat Anda yang bersedih dan ditimpa kepusingan struktural? Kepada Pak Camat, malah dikemplang. Kepada ulama, malah dicurigai sempalan. Kepada cendekiawan, malah dituduh cengeng. Kepada Tuhan, susah caranya omong-omongan.

Kalau bicara soal eskapisme, yang mungkin menjadi terdakwa bukan hanya humor, melainkan juga ibadah dan tarekat, diskusi, dan asyik-masyuk akrobat intelektual, naik haji, sisi *show* demonstrasi, yayasan filantropi, romantisme “posmo”, sejumlah gejala “LSM”, seni tinggi, dan macam-macam lagi.

Kritik

Akan tetapi, pasti bagus untuk menyadari dan meletakkan humor dalam fungsi kritik. Tradisi *clowns*, *guyon parikeno*, *abdidalem oceh-ocehan*, dan sebagainya yang sesungguhnya berlaku universal, selalu berfungsi kritik, meskipun tak usah dikasih beban melebihi kapasitasnya dalam menyumbang perubahan-perubahan dalam sejarah dengan “S” besar. Ia bahkan punya kelemahan mendasar tatkala disadari dan diperlakukan justru sebagai humor.

Kita boleh mengoceh sampai *kemeng*, tetapi Sang Maharaja hanya tersenyum dan nyeletuk ringan: “Toh sekadar humor”, dan rakyat percaya bahwa itu toh sekadar humor. Sayang sekali ada jenis kalangan yang terlalu pelit budaya dan kecut politik, “sekadar humor” saja dilarang.

Humor itu kekayaan dahsyat yang memungkinkan seluruh sisi pergaulan dan pola komunikasi umat manusia lebih menemukan diri bahwa mereka hidup. Kuliah di kampus, *ngungun* di sel tahanan, dakwah agama, pidato politik dan ilmiah, pentas kesenian, rumah tangga, apa pun, akan penuh kematian jika steril dari estetika humor. Humor itu bagian amat mendasar dan mendalam dari daya survival manusia. Adapun jika humor kita *nafsuin* untuk didayagunakan dalam konteks-konteks besar sejarah-perubahan sosial, perlawanan politik, tandingan budaya, dan seterusnya—itu cukup mungkin.

Cuma, kalau gagasan semacam itu menggebu-gebu, biasanya tidak berasal dari orang yang “menguasai humor”. Para pelaku dan pentradisi humor biasanya tahu betapa pretensi nonhumor yang berlebihan bisa melunturkan metabolisme kreativitas humor dalam sistem saraf-dalamnya. Humor tidak terlalu dekat dengan otak, tetapi cenderung intim dengan naluri, insting, spontanitas, serta berbagai jenis kepekaan. Padahal, bangunan setiap pretensi politik itu sangat intelektualistik dan teknokratik. Di situ, orang malah bisa kehilangan humor.

Untunglah, kata sejumlah orang mulia yang cerdik-cendekia: Allah sendiri itu Mahahumor. Sudah enak-enak hidup sendiri, kok bikin

macam-macam makhluk yang lucu-lucu begini. Apa Dia kesepian. Adam sudah nyaman-nyaman di surga, dibiarkan tercampak ke bumi. Kok, lucu. Buah Quldi saja, kok *ndak* boleh dimakan. *Mbok*, ya biar. Apa, sih ruginya Tuhan kehilangan sebiji Quldi? *Mbok* biarkan Adam kawin sama Hawa di surga, pengantin dan pesta sampai anak turunnya sekarang ini.

Mengapa makhluk-makhluk itu harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh kesempatan bercengkerama mesra dengan-Nya. Lucu. Pakai bikin Iblis-Setan segala. Bertugas menggoda manusia. Terus manusia jadi susah sendiri. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Ada yang menindas, ada yang ditindas. Ada yang sibuk korupsi tak habis-habisnya, padahal makannya juga cuma tiga piring sehari.

Manusia juga jadi lucu-lucu dan aneh-aneh. Bikin sekolahan, merumuskan ideologi, mempertengkarkannya dengan darah dan mesin, sok pintar, cari nama besar, merintis karier, padahal ujung-ujungnya, ya kempot, peot, dan mati.[]

Plesetan yang Diketoprakkan, Ketoprak yang Diplesetkan

Kebetulan saya berada dalam situasi dialog tatkala ketoprak plesetan “didukung” untuk lahir. Pada mulanya ia tidak berangkat dari semangat inovasi kesenian, tetapi dari kegelisahan bisnis. Di Yogya, untuk soal kepromotoran kesenian di kalangan muda, Anda harus menyebut nama Butet Kertaradjasa, aktor Teater Gandrik yang memiliki bakat dan kecanggihan dalam hal memasarkan karya seni.

Saya tidak mengatakan bahwa Butet-lah yang melahirkan ketoprak plesetan. Tetapi Bondan Nusantara, sutradara Ketoprak Plesetan yang kini sedang memeteor (bedakan meteor dengan bintang dalam hal masa berlakunya), adalah salah seorang anggota suatu lingkaran pergaulan di mana Butet juga berada di dalamnya. Dan kalau kemudian gagasan mengetoprakkan plesetan dan memplesetkan ketoprak muncul—harus dipahami antara lain dari *setting* lingkungan pergaulan itu. Semangat kepromotoran Butet menyalakan api dialog kreatif antarsejumlah teman di Yogya itu sehingga akhirnya lahir fenomena ketoprak plesetan.

Bahwa sekarang Butet dan lingkaran dialog kreatifnya tidak ikut “panen”, itu masalah tersendiri yang tak usah dibicarakan dalam tulisan ini. Tetapi, jelas bahwa nama Ketoprak Plesetan itu sendiri, bahkan

dengan seluruh gagasan dan pematangan di tahap awalnya, lahir dari lingkaran tersebut.

Dari Zaman ke Zaman

Plesetan bukan hal yang baru dan merupakan salah satu bagian dari budaya tradisi Jawa Mataraman, meskipun belum disepakati sampai sejauh mana wilayah keberlangsungannya dan sejak kapan ia menggejala.

Yang bisa kita anggap fenomena baru dari plesetan hanyalah bahwa ia “dilembagakan” atau diformat secara penuh dalam suatu paket karya seni. Sebelumnya, plesetan sudah ada dalam sejumlah karya seni tradisi, tetapi baru merupakan unsur pendukung. Sedangkan di dalam ketoprak plesetan, ia berposisi primer. Bahkan, bukan hanya kata yang diplesetkan, melainkan juga ide-idenya, gagasannya, juga logika dan alur ceritanya.

Kalau plesetan menimpa nilai, perwatakan, dan alur cerita, bisa kita katakan bahwa itu juga bukan hal baru. Sebab semua karya seni yang bermutu, atau semua karya seni baru bisa dianggap bermutu, apabila sanggup menyodorkan cara paham baru, interpretasi baru, atau penyingkapan baru atas tema lama. Dan itu, pada hakikatnya adalah plesetan.

Artinya, dinamika kesenian pada zaman apa pun, senantiasa mengandalkan reinterpretasi atas realitas dan nilai-nilai. Dengan kata lain, kesenian pada zaman apa pun sudah melakukan tradisi plesetan. Pentas-pentas adaptasi naskah asing ke format budaya setempat, sesungguhnya adalah plesetan. Hamlet pakai surjan dan blangkon, adalah plesetan.

Maka, pada ketoprak plesetan, yang pada akhirnya tetap dijadikan andalan dan merupakan komoditi utama pasarannya adalah plesetan kata.

Budaya Pancingan

Dalam perspektif universal, plesetan adalah kebutuhan setiap manusia, setiap masyarakat dan setiap zaman. Manusia adalah makhluk dinamis, sehingga pada jangka waktu tertentu dia selalu cenderung membutuhkan penyegaran, perlu mengistirahatkan diri dari kemandekan, kemapanan, dan kesumpekan.

Sehari-hari orang membutuhkan situasi “cari angin”: artinya dia memplesetkan diri dari situasi rutin yang baku. Dalam kebudayaan dan peradaban dengan format besar, sejarah selalu mencatat jenis-jenis dan modus-modus plesetan seperti—misalnya—fenomena *hippies*, *punk*, dan lain-lain. Kita sering mengenalnya sebagai *counter culture* atau budaya tandingan—meskipun plesetan tidak seratus persen sama atau memenuhi “konsepsi” yang dimaksudkan oleh “ideologi” budaya tandingan. Maksud saya, dalam pemrosesan budaya tandingan, selalu diperhitungkan kualitas dan efektivitas alternasi. Selalu harus ditargetkan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan, mungkin dengan cara merombak dan memperbarui sesuatu hal.

Itu semua berlangsung tidak hanya di dunia kesenian, tetapi juga dalam kebudayaan pada umumnya, bahkan juga pada dunia politik. Anda tahu politisi dan pemimpin-pemimpin negara yang cerdas selalu sigap menyiapkan plesetan-plesetan tertentu pada iklim-iklim yang memerlukannya agar stabilitas dan ketenteraman kolektif tetap bisa dipelihara. Adalah lazim apabila *the ruling power* pada suatu hari memplesetkan perhatian rakyatnya ke suatu ide tertentu untuk mengamflasekan masalah penting yang dianggap perlu untuk disembunyikan serapi mungkin.

Outlet Sosiopsikologis

Secara lebih sederhana barangkali budaya plesetan bisa kita pahami seperti orang—maaf—kentut. Kentut itu baik secara kesehatan. Yang

perlu dipermasalahkan hanyalah kesopanan berkentut, bagaimana menyutradairanya, di mana ia pantas “dipanggungkan”.

Yang jelas, orang yang tak bisa kentut dan tak punya saluran lain untuk aspirasi itu, sangat berbahaya keadaannya. Mungkin dekat dengan kematian. Kentut itu syarat kesehatan badan, dan plesetan itu syarat kesehatan jiwa. Asal “dosis”-nya pas, tidak *ngeden*. Sebab kalau *ngeden*, bukan kentut yang terjadi, melainkan *mbonjrot*.

Dengan demikian, kalau ketoprak plesetan lahir dan laris dijual, kemungkinan besar masyarakat kita memang sedang mengalami sakit perut psikologis, yang serius. Mungkin berupa kesusahan hidup, kesulitan mencari uang haram (apalagi yang halal), mengalami ketertekan dan kesumpekan—baik oleh persoalan-persoalan yang universal, personal, sosial-struktural, maupun nonstruktural. Artinya, seorang pengamat sosial dengan gampang menulis tentang hubungan antara plesetan dengan BPPC dan IGGI. Namun, di sini saya tidak bertugas untuk merambah wilayah yang paling rawan plesetan semacam itu.

Yang jelas, masyarakat kita, tak hanya rakyat tetapi juga pejabat dan tokoh-tokoh lain, memerlukan plesetan. Bahkan, orang yang paling mewah hidupnya, paling menyala kekuasaannya. Apalagi yang paling gampang tersinggung dan curiga, diam-diam amat memerlukan plesetan karena kesumpekan psikologisnya tergolong pekat—meskipun untuk keperluan dan konteks yang tidak selalu sama.

Ketika Teater Gandrik lahir, seniman *oldcrack* Kirdjomulyo menyebutnya “teater sampakan”. Itu asal-usul istilah *sampakan* yang media massa hampir tak pernah menyebutnya. *Sampak* berasal dari *term* Jawa *sumpek-sampak-suwuk*.

Sumpek jelas artinya. Anda masing-masing bisa menginventarisasikan berbagai jenis dan konteks kesumpekan. *Sampak* adalah upaya naluriah maupun konseptual—bahkan teknokratis—untuk keluar dari kesumpekan. Model sampakan Teater Gandrik adalah awal mula pelembeagaan plesetan yang embrionya telah ada di lingkungan di mana Teater Gandrik didukuni untuk lahir.

Adapun *suwuk*, adalah *way out*. Jalan keluar. Cara mengatasi. Gantinya sesuatu yang dirombak, direstrukturisasikan atau diresistematisasikan. Kita bisa menyebutnya juga sebagai pembaruan, alternatif, paradigma, atau apa pun saja bergantung pada dimensi keberlangsungannya.

Pertanyaan kita adalah, mungkinkah plesetan bisa mengilhami para pengendali, pengubah, dan penggembala sejarah—ya, Anda-Anda semua ini—untuk tidak sekadar berhenti pada tahap mengetoprakkan plesetan dan memplesetkan ketoprak. Kewajiban Bondan, Marwoto, Yati Pesek, dan Daryadi, memang hanya menjual plesetan. Tetapi, mereka adalah salah satu komponen dari perubahan sosial yang luas dimensi dan jangkauannya. Mereka akan memperoleh *jariyah* kalau komponen-komponen lain dalam masyarakat mencoba ikut mengantisipasinya.

Namun, kalau kebanyakan kita menyepakati bahwa tak ada sesuatu pun dalam kehidupan kolektif kita ini yang perlu dirombak, ya *monggo-monggo* saja. Saya pribadi tidak punya obsesi apa-apa, bahkan posisi saya lebih rendah dibanding Marwoto dalam kontribusi perubahan. Bahkan, saya lebih hina dibanding pelacur di tempat tertentu: para pelacur boleh beroperasi, saya tidak boleh ... hehehe[]

Manusia Ria Jenaka

Besar kemungkinan sebagian dari Anda cukup setia nonton acara “Ria Jenaka” Minggu siang di TVRI. Yakni, nomor *gareng-petrukan* yang menampilkan beberapa pelawak *oldcrack* kita yang sudah hampir tak sanggup melucu lagi sehingga *performance* mereka harus dibantu oleh suara tertawa artifisial.

Minggu lusa tolonglah perhatikan bagaimana proses “terjadinya” tulisan Ria Jenaka di awal acara tersebut. Ada tulisan “Ria”, kemudian satu dua variasi, muncul gambar enam manusia berjajar. Kemudian, nongol dua tangan besar dari atas: meringkus enam orang itu, meremasnya, lantas dari genggam tangan raksasa itu keluar huruf-huruf: jenaka.

Tentu saja saya tidak tahu apakah “pola” semacam itu disengaja—artinya dirancang secara konsepsional, atau barangkali penggambarannya hanya mengandalkan pengamatan naluriah terhadap substansi dan watak acara tersebut. Tetapi yang jelas, pola penggambaran nama acara itu sedemikian tepat mewakili apa yang sesungguhnya terjadi.

Saya akan coba menjelaskannya secara agak melingkar.

Ada semacam *term*, atau bisa Anda sebut sikap kesenian, atau barangkali “ideologi politik kesenian”, yang meletakkan ekspresi seni

semata-mata sebagai alat dari sesuatu yang—sebutlah—nonkesenian.

Ada juga kutub lain di mana kesenian dipandang sebagai urusan estetika *an sich*: seni itu otonom dan steril, dan karena itu berposisi eksklusif dari bidang-bidang lainnya. Kutub pandangan yang ini memiliki kemungkinan untuk mengeksplorasi kreativitas estetika secara maksimal, sekaligus memiliki kemungkinan untuk berposisi asosial, sebab pertimbangan estetika berada di atas segala pertimbangan yang lain. Misalnya, seorang seniman di atas panggung menginjak-injak 100 telur ayam demi pencapaian estetika, tanpa peduli apakah telur sebanyak itu sebenarnya lebih diperlukan sebagai gizi makanan. Juga tak peduli apakah si seniman itu sendiri sebenarnya sangat jarang bisa makan telur.

Maka, kutub sikap yang ingin memperlakut estetika demi kepentingan lain, bermaksud menawarkan kepedulian sosial di hadapan kutub lain yang dianggap tak punya kepedulian tersebut. Itu sangat mulia. Tetapi sekaligus juga berbahaya, karena orientasi yang terlampau dominan terhadap dimensi non-estetis, bisa meletakkan kepentingan sosial-politik-ideologis dan seterusnya menjadi “komandan otoriter” yang bersikap seenaknya terhadap harkat estetika.

Kutub yang ini tak memandang penting keluhuran seni itu sendiri, sehingga ia menunggangi seni dengan beban sponsor, iklan pembangunan, pesan-pesan propaganda, dan seterusnya. Seni itu sendiri menjadi tak penting. Yang utama adalah propaganda politik, seni yang diciptakan kehilangan seninya, tinggal politiknya. Itulah yang dulu dilakukan oleh Lekranya PKI.

Mekanisme berkesenian semacam itu biasanya memandulkan seniman, mengikis kemandirian pribadi kreator, sekaligus memuakkan konsumen karena hasilnya buruk secara estetika dan hanya penuh pamrih.

Seni itu penting, politik itu penting, pembangunan juga sama pentingnya. Sehingga dibutuhkan pola demokratisasi dalam *manage* keseimbangan eksistensial antara ketiganya. Dalam banyak hal, kutub

“estetisme *an sich*” maupun “pembangunan *an sich*”, gagal mempe-
luangi demokratisasi tersebut.

Dalam kasus Ria Jenaka, kegagalan itu dicerminkan oleh diperas-
nya manusia menjadi alat pembangunan, oleh kelucuan yang dipak-
sakan, propaganda yang vulgar, serta oleh dilenyapkannya hakikat
historis dari figur Semar-Gareng-Petruk dan Bagong. Punakawan itu
rakyat yang berbicara, bukan yang berbicara kepada rakyat.

Jangan-jangan penggambar Ria Jenaka itu sengaja[]

Rasa Bangga di “Depan” Teve

Tontonan acara musik di televisi, baik pusat maupun daerah, tergolong di antara banyak hal di negeri ini yang bagi saya bukan sekadar menghibur, melainkan juga amat menceriakan dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Kalau malam-malam saya nongkrong di depan teve hitam putih di rumah, bahkan pun ketika numpang di stasiun atau di toko Cina—menyaksikan merdu suara, kecanggihan musik, dan elastisitas lenggak-lenggok aurat para penyanyi pop maupun dangdut—terasa bangkitlah rasa nasionalisme saya.

Tak sia-sia pengorbanan para pahlawan, tak sia-sia Pak Karno dan Pak Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Chairil Anwar dulu cemas—“Kaulah lagi yang menentukan arti tulang-tulang berserakan ini ...,” katanya. Sekarang terbukti kesanggupan besar bangsa kita untuk tak menyalahkan permintaan penyair besar itu. Terutama cewek-cewek, baik lewat teve maupun majalah dan koran-koran: telah bukan saja menentukan arti tulang berserakan. Lebih dari itu, mereka menyerak-nyerakkan daging-daging tubuh mereka.

Untuk itu, para pejuang bangsa itu pantang mundur. Mereka berjuang dengan penuh militansi. Meskipun banyak orang yang sok moralis maupun yang cemburu yang mengecam penampilan aurat-aurat

mereka, anak-anak manis itu tetap tidak bergeming. Mereka progresif dan kreatif. Bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka yang selama ini “dipenjarakan”, perlahan-lahan mereka “bebaskan”. Daging-daging dan kulit mulus itu melesat keluar dari pakaian yang memenjarakan.

Bagaimana saya tidak bangga?

Dengarkanlah musik-musik tayangan televisi itu. Kualitas penggarapan musiknya tak kalah dibanding segala grup terkenal yang pernah nongol di kerajaan musik *Sky Channel* London. Syair-syair atau lirik-lirik lagu mereka mengatasi karya-karya para penyair—baik kelas Allen Ginsberg atau Arthur Rimbaud hingga kelas Subagio Sastrowardoyo dan Goenawan Mohamad. Perhatikanlah betapa bermutu dan mendalam bait-bait itu, dari dekade Singkong-Keju hingga Mobil-Bensin. Amatilah kreativitas jenis-jenis musiknya: Phil Collins atau bahkan Zubin Mehta harus merasa malu kalau mereka mendengarkan *ke-adiluhungan* musik pop dan dangdut Indonesia.

Dan tak kalah penting adalah gerak tari para pengiring penyanyi-nya. Tataplah betapa lincahnya mereka. Pasti itu merupakan sintesis dari supremasi ultrabalet dengan magi tari Bali. Bahkan pada acara musik kanak-kanak, lirik cinta dan lenggok aurat pun telah dipraktikkan. Betapa kagum dan bangga saya! Anak-anak Indonesia tak perlu menunggu usia dewasa untuk menjadi dewasa. Anak-anak kita bisa cepat menjadi aset dari pembangunan masyarakat dan bangsa besar.

Kemudian yang tak kalah menarik adalah untaian kata-kata penyiarnya: penuh bunga-bunga dan puitik.

Di depan televisi saya selalu tersenyum-senyum sendiri dan sering berdecak-decak saking kagumnya. Sampai pada suatu malam datang seorang tamu yang kurang ajar. Masuk rumah langsung *nyelonong*, mematikan teve dan memaki-maki saya.

“Apa-apaan kamu! Nonton *such a stupid thing*! Manusia ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk tertinggi dan mulia. Dia dikasih akal budi dan kecerdasan akal. Komputer otaknya dan disket-disket

ilmu pengetahuannya sedemikian canggih. Dia bisa menghitung jumlah pasir di seluruh Timur Tengah, bisa menerobos langit, bisa memasuki alam ruh, bisa segala macam karena dia memang wakil Tuhan. Tetapi sudah capek-capek jadi manusia, eh, malah yang dikerjakan hanya lenggak-lenggok seperti boneka Malu-maluin ...!”

Saya langsung naik pitam dan telah menyiapkan mulut saya untuk mematahkan tuduhan-tuduhan keji teman saya itu. Tetapi, ternyata dia langsung *ngeloyor* pergi[]

Indonesiaku Rumahku

Film karya Slamet Raharjo, *Langitku Rumahku*, gagal diputar Kamis siang kemarin dalam ekstra-show yang diselenggarakan oleh Sekretariat Mahasiswa Gelanggang UGM di sebuah bioskop di Yogya.

Sebab musababnya simpang siur. Sampai detik menjelang *dead line* masa putar, kabarnya polwil belum mengizinkannya. Berapa puluh menit sesudah detik itu lewat, katanya izin sudah ada, tetapi diskusinya (malam hari di Gelanggang Mahasiswa UGM di mana Drs. Ashadi Siregar, Theo Sambuaga, dan Eros Djarot akan tampil) yang belum diizinkan—katanya—oleh pihak Deppen.

Kita orang-orang kecil dan awam menjadi bingung tentang segala sesuatu mengenai pemutaran film, diskusi, mandi, kentut, atau apa pun, dalam kaitannya dengan birokrasi negara. Tetapi alhasil siang itu, film gagal diputar dan dijanjikan oleh panitia akan diputar pada kesempatan lain yang akan diumumkan.

Saya sendiri yang akan datang ke sana sebagai undangan biasa ditabraki oleh berbagai pihak sehingga menjadi *lolak-lolok* karena saya sungguh-sungguh tak tahu-menahu tentang semua itu. Saya hanya diberi tahu bahwa Eros Djarot akan menginap di rumah kontrakan saya dan dalam diskusi saya ditugasi menjadi moderator.

Kebingungan saya itu berupa keprihatinan yang mendalam. Tetapi karena saya sudah punya banyak kesedihan dalam hidup, diam-diam saya anggap semua ini komedi saja. Meskipun tetap harus menilai segala sesuatunya secara objektif.

Negara kita ini memang eksentrik. Mungkin pemerintah bermaksud menciptakan dinamika bermasyarakat atau ketegangan kreatif, dan cara untuk itu antara lain ialah menyelenggarakan pelarangan atau penghambatan atas karya seni.

Pemerintah pasti punya akal sehat, sehingga mereka pasti tahu persis bahwa film *Langitku Rumahku* adalah karya kemanusiaan yang sangat Pancasila. Tidak ada pemberontakan kepada penguasa, tidak ada makar, tidak ada SARA, bahkan malah menawarkan *pareduluran* kemanusiaan antara anak orang kaya dan anak orang miskin. Jadi, kalau pemerintah terkesan mempersulit sosialisasi film itu, pasti mereka sedang berpura-pura akalnya tidak waras.

Dalam rangka menciptakan dinamika sosial dan ketegangan kreatif itu, dipelihara ketidaktepatan kriteria birokrasi tentang mana karya yang boleh dan mana yang tidak, mana yang berbahaya dan mana yang tidak, atau mana yang Pancasila dan mana yang tidak. Begitu banyak film yang secara nilai sama sekali tidak mendukung proses Pancasilaisasi bangsa malah beredar tenang-tenang tanpa ada hambatan: saya yakin itu karena pemerintah ingin menguji agar masyarakat memiliki filter Pancasila secara orisinal. Artinya, justru film yang kultural edukatif dipersukar, demi supaya masyarakat punya kemandirian berpikir dan mengembangkan kecerdasan. Memang eksentrik betul penguasa kita.

Teaternya Nano dilarang. Dua puisinya Rendra dilarang, *Langitku Rumahku* mengalami nasib yang unik dan absurd. Dan semua itu tanpa standar kriteria yang jelas. Sehingga para mahasiswa banyak nyeletuk bahwa “Indonesiaku bukan Rumahku”, “Indonesiaku adalah Rumahmu”—suatu satire dari *Langitku Rumahku*.

Kita orang-orang kecil tak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Mungkin ada gajah-gajah bertarung dan pelanduk jadi korban.

Mungkin “*undur man qâla ...*”, lihatlah siapa yang berkarya, bukan bagaimana karyanya. Mungkin friksi ekonomi, mungkin dendam pribadi, mungkin pejabat bawahan takut pada atasan, mungkin ini kasus sakit jiwa biasa.

Persoalan terpenting ialah bagaimana orang-orang kecil dan awam yang tak punya kekuasaan, jangan sampai terkena sakit jiwa, dan karena penyakit itu kita lantas anti-Pancasila, tetapi malah merasa paling Pancasila.

Akan tetapi, ternyata soal sakit jiwa itu tidak benar sama sekali setidaknya buat Yogya. Buktinya film *Langitku Rumahku* itu diputar di Mataram Theater siang ini.[]

Musik Mantra dan *Hizib*

(1)

Hari-hari ini, kabarnya, sejumlah pemusik dan pekerja seni lain di Yogyakarta sedang mengolah suatu eksperimentasi kreativitas, untuk menghasilkan apa yang mereka sebut *musik mantra* dan *musik hizib*. Masyarakat Yogya barangkali akan bisa menyaksikan pagelaran-nya dalam waktu dekat, di samping dapat berpartisipasi dalam diskusi atau seminar yang mendampinginya.

Entahlah. Namanya juga eksperimen. Para eksperimentator di bidang apa pun harus menyiapkan diri memasuki saling-silang kontroversi, pro dan kontra, kesediaan untuk diterima atau ditolak. Kata “eksperimen”—atau Anda bisa sebut *ijtihad* atau *carangan* untuk wilayah penggarapan yang berbeda—itu sendiri sudah mengundang kegelisahan. Apalagi yang dieksperimentasikan adalah persenyawaan antara dunia musik dengan mantra dan *hizib*: dua dunia yang sesungguhnya amat berdekatan atau bahkan rekat, tetapi dalam pemahaman kebudayaan kita keduanya dikenal sebagai “kutub” yang berbeda.

Bahkan, *rerasanan* di antara mereka menyebutkan bahwa salah satu elemen musikal yang akan dieksplorasi dalam eksperimen itu adalah suara arwah, suara siksa kubur, atau juga ruh-ruh *ngelambrang gentayangan*. Bisakah Anda bayangkan? Metode dan teknologi macam apa yang akan merekam suara-suara itu? Ilmu dan pakar apa yang

dianggap absah untuk melegitimasi bahwa yang terdengar nanti benar-benar suara ruh? Akankah diterima oleh masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan? Akan dicatat sebagai karya spektakulerkah eksperimen ini nanti, atau justru diklaim sebagai manipulasi, atau setidaknya lawakan?

Instrumental atau Fokus

Untunglah kita hidup di alam keterbukaan Demokrasi Pancasila. Kita boleh melakukan apa saja, asal sesuai dengan kehendak dan kepentingan para pengurus resmi Demokrasi Pancasila. Silakan mengeksperimentasikan apa pun. Tidak semua dan tidak setiap pertanyaan harus terjawab. Bahkan, siapa tahu memang ada sejumlah pertanyaan kehidupan yang memang kita perlukan justru untuk tidak dijawab. Saya pribadi akan penasaran dan menikmati pertemuan atau mungkin korsleting antara kualitas fenomenologis eksperimen musikal itu dan masyarakat penonton atau pendengarnya. Baik yang hadir membawa sikap terbuka ataupun sikap apriori, kewaspadaan ilmiah dan batiniah ataupun kepercayaan buta dan penuh takhayul, juga empati ataupun sinisme.

Yang kita ingin tahu ialah apa sasaran eksperimen itu. Dimensi mantra atau *hizib* akan diposisikan sebagai fungsi instrumental ataukah merupakan bagian inheren dari pencapaian estetika musikal yang merupakan fokus penggarapan. Apakah mantra dan *hizib* akan diefektivisasi secara konkret sebagaimana yang kita kenal dalam realitas budaya masyarakat, ataukah ditangkap esensi, watak, dan nuansanya belaka untuk dijadikan titik berangkat dan target akhir penciptaan musik.

Juga suara-suara ruh dan siksa kubur itu—lepas dari mungkin tidaknya dimensi itu ditransformasikan menjadi ekspresi bahasa budaya—apakah akan diabadikan untuk sofistikasi estetika ataukah sebagai fenomena yang lebih luas dan multidimensional dari olahan estetisme semacam itu.

Kemudian seandainya itu semua ternyata manipulasi, pertanyaan saya adalah seberapa berat takaran dosa penipuan itu dibanding tradisi manipulasi peradaban kita di bidang-bidang ekonomi, politik, kebudayaan, keagamaan, atau khususnya di bidang sejumlah ketidakjujuran cipta musikal masyarakat modern kita selama ini. Serta seandainya itu semua nanti sekadar merupakan dagelan, pertanyaan saya cukup mahalkah biayanya dibanding biaya-biaya spektakuler yang selama ini memasok rekayasa dagelan-dagelan sejarah yang berlangsung besar-besaran?

Sesudah aproksimasi itu, baru kita memasuki kosmos mantra dan *hizib*.[]

Musik Mantra dan *Hizib* (2): Menyingkirkan Badai ...

Para pelaut tradisional suku Mandar, Sulawesi Selatan bagian utara, kalau tiba-tiba badai datang menyerbu dan membuat perahu mereka oleng serta badan terguncang-guncang, dan jika segala sesuatu sudah tak mungkin mereka atasi lagi dengan akal, kecerdasan, dan teknologi (tradisional)—mereka merentangkan kedua tangannya ke langit sambil memekik: “Imam Lapeooooo!”

Sering kali, entah bagaimana kita menjelaskannya, badai lantas menyingkir, dan selamatlah mereka.

Anak-anak Mandar modern, dewasa ini, kalau—misalnya—mereka ikut berdemonstrasi mahasiswa di Ujungpandang dan terdesak sedemikian rupa oleh bahaya atau cengkeraman pihak keamanan—mereka pekikkan juga sebuah *kata* atau *nama* tertentu yang berasal dari referensi mistik modern mereka, sehingga selamatlah mereka dari bahaya.

Imam Lapeo, almarhum, adalah seorang kiai dusun yang amat sederhana. Dalam konstelasi *walayah*, dia terkategori sebagai seorang *Wali Qudrah* yang berbeda dengan *Wali Iradah* yang memperoleh *karamah* kewaliannya melalui *fi'il* atau *laku* atau upaya atau rekayasa. *Walayah* Imam Lapeo secara sosiologis-empirik telah ber-

interaksi dan bersenyawa sedemikian rupa dengan kepercayaan dan rasa syukur umatnya atas manfaat hidup sang Imam.

Perihal “teriakan” ini bisa kita sebut juga contoh lain umpamanya Syaikh Habasy, seorang “pelaku” yang menghayati sumur sebagai sumber air, yakni salah satu lambang fundamen hidup.

Anak-anak kecil di kampungnya biasa dolanan di sumur itu. Mereka berteriak—“Syaikh Habaaasy!”—lantas terjun masuk ke dalam sumur, dan sesaat kemudian mereka mental dan kembali ke tanah di atas sumur, seolah-olah air dalam sumur itu adalah karet busa lunak yang membuat gaya berat tubuh mereka *mendal*.

Pada suatu siang lewatlah seorang musafir, yang tampaknya tergo-long orang pandai pula. Menyaksikan anak-anak itu bermain-main, dia gatal.

“Kenapa Syaikh Habasy? Kalau kita teriakkan *Allahu Akbar* pastilah lebih sakti!” Dia berbisik kepada dirinya sendiri.

Kemudian, dia mencobanya. Dia teriakkan *kalimah thayyibah* itu, dan ternyata badannya tak kembali ke atas, tetapi terjerembap, tengge-lam, dan tak tertolong.

Mengapa? Apakah *Allahu Akbar* kalah ampuh dibanding kata Syaikh Habasy atau Imam Lapeo? Apakah *kalimah thayyibah* ciptaan Allah sendiri itu kalah sakti dibanding bikinan manusia?

Atau, kalau kita kembalikan ke pertanyaan fundamental: mengapa suatu komposisi rapal tertentu bisa menjelmakan yang seharusnya terluka menjadi tidak terluka, yang tak terambrolkan menjadi ter-ambrolkan, atau yang secara rasional tak mungkin menjadi mungkin? Mengapa sebuah menu *hizib* tertentu mampu membuat yang tak ter-tembus menjadi tertembus, membuat yang secara normal tak tersentuh menjadi tersentuh, atau yang biasanya tertutup menjadi terkuak-kan?

Kita bisa kembali ke elemen-elemen *magi* atau *penetrasi transkos-mologis* atau bisa juga digambarkan sebagai semacam *spiritual atmos-phering*. Mengapa ribuan “pegoyang dangdut” bisa *teler* dalam pentas Rhoma Irama? Mengapa lautan massa musik *rock* bisa hanyut dan *in*

trance? Hal yang sama juga berlangsung pada para pelaku *Jaran Ke-pang* atau *Jathilan*, mengapa? Atau, dengan *mateg aji* tertentu seorang pesilat tiba-tiba menjadi kera atau ular?

Dua kunci jawabannya adalah komposisi dan repetisi.

Magi lukisan “Monalisa”-nya Leonardo da Vinci, pada level tertentu, berlangsung sampai hari ini. Lagu “The End of the World” pada masa-nya merangsang pemuda-pemudi Amerika Serikat untuk entah bagaimana merasa berbahagia sedemikian rupa, sehingga sebagian dari mereka rela memutuskan untuk “bunuh diri dengan bahagia”. Cobalah Anda ambil satu lukisan karya maestro internasional kita, Affandi: uraikan unsur-unsurnya. Anda akan menemukan bahan-bahan yang darinya terbuat kanvas. Kemudian cat, yang Anda temukan sesudah penguraian itu unsur-unsur kimia. Tetapi, apakah lukisan Affandi adalah cat dan kanvas? Sama persis dengan unsur-unsur pada lukisan siapa pun lainnya? Maka, kalau lukisan adalah unsur-unsur, menjadi samakah lukisan Affandi dengan pelukis lainnya?

Para kritikus seni rupa akan menjawab gampang: Lukisan Affandi adalah sentuhan kreatifnya, sedangkan cat dan kanvas hanya medium yang dipergunakan untuk merepresentasikan sentuhan itu.

Apakah gerangan “sentuhan kreatif” itu? Yang tidak ada pada lukisan karya pelukis selain Affandi adalah “komposisi Affandi” dan “repetisi Affandi”. Yang dikomposisikan dan direpetisikan betul-betul “hanya” cat dan warna, tetapi sentuhan kreatif komposisi yang dihasilkan Affandi itulah yang menentukan *magi*-nya.

Maka, kalau kita mengetahui bahwa penguraian suatu mantra menghasilkan deretan kata dan kata, substansi kemastraannya tak lagi terletak pada “kata” itu sendiri, tetapi pada komposisi dan repetisi-nya. Itulah sebabnya *kredo mantra* puisi Sutardji Calzoum Bachri ialah “membebaskan kata dari tanggung jawab makna”. Makna itu *nggendoli* kemungkinan terjadinya transformasi susunan kata-kata itu menjadi mantra.

Komposisi dan repetisi suatu mantra atau *hizib* merangsang pengumpulan energi atau *quwwah* yang kemudian digerakkan oleh *iradah*.[]

Musik Mantra dan *Hizib* (3): Kaki Kambing yang Kelima

Ketika pada suatu momentum koran-koran banyak memberitakan tentang kambing berkaki lima, pohon kelapa bercabang, lahir anak lembu berkepala seperti manusia, dan seterusnya, seorang guru agama menjelaskan kepada murid-muridnya: “Itu keajaiban bagi kita. Tetapi, tidak bagi Tuhan.”

Itu batas kerangka antisipasi umum terhadap hukum perkecualian, yang merupakan salah satu sifat kreativitas Tuhan. “Kaki kambing yang kelima” itu terdapat juga pada dimensi-dimensi lain yang nonbiologis. Misalnya, dimensi psikologis, spiritual, mikro dan makro kosmologis, atau yang secara lokal tampak seperti dimensi psikobiologis atau biopsikologis serta macam-macam pertalian transkontekstual lainnya. Bahkan, “kaki kambing yang kelima” merupakan ornamen penyifat realitas-realitas ilmu sosial biasa, atau malah juga pada teknik dan matematika.

Segala macam pemahaman manusia tentang yang disebut dunia mistik, *magic*, *kasekten*, dan sebagainya itu, merupakan guratan-guratan samar, situasional, dan sporadik dari keluasan dan ketakterhinggaan makrokosmologi “kaki kambing yang kelima”.

Itulah sebabnya dalam menanggapi *Seminar Kasekten* tempo hari, saya menekankan pendapat pada fungsi kerendahhatian. Pengenalan,

pengalaman, dan pendalaman *kasekten* setidaknya berguru bagi siapa pun agar memperoleh kesadaran kembali tentang betapa luasnya ilmu kehidupan. Bahwa “rasionalisme” terlalu remeh untuk di-*tuhan*-kan sembari meremehkan dimensi-dimensi lainnya. Bahwa menjadi sarjana, doktor, dan profesor keilmuan modern tidak otomatis merupakan lisensi kenabian ilmu, yang membuat seseorang merasa absah untuk meremehkan Tuhan dengan segala kedahsyatan ilmu dan penciptaan-Nya.

Seseorang yang “telah tua” bahkan mengatakan: Realitas “kaki kambing yang kelima” bisa jadi lebih luas wilayahnya dibanding realitas “kambing berkaki empat” apabila kita bersedia melakukan perjalanan untuk membuktikan betapa remehnya akal manusia.

Dalam konteks ini, kalau kita mengacu pada nomor tulisan (1) dan (2) sebelum ini kita bisa sebutkan bahwa kanvas, cat, warna, garis, dan titik-titik dalam lukisan Affandi sama sekali bukan realitas estetik lukisan Affandi. Kedahsyatan kreativitas Affandi justru terletak pada yang di luar lukisan itu, meskipun coba direpresentasikan oleh lukisan itu; atau bisa kita metaforkan bahwa keindahannya terletak pada “kaki yang kelima” pada setiap kambing, meskipun orang hanya berjumpa dengan “empat kaki kambing” di lukisan Affandi.

Ucapan “Imam Lapeooooo!”, “Syaikh Habaaaaasy!” dan “Allahu Akbar” adalah “empat kaki kambing”. Kalau sekarang Anda teriakkan “Imam Lapeooooo!” untuk menghentikan hujan, insya Allah hujan akan tetap menabur dari angkasa tanpa terpengaruh sedikit pun, karena “kaki kelima” Imam Lapeo, Syaikh Habasy, dan *Allahu Akbar* harus terlebih dulu dibangun oleh komposisi, akumulasi, dan repetisi unsur-unsur tertentu yang berasal dari sumber kata itu, dari diri Anda, maupun dari keberlangsungan komunikasi, internalisasi, kesalingpercayaan, ujian-ujian intensitas, dan waktu.

Manusia Imam Lapeo, di samping seorang Wali Qudrah (wali sejak dari *sono*-nya), adalah juga seseorang yang *nglakoni*. Sejak masa kanak-kanaknya, dia “terbimbing”, *ma’shum* (terpelihara) dan *mulhim* (terilhami), dan dia sendiri memiliki naluri dan akal sehat yang mem-

bimbing langkah-langkah hidupnya untuk mengakumulasi dan merepetisikan pelbagai macam kesalehan, kemuliaan, totalitas cinta yang terekspresikan secara telanjang dalam komunikasi sosialnya maupun kepada Tuhan. Kemesraan dan keimanan *siklis* antara Tuhan, Imam Lapeo, dan komunitasnya, menciptakan suatu komposisi energi dan kekuatan yang pada bagian-bagian tertentu merupakan “kaki kambing yang kelima”.

Komunikasi Imam Lapeo dengan Allah pun sudah sedemikian “sehari-hari” sifat dan bahasanya. Ketika pemuda-pemuda kampung merestorasi musalnya—yang ternyata menggunakan biaya dan material utangan—dan pada suatu siang manakala sedang sendirian dia ditagih oleh pemilik-pemilikinya, dia shalat dan berdoa: “Ya Allah, bayar utang-mu!” Dan datanglah sejenak kemudian seorang dermawan yang membesarkan semuanya.

Pada masa mudanya, seorang haji membuat sayembara untuk menebak apa isi kotak. Tiga “imam” salah tebakannya. Ada yang bilang beras. Ada yang mengatakan pakaian. Yang lainnya lagi malah mengatakan Kitab Al-Quran. Satu “imam” tepat: ada segumpal intan di dalamnya. Maka, kalau Imam Lapeo melakukan tebakannya yang sama, dia hanya akan dianggap meniru “imam” sebelumnya. Maka, dia berkata kepada Allah: “Ya Allah, jangan permalukan saya!”, kemudian menyatakan bahwa kotak itu tidak ada isinya apa-apa.

Maka tatkala, di hadapan segenap hadirin, kotak itu dibuka, *sim salabim*: ternyatalah memang kosong adanya.

Imam Lapeo sudah setingkat derajatnya dengan sebatang pohon: dia tak punya kehendak apa pun, kecuali persis seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan Imam Lapeo, dalam “satu diri” dengan Tuhan, bisa melakukan negosiasi, tawar-menawar, *bargaining*, atau transaksi tentang sesuatu hal.[]

Musik Mantra dan *Hizib* (4): Orang Gila dan Tukang Sihir

Prinsip yang ingin saya kemukakan sesungguhnya ialah terdapatnya sejumlah metode untuk menguak kemungkinan di luar “kepastian umum”.

Mantra dan *hizib*, rapal dan *izim* misalnya, hanyalah salah satu jenis metode. *Laku* dan *thariqat* atau khususnya *fi’l* adalah sebagian dari metodologinya.

Metode dan metodologi itu sendiri dalam kenyataan kebudayaan, kita jumpai sebagai aliran dan perguruan, yang kalau Anda lacak keseluruhan jenisnya, wataknya, variasinya, kesalingterkaitannya, dan seterusnya, Anda memerlukan energi besar, ketelitian yang selembut-lembutnya, ketajaman yang sejernih-jernihnya, waktu yang selapang-lapangnya, serta biaya yang setinggi-tingginya.

Prinsip lainnya adalah suatu pandangan bahwa realitas semacam itu tidak bisa serta-merta saya sebut sebagai “urusan di luar dunia ilmiah”. Sebab apa? Karena kerangka keilmuannya pada akhirnya jelas bagi orang yang “mengembarainya”.

Anda barangkali pernah mendengar informasi bahwa syarat menjadi *wali* (dalam pemahaman kultur maupun kosmofilosofi agama) adalah kalau seseorang sudah *gila* dan menjadi *penyihir*.

“Gila” dalam hal ini—untuk tingkat tertentu—bisa Anda sederhanakan ke dalam pengertian tentang gejala dan kreativitas yang fenomenal maupun fenomenologis. “Gila” adalah sesuatu yang “tidak umum”. Inkonvensional. “Carangan”. “Ijtihad”. Itu terjadi di dunia pemikiran, kesenian, kreativisasi penghayatan nilai-nilai agama. Hanya saja, dalam dunia mantra, *hizib*, *kasekten*, mistik, magi, dan sejenisnya, “carangan”-nya menguak dimensi-dimensi yang khusus dan berbeda dengan inkonvensionalitas kehidupan umum.

“Tukang Sihir” maksudnya adalah kesanggupan untuk “menyihir”. Itu yang saya sebut “atmosphering”. Yang disebut “sihir” tidak hanya berlaku pada realitas picisan seperti *pelet*. Ia juga muncul dalam kebudayaan, politik, kesenian, melalui kaum orator, para pemimpin masyarakat, seniman, dan aktor-aktor sejarah. Tetapi “sekadar” seorang Iwan Fals, Rhoma Irama, Gus Dur, Zaenuddin MZ, atau Madonna, tidak pula serta-merta bisa kita sebut “wali” mentang-mentang mereka “gila” (istimewa) dan pandai menyihir massa; sebab konsep kewalian atau *walayah* mempersyaratkan konteks nilai tertentu. Tidak cukup “gila dan penyihir”, tetapi gila dalam perspektif nilai apa dan menyihir untuk proses *kekhalifahan* yang bagaimana.

Itu semua bukan sesuatu yang non-ilmiah. Artinya, bisa cukup gamblang kita memperoleh penjelasannya. Bukankah disiplin yang paling ilmiah dan paling akademis pun tetap tertentang oleh “ketidakpastiannya kepastian”, oleh “kemungkinan yang membungkus ketetapan”, oleh cakrawala dan ketaktherhinggaan?

Adalah juga cukup ilmiah kalau untuk *dubbing* suara *Allahu Akbar* dalam film *Tjut Nya Dhien*, Eros Djarot tidak bisa sekadar mengumpulkan seratus orang untuk meneriakkan kata-kata itu. Dia harus riset dari ujung Aceh hingga akhirnya bertemu “magi”-nya di Tasikmalaya. Sebab kalau saya mengucapkan *Allahu Akbar* mungkin Anda tidak tersentuh, sedangkan kalau Anda yang meneriakkan *Allahu Akbar*, bulu kuduk saya berdiri dan muncul gelombang hangat jauh di dalam jiwa saya. “Magi” *Allahu Akbar* ditentukan antara lain oleh atmosfer kehidupan pengucapnya.[]

Musik Mantra dan *Hizib* (5): Musik Mantra atau Musik Dimantrai

Akan sangat menggiurkan apabila kita memiliki waktu panjang dan ruang yang luas untuk menguak sebanyak-banyaknya rahasia mantra.

Bagaimana proses eksperimentasi atau *ijtihad* yang pada akhirnya menghasilkan komposisi sejumlah kata, yang apabila dikawinkan dengan teknik napas dan metode pembatinaan tertentu bisa menggumpalkan energi, daya magnetik, dan penetrasi terhadap “tembok konvensi”. Selama ini kita hanya berkenalan dengan efek-efeknya, baik yang bersifat biologis, psikologis, spiritual, maupun sosial.

Di mana saja medan eksperimentasi itu: penghayatan pribadi yang universal? Khazanah budaya? Berita nenek moyang? Anasir-anasir dari agama dan kitab suci? Atau, campuran antara semua itu?

Bagaimana menjelaskan secara mendekati logika konvensional mengapa seseorang mampu “menghilang” (membebaskan diri dari daya penglihatan mata, yang memang sangat wadak dan amat terbatas)? Mengapa seseorang bisa melintasi hukum ruang dan waktu, sebagaimana *transformasi materi-energi-cahaya* pada peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw., sehingga mata pandang sehari-hari menyebutnya sebagai “berada di beberapa tempat sekaligus pada waktu yang sama”?

Mengapa dengan sebuah sentuhan fisik atau dengan sesorot tatapan mata, kondisi psikologis seseorang bisa diubah, atau sejumlah ilmu bisa dialihkan. Mengapa seseorang mempelajari sebuah buku dengan membacanya dari huruf ke huruf, sementara seseorang lainnya hanya memerlukan seserpih waktu untuk menatap dan menyentuh, lantas telah menyerap ilmu itu?

Mengapa *santet* dan *tenung* dan *jengges* menjadi kenyataan universal di setiap jengkal dari bulatan bumi ini tanpa pernah bisa benar-benar disangkal atau diabaikan? Mengapa modus-modus operandi kriminalitas banyak diwarnai oleh dimensi-dimensi semacam itu?

Mengapa bacaan sejumlah Ayat Suci menimbulkan efek yang hampir mirip dengan ramuan antara jenis tanah dan dedaunan tertentu dengan laku fisik, rumus silang ruang-waktu—misalnya untuk menembus *alam lembut*—meskipun kita mengerti bahwa semua makhluk (manusia, alam, dan ayat-ayat literer) pada hakikat dan pada syariatnya adalah memang firman Allah?

Mitos belakakah Aji Lebur Waja yang sanggup meluluhkan batu-batu cadas, atau Gumbala Geni yang membakar atmosfer, atau Aji Welut Putih yang menjadikan manusia selicin belut sehingga sukar ditangkap, tat kala kita mengetahui bahwa yang bernama kekuatan (*daya*, *power*, *quwwah*) bukanlah tulang daging ini sendiri, melainkan suatu “produk dari rahasia batin” yang tangan dan kaki hanya memedi-
diumi dan menyalurkannya?

Benda apakah cahaya itu? Benda padat? Cair? Gas? Materikah ia, atau permukaan yang terkasar dari ruhani?

Bilamana ilmu fisika ultramodern telah menjawabnya dengan mendasar dan hakiki, maka pengetahuan kita tentang benda-benda, darah, daging, daun-daun, warna, suara hati, letak akal, dan lain-lain, akan mengalami revolusi; dan itu berarti kebudayaan dan peradaban umat manusia pun akan menjelmakan wajah baru.

Ada ratusan atau bahkan ribuan pertanyaan lain yang apabila kita deretkan di sini akan sangat mengasyikkan. Apalagi jika kita mendetail dan membedah setiap mantra, aji-aji, rapalan, ayat, dan *izim*.

Akan tetapi, yang menjadi tema kita di sini adalah seberapa jauh kosmos yang kita raba itu akan diaktualisasikan melalui musik mantra dan *hizib* oleh teman-teman yang merancang pementasan itu?

Apakah dunia mantra akan sekadar dijadikan acuan untuk memperkaya pencapaian estetika musikal, ataukah aransemen musiknya akan bersenyawa dengan kosmos mantra itu sendiri untuk menghasilkan efek-efek konkret?

Musik mantrakah, atau musik yang memantrai?

Kita tunggu jawabnya pada pementasan tersebut.[]

Modal-Mokal Seni Islam

Di tengah berbagai kesibukan yang sangat menguras energi batin, tenaga, dan waktu, minggu kemarin saya menyempatkan diri ke Madiun menemani saat-saat terakhir sebelum drama-puisi “Lautan Jilbab” dipentaskan di Stadion Wilis kota itu.

Sejak tahun 1976, puluhan atau mungkin ratusan kali saya melakukan hal semacam ini. Pernah saya jadi kuli belakang panggung pementasan Bengkel Teater, Teater Sanggarbambu, Teater Dinasti, Sanggar Shalahudin, Teater Tikar, Teater Jiwa, Teater Aisiyah, Teater Flamboyan, juga belum lagi kalau dihitungkan tradisi keguyuban grup-grup teater Yogya yang biasanya melibatkan sangat banyak kolega—termasuk saya—untuk ikut bekerja.

Di Madiun itu hadir sekitar lima belas aktor Teater Jiwa pimpinan Agung Waskito dari Yogya, di samping melibatkan 176 orang pemain setempat yang datang dari Maospati, Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Madiun sendiri. Mereka harus kerja amat keras untuk pementasan kolosal yang ditonton 30.000 Muslimin-Muslimah.

Siapakah yang lebih besar dari Agung Waskito, yang mampu, sabar, dan amat telaten dalam waktu sangat singkat mengorganisasikan sebegitu banyak manusia? Untuk pementasan yang dituntut tidak saja

prestasi estetika dan komunikatifnya, tetapi juga dari sisi Islaminya?

Mungkin ada tenaga dari Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, lembaga-lembaga Islam lainnya, atau dari masjid-masjid, yang sesekali boleh menggantikan peran Agung Waskito.

Bahkan kemampuan saya, kesabaran saya, ketelatenan saya, serta kepemimpinan saya, hanya seujung jari dibanding yang dimiliki oleh Agung Waskito, anak yang tidak tamat SMA dan tidak pernah dianggap seseorang oleh umat dan pemimpin-pemimpinnya yang dia beri jasa sedemikian besar.

Normalnya teater profesional saja harus berlatih tiga bulan nonstop untuk satu pementasan. Ini pentas dengan pemeran-pemeran “kagetan” dari pelosok-pelosok, ditangani Agung seminggu dua kali selama hanya dua bulan—dan pentasnya berlangsung lumayan.

Pun pementasan itu berjudul “Lautan Jilbab”, *blakasuta* berbaju Islam dan sangat rawan tuduhan primordial, sektarianistik, atau apa pun yang amat merendahkan dan menghina.

Karya seni semacam itu apakah diperlukan? Apakah umat Islam, organisasi-organisasi Islam beserta para pemimpinnya, menganggap karya semacam itu ada manfaatnya?

Sesudah sukses pentas di Madiun itu—juga dulu di Ujungpandang, Malang, dan Yogya sendiri—permintaan mengalir dari Sabah Malaysia, Gontor, Pare, Solo, Jember, Surabaya, dan semua harus antri satu per satu, tiga bulan per tiga bulan, karena awal Mei ini Agung harus melangsungkan pernikahannya dulu di Palopo, Sulawesi Selatan.

Sebenarnya, kalau karya semacam itu, juga kalau kesenian Islam, tidak sungguh-sungguh penting, tolong janganlah kami diundang, sebab Tuhan *alhamdulillah* masih berkenan menitipkan banyak hal lain yang baik untuk diperbuat dan bermanfaat bagi kehidupan.

Akan tetapi, kalau memang *niat insun* dan *nawaitu*-nya mengundang, maka marilah kita sepakati kerendahan hati dan rasa syukur di antara kita.

Kami amat membutuhkan itu, sebab para pemeran karya itu adalah anak-anak muda yang masih sedang mencari. Mereka bukan Muslim *kamil* seperti Pak AR, Pak Azhar, Pak Amien, Pak Suroyo, dan lain-lain. Anak-anak muda itu masih berkapasitas seperti lazimnya anak-anak muda: shalatnya belum khusyuk, tahajudnya belum mendalam, bahkan terkadang masih kecolongan perilaku yang membahayakan.

Di awal 1980-an, saya kerepotan menggembalakan anak-anak Teater Dinasti yang saya ajak pentas musik puisi khusus untuk jamaah Islam kampus. Dan ini berlangsung berulang-ulang. Perilakunya masih ada yang abangan. Juga ketika Sanggar Shalahudin awal-awal berdiri, masih banyak teman “yang belum lulus masuk surga”.

Kelebihan konkret mereka hanyalah bahwa mereka bersedia membantu syiar Islam melalui kesenian serta bersusah payah untuk itu, termasuk mau dicaci maki oleh orang Islam sendiri. Misalnya karena jilbabnya belum tertib, duduknya *metingkrang*, gaya perilakunya tidak santri, dan sebagainya.

Di Madiun kemarin mereka juga memperoleh caci maki semacam itu. Dan mereka menerimanya dengan tak lagi menangis, meskipun mereka tahu karya-karya seperti itu tak akan terwujud tanpa peran serta mereka.

Apakah Anthony Quinn dan Irene Papas yang beragama Kristen dulu juga dicaci maki oleh umat Islam karena keduanya membintangi film *The Message* dan *Lion of the Desert* karya Musthafa Akkad?

Kasihannya anak-anak yatim di Madiun itu. Tubuhnya kumuh, pakaiannya kumal, uangnya selalu tipis, rambutnya awut-awutan, bekerja ekstrakeras untuk syiar, ditonton oleh puluhan ribu Muslimin-Muslimah dan dicaci maki dari belakang.

Rupanya syarat menjadi pemain drama Islam ialah kadar kemuslimannya harus sempurna dan utuh dulu bagaikan Sayyidina Ali dan Abu Dzar Al-Ghifari.

Saya setuju dengan syarat dan modal itu, sehingga kaum Muslim di mana saja janganlah mengundang anak-anak yang saya temani itu.

Sebab pada suatu hari anak-anak itu bisa tak tahan hati terus dimaki-maki dan ditikam dari belakang. Seandainya mereka mualaf, mungkin mereka minggir dari Islam oleh caci maki itu. Seandainya mereka baru pada taraf bersimpati kepada Islam, mungkin mereka akan meralat simpatinya kepada Islam.

Dan apabila hal itu terjadi, apabila anak-anak itu pergi karena tak tahan hati, percayalah bahwa saya, Emha Ainun Nadjib, akan melangkahkan kaki di sisi mereka.[]

Ki Sunan dan Ki Juru

Sejak berabad-abad yang lalu hingga—barangkali—berabad-abad yang akan datang, salah satu sumber ketegangan sosial atau konflik peradaban dalam masyarakat dan negara manusia, adalah perbenturan antara otoritas negara dan otoritas agama. Segala jenis pertentangan, pada skala kehidupan sehari-hari maupun yang lebih luas dan lebih sistemik, sesungguhnya disumberi oleh pertentangan dasar tersebut.

Sesudah Abad Pertengahan, peradaban masyarakat Eropa mengalami kebangkitan rasionalisme yang mencerahkan sejumlah kegelapan nilai dasar mereka. Salah satu tulisan adalah filosofi sekularisme yang secara tegas memisahkan otoritas negara dan otoritas agama.

Sejak itu wilayah peran agama menjadi sangat terbatas pada lingkaran *privacy* setiap orang. Agama “tidak boleh” seenaknya mengatur kehidupan manusia dari dapur, kamar mandi, gardu, hingga istana negara. Ia hanya punya kapling yang menyangkut komunikasi antara individu dan Tuhan. Lalu lintas di jalan raya, juga lalu lintas uang dan birokrasi, bukan agama yang mengaturnya. Teokrasi adalah momok dari masa silam yang tak boleh kembali dari kuburnya.

Dalam sejarah pra-Indonesia, konflik semacam itu sesungguhnya telah ada, setidaknya secara embrional.

Raja-raja Majapahit memang memeluk ramuan unik antara Hindu dan Buddha, tetapi konsep kerajaan dan pemerintahan yang berlaku sama sekali berada di tangan raja dan lingkarannya. Secara “natural”, otoritas negara ketika itu telah mengatasi kekuasaan agama.

Tatkala Brawijaya terakhir bersedia “memangkas rambut”-nya atas fetakompli Raden Fatah, kemudian Nyoo Lay Wa—Gubernur Majapahit ketika Demak telah membawahnya—dibunuh beramai-ramai oleh sisa rakyat Majapahit non-Muslim: seolah-olah teokrasi Islam sedang didirikan.

Pemerintahan Demak dilatari oleh kewibawaan dan otoritas politik para wali. Islam pesisir memberi format pada pelaksanaan pemerintahan kesultanan dan kehidupan rakyatnya. Meskipun ketika itu telah ada perbedaan *approach* politis dan kultural antara para wali *bang-wetan* di Surabaya dan Gresik dengan wali pesisir utara Kudus Semarang, di mana Sunan Kudus telah menerapkan suatu model persuasi Islam terhadap idiom-idiom kebudayaan Jawa, tetapi dominasi otoritas agama atas kerajaan tetap sangat menonjol.

Sampai akhirnya Sunan Kalijaga menegaskan pendekatan kultural itu secara lebih masuk ke dalam “rempelo ati” kebudayaan Jawa. Sampai akhirnya dia mendorong transformasi untuk menyeimbangkan antara dua otoritas itu dan melatarbelakangi pola kekuasaan Sultan Hadiwijaya di Pajang. Dan akhirnya, Arya Penangsang *mbrodol* ususnya oleh tombak Jebeng Sutawijaya.

Barangkali memang menarik posisi Pajang: Tidak terlalu pesisir, tidak terlalu pedalaman. Seolah-olah letak geografis Pajang mewakili peletakan strategi penyeimbangan otoritas itu.

Tetapi yang terjadi adalah Panembahan Senopati menggantikan legitimasi wali dengan Nyai Roro Kidul, yang sebenarnya sekadar perlambang dari otoritas kekuasaan Jawa. “Negara” dalam terminologi panembahan Senopati—atasi konsep yang disusun oleh Ki Mondoroko Juru Martani—*jumbuh* dengan kebudayaan Jawa itu sendiri.

Strategi Ki Juru adalah merangkul agama dalam batas formalitas politik, tetapi menghambatnya secara kultural. Ketika cucu Sultan

Agung kemudian tak mampu lagi mempertahankan moderasi strategi ini, yang terjadi adalah ekstremitas kekuasaan negara di mana ribuan kiai dibantai habis.

Itulah “Abad Pertengahan” dalam sejarah Jawa.

Otoritas agama kemudian terkebiri. Mereka termarginalisasi. Lari ke pinggiran. Sembunyi di semak-semak belukar. Mendirikan pesantren-pesantren yang “memisahkan diri dari dunia”.

Ketika kemudian kekuasaan “Negara Mataram” berkembang makin canggih dengan peralatan birokrasi dan militer yang mampu menjangkau “helai rambut di ketiak” para penyembunyi itu, maka kemungkinan yang terjadi hanya dua. *Pertama*, mereka gampang mengamuk. *Kedua*, mereka gampang menggantungkan diri justru pada kekuasaan negara.

Keadaan seperti itu berlangsung sampai hari ini.

Tulisan ini bukanlah mendambakan bangkitnya kembali otoritas agama untuk mengatur negara. Melainkan sekadar secara rasional dan dengan kerinduan demokrasi: memimpikan penyeimbangan yang dewasa serta kemungkinan kerja sama antara dua macam otoritas itu.

Saya tidak bahagia menyaksikan Ki Sunan berperang tanding melawan Ki Juru. Kita memerlukan formula kerja sama. Koperasi dan interdependensi. Bukan dependensi salah satu pihak.[]

Nyoo Lay Wa yang Malang

Mestinya Anda kenal siapa Nyoo Lay Wa, bukan?

Kata sebuah sumber sejarah, dia adalah penguasa terakhir Majapahit. Bukan raja, sebab raja pamungkas Majapahit adalah *babe*-nya Raden Fatah. Lha Nyoo ini semacam gubernur, yakni ketika pusat kekuasaan sudah berpindah ke Demak. Mungkin karena masih sedulurnya Raden Fatah, maka dia diangkat menjadi penguasa “Negara Bagian” Demak yang tetap bernama Majapahit.

Pak Lik Nyoo ini tak jelas apa “nama Jawa”-nya atau “nama Islam”-nya—seandainya dia juga menjadi seorang Muslim seperti Raja Demak. Tetapi bisa dijamin dia teguh menggenggam “nasionalisme Demak”. Meskipun tanpa nama Jawa atau nama Islam.

Namun, nasib malang menimpanya. Tak lama memerintah, dan pasti belum sempat cari komisi dari proyek-proyek perampokan tanah air oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Juga belum sempat mensponsori putranya, umpamanya, untuk menjadi promotor tinju profesional.

Dia dikeroyok oleh penduduk provinsi Majapahit. Masya Allah. Dan menjadi jenazahlah dia, dan terkubur sama sekalilah wilayah Majapahit. Ketika itulah polarisasi politik Jawa-Islam bermula. Rakyat Jawa naik pitam, mengapa Brawijaya Pamungkas akhirnya bersedia

“potong rambut gondrongnya” dan membaca syahadat, serta merestui penggantian Hanacaraka menjadi Alifbata. Nyoo menjadi sasaran frustrasi pihak yang disebut terakhir itu.

Sampai enam abad kemudian, polarisasi itu terus menjadi benang merah sejarah Nusantara, meskipun dibumbui oleh varian-varian tertentu, atau bahkan fenomena Nyoo itu sendiri akhirnya substansi tersendiri dari sejarah nasib negeri ini.

Panjang-lebar, deh keterangannya. Tetapi yang mengingatkan saya kepada nasib Lik Nyoo ialah omong-omong Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo dengan wartawan beberapa hari yang lalu. Beliau ditanyai pendapatnya tentang uang kita yang disimpan di luar negeri. Beliau dengan santai menjawab, “... itu bukan terjadi hanya di negeri kita. Di Kanada, Eropa Barat, dan lain-lain, orang juga simpan uang keluar sesuai dengan gelombang pasang surut dolar, yen, dan seterusnya.”

Mengapa, kok lantas ingat Lik Nyoo? Karena raja uang kita mengakumulasi simpanannya di negeri leluhurnya sehingga tak lagi menjadi devisa negara kita. Itu pun dalam jumlah di mana kapasitas kekayaan saat ini amat tergantung Tak banyak informasi yang sampai dengan jujur kepada kita bahwa keadaan ekonomi “dusun” kita sekarang ini sedang amat gawat. Prof. Mubyarto misalnya hanya secara implisit bilang bahwa “ketahanan ekonomi rakyat kecil masih kuat”

Kalau ada orang bilang tentang ketahanan, itu berarti ada sesuatu yang membuat orang banyak harus pintar-pintar bertahan. Ada serangan. Ada krisis. Ada problem serius. Tetapi, kebanyakan ekonomi kita bukanlah “informan rakyat”.

Lik Nyoo dan sang raja uang di atas punya satu kesamaan: memperoleh *privilege*, peluang, kemudahan, untuk mengambil sebagian (kecil maupun besar) dari diri kita atau apa yang kita miliki. Milik itu berarti lubang dalam birokrasi, kendali dalam politik perekonomian, serta berbagai macam “dispensasi” yang ilegal, sistemik, dan struktural.

Saya berdoa kepada Allah agar sang raja uang jangan sampai memperoleh kesamaan nasib akhirnya seperti Lik Nyoo. *Na‘udzubillahi min*

dzalik. Peta keadaan juga sudah amat berlainan. Persepsi kita atas kasus-kasus politik dan ekonomi harus disaring sedemikian rupa dari benih rasisme. Namun, sebaliknya kita tidak lantas menghindari segala objektivitas hanya untuk memutlakkan saringan itu.

Di hadapan semua itu, saat ini, setidaknya kita mengerti bahwa kita amat butuh perolehan informasi-informasi yang lebih objektif tentang berbagai masalah pokok rakyat dan negara kita. Kalau tak ada “media massa informal” yang memungkinkan informasi itu, ya kita mesti cari. Berburu.

Termasuk perlunya kita menggunakan kecerdasan tertentu dalam menanggapi omongan Pak Muby di atas. Kalau seorang anak tahan dipukul, itu artinya saham bagi kemapanan tindakan memukul. Terkadang orang perlu tak tahan lapar dan menderita, sehingga dia lebih cepat mencari jalan untuk menjawab kelaparan dan penderitaan.

Terkadang kesabaran itu negatif. Kesabaran bisa memanjakan sesuatu yang semestinya tak disabari. Kelemahan juga justru merupakan sumber kekuatan bagi kekuasaan yang menimpa. Tetapi, meskipun demikian, kita bukan masyarakatnya Gubernur Nyoo yang gampang ngamuk secara primitif.[]

Mengembalikan Manusia ke Alam, kemudian ke Tuhan

Pariwisata adalah fenomena religius, dalam arti demikian: Manusia modern memasuki proses teknologisasi kebudayaan, yakni arah menjauh dari alam, kemudian menciptakan peluang-peluang khusus untuk kembali ke alam. Kembali dengan Tuhan. Jadi, pariwisata adalah potensi rereligiosisasi.

Terminologi kultur modern menyebut dialektika antara tahap kreasi dan tahap rekreasi. Pariwisata merupakan salah satu pilihan rekreatif, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan kembali manusia modern memasuki olah kreasi.

Bahwa pariwisata dipilih sebagai modus rekreasi, itu karena perspektif filosofi kultural masyarakat modern—yang notabene berpangkal dari masyarakat Barat, dan notabene berwatak sekuler. Masyarakat yang secara teoretis bersikap nonsekuler dan lebih memercayai filosofi dan kosmologi yang bersumber dari informasi wahyu, mestinya punya pilihan berbeda. Apalagi ketika kemudian budaya pariwisata modern itu dikotori oleh muatan-muatan yang juga teknologis-sekuler, bahkan dipokoki oleh ketidakterelakan alternatif seperti wisata seks serta berbagai bentuk alternatif yang oleh *term* agama disebut kemaksiatan.

Bagi masyarakat tradisional-agraris, pariwisata memiliki arti dan orientasi yang berbeda, sebab masyarakat tradisi memiliki pola per-

gaulan serta jarak yang berbeda dengan alam dibanding masyarakat modern berpariwisata untuk “melihat kembali alam”, maka masyarakat tradisi berpariwisata justru untuk “nonton modernitas”. Dengan kata lain: *Wisman* mengajar alam, *Wisnu* mengejar teknologi.

Apa yang diketahui oleh manusia tentang spiritualitas? Tentang ruh, jiwa (juga sukma, perasaan, *roso*, *nafs*, dan seterusnya), serta hubungannya dengan dunia fisik?

Manusia memiliki kesanggupan terbatas untuk menggali sendiri pengetahuan tentang masalah itu, tetapi di luar batas eksplorasinya itu manusia membutuhkan informasi dari wahyu Allah. Karena itulah, agama diperlukan oleh manusia: tidak sekadar sebagai “peraturan”, tetapi lebih penting lagi sebagai informasi ilmu, yang sesungguhnya merupakan landasan mutlak bagi setiap dimensi hukum yang dikandung oleh agama.

Eksplorasi ilmu tradisional terhadap dunia spiritualitas cenderung terjebak pada takhayul, klenik, atau mitos. Sementara ilmu masyarakat modern kurang “berselera” untuk memasuki wilayah spiritualitas, dan terjebak pada semacam ketidakpercayaan terhadap spiritualitas. Dengan kata lain, orang tradisi “menyembah hantu”, orang modern “menyembah batu”.

Saya pribadi berkesimpulan pada titik ekstrem tertentu, baik masyarakat tradisi maupun masyarakat modern terjebak pada kegagalan cukup serius dalam usahanya merumuskan perjalanannya menuju penyatuan diri kembali ke hakikat Tuhan, hakikat alam, dan dengan demikian juga hakikat kemanusiaannya sendiri.

Saya sebut di atas polarisasi antara alam dan teknologi, dan karena manusia sepenuhnya memasuki teknologi secara ahistoris dalam konteks hakikat spiritualitasnya, maka polarisasi itu juga terjadi antara manusia dan Tuhan.

Ini semua berangkat dari filosofi manusia modern yang ingin menaklukkan alam, sesudah filosofi menyatu dengan alam pada masyarakat

kat tradisi. Manusia modern mengatasi alam, menteknologikan alam menjadi kebudayaan—karena memang demikian salah satu ciri manusia modern yang berwatak dinamis; sementara manusia tradisi berwatak pasif dan konservatif karena berfilosofi melebur pada alam. Mana yang “benar” di antara keduanya?

Dinamika manusia modern dengan teknologisasinya akhirnya terjebak pada kekeringan ruhani—pada pandangan saya berdasarkan referensi religi Islam—karena perjalanan ke depan mereka memakai perspektif waktu yang linier. Langkah ke depan mereka adalah langkah menjauh dari alam dan Tuhan. Di dalam Islam terdapat konsep *ilaihi raji’un*: kepergian hidup manusia ini kembali ke Allah. Perjalanan ke depan, tetapi sekaligus berarti kembali ke “belakang”. Konsep waktu dalam Islam adalah siklis, membulat, melingkar. Secara filsafat, perjalanan manusia modern dirumuskan dalam orientasi eksistensialisme, dan itu berarti menjauh dari Allah, atau dengan bahasa Islam: antitauhid. Sementara pada masyarakat tradisi—yang sebenarnya juga memiliki konsep waktu siklis—metode untuk “kembali ke Allah” itu ditempuh tidak dengan “maju ke depan”, tetapi dengan “berjalan di tempat” atau “balik ke belakang”. Jadi, baik masyarakat modern maupun tradisi melakukan tarekat yang sama-sama keliru. Masyarakat modern sukses mengkhalifahi alam, tetapi keliru orientasinya sehingga tidak *taqarrub* kepada Allah; sementara masyarakat tradisi bertahan dekat dengan Allah, tetapi gagal melaksanakan kekhalifahan yang dinamis. Sebenarnya ini semua adalah peta peradaban yang luas sekali, tetapi kali ini kita harus fokuskan pada persoalan pariwisata.

Kegagalan ruhaniah (spiritual) kebudayaan modern itu digelisahkan oleh “bawah sadar” mereka sehingga kemudian ditelurkanlah antara lain alternatif budaya yang bernama pariwisata, seperti yang diungkapkan di atas. Ruhani manusia modern memiliki kerinduan kepada alam dan Tuhan, dan pariwisata adalah metode-metode lain seperti “budaya mabuk” baik dengan minuman keras maupun dengan musik *rock* atau sepak bola—yang sesungguhnya diam-diam dimak-

sudkan untuk proses rehumanisasi kemanusiaan mereka yang *being dehumanized* oleh keringnya teknologisasi kehidupan.

Itulah sebabnya maka pariwisata itu sesungguhnya sangat—pada mulanya—memiliki potensi religius-spiritual. Tetapi, sayang sekali itu tak disadari secara filosofis oleh manusia modern itu sendiri sehingga modus yang mereka ciptakan dalam pariwisata justru banyak bertentangan dengan proses religioisasi manusia.

Dunia pariwisata Indonesia juga diselenggarakan hanya dengan keberangkatan industrial-teknokratis, hampir sama sekali tidak didahului oleh pemahaman-pemahaman kosmologis dan filosofis serta fenomena budaya yang bernama pariwisata.

Kita sekadar “orang miskin” yang butuh tambahan nafkah dan untuk itu kita mempersolek diri, *mejeng*, mengharapkan para “orang kaya” membeli kecantikan kita. Pada hakikatnya kita tidak berbeda dengan prostitut, segala sesuatu yang menyangkut persolekan diri itu semata-mata kita orientasikan kepada apa yang disukai oleh orang-orang kaya itu. Bukankah itu psikologi dan sikap profesional seorang pelacur?

Kita butuh makan, atau setidaknya tambahan uang jajan, untuk itu kita bersedia melakukan apa saja yang merupakan selera “pembeli” kita. Kita melunturkan, bahkan pada saatnya nanti benar-benar melemparkan kepribadian kita sendiri, karena yang penting adalah “pengabdian” diri kita kepada “para pelanggan” rumah bordil kita. Pada suatu hari kelak, kita sebagai bangsa akan betul-betul kehilangan *dignity*, kehilangan harga diri, kebanggaan atas kepribadian diri sendiri, bahkan kehilangan martabat.

Kita bersedia mengorbankan sakralnya tradisi keagamaan untuk dipaket sebagai barang jualan. Kita meruntuhkan harga kreatif kesenian kita demi sekeping dolar. Padahal, sebenarnya kita bisa melakukan dan menawarkan sesuatu yang lain yang lebih hakiki dan yang belum tentu tidak “laku”.

Mengusahakan penggalian dan perumusan tentang “fenomena pariwisata” menurut khazanah yang kita miliki sendiri, yakni komprehensif antara khazanah filosofi tradisi (Timur) dan khazanah keagamaan. Para pakar di bidang teknologi, kebudayaan, dan agama bisa berkumpul untuk merumuskan bahwa pariwisata bukan sekadar urusan jual diri “menyembah” pembeli dari mancanegara.

Menerbitkan buku-buku kepariwisataan Indonesia yang tidak sekadar memandu pengetahuan tentang di mana candi, di mana pantai, dan di mana pelacur, melainkan justru memaparkan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang sungguh-sungguh memiliki sendiri pandangan filosofis, sikap budaya, serta tawaran substansi kepariwisataan yang orisinal.

Mulailah mengusahakan pembagian dua wilayah atau dua kategori pariwisata. Yang satu mencoba persuasif terhadap pembeli, lainnya mencoba menyuguhkan orisinalitas kepribadian kita sendiri. Ini agar nasionalisme dan kebudayaan Indonesia memiliki daya negosiasi yang berusaha berimbang dengan keperluan-keperluan dari bangsa dan kebudayaan lain yang ingin “membeli” kita. Kita harus menjadi bangsa yang menolak perkembangan untuk menjadi “budak” atau “pelacur” dari bangsa lain.

Ketiga alternatif yang saya rekomendasikan di atas sesungguhnya tidak sama sekali “antipasar”. Artinya, komoditi pariwisata kita tidak mutlak mempersyaratkan “menjadi pelacur” supaya “laku”. Saya bahkan melihat yang sebaliknya pada masa datang. “Ideologi kepariwisataan” yang hanya siap bersolek jadi “pelacur” justru akan menjadi marginal dalam peta industri masa depan. Alasan saya antara lain:

Masyarakat modern mancanegara yang memasuki Indonesia sebagai turis, memiliki tradisi intelektual yang relatif sudah mapan. Maka cepat atau lambat, sesungguhnya “permintaan” mereka terhadap “pasar pariwisata” justru adalah dimensi-dimensi yang lebih kualitatif daripada sekadar pemandangan alam, seni paket, dan seks.

Abad ke-21 adalah Abad Spiritual Umat Manusia. Dasawarsa-dasawarsa peradaban ultramodern di hadapan kita disubjekti oleh masya-

rakat “jenuh-modernitas” yang membutuhkan tawaran-tawaran dari dunia spiritual. Akan makin banyak wisman yang datang ke Indonesia dengan rasa haus spiritual yang lebih mendalam.

Kepribadian khas bangsa Indonesia, kebudayaannya yang amat kaya, referensi keagamaan yang merupakan sumur amat dalam—seungguhnya memiliki kapasitas amat besar untuk sanggup menawarkan modus-modus kepariwisataan spiritual. Kita ini bangsa yang tidak murah, bahkan sebenarnya bisa lebih mahal dari yang kita sangka.[]

Inisiatif-Inisiatif Kebudayaan Muslim

Senin pagi besok di Gelanggang Mahasiswa UGM Yogya diselenggarakan diskusi tentang “Alternatif-Alternatif Kebudayaan Muslim”, sebagai semacam “pemanasan” sebelum malam harinya ditampilkan acara “Bintang Mubaligh Baca Puisi” di tempat yang sama.

Kedua acara itu berangkat dari semangat untuk—suatu jargon klise, tetapi belum juga benar-benar terwujud: merintis terobosan-terobosan strategis di mana kaum Muslim berusaha mencari bentuk kreativitas untuk menyubjeki kebudayaannya sendiri. Saya membayangkan acara pagi dan malam itu bisa merupakan embrio dari keadaan di mana agama menemukan dirinya dalam kebudayaan, sebaliknya juga kebudayaan melahirkan dirinya kembali dalam agama.

Perspektif persoalan yang bersangkutan dengan niat-niat baik acara tersebut sesungguhnya amatlah luas. Tidak hanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kembali terhadap—misalnya—kebudayaan modern, sumbangan Islam terhadap hari esok kebudayaan manusia dalam arti menyeluruh maupun detail-detail. Lebih dari itu, ia kontekstual dengan berbagai macam gejala manusia modern pada abad ini: kapitalisasi dan konsumerisme budaya, filsafat-filsafat sekularisme yang mendasarinya, sampai juga menyangkut mekanisme politik mau-

pun ekonomi yang menginisiatif dan memutar roda kebudayaan manusia dewasa ini.

Oleh karena itu, refleksi ini berusaha membatasi diri untuk hanya menelusuri secara singkat benang merah pertumbuhan budaya kaum Muslim di negeri ini, termasuk bagaimana mereka mengantisipasi segala macam arus dan momentum kesejarahan di mana mereka terlibat.

Saya memakai istilah kebudayaan Muslim, bukan kebudayaan Islam, karena soal citra (kultural) dari kata tersebut.

“Islam” segera menyeret asosiasi kita kepada kesan “aliran”, “ideologi”, serta sangat gampang “berbau politis”; sementara semua itu gampang menjebak kita untuk seolah-olah melihat suatu ekspresi dari “fanatisme”, bahkan “sektarianisme”.

Sementara itu, kata “Muslim” terasa lebih memberi kesan tentang manusia, tentang wajah kehidupan, sehingga lebih terasa karib dan teduh di telinga dan hati kita.

Oleh karena itu pula sebenarnya yang kita lacak adalah “Yang mana tampak wajah budayamu, wahai kaum Muslim?”

Acuan pertama yang kita pakai ialah menyadari bahwa antara manusia atau masyarakat dan wajah budayanya, terdapat sumber-sumber nilai. Sumber nilai itu bisa penghayatan naluriyah atas hukum-hukum nilai hidup ini, bisa pengembangan rasional dan intelektualnya, bisa juga agama dan lain-lain. Sumber nilai bagi sebuah kelompok masyarakat pertama-tama adalah perilaku alam serta hukum-hukum batiniahnya sendiri, kemudian baru mereka memperoleh “barang jadi” dari pergesekan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat itu lantas lebih sampai kepada kesadaran nilai atau pemahaman terhadap pengalaman-pengalaman yang memberinya “kesimpulan” nilai.

Dalam hal ini manusia atau masyarakat biasanya melewati dua tahapan. *Pertama*, tahap di mana proses budaya dikendalikan atau memakai bahan-bahan yang masih bersifat “universal”—kita sebut mereka berguru kepada alam. Tahap berikutnya adalah proses di mana

manusia sudah berjumpa dengan informasi dari Tuhan, dan informasi itu merupakan sumber utama (substansial dan metodologis) nilai yang dianjurkan untuk digunakan oleh kehidupan manusia.

Dari “rumus” di atas, kita bisa sedikit melacak beberapa segi kesejarahan budaya kaum Muslim Indonesia.

Sejak semula mereka (sebagai masyarakat) melakukan proses budaya dan menemukan “agama-agama” naluriah mereka yang diwujudkan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sosial, bertani, berpolitik, dan seterusnya. Kemudian, ada tahap di mana impor nilai dan tradisi budaya keagamaan Hindu dan Buddha mencampuri budaya mereka sehingga terbentuk modifikasi budaya baru. Lantas ketika Islam datang, agama itu berjumpa dengan manusia dan masyarakat yang sudah ber-“menu” semacam itu. Berlangsung pergulatan, penumbuhan, penyirnaan, antara lain Islam dengan nilai dari “menu budaya” lama itu.

Dan tatkala akhirnya dunia “modern” tiba menjadi “panglima sejarah”, ramuan menu menjadi semakin ramai dan seru.

Manusia dan masyarakat Muslim “modern” kemudian menjumpai di dalam dirinya berbagai unsur: naluri etnik, sisa sel-sel Buddha-Hindu, klenik-klenik tradisional, pilar-pilar hukum Islam, jurus-jurus sekularisme, serta berbagai “kewajiban” untuk hidup “secara Barat”.

Suatu gerakan swadesi dalam Islam pernah ingin “membersihkan” itu semua dan memilih satu hal yang disebut “pemurnian” Islam atau “kembali kepada Al-Quran dan Sunnah”. Sayangnya proses “perasionalan” kehidupan agama itu agak kurang dilandasi pemahaman dan kesadaran mengenai proses-proses budaya manusia dan masyarakat. Maka yang diberantas pada umumnya adalah “bentuk-bentuk budaya” dan bukannya pemahaman dan sikap terhadap bentuk-bentuk itu. Dengan kata lain: ingin membuang kerikil dalam nasi dengan cara membuang seluruh nasi di piring; atau ingin menyembuhkan borok dengan memotong kaki.

Tradisi-tradisi budaya keagamaan atau seni keagamaan dihapus tanpa diberikan gantinya: akhirnya, kaum Muslim diseret oleh arus

lain yang justru datang dari luar dirinya dan mengancam eksistensi akidah keislaman mereka. Paket-paket budaya Islami tradisional dipenggal begitu saja, bukan sekadar direduksi unsur-unsur bid'ah-khuraflat atau kleniknya.

Dengan kata lain, karena kurangnya pemahaman terhadap proses rekayasa kebudayaan: yang diselenggarakan oleh gerakan pemurnian itu adalah hanya perubahan ke arah kevakuman. Perubahan tanpa tawaran kontinuitas budaya. Dalam metafor lain: kekufuran kreasi budaya itu bukannya diislamkan, melainkan dibunuh dan dibuang.

Karena dekade yang cukup lama di mana kaum Muslim tidak belajar merekayasa perubahan proses budayanya, maka ketika mereka lantas diserbu oleh “klenik-klenik modern” yang jauh lebih dahsyat daya cengkeramnya—maka mereka pun tak mampu mengantisipasi. Misalnya, terhadap tradisi film-film yang liberal-telanjang, budaya video, kehidupan kelompok teater yang suka *free sex*, musik dan penyanyi remaja yang sarat maksiat, atau lebih luas lagi misalnya budaya *niteclub*, senam kostum minim. Atau, segala macam “kebudayaan kota modern” yang dipimpin oleh “akidah” sekularisme dan liberalisme.

Berhadapan dengan budaya seperti itu, kaum Muslim bukan saja belum mampu menjadi subjek budaya yang aktif mengantisipasi, bukan saja mereka justru menjadi konsumen utama dari produk-produk budaya Jahiliyah itu, melainkan juga bahkan sampai hari ini kaum Muslim tidak dengan penuh kesadaran belajar menguasai media-media dan teknologi budaya di mana mereka bisa menggunakan untuk “berperang” melawan kejahiliyahan itu.

Biasanya yang “dibenci” bukan hanya “film yang bagaimana”, melainkan bahkan juga media film itu sendiri. Padahal, media itu amat efektif, dan kaum Muslim bisa memfungsikannya juga untuk tujuan dan moralitas mereka sendiri. Kita bukan hanya “antifilm buruk”, melainkan ternyata “antifilm” itu sendiri. Kita curiga terhadap teater, bukan kepada “teater yang buruk”. Juga media-media seni budaya lainnya yang sebenarnya terbuka bagi kaum Muslim untuk “diislamkan”.

Akibatnya, kaum Muslim tak kunjung memulai secara serius, organisasional dan strategis, untuk mengembangkan pola budayanya sendiri. Paling jauh mereka bersikap defensif dan eskapistik terhadap inisiatif-inisiatif kebudayaan yang dikendalikan oleh orang lain, meskipun yang disebut “orang lain” itu kebanyakan orang yang beragama Islam juga.

Refleksi ini akan sangat panjang apabila kita serius memperdalam dan memperluasnya. Akan tetapi untuk sementara, dari uraian di atas, tampak sekali keperluan kaum Muslim untuk segera menentukan inisiatif kebudayaannya sendiri. Tak hanya untuk “melawan arus lain”, tetapi juga “sekadar” untuk menentukan dirinya sendiri.

Sekarang, kita perlu meneliti kembali setiap pos/kantong/lingkungan budaya kaum Muslim untuk mengetahui seberapa jauh mereka masih menjadi inisiator budaya atau kesenian demi mempersemangat kehidupan keagamaannya. Mungkin pesantren, desa “religius”, jaringan pengajian, remaja masjid, dan lain-lain. Kita teliti kembali setiap kelompok, lembaga atau individu, serta masyarakat Muslim pada umumnya, untuk menakar seberapa jauh perbandingan antara posisi konsumen dan posisi produsen mereka dalam konteks wajah budaya mereka.

Kita memerlukan organisasi—bukan hanya “organ”—di mana para kiai, pemimpin, pemikir, pekerja seni, takmir masjid, dan lain-lain serta para “penggemar kesenian” dan masyarakat Muslim, untuk menemukan bentuk-bentuk awal dari rekayasa budaya Muslimin.

Terakhir, secara singkat saya sudah lama membayangkan bahwa kaum Muslim memiliki sementara Laboratorium Kebudayaan di mana kita bisa melakukan banyak hal. Umpamanya selalu memusyawarahkan rekayasa-rekayasa kebudayaan Islami, menampung dan mendorong perkembangan para pekerja seni Muslim, merintis jaringan-jaringan “pasar” seni budaya Muslim, menumbuhkan kemampuan-kemampuan budaya aktif per kelompok, per jamaah kaum Muslim—jadi, bukan hanya para senimannya.

Syukur apabila kita pada tahap berikutnya bisa juga merintis pemfungsian aktivitas seni budaya untuk metode bagi penumbuhan kesadaran umat Islam terhadap segala macam persoalannya; menawarkan model artikulasi untuk mengungkapkan kesadaran dan kehendak-kehendak (budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya) mereka—sehingga kaum Muslim “lebih bisa berbicara”. Selebihnya diproses juga sosialisasi—lewat kreativitas seni budaya itu—bermacam-macam keperluan umat, penggalangan kekuatan sosial budaya, negosiasi ekonomi dan politik, serta apa saja yang baik dan yang mungkin.[]

Pusat Kebudayaan Muhammadiyah

Banyak mubalig dalam banyak pengajian berucap antara lain mengenai kebudayaan film dengan penuh kegelisahan dan kecemasan. Film-film yang beredar dan ditonton oleh “anak-anak kita”, 90 persen tidak menguntungkan pendidikan moral dan akhlak, bahkan bisa dibilang merusak akhlak mereka.

Film itu tergolong media komunikasi budaya yang amat efektif. Sosialisasi nilai lewat film lebih ampuh dibanding lewat media cetak atau media lainnya. Film sangat mampu “memobilisasi” arah selera kebudayaan sejarah, di samping karena teknik audiovisualnya, juga karena fungsi “pasar hiburan”-nya yang didatangi oleh generasi muda bagai semut mengerubungi gula-gula.

Secara naif kita sering bilang bahwa film tidak dibikin dengan dasar “Islami”, meskipun mungkin banyak sutradara yang beragama Islam. Mengapa naif? Karena fenomena media film yang memang anak dari dunia industri masyarakat sekuler: fungsinya dagang, yang ditambah ialah apa yang paling merangsang bagi kebanyakan orang—meskipun ada film-film yang berorientasi “estetik” belaka. Film bukan anak tradisi masyarakat Muslim di mana mereka justru menjadi objek dari “kepemimpinan kebudayaan film”.

Mari kita mengeluh: anak-anak jadi terpengaruh untuk bergaul bebas, hura-hura, suka kemewahan, bahkan makin dekat ke alam *free sex*. Lantas kita berpidato: “Anak-anak, jangan nonton film seru atau brutal. Jaga iman dan akhlak!” Tetapi, anak-anak tetap juga nonton, dan sudah pasti mayoritas konsumen hiburan film adalah putra-putri Muslimin-Muslimah kita.

Mengapa anak-anak tak berhenti nonton film? Karena umat Islam sendiri tak bisa bikin media hiburan yang memenuhi kehausan jiwa mereka. Kita bukan saja belum mampu bikin film atau karya seni-budaya lain yang berakhlak tinggi: bahkan bikin karya seni saja belum bisa—apalagi dalam frekuensi yang memenuhi luasnya pasar kehausan jiwa kaum Muslim. Umat Islam hanya pinter nyemprit ini haram itu wajib, tetapi tidak mengembangkan kreativitas kebudayaan untuk bertanding melawan serbuan kebudayaan lain yang notabene sangat mencengkeram alam kehidupan generasi muda Islam.

Mungkin kita perlu berdemonstrasi menuntut agar film yang di-edarkan jangan yang merusakkan moral. Namun, kita tidak berani. Mungkin kita mengimbau agar produser dan sutradara agar bikin film yang baik. Tetapi, imbauan itu akan hanya didengar nanti di alam Barzakh, dan lagi di antara penguasa film sebenarnya ada broker-broker yang jangan ngomong soal moral kepadanya. Mungkin kita cukup mempertebal iman anak-anak kita: tetapi itu adalah dakwah yang pasif. Atau, mungkin kita tak pernah sungguh-sungguh memahami betapa serbuan kebudayaan akultural edukatif itu telah perlahan-lahan merembes masuk ke dalam jiwa anak-anak kita dan “membangun” alam kepribadian mereka.

Mungkin kita tak pernah benar-benar menginsafi bahwa karya seni orang Islam itu bukan hanya “boleh”, melainkan bahkan bisa wajib hukumnya apabila melihat bahwa kita mesti ber-*nahyi munkar* yang telah sedemikian merambah di sekitar kita. Mungkin kita belum pernah benar-benar menghayati bahwa gejala kumpul kebo, tipisnya tanggung jawab sosial, hura-hura fatamorgana menipisnya rasa beragama, makin banyak tercerabutnya bidang kehidupan anak-anak muda dari

konsistensi keilahian, dan seterusnya, sebenarnya hanyalah akibat dari suatu politik kebudayaan yang luas dan makro sifatnya.

Mungkin selama ini kita hanya mengurus ujung-ujung gejala dan tidak memedulikan pangkalnya. Mungkin selama ini kita memang membiarkan diri hanya menjadi objek dari perkembangan sejarah kebudayaan yang dikendalikan oleh modal besar perdagangan hiburan dangkal, dan belum berusaha menjadi subjek yang ikut memengaruhi arah kebudayaan masyarakat.

Apa yang ada di benak tokoh-tokoh Islam ketika mereka berjalan-jalan di Malioboro; memandangi seribu konsumerisme yang mubazir, kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang disetir oleh pengelontong begitu banyak konsumsi budaya hidup sia-sia? Apakah para tokoh itu tidak menyaksikan di jalan-jalan, di gedung-gedung pertunjukan. Dan, bahkan di rumah mereka sendiri contoh-contoh soal bahwa kita bukan hanya mengalami “kekalahan politik”, “kekalahan ekonomi”, melainkan bahkan juga “kekalahan kebudayaan”? Atau, setidaknya: benarkah kita sedang kalah dalam bidang kebudayaan?

Ada sekian banyak dimensi lain—untuk membuktikan hal itu—yang belum mungkin saya tuangkan di ruang yang terbatas ini. Apa yang saya tuliskan sekilas ini sekadar tabungan untuk sampai pada suatu mimpi yang sejak lama saya idamkan. Ialah suatu “Pusat Kebudayaan Muhammadiyah” suatu lembaga inisiatif, kreativitas, dan pengembangan kebudayaan Islam. Suatu upaya untuk menyubjeki perkembangan sejarah, sesudah Muhammadiyah mungkin melakukannya lewat bidang-bidang pendidikan formal yang sukses.

Saya tidak “mimpi mendadak” akan punya sutradara Muslim, produser Muslim, dan broker Muslim yang berusaha menandingi jaringan kekuasaan jualan budaya non-Islami. Saya hanya berpikir bahwa di tengah dunia sekularistik yang makin menggiring aktivitas keagamaan ke ruang-ruang terpencil yang steril dari politik dan mekanisme kebudayaan: Muhammadiyah serta berbagai badan Islam lainnya, memulai usaha memasukkan ruh Islam ke berbagai kegiatan hidup. Muhammadiyah pasti tahu di mana saja letak pusat-pusat pengendalian kebuda-

yaan masyarakat. Kita bisa memulai mengorganisasi pemikiran dalam soal itu, antara lain bagaimana menumbuhkan kreativitas seni budaya di kalangan generasi muda Islam.

Mereka wajib jadi *fa'il*. Sebab, mereka adalah khalifah Allah di bumi.[]

Surat Ketiga

Ihwal Rahasia Air Mata Bang Ali



Masalah–Masalah
Politik dan Ekonomi

Demokrasi dan “Egomania”

Saya menduga keras bahwa secara ilmu bahasa, istilah “egomania” tampaknya tak bisa dibenarkan. Tetapi, saya tidak sanggup menjumpai idiom lain untuk mewakili apa yang hendak saya jelaskan.

Egomania adalah suatu kondisi mentalitas di mana “kosmos kepribadian” seseorang hampir seluruhnya diisi oleh hanya dirinya sendiri. “Dirinya sendiri” itu mungkin lebih gamblang kalau saya sebut egopribadi, atau bahasa umum menyebutnya “interes pribadi”. Idiom yang saya gunakan itu memakai kata “mania” untuk menerangkan kadar kepenuhan interes pribadi itu di setiap sepak terjang seseorang. “Stadium tinggi” egoisme itu membuat orang tersebut tidak lagi memiliki aktivitas sosial, karena setiap perilaku “sosial”-nya sesungguhnya merupakan aktivitas pribadi. Dengan kata lain: seluruh dunia ini, orang lain, lingkungan, fasilitas-fasilitas kehidupan, hanyalah “bagian” dari egonya.

Anda boleh membayangkan jika—misalnya—negara, partai politik, lembaga-lembaga sosial, rakyat, tanah, hasil bumi, atau lebih eksplisit: institusi Ikadin atau AAI, hanyalah bagian dari egoisme atau interes pribadi-pribadi.

Sesungguhnya Anda boleh percaya bahwa hal demikian sudah merupakan pemandangan “lumrah” di sekitar kita. “Pancasila”, “Islam”,

“kesatuan dan persatuan”, “manusia Indonesia seutuhnya”, “konstitusi”, atau apa pun, amat sering diucapkan tidak sebagai idiom-idiom itu sendiri, tetapi sebagai alat dari proyek interest-interest pribadi. Pancasila sering kali hanyalah berfungsi instrumental, sedangkan yang substansial adalah “egomania”.

Sesungguhnya pula, jika Anda memasuki hakikat realitas dunia perpolitikan—dalam konteks sempitnya maupun konteks luasnya—pandangan mata Anda insya Allah akan bergelimangan “egomania”. Lantas, Anda akan juga merasa tergetar apabila menyaksikan betapa batu cadas “egomania” itu dikonstruksikan dengan pilar-pilar kekuasaan politik, fundamental-fundamental beton persenjataan, serta dinding-dinding tebal kulturalisme dan “birokratisme”.

Jika sebuah komunitas, atau setidaknya sebuah organisasi, mengalami keretakan: Anda silakan bersangka baik bahwa itulah mekanisme demokrasi. Itulah potret pluralitas di mana perbedaan pendapat dan kehendak boleh dipanggungkan.

Akan tetapi, jika kemudian Anda menjumpai bahwa itu bukanlah perbedaan pendapat tentang kebenaran, melainkan benturan kepentingan-kepentingan “egomania”, persilakanlah hati nurani Anda menitikkan air mata.

Apabila jika cara berbeda yang dipakai oleh kaum intelektual, priayi modern, pengemban prinsip hukum, serta teladan bagi jutaan rakyat yang selalu dituduh “buta hukum”—persis dengan cara para *korak* atau *gali* membenturkan perbedaan.

Kita adalah manusia modern yang tak tahu diri.[]

Filosofi dan Empirisme 1990-1991

Semula saya menyangka itu adalah klenik atau *otak-atik gathuk* model naluri orang Jawa kampung. Tetapi lama-lama saya berpikir lain, setidaknya semacam kebetulan. “Betul” itu “benar”, jadi “kebetulan” itu, ya “kebenaran”. Dan kebenaran itu hanya bisa dijelaskan apabila kita memahami akar *sangkan paran* idiom “kebetulan” itu. Mungkin *ndilallah kersane Allah* bisa menjelaskan akar itu. Atau, *blessing in disguise*. “Blessing” itu datangnya tidak bisa dari pak camat atau tukang kredit, tetapi dari Allah juga. Dengan kata lain, benar tidaknya apa yang saya asumsikan sebagai klenik itu tergantung batas pengetahuan kita tentang keterkaitan antara kejadian-kejadian dalam hidup dengan kehendak atau *kersaning Allah* tadi.

Yang saya maksud ialah angka tahun 1991. Selama saya menyaksikan berbagai peristiwa besar dan “aneh” di tahun 1990. Untunglah saya orang Jawa, sehingga tertarik kepada *gothak-gathuk* seperti itu. Dan untung pulalah saya juga orang Indonesia yang sudah ala kadarnya diajari berpikir, sehingga saya punya peluang untuk terhindar dari klenik angka 1991.

Perhatikanlah pertemuan antara dua angka 9, serta perhatikan pula bahwa 9 adalah angka tertinggi, 1 adalah angka pemula. Pada 1991, 9 yang pertama didahului oleh 1, dan 9 yang kedua disertai

oleh 1 yang baru. Pun jangan lupa bahwa waktu sebelum 1991 adalah 1990 masih diikuti oleh 0, dan baru ada angka 1 pada 1991.

Pertemuan dua angka 9 memuat isyarat filosofis bahwa ada dua ekstrem nilai yang terjelaskan pada garis terpinggir dari polarisasinya. Itu semacam pembeda: antara yang paling terang dan yang paling gelap, yang terbaik, terbenar, terindah, dengan yang terburuk, tersalah, dan terjorok. Kalau orang Islam bilang *zhulumat* dan *nur*. Kiai-kiai bilang *qad tabayyanar rusydu minal ghayy*, telah terjelaskan antara petunjuk terang dan kegelapan. Kalau saya bilang *iyo yo iyo, gak yo gak*.

1991 berbeda dengan 1881 atau 1331, ketika nilai-nilai belum memanifestasikan dirinya sampai puncak atau ekstremitasnya. Akan tetapi, betulkah dunia di senja abad ke-20 dan di ambang dini hari abad ke-21 telah menampakkan ekstrem-ekstrem tersebut? Itulah yang menentukan soal ini klenik atau tidak.

Selama tahun 1990, dunia bagai dikocok. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan proses globalisasi. Berbagai gejala dan nilai yang semula berposisi dikotomis, berubah campur aduk, merobohkan sekat-sekat. Eksklusivisme terkikis perlahan-lahan oleh inklusivisme global.

Satu contoh pada skala internasional, kita tahu tak seorang ahli pun yang paling pakar dan bahkan pun yang paling “paranormal”, pernah menyangka bahwa sedemikian dahsyat gelombang *perestroika*-nya Gorbachev merombak peta nilai dan kekuatan-kekuatan di muka bumi. Tembok Berlin ambrol secara demikian “sepele”-nya, “legenda” Timur-Barat seolah-olah tiba-tiba saja menguap ke langit, dan “mitos” tentang dua raksasa Kapitalisme dan Sosialisme tiba-tiba saja—di luar asumsi segala macam ilmu sosial modern—tak lagi bisa dinilai secara simplifikatif bahwa salah satunya menang dari lainnya.

RRC dan Vietnam jadi “salah tingkah”, juga banyak negara komunis lain, kecuali Kuba yang jadi lucu dan *wagu*. Sementara negara-negara yang selama ini terkategori dalam lingkaran kaum kapitalis, men-

jumpai gejala-gejala internal yang membuat rumus-rumus kapitalisme konvensional menjadi tidak menentu wajah teoretisnya.

Kemudian Krisis Teluk, yang belum berakhir hingga hari ini, membuat semua perkembangan dunia menjadi semakin lucu. Manusia dan negara, perut dan politik, telah terpeleset-peleset dari satu *wuwu* ke *wuwu* lain, dari ahistorisitas antara jengkal waktu dan waktu berikutnya, serta dari inkontekstualitas kepentingan demi kepentingan yang membuat manusia, rakyat, negara, pemerintah berubah-ubah warna wajahnya setiap saat. Kawan pagi ini, lawan nanti sore. Tangan kanan berkawan, tangan kiri bermusuhan. Manusia dan umat dunia telah tercabik-cabik oleh pergeseran demi pergeseran kepentingan yang tidak menentu dari ke hari. Tiba-tiba saja Arab Saudi berposisi sebagai mitra Israel, bahkan pun Suriah yang selama ini cukup *ngeyel*. Tiba-tiba saja Saddam Hussein berposisi karib dengan Allahu Akbar, Palestina, kaum *mustadh'afin* yang paling nyata di muka bumi.

Semua serba tidak menentu. Tergantung apa peristiwanya pagi ini, dan nanti malam dua sahabat yang tidak lagi bergandeng tangan mendadak bisa saling menikam. Dunia dikocok dan tampaklah betapa manusia, negara, masyarakat, tak satu pun yang bisa secara utuh menggolongkan diri dalam “kebenaran” atau “kesalahan”—padahal 1991 tampak jelas sedang menuntut polarisasi nilai yang segamblang-gamblangnya. Seolah-olah *bandul* iradat Tuhan sedang bekerja di puncak intensitasnya, sehingga mau tidak mau seluruh penghuni dunia harus menempuh proses—melalui kontemplasi maupun peperangan—untuk menjelaskan posisinya pada kebenaran atau ketidakbenaran. Hal itu berlaku pada perpolitikan internasional maupun pada kehidupan pribadi setiap anak manusia sehari-hari.

Terjadi proses universalisasi dan globalisasi, lebih dari yang selama ini diteorikan oleh segala perbincangan tentang era informasi dan teknologi komunikasi. Namun, pada saat yang bersamaan juga berlangsung secara “aneh” proses-proses sebaliknya, yakni primordialisasi dan lokalisasi. Akar penyebabnya adalah puncak-puncak dari represi politik, ketidakberdayaan ekonomi yang berkepanjangan, kebodohan

dan pembodohan yang membuat “sukma” manusia tidak lagi bisa menerka: sementara bentuk atau kostum primordialisasi dan lokalisasi itu amatlah bermacam-macam: reidentifikasi rasialistik, puritanisme keagamaan, kelas-kelas sosial ekonomi, atau bahkan juga ada strata-strata dalam konteks “sakit jiwa sosial”.

Kasus “dunia dikocok” itu kita rasakan sendiri melalui banyak sekali peristiwa di Indonesia. Kejutan-kejutan tentang korupsi, barbarisme, atau kebodohan, muncul dari wilayah-wilayah yang tak pernah kita sangka akan memunculkan gejala demikian. Pejabat-pejabat negara omong bertentangan satu sama lain, terjadi kebingungan global dan kegoyahan-kegoyahan konteks pada lokal masing-masing. Logika untuk undang-undang berkembang tak menentu di berbagai bidang, dan masyarakat secara keseluruhan bagai dihindangi penyakit rabun senja sehingga meyakini bahwa merah itu hijau dan putih itu kelabu; sehingga mereka bisa-bisanya memercayai apa yang sama sekali tidak bisa dipercaya dan tidak memercayai realitas yang tertera segunung di depan *mripat*-nya. Informasi-informasi memuat lapis yang paling tidak substansial dari realitas, meng-*headline*-kan bias-bias dan halusinasi kenyataan. 1990 merupakan puncak di mana manusia dikurung oleh situasi anti-intelektual, di mana perunggu disebut emas dan logam mulai dipandang sebagai lumpur. Kulminasi kerabunan semacam itu juga tidak memungkinkan pembenahan-pembenahan informasi, karena yang sanggup mengubah pengetahuan semacam itu—pengetahuan yang tidak tahu itu—adalah deretan hari-hari dan empirisme radikal dari hukum-hukum alam yang menimpa kehidupan secara frontal.

Situasi kerabunan global dan massal seperti itu membuat hampir setiap peristiwa penting yang berskala lokal maupun nasional tidak berhasil diadili, dijernihi, sehingga berbuah manfaat bagi rekayasa hari depan masyarakat, rakyat dan negara, politik dan kemanusiaan, sungguh-sungguh dikocok di antara dua kutub “9” ekstrem yang merupakan irama alam, dan kocokan itu membuat mereka tidak menentu sosok dan guratan wajahnya. Tidak menentukan watak dan aspirasinya, langkah dan arahnya. Bahkan, mereka yang kita sangka amat

kelas sosoknya, sesungguhnya mengandung ketidakjelasan yang ekstrem, karena sesungguhnya sangkaan kita itu berjarak amat jauh dari realitasnya.

Jika kita perhatikan misalnya “senja hari orba” dewasa ini, jelaslah betapa masalah-masalah yang menggelisahkan di bidang politik, perekonomian, hukum, dan kebudayaan, telah tiba pada “9” dari kegalauannya. Isu-isu tentang keterbukaan, demokratisasi, kebangkitan ini-itu, reformasi, restrukturisasi, bahkan soal-soal khusus seperti dunia kesenian, dunia kemahasiswaan, dunia organisasi sosial, dunia perpolitikan yang penuh misteri, bahkan pun nalar dari yang setiap hari kita gambar-gemborkan sebagai “lepas landas”—sesungguhnya sekadar menampilkan diri sebagai seolah-olah “kejelasan”, tetapi itu justru menjelaskan ketidakjelasan yang ekstrem. Dunia, manusia, dan zaman ini, telah rancu di antara dua “9” ekstrem, dua puncak nilai dan gejala.

Kalau kita menyempatkan waktu untuk memperhatikan “arus tersembunyi” semacam itu, kita akan memperoleh pemandangan tentang tidak realistiknya “realitas” kejadian-kejadian yang selama ini kita dengar dan baca. Akhir 1990 membawa kita kepada suatu situasi di mana setiap kata di koran dan mulut telah tidak lagi tampil sebagai makna kandungannya. Baik kata yang muncul dari mulut pejabat, seniman, muktamar, seminar, warung-warung kopi, dan lain-lain: kita membutuhkan semacam telinga batin untuk mendengarkan *swaraning asepi* suara real yang tersembunyi di balik setiap pernyataan dan kenyataan.

Akan tetapi, *chaos* di antara dua angka “9” yang rancu itu, alhamdulillah, diikuti oleh angka 1. Suatu pagi hari zaman baru. Suatu kelahiran dan kesadaran baru. Suatu kejernihan mata bayi. Anda boleh menyebutkan *reborn*, rekreativisasi, restrukturisasi, reformasi, yang bisa berlangsung pada diri setiap orang atau pada diri masyarakat dan negara.

Berdasarkan “perkawinan” antara filosofi dan empirisme sejarah 1990-1991, barang siapa melakukan “kelahiran baru” itu (yang tentu saja harus bersifat transformatif)—baik kita sebagai pedagang, pejabat,

guru, atau apa pun—tampaknya itu seirama dengan *cakramanggilingan* atau ritme *sunnatullah*. Inilah momentum ekstrem di mana Arab Saudi dikocok antara dua “9”, antara Israel dan saudaranya sesama Arab, antara Zionisme Israel-Amerika dan Islam; dan ia tidak bisa mengelak untuk secara gamblang pada akhirnya menentukan “kelahiran murni” dari diri Arab Saudi itu sendiri. Kalau Arab tak “lahir”, ia akan kaget menjumpai dirinya di “rumah” Zionis. Demikian juga kita, yang hidup menjalani deviasi-deviasi jauh dari konteks yang sebenarnya sama. Tahun 1990 tidak lagi “memperkenankan” kita untuk tetap bodoh dengan menyangka bahwa sesuap nasi di mulut kita steril dari perhubungan-perhubungan global seperti yang barusan saya uraikan.

So, apa gerangankah angka 1 kita? Atau, apa gerangan 1-saya dan 1-Anda? []

Pemilu Ban Bin Bun

Sebentar lagi kita akan ramai-ramai mengerumuni Pemilu. Bahasa Inggrisnya *general election*. Orang Jepang menyebutnya *generar erection*. Maka, beruntunglah orang Cina, yang maunya mengejek musuh klasiknya dengan menirukan ucapan orang Jepang—malah melafalkan secara benar: *genelal election*. Jadi, tak ada kesulitan bagi Cina WNI untuk ikut Pemilu. Berbeda dengan—seandainya ada—Jepang WNI yang bulan Mei nanti terpaksa “melanggar peraturan” dengan tidak ikut Pemilu, melainkan “Pemiru”.

Saya sebut-sebut hal itu supaya kita tenang dan santai menyongsong kerja keras Pemilu. Stabilitas mesti dipelihara, dan untuk Anda sebaiknya tidak tegang. Tetapi, jangan *erect*. Ini *election*. Namun, jangan keliru *electone*, musik semu dan pemalsu alam dan kreativitas manusia.

Kalau sudah mulai demam Pemilu begini, yang kambuh dalam otak saya ialah suasana desa saya di Jombang. Sejak Pemilu 1955 terus saja ada orang-orang yang datang ke rumah atau bertanya di masjid: Cak, saya nyoblos apa?

Negara kita sudah berusia dewasa, tetapi pendidikan politik kita terus saja balita. Ini panjang dan bertele-tele ceritanya, tetapi bukan kredibilitas saya untuk menulis *metoto-metoto* mengenai rangka sistem

dan kultur politik. Bagian saya hanya *ndongeng* singkat tentang garis pinggiran. Misalnya, penduduk desa saya belum pernah ada yang “mengerti politik”, kecuali pada dimensinya yang paling “universal”. Pengalaman politik mereka hanya berupa pertemuan-pertemuan langka dengan simbol-simbol politik tertentu.

Kalau mencari tahu apakah surat-menyurat Tebu Rakyat Intensifikasi yang dipegang penduduk ini asli atau tidak, atau apakah mereka mampu bernegosiasi cukup tegar terhadap KUD—juga dianggap pengalaman politik—maka itu lain soal. Yang saya maksud ialah ketidak-tahuan rakyat atas proses pelimpahan dan pengelolaan kekuasaan negara. Itu yang saya sebut bahwa kita masih balita.

Mereka, di desa saya itu, hanya bertemu dengan simbol banteng, beringin, dan bintang. Tetapi binatang cap apa itu PPP, PDI, dan Golkar? Mana yang “jowo”, yang apik? Apa a-b-c partai-partai itu? Yang mana, yang membawa mereka ke surga? Bagaimana kapling penempatan calon-calon? Siapa yang mengapling? Apa sesungguhnya urusan calon dengan rakyat? Bagi mereka hal itu *wâllahu a’lam*. Sedangkan pak lurah pun tak bertanya kepada para tetangganya: Anakmu sekolah apa tidak? Kamu kekurangan beras apa tidak? Punya utang atau tidak? Apa kesulitan keluargamu?

Maka, di masjid, kami menjawab: “Cobloslah *shirâthal mustaqîm*!” Lho, yang *shirâthal mustaqîm* itu PPP atau Golkar atau PDI? Hanya Allah yang mampu memberimu petunjuk dan penjelasan tanpa metode atau kerangka pendekatan apa pun. *Man tabi’a hudâya falâ khaufun ‘alaihim walâ hum yahzanûn*. Barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, maka tak ada takut dan sedih pada jiwanya

“Ya, Cak! Tapi, dari tiga gambar itu yang mana yang mesti dicoblos?”

Saya bilang, ternyata Pemilu itu barang gaib bagi kesiapan wawasan politik mereka. Jadi, rengkuhlah juga kegaiban Allah. Puasa Senin-Kamis. Shalat Tahajud, zikir *ihdinash-shirâthal mustaqîm* entah 3.333 kali entah 4.000 x 4.000 kali. Di kotak Pemilu, niatilah menyoblos

shirâthal mustaqîm dengan tanganmu yang sudah engkau *taqarrub-*kan ke tangan Allah lewat malaikatnya.

Hmmm

Namun, toh para penduduk desa itu akhirnya menemukan keputusan: Pokoknya mencoblos apa yang kira-kira tidak dicoblos pak lurah. Persoalannya sederhana—mereka selama ini, lebih 30 tahun, tidak merasa punya pak lurah.

Di Pulau Lombok lain lagi. Kiai-kiai, yang di sana disebut Tuan Guru, tidak mengucapkan satu patah kata pun mengenai Pemilu, baik kepada umatnya maupun kepada pemerintah. Karena Tuan-Tuan Guru punya posisi kunci dalam memobilisasi segala alam kehidupan rakyat, maka kediaman ini membuat di daerah tersebut kini seolah “tak ada iklim Pemilu”.

Dalam dialog “rahasia”, Tuan Guru hanya mengucap kata: Ban Bin Bun.

Dalam bahasa Arab, *ban* itu *ba* dikasih *fathatain*. Fungsi maknanya ialah “yang dikerjain”. Objek. *Bin* itu *ba* dengan *kasrotain*. Itu artinya “yang dibawahih”. Adapun *bun* ialah *fa’il*. Subjek. Yang berinisiatif.

Jelas maksudnya, “Dari dulu kita, kok jadi *ma’fulun bih* terus, jadi objek terus, jadi yang di bawah terus. Kita cobalah ala kadarnya, sebelum mati, untuk memulai jadi *fa’il*. Pekerja yang menginisiatifi sendiri pekerjaannya.”

Ban Bin Bun itu ternyata begitu mendasar dan menyeluruh. Dalam pekerjaan politik, pekerjaan ekonomi, pekerjaan sosial dan kebudayaan. Tuan Guru mencoba memulai posisi sebagai *fa’il*.

Ketika Pak Sudharmono bilang bahwa kita harus menggunakan hak kita dalam Pemilu, maka itulah manifestasi subjek dia baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Golkar. Tokoh lain mungkin berbeda dan memakai logika yang tidak merancukan hak dengan keharusan.[]

Keterbukaan di “Dunia Alkisah”

Di sekitar kita sering terdengar pemeo yang populer dan diam-diam disepakati oleh masyarakat luas: “Anda boleh melontarkan kritik apa saja, tetapi harus diperhatikan cara dan tempatnya. Tidak semua hal bisa kita ungkap di depan umum”

Itu edisi berikut dari klise “kritik bebas, asal konstruktif”, atau “melontarkan pendapat itu bebas, tetapi harus bertanggung jawab”. Dan semua itu merupakan pola-pola komunikasi kontemporer yang *wantah*, sesudah masyarakat “modern” kita gagal mentransformasikan idiom-idiom komunikasi budaya tradisional seperti *sanepan*, *guyon parikena*, atau yang secara verbal sering kita terjemahkan menjadi “kena ikannya, tak keruh airnya”.

Kita bisa memahami semua itu dalam kerangka pergeseran-pergeseran bentuk ungkap budaya, perubahan-perubahan etika komunikasi sosial, atau mungkin Anda temukan kerangka lain: itu hanyalah suatu jenis retorika politik, eufemisasi bahasa, relativisasi epistemologi, yang keseluruhannya bermuara pada pusat-pusat kepentingan politik. Dan itu “bisa dipahami” karena hampir seluruh mekanisme kebudayaan masyarakat kita berposisi subordinatif terhadap kepanglimaian dunia politik.

Siapakah yang menentukan “cara”, “tempat”, dan “di tempat umum”, yakni pantangan disampaikan suatu kritik? Orang yang mengkritik ataukah pihak yang dikritik?

Setiap kode etik komunikasi mengandaikan suatu tatanan objektif yang disepakati secara imbang oleh kedua belah pihak. Saya kira masyarakat kita memiliki kelemahan serius dalam hal tersebut. Kalau Anda bermaksud menyampaikan kritik kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu yang dilakukan oleh Pak RT, dalam konteks budaya kita, harus dilakukan dengan cara dan di tempat yang dikehendaki oleh posisi nilai (psikologis, kultural) yang berlaku pada diri Pak RT. Bukan dengan cara dan di tempat yang mau atau ditentukan oleh sebuah konvensi objektif, sebab setiap konvensi memerlukan negosiasi berimbang antara Anda dan Pak RT.

Dengan kata lain, pihak yang mengkritik berposisi menyesuaikan diri terhadap orang yang dikritik. Penyesuaian itu bisa bermakna *ngemong* atau mengabdikan, dan meletakkan Anda pada posisi mengalah atau sungguh-sungguh kalah. Dan jika masih ada kalah-menang, yang berlangsung bukanlah dialog kritis, melainkan penekanan dan keterbatasan kekuasaan.

Pada latar kultural semacam ini tidak mengherankan bahwa tatkala sepanjang tahun 1990 dilontarkan isu keterbukaan, ia terasa begitu manis di telinga, tetapi ia adalah “kembang plastik” dalam realitas budaya. Hanya kita-kita yang lugu tidak segera peka bahwa isu itu bergerak tidak menuju akulturasi suatu nilai, melainkan suatu nilai melainkan suatu metode politik kebudayaan. Atau, lebih gamblang lagi: itu kembang gula dunia politik.

Sampai hari ini kita masih belum bisa membantah kenyataan bahwa kebudayaan negara dan masyarakat kita tidak semakin menyediakan infrastruktur dan infrakultur untuk keberlangsungan egalitarianitas mekanisme dialog. Pelawak Asmuni pernah secara cerdas nyeletuk: bagaimana akan pernah terjadi musyawarah kalau yang satu kuat dan

yang satu lemah, di mana-mana yang satu tambah kuat dan lainnya tambah lemah.

Pada metafora lain sering disebut orang Indonesia itu *tengeng* lehernya. Dia cenderung tidak bisa menoleh ke kiri atau ke kanan. Bisanya cuma mendongak ke atas atau *ndingkluk* ke bawah.

Artinya, aspirasi dan tradisi budayanya, baik yang “asli” maupun yang direkayasa oleh budaya politik, tidak egaliter. Orang tidak begitu punya kemampuan untuk memandang orang lain dalam posisi sejajar di kiri atau kanannya, karena naluri dan cara pandang yang dididikkan ialah memandang orang lain sebagai atasan atau bawahan. Manusia Indonesia seolah-olah hanya mempunyai garis budaya vertikal dan tidak memiliki garis budaya horizontal.

Tentu saja kita tak berkeberatan apa pun apabila yang kita omongkan adalah tata internal dunia birokrasi atau organisasi kemiliteran. Akan tetapi, yang kita jumpai dalam masyarakat kita adalah salah kaprah yang sangat parah dalam soal ini.

Seorang camat tentu saja memandang bupati sebagai atasannya. Tetapi, celakanya rakyat juga memandang pejabat sebagai atasan. Ini warisan sejarah feodal dan dikukuhkan pula oleh refeodalisasi budaya, yang rupanya diperlukan oleh politik birokrasi negara kita. Dan karena itu lebih celaka lagi karena pejabat yang memandang rakyat sebagai bawahan. Hal ini bahkan terefleksikan ke dalam idiom kebahasaan: rakyat selalu disebut rakyat biasa, sehingga pejabat pastilah rakyat luar biasa.

Orang miskin merasa bahwa orang kaya adalah “atasan”-nya. Ulama menganggap bahwa para jamaah adalah “bawahan”-nya. Otoritas dalam bidang apa pun hampir selalu melahirkan tata budaya hierarkis-vertikal. Murid sekolah secara psikologis melihat guru adalah atasan dan susahnyanya banyak dosen juga meletakkan mahasiswa seolah-olah bawahannya.

“Festival” salah kaprah seperti itu mungkin tak pernah Anda bayangkan seberapa kerugian yang ditimbulkannya. Baik kerugian fungsi, kerugian ilmu, kerugian kreativitas, serta kerugian kesejahteraan secara menyeluruh. Kalau seorang guru melihat muridnya sebagai bawahan, prospek kreativitas keilmuan cenderung menumpul, baik pada guru maupun murid. Kalau seorang pegawai memandang masyarakat sebagai “orang di dataran bawah” kata prinsip fungsionalitas birokrasi menjadi rusak, filosofi negara dan rakyat menjadi terbalik, sementara itu tinggal kita hitung berapa defisit proses, kerugian demokrasi, bahkan berapa jumlah uang anggaran yang menjadi tidak efektif terhadap kehendak pembangunan yang sebenarnya.

Yang paling menyedihkan ialah kenyataan bahwa banyak kalangan masyarakat umum, bahkan kaum terpelajar dan birokrat, yang tidak memahami bahwa itu semua salah kaprah. Generasi mutakhir kita dilahirkan, dibesarkan, dan dididik oleh atmosfer yang sedemikian, dan mereka tidak cukup menyadari bahwa seharusnya tidaklah demikian.

Seorang ketua RT berpidato diiringi ajudan yang membawakan kacamatanya. Seorang dosen kehilangan keterampilan untuk membuka pintu mobil dan membawa tasnya ke kantor fakultas, sehingga diperlukan pembantu yang menolongnya. Pak kades, pak camat, atau apalagi pak bupati, memilih bentuk upacara dan *performance*-nya dalam konteks apa pun dengan *ubo rampe* ala pangeran atau raja. Seorang direktur perusahaan atau seorang kasubdit merasa bahwa tatkala makan di restoran atau buang air besar di WC, dia tetaplah seorang direktur dan kasubdit.

Pemahaman budaya masyarakat kita makin kehilangan pilah antara fungsi dan status. Seseorang tidak bisa membedakan lagi—pada dirinya sendiri maupun orang lain—konteks-konteks yang berbeda saat dia menjadi kapten, menjadi pemain sepak bola, menjadi bapak rumah tangga, serta saat dia menjadi manusia.

Tentu saja pada diri setiap orang bercampur dan terkait antara semua status dan fungsinya, tetapi ada yang namanya *galengan* kesadaran, ada manajemen dan irigasi yang membedakan kedudukannya di ruang dan waktu yang berbeda.

Dengan itu semua bisa kita bayangkan betapa kisruhnya silang sengkabut konteks dan pola-pola komunikasi antara manusia dalam kedudukannya yang begitu beragam setiap saat. Dan dalam keruwetan seperti itu tidak mengherankan apabila kultur dialog tidak cukup memiliki ladang untuk tumbuh subur.

Kalau di kelas sekolah atau bangku universitas saja kultur dialog atau tradisi interargumentasi tidak cukup hidup, maka apalagi pada skala sosial yang lebih luas dari itu. Tatkala seorang wartawan bertanya kepada saya tentang isu keterbukaan, saya katakan, “Itu pertanyaan terlalu lugu. Coba Anda omong terbuka ke Pak RT, dan tunggu jumlah akibat-akibatnya!” Atau, kemukakan pendapat Anda secara terbuka tentang tentara kepada tentara.

Dan kalau mekanisme komunikasi budaya yang berlangsung tidak dialogis, tentu monolog yang terjadi. Bagi kaum atasan, monolog ialah melontarkan otoritas terhadap bawahan, monolog ialah melamun sendiri atau menggerundel sambil jalan di trotoar, minum bir, beli SDSB, atau masuk rumah sakit jiwa.

Kemudian, resultan dari keseluruhan kultur tanpa dialog itu, sepanjang yang saya ketahui, masih tersisa kemungkinan untuk berdialog. Ialah apabila tema dialog itu menyangkut dunia alkisah. Artinya, hal-hal yang tidak secara langsung menyangkut persoalan-persoalan konkret kita sendiri.

Anda boleh memperdebatkan masalah keadilan sosial secara terbuka dan tanpa risiko politis apa pun, asal yang dimaksud adalah keadilan sosial dari masyarakat anonim, atau setidaknya “ketidakadilan sosial di Nairobi”, misalnya. Anda boleh mengecam intervensi Irak ke Kuwait, asal jangan dihubungkan dengan kasus Timor Timur.

Iklim semacam itu melahirkan generasi kelu dan bisu, karena bapak sejarah mereka tertutup dan *ngratu*.[]

Tingkat-Tingkat Kearifan Politik di Dalam Masyarakat Kita

Sebulan terakhir ini, semua pihak dalam tubuh bangsa Indonesia diberi dua pelajaran besar oleh sejarah. Yakni, kasus NU-SDSB dan Timor Timur.

Saya menyebutnya pelajaran besar dari sejarah, karena sesudah manusia meniatkan dan merencanakan langkah-langkahnya—entah berupa kemajuan atau ternyata kemunduran, entah penyesuaian atau ranjau, entah progresi atau degradasi—manusia itu sendiri pulalah yang kemudian memiliki peluang untuk bercermin.

Kalau kita memang adalah bangsa besar, seperti yang selalu kita umum-umumkan kepada diri sendiri, maka pertanyaan yang muncul adalah seberapa bermutu kita menyikapi pengalaman-pengalaman pahit itu untuk mendewasakan diri. “Diri” yang saya maksudkan tentu saja mencakup seluruh rakyat, pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, pers, atau kelompok-kelompok apa pun yang merupakan pilar-pilar penyangga pematangan sejarah seluruh bangsa.

Dalam hal ini, saya ingin mengonsentrasikan tulisan ini pada tema yang saya sebut kearifan politik, atau barangkali dari *angle* lain: “kedewasaan kepemimpinan”. Meskipun kita tidak selalu punya peluang untuk mengekspresikan, tetapi pastilah secara diam-diam kita mengamati dan merenungi bagaimana Gus Dur, Kiai Ali Yafie, serta NU

sebagai keseluruhan maupun bagian-bagian; juga bagaimana Mendagri Rudini, kaum mahasiswa, dan intelektual pada umumnya—menyikapi kasus NU-SDSB itu.

Atau, misalnya, pada persoalan yang meletup di Dili itu, kita juga sangat bisa mengambil pelajaran tertentu dari modernitas kepemimpinan dan kejernihan Carascalao, tetapi juga komplikasi politis-psikologis yang memblokir sejumlah pemahaman dan kesadaran nasional kita atas kasus di Timor Timur.

Udele Bodong

Dalam kasus bantuan YDBKS, Gus Dur jelas *kesandung*, meskipun ujian semacam ini memang justru diperlukan olehnya, bahkan mungkin oleh umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selama masa kepemimpinan Gus Dur di NU maupun dalam “radius kepemimpinan” nasional yang lebih luas, belum pernah dia terlihat sebegitu terpukul dan resah melebihi kasusnya kali ini—meskipun saya tahu ada soal yang jauh lebih besar yang juga sedang disangganya dewasa ini.

Sejauh ini pula Gus Dur cukup tepat memilih kuda-kuda agar tetap bisa mengekspresikan objektivitas, ketegasan sikap, tetapi juga kearifan. Kalau Anda, mengenalnya secara pribadi, Anda akan menjumpai dia seolah merupakan pribadi yang seolah-olah cuek, amat suka bercanda, *jembar* moralnya untuk tidak menjadi tegang oleh soal-soal yang seharusnya membuatnya tegang, terutama yang menyangkut kontroversi atas pandangannya. Istilah cuek sebenarnya kurang tepat, sebab dia bukan acuh tak acuh. Barangkali lebih proporsional untuk menyebutnya memiliki semacam manajemen psikologis tersendiri sebagai pribadi pemimpin.

Seorang “tua” di Jawa Timur pernah berkata: “*Duwe anak loro, udele bodong kabeh*” Ini semacam keluhan, tetapi juga kebanggaan. Kata *udele bodong* menyimbolkan semacam kenakalan tetapi juga krea-

tivitas, semacam kesintingan tetapi juga kebesaran, atau semacam kontroversi tetapi juga elan pemimpin.

Dan sesudah Gus Dur disebut “udele bodong”, si orangtua itu mencoba menumbuhkan kepercayaan kita semua: “Tenanglah, biarkan si *Udel Bodong* itu berbuat dan omong macam-macam. Insya Allah nanti akan selalu muncul hikmahnya”

Dan ketika kemudian sesudah kasus NU-SDSB itu muncul gelombang unjuk rasa kaum muda di berbagai kota di Jawa maupun di luar Jawa, seolah-olah kita menemukan bukti bahwa kesandungnya Gus Dur itu, toh membawa dampak positif: membangkitkan kembali akal sehat dan kesadaran tentang nilai SDSB.

Demokrasi Tak Cukup

Namun, toh Gus Dur tetap “manusiawi” dengan melakukan suatu kekhilafan yang tidak mencerminkan kearifan. Yakni, ketika sepulang dari Hongkong tergopoh-gopoh dia menyatakan: “Apa betul rakyat menolak SDSB?”

Pengandaian dari pernyataan tersebut memurukannya ke perspektif demokrasi. Bahwa segala sesuatu, asal disetujui dan diterima oleh rakyat, bisa dianggap sah. Maka karena toh SDSB laris bukan main, segala gerakan penentang SDSB bisa dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.

Saya menyebut ungkapan Gus Dur itu agak sembrono dan tidak arif, karena kerangka demokrasi hanya bisa mendekati salah satu sisi dari persoalan nasional yang bernama SDSB. Seperti juga Anda tidak cukup hanya menggunakan rumus demokrasi untuk mengantisipasi masalah *free sex* umpamanya.

Para pelaku seks bebas, dalam alam pikir demokrasi, tak melanggar apa pun karena mereka melakukannya rela sama rela. Orang juga rela menjual minuman memabukkan, dan lainnya rela membeli dan meminumnya: tak ada problem secara demokrasi. Tetapi, permasalahan

manusia memuat dimensi yang lebih kompleks dan lebih tinggi dibanding hanya segi mau sama mau atau persetujuan umum.

Ada kepemimpinan yang lebih tinggi dari demokrasi. Kemauan dan kerelaan manusia tidak di atas segala-galanya. Berapa peradaban hancur oleh pemanjaan terhadap *free will* masyarakat: ada sesuatu yang lebih hakiki di mana umat manusia memerlukan kepemimpinannya.

Bahkan, kalau masyarakat kita percaya kepada filosofi, agama, atau *ngelmu*: justru nukleus pembangunan kemanusiaan terletak pada kepemimpinan untuk melawan kemauan diri. Jadi, demokrasi hanya salah satu “anak tangga” yang memang harus ditapaki, tetapi itu justru untuk menapak ke anak tangga yang lebih tinggi dan hakiki.

Memang tahap penerapan “nilai yang lebih tinggi” itu akan selalu bertemu dengan dilema dan kompleksitas institusional. Suatu pemerintahan tidak bisa memaksakan nilai yang dianggap setinggi apa pun seperti dulu negara-negara sosialis secara otoriter melakukannya.

Nilai-nilai itu harus ditemukan sendiri oleh manusia dan masyarakat dan aplikasinya sepenuhnya berada dalam genggamannya sendiri. Tak bisa “diperintahkan”. Dan untuk itu diperlukan “anak tangga” demokrasi.

Dalam hal seperti ini, seorang pemimpin yang arif tidak bisa berkata: “Toh, rakyat ramai-ramai membeli kupon SDSB” Itu benar secara konstitusional-formal dan secara alam pikir demokrasi, tetapi tidak arif dalam konteks nilai kepemimpinan yang harus mengacu pada kesejahteraan hakiki dari “manusia seutuhnya”.

Ketidakarifan Gus pada segi itu merupakan rezeki bagi pejabat yang berwenang soal SDSB, sehingga disambutnya bola Gus Dur itu dengan menyatakan: “Laporkan saja kalau rakyat memang tidak setuju SDSB.” Padahal, soalnya bukan itu. Padahal, seorang pecandu narkotik memang setiap ketagihan akan dengan segala cara mencari serbuk morfin. Tak bisa kita bilang: “Silakan, demokrasi, kok!”

Kerancuan dan Ironi

Sayang sekali tidak cukup ada pakar ekonomi yang menolong rakyat dengan menjelaskan mengapa dalam perhitungan makro-ekonomi negara kita “harus” ada SDSB. Ada *blunder* apa sehingga secara “darurat” rakyat harus “diisap darahnya” seperti itu.

Pada saat yang sama, pemahaman dan sikap semua pihak terhadap SDSB ini sedemikian rancu dan ironisnya. Secara nasional segala bentuk perjudian dilarang, tetapi SDSB dipertahankan “sampai titik darah penghabisan”. Apakah permasalahannya sekadar perbedaan pendapat, di mana pemerintah yakin benar bahwa SDSB bukan judi?

Di Aceh tegas menolak SDSB dan itu tidak menjadi referensi yang mendasar bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali SDSB. Kalau Mendagri berkata: “Setiap provinsi berhak menolak SDSB”, lantas belum ada yang tegas menolak selain Aceh, apakah pemda-pemda itu sedang sibuk mendiskusikannya dengan komponen-komponen masyarakat dan para pakar di wilayahnya masing-masing? Juga kalau NU dan Muhammadiyah jelas menyimpulkan bahwa SDSB itu haram, apakah bagi pemerintah, dua organisasi Islam itu tidak cukup punya kredibilitas *syar’i* sehingga tak perlu dipercaya?

Pada saat yang sama, Mendagri menganjurkan agar para pegawai negeri tak usah meramal-ramal atau mengotak-atik angka dengan alasan “supaya tidak masuk iklim perjudian”. Apakah maksudnya adalah apabila Anda langsung membeli kupon SDSB tanpa meramal-ramal dulu, maka Anda terhindar dari atmosfer perjudian? Atau, bagaimana?

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “atmosfer perjudian” yang dianggap negatif oleh Mendagri itu, sedangkan satu-satunya yang menyebabkan orang meramal-ramal angka justru adalah SDSB dan pemerintah mengatakan SDSB bukan perjudian.

Tingkat kompleksitas masalah SDSB ini masih berkisar pada soal akal sehat, konsistensi intelektual, kejelasan paham, dan sikap. Belum lagi bisa dipertanyakan apakah kepemimpinan SDSB ini arif atau tidak.

Barangkali seluruh permasalahan ini akan beres seandainya saja ada seorang Kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad di depan Ka'bah dan membisikinya: "Aku titipkan SDSB kepadamu!"[]

Islam, Demokrasi, dan Sektarian

Semua bisa salah. Doktor bisa salah, cendekiawan bisa salah, politikus pun bisa salah, mahasiswa juga sering salah. Apalagi pemerintah, juga bisa salah. Maka, jika semua yang saya sampaikan ini salah, karena saya manusia, tetapi jika benar hanya dari Allah Swt.

Hampir tiap hari kita mendengar analisis, ungkapan, kesimpulan, persepsi-persepsi dari ilmuwan, cendekiawan tentang Islam. Dari pembicaraan-pembicaraan itu selalu terkesan bahwa Islam itu tidak mengenal demokrasi. Tidak hanya umat Islamnya, tetapi seolah-olah Islamnya juga tidak mengenal demokrasi. Mereka sangat terbelakang, ganas, suka mengamuk, dan tidak demokratis, sehingga egois. Saya merasa, sebagai umat Islam, saya begitu kampungan karena tidak kenal demokrasi. Padahal, demokrasi itu hanya sepetak nilai dari nilai Al-Quran yang sudah diturunkan.

Di dalam Al-Quran, jangan kan demokrasi dalam konteks negara, demokrasi dalam konteks alam seluruhnya juga terkandung. Demokrasi ala Yunani itu 'kan hanya bagaimana penduduk atau rakyat bermusyawarah menentukan X dan Y di dalam proses bernegara. Ini sangat terbatas. Tetapi, demokrasi di dalam Islam bukan hanya demokrasi yang dikenal manusia, melainkan jin, setan, dan makhluk gaib

lainnya kenal dan diberi haknya masing-masing, sesuai dengan porsi-nya.

Bagaimana sesungguhnya hubungan demokrasi dengan Islam dalam level konsepsional atau filosofis itu? Kalau berbicara masalah itu, perlu dipisahkan dengan pembicaraan tentang demokrasi dan umat Islam itu sendiri dipandang dari sudut sosiologis-historis. Artinya, jangan sampai kita menjadi orang Islam yang cape-cape belajar ke mana-mana, tetapi masih tetap inferior. Seolah-olah kita adalah orang yang sangat ketinggalan zaman dan agama kita ternyata adalah agama primitif. Sehingga, kita merasa *ewuh* kalau harus belajar demokrasi karena kita tidak pernah merasa mempunyai. Maka, seluruh makalah dan disertasi kita mencerminkan inferioritas primitif yang semacam itu. Nah, saya harap ini tidak terjadi.

Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya akan mencermati kepin-cangan pendapat Gus Dur, tentang definisi demokrasi. Sayang, Gus Dur terlalu mudah menuduh orang lain sektarian, primordial, dan tidak demokratis. Misalkan, kita memakai jilbab yang kearab-araban itu, bisa jadi itu primordial. Sepertinya Gus Dur menganggap semua hal yang berbau kearab-araban adalah primordial dan sektarian. Tam-paknya bagi Gus Dur, hanya sesuatu yang berasal dari negara Barat itulah yang universal.

Cara berpikir seperti itu akan membuat otak kita tidak bisa adil menatap paham-paham atau kriteria-kriteria yang jernih tentang apa yang sesungguhnya disebut sebagai sektarianisme atau primordialisme itu. Sebab, jilbab yang disebut sebagai sektarian itu memiliki keabsah-annya sendiri. Sementara rok mini juga memiliki keabsahannya sendiri dilihat dari sistem nilainya kalau memang kita berpikir secara demo-kratis. Jika cara berpikir kita begitu, boleh disebut sebagai primor-dial.

Dalam cara berpikir Gus Dur, primordial itu bisa dikatakan sebagai penyeragaman. Cuma penyeragaman Gus Dur ini sistemnya dipesan dari Eropa dan Amerika. Susahnya begitu. Padahal, pakai rok mini ala Eropa Amerika itu primordial sekali. Mudah-mudahan apa yang

saya utarakan itu dapat membuat kita berpikir lebih jernih. Hal ini sangat terkait dengan posisi umat Islam terhadap tuntutan demokrasi. Kalau umat Islam tidak boleh menampilkan diri sesuai dengan citranya dan harus taat serta takut pada simbol-simbol budaya milik orang lain, secara psikologis membuat kita tidak mempunyai kepercayaan diri.

Gus Dur itu setiap hari pakai baju batik. Bukankah batik itu primordial sekali? Ee, nggak *kroso* (nggak mau tahu diri). Mendingan saya pakai baju putih dan celana hitam, sebab ini universal, semua orang merasa memiliki. Saya ngomong begini bukan berarti *ngrasani* Gus Dur. Kalau saya *ngrasani* Gus Dur, itu memang pada tempatnya. *Gak po po* (Tidak apa-apa). Sebab, saya satu-satunya orang di Indonesia yang berani mengejek Gus Dur. Ini karena alasan historis.

Berangkat dari peristiwa semacam ini, kita telah menemukan satu soal tentang psikologisme melalui penyebaran cara berpikir yang tidak adil. Dan itu sayangnya sangat memengaruhi cara berpikir kita. Saya pribadi secara empirik sangat mengalami kerugian karena peristiwa semacam itu. Misalnya, saya disuruh masyarakat untuk membuat teater. Ideologi saya adalah teater rakyat. Artinya, teater yang dasarnya *ud'u ilâ sabîli rabbika bil hikmah wal mau'izhatil hasanah wajâdilhum billatî hiya ahsan* (berangkatlah kamu dalam keadaan berat atau ringan di jalan Tuhanmu untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah. Demikian itu lebih baik jika kamu mengerti).

Kalau kita berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa komunikasi, yaitu bahasa orang yang kita ajak ngomong. Kalau saya membuat teater, maka idiom-idiom teater yang saya pakai haruslah idiom-idiom yang tepat pada audiensnya. Kalau saya akan berhadapan dengan umat Islam, maka saya bikin drama Islam, *Lautan Jilbab*. Tetapi, apa yang terjadi? Setelah pementasan beberapa kali, saya dianggap primordial.

Jadi, mereka hanya melihat kulitnya. Sebenarnya, idiom-idiom budaya yang saya pakai hanya sekadar kendaraan menuju substansinya. Substansinya dari salah satu drama-drama saya adalah pendidik-

an politik. Dan sepengetahuan saya belum pernah ada drama kritik sosial yang seeksplisit dan sekeras *Lautan Jilbab* (terakhir dipentaskan di Surabaya dan dipuji oleh Pangdam Jawa Timur, tetapi dicekal di Jawa Tengah. Drama kami menyesuaikan bahasa audiensnya. Nah, dengan begitu, Gus Dur jangan terlalu mudah menuduh primordial pada *Lautan Jilbab*. Kalau Gus Dur menuduh begitu, maka yang maha-primordial adalah pemikiran-pemikiran, persepsi-persepsi, dan ilmu Gus Dur itu sendiri.

Kemudian, apa kandungan dalam Islam jika dikaitkan dengan demokrasi? Menurut saya, kita ini seperti Tarzan. Tarzan itu hidup di hutan tak kenal teknologi maupun kemajuan zaman. Artinya, begitu kita ngomong demokrasi, seolah-olah Islam itu tidak memiliki kandungan demokrasi. Kita kenal nasi itu berasal dari Indonesia. Tetapi, beras itu ada di mana-mana. Dan demokrasi itu sekadar berposisi seperti nasi. Tetapi jangan lupa, berasnya, benihnya, dan sawahnya ada di mana-mana. Apalagi di dalam Islam.

Jadi, sekali lagi saya tidak percaya bahwa seolah-olah Islam itu sesuatu yang tersendiri dan demokrasi itu sesuatu yang lain. Bagi saya, demokrasi itu nasi. Artinya, Islam itu mengandung beras dan nasi. Bahwa kemudian beras dan nasi itu diolah secara psikologis dalam dekade tertentu di Eropa, Amerika, dan lainnya, itu benar. Tetapi, tidak lantas kalau Islam mengenal demokrasi berarti adopsi. Bukan adopsi. Lihat saja Surah Al-Hajj ayat 4, Al-Hasyr ayat 18-24, yang mengandung tatanan Asmaul Husna dan demokrasi.

Tidak ada keadaan yang menyedihkan dibanding keadaan umat Islam dewasa ini, meskipun sekarang ini kita seolah-olah mengalami kondisi yang dikatakan berada pada tataran kebangkitan. Kondisi yang bernama Islam itu ditutupi orang Islam sendiri yang saat ini berada pada titik kulminasinya.[]

Bukan “Kartu Kuning” bagi Keterbukaan Demokrasi Kita

*“Bukan kematian benar menusuk kalbu
Keridhaanmu menerima segala tiba
Tak kutahu setinggi itu atas debu
Dan duka maha tuan bertakhta”*

(Chairil Anwar, *Nisan*)

Saya tidak tahu apakah sejarah kesusastraan negeri dewata agung India memiliki puisi *adiluhung* yang semenusuk karya Chairil itu.

Juga apakah kepurbaan duka kemanusiaan sejak kurun tragedi yang digambarkan oleh Empu Wiyasa hingga beribu kali *bharatayudha* besar maupun kecil yang terjadi hingga hari ini pernah melahirkan lagu-lagu tangis jiwa seperti bangsa Filipina mendendangkan *Ang Bayan Ko* setiap saat atau *Dahil Sa’iyo nais Ki Mabuhay, Dahil Sa’iyo Honggang Mamatay*—ketika begitu tiba-tiba “duka mahatuan” itu “bertakhta”, “menusuk kalbu”, untuk pada akhirnya tak bisa lain, kecuali melapangkan “keridhaan menerima segala tiba”.

Namun, memang hanya tingkat nuansa puisi dan lagu yang seperti itu yang bisa mewakili tumpahan air mata para warga *Nehru Dynasti* ketika menyemayamkan jenazah Rajiv *kinasih* mereka. Bahkan, mungkin juga air mata seluruh rasa kebangsaan India, air mata para pencinta demokrasi, air mata dunia dan kemanusiaan, air mata pemaafhum keterbatasan manusia dan dewasanya peradaban.

Namun, Tuhan, betapa penuh teka-teki di balik setiap kehendak-Mu yang tak pernah bisa kami sangka-sangka.

Apa gerakan yang tebersit di hati dan benak Anda beberapa saat sesudah kaget mendengar kabar duka dari India itu?

Kita semua adalah anak-anak sejarah. Anak-anak yang lahir dari rahim kebahagiaan juga kesengsaraan. “Ibu” itu menentukan warna pandang kita terhadap nuansa kematian. Pengalaman-pengalaman sejarah memengaruhi sikap-sikap kita terhadap kematian. Terkadang kita menyesalinya, pada saat lain diam-diam mensyukurinya, atau sering kali bingung memformat isi hati dan isi pikiran dalam doa-doa terhadap kematian itu.

Seorang tokoh tiba-tiba dipanggil Tuhan dan spontan kita bergumam: “Kenapa dia yang Engkau panggil, Tuhan? Kenapa bukan orang lain yang selama ini menyengsarakan kami? Kenapa bukan tokoh lain yang sedemikian membuat kami makin tak kerasan hidup di bumi rahmat-Mu ini? Kami tahu setiap pemimpin tampil kepada kami dengan keterbatasannya masing-masing. Tapi, kenapa orang yang menurut perhitungan akal sehat kami akan bisa menjanjikan sesuatu, Engkau panggil secepat ini, sementara orang lain yang tak habis-habisnya menyengsarakan sangat banyak orang, Engkau biarkan tetap hidup dan merajalela?”

Dan Allah terus berjalan dengan kehendak-Nya sendiri, hitungan dan manajemen-Nya sendiri. Ketika Rasulullah Muhammad memohon kepada-Nya agar mengislamkan salah satu dari dua Umar, Dia mengabulkan. Namun, tatkala paman beliau sendiri tak juga bersyahadat dan Rasul memintakan hal itu kepada-Nya, Muhammad ditegur oleh-Nya secara halus bahasanya tetapi keras substansinya.

Demikianlah juga cara Allah bergaul dengan kita sekarang. Dia memakai perhitungan semestawi-Nya sendiri untuk menerapkan keadilan, untuk menentukan siapa mati siapa *diujo* dengan kekuasaan yang tak luruh-luruhnya sampai berpuluh-puluh tahun. Dan kita hanya bisa menirukan Chairil—*Tak kutahu setinggi itu atas debu, dan duka maha tuan bertakhta.*

Rajiv telah meninggal. Dan dia bukan yang pertama serta bukan pula yang terakhir dari *rhythm of explosion* yang telah, sedang, dan akan berlangsung di sekitar tahun cermin 1991.

Tahun cermin. Tahun *furqan*. Tahun pengutuban. Polarisasi ekstrem gejala-gejala dan nilai-nilai paradoksal dengan apa yang kita pahami dan sepakati tentang globalisasi. Tahun *wingit*, untuk skala yang sempit atau seluas apa pun.

Ritme dan progresi ini mengerjasamakan gelombang alam atau *sunnatullah* dengan kecenderungan rekayasa umat manusia sendiri dengan segala ketidakanggupan untuk memilih yang lebih dewasa dari sistem-sistem dan perilaku kesejarahannya. Manusia memojokkan dirinya sendiri. Para pemimpin mengutuk sebagian rakyatnya dengan kalimat-kalimat yang dia tahu itu justru relevan buat dirinya sendiri. Sampai tingkat yang tidak rendah mereka mempersiapkan suku cadang dan infrastruktur historis dari kehancuran sendiri.

Akan tetapi, tipologi lakon dan pola penyutradaraan Allah atas kehidupan ini tidak bersahaja dan selinier logika kita semua tentang keadilan, kebersamaan dan baik buruk. Kita belum memasuki era Nuh di mana banjir bandang akan tiba dan yang selamat hanyalah sejumlah kecil manusia yang sejak lama mempersiapkan perahu. Di samping itu, kehancuran duniawi dan kematian fisik bukan satu-satunya *output* dari logika keadilan-Nya. Artinya, jutaan penduduk Bangladesh, yang menderita bukanlah orang-orang kwalat yang dikutuk Tuhan, seperti juga kemakmuran konstan ratusan juta penduduk bumi bagian utara tak bisa dipastikan sebagai rahmat.

Apa yang kita sebut tragedi, bisa menimpa pemimpin jahat dan pemimpin tak jahat sekaligus. Seluruh ritme alam dan sejarah ini memojokkan setiap manusia untuk tidak menutup-nutupi borok hidupnya, atau mengelabui mata Tuhan dengan mendamaikan korupsi dengan

naik haji atau mengompromikan maksiat dan hedonisme dengan seseorang datang ke pengajian memakai jilbab dan peci.

Keterpojokan itu sesungguhnya menandai datangnya kembali ajaran untuk mengkritik pandangan konvensional yang menganggap bahwa kematian adalah ketidakselamatan. Maksud saya, seorang kepala negara bisa saja pada suatu hari harus terjungkal dari singgasananya justru untuk memperoleh keselamatan yang sejati. Tetapi, kejatuhan itu akan juga habis sungguh-sungguh merupakan ketidakselamatan jika kita ketahui dari hari ke hari dia memang—melalui tindakan dan ucapan-ucapannya—menabung ketidakselamatan “dunia akhirat”.

Rajiv telah tiada. Namun, ini bukan indikator dari degradasi demokrasi di mana pun. Juga belum tentu membuat kita akan lebih sungguh-sungguh memahami pentingnya demokrasi, atau apalagi lebih serius mempertahankan dan menumbuhkannya.

Kaum birokrat di negeri kita merefleksi tragedi ini dengan mengemukakan “Kita pakai demokrasi Pancasila sajalah!”, sementara para pakar menilai “Beginilah kalau demokrasi diterapkan secara terlalu terbuka”. Lantas dengan argumentasi itu kita merancang untuk lebih menutup proses demokratisasi kita sendiri.

Padahal, inti soalnya kemungkinan besar tak di situ. Kasus ini juga bukan pelajaran agar kita “lebih mencintai perdamaian” atau “belajar tidak memakai kekerasan”.

Saya ingin katakan bahwa seandainya Indonesia bukan negara kepulauan dengan segala akibatnya terhadap geografis ekonomi, politik, juga psikobudaya kebanggaan kita—maka sejak lama kita sudah akan melahirkan Rajiv-Rajiv yang meledak. Negara kita “diselamatkan” oleh ketidakpampatan geografis, teluk-teluk permisivisme dan selat-selat kulturalisme, juga tingkat kekayaan alamiah, sehingga jumlah *chances of explosion* bisa dibikin *busung* dengan sendirinya.

Proses demokrasi memang memerlukan infrastruktur budaya dan mentalitas, termasuk di dalamnya kesiapan taraf kemampuan dan

kedewasaan berpikir. Tetapi, lebih utama dari perangkat lunak macam itu sesungguhnya yang lebih menyumbuhkan kemungkinan benturan, ledakan, atau anarki, adalah terselenggara-tidaknya keadilan sosial serta taraf kesejahteraan ekonomi global.

Kita tidak sedang berhadapan dengan situasi dunia di mana—seperti George Bush bilang—“Kita sayangkan orang masih menyelesaikan perbedaan pandangan politik dengan kekerasan.” Di samping karena dimensi itu lebih menunjuk ke wajah Bush sendiri, juga karena soalnya tidak terletak pada “ideologi” kekerasan atau perdamaian, tetapi pada seberapa jauh kesejahteraan pokok penghidupan manusia telah didistribusikan. Kesejahteraan pokok bagi raganya, yakni sosial ekonomi, maupun bagi batinnya, yakni politik dan hak asasi. Salah satu latar kematian Rajiv adalah “warisan” sejarah represi kekerasan dari masa silam, misalnya tatkala ibunya menggunakan tangan besinya di pusat ruhani dan markas politik Sikh.

Jadi, pandangan bahwa kematian Rajiv adalah karena “demokrasi terlalu terbuka”, tampak sebagai permisivisme subjektif yang sebenarnya berangkat dan mengacu pada kepentingan sepihak. Ia yang mengemukakan asumsi itu tidaklah berbicara tentang Rajiv dan dunia, tetapi tentang kepentingannya sendiri di arena nasional.

Kalau memang kita ingin menghikmahkan kasus ini buat Indonesia, saya bukan tidak mengakui bahwa masyarakat kita belum cukup memiliki modal (kultural, intelektual, mental) untuk berdemokrasi, untuk berbeda, untuk menyangga kebebasan, serta untuk dewasa di tengah ragamnya pilihan-pilihan. Bahkan, kita tahu subjektivisme kekuasaan di negeri ini justru merupakan contoh terpendam dari ketidaksiapan itu; ini kalau saya tidak boleh berterus terang mengatakan bahwa belum ada kesungguhan iktikad untuk berdemokrasi.

Saya sepenuhnya setuju pada soal ketidaksiapan mental dan budaya itu. Tetapi, kalau pada suatu saat kita mengalami “Rajiv” meskipun dalam kadar yang berbeda, saya tidak akan terutama menuding soal mental dan budaya. Melainkan menukik ke sumber yang substansinya

adalah ketidakadilan sosial ekonomi dan subjektivisme kekuasaan yang berkepanjangan.

Dengan kata lain, tragedi Rajiv bukanlah “lampu kuning” bagi gairah keterbukaan politik dalam proses demokrasi bangsa dan negara kita. Kalau kita khawatir akan terjadi anarki, yang kita lakukan sebaiknya bukan memperkeras bungkaman, melainkan memperbanyak upaya pelubangan tembok-tembok ketidakadilan sosial.

Kalau tidak, *rhythm of explosion* akan pada akhirnya tiba pada ketukan yang mewajibkan kita secara alamiah untuk ikut berbaris dalam koor zaman. ‘Kan saya tidak boleh menampar pipi Anda lantas saya ceramahi Anda tentang luhurnya perdamaian dan antikekerasan.[]

ICMI, Ratu Adil, Takhayul

Ketika seorang wartawan menanyakan komentar saya tentang momentum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), saya merasa otak saya harus bekerja keras untuk menemukan jawabannya. Jawaban yang bisa saya anggap paling mewakili seluruh kompleks pengetahuan dan harapan saya terhadap organisasi raksasa ini.

Pada akhirnya, saya hanya berkata sederhana, “Hendaknya umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya mengembangkan kemampuannya untuk menyeleksi harapan atau menyaring impian yang menyangkut ICMI. Dan ICMI sendiri tolong rajin-rajin mengumumkan dan menjelaskan keterbatasan-keterbatasan kapasitas perannya, syukur dengan penuh kerendahan hati.”

Maksud saya, jangan menambah jumlah keadaan sejarah di mana “pasak lebih besar daripada tiang”. Kasihan rakyat kecil dan umat awam.

Memang sejak saya menyatakan keluar dari ICMI, semakin terasa bahwa saya benar-benar orang kecil dan atau rakyat biasa. Rakyat kecil yang lugu, naif, dengan kondisi cara berpikir yang kita sebut saja—“rural” atau “tradisional”.

Itu pun harus saya tambah: rakyat kecil dan orang biasa dengan “hati petani”.

Hati petani?

Ya. Hati petani bukan—umpamanya—hati seorang cendekiawan modernis yang dingin melihat apa pun termasuk penderitaan manusia: Sebab setiap “keterharuan” dan “romantisme” dianggap bisa meluncurkan “objektivitas”.

Hati petani bukanlah hati seorang manusia karier yang melihat dan memperlakukan apa saja—termasuk manusia dan ICMI—sebagai kapital dan alat produksi bagi kepentingan karier pribadi.

Hati petani adalah “hati manusia”. “Hati alam”. “Hati makhluk Tuhan”. Bukan “hati profesionalis” atau apalagi “hati kapitalis”. Hati yang lemah. Hati yang gampang luruh. Hati yang *semanak* (ramah) dan *ke-semanak-an* itu diterapkan dalam setiap keterlibatan hidup, entah dalam mengolah sawah, berdagang, berpolitik, atau apa pun.

Dengan kata lain—menurut cara hidup modern—hati yang tolol.

Tetapi, mungkin saja saya sedikit punya kelebihan dibanding rakyat kecil pada umumnya, misalnya dalam hal menyeleksi impian atau menyaring harapan. Saya sudah lama belajar untuk tidak jatuh terjerembap dari langit impian dan angkasa harapan yang terlalu tinggi.

Di bawah sadar kejiwaan rakyat kecil, ICMI itu semacam Ratu Adil. Persis seperti posisi kata “tinggal landas” selama ini. Impian tentang Ratu Adil adalah impian tentang keajaiban atau—mungkin—semacam sulapan.

Sekitar 90% waktu saya sehari-hari, saya habiskan untuk berada di lingkungan rakyat kecil. Dan saya menyimpulkan betapa banyak di antara mereka yang merasa yakin bahwa “kalau nanti tinggal landas sudah tiba, hidup semua rakyat negeri ini akan tiba-tiba makmur”.

Tatkala ICMI sedang didukung kelahirannya di Unibraw Malang, di antara hari-hari proses kelahiran itu saya “harus menjadi mubalig” pada suatu malam di depan ribuan umat Islam di Pare, Kediri. Dan ketika saya berkisah tentang berdirinya ICMI, mereka lantas bertepuk tangan dalam nuansa “histeria” yang mengerikan.

Sesudah itu, perlahan-lahan saya menyaksikan dan merasakan betapa ICMI memang *dibatin* banyak orang sebagai semacam Ratu

Adil meskipun kecil-kecilan. Yang dimimpikan akan bisa menjawab banyak problem hidup mereka yang mendasar, menyakitkan, dan ber-tele-tele.

Padahal, ICMI itu memiliki segudang keterbatasan di hadapan kompleksitas problem kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia. Dalam konteksnya terhadap kebutuhan-kebutuhan konkret umat Islam dan rakyat Indonesia di lapangan, jumlah keterbatasan ICMI berlipat-lipat dibanding kesanggupan historisnya.

Keterbatasan itu meliputi banyak hal. Bingkai-bingkai struktural-politis yang saya “optimistis” amat sukar mereka tembus. Rendahnya tingkat kohesi di antara para pelaku organisasionalnya apabila dikontekstualisasikan pada permasalahan-permasalahan konkret yang bukan saja potensial untuk menjadi “mentah di lapangan”, melainkan juga bisa menjadi bumerang bagi diri dan posisi mereka sendiri.

Belum lagi realitas praktis mereka bahwa mereka adalah “orang sibuk” dan “orang besar” semua, dan karena itu punya banyak kelemahan. Kemudian, jangan lupa bahwa sangat tidak mudah untuk tidak mengulangi eksistensi disfungsional organisasi besar semacam NU atau Muhammadiyah.

Terutama kalau sudah berhadapan dengan persoalan-persoalan struktural: sosial ekonomi, sosial politik, atau sosial budaya. Dan akhirnya, bahwa jargon ICMI yang berpusat pada isu “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”—tak kurang dan tak lebih—adalah sebuah jargon abstrak yang bisa terjebak menjadi takhayul.

Anda menjadi kernet, buruh bengkel motor, mengerjakan sawah, mengorganisasikan koperasi-koperasi kecil, menyelenggarakan *workshop* dan advokasi hukum dan hak asasi manusia, demonstrasi, kursus-kursus, kuliah dan ceramah, aktif menemani rakyat tergusur, membela orang di penjara padahal tak bersalah; serta apa pun yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif: selalu pada akhirnya menyangkut kualitas hidup.

Kuantitas dan kualitas itu komplementer dan dialektis. Kuantitas mengada karena kualitas, dan kualitas mengada karena kuantitas.

Seperti jiwa dan raga, badan dan ruh, syariat dan hakikat. Tak bisa dipisahkan. ICMI meletakkan diri di mana?

Tentu saja, kewajiban kita adalah menunggu kejelasan format perjuangan mereka. Dan terus mencoba memberi peluang historis agar mereka membuktikan dirinya. Membuktikan bahwa ICMI lebih dari sekadar *politically recruited community*.[]

Luar-Dalam, Atas-Bawah ICMI

Tak pernah saya sangka bahwa ICMI sedemikian tulus dan rendah hati.

Dalam pencarian ilmu, saya mencoba mentradisikan sikap merasa nol. Dalam pengolahan mental, saya membiasakan ilmu *kantong bolong*. Dan dalam kompleks eksistensi budaya, saya terlalu peka untuk harus selalu melihat diri bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.

Kalau diminta berceramah, saya menjawab, “Saya tidak bisa menjamin bahwa saya mampu.” Itu bukan kerendahan hati. Itu realitas.

Terhadap kebahagiaan dan kesedihan, saya mem-*bolong*-kan kantong mental. Dan jika orang memanggil, “He, Emha!”—selalu ada naluri yang menjawab: “Emha” itu ‘kan format budaya tertentu dalam asosiasi orang tentang masa silam saya. Adapun saya sendiri bergerak, bergeser, berubah, berkembang tiap detik.”

Nuansa itu pulalah yang saya alami tatkala saya mengalami kasus *korsleting* teknis dengan ICMI. Saya tak keberatan apa pun dengan *fait accompli* itu karena memang saya bukan apa-apa. Dan ketika saya mengemukakan, “Tolong jangan jadikan pengurus, karena saya tak mampu,” itu juga bukan sikap *tawadhu*. Itu rasa kosong diri.

Diwawancarai

Susahnya, koran meminta saya untuk menuliskan dan diwawancarai pula. Padahal, situasi saya adalah: “Sudahlah. Lupakanlah itu. Saya sudah sangat sibuk dengan *nulis* rutin, bengkelnya Markesot, bakminya Imam, ngurus anak-anak *minggat*, serta problem-problem pribadi yang kegetirannya saya usir dengan memacu kerja dan kreativitas.”

Dan saya terus begadang dan bekerja dan lupa *rame-rame* ICMI, sampai lewat tengah malam itu saya tiba di rumah kontrakan dalam keadaan hujan sangat lebat. Dua orang utusan Pak Habibie menunggu di beranda yang gelap pekat.

Masya Allah. Untung saya pulang. Sebab baru malam itu—pukul 01.00—saya *ngendon* lagi di rumah.

Tergopoh-gopoh saya menuanrumahi mereka yang datang menda-dak dari Jakarta melalui Semarang, untuk menyampaikan permintaan maaf resmi dari ICMI. Menjelaskan segala kekhilafan teknis itu sambil menyodorkan berkas-berkas buktinya. Kemudian membuka diskusi tentang hampir seluruh pokok persoalan kemasyarakatan dan negara kita untuk melandasi permintaan mereka agar saya tetap bersedia duduk sebagai anggota pengurus. “Paling lambat besok siang Pak Soetjipto Wirosardjono akan menemui Anda untuk melanjutkan dialog dan negosiasi kita ini,” kata salah seorang dari mereka.

Saya jadi *pakewuh* dan “GR”. Kok, begitu pentingnya saya, sampai merepotkan sejauh ini.

Reaksi spontan saya ini juga sama sekali bukan *tawadhu* atau sikap *low profile*, melainkan sungguh-sungguh tidak mengerti. Bahkan, secara psikologis saya defensif untuk mau mengerti soal itu, sebab sangat berbahaya bagi saya.

Kemudian, Pak Tjip benar-benar datang. Jadinya lengkap dua hari dua malam, sebab sengaja saya repoti mereka dengan menyodorkan kasus tentang anak cerdas yang bentrok terus dengan orangtua dan sekolahnya. Dan tak saya sangka mereka meresponsnya dengan penuh

kesantunan dengan mengorientasikan anak itu untuk kelak dinominasikan mengikuti program STAID yang ditangani BPPT-nya Habibie.

Jangkauan

Orang ICMI itu seolah-olah ingin membuktikan secara langsung di depan mata kepala saya bahwa jangkauan konteks program ICMI bisa sangat luas dan multidimensional. Namun, toh saya merasa *nranyak* kalau pada tahap itu saya goda juga mereka dengan kasus tanah di Urip Sumoharjo Surabaya atau Buleleng Bali.

Alhasil ICMI mulai tampak tidak semata-mata “benda abstrak” di mata saya.

Tentu saja tidak *fair* untuk menuntut ICMI akan merupakan institusi yang sanggup menjawab seribu kegelisahan sospolekum umat Islam, orang kecil, dan rakyat Indonesia seluruhnya.

Betapun ia “sekadar” lembaga kecendekiawanan, ia bisa memerankan “kepujangaan dan keresian” bagi negeri ini, tetapi ia tetap bukan parpol, bukan perusahaan pen-*support* gerakan oposisi, bukan lembaga tarekat dengan jutaan jamaah, pun bukan divisi “perangkat keras” di tengah pertarungan kekuasaan sejarah.

ICMI bersama dengan institusi kecendekiawanan lainnya, berposisi seperti “akal budi dalam diri seseorang”. “Seseorang” itu ialah bangsa dan negara ini: persoalannya bagaimana memanifestasikan dan menyistematiskan ruh akal budi itu dalam peta struktural masyarakat dan negara kita.

“Kaplring” ikatan cendekiawan yang berskala nasional sekadar selangkah di depan dunia universal, yang juga merupakan “akal budi” negara. Sementara institusi seperti DPR dan pers, sebenarnya selangkah di depan ikatan cendekiawan, sebab keduanya memiliki “alat produksi” yang lebih konkret dan aktual.

Maka, tidak heran bahwa sejak ICMI akan lahir, muncul sangat banyak sangka buruk, kecurigaan dan nada meremehkan. Bangsa Indonesia berada dalam situasi *splits*, terbelah: di satu pihak ia berharap

sesuatu, di lain pihak sudah tidak terlalu percaya kepada harapan apa pun.

Hal-hal demikian membuat dialog saya dengan keputusan ICMI dan Pak Tjip tidak terlalu ber-GR memfokuskan cita-cita besar bangsa, tetapi mencoba menemukan apa yang maksimal dari tumpukan segala yang serbaminimal.

Misalnya, satu hal: jaminan independensi. Minimal bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya, dan maksimal ICMI itu sendiri. Misalnya, kalau ICMI pada suatu hari menjadi lembaga kebulatan tekad bagi suatu primordialisme politik, saya sudah mendaftar sejak sekarang untuk melecehkannya.

Karena kebetulan Pak Tjip adalah juga seorang dalang, maka kami memakai idiom dunia wayang.

Banyak kebetulan yang bisa dipakai. Umpamanya: “Kalau ICMI adalah Raden Sadewa, si bungsu Pandawa, yang punya autentisitas dan konsistensi sikap untuk tak segan-segan menentang kakak-kakaknya jika dia pandang tidak benar, maka kita berada di satu gelombang.”

Atau, Ontoseno dan Wisanggeni. ICMI mestinya merupakan sosok yang memiliki kemerdekaan jelajah dan eksplorasi budaya seperti putra Bima dan putra Arjuna itu. ICMI bukan kesatria yang *sendika dhawuh* dan akan membuktikan bahwa ia lahir untuk proyek *sendika dhawuh* seperti dicurigai oleh banyak orang.

Kalau ICMI memang demikian dan kami-kami diperkenankan terus mengasah potensi keontosenoan dan kewisanggenian, maka persoalannya menjadi sederhana. Kalau independensi dan kemerdekaan jelajah (dalam ilmu maupun gerakan) itu dijamin, maka menjadi tidak penting apakah seseorang menjadi pengurus atau tidak. Tidak penting apakah ia di bawah ICMI atau di dalam ICMI. Sebab luar dan dalamnya, bagi nuansa dan tradisi hidup saya, sama saja. Juga bawah atau atasnya.

Kalau Ontoseno tetap menjelajah hutan, maka rumah ICMI hanya patokan teknis, dan bukan sumber maupun tujuan. Kalau Wisanggeni

tetap berdomisili dalam idealisme dan kreativitasnya, maka jadi pengurus ICMI atau tidak, menjadi bukan nomor satu. Kreativitas dan idealisme itu di atas ICMI, di atas NU, Muhammadiyah, di atas Indonesia, bahkan di atas dunia.

Dan Pak Soetjipto Wirosardjono, Kiai Kantong Bolong dari Biro Statistik Pusat ini, ternyata adalah memang seorang dalang pesisiran, dalang pinggiran dengan versi-versi *carangan*.

Untuk sementara, mungkin asyik menempuh perjalanan remang-remang ini dengannya.[]

Makan Nasi Jangan Dihirup, Minum Kopi Jangan Dikunyah

Pergaulan saya dengan ICMI cukup mengesankan, setidaknya bagi saya sendiri. Saya bertemu, berkenalan, dan bergaul sebagai sahabat dengan salah seorang “anak buah” Habibie. Dalam berbagai kesempatan kami secara tak sengaja berdialog tentang berbagai soal: negara, rakyat, birokrasi, pejabat, sistem, Islam, kaum Muslim, atas-bawah, pusat-pinggiran, dan seterusnya.

Kemudian, bersama Dr. Kuntowijoyo dan Eros Djarot, saya diundang ke BPPT, tempat sahabat saya itu bekerja, untuk berbicara tentang “Budayawan Menatap Iptek”. Nuansa yang muncul kemudian adalah pergeseran B.J. Habibie dari “antropoiptek” menjadi makhluk yang mulai memperhatikan dimensi kebudayaan dalam kehidupan. Dari berbagai pernyataannya, tampak beliau mulai memasuki atmosfer pandangan, bahwa kebudayaan bukan saja sebuah sisi hidup, melainkan bahkan merupakan landasan segala macam keputusan pembangunan.

Rasan-rasan sesudah itu adalah rencana dikumpulkannya sebanyak mungkin budayawan dari seluruh Nusantara untuk bersilaturahmi intelektual di BPPT alias “pesanggrahan” Habibie itu.

Kemudian, terjadi suatu peristiwa indah pada suatu siang, seusai shalat Jumat. Sambil *klesetan* di atas tikar. Habibie mengobrol dengan

beberapa anak muda yang seolah-olah diutus oleh Tuhan untuk membuka salah satu urat saraf di otaknya yang selama ini seolah-olah membeku.

Habibie tiba-tiba menjumpai bahwa dirinya itu pertama-tama bukanlah menteri, bukan ilmuwan iptek, bukan pula segala status yang lain, kecuali seorang Muslim.

Kesadaran itu mengubah visinya dalam memandang dunia. Perspektif di benaknya berubah. Habibie melihat Indonesia, sejarah, BPPT, aktivitas iptek menjelang pembangunan jangka panjang kedua: dengan kacamata yang lain sama sekali dengan sebelumnya.

Maka kemudian muncullah dari hati, pikiran, dan tangannya berbagai inisiatif. Bersilaturahmi dengan beberapa “kolega elite” termasuk *sowan* kepada Bapak Presiden. Pertemuan dengan beliau itu ibarat *tumbu nemu tutup* yang untuk memahaminya Anda tinggal membuka rumus-rumus dunia perpolitikan, baik dalam skala pragmatik maupun dalam skala luas. Terhadap hal itu, jika kita mengukur “bagaimana posisi Islam”, tidak bisa kita hasilkan kesimpulan final apa pun. Sebab kehidupan ini, terutama dunia politik, hanya berisi dua makhluk: kuda dan joki.

Jadi, segala jawaban tentang prospek-prospek politik dari person atau kelompok apa pun, selalu terpulang pada pertanyaan: “Siapa joki dan siapa kudanya?” Dan antara joki dan kuda bisa “bergantian” posisi dan fungsi setiap saat.

Dengan sahabat saya itu, serta dengan keseluruhan pihak dan proses yang “tersangkut” dalam tahap-tahap dialog yang saya ceritakan di atas—kemudian terjadi pergesekan-pergesekan yang beredisi-edisi alias berulang-ulang; sampai akhirnya saya memperoleh undangan untuk ikut berbicara dalam acara di Unibraw Malang, yakni Desember tahun 1990, tat kala ICMI didukuni.

Banyak perbedaan pendapat serta hal-hal yang saya kurang *sreg*. Tetapi, akhirnya saya datang juga, meskipun makalah 14 halaman saya tentang “Rekayasa Sejarah Berdasar 8 Ayat Terakhir Surah Al-Hasyr” sama sekali tidak menjadi penting dalam acara itu.

Teman-teman di Yogya mewanti-wanti saya: “Kamu ini satu-satunya orang yang bukan sarjana yang diundang ke acara itu. Jangan bangga. Kamu dipakai untuk jadi bember atas pertanyaan-pertanyaan tentang identifikasi cendekiawan dengan kesarjanaan! Dengan kamu datang ke situ, gugatan tentang masalah itu menjadi gembos!”

Saya jawab bahwa saya harus percaya kepada kumpulan orang saleh dan piawai itu. Tetapi, kemudian saya memang menjumpai bahwa kriteria pemilihan siapa-siapa yang diundang sungguh-sungguh “tergantung pemborongnya”. Tergantung siapa yang dikenal, siapa yang dekat, siapa yang dianggap kualifikasinya tidak cukup memenuhi standar kualitas objektif.

Bahkan, ketika saya membaca susunan pengurus, terlihat juga ada yang lucu-lucu berkat improporsi kualifikasi di sana-sini. Contoh paling gamblang adalah dicantumkan nama saya.

Akan tetapi, saya tidak bersedia membunuh tanaman yang baru saja *ditandur*. Saya tidak bersedia diajak oleh banyak wartawan untuk bersangka buruk tentang hubungan ICMI dengan mobilisasi politik menjelang Pemilu 1992, misalnya. Maka di televisi Surabaya, saya ikut mengangkat bendera dengan memberikan wawancara—juga di beberapa koran—bahwa kita harus memberi kesempatan sejarah kepada ICMI untuk membuktikan kesungguh-sungguhannya.

Kelak kalau ICMI berbuat tidak seperti yang dipropagandakannya, ya kita tinggal “melempari kerikil melalui paruh burung Ababil”.

Di forum ICMI Malang itu, saya sempat mengusulkan nama IMCI: Muslim Cendekiawan, bukan Cendekiawan Muslim. Dalam pemahaman saya, subjeknya haruslah Muslim, kecenderungan itu instrumennya. Kalau ICMI, kemusliman bisa jadi hanya embel-embel.

Tentu saja usulan saya ini bukan saja ditolak, melainkan bahkan tidak didengarkan oleh seorang pun dari tokoh-tokoh itu. Dan itu sama sekali tidak mengurangi dukungan saya terhadap iktikad baik ICMI untuk pembangunan bangsa Indonesia dan kaum Muslim. Saya juga sering mengusulkan agar jangan ada perang, tetapi perang juga. Saya mengusulkan agar di muka bumi ini tidak usah ada yang namanya “negara”, tetapi toh segala-galanya adalah negara. Saya mengusulkan agar ibu kota ekonomi serta ibu kota kebudayaan Indonesia dipisahkan, tetapi toh segala-galanya Jakarta.

Jadi, saya sudah terbiasa usul, dan terbiasa ditolak. Lurah desa saya di Jombang saja pun bukanlah orang yang saya usulkan. Tetapi, itu tak mengurangi kecintaan dan *support* saya terhadap pembangunan desa saya.

Jadi, saya mendukung ICMI, seperti juga saya mendukung berdirinya Koperasi Pedagang Asongan atau Paguyuban Pengamen: mereka semua bermaksud memuliakan manusia dan kehidupan.

Ketika di sebuah koran Surabaya, saya menyebut ICMI adalah “re-inkarnasi perpolitikan santri tanpa kekakuan Masyumi”, para tokoh inti ICMI membantah dengan mengatakan bahwa ICMI *nothing to do with politic*. ICMI itu gerakan intelektual dan kebudayaan.

Terhadap pernyataan ini, saya juga OK-OK saja. Sebab, memang begitulah politik ICMI.

Seorang sutradara (film) Muslim terkenal, *guyon-guyon* mengkritik: “Ketua dan banyak pengurus ICMI tidak bisa baca Al-Quran!” Saya jawab: “Tunggu, saya akan cek dulu.”

Yang lain bertanya: “ICMI itu mana Al-Qurannya? Mana ilmu Islamnya? Mana metodologi Islaminya? Apakah dengan figur-figur itu mereka tak sekadar mengulang-ulang penerapan ilmu modern sekuler dikasih aksesori comotan ayat-ayat?” Tentu saja, saya sendiri tidak punya keberanian politis-kultural-psikologis untuk bertanya demikian. Demi Allah, saya berani melawan peluru dan sel penjara, tetapi saya

ngeri kepada kaum intelektual kaum fiqih, kaum formalis, dan pangeran-pangeran pemilik kehidupan.

Mending orang Madura. Kalau di teve ada ceramah Isra' Mi'raj yang ucapan *Assalamu'alaikum*-nya saja tidak fasih, mereka langsung memantikan teve. “*Dak bisa salam, kok kasih pengajian! Dekremak!*”

Saya sendiri tetap bertahan percaya kepada ICMI, kepada semua manusia, dengan segala keterbatasannya masing-masing. Justru karena itu, maka pergaulan saya dengan ICMI—bagi saya pribadi—senantiasa menyodorkan mozaik ilmu yang tiada taranya.

Juga tat kala seorang adik saya datang dari Jakarta mengikuti temu pers ICMI di mana Habibie mengumumkan “kabinet”-nya. Dari berkas yang disodorkan oleh adik saya itu, saya jadi tahu bahwa ternyata saya adalah Ketua Bidang Dialog Kebudayaan ICMI.

Saya tetap percaya kepada ICMI bukan karena saya di-*fetakompli*, bukan karena hal itu tidak etis dan tidak menghargai hak saya atas seluruh hidup saya, bukan karena saya kok tidak diajak rundingan dulu atau setidaknya diberi tahu.

Betapun pencantuman nama saya itu merupakan kepercayaan kepada saya. Cuma, bagi saya, ini semacam *slip of the tongue* alias keseleo lidah. Atau, kalau bahasa koran: Itu salah cetak.

Mana mampu saya dibebani tugas seberat itu? Bukan kapasitas saya dan bukan *maqam* saya: salah-salah bisa jadi *makam* saya. Kalau bekerja sama atau dipekerjakan oleh ICMI, masih mungkin. Tetapi, menjadi bagian formal dari suatu lembaga, bukan “kodrat kultural” saya. Pundak kemusliman saya, punggung kecendekiawanan (hiii ...!) saya, serta kaki-tangan politik dan kebudayaan saya, tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan ke-ICMI-an yang tersandang di tubuh saya. Tampaknya saya justru bisa maksimal mengontribusikan diri kepada dunia yang penuh duka lara ini, jika dibiarkan sunyi sendiri dengan baju robek-robek saya.

Apalagi kalau ICMI tahu, bahwa—bersamaan dengan berita ICMI itu—datang surat kritik kepada saya dari seorang aktivis Dakwah Kam-

pus IKIP Negeri Semarang, yang isinya memperjelaskan kenyataan “rempelo-ati-usus” kepribadian saya.

“Ternyata,” kata sahabat dari Jalan Tampomas Selatan itu, “Anda seorang yang egoistis, gila hormat, mudah putus asa, dan suka rewel. Anda selalu merasa paling benar, merasa paling dibutuhkan oleh umat Islam”

Itu salah satu bukti—kalau ICMI mau mendengarkan suara hati nurani umat di bawah—bahwa keputusan mencantumkan nama saya di kepengurusan ICMI adalah *slip of the tongue*. Kalau itu tidak diralat, sangat membahayakan umat.

Saya sendiri sedang merenung-renungkan bagaimana cara yang paling halus dan *ngemong ati* untuk menolak, supaya kalau orang “makan nasi jangan dihirup, minum kopi jangan dikunyah.”[]

Asal Saya Tetap Boleh Jadi Ontoseno

Tentu saja omong besar kalau saya mengidentifikasikan diri dengan tokoh Ontoseno. Tetapi, setidaknya saya berhak menginginkan punya potensi keontosenoan, sikap dan kemerdekaan berpikirnya, gairah eksplorasinya, juga pengambilan posisinya dalam peta nilai sejarah.

Yang “salah” sebenarnya adalah doktor kita Riswandha Imawan, yang menulis di harian ini Rabu kemarin, dengan mengambil metafora Gatotkaca untuk menggambarkan sosok B.J. Habibie dan gairah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia—atau boleh juga dicurigai oleh siapa pun untuk berbunyi Ikatan Cari Muka Indonesia, Ikatan Caci Maki Indonesia, atau Ikatan Carok Meduroan Indonesia.

Sejak kapan pun saya memang tidak pernah mendambakan atau menemukan diri saya dalam identifikasi atau apalagi *idolatri* Gatotkaca, kesatria Pringgondani yang berotot kawat bertulang besi. Setidaknya karena segala macam virus militerisme saya ketahui sebagai negasi terhadap humanitas.

Maka kalau mau pertandingan idola-idolaan, kalau tidak pakai terminologi yang bisa menyebut Muhammad atau Siti Djenar, lebih baik saya jagokan si Ontoseno, yang notabene masih saudara misannya Gatotkaca sendiri.

Namun, apa hubungannya dengan ICMI ?

Habibie mengumumkan pengurusnya, dan dari koran saya tahu, bahwa saya terdaftar. Tetapi saya tidak apa-apa, saya tidak protes bahwa saya tidak diajak rundingan sebelumnya. Saya kemudian sekadar berpendapat bahwa rasanya kurang cocok saya jadi pengurus ICMI, berdasarkan banyak pertimbangan. Tampaknya saya biasanya bisa lebih produktif dan efektif bersepak terjang kalau dalam posisi otonom dan independen. Jadi, saya tulis kepada Pak Habibie: “*Mbok ya tolong cari tenaga lain yang lebih representatif.*”

Namun, itu tidak mengurangi dukungan saya terhadap ICMI, seperti juga saya mendukung Koperasi Blantik atau Paguyuban Pengembangan Setiap Acara Muktamar. Kalau perlu saya dukung juga organisasi PSNI (Persatuan Suami Ngeri Istri) karena saya, memiliki argumentasi empirik-historis.

Banyak orang curiga jangan-jangan ICMI akan hanya menjadi “Lembaga Kebulatan Tekad” menjelang Pemilu 1992. Atau, bermacam sangka buruk lainnya yang tak bisa dibuktikan akan benar atau tidak.

Wartawan juga cenderung menikmati dan mencari kalau-kalau ada yang bisa “diadu” dalam ICMI; karena memang demikianlah kebenaran ideologi pasar dan oplah. Itu membuat potret wajah ICMI hanya tampak segi-segi politis-birokratis-internalnya, sementara wajah kecendekiawanannya tidak tampak sama sekali. Tetapi, memang kecendekiawanan belumlah termasuk komoditi yang cukup layak pasar; sehingga dari ICMI harus dicari-cari unsur yang sesungguhnya “non-ICMI”.

Saya sendiri memilih sikap objektif terhadap kemungkinan dinamika setiap proses manusia dan lembaga-lembaga. Biarlah ICMI kita kasih waktu untuk membuktikan dirinya. Terserah apa yang mau disumbangkannya kepada bangsa dan negara, terserah di petak mana ia memilih tempat, terserah apa pilihan kostumnya dan jenis *make up*-nya. Tetapi, yang penting kontributif atau tidakkah gerakan-gerak-

annya terhadap pembangunan kebajikan dan kesejahteraan negeri ini.

Lantas apakah saya terlibat secara formal di dalamnya?

Pak Habibie mengutus dua orang ke Yogya, Selasa kemarin, untuk menjelaskan kekhilafan teknis yang membuat ada miskomunikasi dalam pencantuman nama saya. Dengan penuh kerendah-hatian mereka menyatakan bahwa Pak Habibie dan ICMI memohon maaf atas kekhilafan itu.

Saya sudah kontrak seumur hidup untuk memaafkan apa dan siapa saja yang menurut hukum Tuhan memang wajib saya maafkan. Jadi, tak ada problem. Sejak semula saya bilang saya tidak protes, karena saya paham tumpukan kesibukan mereka sehingga saya *ketlingsut*. Tatkala saya katakan, “Pada situasi tertentu, formalitas organisasional bisa dinomorduakan,” para perutusan itu membantah: “Tidak, itu etika yang wajib dipenuhi, dan kami bersalah dengan kekhilafan ini.”

Segera pembenahan soal teknis itu terbereskan. Kemudian, kami berdialog dan menegosiasikan masalah-masalah substantif yang justru merupakan pusat perhatian dari hakikat berdirinya ICMI: Indonesia, kok begini! Umat Islam, kok begini! Manusia, kok begini! Kebudayaan, kok begini! Peradaban, kok begini! Terus masa depan *gimana* dong!

Dalam banyak hal kami sepakat, tetapi dalam lebih banyak hal kami berbeda pendapat, bahkan bertentangan pandangan.

Akan tetapi, kecendekiawanan memang tidak merekayasa kekompakan. Kecendekiawanan, juga demikian semangat ICMI seharusnya, adalah lapangan penampung dan pengelola perbedaan-perbedaan. Makin tecermin perbedaan, serta makin damai dan dewasa kita semua dalam perbedaan-perbedaan itu, berarti kecendekiawanan berhak untuk disebut kecendekiawanan.

Kalau Dawam bilang begini atau Habibie tak diketahui orang bilang apa: lantas disimpulkan bahwa “ICMI pecah”. Itu cara berpikir “orbais-tik”, yang mengacu pada takhayul persatuan dan kesatuan, pada monoloyalitas dan penghormatan terhadap perbedaan.

Kecendekiawanan melihat perbedaan itu sebagai dinamika, sebagai indikator independensi dan kreativitas, sebagai justru memang harus demikianlah kalau cendekiawan berkumpul.

Sebenarnya, memang segi-segi itulah yang saya khawatirkan kalau saya yang liar ini harus kompak-kompak-ria secara formal dalam sebuah organisasi.

Maka, betapa gembira hati saya ketika sehari kemudian datang pula resi-cendekiawan yang saya cintai, saya percayai integritas intelektual dan spiritualnya. Namanya Soetjipto Wirosardjono, seorang birokrat yang aneh, seorang dalang dengan aspirasi pesisiran dan “wetanan”, seseorang yang sejak lama bersama saya saling merasa “berenang di satu gelombang”.

Saya sering menyebutnya sebagai Kiai Kantong Bolong, karena aneh bahwa di negara semacam ini ada pejabat tinggi macam dia yang artikulasi politiknya sangat eksplisit memancarkan aspirasi kepujangan rakyat, sementara dia berhasil *sluman-slumun* sampai hari ini.

Terkadang saya menyebutnya Bima, karena sebagai elite Pandawa, dia tidak pernah bersedia duduk dan *ngapurancang* atau berbahasa *kromoinggil*.

Bima itulah yang memperanakan Ontoseno, yang tingkat “pembangkangan”-nya sudah lebih “disempurnakan”.

Saya bertanya: “Pak Cip, saya bukan Gatotkaca yang patuh. Maka, kalau saya berada di rumah ICMI, bolehkah saya berlaku tetap sebagai Ontoseno?”

Sang resi menjawab: “Anda jangan masuk rumah ICMI kalau mengubah diri tidak lagi menjadi Ontoseno!”

Tenan, Pak?[]

Rahasia Air Mata Bang Ali

Kalau kita adalah warga negara, subjek kebangsaan dan pemerhati politik yang romantis, maka kemesraan Bang Ali plus sejumlah anggota Petisi 50 dengan Habibie *cum suis*—yang notabene merupakan ujung tombak kebijakan baru pembangunan bangsa sekaligus representer paling transparan dari suprakekuatan kontemporer—tentu kita impikan hendaknya merupakan “permainan catur tingkat tinggi”, yang dengan berdebar-debar akan kita tunggu hasilnya.

Yang satu Petisi 50: selalu cukup “segar” penampilannya, dan apalagi Bang Ali, “striker”-nya kali ini, yang dikenal selalu tampil tanpa tedeng aling-aling. Pihak lainnya adalah Habibie, si teknolog genius, politisi lugu yang memusingkan sangat banyak pihak dengan kepolosannya. Dari kalangan kaum Muslim yang *going abroad* dengan psikologi politik “sekuler”, pihak militer, hingga semua Indonesiolog domestik maupun dari manca, yang selama ini hanya menakar simptoma-simp-toma politik di negeri ini dengan kerangka teori baku.

Petisi 50 dan “*clan*” Habibie adalah dua kutub yang selama ini terlihat tak terkirakan jarak polaritasnya. Interval politis di antara keduanya merupakan jarak terjauh dari yang pernah dikenal dalam konstelasi perpolitikan Indonesia kontemporer.

Memang, Bang Ali dan kawan-kawan bukan simbol dari sebuah *counter-ideology* terhadap mono-ideologi yang berlaku. Juga bukan semacam partai politik yang konkret, memiliki akar dan program-program alternatif. Petisi 50 sesungguhnya bukan sebuah kekuatan sejarah yang cukup mendasar. Hanya beberapa langkah, ia bisa dituding sebagai sekadar reaktif terhadap arus. Itu pun bermuara tidak benar-benar pada inti permasalahan historis rakyat banyak, tetapi dikonfigurasi oleh kesamaan atau pribadi, meskipun substansi nilainya bisa saja tetap murni.

Sementara itu, Habibie—yang “bikin ribut” negeri ini sejak mega-proyek IPTN dan lain-lain serta gebrakan ICMI-nya—adalah makhluk Indonesia ambang abad ke-21 yang masih jauh dari akhir “ronde pertarungan sejarah” untuk bisa disimpulkan. Sebagai “petinju”, dia belum bisa disimpulkan, apakah bertipe *slugger* yang pokoknya meringsek ke depan, bertipe *boxer* yang pandai ambil jarak dan bermain taktis, atautkah semacam *counter-fighter* dengan teknik pukul dan strategi bertanding yang kelihatannya bersahaja, tetapi selalu saja mendapat poin.

Di seberang itu, romantisme kita tetaplah rasional. Yakni, bahwa kalau Habibie saja belum tentu “sekadar orang lugu”, maka apalagi rekan-rekannya di Petisi 50 yang kita ketahui sangat punya tingkat kematangan nilai dalam memilih garis politik.

Maka, romantisme kita membuat kita optimistis, bahwa kemesraan antara Habibie dan Bang Ali pastilah memuat sesuatu yang tidak bersahaja.

Akan tetapi sebaliknya, kalau kita adalah manusia Indonesia yang sudah terlampaui capek memimpikan harapan-harapan akan perubahan mendasar di Indonesia, maka kemesraan dua penghuni kutub politik Indonesia itu adalah sebuah kecengengan.

Kita mungkin menilai, bahwa Bang Ali dan rombongannya tidak membawa persiapan yang cukup dalam melakukan persentuhan itu.

Dari sudut politik praktis, hal itu sangat tampak kompromistik, di samping sangat terasa menusuk sebagai sebuah kekalahan yang memalukan. Dari sudut psikologi politik, Petisi 50 terlalu gampang tercairkan oleh sentimentalitas kemanusiaan dan kulturalisme kemanusiaan dan kulturalisme sosial. Sementara, tatkala mengunjungi IPTN Bandung, tampak bahwa para oposan itu tidak menggenggam “ilmu” yang cukup dalam mengantisipasi apa “makhluk IPTN” dan seluruh politik perekonomian *hi-tech* itu sesungguhnya. Mereka tidak siap dengan kerangka persepsi untuk mengkritik, sementara terlalu lunak untuk begitu gampang menyodorkan pujian.

Dan ketika kemudian Bang Ali menangisi nasib Pak Nasution, bangunan idealisme kerakyatan yang seolah-olah sedang diperjuangkan itu sesungguhnya mencair dan ambruk perlahan-lahan secara substansial, oleh permisivisme kemanusiaan terhadap hakikat permasalahan yang sesungguhnya lebih mendasar. Bang Ali pasti bermaksud tulus, tetapi muatan pikiran dan nuraninya yang terungkap dalam sambutan spontan di Bandung itu tidak mengandung skala perjuangan kerakyatan yang sebenarnya. Beliau menangisi Pak Nas sedemikian perih rasa hati, sehingga tak teringat nasib yang jauh lebih malang dari jutaan orang lain oleh struktur pemiskinan ekonomi dan pembodohan intelektual.

Bisa dijamin, bahwa Petisi 50 bukan tidak bermaksud merencanakan perjuangan yang lebih luas dan lebih mendasar. Tetapi, kelemahan kekuatan pejuang sosial di negeri kita adalah, terlalu bermuaranya etos perjuangan itu pada lingkaran kepentingan subjektif golongan, jaringan, atau pribadinya sendiri.

Rabu malam yang lalu, di sebuah restoran hotel bintang lima di Jakarta, seorang anggota Petisi 50 dari kalangan “muda” yang selama ini dikenal sebagai *playmaker* dari sejumlah kiprah kelompok tersebut, mengeluh tentang hampir semua gerakan sosial politik kontemporer, sekaligus merupakan keluhan atas dirinya sendiri.

“Saya kira, kesimpulan kita dari tahun ke tahun akan sama saja tentang gerakan *counter* politik apa pun yang dicoba dilangsungkan,” katanya. “Yakin, masih sangat jauh bagi bangsa ini untuk mengharapkan akan terjadinya perubahan mendasar yang sungguh-sungguh. Kami-kami ini, para pejuang, sangat matang kepatuhan pikiran dan pilihan politis kami. Namun, hal itu tidak diwadahi oleh peran sosial ekonomi dan sosial budaya yang tepat. Para pejuang yang diharapkan oleh rakyat banyak ini adalah orang-orang yang juga menikmati kesejahteraan dalam sistem yang selama ini berlangsung. Para pejuang memiliki ketergantungan yang sama sekali tidak kecil terhadap *establishment* dari tatanan yang berlaku sekarang. Bahkan, sebagian dari kami sekarang menjadi kaya, karena punya saham di berbagai perusahaan yang dulu didukungnya tatkala duduk di pemerintahan.”

Akan tetapi, saya sendiri tidak akan ikut menangis. Sudah sejak dahulu tangis politik, tangis sistemik, dan tangis struktural, telah saya manifestasikan menjadi semangat hidup dan etos kerja yang berlipat-lipat. Di negeri ini, manusia harus mampu belajar menangis dengan cara bergembira.

Namun saya berpikir, mestinya Bang Ali jangan berhenti hanya pada tangis untuk Pak Nas. Karena, terbukti, jika permasalahan hak asasi dan demokrasi dilokalisasi pada kasus Pak Nas; sangat gampang mengantisipasinya. Kita tahu, psikologisme dan kulturalisme manusia atau masyarakat Jawa-Melayu didayagunakan secara sangat taktis. Hanya dengan Pak Nas dan Pak Dharsono dijenguk di rumah sakit, persoalan seolah sudah selesai.

Politik adalah *multi-fight*, sebuah gerakan pembelaan terhadap nasib malang berpuluh-puluh juta orang, tidak bisa dibekali hanya dengan satu dua jurus sporadis, yang parsial pula efektivitasnya.[]

Habibie

Bagaimana mungkin kita bisa sungguh-sungguh mengenal manusia kalau sesudah kawin dan hidup bersama dengan istri lebih dari dua puluh tahun, pada suatu malam sambil memandangi tubuh tergolek dan mata terpejam sang istri—kita bergumam: “Istriku, selalu saja ada yang tak bisa kuduga dari dirimu Selalu saja ada yang baru dan tak kukenal dari jiwamu”

Terkadang atau bahkan sering kali, tiba-tiba kita merasa asing terhadap istri kita sendiri, terhadap anggota-anggota keluarga kita sendiri, terhadap sahabat-sahabat kita sendiri, bahkan mungkin terhadap diri kita sendiri.

Bagaimana mungkin kita akan bisa sungguh-sungguh mengenal manusia, kalau terhadap diri sendiri kita acap kali asing dan salah duga. Bagaimana mungkin kita benar-benar mengenal manusia, padahal kewajiban hidup ini menuntut kita untuk tak sekadar mengenalnya, tetapi juga menilainya, menghargainya, menghormatinya, dan semua itu pulalah yang memungkinkan pergaulan antarmanusia di bidang apa pun menjadi enak, indah, dan membahagiakan.

Namun, alangkah senantiasa jauh kita dari kemesraan semacam itu, tatkala tahu bahwa segala ilmu dan metode, dari *katuranggan* sampai psikologi modern, dari astrologi sampai kerangka-kerangka

terbaru pengetahuan untuk mencandra manusia—tak pernah sungguh-sungguh memisahkan kita dari keasingan.

Kita asing terhadap tetangga-tetangga, handai tolan, dan sanak famili yang tempatnya berdekatan dengan rumah kita. Apalagi terhadap orang-orang jauh yang kita kenal hanya lewat jalur-jalur komunikasi, lewat media massa atau pendengaran dari jauh.

Apalagi kita tidak punya cukup tradisi untuk memelihara rasionalitas dan objektivitas. Kita terbiasa mengenal orang lain tidak sebagai diri orang lain itu sungguh-sungguh, melainkan sebagai seseorang yang kita patungkan di otak kita berdasarkan asumsi-asumsi dan kecurigaan, pergeseran atau perkecilan, yang kita selenggarakan untuk menindas realitasnya.

Tahukah kau siapa sesungguhnya Conny Constantia, Emil Salim, Susi Susanti? Rudini? Dicky Iskandardinata? Dorce? Sudomo? Benyamin? Try Sutrisno? Gorbachev? Komar? Saddam? Velayati? Ateng? Ishak? Dan Gubernur Ismail?

Saya lihat berpuluh-puluh juta orang, termasuk saya, sangat menggunakan banyak ketidaktahuan untuk “mengetahui” B.J. Habibie yang *mripat-nya plotat-plotot* kalau berbicara itu. Saya bahkan pernah mengutip Dr. Riswandha Imawan untuk menyebutnya Raden Gatotkaca, sebelum akhirnya saya tahu bahwa sesungguhnya dia pernah dan tetap memiliki potensi Ontoseno yang tidak kecil—dan faktor itulah sesungguhnya yang membawanya melewati suatu proses untuk menjadi seperti yang dilihat orang sekarang ini.

Sampai hari ini, Habibie adalah manusia yang hanya bisa mengatakan bahwa empat kali empat itu enam belas. Tak bisa disebutnya tujuh belas atau apalagi tujuh puluh sembilan. Dia tidak bisa bicara “*kromo inggil*”, dalam arti dia tidak punya artikulasi budaya untuk membungkus-bungkus realitas untuk pada akhirnya memanipulasikannya. Dia adalah manusia ilmuwan yang hanya punya bahasa ilmu, yakni bahasa kebenaran yang tidak bisa direduksi oleh pertimbangan politis atau kultural apa pun.

Sejak dia menjadi mahasiswa di Achen, Jerbar, dia beberapa kali memimpin organisasi mahasiswa dengan etos ilmu. Dia menolak menandatangani kebulatan tekad untuk *sendika* kepada Bung Karno. Ideologi politiknya adalah pembangunan, bukan politik itu sendiri. Oleh karena itu, dia sering disebut “polos politik”.

Akan tetapi, kepribadian “ngokonya” itulah yang dia bawa untuk melakukan tawar-menawar program-program karya autentiknya dulu kepada para penguasa negeri ini. Dan itu pulalah yang membuatnya jadi aset amat penting sejarah negeri ini: dia sebagai manusia teknologi yang unggul, dia sebagai emas pembangunan, dia sebagai pemuka dari kumpulan pujangga Islam modern.

Sampai hari ini, dia tetap berdiri dengan etos ilmu: lima ditambah lima itu sepuluh! Cendekiawan tak boleh buta huruf terhadap kenyataan sosial!

Namun, hari ini dia memasuki tahap baru: belajar meladeni pisau tajam politik, yang amat berbeda dengan kejernihan telaga ilmu.[]

Kiai Sahal, “Ahlan Wa Sahlan”

Meskipun saya bukan orang Kedung Ombo, tetapi sebagai sesama rakyat Indonesia dan sesama orang kecil, wajib saya ucapkan *ahlan wa sahlân fi* Kedung Ombo. Betapa bahagia setiap anak yatim yang diuluri tangan hangat bapak-bapak angkatnya. *Fastabiqul khairât* (berlomba dalam kebajikan) dan MUI Jateng—dengan Kiai Sahal Mahfudh sebagai pendekar utamanya—telah berancang-ancang untuk berdakwah *bil hal*. Maka, kita semua *ngaturaken ahlân wa sahlân*. Kita semua berdoa ‘*asâ an yakûna* Kedung Ombo *ma’akum sahlân!* Semoga segala komplikasi benang ruwet konflik Kedung Ombo, dengan kehadiran Kiai Sahal, menjadi *sahl*, menjadi mudah.

Telah kita pandangi dengan penuh hikmat foto Kiai bersalaman dengan bapak gubernur dengan punggung agak membungkuk di koran-koran. Senyum lebar Kiai memancarkan aroma surgawi. Alangkah rukunnya para bapak penyantun rakyat.

Dan nuansa santun itu pasti akan menjadi sempurna apabila koran esok atau lusa kami tatap juga foto Kiai tersenyum bersalaman membungkuk dengan para penduduk Kedung Ombo, baik yang telah tinggal di permukiman baru maupun yang masih bertahan di tanah-tanah penuh ancaman nasib. Kita yakin foto itu akan terpampang di koran entah kapan, karena para *zu’amâ’* dan ‘*ulama’* memiliki persediaan

senyum dan *kesarehan* serta keadilan sepuluh kali lipat dibanding yang dimiliki kaum *umarâ'* yang waktu, tenaga, pikiran, hatinya habis oleh gegap gempita pembangunan.

Na'am. Ustadz. Sebab, manusia itu lemah dan pencemburu. Kalau Kiai ingin berbuat sesuatu di tengah situasi *mangkel* antara saya dan istri saya, mohon janganlah tampak bermesraan dengan istri saya itu. Tolonglah jaga “bloking dan akting teater” Kiai di titik tengah, agar saya terdorong untuk memelihara kepercayaan saya kepada iktikad adil Kiai, serta agar hati saya yang lemah tak terperosok bersangka buruk bahwa Kiai adalah “agen” istri saya, adalah tangan panjang istri saya untuk menguasai saya.

Percaya

Karena itu, mohon bertanyalah kepada hati saya, Kiai. Apakah dengan cara *entrance* Kiai dan MUI Jateng yang seperti itu hati saya masih percaya kepada Kiai. *Among rosolah*, Kiai, dalam *usreg* cinta saya dengan istri saya ini tidaklah mutlak bahwa saya pasti benar. Saya manusia biasa, bisa sakit, bisa mangkel dan tidak objektif, justru karena itu hadirilah *bil hikmah wal mau'izhatil hasanah*. Jangan bakar panas api cemburu hati saya.

Kecuali, saya bukan pihak yang Kiai masukkan ke dalam *frame* rancangan keterlibatan Kiai. Kecuali, Kiai memang tidak bermaksud mengurus bagian yang itu dari peta penduduk Kedung Ombo. Peta sawah persoalan di Kedung Ombo itu penuh *galengan-galengan*, baik dalam arti geografis, yuridis, psikologis, maupun politis. Di titik mana-kah, Kiai, proyeksi *ummatan wasathan* yang Kiai maksudkan?

Sepanjang pengetahuan saya, komplikasi peta itulah yang melahirkan konsensus antara ICMI dan sejumlah menteri untuk *keep silent*. Sepanjang pengetahuan saya, formula *problem solving*-nya harus sedemikian arif dan *ora ngasorake* siapa pun, bahkan kalau perlu memah-lawankan semua pihak. Dalam istilah para Kiai, mungkin itu disebut “manajemen Muhammad”, yakni perkawinan arif bijak antara keras

frontalnya kebenaran Musa dan lembut lunglai cinta kasih Isa. Dengan metode Musa akan meledak, dengan metode Isa akan bertele-tele dan *nranyak* oleh pemanjaan.

Jadi, lewat manajemen Muhammad-lah dicari determinasi yang efektif, tetapi harus dihindarkan kekeruhan pada setiap sisi. Itulah sebabnya orang semacam saya sebaiknya tidak menyertai Pak Soetjipto Wirosardjono menghadap Pak Lurah Jateng, karena perilaku punakawan *ndesit* yang kurang paham tata krama bisa memotensikan kekeruhan psikologis.

Cendekiawan

Hanya satu sisi itu yang bisa dan terpaksa saya ungkapkan, sekadar untuk memahami betapa besar sebenarnya yang bisa dilakukan oleh MUI Jateng dan Kiai dalam masalah ini. Kiai tak perlu jadi *maling cluring* mengendarai angin untuk masuk Kedung Ombo, karena Pak Lurah langsung mempersilakan. Cendekiawan dan ulama itu menurut kamus tak ada bedanya, tetapi dalam hal ini cendekiawan lebih tinggi derajatnya dibanding ulama. Sebab, cendekiawan sebaiknya tidak *blusukan* atau *dlasap-dlusup* sambil terancam dipagut ular, sementara ulama ternyata berderajat “tenaga kasar” yang langsung direkomendasi untuk *blusak-blusuk* setidaknya karena ular-ular bersahabat dengan mereka.

However, keputusan Kiai dan MUI Jateng masuk Kedung Ombo adalah indikator kesekian, bahwa memang masih terdapat persoalan serius di daerah misterius yang ditimpa *martial law* itu. Kecuali bagi *maling cluring*, lebih gampang masuk Eskimo atau Rusia dibanding cari visa masuk Kedung Ombo. Itu pun, di wilayah tertentu, diperlukan dua visa yang paradoksal efektivitasnya. Kalau dapat visa dari Pak Lurah dan diiringi sebagai “tamunegara” dari hati dan kepercayaan-nya. Sementara kalau mendapat visa jenis kedua ini, berarti masuk daftar cekal. Apakah masuk surga lebih susah dibanding masuk Kedung Ombo, Kiai? Padahal, *you’re welcome to do so*.

Jadi, *monggo, ashlihû baina humâ bil'adli wa aqsithu*. Damaikanlah keduanya dan berlakulah adil. Kedung Ombo itu, demi Allah, ibarat rujak cingur yang punya muatan *piningit* lombok yang bukan main pedasnya, sehingga ketika *historical deadline*-nya nanti tiba: bisa mele-dakkan perut. Itu rujak merupakan ramuan campur aduk petis hitam kesengsaraan berkepanjangan dengan congor cingur *power approach*, dengan lombok gengsi harga diri kemarahan, dengan lontong *lingsem*, kangkung sakit jiwa, kecambah patologi; semuanya berdialektika dari tahun ke tahun dan berakibat saling membengkakkan masing-masing unsur.

Semuanya saudara kita sebangsa dan setanah air secinta kasih. Demi Allah diperlukan suatu forum pleno semua pihak disaksikan pers agar titik tertinggi dari kemungkinan keadilan dan kearifan bisa dicapai. *Do you take a violence for granted*, Kiai?

Kalau membatasi diri hanya mengurus potensi Golput di Kedung Ombo, apalagi dengan bahasa *umarâ'* "rekayasa pihak ketiga" *kok ora sumbut*, Kiai! Lagi pula kayak nggak tahu alam psikologi politik Indone-sia saja. Golput hanya asap, yang lokal dan fragmentaris. Lha, apinya itu yang global struktural. Hanya tukang *sebul* asap sajakah MUI Ja-teng? Dan lagi Pemilu itu bebas, demi demokrasi.

Demi Allah saya cukup kenal Kiai Sahal, dan saya berdoa semoga tak menjadi tak kenal Kiai Sahal.

‘Afwan, Ustadz, wa hattal liqâ’. [.]

Melempari Bumi, Memantul ke Langit

Ketika Abdurrahman Wahid mengumumkan lahirnya “Forum Demokrasi”, serta-merta saya teringat kisah Prof. Dr. Umar Kayam dengan sepeda kesayangannya.

Pada suatu hari sebuah koran lokal di Yogya memuat foto Umar Kayam sedang naik sepeda. Memang gabungan antara Kayam dan sepeda itulah yang *newsable*. Kira-kira sang redaktur hendak menyatakan begini kepada pembacanya: “Bayangkanlah, Umar Kayam, si orang besar itu, dedengkot ilmuwan, mantan dirjen, seniman budayawan yang kondang, sehari-harinya cukup naik sepeda dari rumah ke kantornya” Lantas Kayam yang nakal nyeletuk pula: “Bayangkanlah. Tak punya mobil. Tak punya rumah. Buta proyek, buta tender”

Pagi itu pula mendadak nongol di kantor Kayam seorang dosen rekannya sendiri dan memaki-maki: “*Bajinguk!* Beginilah kalau orang besar. Naik sepeda sesekali saja, itu pun jarak antara rumah dan kantor hanya 200 meter, dimuat besar-besaran di koran. Lha, saya tiap hari pulang balik lima kilometer naik sepeda, terus-menerus dua puluh tahun lebih, tak seorang wartawan pun berminat memotret saya, apalagi memuat besar-besaran di koran!”

Berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kelompok menyelenggarakan forum demokrasi selama ini, tanpa seekor nyamuk pun terbang

karena kaget. Tiba-tiba *the crazy boy* mengumumkan hal yang sama, dan setiap orang di seantero negeri menyangka itu sesuatu yang baru. Koran-koran sibuk, majalah melaporkannya, para menteri ada yang pura-pura kalem, ada yang belingsatan.

Tentulah persoalannya tidak sesederhana itu, tetapi biarlah saya singgung sisi yang sederhana itu dulu.

Gus Dur menendang bola ke tembok-tembok di sekitarnya: bola itu pastilah kembali kepadanya. Kemudian, dia tendang lagi lantas kembali kepadanya lagi. Dia adalah pemain sepak bola dialektika politik yang andal. Dan kesiapan rutin seorang bintang bola adalah memperoleh kartu kuning atau bahkan kartu merah—baik dari wasit, dari pemain kawan, dari yang empunya bola, atau mungkin juga dari penonton.

Belum Gus Dur tendang kembali balikan bola “tak masuk akal pernyataan tentang sektarianisme itu.” Tetapi, bola “bisa terjebak ke politik praktis,” langsung ditendangnya: “Ini cuma arisan, kok.” Ormas baru? “Ini sekadar forum refleksi dan kontemplasi.”

Lho, kalau arisan, jutaan ibu-ibu pakar arisan jadi salah tingkah dong. Arisan, kok jadi laporan utama majalah besar dan menempati baris paling atas koran-koran. Ah, betapa lemahnya bahasa! Betapa terbatasnya kata! Betapa menipu dan menjebakny idiom.

Forum demokrasi. Forum refleksi dan kontemplasi. Lho, beribu-ribu anak muda di kampus-kampus dan kampung-kampung bikin hal yang sama selama ini. Macam-macam pula warisan tema atau komitmen-nya, meskipun muaranya sama, yakni yang disebut rakyat.

Dulu Nahdlatul Ulama kabarnya juga lahir dari embrio yang bersifat kelompok diskusi alias forum refleksi dan kontemplasi pula. Bahkan, beranda setiap rumah kita adalah forum demokrasi.

Namun, marilah tidak *lugu*. Ini adalah pop *singer not the song*. Tak penting apa lagunya, yang pokok siapa penyanyinya. Ini adalah permainan biliar. Jangan perhatikan arah stik, tetapi tunggu dan amati ke lubang mana akhirnya bola masuk.

Isu sektarianisme, kepentingan golongan, terancamnya persatuan nasional, atau soal arisan, refleksi dan kontemplasi: hanyalah lagu, hanyalah arah stik. Ia bukan pantulan nada dan iramanya, ia bukan lubang ke mana bola hendak memasukkan dirinya.

Tentu saja rakyat bingung. Orang awam bingung. Setidaknya karena jatah rakyat dan orang bawah adalah memang untuk bingung. Tema pokok sejarah adalah pemerintah untuk rakyat, partai untuk rakyat, parlemen untuk rakyat, lembaga swadaya untuk rakyat, dakwah untuk rakyat, kiai untuk rakyat, pastor untuk rakyat, industri untuk rakyat, pembangunan untuk rakyat—sedemikian rupa sehingga rakyat tak kebagian dirinya sendiri.

Namun, yang penting tunggu saja momentum Gus Dur untuk rakyat.

Kiai Haji kita ini, dengan 44 pendengar tepercaya lainnya, sedang membanting mercon ke bumi. Percayalah yang penting adalah pantulannya di langit. Maka, segala kalkulasi politik tentang Forum Demokrasi ini letaknya tidak di bumi, tetapi di langit.

Kita-kita yang berdomisili di bumi, berani taruhan pasti relatif buta huruf langit. Tetapi, minimal kita tahu bahwa kasus-kasus di bumi, umpamanya Kedung Ombo, kalender Tanah untuk Rakyat, Urip Sumohardjo, Buleleng, dan sebagainya—kunci penyelesaiannya semata-mata terletak di langit.

Kita tahu dan kita yakin bahwa Forum Demokrasi, demi demokrasi, akan melacak jejak kunci itu di langit.

Itu sebagian harapan kita. Tetapi, jangan-jangan kita ini sedemikian awamnya sehingga untuk merumuskan harapan saja ternyata keliru.[]

Gus Dur, Pelindung Minoritas

Sepak terjang K.H. Abdurrahman Wahid sejak dulu—baik yang biasa-biasa saja, yang kontroversial, yang radikal, yang *gendheng*, maupun yang membingungkan—sebenarnya terletak dalam suatu *grand theory* yang tidak sukar dipahami.

Pertama, dalam perspektif universal, dia bermaksud menumbuhkan demokrasi setelanjang-telanjangnya.

Kedua, dalam konstelasi keindonesiaan, dia bermaksud menerapkan suatu ideologi nasionalisme yang habis-habisan, yakni dengan menomorsatukan apa pun yang indikatif terhadap primordialisme, atau yang antinasionalisme.

Ketiga, khusus dalam kaitannya dengan Islam, Gus Dur dengan segala risikonya—berkehendak untuk melakukan domestikasi atau pembumian nilai-nilai Islam dalam kerangka dan nuansa kultural yang tak bersedia ditawarkan oleh segala “kegamangan teologis” apa pun.

Semalam kita menyaksikan beliau ini dalam acara “Profil Budayawan” di TVRI, dan tiba di pangkuan kita komposisi—dalam sebuah kepribadian—antara kapasitasnya sebagai seorang manusia, seorang nasionalis, seorang demokrat, seorang budayawan, dan tentu saja juga seorang

pemberani yang selalu gagah melawan arus. Pun jangan lupa, dia adalah seorang *scholar* tradisional sekaligus modern yang memahami segala seluk-beluk ilmu keislaman maupun segala aspek persoalan modern.

Dia memang seorang bintang yang telah tiba pada suatu taraf kekuatan untuk berposisi dipahami. Artinya, Gus Dur sudah sedemikian besarnya sehingga dia tak perlu memahami kegamangan dan kebingungan kita atas perilakunya; melainkan kitalah yang mau tidak mau harus berusaha menambah dan menambah lagi referensi untuk memahaminya.

Tahap-tahap strategi yang Gus Dur tempuh untuk menerapkan tiga dimensi dari teori besarnya di atas, antara lain usahanya bertahun-tahun untuk memberi “jaminan” kepada pemerintah RI bahwa tak akan ada “Negara Islam” yang dicita-citakan oleh umat Islam Indonesia. Puluhan kali dia melakukan manuver yang mengejutkan, bahkan yang sering menyakitkan hati umat Islam. Namun, bahwa sampai saat ini dia tetap *survive* sebagai Ketua PB NU, merupakan cerminan bahwa—sejauh ini—yang dilakukannya itu berhasil.

Ketika kasus *Monitor* meledak, Gus Dur adalah seorang pendekar yang gagah berani melawan arus emosi umat Islam. Bahkan, hal itu diungkit-ungkitnya sampai kini, serta merupakan salah satu sumber lahirnya Forum Demokrasi yang merupakan “mercon bantingan” terbaru yang memekakkan telinga kita.

Dia dengan tanpa tedeng aling-aling melontarkan kecamannya terhadap rekan se-Jombangnya, yakni Dr. Nurcholish Madjid, yang menyetujui, bahkan meminta, SIUPP *Monitor* diberedel. Bagi Gus Dur itu merupakan preseden yang amat membahayakan demokrasi, serta merupakan langkah dekaden umat Islam.

Ornamen tajam yang terakhir dilontarkannya adalah kekhawatiran “mayoritas menindas minoritas”. Seandainya umat Islam cukup punya tingkat kecerdasan tertentu serta cukup memiliki kepekaan dan logika politis tertentu, pernyataan ini sesungguhnya bisa lebih “membakar janggut” dibanding kasus “Assalamu‘alaikum Selamat Pagi”.

Apalagi dalam situasi ketika umat Islam mengalami rasa sakit panjang oleh represi politik nasional—suatu keadaan yang membuat kaum Muslim tak habis-habisnya dihindangi paranoia dan itu tak sedikit pun dipedulikan oleh Gus Dur. Ditambah kenyataan rutin tentang dirongrongnya Islam dan kaum Muslim baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan ada segudang data soal itu oleh kekuatan-kekuatan yang dalam kerangka Gus Dur disebut “minoritas”. Wajar jika banyak pihak dalam umat Islam merasa jengkel, sebab dalam kenyataan seperti itu Gus Dur malah sibuk “pacaran” dan membela pihak-pihak yang oleh orang Islam lain dianggap sebagai ancaman.

Terserah bagaimana Anda semua atau masing-masing mengantisipasi hal ini. Gus Dur memang seorang budayawan, artinya seorang pekerja lapangan kebudayaan—suatu dimensi yang memang merupakan kelemahan umat Islam. Ketika tiga hari yang lalu, Gus Dur melontarkan pandangan lugasnya soal “format-format politik Islam”, tampak pada kita dia memilih bentuk perjuangan kebudayaan untuk segala cita-cita Islamisasi alam semesta—yakni merahmati kehidupan ini seluruhnya.

Kita biarkan dia melakukan pilihannya, sambil menuntutnya untuk membiarkan juga pilihan-pilihan yang lain. Dua puluh tahun lagi, mari kita saksikan mana yang lebih realistis dan relevan terhadap kesejatan cita-cita universal Islam.[]

Gus Dur “Can Do Wrong”

Ketika seorang redaktur media massa meminta saya menulis tentang—lagi-lagi—Gus Dur dan Forum Demokrasi, saya menjawab: Apa tidak basi?

Dikatakan kepada saya, “Apa mungkin Gus Dur bisa basi?”

Lho, maksud saya momentum dari isu Forum Demokrasi ‘kan sudah berlalu.

Dikatakan lagi kepada saya, “Apalagi Forum Demokrasi. Sejak zaman Ajisaka, yakni tahun 0003 Masehi tatkala Jawa kabarnya bermula, Forum Demokrasi sudah langsung menemukan relevansi dan urgensinya. Apalagi menjelang Pemilu 1992. Bukankah kita telah baca bersama perdebatan dalam Forum Demokrasi paling mutakhir antara ‘makalah’ Syaiful Sulun dengan tanggapan Mensesneg dan Pangab. Kemudian, pasti terbuka sesi untuk Pak Sudomo yang terkenal partisipan teraktif dalam forum semacam itu, serta pihak-pihak lain.”

Saya menyambung. Dan biasanya yang menjadi moderator adalah koran-koran dan majalah-majalah. Waktunya ditambah terus, dan selalu dicari-cari apa yang kira-kira menarik hati pengunjung, alias menarik kocek pembaca media massa.

Akan tetapi, memang Gus Dur sedang tak bisa basi. Ibarat makanan yang diawetkan, tetapi pasti bukan ibarat mumi yang tak lekang oleh kurun waktu.

Bahkan Gus Dur, dalam kultur perpolitikan dan kultur dunia ilmu pengetahuan, telah menjadi semacam putra mahkota dengan *kuluk* di kepalanya yang berbunyi *Gus Dur can do no wrong*. Gus Dur tak mungkin berbuat salah. Sebentar lagi *sabdo pendito ratu*.

Kalau di Jombang, dia disebut *Imamul Agagis*. “Agagis” itu jamak dari “Gus”. “Gus” itu semacam gelar kepriyayan santri atau Kiai utama. Jadi, *Imamul Agagis* berarti dedengkotnya para “Gus”.

Sekadar untuk tambahan referensi, orang macam saya, di Jombang memperoleh panggilan “Guk”. Cak Nun. Di antara kaum penggembala kambing atau kerbau, yang lebih tua usianya dipanggil “Guk”. Jadi, saya ini Guk Nun, lantas di keraton nasional memperoleh kenaikan pangkat menjadi Cak Nun, seperti seorang gubernur yang mendapat gelar KRT dari keraton. Tetapi, jangan harap akan ada panggilan Gus Nun, sebab saya tak memenuhi syarat nasab dan hubungan darah.

Apa yang saya maksudkan adalah bahwa sepak terjang dan reputasi si Durahman ini secara empirik telah sukses menggoreskan “stabilo” bagi gelar *Gus*-nya. Secara tradisional, kaum Agagis pun memang hampir-hampir *can do no wrong*.

Namun, ungkapan-ungkapan ini sama sekali bukan gugatan, juga bukan sinisme. Saya berani omong apa saja kepada Gus Dur karena beliau adalah *pentholan*-nya Forum Demokrasi. Itu pertama. Kedua, ini urusan orang Jombang, tempat lahirnya ludruk.

Alconthongu filludruki bebasun. Nyonthong dalam ludruk itu bebas. Asal sanggup mempertanggungjawabkannya dari segala sisi: argumen-tasi ilmiahnya, kebenaran empiriknya, serta status etikanya.

Idiom *can do no wrong* tentu saja berlaku hanya dalam perspektif kultural. Seseorang bisa mencapai suatu “singgasana” tingkat tinggi tertentu di mana segala ucapan dan perilakunya akan cenderung—pada

akhirnya—dibenarkan oleh sistem berpikir yang berlaku di lingkungannya.

Pasti istilah lain: ia menjadi mitos.

Dalam dunia kesenian, karena Chairil Anwar sudah menjadi mitos, maka setiap kata-katanya adalah kebenaran, setiap ungkapannya adalah keindahan, setiap kekeliruan yang mungkin ada akan dicari-carikan pembenarannya.

Orang gila, pada dunia kaum pencari ramalan *nomer*, punya kedudukan mitis. Apa saja yang diucapkan dan dilakukan oleh si gila akan diinterpretasikan menjadi petunjuk *nomer*.

Demikian juga golongan manusia-manusia mitos lainnya. Kalau raja tidur ngorok, maka irama ngoroknya diterjemahkan menjadi irama pembangunan.

Kalau Gus Dur omong soal “sektarianisme”, pertama ada sejumlah tokoh lain membantah, tetapi lama-kelamaan setiap orang terkondisikan untuk percaya.

Akhirnya, Gus Dur menjadi induk dari suatu “sekte” baru. Sikap antisektarianisme Gus Dur bisa menjadi sekte tersendiri yang bisa justru lebih membahayakan dari segala ancaman yang Gus Dur menyebutkannya sebagai bahaya-bahaya nasional.

Tak lagi penting bahwa ungkapan Gus Dur itu paradoksal dengan hakikat Forum Demokrasi bikinannya itu sendiri. Tak penting bahwa justru seribu kepala, seribu pendapat, seribu pilihan, seribu perilaku, adalah justru tanda utama demokrasi.

Juga tak lagi dianggap penting bahwa dalam realitas kebudayaan politik kita yang namanya Demokrasi Pancasila, terlebih-lebih lagi aplikasi birokrasinya, adalah sungguh-sungguh sekte segala sekte yang tertajam yang ada di negeri ini.

Demi Allah, kalau saya ditanya apa yang dalam soal ini sangat penting dan mendesak untuk kita lakukan dan Gus Dur sendiri lakukan, maka jawaban saya ialah upaya dalam masing-masing diri setiap orang

untuk melakukan demitologisasi Gus Dur. Upaya untuk melihat sewajarnya bahwa Gus Dur adalah manusia biasa sebagaimana manusia biasa yang berbincang dengan kita-kita manusia biasa di gardu dan warung-warung biasa.

Setidak-tidaknya agar Gus Dur tidak diam-diam diproses oleh kelemahan-kelemahan kultural kita menjadi manusia anti-Forum Demokrasi. Setidak-tidaknya agar kita mafhum dan Gus Dur mafhum bahwa kalau kita tak setuju pada pikiran Gus Dur lantas serta-merta kita menjadi seorang sektarianis.

Gus Dur itu, ya *can do wrong* juga, kok.[]

Rapat Akbar dan Shalawat Badar

Banyak orang dan banyak pihak riuh rendah mempergunjingkan Rapat Akbar Harlah NU ke-68 yang akan berlangsung 1 Maret mendatang di lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta. Mereka bertemu di satu titik simpul: bahwa Gus Dur hendak melakukan *show of force*. Unjuk kekuatan. Hmmm ... apa kata Anda?

Secara politis dan kultural—serta tak hanya dalam konteks NU—eksistensi Gus Dur sampai hari ini telah terbukti tak bergeming oleh berbagai gelombang badai macam apa pun; meskipun dia memang belum membawa dirinya ke wilayah-wilayah yang paling mengguncangkan di tengah “lautan Indonesia” kontemporer. Tidakkah itu dengan sendirinya sudah merupakan *performance of his force*?

Bahwa dia adalah cucu Kiai Hasyim Asy’ari, merupakan kartu *jumengnan* kultural dan akar eksistensi yang belum tergoyahkan. Kelengkapan ilmu “kitab kuning” dan wawasan modernnya mengukuhkan pohon kedudukan sosialnya. “Daya sihir” dahsyatnya terhadap media massa adalah dedaunan dan kembang yang memaksa puluhan juta orang selalu menatapnya. Dan, pasti, “kenakalan”-nya adalah suatu jenis “aransemen musik” yang menawan.

So untuk apa pula *show of force*? Sejumlah peristiwa “tarik tambang” Gus Dur melawan Kiai As’ad, Kiai Ali Yafie, dan kasus YDBKS adalah pertunjukan kekuatan-kekuatan yang sejelas-jelasnya.

Kalau fokus kita hanyalah Gus Dur, maka dia memenuhi gambaran *ashluha tsabit, wa far’uha fis-sama’* (akarnya menghunjam ke bumi dan daun-daunnya merambah langit), meskipun orang masih bertanya-tanya apakah dia adalah sungguh-sungguh suatu jenis *syajarah thayyibah*, pohon yang baik—seperti Al-Quran memetamorforakannya.

Namun pusat perhatian kita, kalau berbicara tentang rapat akbar, bukanlah Gus Dur. Kita hidup hanya sekali dan sangat sebentar, dan karena itu tak akan kita pakai untuk “menyembah Gus Dur”. Bahkan, Gus Dur sendiri pun *insya Allah* tidak menyembah dirinya sendiri. Rapat akbar itu bukan dia selenggarakan sebagai instrumen bagi karier pribadinya dalam politik dan keumatan.

Pemilu telah menjelang, Gus Dur mendekatkan kita semua ke tanah genting. Yakni, pertemuan antara dua arus air samudra di mana ikan bekal perjalanan Nabi Musa yang dibawa oleh Dzun Nun mendadak hidup kembali dan melompat ke laut. Mungkin karena itu, rapat akbar itu akan ditutup dengan *shalawat badar*. Jadi jelas, itu bukan acara haflah atau kenduri yang romantik.

Kalau dua arus listrik yang berlawanan itu bersentuhan, mungkin akan terjadi kebakaran, tetapi mungkin juga akan menerbitkan cahaya. Asalkan bohlamnya disediakan dengan saksama.

Rapat akbar NU itu bukan hanya akan menginformasikan bahwa “NU” bukan singkatan dari *Nunut Urip*. Tetapi, juga untuk momentum ikrar: “Mendukung konstitusi Negara Pancasila dan UUD ’45”.

Lho, kok tiba-tiba ada ikrar macam itu? Di Amerika Serikat tak pernah ada unjuk rasa atau apel akbar mendukung demokrasi atau hak asasi manusia, karena dua hal itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Para ulama juga tidak pernah mengajak kita shalat *istisqa’*

di tengah hujan deras. Sembahyang minta hujan hanya diselenggarakan pada musim kemarau yang membakar.

Maka, kalau rapat akbar ini melakukan “*istisqa’* konstitusi”, tentu ia berangkat dari penglihatan bahwa konstitusi, Pancasila dan UUD ’45, sejauh ini relatif masih berposisi sebagai hujan yang dimintakan untuk turun mengguyur bumi. Dan kalau “*istisqa’* konstitusi” itu digemakan dalam konteks menyongsong pemilu, semua orang tentu memahami “hujan” apa yang dimaksud. Mudah-mudahan tak sia-sia yang miliaran rupiah itu digunakan untuk membangunkan kesadaran, agar kita melaksanakan pemilu mendatang dengan sungguh-sungguh memedomani konstitusi.

Mungkin kita termasuk orang yang “tak paham Gus Dur”. Bahkan, mungkin “jengkel” dan “curiga”. Tetapi, saya bisa katakan bahwa segala sesuatu yang tak kita pahami itu sebenarnya hanyalah “bungkus” dari sejumlah *sirr* (misteri) yang kini coba dikuakkannya.

Meskipun demikian, anggap saja ini bagian dari pertandingan final Divisi Utama PSSI.[]

Islam Pasca-NU-Muhammadiyah

Kiai Sudrun tidak merasa *sreg* dengan istilah yang dilontarkan oleh salah seorang anggota jamaah tersebut. “Kita jangan main pasca, deh!” katanya.

“Maksud Cak Drun!” dia dikejar. (Terkadang dia memang dipanggil Cak Drun. Ada juga yang seenaknya memanggil Oom Su atau Kiai Nyudrun—mungkin karena orang merasa karib. Tetapi, tak seorang pun memanggilnya Gus Drun, karena dia memang tak ada *nasab* “priayi religius”).

“Begini, lho,” jawab Sudrun, “dengan istilah Anda itu, seakan-akan kita memasasilamkan NU dan Muhammadiyah. Memang ada bagian tertentu dari diri NU-Muhammadiyah yang masuk museum masa silam, tetapi NU-Muhammadiyah bukanlah benda mati. Mereka adalah ‘kata kerja sejarah’ yang bisa mengatasi waktu. Sampai kelak kita akan terus menyongsong *the up coming* NU-Muhammadiyah.”

“Tetapi, konteks pembicaraan kita ini sungguh-sungguh memang merupakan gejala pasca-NU-Muhammadiyah!” bantah si Hadir.

“Tak saya sangkal hal itu,” kata Sudrun, “memang indikator-indikator yang kita sebut kebangkitan Islam pada dasawarsa terakhir ini ditumbuhkan kebanyakan oleh inisiatif-inisiatif non-NU-Muhammadiyah. Terdapat aktivitas dan dinamika baru di kalangan masyarakat

Islam yang ‘kompor pendidih airnya’ atau ‘air penyiram’ benihnya relatif bukan NU-Muhammadiyah. Ia bersemi secara otonom dan liar —dalam arti tidak merupakan munculan dari strategi organisasional NU maupun Muhammadiyah. Aktivitas dan dinamika itu sering juga muncul dari komunitas-komunitas di naungan NU-Muhammadiyah, tetapi potensial dan watak gerakannya tidak bersumber dari *ghirrah* NU-Muhammadiyah”

“Jadi, kenapa kita ragu-ragu menyebutnya non-NU-Muhammadiyah atau pasca-NU-Muhammadiyah?” Sudrun dipotong, “kenapa mesti dihalus-haluskan, kenapa sungkan dan eufimistik segala?”

“Persis,” si Hadir yang lain menyambung, “telah makin menyebar sel-sel kebangkitan kaum Muslim, remaja-remaja masjid, kelompok-kelompok studi Islam, lembaga-lembaga swadaya komunitas Muslim, atau model aktivitas dan pola gerakan yang lain. Itu semualah yang sebenarnya menyumburi semacam mobilitas baru di tubuh kaum Muslim dan merupakan tanda-tanda konkret Kebangkitan Islam. Ia muncul baru sebagai semacam gerakan kebudayaan, tapi jelas merupakan infrastruktur bagi kemungkinan gerakan politik baru umat Islam. Mekanisme itu pulalah yang perlahan-lahan menyaring modus-modus baru rekayasa kesejarahan umat Islam, termasuk tipe-tipe baru atau paradigma kepemimpinan baru umat Islam. Dalam itu semua sesungguhnya bukanlah hasil persemaian strategis dari NU maupun Muhammadiyah atau organisasi-organisasi besar Islam lainnya. Kita tinggal menegaskan eksistensinya sebagai semacam jaringan solidaritas Islam baru pasca-NU-Muhammadiyah”

Kiai Sudrun tersenyum, “Itu pun tidak saya sangkal,” katanya, “tapi yang Anda sebut penegasan itu secara psikologis bisa menjadi benih perpecahan baru di kalangan umat Islam. Bagaimana kalau kita sebut saja bahwa dewasa ini telah makin berkembang gerakan Islam independen yang mencoba menggarap lahan-lahan atau segmen-segmen sosial yang selama ini belum disentuh oleh NU dan Muhammadiyah? Dua organisasi raksasa itu belum cukup siap secara sosiologis untuk merangkulkan lengannya ke tubuh satuan-satuan sosial baru masya-

rakat menjelang Tinggal Landas ini: kaum buruh, bagian tertentu dari kaum urban, atau satuan-satuan ‘modernitas’ lain yang meletakkan manusia dan masyarakat ke dalam semacam kotak-kotak baru yang asing”

“Cak Drun, kok *njawani* amat!” mereka protes.[]

NU dan Adu Jangkrik

Mengapa “pertengkaran” selalu menarik perhatian? Sehingga Munas NU di Bandarlampung pun baru terasa geregetnya sesudah kasus Kiai Ali Yafie mencuat? Setidaknya ada tiga alasan:

Pertama, alasan psikologis, yaitu yang berkaitan dengan naluri kekanak-kanakan. Manusia terus menggendong naluri kekanak-kanakannya sampai dia dewasa dan tua. Komunitas kemanusiaan di mana pun di muka bumi ini juga memuat naluri itu sampai kekal. Masyarakat adalah “orangtua” abadi, tetapi juga “kanak-kanak” abadi.

Jadi, ramainya setiap pertengkaran nasional itu manusiawi dan universal. “Pertengkaran” bahkan kita lembagakan, kita institusionalisasikan dan kita budayakan—justru sebagai salah satu manifestasi dari hakikat dialektika kehidupan manusia.

Cobalah lihat dunia olahraga. Tinjau, industri perkelahian dengan omzet amat tinggi itu. Sepak bola, 22 orang berebut memasukkan sebuah bola ke suatu lubang ... bukankah kanak-kanak? Dan, toh kita biayai dengan miliaran dolar nasionalisme, doa kepada Tuhan, tepuk tangan yang memenuhi angkasa, bahkan juga dengan perang dan pembunuhan.

Kita ini semua, kanak-kanak sampai mati.

Kedua, alasan kultural. Pertengkaran itu sama menariknya dengan seks atau pornografi, judi, pesta disko hingga *tayub*, uang dan hiasan-hiasan hidup lainnya.

Kita orang Jawa Timur punya nilai ludruk yang ahli di bidang menikmati pertengkaran. *Tukaran* atau *celathu-celathuan* jaraknya sangat tipis dengan tertawa dan kenikmatan. Budaya mainan anak-anak, di atas 75 persen berpola pertengkaran, pertandingan, atau setidaknya perlombaan. Yang tradisional maupun yang modern. Hidup tanpa pertengkaran ibarat makan tanpa sambal.

Culture of poverty, budaya kemiskinan, juga memberi andil yang khas dalam soal ini. Dua pengemis suami-istri bertengkar. Si suami memaki: “Dasar pengemis!” dan sang istri menjawab: “Kamu juga *mbambung!*” Tetapi, beberapa saat kemudian mereka bermesraan kembali. Bagi orang-orang miskin, pertengkaran adalah kosmetika hidup. Beda dengan orang modern kelas menengah atas, pertengkaran membuat mereka *sutris*.

Dan *ketiga*, alasan industrial. Pertengkaran adalah barang jualan industrial kelas paling mahal. *High demand*. Pertarungan di ring tinju, di macam-macam lapangan, juga di ring politik, gosip yang mengadu dua pihak—adalah pengisi utama etalase industri informasi.

Maka, walaupun Munas NU di Lampung ribut bicara soal keterbelakangan umat Islam, soal kemiskinan, keadilan, dan demokrasi; tidaklah terlalu menarik hati para wartawan yang meliputnya. Apalagi ulama-ulama itu sekadar kumpul di masjid dan shalat bareng—itu sama sekali bukan berita. Maka, kalau kasus Kiai Ali Yafie tak nongol, *sepo* (hambar) dan *kecut*-lah koran-koran.

Secara psikologis, secara kultural, dan sebagai konsumen industri informasi, kita semua senantiasa menunggu-nunggu Mike Tyson dan Evander Holyfield. Terserah, apakah kedua petinju itu *manjing* atau merasuk ke tubuh Gus Dur, Kiai Ali Yafie, OPP, janda Haji Taher, Dili, atau siapa dan apa pun.

Maka, yang penting pada Mukhtamar Muhammadiyah dulu adalah duel antara Lukman Harun dan Jasman. Yang *headline* pada berdirinya ICMI dulu adalah penolakan Gus Dur. Yang *slit* dari Mukhtamar NU di Yogya dulu adalah pernyataan *mufarraqa*h Kiai Ali As'ad. Dan yang *ngetop* dari Bandarlampung kali ini adalah bagaimana hasil ronde berikutnya, apakah *swing* Kiai Ali Yafie bisa dihindarkan oleh Gus Dur dan dibalas dengan *upper cut*. Juga berbagai jenis adu jangkrik lainnya dalam peristiwa-peristiwa nasional yang bermacam-macam.

Sebenarnya itu semua 'kan urusan rumah tangga suprastruktural kelompok-kelompok itu, yang tak perlu kita urusi. Kita tak peduli Kiai Ali Yafie maju atau mundur, Gus Dur kelak terpilih lagi atau tidak. Juga tak terlalu penting siapa ketua Syuriah, Ketua Tanfidziyah atau Ketua Ketopraknya. Yang relevan bagi kita adalah apa yang NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya itu perbuat untuk hidup konkret kita di negeri ini. Baik yang menyangkut usus, perut, kaki, keringat, maupun jantung, hati, otak, dan iman.

Akan tetapi anehnya, memang hanya pertengkaran-pertengkaran intern rumah tangga itu satu-satunya yang dianggap penting. NU, dengan atau tanpa Ali Yafie apa bedanya. NU, dengan atau tanpa Gus Dur, *sami mawon*. Yang *menyun* 'kan Gus Dur-nya, bukan NU. Muhammadiyah, NU, atau kelompok-kelompok apa pun, dengan ketuanya X, Y, Z, atau siapa pun, *wujuduhu* masih juga *ka'adamihi*—untuk kompleksitas problem-problem kenegaraan dan kemasyarakatan kita yang tidak menurun kedahsyatannya.

Yang punya utang, ya tidak lantas ada yang *mbayari*. Yang kena gusur, ya tetap kena gusur.[]

Debirokratisasi Pendidikan

Salah satu persoalan nasional yang akan (dan sebaiknya direkayasa untuk) menjadi isu nasional adalah masalah pendidikan. Proyek Lepas Landas sesungguhnya adalah suatu *takabbur* sejauh kita meng-insafi seberapa borok iklim kependidikan kita selama ini. Tetapi justru karena itu, maka pelaku-pelaku sejarah yang nonpemerintah jadinya memperoleh bukan saja tantangan. Kita tidak bisa “licin” omong soal Lepas Landas selama dunia pendidikan—yang merupakan *software* infrastrukturnya—masih sedemikian mengalami kejumudan dan stagnasi.

Kebobrokan dunia pendidikan kita terjadi pada beberapa dataran. Umpamanya, dataran filosofis: bahwa kita belum *mendidik*, melainkan baru *mengajar*. Itu pun belum mengajar *berpikir*, melainkan *menghafalkan*, bahkan hingga saat ini kita membiarkan saja kesalahan filosofis dan “ideologis” yang merupakan sumbernya. Atau juga bahwa guru itu *atasan* dan bukan *teman*. Bahwa banyak muatan kurikulum yang tidak relevan terhadap tahap usia anak didik, pola pengajaran yang feodalistik dan otoriter. Bahkan, beberapa ahli menggelisahkan betapa filosofi taman kanak-kanak, juga filosofi *play group*, sudah dirampok oleh “fasisme” birokrasi orang-orang “dewasa”.

Pada dataran *perangkat keras*-nya, dunia pendidikan kita juga mengidap penyakit kanker yang—diakui atau tidak—mengancam kualitas regenerasi bangsa kita. Kalau Anda cukup rajin mengamati dan coba mengalami situasi-situasi kependidikan dari tingkat atas sampai terbawah, dari skala lokal hingga nasional, saya yakin Anda sepakat bahwa dunia pendidikan kita makin tidak terlihat sebagai dunia pendidikan itu sendiri.

Dunia pendidikan sudah menjadi bagian yang “inheren” dari mekanisme politik birokrasi, dan mobilisasi. Bersekolah bukanlah mencari ilmu (sekadar menghafalkan pengetahuan tertentu), bukanlah mengolah kreativitas (bahkan, guru acap kali merupakan agen dekreativitas), serta bukan pula menggali dan mengembangkan kepribadian (bersekolah ialah penyeragaman atau penghapusan unikum manusia).

Pada saat yang sama, dunia pendidikan juga sudah menjadi bagian dari proses-proses wadak industrialisasi. Para pengurus pendidikan, dari pejabat Depdikbud hingga sementara guru-guru, adalah semacam tuan tanah dari lahan pertanian modern yang bernama dunia pendidikan. Dari banyak kasus, tecermin bahwa bagi mereka yang penting bukanlah pertumbuhan anak didik, melainkan posisi birokratis mereka bisa bermanfaat untuk mencari nafkah: perang tender, royokan proyek, jual diktat, dan sebagainya. Atmosfer mental dunia kependidikan tidak berpusat pada dunia pendidikan itu sendiri.

Dalam banyak hal, sesungguhnya kita sedang menabung dosa kepada Tuhan dan anak cucu, padahal belum tentu kita sudah bercucu.

Apa yang bisa dilakukan oleh institusi-institusi sosial, misalnya Muhammadiyah atau NU, dan lain-lain—dalam soal ini—saya kira adalah merintis sungguh-sungguh proses *ishlah* terhadap dunia kependidikan secara menyeluruh, pada semua dataran.

Sejauh yang saya ketahui, sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang dimiliki oleh umat Islam tidak memiliki iklim yang cukup berbeda dibanding persekolahan pada umumnya—kecuali, sementara “sekolah khusus” seperti pesantren yang tanggap terhadap relevansi zaman

dan hari depan. Situasi kependidikan Islam, karena halangan birokrasi dan kultur serta karena lemahnya kekhalifahan umat Islam sendiri di bidang itu—sama memprihatinkannya dengan situasi menyeluruh dunia pendidikan kita.

Semua pihak berkewajiban untuk lebih serius memikirkan hal itu. Di bawah maupun di atas. Dan salah satu alternatif yang mutlak diperlukan adalah upaya pemandirian pendidikan, yang dalam hal tertentu berarti debirokratisasi pendidikan.

Saya kira Anda tahu semua bahwa seorang menteri pun, macam Fuad Hassan, tidak dengan gampang melakukan pembenahan-pembenahan sekecil apa pun, “berkat” jumudnya “mafia birokrasi” di bawahnya.[]

Pendidikan Lokomotif

Entah sampai berapa lama lagi perbincangan mengenai “pemimpin”, “kualitas kepemimpinan”, dan “sekolah calon pemimpin” akan mampu menyelipkan diri di tengah berbagai topik *rerasanan* kita sehari-hari: tragedi Thomas Cup, Sipenmaru, KTT Gorbachev-Reagan, atau KSOB/Porkas serta tema-tema lain yang mendasar yang amat menyangkut nasib kita sehari-hari akhirnya terasa tak lagi “aktual” dan tak lagi “penting” karena kita sudah terbiasa.

Sehubungan dengan soal yang disebut “krisis kepemimpinan” itu ingin saya mengemukakan pendapat secara singkat dan langsung bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia tidak sedang tak punya manusia-manusia yang memiliki kualitas pemimpin.

Klaim “krisis kepemimpinan” masih bisa saya pahami dalam arti bahwa dewasa ini yang memimpin kita pada umumnya bukanlah manusia-manusia yang layak menjadi pemimpin. Ini tidak hanya dalam bidang-bidang politik, organisasi sosial, keagamaan, dan lain-lain. Tetapi, itu tidak identik dengan pengertian bahwa kita sedang tak punya orang-orang yang sesungguhnya mampu memimpin.

Kita harus kembali menata pengertian kita tentang “kriteria pemimpin” yang—notabene—tuntutan kualitatif dan kuantitatifnya tidak sepele. Apalagi kalau kita sedang bercerita tentang cita-cita pemba-

ngunan sejarah kemanusiaan dan bangsa dalam arti yang sebaik-baiknya. Penataan pengertian itu memerlukan *rembug* yang di samping serius, juga harus demokratis dan terbuka.

Akan tetapi secara keseluruhan, apa yang mampu saya saksikan dalam jengkal kesejarahan kita dewasa ini, bukanlah “krisis pemimpin”.

Maksud saya begini. Kalau Anda adalah anggota masyarakat hutan, dan situasi “peradaban” hutan itu didominasi oleh iklim kepemimpinan musang, maka para “ayam putih” bukan saja tidak memiliki “lahan” untuk memimpin: tetapi mereka juga akan cenderung tidak bersedia menjadi pemimpin.

Kepemimpinan musang tak sekadar mengandalkan kekuatan dan kekuasaan: ia juga mengonsentrasikan kekuatan dan kekuasaannya kepada suatu perspektif pengelolaan sejarah yang jauh lebih sempit dan “egoistik” dibanding wilayah yang secara “lugu” sering kita sebut “kepemimpinan bangsa”. Saya sebut “lugu” karena selama ini kita begitu gampang percaya pada jargon “kepentingan nasional berada di atas kepentingan golongan”, yang diucapkan oleh—justru—sebuah “kepentingan golongan”. Ini berlaku pada peta koherensi politik, grup keagamaan, etnik, budaya, maupun kepentingan-kepentingan ekonomi yang memusatkan diri pada sebuah “gumpalan” tertentu.

Di dalam watak patrimonialisme kemasyarakatan dan kenegaraan kita yang makin lama makin dicangguhkan oleh berbagai faktor: konsentrasi kekuatan dan kekuasaan yang tersebut di atas berarti penyerapan hampir seluruh potensi bangsa ini (disubordinasikan, dijilatkan) ke segala “isi kepala” kepemimpinan musang dengan segala mekanismenya. Potensi-potensi kepemimpinan murni yang sesungguhnya justru dibutuhkan oleh bangsa ini malah merupakan pihak yang “memasang filter” untuk menolak penyerapan itu.

Maka, mereka cenderung tak akan pernah tampil ke “permukaan”.

Dengan kata lain, sebenarnya kita sedang hidup dan menghidupi suatu pola kepemimpinan musang, suatu “nurani” kultur kemasyara-

katan yang terlalu dibiasakan oleh hukum-hukum perilaku musang. Suatu cara berpikir dan bahkan model birokrasi musang, yang keseluruhannya hampir tidak memberi kemungkinan bagi bertumbuhnya kepemimpinan dan pemimpin yang lebih “sejati”.

Relativitas dari situasi semacam itu hanya terletak pada munculnya beberapa gelintir pemimpin yang lebih “sejati”. Relativitas dari situasi semacam itu hanya terletak pada munculnya beberapa gelintir pemimpin atau model kepemimpinan yang tampak sedikit mampu memunculkan unsur-unsur kesejatiannya, tetapi itu berlaku sejauh tidak merupakan “klilip” bagi proses penyerapan kepemimpinan aspal yang telah menjadi rumus umum sehari-hari.

Anda dipersilakan mengamati gejala-gejala itu pada berbagai level kehidupan. Kita membaca “sejarah” di belakang hal-hal seperti pemilihan lurah di desa, di belakang susahnyanya proses demokratisasi atau inovasi-inovasi dalam proses organisasi sosial Anda, di belakang hampir mustahilnya sesosok “pemimpin sejati” untuk mampu naik jenjang yang lebih tinggi, dan seterusnya.

Dalam keadaan yang demikian, maka ide “Sekolah Pemimpin” bisa hanya berarti pencanggihan proses patrimonialisasi, pensolidan suatu metode *behavioristic education* di mana putra-putra terbaik Anda akan digodok dalam sebuah bengkel untuk menjadi “lokomotif unggul”—di mana segala onderdil dan kemampuan mobilitasnya sudah akan makin disesuaikan dengan kehendak-kehendak masinis dalam *meng-engineer* arah perjalanan kereta api sejarah.[]

Maniak Profesionalisme dan Teknokratisme

Betapa menakjubkan bahwa dari lingkungan “sistem pendidikan” masyarakat Jahiliyah Makkah lahir manusia agung bernama Muhammad!

Adakah beliau yang tercinta itu pernah digodok di “SLA Bibit Unggul” milik Yayasan Abu Jahal? Adakah kecerdasan beliau, geniusitas beliau, *kesarehan* beliau, kesejatian nurani beliau, kemutiaraan moral beliau, digosok oleh kurikulum Abu Jahal?

Mengapa teman-teman sekolah dasar Soekarno tidak menjadi orang menonjol seperti anak Blitar itu? Mengapa rekan-rekannya di pendidikan menengah tidak menjadi manusia utama seperti si *play boy* itu? Mengapa sahabat-sahabatnya di Fakultas Teknik tidak beramai-ramai menjadi Pemimpin Besar Revolusi?

Mengapa sastrawan besar Boris Pasternak atau Yevtushenko tidak lahir dari negeri merdeka Amerika Serikat? Tetapi juga mengapa Emily Dickinson atau Robert Frost secara cemerlang muncul dari negeri para Yankee itu?

Karena ada relativitas sistem.

Manusia bisa dibunuh oleh “penjara”, tetapi juga bisa dididik menjadi lebih matang dan besar daya hidupnya. Persis sama dengan “alam

bebas” yang sekaligus bisa mematikan kreativitas seseorang juga justru merangsangnya untuk penuh inisiatif hidup.

Itu *sunnatullah*, yang—sesungguhnya—penuh misteri. Dan karena itu, sangat indah. Dan karena itu pula, ia tak bisa kita sikapi secara *nggampangke rembug*.

Sunnatullah atau hukum alam itu berlapis-lapis dan berdimensi-dimensi. Ada yang gamblang di mata dan pengetahuan kita. Ada yang transparan. Ada yang abstrak. Dan ada yang masih gelap sekali bagi kita, bagi pengetahuan manusia.

Jadi, *iqra’*-lah. Dan saya sedang khawatir, atau hampir yakin bahwa lontaran ide *al-mukarram* Benny Moerdani tentang Sekolah Bibit Unggul, itu berasal dari keadaan salah baca, terhadap *sunnatullah*.

Ada tiga jenis manusia.

Yang *pertama* adalah manusia yang memperoleh kehormatan (*karamah*) dari Allah untuk memiliki potensi istimewa, tidak terlalu bergantung pada arus lingkungannya, memiliki kesanggupan untuk “mengatasi gejala”, untuk “transenden” dari hukum sejarah, dari *engineering* sistem-sistem. Manusia macam ini Anda taruh di sekolah SLB atau sekolah bibit unggul, dia tetap unggul. Anda sekolahkan atau tidak, akan tetap unggul—meskipun itu berlaku pada batas-batas tertentu dan memiliki relativitasnya sendiri.

Manusia macam ini, tak usah Anda daftarkan ke sekolah ulama, dia akan tetap menjadi ulama. Tak usah Anda masukkan ke sekolah maling, akan tetap menjadi maling. Tak usah Anda kirim ke Universitas Khusus Tokoh, dia akan menjadi tokoh. Tak usah Anda didik di Laboratorium Korupsi Nasional, karena tetap akan canggih berkorupsi juga.

Yang *kedua*, yakni mayoritas manusia, adalah manusia yang memiliki ketergantungan “normal” terhadap lingkungan pendidikannya, terhadap sejarah dan nilai yang membesarkannya. Kalau sekolah mengajarnya cara-cara menindas, dia akan tumbuh menjadi pakar penindas. Kalau sekolah mendidiknya santun solider, dia akan jadi sahabat bangsa. Kalau sekolah mencetaknya jadi robot atau komputer, dia akan tumbuh jadi robot dan komputer.

Adapun yang *ketiga* ialah manusia yang kelak insya Allah akan cepat memperoleh kasih Allah. Yakni, manusia yang juga tidak bergantung pada sistem yang mendidiknya, tetapi dalam kapasitas sebaliknya. Meskipun dia Anda didik jadi jenderal, dia akan tetap manusia-prajurit juga. Meskipun Anda didik jadi pendekar, dia akan berkapasitas semula terus. Meskipun misalnya dia sudah mengantongi ijazah sarjana (misalnya, saking tidak bonafidennya sistem persekolahan kita), sebenarnya dia tetap “anak SD” juga levelnya.

Sesungguhnya, segala rekayasa kependidikan yang diselenggarakan oleh manusia, masyarakat, dan negara dalam kepercayaan atau ideologi apa pun diperuntukkan bagi golongan manusia kedua. Yaitu, golongan mayoritas, golongan *generous*, golongan rata-rata, umum.

Bahkan, golongan ini pulalah yang menjadi pedoman dan sasaran utama dari segala macam filosofi perjalanan sejarah. Moral lingkungan, kurikulum persekolahan, atau segala macam tuntunan “syariat” kehidupan, distandardisasikan menurut level rata-rata ini.

Adapun golongan *upper* (pertama) dan *under* (ketiga) sebenarnya lebih banyak “diurusi” oleh Tuhan melewati berbagai misteri sunnah-Nya. Karena itu, ada pengetahuan di sekitar kita bahwa—misalnya—“Pemimpin itu tak bisa dicetak, tetapi dilahirkan”. Persis seperti ada juga maling yang sebab-sebab kemalingannya tidak terutama berasal dari dorongan-dorongan lingkungannya, tetapi lebih pada potensi dasarnya.

Terhadap golongan kedua, Anda bisa menyelenggarakan macam-macam. Dalam politik, Anda bisa langsung melakukan mobilisasi, pengembangan massa, atau pengebirian. Dalam kebudayaan, Anda bisa lakukan reduksi kemanusiaan, pembinatangan, pensetanan, atau perobotan. Secara keseluruhan—seperti demikian watak utama sejarah umat manusia abad ke-20 ini—Anda bisa menciptakan sistem-sistem beserta segala perangkat dan fasilitasnya yang memegang manusia-manusia ini seperti memegang kepala pion catur, seperti menggenggam tanah liat untuk Anda jadikan keramik apa pun sesuai dengan selera atau kepentingan politik Anda.

Dengan demikian, jutaan anak-anak yang bersekolah bagi Anda bukanlah manusia-manusia yang akan mengembangkan kemanusiaannya dengan dibantu oleh kurikulum, melainkan alat-alat bagi rekayasa politik dan kesejahteraan yang Anda jalankan. Mereka hanya permadani tempat lewat kaki para tokoh politik. Mereka hanya sekrup dari mesin industrialisasi Yayasan Harapan Anda. Mereka hanya mulut menganga yang Anda jejal makanan sesuka *wudel* Anda. Mereka hanya instrumen dari kepentingan para pemegang kapital masa depan, di mana mereka berduyun-duyun antre di bawah selangkangan para raksasa itu.

Untuk mengefektifkan proses itu, Anda membutuhkan profesionalisasi segala ragam potensi manusia. Kebutuhan profesionalisasi ini sedemikian mutlak sehingga menjadi isme. Kita adalah pejalan “agama” profesionalisme. Dan ketika kita sudah secara gamblang memegang kepala jutaan manusia itu untuk teknokrasi sejarah, maka sisi mata uang lain dari profesionalisme itu adalah teknokratisisme.

Salahkah profesionalisme? Itu tergantung.

“Makhluk” yang bernama profesionalisme itu sebenarnya merupakan racikan dari berbagai unsur, misalnya keterampilan, kepekaan, kreativitas, tanggung jawab, dan lain-lain, yang semuanya amat dituntunkan dalam Islam. Seperti juga etos efektivitas dan efisiensi: jelas sekali konsepnya dalam Islam (hayatilah misalnya kata “mubazir”), meskipun—dalam Islam—hal itu tak berdiri sendiri.

Tak berdiri sendiri? Ya. Sebab, kita *mas’ûl* (bertanggung jawab) tentang: sebagai apa Anda profesional? Dalam rangka apa? Ke mana tujuannya? Apa iman dan akidahnya?

Hal itu langsung menyangkut soal teknokratisisme. Islam amat mengemban eksistensi manusia, amat memelihara kemanusiaan, bahkan menganjurkan peningkatan maknanya: Manusia diwajibkan untuk tidak hanya menjadi *Nâs*, tetapi juga *Mu’min* (beriman), *Muslim* (*sumarah* ke Allah), dan *Muhsin* (luhur, baik). Maka, sudah pasti Islam dengan frontal menolak sistem yang memperlakukan manusia sebagai instrumen dari hal-hal yang lebih rendah dari kemanusiaan: misalnya

industrialisasi, penguasaan politik, dan seterusnya. Islam menolak perobotan, pengomputeran manusia.

Maka, kalau akhir-akhir ini kita makin melihat gejala maniak profesionalisme dan teknokratisme dalam pola akidah yang menafikan iman, Islam, dan ihsan: respons kita ada dua macam. *Pertama*, kita makin prihatin “jenis makanan kedua” makin dirobotkan seperti Tentara SS Hitler. *Kedua*, kita tetap bersyukur karena Allah menyediakan “jenis manusia pertama” yang tetap terlindung dalam sunnah-Nya.[]

Bank Samiun

Kalau ada sesuatu dalam kehidupan ini yang saya hampir sama sekali buta huruf adalah masalah ekonomi.

Mungkin saya sedikit tahu hubungan antara sakit pusing kepala dan keadaan usus di perut atau dengan sejumlah kalimat yang dilontarkan oleh istri tadi malam. Mungkin juga saya alah kadarnya mengerti keterkaitan antara gejala-gejala di jalan raya, di kantor-kantor, di masjid, dan di pasar, dengan metabolisme makro suatu masyarakat yang sakit.

Namun, kalau soal ekonomi, ampun seribu ampun. Setiap istilah ekonomi memerlukan tenaga yang sama dengan yang saya butuhkan untuk merenungkan alam makrifat dan laduni tingkat tinggi. Atau, setidaknya sama dengan energi yang saya keluarkan untuk bermain sepak bola lima jam nonstop.

Pokoknya soal-soal ekonomi, bagaimana uang berputar di muka bumi, bagaimana berdagang, bagaimana menjalankan perusahaan, apalagi bagaimana sistem-sistem besar perekonomian dimekanisasikan, hamba bodoh seabodoh-bodohnya.

Pengetahuan saya hanya satu: kalau menulis di koran, saya menerima honorarium.

Lha, kok hari Sabtu malam 13 April 1991 yang lalu saya harus terlibat dalam diskusi tentang pendirian “Bank Islam” oleh Yayasan Uswatun Hasanah di bawah Majelis Ulama Indonesia.

Pertemuan di rumah usahawan terkenal Setiawan Djody itu berlangsung sejak usai shalat Tarawih hingga hampir tengah malam. Dan saya yakin tak ada hadirin yang tersiksa selama tiga jam lebih itu melebihi saya.

Alangkah pandainya tokoh-tokoh itu. Pak Prodjokusumo, Pak Fadel Muhammad, Pak Sri Edi Swasono, Pak Adi Sasono, dan puluhan tokoh Islam lain.

Kalau ingat bank, saya hanya tahu bahwa kalau saya masuk gedung bank, selalu langsung dicurigai satpam dan polisi yang bertugas. Kalau saya dikasih cek oleh seorang teman, pada umumnya saya gagal menguangkannya, karena ada-ada saja halangan yang terutama bersumber dari profil teroris di wajah dan mimik saya.

Itu tak hanya di Indonesia. Juga di Amerika, di Negeri Belanda, Jerman, dan lain-lain. Kalau saya ngurus sesuatu di bank, kejadiannya jadi sumpek. Mungkin karena alam kemakhlukan saya memang ditakdirkan untuk alergi atau dicurigai oleh segala unsur profesionalitas formal dunia modern. Gampangnya, saya ini dibolak-balik, ya tetap orang dusun. Orang udik.

Setiap kali ingat bank, saya ingat bunga. Saya tidak lantas merenungkannya, tetapi melawakkannya. Saya bertanya kepada pegawai bank: *“How much is the flower?”* Berapa bunganya?

Dan ketika rapat Sabtu malam itu mendiskusikan Bank Tanpa Bunga, otak saya juga hanya melawak: *“Say it with no flower!”*

Saya ingat di Jawa Timur para ulama bertengkar tentang bunga bank. Yang satu bilang bunga itu riba, lainnya bilang tidak. Lainnya lagi bilang itu bergantung pada konteks penggunaan uang oleh para pemakai jasa bank.

Saya ingat Kiai Yasin Hasan Abdullah dari Pasuruan mengkritik Dawam Rahardjo: “Dawam bilang untuk menghilangkan rentenir harus melalui bank. Lha, bank itu apa bukan sedulurnya rentenir?”

Namun, rupanya kaum intelektual modernis dari kalangan Islam di Jakarta cenderung pada pendapat yang menggelisahkan keribaan bunga. Maka, mereka mendirikan Bank Tanpa Bunga. Dan itulah Bank Islam. Tujuannya untuk menolong kaum *dhu'afa*. Kaum lemah. Meskipun saya tidak bisa membayangkan lapis kaum lemah yang mana yang akan pernah tersentuh oleh mekanisme bank. Jadi, tampaknya persentuhan bank ini terutama dengan kalangan menengah ke atas juga.

Akan tetapi, ya alhamdulillah-alhamdulillah saja saya. Saya tidak mengerti dan tak bisa menilai. Namun, tetap saya ucapkan *ahlan wa sahan*, baik kepada Bank Islam maupun kepada Bank Samiun.[]

Mencegah Keresahan Sosial

(Si Komo 1)

Sejak di taman kanak-kanak, kita selalu diajari bahwa cita-cita yang terbaik adalah membela bangsa dan negara. Sesudah kita dewasa, sekarang, kita selalu menyadari bahwa tugas mulia kita adalah bagaimana senantiasa menyumbangkan tenaga dan pikiran kita untuk ikut menyejahterakan rakyat, membela bangsa, membahagiakan masyarakat, menciptakan ketenteraman sosial. Apa saja yang mengancam ketenteraman sosial, akan kita perangi bersama-sama.

Keyakinan itulah yang saya patrikan dalam hati ketika membaca surat dari beberapa pekerja pabrik, yang beberapa hari kemudian langsung menemui saya di rumah kontrakan. Wajah mereka kuyu, sinar mata mereka layu meskipun penuh semangat, dan pakaian mereka—tentu saja—tidak *trendy*. Sebagai pekerja rendahan, tentulah mereka tak punya kapasitas ekonomi untuk mengejar mode yang larnya selalu sangat lebih cepat dibanding “langkah” gaji kita semua.

Terus terang, kalau bersentuhan dengan strata pekerja, otak saya langsung curiga. Ini mesti ada urusannya dengan ketenteraman sosial. Oleh karena itu, saya “siap perang”. Terus terang saja, saya tidak suka pada pemogokan kaum buruh. Itu mengancam ketenteraman sosial. Dan sangat lebih tidak suka lagi kepada sumber atau penyebab-peny-

bab pemogokan mereka. Misalnya, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi!

“Tampaknya Anda-Anda ini sahabatnya Si Komo ...!” saya nyeletuk, sesudah beberapa kalimat pembicaraan, serta berdasarkan yang saya ketahui dari surat mereka.

“Kata orang, buruh macam kami ini derajatnya sama dengan onderdil mesin. Tapi, ternyata mesin lebih berharga dan lebih bernasib baik dibanding kami, Cak!” salah seorang *nerombol*.

“*Opo maneh iku! ...*,” kata saya.

“Kalau mesin mogok, ia tidak dipukuli, tetapi langsung diperbaiki, agar bisa digunakan lagi. Kalau kami yang mogok, lain soalnya. *Wong* masalahnya hanya aus karena kurang oli, *kok* lantas bisa sampai ke mana-mana yang kami tidak paham. Yang *mbalelo*, yang subversif”

“Bukan,” jawab saya. “Bukan sampai ke mana-mana. Hanya sampai ke uang. Uang itu titik pusat dari gerak-gerak lain dalam kehidupan. Gerak pendidikan, gerak kebudayaan, gerak politik, tuduhan-tuduhan, dan retorika dalam hubungan kerja antarmanusia, sesungguhnya bermuara pada uang. Tetapi yang penting, saya tidak mau kedatangan Anda kemari ini menjadi potensi yang bisa mengancam ketenteraman sosial. Sebagai warga negara yang berusaha baik, saya selalu wajib mencegah segala sesuatu yang bisa meresahkan masyarakat, meskipun yang bisa saya lakukan, ya hanya sebatas begini-begini ini saja”

“Meresahkan masyarakat bagaimana? Dan ikut mencegah bagaimana,” mereka mengejar.

“Misalnya,” jawab saya, “seperti dalam kasus yang Anda kemukakan kepada saya: para buruh harus kompak dengan juragan dan semua pihak dalam perusahaan untuk mengantisipasi oknum-oknum yang dinilai tidak bisa melaksanakan undang-undang perburuhan. Para buruh harus selalu meletakkan diri dalam satu kepentingan dengan perusahaan. Demikian juga pihak perusahaan harus meletakkan diri dalam dialektika profesional diri dengan buruh, sebab keduanya saling memerlukan dan menyejahterakan. Para buruh kompak dengan per-

usaha dalam pemenuhan hak-hak: gaji yang memadai sesuai dengan Moral Perburuhan Pancasila, imbalan lembur, fasilitas kesehatan, cuti haid, keterbukaan, dan keadilan ketentuan kesejahteraan buruh ... pokoknya semua segi hubungan kerjanya. Perusahaan juga harus bertindak tegas kalau ada buruh yang menyogok atau menyewa pihak luar yang punya kekuatan untuk menekankan kepentingannya. Kalau ternyata buruh tak mungkin melakukan itu karena tak punya biaya, ya perusahaan yang harus waspada jangan sampai dirinya sendiri menyewa kekuatan macam itu”

Saya menganjurkan agar para buruh itu mengusulkan kepada para juragannya, para direktur, dan mandor-mandornya, agar memberikan penataran kepada para buruh—umpamanya—tentang undang-undang perburuhan, misalnya apa kata Pancasila tentang hak-hak buruh?[]

Akhlag Lembaga Ekonomi (Si Komo 2)

Para juragan di perusahaan bisa menatar para buruh—sesudah menatar diri mereka sendiri—bahwa perburuhan Pancasila misalnya, adalah kesejahteraan kolektif pada semua yang terlibat dalam suatu lembaga ekonomi. Suatu akhlak yang memperhatikan kepentingan bersama adalah tidak ada yang mengisap dan tidak ada yang diisap, tidak ada yang mengeksploitasi dan tidak ada yang dieksploitasi. Tidak harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah, sebagaimana kedudukan direktur dengan tukang sapu. Memang setidaknya berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Kalau sudah ditatar oleh direkturnya, para buruh akan berkata: “Kami para buruh ini punya kepentingan agar perusahaan tempat kami ini bisa maju semaju-majunya! Siapa, sih pekerja yang menginginkan tempat kerjanya bangkrut? Tidak ada ‘kan? Semakin maju pabrik tempat kerja kami, semakin sejahtera pula kehidupan kami. Begitu mestinya ‘kan? Dan logikanya, kalau buruh, tidak terpenuhi hak-haknya, kurang disantuni kelak hidupnya, apalagi kalau standar minimal upahnya saja tidak terpenuhi, tentu kemajuan perusahaan juga menjadi tidak maksimal.”

Mereka juga menjadi mengerti: “Kami ini mesin. Kalau mesin loyo, bensinnya terlalu *ngirit*, minyak pelumasnya tidak lancar, tentu rugi

'kan yang punya kendaraan. Bensin *ngirit* membuat temperatur mesin panas, oli kurang membuat onderdil gampang rusak. Siapakah pengurus perusahaan yang menginginkan mesin kepanasan dan rusak seperti itu?"

Mungkin kemudian ada yang menyahut: "Dan kalau panasnya dan rusaknya keterlaluan, akhirnya mesin 'kan mogok!"—tetapi pasti tidak ada juga yang meneruskan: "Padahal, kami sama sekali tidak suka mogok"

"Benar! Kami tidak suka mogok! Kami ingin bekerja baik-baik dan memaksimalkan hasil perusahaan, sehingga dengan demikian penghidupan kami pun menjadi baik. Sekali lagi, kami tidak menginginkan suatu mekanisme kerja sama bisnis yang adil yang tidak memaksa mesin menjadi mogok."

"Ya, Pak," demikian kira-kira yang lainnya lagi meneruskan. "Kalau Bapak punya mesin, tanyakan kepadanya apakah ia suka mogok, pasti jawabnya tidak. Tapi, kenapa terkadang mesin itu mogok? Ya, karena keadaannya mogok, karena realitasnya mogok. Ia dipaksa oleh kenyataan dirinya untuk hanya bisa mogok, meskipun ia sama sekali tidak senang mogok."

Ketidaksukaan mereka untuk mogok itu jika sudah ditatar akan lebih dilandasi oleh filosofi dan cara berpikir yang benar, di samping oleh kesadaran untuk memelihara ketenteraman sosial. Mereka menjadi paham hakikat mogok. "Hakikat mogok itu sama dengan hakikat macetnya lalu lintas. Apakah bisa dibuat undang-undang yang melarang jalanan macet?"

Karena kecerdasan buruh meningkat, maka mungkin akan ada yang membuka wawasan lain, "Bagaimana kalau jalan yang ditempuh bukan pemogokan, melainkan suatu cara yang lebih bijak?"

"Apa misalnya?"

"Musyawarah, diplomasi perundingan"

Kecil kemungkinan akan ada yang menjawab begini: "Ah. Mas ini! Ya, buruh pasti kalah dan diakali saja kalau pakai diplomasi segala. Kami ini makan sekolahan hanya sedikit, sedangkan bos-bos kami

orang pandai semua. Kalau kami ini pandai, *mosok* ya menjabat sebagai buruh *to* Maaas ...!”

Insya Allah tidak begitu. Kecuali, kalau kaum buruh memang disengaja diperbodoh, dibiarkan bodoh, dan dibodohi.[]

Menatar Diri Sendiri (Si Komo 3)

Akhirnya teman-teman pekerja itu mengetahui para juragannya amat sangat sibuk untuk punya waktu menatar buruh-buruhnya. Untuk itu, saya menyarankan agar mereka iseng-iseng membuat aktivitas “drama”.

Maksud saya, daripada kalau nganggur-nganggur hanya diisi dengan joget dangdut atau *ngramal buntutan*, mungkin bisa mendayagunakan proses teater untuk menatar diri mereka sendiri. Bisa kumpul-kumpul di Balai RK atau di asrama atau tempat kos mereka. Tidak untuk membuat sandiwara seperti Rendra yang besar-besar, tetapi sekadar untuk proses penataran diri. Ini perlu karena proyek penataran pemerintah tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Jadi, kaum buruh harus tahu bagaimana menatar diri mereka sendiri.

Apa yang penting dalam drama itu bukan pementasannya, melainkan proses pembuatannya. Misalnya dalam menentukan lakon, mereka bisa mendiskusikannya, menggali dari pengalaman-pengalamannya sebagai buruh. Mereka menginventarisasi, menganalisis, mendiskusikan, dan menentukan artikulasinya.

Drama itu tak memerlukan naskah sampai tahap skenario, tetapi cukup sinopsis atau paling jauh *treatment* saja. Para aktor tak usah disediakan kalimat demi kalimat, kata per kata, sebab mereka cukup

berimprovisasi saja, sepanjang sudah menyepakati batas-batas dan konteks setiap adegan.

Jadi, sesudah pokok-temanya ditentukan, tokoh-tokohnya dipilih, penahanan eksposisi, konflik dan solusinya diputuskan, maka dituliskanlah *treatment*: adegan itu siapa saja yang tampil, apa yang dibicarakan, seberapa takaran unsur-unsurnya, dan seterusnya. Nanti segala sesuatunya digarap sambil berjalan. Latihan akan dijalankan oleh seorang koordinator, tetapi kerja penyutradaraan sesungguhnya dijalankan oleh semua.

Ini jenis teater distribusi alias teater demokrasi. Tidak bergantung dan berpusat pada satu pimpinan sentral. Ini memenuhi aspirasi dan ideologi kesenian komunitas: semua berperan untuk semua. Demikianlah hakikat dan realitas teater rakyat. Dan mestinya demikianlah pula yang disebut teater Pancasila, yang bukan hanya sangat mengutamakan dan menggali muatan dari sumber nilai keadilan, kesejahteraan bersama, kerja sama yang seimbang, tetapi juga melandasi seluruhnya pada nilai kemanusiaan dan religiositas ketuhanan.

Terserah bagaimana alur dan progresi, bahkan juga suspensi, yang hendak diciptakan. “Tapi yang penting,” kata salah seorang dari mereka, sesudah menyetujui dan langsung merancang-rancang, “realitas pengalaman sebagian kaum buruh yang masih mengalami ketertindasan diungkapkan di dalamnya. Juga aspirasi dan sikap mereka terhadap realitas itu.”

Dirumuskan oleh mereka, misalnya, sejumlah alasan real mengapa pada suatu hari mereka terpaksa mogok. Ada staf personalia yang tidak melaksanakan undang-undang perburuhan sebagaimana mestinya.

Ada ketua serikat pekerja yang dinilai terlalu memihak kepada kepentingan perusahaan, padahal posisi perusahaan cenderung mengisap buruh.

Juga belum dipenuhinya hak bagi buruh yang memenuhi syarat untuk menerima asuransi tenaga kerja. Kurang ada upaya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan buruh. Kelebihan jam kerja yang belum

dibayar. Atau juga ketentuan kerja buruh yang belum dirumuskan, dan menuntut kelayakan dan hak buruh untuk ikut menegosiasikan ketentuan tersebut. Dipertanyakan juga mengapa perusahaan cenderung melecehkan masalah-masalah seperti besarnya uang transportasi, uang makan, Astek, cuti haid, dan sebagainya.

Para buruh melakukan pemogokan, sebagai satu-satunya instrumen politik dan bahasa profesional yang mereka miliki. Dan yang merupakan puncak suspensi dramatisiknya adalah tindak penangkapan, tekanan psikologis-politis, dan kekerasan fisik oknum keamanan tertentu terhadap tiga orang buruh yang dianggap mewakili keseluruhannya.

Substansi adegan ini bukan sekadar segi negatif dari *violence approach*, melainkan juga tradisi kalangan sekuriti untuk cenderung lebih melakukan pemihakan terhadap pemilikan modal. Sebaiknya dipaparkan juga perspektif filosofis adegan itu: betapa ekonomisasi, industrialisasi, profesionalisasi, dan komoditisasi, mencerminkan *syirik* umat manusia dalam menyumbang materialisme.

Ending lakon ini adalah imbauan keras kepada Departemen Tenaga Kerja agar turun tangan menyelesaikan: korsleting antara kepentingan subjektif perusahaan dan hak-hak wajar kaum buruh. Mempertanyakan mengapa Pancasila dengan gampang dilanggar melalui ikut campur oknum keamanan secara berlebihan tanpa memedulikan rasionalitas kasus secara jernih dan adil.

“Permasalahan kita sekarang,” saya menanggapi, “apakah pemertasan semacam ini akan tidak dianggap mengganggu stabilitas dan ketenteraman masyarakat umum? Dan apakah itu tidak rawan terhadap tuduhan-tuduhan politik dan subversif?”

“Kaum buruh justru adalah rakyat yang selama ini diganggu ketenteraman hidupnya ...,” jawab mereka.[]

Bumi Tuhan

Sering kali keinginan harus disaring, niat baik dicek kembali, dan mimpi ditertibkan. Juga kekhawatiran.

Kekhawatiran bahwa, misalnya, sejarah sungguh-sungguh sedang membutuhkan sesuatu hal yang rasanya belum mungkin dilahirkan-nya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Sebagai rakyat, kita butuh—sebutlah—Ratu Adil, atau keajaiban apa pun asal bisa membawa perubahan yang mendadak. Sebagai bangsa, kita merindukan sesuatu yang lebih rasional: seorang negarawan misalnya. Atau, sebagai jamaah yang menggumpal di mana-mana dan terpencar-pencar, kita membutuhkan kelahiran manusia dengan kualitas wali

Boleh “sekadar” pemikir, asal dia berpikir tak hanya dengan otaknya, tetapi dengan seluruh hidupnya. Orang mulai kurang mantap mendengarkan pemikiran hasil para pemikir yang hidupnya tidak independen. Dari seorang pakar yang begitu dikalungi oleh berbagai ketergantungan politis dan ekonomis di bawah tata kekuasaan, bagaimana mungkin bisa diharapkan pemikiran yang proses dan hasilnya bersifat bebas. Orang merasa lebih terjamin apabila sebutir “pikiran bebas”, apabila setetes kata berasal dari kebebasan yang sungguh-sungguh dihidupi dengan perjuangan, konsistensi, dan—tentunya—sedikit atau banyak duka derita.

Demikian juga yang bisa dijamin kepada orang banyak dari pakar-pakar lain: ulama, budayawan, atau apa pun. Kalau tidak, orang akan makin tahu bahwa mereka sedang nonton akrobat, membaca pameran kepiawaian yang steril dari kumuh persoalan, membeli komoditi ragam-ragam yang lebih canggih dari dunia peragaan, atau mendengarkan nyanyi hiburan kosong yang terlalu fana.

Kehidupan ini barangkali monoton, sejarah terus begini-begini saja, atau mungkin akan ada satu-dua ombak perubahan di sekeliling kita; tetapi, kekhawatiran semacam itu amat tak gampang ditenteramkan.

Bisa juga kita hibur bahwa dewasa ini kita sedang melangkah menuju pola kepemimpinan impersonal. Bahwa fungsi individu dalam tata tradisi digantikan oleh fungsi institusi-institusi. Ada semacam kepuasan akademik dengan kesimpulan itu, tetapi kehidupan tetap dahaga.

Sampai-sampai, jamaah-jamaah kaum Muslim umpamanya, merasa mending mengundang pelawak saja untuk diminta bertabligh. Haus, sih. Kalau makan-minum kurang ada, syukur bisa ketawa. Pertemuan-pertemuan di jamaah Jumat, di pengajian-pengajian, peringatan ini-itu, berlangsung tak efektif untuk mengusir lapar dan dahaga itu —baik secara batin maupun fisik.

Sebenarnya mereka “minta” muazin dan imam yang *all-round*. Mubalig, ulama, pemimpin, yang mampu membawa mereka tidak terutama ke surga dan neraka yang jauh, tetapi ke kerak-kerak soal-soal sosial yang mereka alami sehari-hari. Kemudian membawakan itu semua dengan sikap politik yang jelas, sambil meramunya dengan suatu bentuk komunikasi yang indah dan segar.

Atau pemuka politik, yang tahu memakai *frame* keagamaan, membawakan aspirasi politik yang gamblang arahnya, tahu persambungannya dengan kenyataan hidup sehari-hari, serta dengan memaketnya dalam suatu “dakwah kesenian” yang hangat. Jadi, bukan politikus yang hanya punya pengetahuan tunggal tentang memobilisasi mereka menjelang Pemilu.

Atau seorang seniman, budayawan, sang “penggembala batin kehidupan”, yang mengerti dan bisa lebih dari sekadar membedakan antara Siti Nurbaya dan Angkatan ’45, yang menyembah karya seni melebihi Tuhan; tetapi yang mereguk agama, politik, dan persoalan sosial sebagai realitas yang tak terlepas dari seluruh kesenian.

Akan tetapi, apa bukan sentimentalitas untuk bernostalgia-ria mengenang para Sunan, yang bukan saja berlaga di “belakang Istana”, mengolah kebudayaan dan mengakarkan dirinya pada komunitas yang jelas, melainkan juga sungguh-sungguh menemani orang kecil? Apa tidak naif untuk menoleh ke *mBah* Mahatma Gandhi yang terus bikin tenun bukan saja merakyat, melainkan juga untuk mencari nafkah? Apa di negeri adiluhung ini seorang pemimpin kita suruh berdagang di kaki lima?

Susah lahir orang-impian semacam itu karena ada yang timpang dalam pergulatan antara—katakanlah—kebudayaan negara melawan kebudayaan bangsa, kebudayaan rakyat, kebudayaan manusia, dan atau kebudayaan agama. Segala mekanisme yang menyangkut bangsa, rakyat, manusia, dan agama makin terserap oleh mekanisme kepada kebudayaan negara—dalam bentuk yang gamblang maupun samar.

Di kalangan kaum Muslim umpamanya, tampaknya makin disepakati pendapat bahwa dalam Islam tak ada konsep tentang negara. Logikanya, jangan bikin Negara Islam. Logika lanjutnya, kalau bisa *mbok* nggak usah negara. Dalam Islam ‘kan tak ada. Yang ada ialah manusia, alam, dan Tuhan.

Sudah pasti itu bukan pikiran makar melawan negara atau setidaknya fenomennya. Itu sekadar dorongan agar bangsa, rakyat, dan manusia, bisa berusaha berpikir dan mempertolakkan langkah hidupnya lebih luas dari “primordialisme negara”, umpamanya dengan skala penghayatan “bumi Tuhan” sebagai “negara”-nya. Sudah pasti pula bahwa kini makin berlangsung berbagai macam perjuangan politik dan kemanusiaan yang mengarah ke negara bumi Tuhan. Cakrawala semacam itu merupakan pelindung paling realistis atas manusia.

Makin lama makin tidak lucu kalau soal “dalam Islam tak ada konsep negara” itu dieksploitasi yang model primordialisme tersembunyi yang begitu menyempitkan manusia, bangsa, rakyat, bumi, alam, bahkan “Tuhan”.[]

Boleh Merah Boleh Putih Asal Hitam

Kaum paranormal silakan meramal bahwa 1990 adalah tahun *gonjang-ganjing*. Toh, kita sudah mendapat jaminan dari para pamong dan pakar bahwa ekonomi kita akan sedikit lebih baik, politik kita insya Allah aman-aman saja—plus kebudayaan kita makin dipenuhi oleh foto-foto wanita menggiurkan. Untuk yang terakhir itu silakan pilih *astaghfirullah* atau *alhamdulillah*.

Gaji pegneg naik, kita semua ikut bersyukur. Paling tidak, karena kalau kesejahteraan seseorang meningkat, akan berkurang inisiatifnya untuk cari uang ekstrakurikuler, baik yang pakai *aji-aji sambernyowo* maupun *samberproyek*.

Di bidang politik telah makin reda konflik-konflik nilai. Orang yang suka *nyonthong* aneh-aneh sudah makin sakit gigi, orang yang suka buang angin sudah di-*rheumason* perutnya, dan tanaman-tanaman liar sudah makin dipangkas.

Kita semua makin menyepakati apa yang dikehendaki oleh pemerintah untuk disepakati. Integrasi nasional pada dataran aspirasi dan ideologi makin *rengket*. Semua pihak telah membanting kartu untuk menunjukkan persuasinya. Misalnya, Gus Dur bertahun-tahun mencoba meyakinkan pihak penguasa bahwa “Islam bukan ancaman bagi ideologi nasional”, antara lain dengan cara menabur-naburkan ide

pluralisme, Cak Nur juga melegitimasi dengan menyebut bahwa ide dasar Al-Quran sesungguhnya adalah juga kemajemukan. Islam menerima semua saudaranya setanah air seperti kambing dan kijang menerima macan dan singa di belantara nasional.

Dengan sedikit *footnote* bahwa pluralisme yang dimaksud adalah kemajemukan tanpa komunisme, tanpa Islam fundamentalis, tanpa aliran-aliran sesat, tanpa unjuk rasa mahasiswa, tanpa kelompok-kelompok sempalan model apa pun, tanpa partai baru, tanpa golput, tanpa surat kabar yang tak punya SIUPP, tanpa segala macam pendapat yang berbeda dengan pendapat pemerintah, tanpa becak di Jakarta, serta tanpa beribu tanpa yang lain. Wajib begitu.

Sebenarnya memang itulah kesalahan Bung Karno dulu. Dia terlalu lugu. Dia seorang bapak yang terlalu baik hati sehingga diterimanya saja semua model anak-anaknya, meski nakal kayak setan: beliau ragu-ragu ketika harus membubarkan PKI. Padahal, si anak yang *nranyak* itu memang harus *disetrap*!

Mungkin karena Bung Karno orang Blitar. Bukan orang Jawa *negarigung*. Tak dibesarkan oleh tradisi yang memungkinkan dia memahami filosofi *Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono*. Anda boleh begitu, asal tidak begitu. Anda boleh merah boleh putih, asal tetap hitam. Filosofi tradisional itu sudah kita transformasi atau kita nasionalisasi menjadi “kebebasan yang terbatas” atau “kemerdekaan yang bertanggung jawab”.

Anda bebas berpikir, berpendapat, berjualan kaki lima, bikin konglomerat bak *samrat* persemakmuran Ngamarta cs., atau apa saja, asal terbatas dan bertanggung jawab. Anda silakan ke utara asal tidak betul-betul ke utara. Mana “utara”, apa “batas”, dan “tanggung jawab”, simpel saja asal kita rajin memperhatikan penjelasan Pak Harmoko. Kalau ada pakar yang mengatakan bahwa hal itu bisa merupakan tanah subur bagi eufemisme, ambivalensi, kemunafikan, atau ketidakmenentuan aturan main—pakai saja filosofi lain: Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu tinggal landas!

Pak Karno dulu hanya sibuk pidato dan bergaya, padahal mestinya dia merenung dan mempersiapkan petunjuk. Mungkin itu sebabnya dia jatuh, padahal setahun sebelumnya tak ada orang berani mimpi bahwa Paduka Yang Mulia yang kedudukan karismatiknyanya bagaikan nabi itu akan bisa jatuh. *Ignoramus et ignorabimus*, kita tak tahu dan kita tak akan pernah tahu—begitu kata para peramal politik ketika itu. Tiba-tiba kok *njekektheek* dia terjatuh dengan amat gampangnyanya. Persis seperti bertengkurapannya domino komunisme di Eropa Timur.[]

Globalisasi dan Manusia Komprehensif

Gambarkanlah proses globalisasi dengan berbagai cara atau model. Rumah Anda misalnya, bayangkanlah bahwa sekat-sekat yang memisahkan satu kamar dengan lainnya telah Anda cabut. Atau, setidaknya setiap bilik Anda buat memiliki multipintu yang menjadikan Anda bisa bergerak keluar-masuk ke mana dan dari mana saja.

Bilik-bilik yang semula masing-masing dihuni oleh “primordialitas”, subjektivitas, atau kesepihakan, kini berlubang-lubang di semua sisi. Rumah Anda menjadi global: seluruh penghuni bilik-bilik menjadi bagian dan “menaati” tata nilai keseluruhan rumah tersebut. Kecenderungan bilik-bilik kecil bergeser menjadi kecenderungan satu rumah besar.

Bisa juga Anda analogikan rumah itu—jika Anda pernah bertani—umpamanya dengan persawahan. *Galengan-galengan*-nya Anda “lukai” di sana-sini sehingga air mendistribusikan dirinya menjadi satu arus yang menyeluruh. Sawah-sawah itu seolah-olah merupakan bejana-bejana saling berhubungan, sehingga keseluruhan air menjadi “bersatu sikap”, permukaan sama, serta terjadi percampuran unsur-unsur yang semula berdiri sendiri-sendiri akhirnya menjadi bersifat menyeluruh.

Proses globalisasi adalah proses pengocokan atau pengacak-acak. Tata-bagian menjadi tata-kemenyeluruhan. Muatan dari bagian yang kini menyeluruh itu dengan sendirinya melahirkan suatu persenyawaan baru yang tidak mungkin lagi Anda pahami dengan metode sekat-sekat seperti sebelumnya.

So, satu rumah besar, sawah-sawah bejana berhubungan, muatan-muatan “kawin” satu sama lain secara aneh

Muatan-muatan itu—umpamanya—metabolisme kekuasaan dunia, kesalingtergantungan ekonomi, transformasi nilai-nilai, modifikasi ideologi menjadi semacam ideologi baru, atau mungkin melangkah ke—sebutlah—transideologi.

Anda sudah melihat gejalanya sejak lama. Sejak “era dua adikuasa”, kalau kita omong perekonomian atau politik, selalu harus kita gambarkan garis-garis skema di mana naiknya harga bawang atau makin memblenya buruh tani harus ditemukan hubungannya dengan apa isi negosiasi antara presiden Amerika Serikat dan Kongres. Keponakan Anda mencopet karena anaknya hendak lahir. Dia mencopet gara-gara pekerjaan *ngasak*-nya sirna oleh Revolusi Hijau. *Green Revolution* berlangsung oleh politik pertanian yang tidak berorientasi ke peningkatan pendapatan petani, tetapi meletakkan petani sebagai “pesawahan dari pertanian kelas menengah nasional”. Penyawahan petani diselenggarakan karena Negara Berkembang harus ikut arus untuk berkonsentrasi ke pertumbuhan ekonomi yang parameter utamanya adalah GNP.

Konsentrasi ini dilahirkan oleh “loyalitas” terhadap rumus kemajuan sejarah yang dikomandani oleh negara-negara makmur, di mana Anda wajib mempersembahkan perekonomian piramidal, stabilitas politik, dan *jer basuki mawa bea*. “Bea”-nya dipikul oleh mayoritas rakyat strata bawah, “basuki”-nya digenggam oleh sekelompok kecil yang hidup menumpang di pundak mereka: suatu pembagian yang “adil”. Ini membuat setiap orang ingin “bergerak ke atas”: dunia pendidikan misalnya adalah tangga untuk memanjat ke atas dan mencari

cantolan-cantolan. Elitisasi secara ekonomi dan politik, pemriyian secara budaya. Kalau seorang anak muda menjadi Malin Kundang yang berpaling dari dusun asal-usulnya, sesungguhnya itu berhubungan dengan kuku politik di Washington dan gemuruh industri di Jepang.

Pada era yang barusan saya sebut itu, “tembok bilik rumah Anda” berlubang di bagian belakang.

Ketika kemudian dunia memasuki era informasi, lubang-lubang di tembok bertambah jumlahnya—sehingga peluang untuk pengocokan atau pengacak-acakan globalisasi semakin terbuka.

Kita sudah saksikan sendiri dalam percepatan yang tinggi bagaimana sesudah “era dua adikuasa”, kemudian “era Utara-Selatan” yang lantas berkembang makin relatif, terjadi ramuan-ramuan baru dan perimbangan baru. Meskipun kondisi-kondisi (parsial) bidang perekonomian dunia belum jauh bergeser dari sebelumnya, tetapi sudah “terluka” di sana-sini: teknologi komunikasi memungkinkan terjadinya rumus-rumus politik perekonomian yang baru. Yang dewasa ini gamblang kita saksikan bersama adalah jebolnya sekat-sekat pada level nilai dan ideologi.

Keruntuhan-keruntuhan bangunan komunis di Eropa Timur yang secepat itu berlangsungnya, memperlihatkan betapa makin bocornya galengan-galengan sawah. Dulu ada eurokomunisme—suatu makhluk aneh yang masih transparan—lantas berkembang di Cina, yaitu kapitalisasi, makin tidak konsistennya muara-muara komunisme di beberapa negara, akhirnya menjadi lebih jelas sesudah *goro-goro* di Eropa Timur. Dan ketika kemudian krisis Teluk terjadi kita makin asyik menyaksikan betapa “irigasi nilai, ideologi, kepentingan politik, dan ekonomi” telah makin bercampur-baur melalui bejana-bejana pengujung abad ke-21 yang makin banyak lubang perhubungannya.

Rumus-rumus tentang kawan dan lawan—baik pada level ideologi atau kepentingan ekonomi dan politik—menjadi inkonvensional dan belum bisa kita temukan apakah akan ada “pakem” yang baru. Dunia Arab berbelah-belah memunculkan “hakikat realitas”-nya yang selama ini sekadar merupakan sekam. Arab Saudi kompak dengan yang disebut “Pasukan Kafir”: kekompakannya sudah sedemikian verbal, sudah pada level “syariat”, bukan lagi “hakikat” seperti yang berlangsung sebelumnya. Iran dan Irak *theklek kecemplung kalen*, sehingga George Bush menyesalkan mengapa mereka rujuk. Kesimpulannya, Bush tidak suka perdamaian. Kalau Rusia-Amerika Serikat rujuk diagung-agungkan, kalau Irak-Iran rujuk diklaim sebagai konspirasi teroris. Peta menjadi berubah sama sekali. Sekat-sekat menganga di sana-sini. Terutama kalau kita kaitkan dengan kanker zaman yang bernama Israel.

Siapa kawan siapa lawan teraduk-aduk sedemikian rupa. Sejak beberapa tahun yang lalu, saya memang “curiga” kepada akan terjadinya proses pembusukan untuk menuju suatu kelahiran baru. Busuk pada segala level, tetapi saya ingin itu berlangsung tidak dengan peperangan fisik. Peradaban abad ke-20 memang tak lagi bisa diselamatkan dengan rekayasa normal, tetapi hanya dengan kehancuran. Namun, semoga kehancuran yang terjadi tak usah karena rudal-rudal dan bom kimia.

Kehancuran itu cukuplah berupa merelatifnya berbagai acuan politik dan kepentingan. Kita tidak lagi bisa menemukan sosok cukup jelas dari ideologi-ideologi dan bahwa suatu negara menghidupi secara konsisten ideologinya. Wajah ideologi, bahkan nilai—di level filosofis—sudah makin tak tentu. Kepalsuan runtuh topengnya, kesejatan tertemukan dalam “abstraksi kesadaran”. Saya berharap semoga kehancuran dan pembusukan itu akan berlangsung total, meskipun urusan sehari-hari kita tetaplah soal utang, bayar uang sekolah anak-anak, bingung terhadap gejala-gejala politik nasional di balik kasus-kasus yang seakan-akan urusan bisnis murni belaka

Pada gilirannya nanti, ketika mayoritas manusia terikut menjadi tak menentu sosok wajahnya, terseret gelombang-gelombang yang berputar-putar—seperti kaum Nuh yang tenggelam dalam arus air bah besar nilai-nilai: akan lahir sejumlah anak-anak manusia yang berfungsi seperti penumpang perahu Nuh. Mereka adalah manusia global, manusia kosmopolitan, manusia reintegralis, manusia komprehensif, egaliter, dan holistik. Bukan manusia sekat, bukan manusia primordial, bukan manusia parsial, bukan manusia spesialis. Bukan ekonom, seniman, cendekiawan, melainkan manusia. Manusia yang “kebetulan” berfungsi sebagai ekonom, sastrawan, atau intelektual. Tetapi, pertama-tama dia adalah manusia.

Bukankah selama ini karena proses disintegralisasi dan diferensiasi, yang lahir adalah spesialis-spesialis dan bukan “manusia utuh”? Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Harto sebagai “manusia baru”. Manusia baru memang lahir pasca-Soeharto.[]

Surat Keempat

Ihwal
"Mengendarai"
Al-Quran,
Melintasi
Tujuh Langit



Masalah-Masalah
Agama

Agama, Nasi, dan Kebodohan

A gama itu mata air kebenaran, tetapi sangat banyak manusia mungkin tidak sungguh-sungguh memercayai itu. Sangat banyak manusia, baik sebagai pribadi maupun selaku komunitas, dalam perilaku sehari-harinya maupun dalam kebutuhan dan pilihan-pilihan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya—tidak menunjukkan tanda-tanda serius bahwa mereka memercayai agama.

Kenyataan itu bisa jelas Anda jumpai dalam hal ke mana kehidupan masyarakat kita diarahkan, bagaimana politik dan ekonomi diselenggarakan, atau bagaimana prinsip-prinsip kognisi kehidupan dipetakan: nilai-nilai agama diletakkan marginal dan “ilustratif”, bahkan sering kali diperlukan sekadar untuk manipulasi-manipulasi. Dengan kata lain: agama difungsikan tidak dalam identifikasi terhadap pencarian kebenaran. Sering kali orang lebih mencari *pembenaran* dibanding *kebenaran*.

Yang secara khusus merupakan “tugas” saya untuk menuliskannya di sini adalah—dengan sumber kenyataan di atas—betapa gerakan penyebaran agama juga cenderung tidak identik dengan sosialisasi nilai-nilai kebenaran.

Agama, atau “yang disebut agama”, disebarkan untuk motivasi-motivasi yang sangat duniawiah: rekrutmen massa, kekuasaan global

atas peradaban umat manusia, gengsi korps, pengembangan kekuatan politik, kekuatan sosial, serta dengan demikian juga kekuatan kebudayaan. Itu semua jauh, atau bahkan bisa berlawanan, dengan fungsi dakwah yang sesungguhnya, yakni menemani dan mengantarkan manusia memasuki kebenaran yang sebenar-benarnya.

Pada saat banyak tempat, orang-orang dan lembaga-lembaga penyebaran agama memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan untuk mengintervensi apa yang mereka sangka kebenaran agama. Kalau perlu dengan mengaktifkan kaum rentenir: orang-orang yang setelah sekian bulan atau sekian tahun terjatut utang gila rentenir tak bisa lagi mengatasi keterjerumumannya. Maka, sang penyebar agama datang “menolong” dan berkata lembut: “Ibu dan Bapak kami bebaskan dari utang, kami akan bayar kepada rentenir itu berapa pun saja. Dan karena itu masukilah kebebasan dan kasih”

Artinya, dia bebas dari utang dengan syarat sekian ratus cara, taktik, dan strategi makro-mikro yang dijalankan untuk proyek yang disebut “menyebarkan agama”.

Orang-orang miskin ditawarkan uang dan makanan. Anak-anak yang belajar dalam kemiskinan dan kejumudan diiming-imingi uang dan roti. Gurunya marah-marah. Pendidik agama ini berkelahi melawan sang pendatang penyebar agama, lantas aparat keamanan menyalahkan—justeru sang pendidik agama lokal.

Terdapat suatu psikologi politik yang berkaitan dengan peta kekuatan dan kepentingan ekonomi-politik nasional dan internasional yang membuat “si guru lokal” selalu dianggap salah dan dituduh “SARA”, sementara “si pendatang” selalu dianggap benar dan terancam oleh “SARA”.

Situasi itu dipertegas oleh kondisi mualaf yang konstan di kalangan “kaum miskin” yang menjadi korban tersebut. Para pemimpin mereka bertengkar satu sama lain, tidak kunjung merasa perlu mengorganisasi kekuatan-kekuatan sendiri, serta sibuk sentimen sana sentimen sini untuk hal-hal yang amat sepele.

Memang ada satu “rumus” bahwa orang yang berpindah agama dari X ke Y selalu hanya yang miskin dan bodoh dan mualaf, sementara jika terjadi perpindahan sebaliknya—dari Y ke X—biasanya hanya terjadi pada yang kaya dan pandai. Rumus itu seolah-olah mencerminkan “kebenaran sejati” yang kaya dan sampai hari ini belum bisa dilihat dan dipahami atau dinilai oleh kacamata mana pun, termasuk kacamata orang-orang yang memeluk agama kebenaran sejati itu. Akan tetapi, yang menjadi pusat persoalan di sini adalah sangat lemahnyaantisipasi pihak yang dirugikan itu, tak kunjung terbangunnya suatu kesadaran, komitmen, dan solidaritas untuk bersama merawat bangunan-bangunan kebenaran sejati itu.

Friksi antar-“agama” telah makin membengkak di segala sektor dan di hampir semua lapisan. Tak hanya di lapisan masyarakat umum, tetapi juga di kantor-kantor birokrasi, di kampus, bahkan juga di tubuh militer. Intervensi seperti yang saya sebut di atas telah makin berlangsung dalam strategi yang ragam dan komprehensif, menggunakan hampir segala cara, bahkan menunggangi keberlangsungan sistem-sistem pembangunan.

Namun, sangat banyak orang dari “pihak yang dirugikan” tidak memercayainya. Terlebih tak percaya lagi bahwa “urusan agama” ada terkait dengan keberlangsungan pembangunan. KB, kesenian, ilmu pengetahuan, pabrik rokok, dan sebagainya.

Sangatlah saya mklumi jika kesadaran dan pemikiran “strategi empiris” mereka tidak semakin peka terhadap gejala itu. Sebab bahkan pun di dalam bidang akidah saja landasan-landasan pemahaman mereka sering rapuh.

Orang tidak tahu dan tidak pernah merasa tahu bahwa ada beda serius (menyangkut pertanggungjawaban di hadapan Allah) antara agama dan “agama”. Ada beda tidak main-main antara “buatan Allah” dan “bikinan manusia”.

Siapakah yang punya otoritas menciptakan agama?

Allah.

Siapa yang memberi nama kepada agama?

Allah.

Kepada berapa banyak agama, Allah menciptakan dan memberi nama? Adakah Allah Yang Mahasatu menciptakan banyak agama, lantas hanya mengakui dan meridhai satu belaka? Itu curang namanya.

Bahkan, kalau kelak Anda menemukan metodologi sejarah dan antropologi untuk melacak benang merah teologi dalam kurun hidup umat manusia, Anda insya Allah akan berjumpa hanya dengan Allah yang *Ahad* dan agama yang juga hanya *ahad*.

Kalau yang namanya agama “boleh” diciptakan oleh manusia dan diberi nama oleh manusia, maka cukup ia kita namakan gerakan kebudayaan atau klompencapir.[]

Agama dan Perubahan Sosial

Agama sedang digadang-gadang untuk berperan memperbaiki peradaban masa depan untuk manusia. Ia ibarat pelita kecil di sayup-sayup abad ke-21 yang dituntut untuk menjanjikan sesuatu sejak sekarang. Kecemasan para pakar pemerhati sejarah terhadap hampir seluruh *evil product* bidang-bidang politik, ekonomi, budaya, serta semua muatan perilaku sejarah umat manusia, akhirnya diacukan kepada kemungkinan peran agama.

Tulisan ini sekadar permintaan interupsi sesaat, yang penawaran tesisnya amat bersahaja. Sebaiknya, kita tak usah terlalu tergesa memperpanjang-panjang pembicaraan tentang apa yang didorongkan oleh agama terhadap proses perubahan sosial, sebelum kita benahi dulu dasar filosofi, epistemologi, atau bahkan “sekadar” struktur logika kita dalam memahami agama.

Pada akhirnya ini mungkin “sekadar soal istilah”, tetapi saya tidak bisa berhenti pada anggapan demikian. Saya tidak pernah sanggup mengucapkan kata “agama berperan dalam” Saya hanya bisa menjumpai agama sebagaimana kayu, atom, biji besi, dedaunan, atau anasir alam lainnya: ia tidak bisa menjadi subjek.

Agama harus tidak berasal dari nabi, murid-murid nabi, ulama, ruhaniwan, pujangga, atau jenis cerdik-cendekia macam apa pun.

Agama hanya mungkin disebut agama apabila ia sepenuh-penuhnya merupakan hasil karya Tuhan—lepas dari kenyataan bahwa kita boleh mempertengkarkan secara metodologis mengenai bagaimana sesuatu itu absah dianggap sebagai hasil karya Tuhan.

Agama hanya mungkin sah disebut agama apabila berasal dari Tuhan, dan bukan kebetulan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada agama untuk berperan apa pun dalam kehidupan manusia. Yang menerima perintah adalah manusia, dan Tuhan telah memberikan fasilitas-fasilitas untuk menjalankan perintah itu. Sedangkan agama tidak mempunyai akal sebagaimana manusia. Agama tidak akan dimasukkan ke surga ataupun neraka. Agama adalah makhluk Tuhan yang sama sekali berbeda dari manusia. Agama tidak punya kewajiban, tidak punya hak, dan tidak dibebani tanggung jawab apa pun.

Dengan logika pemahaman seperti ini seorang ahli tidak mungkin bisa mengatakan—umpamanya—“agama tidak cukup untuk menangkal kenakalan remaja” Yang tidak cukup, dan senantiasa relatif dan polemis, adalah tafsir manusia atas agama.

Manusia sebagai Subjek

Jadi, permasalahan ini sangat jauh lebih dari sekadar “soal bahasa” atau “soal istilah”. Dengan demikian, pun, agama bukan hanya tidak bisa berperan apa-apa terhadap proses kemajuan hidup manusia: ia memang sama sekali tidak dilahirkan untuk itu. Manusia adalah subjek yang harus bekerja dan bertanggung jawab. Manusia pula yang maju atau mundur, yang untung atau rugi. Kalau seluruh umat manusia berduyun-duyun meninggalkannya, agama “tenang-tenang saja”, tidak rugi sesuatu apa.

Oleh karena itu, kalau harus berbicara tentang agama, saya selalu merasa harus mengambil jarak yang setepat-tepatnya dan sejernih-jernihnya dari pemahaman tentang agama yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial. Ibu kelahiran ilmu sosial adalah realitas sosial, sedangkan agama bukan kenyataan sosial. Jika ada dimensi dalam realitas sosial

yang disebut agama, yang dimaksud sesungguhnya adalah upaya terbatas manusia dalam mewujudkan nilai-nilai yang diambilnya dari agama.

Sementara itu, agama itu sendiri, sekali lagi, sama sekali bukan hasil karya manusia, bukan produk kebudayaan, sehingga segala sesuatu yang berasal dari hasil upaya atau rekayasa manusia, sejauh-jauhnya hanya bisa disebut manifestasi agama.

Agama berbeda dari manifestasi agama, seperti halnya matahari berbeda dari cahaya matahari, atau seniman berbeda dari karya seni atau dari rahasia alam ruhani yang menjadi sumber lahirnya karya seni.

Dalam hal ini, saya sangat terikat oleh *common sense*: Bahwa manusia tidak memiliki otoritas untuk menciptakan agama, memberi nama kepadanya, serta menentukan muatan nilai-nilainya; lepas bahwa kita bisa kekal memperbantahkan metode apa yang paling absah untuk menentukan apakah suatu firman, umpamanya, itu berasal dari Allah langsung atau tidak.

Katakanlah ini barangkali sekadar sikap pribadi: Jika ada agama yang berasal dari manusia, saya tidak akan pernah bersedia menganutnya. Saya tidak percaya pada manusia jenis apa pun untuk bisa membimbing saya dalam hal-hal yang menyangkut kebahagiaan, kesejatan, keabadian, dan sebagainya.

Akan tetapi, kalau saya tidak menggunakan “pengertian agama secara sosiologis” tidak berani saya lantas memakai “pengertian agama menurut agama itu sendiri”. Yang bisa saya pakai hanyalah pemahaman atau tafsir saya atas agama menurut Yang Membuat Agama itu sendiri.

Analoginya barangkali seperti bunyi kokok ayam: Apa bunyi kokok ayam? Setiap orang menirukan bunyinya, merefleksikannya berdasarkan cita rasa dan pola ungkap musikalnya. Adapun bunyi kokok ayam itu, ya bunyi kokok ayam: kalau ayam ditanya apa bunyi kokoknya, ia cukup berkokok saja, dan sampai kiamat kita memperdebatkan hasil pendengaran kita atas bunyi kokok ayam itu.

Pada level teoretis, agama memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengolah tujuan-tujuan hidupnya. Agama menyediakan demokrasi, etos kerja, kearifan, moralitas, serta apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempergaulkan dirinya dengan tanah, tetumbuhan, seluruh unsur alam, sesama manusia, cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan, juga manajemen keadilan, cinta, dan kebenaran.

Namun pada level *kasunyatan*, agama telah dihinakan oleh kebebasan manusia, direduksi oleh kepentingan subjektif manusia, bahkan diubah wajahnya menjadi faktor sejarah yang merepotkan dan menjadi sumber peperangan.

Agama dirancang dalam organisasi sosial atau gerakan kebudayaan. Tidak sedikit orang berkata, meyakini, dan memperbuat agama, padahal yang dimaksud sesungguhnya hanyalah sangkaan terhadap sesuatu yang mereka anggap agama.

Menemukan Kehadiran Agama

Agama bahkan dipersempit menjadi mata kuda politik atau primordialisme formalistik. Keluaran maksimalnya adalah menjadi blunder atau ranjau dalam proses perdamaian dan keadilan. Keluaran minimalnya adalah bahwa ia dieksploitasikan untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan yang sempit dan sepihak dari polarisasi kelompok-kelompok dalam sejarah manusia.

Karena keterjajahan politik, ekonomi, dan kebudayaan pada sementara bangsa-bangsa Asia, beberapa abad mutakhir ini agama terkikis dan dijadikan sekadar sebagai alat pelarian psikologis, dijadikan simbol dekadensi kultur, sementara perwujudannya di bidang politik terbelah dua: *pertama* dijadikan pisau fasisme, *kedua* dijadikan legitimasi dan tradisi hipokrisi.

Islam, misalnya, dimiskinkan—di dalam pemahaman para pemeluknya, tidak di dalam diri Islam itu sendiri—menjadi makhluk yang hampir bertentangan dengan bagaimana Sang Pencipta Islam itu sen-

diri memahami ciptaan-Nya. Pemiskinan itu tidak berlangsung hanya pada level interpretasi, pemaknaan, dan penerjemahan sosiokulturalnya, tetapi bahkan berlangsung pada tahap yang paling harfiah. Ada beribu contoh, tetapi bahwa arti literer kata “Islam” itu sendiri sudah membias amat jauh.

Di dalam kenyataan sejarah, tatkala alam pikiran dan alam perilaku manusia telah sedemikian jauh mengalami pemiskinan dari apa yang secara potensial sebenarnya bisa digali dari agama, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan biasanya mengandalkan bahwa agama adalah sebuah “kotak” yang disepadankan esensi, eksistensi, dan fungsinya dengan, umpamanya, “kotak-kotak” lain yang bernama kekuatan ekonomi-politik, akumulasi kapital, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Kita lantas mengasumsikan bahwa faktor ekonomi dan politik adalah kekuatan yang kita anggap paling progresif dalam mendorong perubahan-perubahan zaman. Kemudian, kita melakukan komparasi dan berkesimpulan bahwa agama hanya kekuatan marginal.

Kita memahami ekonomi, politik, dan agama, sebagaimana kita memilahkan kacang, kedelai, dan jagung. Ilmu sosial melihat bahwa ada sebuah “rumah” kehidupan dengan bilik politik, bilik agama, bilik kultur, bilik hukum, bilik ekologi, dan seterusnya. Agama tidak dipandang sebagai tawaran nilai-nilai semacam muatan untuk batin (ruhani dan intelek) untuk ditolak atau dipakai oleh penghuni “rumah” tersebut, serta memberinya gagasan bagaimana memperlakukan atau mengatur bilik-bilik tersebut.

Saya kira akan tiba zaman di mana orang tidak lagi mengatakan bahwa “bercocok tanam itu pertanian, shalat itu agama”: pemahaman semacam itu telah memasuki ambang dekadensinya.

Jika seseorang menanam pohon, menyiraminya, dan memelihara kesuburan tanahnya—perbuatannya itu didorong oleh salah satu muatan yang dikandung agama, atau bersifat religius—terlepas dari apakah orang tersebut menyadarinya atau tidak, mengakuinya atau tidak, menyebutnya demikian atau tidak.

Agama bukan ritus-ritus dan simbol-simbol. Ritus dan simbol adalah ungkapan budaya atas ruhani muatan agama. Sebagaimana kata-kata bukanlah puisi, kata-kata hanya alat untuk mengantarkan puisi. Alat atau bahasa mengungkap puisi sama sekali tidak bisa diidentikkan dengan puisi itu sendiri.

Agama ditemukan orang kehadirannya tatkala mencangkul tanah dengan ketakjuban kepada keagungan Allah. Ketika menatap hutan belantara, keremangan senja dan hamparan bintang-bintang, dengan kekaguman kepada daya keindahan-Nya, ketika berdagang dalam kesadaran akan titik pusat hidup yang bernama Allah. Juga ketika menjalankan politik, ekonomi, hukum, organisasi, gerakan teknokrasi, negara, klub, laboratorium, proyek-proyek, memancing, berolahraga, bersanggama, dan apa saja, dengan keberangkatan dan orientasi titik pusat kehidupan itu.

Dengan demikian, saya tidak bisa memakai suatu kerangka keilmuan yang menyebut, misalnya, faktor ekonomi dan politik adalah non-agama. Yang hidup dalam pengertian saya: apakah berpolitik, berekonomi, bersuami-istri, dan sebagainya adalah beragama atau tidak.

Sangat sederhana.[]

Manusia Mengisap, Tuhan Menghisab

Sebelum pergi menghadap Tuhan kembali, Jenderal Sarwo Edhie Wibowo menuturkan nasihat luar biasa yang beliau kutip dari tradisi filosofi Jawa: *Ojo Kaget* dan *Ojo Dumeh*! Sudah cukup lama beliau meninggal, tetapi nasihat itu terus terngiang-ngiang.

Mungkin karena saya tergolong orang yang sukar melaksanakan hal itu. Saya ini *kagetan* dan *gumunan*, karena itu jadinya sering *dumeh* terhadap sesuatu hal. Orang yang *dumeh* adalah orang yang sempit, dan orang yang sempit itu gampang kaget kalau ada apa-apa.

Misalnya kalau melihat komputer, saya *gumun* bukan main. Nonton teve sering saya luput dari acaranya yang bagus-bagus karena konsentrasi saya terseret pada imaji tentang teknologi teve yang fantastis itu. Bayangkan, Mike Tyson gebuk-gebukan detik ini di Atlantic City misalnya, detik ini juga langsung kita lihat di sini. Kok bisa. Sedangkan *jithok* saya sendiri, saya tak bisa lihat.

Maka, ketika pada suatu hari saya masuk pabrik, diri saya hilang lenyap, yang tinggal hanya *guman* dan *gumun* belaka.

Coba *toh*. Jangankan pabrik yang begitu canggih. Sedangkan *sambel* saja saya *gumun*. Kok, bisa-bisanya orang dulu menemukan harmoni antara lombok dengan brambang dengan garam dan lain-lain menjadi makanan *masterpiece* segala zaman. Bagaimana dulu caranya

tajribah atawa risetnya? Siapa dulu yang pertama-tama *nyoba-nyoba* lombo, dan berada di generasi yang dibutuhkan untuk sampai pada ramuan *sambel* itu. Sayang tak ada sejarawan yang tahu siapa penemu *sambel*. Mungkin Ki Sambel atau Nyi Sambel. Abad berapa ditemukan, bagaimana tahap transformasi dari *sambel* ini ke *sambel* itu, dan seterusnya. Amal jariah si penemu sambel sangat besar. Apakah manusia abad ke-20 ada yang spektakuler prestasinya sebanding dengan invensi sambel?

Kita sekarang hanya pintar beli motor baru, nonton *blue film*, bikin arisan, asyik *intercom*, dan *ngrasani* teman. Padahal kalau kita mau riset, siapa tahu daun waru, kulit trembesi, atau daun krokot ternyata enak dicampur daging trenggiling atau biawak.

Pokoknya saya *gumun* betul sama kekayaan alam semesta ini serta kepada kreativitas manusia. Pabrik yang saya datang itu membuat alat-alat cetak. Sederhana saja. Misalnya plastik wadah shampo, itu alat cetaknya dicetak di sana. Puncak *kegumunan* saya adalah bahwa untuk mencetak alat cetak itu perangkatnya punya tingkat ketelitian sampai sepersepuluh ribu milimeter.

Ada yang sejuta kali lebih besar dari jagat raya, ada yang sejuta kali lebih kecil dari atom—dan teknologi kita kelak mungkin mencapai pengetahuan tentang itu. Kalau sudah sampai ke tingkat sepermiliar atom, mungkin itu yang disebut elemen ruh.

Hati bergetar. Dengan mata telanjang sebenarnya kita ini belum tahu apa-apa. Terhadap materi saja, tingkat ketelitian kita masih rendah: maka betapa mulia para ahli teknik!

Apalagi terhadap yang nonmateri, yang ruhaniah, yang kualitatif, yang spiritual. Kalau manusia bisa mencapai ilmu dengan tingkat ketelitian sepersepuluh ribu milimeter, maka berapa pula tingkat ketelitian Allah!

Hati bergetar. Para ilmuwan teknik itu pasti rajin sembahyang karena selalu menemukan betapa agungnya Allah.

Karena itu, saya tidak boleh *dumeh* kepada orang lain. Tak boleh gampang curiga, menajiskan, mengafirkan, atau mengutuk perilaku

orang lain dan setiap kemunculan gejala dari orang lain. Sebab, tingkat ketelitian kita rendah. Kita sebenarnya tahu amat sangat sedikit. Saya juga tidak boleh mengisap orang lain dalam bentuk yang sesamar apa pun dan dalam takaran yang sekecil apa pun, sebab Allah menghitung setiap perbuatan kita. Allah menghisab setiap butir udara napas kita dengan ketelitian yang maha.[]

Besok Pagi atau Semenit Lagi: Kita Mati

Sejak Pak Kuntowijoyo sakit, saya takut naik pesawat.

Saya memotret kasus sakitnya *wong agung* dari Ngawonggo itu dari pelbagai sudut. Misalnya, *pertama*, Allah melindungi untuk sementara waktu dari virus dosa yang kini sedang mencapai salah satu puncaknya dalam peradaban umat manusia yang mengaku terpandai dan terbaik ini.

Kedua, Allah menyelenggarakan semacam proses *regeniuisasi* atas akal budi beliau. *Ketiga*, Allah mengkritik beliau dan orang-orang di sekitarnya. *Keempat*, Allah menguji kita semua. Ya, kita semua: sahabat-sahabat beliau, handai tolan, masyarakat kaum intelektual, umat Islam, para pemimpin.

Betapa mahalnyanya manusia Kuntowijoyo, dan semestinya tatkala beliau sakit inilah harga termahal beliau memuncak dalam perasaan, cinta, dan kesadaran kita. Beliau figur manusia yang hampir tak punya kejahatan hati, intelektual yang jernih dan jujur, seniman yang bertahan kreatif, sahabat yang tulus, bapak yang tertib, tokoh yang adonan kualitas ketokohan tidak bisa digantikan oleh siapa pun.

Yang jadi pertanyaan: apa yang telah kita lakukan buat beliau? Sanggupkah kita memberi harga dan penghormatan yang sepadan dengan kualitas beliau? Seberapa cemaskah hati kita jika harus kehi-

langan beliau? Berapa rakaat shalat yang kita peruntukkan buat men-doakan kesembuhan beliau? Apakah kita pernah mengerahkan kawan-kawan, jamaah di masjid, anggota umat, segenap masyarakat yang mungkin dipanggil—untuk mohon kepada Allah keafiatan beliau?

Tidak benarkah kita adalah masyarakat yang tak mampu menghargai aset kita sendiri? Tidak benarkah kita adalah umat yang buta terhadap rahmat Allah yang dijelmakan-Nya melalui manusia Kunto? Seberapa mahal harga beliau bagi realitas dan cita-cita keumatan kita, kebangsaan, dan kenegaraan kita? Dan apa yang kita lakukan untuk membuktikan penghargaan, dan cinta kita?

Sejak Pak Kuntowijoyo sakit, saya takut naik pesawat.

Kalau Allah menghendaki—apa pun maksud dan hikmah di balik-nya—Dia bisa mengubah atau mendisfungsikan hanya sehelai saraf amat kecil di otak kita, untuk membuat seluruh tatanan realitas hidup kita menjadi berubah sama sekali. Kalau Allah menghendaki, dibatal-kannya peran hanya sehelai kabel kecil di mesin pesawat, untuk mem-buat seluruh penumpang tumpas, dan hancur lebur.

Sejak Pak Kuntowijoyo sakit, saya takut naik pesawat.

Kalau menghendaki, nanti semenit lagi kita akan kehilangan inti nilai hidup kita, dan besok pagi-pagi buta para tetangga menjumpai kita kuyu terkulai sebagai jasad membeku.

Jika pesawat mengudara, tubuh, jiwa, dan kesadaran saya diseret memasuki seluruh kosmos nilai inti kehidupan saya. Saya menjadi asing dan tidak mengerti bagaimana mungkin orang-orang di sekitar saya yang naik pesawat itu sedemikian tenang. Adakah mereka adalah hamba-hamba Allah yang sedemikian teguh imannya sehingga telah pasrah apa pun yang terjadi?

Kalau demikian, alangkah rendah mutu iman saya, sehingga sedemikian ketakutan menaiki pesawat.

Dalam kosmos kesadaran yang amat ketakutan itu, saya hitung segala dosa saya. Saya kalkulasi seberapa utang saya kepada-Nya. Badan ini, rambut ini, hidung, daki, usus, nyawa, bakat, potensi, akal, perasaan, dan semua yang merupakan suku cadang kehidupan saya,

adalah saham Allah yang berkedudukan sebagai utang saya kepada-Nya.

Apa upaya saya selama ini mencicil pembayaran utang itu? Paling jauh hanyalah kesadaran bahwa sesungguhnya tak ada apa pun yang pernah sungguh-sungguh saya miliki. Juga diri saya sendiri, bukanlah milik saya. Maka betapa fakir, betapa miskin, betapa tak punya, dan *nothing* seluruh keberadaan saya yang pada hakikatnya tiada ini. Karier, prestasi, prestise, penghormatan, nama baik, *income*, upah, popularitas ... hampir seluruhnya adalah utang saya kepada-Nya.

Maka, betapa riang gembira hati saya menyaksikan teman-teman berpikir dan berbuat untuk sahabat-sahabatnya yang dianugerahi sakit, dan kekurangan. Kawan yang lumpuh disapanya. Kawan yang mengerang sakit dijenguknya. Kawan yang membutuhkan dibantunya.

Lebih riang gembira lagi karena kawan-kawan yang menyelenggarakan sejumlah acara solidaritas ini adalah manusia-manusia yang tidak punya *baju* sebagai tokoh, moralis, ulama, cendekiawan, atau apa pun yang megah-megah. Mereka hanya *wong*, yang mewujudkan cintanya kepada sesama *wong*[]

Wadh-dhuheee

Mungkin engkau menyukai pembacaan ayat-ayat Al-Quran, entah karena kekhusyukan religius atau untuk kenikmatan kesenian. Mungkin engkau terbiasa mendengarkan para *qari* menyelenggarakan “pembangunan” menjelang subuh dari corong-corong masjid, dengan rasa terganggu ataupun tergoda.

Mungkin engkau mengakui teknik tilawah Al-Quran Syaikh Abdul Bashit bin Abdus Shamad yang gagah melengking dengan oktaf suara menyaingi Robert Plant. Juga Abdul Aziz Muslim asli Pekalongan yang mampu meniru si Mesir di atas, tetapi membumbuinya dengan cengkok romantik Melayu. Atau, lebih suka Syaikh Ahmad Khusyairi yang bersahaja, yang azannya anggun abadi terdengar di seluruh penjuru bumi. Atau, keluguan *qira’ah* Nur Asiyah Jamil

Apa pendapatmu tentang tilawah Al-Quran kontemporer di negeri ini? Jago-jago *qira’ah* makin banyak dan makin canggih. Teknik vokal dan inovasi lagunya prima. Bahkan, ditimba pula khazanah dari berbagai tradisi adiluhung tilawah Al-Quran, pola “slendro pelog”-nya, logat-logatnya, dialek, ucapan (*makhraj*) yang terdengar menyempal dari pengetahuan tradisional kita dalam hal pembacaan bahasa Arab Al-Quran. Itu suatu *avant-garde* seni modern Indonesia yang justru “menoleh ke belakang”, ke tradisi.

Engkau mendengar suku-suku kata Arab disambung tak seperti yang dulu kita pelajari di surau. Kalimat diulang-ulang sedemikian rupa. Improvisasi estetis lagu-lagu bukan main. Sesudah *bismillah* melengking, telingamu kaget oleh hentakan kata *Wadh-dhuheee!* Engkau biasa mengucapkannya *wadh-dhuhâ*. Pun, *idzâ sajâ*-mu diucapkan *idzaa sajjii*, *wamâ qalâ*-mu dilafalkan *wamaa qalii*

Tak tahu bagaimana dialek *Mishri* itu tiba-tiba menjadi bagian megah dari cita rasa estetis kita. Tak tahu juga apakah ada risiko kerancuan arti dari ucapan yang menyempal.

Hak saya hanyalah mengungkapkan kesan pribadi. Bisa jadi amat subjektif dan amat bisa tidak mengandung kebenaran. Tilawah Al-Quran di dalam arti saya lebih bersangkutan dengan kemesraan batin: para *qari* mengantarkan kita menuju rasa jiwa keilahian, kangen kepada Sang Mahaaneh itu, kepasrahan dan keinginan tenggelam tanpa sisa di dalam-Nya.

Ada pun mendengar banyak tilawah kontemporer itu saya merasa lebih disodori oleh getaran yang lain: eksibisionisme, *show of ability*, pamrih pameran—meskipun hanya Allah juga yang keikhlasan dan kebersahajaan hati serta sikap sujud kepada-Nya, ataukah untuk suatu “demonstrasi sekuler”.

Ini sama sekali bukan penilaian. Ini kesan pribadi.

Tak ada soal membenarkan atau menyalahkan di sini. Yang ada sekadar kekurangkrasanan. Sudah cukup lama kita hidup dalam kebudayaan seni modern yang mengunggulkan etos inovasi, “*ngenden*” terhadap sesuatu yang baru, mengabdikan kepada keunggulan-keunggulan dan pameran-pameran. Itu semua bertumbuh menjadi sikap mental, menjadi semacam “agama”—yakni, dasar-dasar kepribadian yang menyumbangkan pola-pola perilaku dari pernyataan.

Bukan tidak mungkin “agama” kebudayaan seni modern ini masuk ke dalam tradisi-tradisi keagamaan, umpamanya ke dalam sikap mental dalam bertilawah Al-Quran. Seni Hadrah bisa bergeser dari peristiwa keagamaan menjadi lebih merupakan komoditi artistik. Tila-

wah Al-Quran juga bisa “dikapitalisasi” untuk pasar-pasar kepentingan yang—disengaja atau tidak—sebenarnya lebih bersifat “duniawi”.

Seorang *qari*, insya Allah bersih dari kemungkinan meniatkan maksud semacam itu. Tetapi, memang ada yang bernama proses sejarah yang—bukan hanya membangun anatomi kebudayaan dan perubahan yang “tampak”—melainkan yang merasuk “ke dalam darah daging”, di tengah sejarah itu, “tak dilarang” menjadi helai daun yang diterbangkan arah angin.

Asyik benar gejala itu. Perilaku keagamaan bisa diberi “motivasi baru” oleh semangat perlombaan dunia. Sementara tak sedikit hasil karya “kesenian sekuler” yang justru menampakkan pertumbuhan naluri keilahian yang tinggi.

Ngawohi itu namanya. Kalau sudah di utara, manusia merindukan selatan. Kalau sudah dikabulkan di selatan, dia memberontak untuk bisa ke utara. Jauh di luar kesadaran-kesadaran intelektual dan *social engineering*, naluri kemanusiaan menjalani dan menyaksikan “takdir”-nya. Kalau engkau buta, engkau menyesal—“Kenapa aku tak diperkenankan menatap gadis-gadis yang indah.” Dan ketika mata cemerlangmu memandangi estetika lenggak-lenggok perawan, engkau protes, “Kenapa aku tak lahir buta.”[]

Binar-Binar Cahaya MTQ

Hari-hari ini, MTQN XVI menjadi tema penyejuk hati, terutama bagi warga Yogya dan sekitarnya, di sisi berita-berita menggetirkan dari Perang Teluk.

Seperti ayat 82 Surah Al-Isrâ' (disebutkan *syifa' wa rahmah*, penawar dan rahmat) yang merupakan salah satu tema utama MTQ kali ini: terasa betapa konkretnya kehadiran Al-Quran ke dalam batin kita. Peluru-peluru dari Timur Tengah alangkah panasnya! Segala kabar *khauf wa huzn*, yang menguras rasa takut dan kegetiran, dari parang yang tak masuk akal itu, alangkah membakar jiwa kita! Dan beratus saudara-saudari kita dari seluruh penjuru Nusantara datang ke Yogya untuk memberikan penyembuhan batin melalui keindahan dan keikhlasan tilawah mereka.

Bahkan, tahukah Anda mengapa hujan mengguyur Kota Yogya ketika kekhusyukan awal MTQ itu dilaksanakan? Insya Allah itu adalah *iradatullah*; adalah kehendak Tuhan, untuk menyirami batin kita yang terpanggang oleh kegiatan dunia dewasa ini! Dan apabila tumpahan air dari langit itu terus menyejuki kita, bahkan pun apabila pada puncak atau penutupan nanti Allah tetap juga tak bosan-bosannya menaburkan “penyembuhan” bagi kegerahan kita, ayolah kita syukuri. Mungkin agak bertentangan dengan kepentingan pragmatis kita, tetapi

Allah Mahatahu apa yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Tinggal bagaimana kita mengarifinya.

Tangan yang Lain Jangan Tahu

Tidak bisa kita hitung betapa tinggi nilai acara perlombaan tilawah Al-Quran. Ia bermakna sebagai investasi ukhrawi sekaligus bermakna langsung bagi kehidupan kita semua, bagi pertumbuhan bangsa kita, ekonomi kita, dan semua segi yang lain.

Akan tetapi, Islam menuntunkan suatu “moralitas” yang unik bagi orang-orang yang berbuat baik. *“Kalau tangan kananmu berbuat baik,”* bersabda Rasulullah, *“jaga jangan sampai tangan kirimu mengetahuinya.”*

Itu suatu ajaran untuk rendah hati, tawadhu, tidak pamer, tidak takabur, dan semua itu bermuara pada keikhlasan.

Dan sesungguhnya itulah “handikap” atau halangan mengapa dari MTQ ini kita hanya bisa memperoleh informasi-informasi yang formal, seremonial, atau yang serbapermukaan. Seolah-olah dari MTQ ini, kita hanya bisa bertemu dengan realitas slogan, realitas pamflet, basa-basi birokrasi, dan sebangsanya. Padahal, di balik itu sesungguhnya ia menyimpan suatu kualitas makna yang—mau tidak mau—memang harus tidak diumumkan-umumkan, alias ditawaduhkan.

Maka, merupakan kewajiban kita bersamalah untuk peka dan cerdas mengetahui makna yang sebenarnya. Tangan kirimu jangan sampai tahu, biarlah tangan lain yang mengungkapkan amal baik itu, agar si tangan kanan tidak takabur.

Sesungguhnya, Saudara-Saudariku, kewajiban “tangan lain” itulah yang sedang saya jalankan melalui tulisan ini.

Mari, kita berangkat dari sementara asumsi yang memotret aktivitas MTQ ini dalam kategori “kesenian steril” atau—kalau memakai idiom populer dunia kesenian—“seni untuk seni”.

Al-Quran dibaca perlahan, dengan tartil, indah, dan estetikanya digarap sedemikian rupa. Jadi, jelas ini kegiatan kesenian. Para *qari*

dan *qari'ah* ibarat para deklamator atau pembaca puisi yang di alun-alun megah itu membacakan—secara musikal—syair-syair agung tak tertandingi karya Allah Swt. Al-Quran adalah karya puisi *masterpiece* sebagaimana manusia adalah makhluk *masterpiece* yang dilebihkan dari materi tetumbuhan dan hewan.

Asumsi “kesenian steril” itu maksudnya bahwa dalam kegiatan itu Al-Quran hanya sekedar dibaca dan tidak untuk benar-benar dilakukan: Sebab kalau sungguh-sungguh dikerjakan, diaplikasikan, diwujudkan secara konsisten, maka akan sangat terasa benturan dengan berbagai sisi kehidupan konkret kita, baik di bidang sosial budaya, hukum, dan terutama politik.

Pastilah kita bisa memahami kecurigaan positif semacam itu, tetapi kita juga paham bahwa proses sejarah tidaklah sederhana. Mengamalkan Al-Quran tidak sama dengan memasak soto. Al-Quran itu sedemikian luas, komprehensif, detail, tetapi juga holistik, berurusan dengan soal besar dan kecil, terkait dengan bagaimana sebuah sistem pemerintahan dirumuskan hingga bagaimana posisi yang etis waktu buang air kecil. Oleh karena itu, segala upaya pengamalan Al-Quran harus diperhitungkan melalui berbagai faktor yang rumit dalam kehidupan sejarah manusia. Ia harus diramu dan diterjemahkan melalui perhitungan-perhitungan sosiologis, kultural, psikologis, juga politis.

Dan sebenarnya hal itulah yang selama ini tak bisa dipublikasikan oleh komunitas MTQ di Indonesia.

Kita tidak pernah tahu dan tak menduga betapa nilai-nilai Al-Quran diterapkan secara konsisten hampir dalam semua segi aktivitas MTQ. Inisiatif pengadaan MTQ itu sendiri pun diuji melalui proses panjang untuk membereskan apakah MTQ ini murni syiar Islam ataukah berbingkai pragmatis belaka, umpamanya sebagai bentuk mobilisasi kekuatan politik mapan terhadap umat Islam. Apakah subjek MTQ itu pemerintah ataukah kaum Muslim. Apakah Islam dan Al-Quran serta umat Islam berposisi sebagai alat, ataukah sebagai pokok, sumber, muara, dan subjek. Apakah kaum Muslim ber-*maqam* sebagai *fa'il* ataukah *ma'ful bih*.

Dan kita patut bergembira karena ternyata kaum Muslim dan para ulama Islam sungguh-sungguh *fa'il* dalam hal ini. Anda saksikan betapa semaraknya ia, betapa berbinar-binar cahayanya, betapa pawai menjelang pembukaan itu bagai arak-arakan kaum *Fa'izun*, orang-orang menang, yang berduyun-duyun memasuki pintu surga. Anda saksikan sendiri semua yang terlibat dalam kepanitiaan serta semua yang berkaitan dengan MTQ adalah orang-orang yang memang relevan untuk itu dan memang bertujuan untuk membumikan Al-Quran benar-benar. Yang terlibat itu dari ulamanya, pejabat-pejabatnya, intelektualnya, budayawan dan senimannya, hingga pekerja-pekerja teknisnya—sungguh-sungguh mengingatkan *sumringah* keguyuban kaum Anshar Kota Madinah tatkala membantu Rasulullah mendirikan masjid yang di-azani Bilal bin Rabah.

Bacalah buku panduan MTQ, amatilah detik demi detik pelaksanaan MTQ. Anda akan jumpai bahwa ukhuwah Islamiyah bukan saja telah benar-benar memiliki dan menyubjekti kegiatan mulia ini, melainkan bahkan telah mengendalikannya sedemikian rupa untuk suatu proses strategis jangka panjang dari *rahmatan lil'alam*.

Itu salah satu bukti bahwa MTQ bukanlah sekadar “seni untuk seni”. Nilai Al-Quran tidaklah steril dari konsistensi amaliahnya.

Pembebasan dari Syubhat

Kita tentu tidak pernah menyangka betapa setiap detail aktivitas MTQ ini diperhitungkan halal-haram *fiqhiyyah*-nya, Islami atau tidak budaya dan politiknya, bahkan satu lembar tripleks pun diperhitungkan keselamatannya di hadapan Allah—seperti seorang kiai yang memperhitungkan secara adil apakah tusuk gigi yang dia pakai untuk menghilangkan slilit di giginya itu barangkali halal atautakah mencuri seserpih di pagar tetangga.

Itu sekadar tusuk gigi! Jangankan lagi biaya miliaran rupiah yang memungkinkan *haflah* MTQ ini terselenggarakan dengan prima. Tecermin jelas melalui mekanisme kerja MTQ ini tentang makin meningkat-

nya kesadaran umat Islam terhadap halal-haram keluar-masuknya uang. Setiap rupiah yang ada di genggaman panitia, diperhitungkan dulu asal-usulnya, halal-haramnya, *syubhat*-tidaknya, riba ataukah tidak. Bukankah telah tumbuh tradisi di mana selembur tikar plastik yang dihamparkan di masjid pun dihitung historitas halal-haramnya? Kalau umpamanya perusahaan tikar plastik itu dalam praktik sistemik perekonomian kita ternyata berposisi “mematikan” usaha-usaha kecil para pengrajin tikar pandan, maka takmir masjid yang bersangkutan pasti menyikapinya secara Islami. Tidak sebutir debu pun boleh ada di lantai masjid atau di mimbar MTQ yang tidak terjamin halalnya, sebab bisa gugur nilai masjid dan MTQ sebagai wadah sujud kepada Allah.

Dan apabila Anda menyaksikan bahwa gembelar MTQ ini telah dengan lancar menaburkan cahaya ke langit dan bumi, maka percayalah bahwa miliaran rupiah itu telah lolos sensor Al-Quran.

Seluruh anggota panitia, dari yang kerja halus hingga yang kerja kasar, dengan penuh keinsafan menjaga setiap gumpal barang dan setiap lembar rupiah agar tidak berposisi *corrupted*. Para pelaksana MTQ memiliki wawasan yang lebih dari cukup untuk memanfaatkan MTQ buat memberi alternatif, *aswatun hasanah*, memberi keteladanan yang Islami kepada tradisi korupsi yang makin membengkak di banyak kalangan birokrasi dan masyarakat.

Organisasi kerja MTQ bisa merupakan sampel dari birokrasi bersih. Bahkan, saya mendengar setiap kelebihan biaya akan dihimpun untuk mendirikan *Islamic Center* di Yogyakarta.

Dalam jangka panjang, kita bisa menyaksikan aplikasi-aplikasi yang lebih luas dan mendalam dari ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya terbatas pada komunitas MTQ, tetapi lebih luas dari itu: keseluruhan umat Islam di negeri ini. Di buku panduan MTQ, dipilih 19 ayat dari Al-Quran yang seluruhnya menyebut tentang kebenaran kitab terakhir dari Allah itu. Misalnya, Al-Ra’d (13) ayat 1: “... inilah ayat-ayat Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ini adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.”

Ini sebuah pernyataan amat serius, yang akan dinyatakan melalui acuan-acuan ideologis, sistem-sistem kenegaraan, juga melalui reformasi berbagai tatanan formal yang selama ini tidak mungkin mengakomodasikan aspirasi tersebut. Kita bisa bayangkan betapa berat dan kerja keras para penggembala MTQ ini khususnya serta para penggembala umat Islam pada umumnya dalam memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran. Untunglah pemerintah bersikap kooperatif dalam hal ini, bahkan memang jelas memiliki iktikad untuk melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran secara murni dan konsekuen sebagaimana kita mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen pula.[]

“Mengendarai” Al-Quran, Melintasi Tujuh Langit

Naikilah kendaraan ruhani yang bernama Al-Quran.

Engkau tiba di *langit pertama* dengan mendengarkan orang yang membacanya, secara langsung maupun yang terlantunkan dari rekaman masa silam dalam memorimu.

Engkau sampai di *langit kedua* dengan cara membacanya sendiri dengan suaramu atau dalam diammu.

Kemudian, jika engkau membacanya dengan mulutmu sekaligus mendengarkannya dengan telingamu, *langit ketiga*-lah tempatmu. Juga tatkala engkau membacanya dalam kebisuan dan telingamu mendengarkan suara sunyi dari dalam dirimu sendiri itu.

Dan *langit keempat*? Engkau mungkin mendakinya jika memulai tak sekadar membaca atau mendengarkannya, tetapi juga memahaminya.

Selapis langit lagi menyongsong langkahmu tatkala engkau menyadari bahwa pemahaman itu bergerak terus-menerus tanpa pernah berhenti. Pemahaman itu bergerak dan senantiasa bekerja, sehingga yang engkau alami kemudian bukan lagi sekadar pemahaman, melainkan pendalaman. Itulah *langit kelima*.

Ada pun *langit keenam*, pasti engkau mengerti: engkau capai ia dengan mengamalkan, mengerjakan, mewujudkan firman-firman yang

kau baca, dengarkan, pahami, dan alami itu dalam kehidupan nyata. Tetapi, masih adakah lapisan langit yang lebih tinggi dari pengamalan firman?

Itulah *langit ketujuh*. Langit yang engkau huni dengan menyatukan bacaan, “semakan”, pemahaman, pendalaman, dan perwujudan atas firman Al-Quran itu dalam suatu gerak keterkaitan yang terus-menerus sehingga mencapai kematangan dan kejernihan.

Perjalanan ruhaniah menggapai tujuh langit bukanlah pengalaman jiwa asing seperti yang terkesan dari kata “mistik”, “kebatinan”, “tasa-wuf”, atau apa pun.

Itu perjalanan biasa saja, seperti halnya segala pengalaman dan peristiwa serta benda-benda yang kita libati setiap saat dalam kehidupan wajar.

“Langit” itu idiom. Perlambang. Penjelajahan “ke atas” bukan berarti kita sedang naik ke suatu tempat nun jauh di atas sana. Penjelajahan “ke atas” bisa kita ucapkan dengan bahasa sehari-hari: meningkatkan kualitas kemanusiaan, mutu ruhani, kematangan mental, atau penjernihan kepribadian.

“Semakan”, tilawah Al-Quran, tafsir dan studi Al-Quran serta pengamalannya, bisa saja kita jajarkan dengan metode dan mekanisme pendidikan kultural biasa: persekolahan, pengajian, ceramah, lokakarya, pelatihan, praktikum, atau apa pun.

Bedanya “hanya” pada kualitas metodenya itu sendiri, serta pada kenyataan “dogmatis” bahwa membaca dan mendengarkan Al-Quran (apalagi memahami, mendalami, dan mengerjakan) memiliki nilai plus langsung dari Allah sendiri.

Itu semacam “konsesi religius”, bukan transaksi antara Tuhan dan manusia, melainkan inisiatif kemurahan-Nya.

Hadiah Tuhan itu oleh bahasa syariat disebut pahala. Dan, sayangnya, hanya bahasa semacam itulah yang populer dalam peta pemahaman hidup kita.

Orang diimbau baca Al-Quran dengan iming-iming mendapat pahala. Orang “dimobilisasi” secara psikologis untuk menaati rukun agama, untuk shalat, puasa, dan lain-lain dengan argumentasi ekonomis, yakni mendapat pahala. Kita didik untuk hanya mencari laba di hadapan Allah. Seakan-akan ia adalah “Bandar”.

Pahala itu pun kita pahami secara sangat formalistik: kapling tanah di surga, sejumlah bidadari, makanan enak-enak, sungai susu, dan terpenuhinya secara langsung segala keinginan.

Pahala amat jarang kita pahami secara kualitatif. Dalam perspektif ilmu, pahala berarti meluasnya cakrawala pengetahuan dan merekahnya ufuk makrifat. Orang melakukan sembahyang, selama ini, tanpa dimensi keilmuan, tanpa gairah memperluas cakrawala makrifat, tanpa pendalaman maknawi, tanpa kegelisahan untuk mengukur apakah jumlah shalat sepadan dengan peningkatan pencapaian langit-langit ruhani.

Orang melakukan shalat seperti pegawai yang menandatangani buku presensi, seperti serdadu berbaris, atau seperti konsumen yang membayar kredit untuk memperoleh “komoditi” yang bernama surga. Sikap orang-orang bersembahyang terhadap Tuhan sangat kapitalistik. Sedemikian rupa “maniak” pahala—dalam arti ekonomis ini—sehingga yang mereka tuhankan bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan pahala atau laba.

Dalam perspektif akidah dan tauhid, pahala ialah proses mendekatnya manusia ke *maqam* Tuhan dengan antara lain—metode “semakan” Al-Quran, memahaminya, mendalaminya, dan mengamalkannya. Orang yang banyak pahalanya dalam konteks ini identik dengan orang yang makin karib dengan Allah.

Sebab memang yang dicari oleh jiwa manusia bukan pahala, bukan surga, bukan apa pun, melainkan Allah itu sendiri.

Manusia, semua hamba Allah, melakukan perjalanan yang panjang dan sakit, untuk mutu kehidupannya sehingga mendekat kepada-Nya dan mengislam—ini artinya *jumbuh* dengan-Nya. Karena hakikat makh-luk sesungguhnya adalah tiada. Hanya Allah yang sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh telah ada, akan ada, dan kekal ada.

Kehidupan nyata ialah kamar mandi di rumah, dapur, pot bunga, pagar rumah, tetangga, pasar dan politik, supermarket, dan tata ekonomi internasional, apa pun.

Bagaimana manusia menyikapi itu semua dengan metode Qurani, itulah perjalanan menembus tujuh langit yang berujung di telapak kaki-Nya.[]

Manajemen Dakwah

Di Yogya, MTQ diguyur hujan. *Haflah* Al-Quran itu ditaburi air sejuk dari langit. Biaya dua ratus juta untuk upacara dan kesenian *opening ceremony* gagal dipentaskan. Mengapa? Karena harga hujan pasti jauh lebih mahal, dan selaksa butir air yang tercurah dari awan adalah keindahan karya Allah yang tiada taranya. Hujan adalah ayat (*filafaq*) yang lebih estetik dan lebih kuat daripada gemerlap upacara kebudayaan yang paling canggih pun.

Yogya diguyur rahmat Allah. Meskipun belum ada pengumuman resmi, berbagai kalangan telah mendengar kabar mulia yang makin santer bahwa kelebihan biaya MTQ Nasional XVI ini akan dipergunakan untuk membangun Islamic Center.

Pusat Islam. Renungkanlah. Tentu bukan sekadar sebuah gedung. Lebih dari itu: ia tentu salah satu pusat manajemen organisasional keumatan yang berhati iman, berjantung akidah, berotak ide-konsep-konsep strategi, bermata-telinga Al-Quran, berkaki-tangan rekayasa sejarah (politik-ekonomi-hukum-kebudayaan), berperilaku *akhlaqul karimah*, serta berpandangan zuhud menuju hanya Allah. Dan Yogya, insya Allah memang memiliki aset lengkap untuk itu.

Ah, betapa bahagiannya!

‘Kan Anda tahu ada setidaknya dua pengusaha (amat) besar yang dibuka hatinya oleh Allah untuk menguangi MTQ dengan jumlah miliar rupiah sehingga memungkinkan pesta tilawah ini bukan saja sukses dan megah, melainkan juga ada kelebihan biaya. Ada isu bahwa sisa uang itu akan dipakai untuk merestorasi stadion olahraga Mandala Krida, tetapi otak saya masih cukup sehat, sehingga saya lebih percaya kepada kabar *Islamic Center* karena memang relevan.

Sebagian kalangan juga mempertanyakan: apakah dalam realitas struktur perekonomian yang banyak mengandung monopoli dan ketidakadilan seperti sekarang ini tidak perlu dipertanyakan halal-haramnya uang sumbangan tersebut? Setidaknya, apakah tidak *musytabihat*. Tetapi, saya juga mendengar ada sebuah tim yang mengurus soal itu. Dan kalau hari ini MTQ berakhir, tentulah memang *lâ raiba fîh*: tak ada keraguan apa pun tentang masalah itu. Bahkan, jangan kaget kalau seluruh *tartil* manajemen penyelenggaraan betul-betul bersih dari korupsi. Sehelai benang pun dalam MTQ ini dijaga keislamannya. Sebab, kalau tidak, munafik dan munkar namanya.

Itu juga yang membuat saya optimistis tentang *Islamic Center*. Ia bukan sulapan. Lembaga itu bisa realistis dan progresif ke hari depan karena infrastruktur kuantitatif maupun kualitatifnya telah tersedia, sementara selama ini telah pula dilakukan tahap-tahap penyiapannya, langsung maupun tak langsung.

Muhammadiyah, umpamanya, salah satu *soko guru* pembangunan Islam modern, adalah reformer yang tak diragukan lagi. Dan, Yogya sendiri sebagai “kota cendekiawan” punya banyak tokoh intelektual Muslim yang siap untuk itu. Kalau Anda membaca penerbitan Universitas Muhammadiyah Yogya, Anda akan menemukan betapa hampir seluruh ide, aspirasi, gagasan, konsepsi, dan strategi yang diperlukan perjuangan kaum Muslim di tengah peradaban besar menjelang abad ke-21 ini telah tersedia dengan gamblang. Ya, *grand theory*-nya, ya *grand strategy*-nya—tentu saja tanpa *grand slam tennis circuit*.

Jangan lupa pula—minimal di Yogya—telah aktif selama ini pos-pos gerakan sejarah kaum Muslim, yang bermacam-macam bentuk

lembaganya serta model jamaahnya. Meskipun itu semua adalah titik-titik di kanvas zaman yang seolah-olah tidak saling berhubungan, watak natural dari hakikat *ummah* telah dengan sendirinya menyambungkan tali-temali titik-titik itu. Silaturahmi, sambungan tali cinta iman, tali cinta akidah, perjuangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. Wong namanya saja *ummatan wāhidah*. Muslim dengan Muslim itu *kalbunyan yasyuddu ba'dhuhum ba'dhan*. Hatinya, akalanya, langkahnya, tujuannya, *rengket* satu sama lain, baik natural-otomatik maupun berkat rekayasa.

Saya minta maaf bahwa selama ini saya sendiri agak *under estimate* terhadap kesiapan sejarah lembaga-lembaga kepemimpinan Islam. Tampaknya ini gara-gara *kuper* dan *kuin*, kurang pergaulan dan kurang informasi. Saya, kok sampai tidak tahu hal yang begitu penting.

Misalnya, tentang suatu hal sederhana bahwa lembaga-lembaga dakwah Islam telah melakukan pola baru manajemen dakwah, antara lain komputerisasi tablig. Maksudnya, bukan dakwah melalui saluran-saluran komputer, melainkan mendayagunakan peralatan modern untuk mengorganisasikan keperluan-keperluan dakwah.

Dalam disket-disket telah tersimpan data lengkap tentang mubalig-mubaligh dan keadaan umat Islam pada semua aspeknya. Berapa jumlah mubalig di satu kabupaten, umpamanya. Siapa namanya, dari mana asal-usulnya, seberapa tingkat ilmunya, apa spesialisasinya, untuk tema apa cocoknya, bagaimana daya komunikasinya, atau pada dataran umat yang mana sebaiknya dia diterjunkan. Secara konstan dicatat pula skedul setiap mubalig, sehingga semua pihak yang berkepentingan mendatangkannya tinggal menghubungi Pusat Distributor Mubalig. Masjid-masjid dan organisasi-organisasi Islam tak perlu lari-lari ke sana-kemari seperti anak hilang dan berspekulasi.

Disediakan pula manajemen dalam skala yang lebih luas dan kualitatif. Setiap acara dakwah diperhitungkan bagaimana bisa efektif secara ide dan tidak mengulang-ulang hal yang sama selama berpuluh-puluh tahun. Pusat Manajemen Dakwah memiliki data tentang umat Islam di mana pun di negeri ini. Oh, yang di Kecamatan Anu itu perlu

guru *alif-ba-ta*. Yang di Pedukuhan X butuh santunan ekonomi. Yang di Dusun Z minta dukungan soal penggusuran. Alhasil, telah diteliti dan didata seluruh segi kehidupan umat Islam sehingga pola dan orientasi dakwah bisa ditentukan.

Penentuan langkah-langkah dakwah itu didasarkan pada *hisab historisitas* yang mendasar, komprehensif, dan sungguh-sungguh melangkah ke depan. Dengan demikian, seluruh aset tablig bisa bermanfaat secara maksimal, akurat penempatannya, relevan keilmuannya, futuristik langkah sejarahnya, juga tidak kebesaran atau kekecilan baju yang kita sandangkan padanya.

Kalau *Islamic Center* itu nanti bisa merupakan wadah penyatuan manajerial (tidak harus organisasional) dari heterogenitas aliran dan warna baju kaum Muslim, betapa indahnyanya. Saya yakin itu. Lha, *wong* integrasi nasional antarkelompok sosial se-Indonesia saja sudah tercapai. Bhinneka-nya Indonesia saja sudah ika. Tentulah *wahidah*-nya umat Islam sudah lebih dulu pula tergapai.

Bayangkanlah *Islamic Center*. Dengan laboratorium ilmunya, dari filsafat hingga fiqih, dari pertanian hingga tawasuf. Dengan *workshop da'wah bilhal*-nya, dari mengantisipasi kesenian hingga dukun, dari kemiskinan sampai kediktatoran politik. Serta segala kabar mulia lainnya, yang Anda silakan memasukinya sendiri. Abad ke-21 memang *bejo*. Kecuali, kalau tidak.[]

Audio-Visual, Sami‘ Bashir

Sebagian dari Anda barangkali masih ingat di sekitar waktu MTQ XVI, saya menulis tentang optimisme Majelis Kebudayaan (Muhammadiyah) serta kabar tentang *Islamic Center*, yang didirikan dengan biaya kelebihan MTQ.

Kita tentunya lantas menggagas skala fasilitas dan pembiayaan program yang diperlukan lebih lanjut. Umat Islam punya cukup banyak pengusaha-pengusaha amat kaya, juga berhubungan dengan berbagai macam lembaga dana—dalam negeri maupun luar negeri—serta bantuan yang pasti datang pula dari pemerintah. Dari perhitungan itu mestinya tidak terlalu sukar memperoleh kemungkinan pengadaan apa pun yang minimal diperlukan oleh sebuah *Islamic Center*.

Katakanlah Pusat Islam adalah suatu laboratorium sejarah milik umat Islam yang bukan saja bermaksud mengantisipasi perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat, melainkan juga menyubjeki hari depannya, sebisa mungkin di segala bidang.

Ambil satu *angle*: bahwa Pusat Islam salah satunya berfungsi sebagai Pusat Dakwah.

Dakwah itu, denotatif, bermakna panggilan. Secara konotatif, ia dikhususkan sebagai panggilan untuk menuju ajaran tauhid.

Propaganda-idiom politik itu juga bermakna panggilan. Dalam mekanisme industri, panggilan itu disebut iklan atau *advertisement*. Hanya saja, dakwah dalam politik memanggil orang ke dalam lingkaran kekuasaan suatu kelompok dan dakwah dalam industri memanggil orang untuk menjadi konsumen barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan.

Semuanya panggilan. Semuanya memanggil. Siaran teve itu memanggil. Pentas nyanyi di layar kaca itu memanggil. Siaran pedesaan juga memanggil. Berita-berita juga memanggil. Koran-koran memanggil. Poster-poster memanggil. Kaset-kaset memanggil. Apa saja memanggil ke agamanya masing-masing.

Bisakah Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, masjid-masjid, lembaga-lembaga Islam, jamaah-jamaah, dan lain-lain melawan iklan-iklan, siaran teve, musik *rock*, rok mini, *gengsot* dangdut, kaset Cinderella, taktik psikologi pemberitaan, komik, buku-buku propaganda ideologi rahasia, serta seribu “dakwah” modern lain yang dalam banyak hal “mengancam” panggilan ke arah tauhid?

Jawabannya: belum.

Maka, tidak heran kalau para pemimpin kita dengan penuh keinsafan beriktikad mendirikan Islamic Center di Yogya, yang bukan saja kota budaya dan kota intelektual, melainkan juga kota Muhammadiyah, kota dakwah kampus, dan sebagainya.

Anda pasti juga tahu di Yogya ada studio-visual “Pusat Kateketik” yang juga secara efektif memproduksi panggilan-panggilan semacam itu. Bukti bahwa lembaga-lembaga keagamaan sadar mengantisipasi “dakwah”-nya Empire-21, Regent, Golden-Galaxy, Supermarket, Kontes Aurat Indah, serta segala panggilan sekuler lainnya.

Maka, saya pun sangat paham kalau Muhammadiyah serta lembaga-lembaga Islam lainnya, terutama para pemimpin Islam di kota ini, merasa “cemburu” dan malu kalau sampai tidak punya studio semacam itu. Dan memang itulah salah satu dimensi gerak dari *Islamic Center*, yang pasti ditulangpungungi oleh Majelis Kebudayaan serta para pakar yang bertebaran di sini.

Studio audio-visual. *Sami' bashir*. Mendengar dan melihat. Masyarakat dan umat tiap hari mendengar dan melihat. Siapa yang menentukan hal-hal yang didengar dan dilihat oleh umat?

Itulah yang coba dijawab oleh *Islamic Center*. Bahkan, kelak saya tidak kaget mendengar mereka punya siaran teve sendiri yang memanggil-manggil orang ke rumah Allah.

Saya yakin Anda semua akan melakukan sujud syukur jika mendengar berita mulia seperti itu.[]

Dari Majelis Kebudayaan ke MTQ ke Islamic Center

A da beribu alasan positif untuk bersyukur bagi kita semua bahwa kelebihan biaya penyelenggaraan MTQ XVI ini—menurut beberapa sumber—akan digunakan untuk mendirikan Islamic Center.

Sesudah kita bergembira Muhammadiyah melahirkan Majelis Kebudayaan, kini segala sesuatunya menjadi semakin jelas bahwa umat Islam bersungguh-sungguh beriktikad mengontribusikan aspirasi dan wadah untuk—katakanlah—suatu *Lepas Landas Kultural* atau *Lepas Landas Religius*. Reintegrasi politis kultural kaum Muslim ke dalam skala nasionalitas Indonesia hari depan semakin menemukan bentuknya yang konkret tetapi arif.

Beberapa kalangan masyarakat Yogya memang mengkhawatirkan sesuatu: “Muktamar NU di Yogya, Muktamar Muhammadiyah di Yogya, dan kini MTQ Nasional juga di Yogya. Tampaknya ada semacam *proyek Islamisasi Yogya ...*”, demikian *rerasanan* mereka.

Seandainya benar demikian, itu bukanlah sesuatu yang perlu dicemaskan, melainkan justru layak disyukuri. Sebab, Islamisasi berarti penaburan *rahmatan lil ‘âlamîn*, penyebaran kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian bagi seluruh penghuni alam. Persis seperti kita juga tidak pernah mencemaskan Kristenisasi, Buddhaisasi, atau Hinduisasi di Indonesia, karena semua inisiatif dari para penghuni hete-

rogenitas keagamaan bangsa kita senantiasa berprinsip menyelamatkan satu sama lain. Biarlah orang-orang yang tak paham Pancasila mengigau-igau dan melontarkan kata-kata SARA, tanpa pernah punya kesanggupan dan kemauan untuk memahami betapa bangsa dan negara kita memiliki pola yang spesifik untuk memodifikasikan kerukunan dan kekompakan. Jangankan manusianya, presidennya, camatnya, intelektual, atau ulamanya: sedangkan TVRI yang hanya barang elektronik itu pun mampu bernyanyi setiap hari dan malam—“Te-ve-er-i menjamin kesatuan dan persatuan ...!” Menjamin. Gamblang ‘kan? Di dalam Pancasila, benda-benda pun sanggup memberi asuransi politik dan kebudayaan. Terlebih lagi manusianya. Apalagi telah tercapai pula kondisi “manusia Indonesia yang seutuhnya”.

Kerja Sama Kohesif-Otomatik

Proses Islamisasi yang seandainya benar sedang gencar dilakukan di Yogya tidaklah identik dengan “memasukkan orang ke dalam agama Islam”. Ada semacam etik-pergaulan antar-agama yang tecermin—misalnya—dari banyak pernyataan tokoh-tokoh Muhammadiyah selama ini, bahwa suatu kelompok keagamaan tidak akan mengganggu orang lain yang telah memeluk suatu agama. Selain itu, disepakati pula bahwa gerakan-gerakan Islam tidak terutama berorientasi pada penyematan emblem Islam di pakaian seseorang. Bukan *ajsamukum* bukan *shuwarukum*. Bukan bagaimana “wadakmu”, bukan bagaimana “rupamu”. Artinya, orientasi yang terpenting adalah bagaimana memproses dan merekayasa mekanisme sosial, politik, hukum, dan kebudayaan sehingga berwatak Islami.

Perilaku Islamisasi khas kultur Yogya bahkan mengupayakan metode-metode yang khas untuk menghindarkan bias formalisme keislaman, sebab pemimpin-pemimpin Islam di wilayah ini telah lama melakukan *deformalisasi* secara sadar. Sampai hal yang sekecil-kecilnya diperhitungkan bagaimana upaya Islamisasi tidak lantas menghasilkan penambahan jumlah “Muslim KTP”. Sampai-sampai soal syiar sehari-

hari lewat masjid pun diperhitungkan demikian. Umpamanya, banyak lantunan azan lewat corong masjid yang tampaknya sengaja dibuat “kurang enak didengar” atau “direndahkan mutu artistiknya” sedemikian rupa sehingga kalau orang tertarik kepada Islam bukanlah karena faktor-faktor wadak seperti itu, melainkan sungguh-sungguh karena pertemuan agungnya dengan hakikat nilai Islam.

Pada sisi lain, para pemimpin Islam mungkin banyak diam-diam dikecam orang karena tidak cukup menunjukkan upaya untuk mempertahankan umatnya agar—misalnya—tidak pindah agama hanya karena kemiskinan dan kebodohan. Padahal, para pengecam itu tidak tahu bahwa itu sesungguhnya proses *kualifikasi*, proses untuk menyaring siapa yang sungguh berkualitas kemuslimannya. Strategi Islamisasi modern bagi para pemimpin itu bisa diterangkan melalui idiom *dekuantitasasi*, yakni membiarkan jumlah berkurang, asal yang tetap tinggal itu kualitasnya dikembangkan. Jadi semacam *furqan*, pembeda. Antara yang sungguh-sungguh Muslim (kualitatif) dan yang setengah Muslim (kuantitatif). Yang terakhir itu, beremblem Muslim atau tidak, sebenarnya sama saja.

Konteks penyaringan itulah salah satu alasan positif kita untuk bersyukur apa yang disebut oleh judul tulisan ini: *Dari Majelis Kebudayaan ke MTQ ke Islamic Center*.

Secara institusional, antara Majelis Kebudayaan Muhammadiyah dengan lembaga MTQ dan pendirian Islamic Center memang tidak terkait langsung. Tetapi, itu ‘kan sekadar masalah birokrasi-administrasi. Bagi mereka yang tahu bahwa jaringan syiar Islam kini telah memasuki tahap “kohesif-otomatik”, insya Allah mengerti bahwa meskipun di Indonesia ini umat Islam terbagi-bagi dalam sangat banyak lembaga, sangat banyak aliran, atau sangat ragam *galengan-galengan* sosiologisnya, tetapi sebenarnya antara satu dan lainnya terdapat mekanisme kerja sama yang terkait satu sama lain secara kompak, kohesif, dan itu berlangsung otomatis. Namanya juga *ummatan wahidah*. Biar ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada DDII, ada MDI, atau apa pun—tetapi di antara mereka terdapat suatu kepekaan strategis

dan kesadaran aspiratif untuk senantiasa berkooperasi satu sama lain.

Pembaruan Strategi dan Komputerisasi Tablig

Memang banyak di antara kaum Muslim sendiri yang tidak atau belum mengetahui kenyataan-kenyataan tertentu, yang membuat surat kabar tentang Majelis Kebudayaan atau Pusat Islam tidak serta-merta menjadi entakan berita yang mengejutkan dan menggembirakan.

Misalnya, lembaga-lembaga dakwah Islam—baik itu Majelis Tabligh, Institut Dakwah Islam, Bank Da'i, dan lain-lain—sejauh ini telah menerapkan profesionalisasi dan efektivisasi mekanisme dakwah, umpamanya dengan komputerisasi tablig serta berbagai macam upaya memperbarui strategi Islamisasi.

Yang dimaksud profesionalisasi tentu saja tidak dalam konteks finansial-kapitalistik, tetapi dalam metode kerjanya. Setiap lembaga dakwah memiliki disket-disket yang berisi segala macam data yang diperlukan oleh dakwah di kalangan umat Islam di mana pun.

Semua mubalig yang ada telah diteliti, dirumuskan, dan di-*saved* dalam komputer. Siapa saja namanya, asal-usulnya, bidang istimewa keilmuannya, *full time* atau *part time* sebagai mubalig, cocok untuk bidang fiqih ataukah filsafat agama dan seterusnya, kesanggupan komunikasinya, kecenderungan sikap sosial-politis-nya, “jam terbang”-nya, pakaian kesukaannya, kecenderungan psikologisnya, penguasaannya terhadap *kitab kuning* dan ilmu-ilmu modern, wawasannya tentang persoalan-persoalan kontemporer, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang menyangkut mubalig—kecuali mungkin hal-hal yang terlalu *privat*—telah didata secara rapi.

Juga telah diteliti, dirumuskan, dan disimpan dalam disket, data-data tentang umat Islam. Misalnya, dalam satu provinsi: di Kecamatan X apa yang terutama diperlukan oleh komunitas Muslim di sana, soal buta huruf Al-Quran, soal akhlak, atau kemiskinan. Bagaimana posisinya dalam skala kultur, bagaimana posisi ekonomisnya, atau

kerawanan apa saja yang dikandungnya. “Disket dakwah” ini mengerti persis “tulang daging” dan “rempelo ati” umatnya. Termasuk kondisi jamaah dan takmir masjid di sini dan di sana: apa problem utamanya, apa kendala regenerasinya, apa handikap pembaruannya, bagaimana solidaritas sosial-ekonomisnya, serta segala macam yang diperlukan oleh skala strategi mikro suatu jamaah maupun skala makro strategi umat Islam dan masyarakat luas dalam rangka membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan aman.

Dengan demikian, jika Anda adalah pengurus suatu jamaah, anggota takmir masjid atau warga suatu lembaga yang membutuhkan juru dakwah atau apa pun yang bersangkutan dengan tahap-tahap rekayasa strategis tablig: Anda tinggal datang ke lembaga-lembaga dakwah itu. Anda tinggal membuka pintu lembaga informasi dakwah itu. Dengan demikian, Anda tidak perlu menyebarkan anggota-anggota pengurus menelusup kampung-kampung mencari juru dakwah secara serampangan seperti anak yatim liar yang mencari bapaknya yang belum tentu ada di tempat yang dia tuju. Anda bisa memperoleh data tentang mubalig ini pada tanggal anu sudah di-*booking* atau belum. Bahkan, dalam hamparan pendataan komputer Anda bisa memikirkan kembali siapa yang paling tepat untuk diundang, bahkan bisa dipertimbangkan ulang pula tema apa sebaiknya yang dijadikan topik dakwah. Lebih dari itu tersedia pula rumus-rumus strategis bagaimana mekanisme dakwah ditingkatkan, dikembangkan, apa saja bentuk *da'wah bilhal* yang mulai bisa diterapkan.

Anda barangkali tidak pernah menyangka bahwa dalam disket itu telah pula dipaparkan peta sumber dana dalam dan luar negeri, siapa pengurus Muslim yang akomodatif terhadap kegiatan dakwah. Pokoknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dakwah dan syiar Islam yang tak cukup kalau saya *jelentrehkan* di sini.

Magnet Islamic Center

Sekarang, kita bisa berpikir: kalau lembaga-lembaga dakwah konvensional saja telah menyediakan metode gerak yang semacam itu, maka kecanggihan yang lebih prima insya Allah akan kita dengar dilaksanakan oleh Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, dan apalagi oleh Pusat Islam yang segera didirikan sesudah MTQ XVI usai.

Majelis Kebudayaan akan dengan sendirinya tanggap bagaimana menciptakan iklim agar seluruh aset kultur kaum Muslim sungguh-sungguh bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan Islam dan kebudayaan nasional. Ia bukan saja siap dengan landasan idealnya (sumber Quraninya, beratus-ratus ayat Allah tentang kebudayaan dalam arti luas maupun kesenian dalam arti eksklusif, termasuk bagi Al-Quran sebagai metodologi menjelaskan dialektika antara proses-proses bernegara, politik, birokrasi, warisan kultur, dan seterusnya, bisa diantisipasi secara pandai dan arif). Lebih dari itu, majelis kebudayaan juga mengonsep strategi dan praksisnya: untuk mana diperlukan wawasan tentang peta kebudayaan, *katuranggan sejarah* watak-watak perubahan dalam realitas manusia dan masyarakat, pemanfaatan secara tepat semua modal kultural di tubuh kaum Muslim.

Dalam hal ini, kita tidak sekadar berpikir tentang akan makin semarak syiar Islam melalui penulisan sastra atau pementasan drama dan musik yang “muhammadiyah” sifatnya. Lebih dari itu, kita akan menyaksikan suatu pola akulturasi nilai-nilai budaya di mana yang disebut panggung bukan lagi gedung pertunjukan, melainkan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Yogya akan bukan sekadar merupakan “kota kebudayaan”, melainkan juga “kota kebudayaan Islam”, atau setidaknya “kota kebudayaan Muhammadiyah”.

Dan aktivitas tersebut akan dengan sendirinya berposisi seperti *tumbu nemu tutup* dengan lembaga Islamic Center yang segera akan menjadi kebanggaan Yogya. Sebuah Pusat Islam yang akan memagneti kita semua dengan laboratorium ilmunya, laboratorium keseniannya,

laboratorium zakat kontemporeranya, laboratorium kenegarawanan-nya, laboratorium ijtihadnya, dan seterusnya.

Saya yakin Anda pun berperasaan seperti saya: sangat berdebar-debar menunggu[]

Di Mana Pusat Bumi? Di Yogya, Eh Jombang

Larut malam, di warung tepi jalan sebelah timur gedung PP Muhammadiyah Yogya, terdengar perdebatan seru dari sekelompok anak-anak muda. Tampaknya kesibukan mempersiapkan Muktamar Muhammadiyah membuat gedung kuno itu memancarkan vibrasi tertentu yang memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

“Kebangkitan Islam harus dimulai dari Indonesia,” berkata salah seorang. “Di Indonesia itu pun harus di Jawa, dan di Pulau Jawa itu harus di Yogya”

“Di Yogya itu pun harus di Jalan K.H. A. Dahlan!” sambung seseorang yang lain yang rupanya fanatik memeluk “agama” Muhammadiyah.

“Jalan K.H. A. Dahlan yang mana dulu!” suara lainnya lagi, “belum tentu bagian PP Muhammadiyah. Bisa di kantor PWI, bisa di Toko Roma, atau jangan-jangan malah di warung kita ini!”

“Jangan GR,” sahut orang terakhir, “Yogya boleh menjadi wadah utama yang paling strategis dari embrio hari depan keindonesiaan atau Islam—dan karena itulah Yogya paling diserbu oleh pasukan-pasukan non-Islam—tetapi ada satu syarat mutlak.”

“Apa itu?” tanya lainnya bersama-sama.

“Segala aktivitas di Yogya itu *isen*-nya harus dari Jombang.”

“Lhadalah”

“Terserah Jombang bagian mana. Boleh Diwek, boleh Tebuireng, boleh Mojowarno, boleh Menturo.”

Mereka kemudian mempertarungkan argumentasi. Si Jawa Yogya mengungkap ilmu kosmogeografi, orkestrasi harmonis air samudra yang melimpah, mutiara kepulauan, atmosfer tropis khas Nusantara, menciptakan langgam musik sejarah di mana Islam menemukan bentuk budayanya sebagai gerak *mamayu hayuning bawana*. “Khomeini diperlukan sebagai pasukan garis depan penyapu ranjau, tetapi Yogyalah yang membangun pilar-pilar kebangkitan di atas lahan baru itu sesudahnya,” katanya.

“Lho! NU sengaja bermuktamar di Yogya untuk menyindir betapa Muhammdiyah adalah organisasi reformer yang kini justru sangat membutuhkan reformasi,” bantah si Jawa Jombang. Dia menguraikan soal kepahlawanan 10 November serta berbagai rahasia sejarah yang sesungguhnya berpingkal di Jombang.

Debat terus berkepanjangan, dan lama-lama menjadi jelas bahwa soal utamanya bukanlah kebangkitan Islam, melainkan sentrisisme khas manusia Jawa. Di mana pusat dunia? Orang Yogya menjawab: di bilik Hamengkubuwono. Kalau tidak bagaimana jagat raya dapat dipangku oleh beliau. Orang Solo bilang di Pakubuwanan: jelas bahwa paku harus ditancapkan di pusat keseimbangan. Orang Gunung Kawi bilang di Gunung Kawi, orang Tengger bilang di Tengger, orang Samin bilang di Samin, dan orang Jombang bilang di *atom* Jombang yang dikelilingi oleh cairan Mojowarno, Tebuireng, Diwek, Denanyar, Ploso, Menturo, yaitu tempat lahirnya Gajah Mada.

Padahal, pusat kebulatan dunia adalah di segala titik atau tak sebuah titik pun.

Orang Eropa sebaliknya; mempelajari dan meniru GR alias sentrisisme semacam itu untuk menambah kemantapan hati dan memacu kreativitas. Bilanglah kebangkitan Islam harus dirintis dari Eropa.

Pertama karena cahaya Islam akan mengetuk manusia sejarah modern melalui invensi iptek, dan orang Eropalah *ahli qira’ah* para pem-

baca ayat Allah di alam yang utama, meskipun belum mengaplikasikan teknologinya *bismi rabbi*, belum mendayagunakan teknologinya sungguh-sungguh untuk kerangka peradaban yang menyembah Allah. Tetapi, para pakar ilmu alam di negeri-negeri itu yang akan datang dengan lentera Islam yang *wajilat qulubuhum* yang jiwa mereka tergetar tanpa bisa terus-menerus menipu diri lagi.

Kedua, kasus Salman Rushdie menggeser perpolitikan Inggris ke peta perimbangan baru di mana kekuatan Muslimin harus dirayu untuk berkoalisi dengan oposan tertentu. Guncangan rontoknya komunisme yang menggegagempitakan bulan-bulan terakhir ini, terutama di Jerman membuat pergerakan Islam-Eropa di Koln dan tempat-tempat laut menjadi semakin relevan dan semakin dibutuhkan.

Untuk menjadi kebangkitan, Islam memang sebaiknya diterangkan *rahmah lil'alam*nya oleh pakar-pakar ilmu dari Eropa, supaya bergengsi dan dianggap kredibel. Kalau orang Jombang dan Yogya, *entah diketawain*, seperti orang miskin memenangkan kemiskinan; yang sah menerangkan kemiskinan adalah sarjana kemiskinan.[]

Alat Pendingin dan Pemanas

Oplah kipas melonjak selama hari-hari Lebaran. Sebab agar tak terlampau *sumuk* ketika berjejal-jejal di kendaraan mudik yang *overweight*, Anda perlu beli kipas.

Dalam kebudayaan tradisional maupun modern, kipas berfungsi sebagai alat pendingin.

Namun, kalau membakar sate, Anda juga pakai kipas, agar bara api itu lebih tinggi daya bakarnya. Jadi, ternyata kipas juga berfungsi sebagai alat pemanas. Ia *air conditioner*, juga *heater*.

Yang pasti: kipas itu besar jasanya kepada manusia.

Kalau Pak Pamong *ngerem-ngerem* rakyatnya, “Hendaknya kalian bersabar dengan tahap-tahap pencapaian pembangunan,” itu beliau mengipasi gerah ekonomi rakyatnya supaya agak sejuk. Atau, pada saat lain beliau “membakar sate”: “Hendaknya rakyat meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan!” Itu upaya membakar semangat, memanaskan gairah pembangunan, menghangatkan progresi darah perjuangan untuk menyukseskan Pelita-Pelita.

Seluruh komponen masyarakat, terutama para pemuka, sebisa mungkin menggerak-gerakkan pengipasan demi kemajuan pembangunan.

Daya guna “Kipas Nasional” itu di-*support* oleh sistem dan metode kipas yang lain. Media massa ikut mengipasi pemanasan semangat atau terkadang pendinginan psikologis dari sesak sosial ekonomi atau pengap sosial politik.

Para mubalig, ulama, pastor, khutbah-khutbah, pidato, pengajian, seminar, atau omong sehari-hari, sesungguhnya merupakan mekanisme kipas-mengipasi agar diperoleh kenyamanan atmosfer sosial.

Dulu, Nabi Muhammad adalah seorang tukang kipas yang luar biasa. Selama berlangsung “sekatenan” di sekitar Ka’bah dari tahun ke tahun—sementara orang lain baca sajak, menawarkan dagangan atau *teler* menari-nari—Rasulullah yang berwajah ganteng dan bertubuh atletis itu beredar dari kerumunan manusia ke kerumunan yang lain untuk mengipasi mereka dengan informasi tauhid.

Embusan angin dari kipas tauhid Muhammad itu menyebar makin luas dan menenteramkan menyejukkan hati makin banyak orang. Sampai-sampai *wong cilik* seperti Bilal bin Rabah, berkat kesejukan tauhid itu, berani melawan Umayyah, juragannya. Bilal bersedia disiksa atau diapakan saja demi mempertahankan tanah “kehidupan”-nya.

“Tradisi kipas” itu hidup subur selama keberlangsungan komunitas Islam pada zaman Nabi dan Khulafa Rasyidin. “Kipas” itu memiliki substansi: mengemukakan apa yang benar, mengajak orang untuk membela kebenaran dan melawan kemungkaran, *asyiddâ’u ‘alal kuffâr; ruhamâ’u bainahum*, melawan orang-orang yang mengingkari kebenaran, berkasih-kasihan sesama kaum tertindas, *mustadh’afîn*.

Khalifah Umar bin Khaththab misalnya, sebagai pemimpin nomor satu, menyediakan peluang amat luas bagi “kipas kebenaran”. Beliau bersedia dikritik di depan umum, kapan saja dan di mana saja. Itu bukan soal berat bagi beliau, sebab beliau ikhlas, tak punya pamrih politik atau ekonomi, sehingga tak perlu mempertahankan ketidakbe-naran dengan memanfaatkan para prajurit kecil yang sebenarnya tak memperoleh apa-apa dari tugas yang memedihkan hatinya itu.

Bagi Abu Jahal, yang namanya berarti “bapak kebodohan”, kipas Muhammad itu dilihat sebagai hasutan. Padahal, *hasad* yang merupa-

kan akar kata “hasut”, memiliki konotasi negatif. Orang yang mem-bisiki orang lain agar mempertahankan kebenaran dan mulia kedudukannya. Asalkan dia pakai cara yang *hasanah* serta dengan hikmah.

Dalam segala sejarah, selalu ada “Bilal-Bilal” yang jumlahnya sangat banyak. Di Abad Pertengahan Eropa, banyak sekali Bilal. Di Afrika, Amerika Latin, Suriname, Rusia, Kerajaan Singosari dan Majapahit, dan lain-lain, banyak sekali Bilal-Bilal. Apabila muncul “Muhammad-Muhammad”, biasanya para “Abu Jahal” segera memobilisasikan gerakan antikipas.

Ini keanehan. Sebab dengan begitu kehidupan jadi semakin *sumpeg* dan gerah. Lha, wong *sumpeg*, kok senang. Sungguh itu tak sesuai dengan Pancasila.[]

Ayat yang Mengurusi Wanita

Kaum Muslim pada umumnya atau para pengamat dan penafsir Al-Quran pada khususnya memiliki kecenderungan untuk menganggap bahwa ayat-ayat yang bersangkutan dengan urusan wanita adalah yang memuat sebutan atau indikator formal, misalnya lewat kata *an-nisâ* atau *az-zâujah*. Sehingga rujukan yang dipakai untuk mencari landasan nilai atau hukum mengenai wanita kebanyakan hanyalah ayat-ayat semacam itu.

Dalam pandangan saya, kecenderungan itu sesungguhnya merupakan akibat pengondisian kultural dari model kemasyarakatan patri-monial; atau dengan kata lain, Al-Quran sendiri sebenarnya tidak memberi tuntutan yang sempit dan reduktif semacam itu. Maksud saya, dari kecenderungan itu, kita telah melakukan ketidakadilan dengan memandang wanita hanya sebagai wanita, dan kurang atau tidak sebagai manusia.

Ketika kita mendengar ayat Allah “*Yâ ayyuhan-nâs ...*” (Wahai manusia!) (yakni, setiap Allah mengawali anjuran nilai atau hukum kepadanya)—seperti juga *Yâ ayyuhalladzîna âmanû ...*” (Wahai orang-orang yang beriman!), kita tidak sepenuhnya menangkap bahwa seruan itu diperuntukkan sekaligus untuk lelaki dan wanita dalam posisi yang sama.

Juga umpamanya ayat *Kullukum râ'in kullu râ'in mas'ûlun 'an râ'iy-yatihi* (Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tanggung jawabnya sebagai pemimpin) belum pernah sungguh-sungguh kita pahami sebagai landasan sikap individu dan sungguh-sungguh kita pahami sebagai landasan sikap individu dan sikap sosial yang berlaku persis sama baik bagi lelaki maupun bagi wanita. Dan kita tahu kata-kata Allah itu sangat tegas dan langsung memberi pedoman mendasar bagi rumusan kedudukan, tugas, hak, dan kewajiban baik lelaki maupun wanita dalam mengelola kehidupan mereka.

Tentu kita tidak memberi arti *kullukum* sebagai hanya dimaksudkan bagi lelaki, dan karena Allah tak melanjutkannya dengan *wa kullukun-na*, maka kita memaknakan bahwa pemimpin hanyalah lelaki, sementara wanita tidak. *Kum* di situ mencakup lelaki maupun wanita.

Dengan demikian, kalau Allah saja sudah bilang bahwa baik lelaki maupun wanita itu masing-masing adalah pemimpin, maka jelaslah bagi kita rumus dasar tentang posisi (*maqam*) dan tugas, hak, kewajiban (*kekhalifahan*) wanita dalam pergaulan, dan seterusnya.

Dengan demikian pula, maka tampaknya kita wajib mempertanyakan kembali pandangan-pandangan baku mengenai—misalnya—bahwa “lelaki adalah pemimpin atas wanita”, bahwa “dalam rumah tangga otoritas tertinggi dipegang oleh suami”, atau bahwa “istri wajib mematuhi suami”—apalagi jika “otoritas tertinggi dipegang oleh suami”, atau bahwa “istri wajib mematuhi suami”—apalagi otoritas tunggal itu dipakai untuk eksploitasi, untuk meletakkan wanita sebagai budak yang taat tanpa *reserve*.

Kalau, toh kita mempertahankan bahwa istri wajib taat kepada suami, sementara suami boleh tidak taat kepada istri: kita tetap harus memedomankan segala hal yang harus dipatuhi itu pada berbagai nilai kemanusiaan, pergaulan, hubungan sosial, serta makna-makna kehidupan lain yang secara lengkap telah dituturkan Al-Quran. Atau dengan kata lain, paling jauh kita hanya bisa menganggap bahwa otoritas suami harus dipatuhi oleh istri itu sekadar merupakan “pola manajemen rumah tangga”, tetapi keseluruhan mekanisme kualitatif-

nya tetap berada di bawah pedoman kebenaran keislaman yang menyangkut takwa, keadilan, cinta kasih, keseimbangan, dan seterusnya. Artinya, otoritas (manajemen) itu tetap wajib mematuhi nilai-nilai sejati kebenaran Islam yang universal, yang mengatasi secara adil baik lelaki maupun wanita.

Secara khusus ingin saya mengemukakan ketidakmengertian (bukan sanggahan) saya terhadap beberapa kecenderungan tafsir Al-Quran, khusus terhadap ayat-ayat yang secara langsung menyebut kasus wanita.

Umpamanya Surah Al-Nisâ' ayat 19: *“Hai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”*

Dalam sebuah penerbitan resmi Al-Quran dan Terjemahannya, bagian kalimat *“... kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata ...”* itu diberi catatan kaki dengan maksud: membangkang perintah suami atau menyakiti hatinya.

Mungkin ada *asbabun-nuzul* atau rujukan konteks historis tertentu yang tak saya ketahui sehingga saya gagal memahami bahwa “melakukan perbuatan keji yang nyata” itu identik dengan “membangkang perintah suami”. Saya baru sanggup melihat bahwa tafsir semacam itu merupakan tindak penyempitan atau reduksi makna yang bukan saja picik dan mengandung kecurangan, melainkan juga sangat berbahaya. Terutama apabila dalam praktik budaya rumah tangga, tafsir itu dieksploitasi untuk melegitimasi otoritas buta kaum lelaki yang memenjarakan wanita dalam keharusan patuh yang sama butanya.

Contoh lain umpamanya pada surah yang sama ayat 3: *“... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka seorang saja”* Bagian “tidak dapat adil” diberi catatan: Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Suatu ketidaktahuan yang sama pada ayat di atas menyebabkan saya gagal memahami bahwa “tidak dapat berlaku adil” itu artinya sedemikian fisik dan kuantitatif. Saya tidak mengerti bahwa Al-Quran yang agung memuat makna di mana keadilan ternyata bukan kualitas, melainkan kuantitas. Saya mungkin menangis mendengar Anda mengawini empat wanita dan memelihara mereka cukup dengan membikin rumah yang sama, membelikan pakaian yang sama atau merek *softex* yang sama. Tetapi, insya Allah saya tak akan pernah percaya bahwa Al-Quran mengajarkan kebodohan semacam itu.

Sementara saya ingin menabung pendapat bahwa hukum pembolean lelaki mengawini empat wanita sesungguhnya merupakan misteri (seperti halnya perintah shalat Subuh dua rakaat dan bukan 44 rakaat) yang mungkin harus kita gali rasionalitasnya melalui berbagai ilmu, pendekatan, dan pengalaman, atau cukup kita imani saja bahwa itu benar dan pasti mengandung hikmah—ingin saya sedikit lanjutkan mengenai Al-Nisâ’ ayat 3 di atas.

Selama ini kita cenderung memenggal ayat tersebut: kita langsung berangkat (memahaminya) dari “*Fankihû ...*” (maka kawinilah). Padahal, itu berada dalam konteks yang dijelaskan oleh penggalan sebelumnya. Didahului (di ayat-ayat sebelumnya) oleh ungkapan tentang dasar-dasar penciptaan, tentang takwa, silaturahmi, tentang *take and give*, hak-hak dan penyantunan anak yatim, ayat 4 itu berbunyi, “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim ...*”, baru disebut “*Maka kawinilah*” Dengan demikian, secara harfiah ia tidak berbunyi langsung “*inkihû*”, tetapi “*fankihû*”, artinya—secara maknawi—pembolean itu berada dalam konteks yang tertentu dan berkaitan dengan segi-segi kehidupan yang lebih luas.

Soal lain adalah kecenderungan kita untuk lebih mengambil titik berat ayat itu pada “... dua, tiga, atau empat”, bukan pada “jika kamu takut tak bisa berlaku adil”. Oleh karena itu, tafsir dan pemahaman kita mengenai rumusan keadilan berumah tangga kurang berkembang. Kita lebih banyak berkutat pada pertentangan kuantitatif antara poligami dan monogami, dan kurang mendalami penghayatan atas makna-

makna keadilan. Lebih jauh lagi kita tidak pernah menganggap serius bahwa “bila kamu takut tak bisa berlaku adil” juga merupakan landasan hukum perkawinan yang sama penting dengan boleh tidaknya poligami. Dengan demikian, kita juga tak pernah berpikir logis bahwa “ketidakmampuan untuk berlaku adil” akan dengan sendirinya bermakna larangan berpoligami.

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terhadap beberapa kecenderungan tafsir tersebut sebenarnya saya maksudkan sebagai usaha untuk lebih melacak kesejatan kebenaran. Umpamanya, kalau kita bersikeras bahwa ayat *Ar-rijâlu qawwâmûna ‘alan nisâ’* berarti “lelaki adalah pemimpin atas wanita”, maka kita harus sangat waspada terhadap syarat-syarat kepemimpinan yang dituntunkan Al-Quran dalam berbagai ayat yang lain. Sederhananya: kalau memang lelaki kualitas kepemimpinan (*ra‘îyah*) sehingga apa-apa yang harus dipatuhi darinya hanyalah hal-hal yang Islami—dan itu tuntunannya amat luas dan lengkap dalam Al-Quran. Bahwa “lelaki itu pemimpin”, itu hanyalah salah satu dari banyak dimensi lain yang wajib dipenuhinya sebagai pemimpin.

Kepemimpinan, menurut Islam, terletak tidak pada otoritasnya, tetapi pada fungsi kekhalifahannya; tidak pada kelembagaannya tetapi pada kualitas (keislaman)-nya. Selebihnya tetap terbuka berbagai kemungkinan makna dari konteks *qawwâmûna*: itu bisa kita gali dan kita hitung dari level hakikat kewanitaan, hakikat kelelakian, dan hakikat kemanusiaan, atau hakikat kehidupan ini seluruhnya; juga dari tarikan teoretis berdasarkan pengalaman sejarah manusia, sistem hubungan sosialnya, dialektika psikologisnya, atau segi-segi lain. Selama ini sebenarnya kita (ilmu pengetahuan manusia) belum benar-benar mengenal apa, siapa, mengapa, bagaimana lelaki, wanita, dan manusia. Yang lebih kita mengerti hanyalah baju-baju kebudayaannya, wajah perilaku luarnya, gerak fungsinya, atau lapisan-lapisan pembungkusnya.

Kalau sudah lebih jelas pengertian-pengertian kita tentang prinsip-prinsip dasar dari Al-Quran yang menyangkut wanita, lelaki, dan

manusia, baru kita akan bisa “tidak terlalu tersesat” menelusuri *maqam* mereka dalam sejarah (proses dan bangunan individualitas, sosialitas, dan seterusnya) termasuk pada tahapannya yang kita sebut “realitas dunia modern”.

Sesudah itu—dengan “mata pandang Qurani”—insya Allah lebih jelas bagi kita apa sesungguhnya yang terjadi dengan tema-tema “antara karier dan rumah tangga”, “eksploitasi bisnis atas wanita”, “keterkaitan kaum wanita dengan lahan sejarah yang ditaburi bibit liberalisme, sekularisme, materialisme, dan seterusnya”, “emansipasi wanita”, “kebebasan wanita modern”, serta beratus judul yang lain.[]

Estetika Ramadhan

A da yang aneh dan agak tak masuk akal, bagi saya, pada sebagian situasi Ramadhan di Yogyakarta.

Pada siang hari atau separuh malam, saya bisa berkeliling kota untuk menghirup wangi budaya Ramadhan di seantero Yogya. Tetapi, selewat tengah malam hingga subuh tentulah saya berada di tempat tinggal saya. Dan aroma Ramadhan yang bisa saya capai tentulah sejauh lingkungan di kampung saya, atau paling banter suara-suara dari pengeras sejumlah masjid yang radiusnya mencapai rumah kontrakan saya.

Yang khas dari Ramadhan, pertama-tama, adalah bunyi sirine, satu nada seruling melengking yang menandai Maghrib tiba. Tanpa melihat siaran teve, mendengarkan tanda dari radio atau jam, kita langsung tahu waktu berbuka telah tiba karena suara sirine yang memenuhi kota.

Kalau di dusun saya dulu, yakni di wilayah timur Jambangan, kami berbuka puasa begitu suara beduk berbunyi. Menjelang saya pergi merantau, beduk sudah “dipersonanongratakan” karena—menurut sejumlah mubalig Muhammadiyah—dianggap *bid'ah*. Yakni, unsur-unsur dalam atau sekitar peribadahan resmi yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad.

Beduk, gendang besar, dengan pola-pola aransemen musikalnya yang bermacam-macam, dari yang baku sampai berjenis-jenis “beduk” sesuai dengan momentum dan konteksnya—adalah bagian dari kenikmatan budaya keislaman kami. Tetapi karena katanya itu *bid’ah*, ya kami harus tak keberatan untuk membuangnya serta menggantikannya dengan pengeras suara dan kaset yang katanya juga tidak termasuk *bid’ah*.

Sesudah Ashar, sehari sebelum hari Ramadhan tiba, biasanya kami berkerumun di sekitar surau, karena pemuda dengan penuh gairah mendemonstrasikan aransemen *tedur* menandai akan masuknya Bulan Suci. Biasanya, kami menonton *tedur* sambil tak bisa menahan sunggingan senyum aneh—semacam kenikmatan estetis yang tak ada duanya. Mungkin itu memancarkan rasa bahagia karena selama Ramadhan setan, iblis, *dajjal* diborgol oleh para malaikat. Mungkin juga kami anak-anak kecil merasa terancam karena mulai besok tak bisa makan-minum sepanjang hari.

Akan tetapi, ternyata beduk itu katanya *bid’ah*. Kami merasa kehilangan, meskipun tetap rela demi pemurnian Islam. Bahkan, kami juga tak bisa berlagu-lagu pujian menjelang sembahyang. Juga tidak lagi melakukan *wirid* kolektif, tetapi sendiri-sendiri, sehingga akhirnya hanya amat sedikit yang melakukan *wirid*. Tetapi, tak apa. Demi pemurnian Islam. Kita harus menjalankan sesuatu yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Nabi.

Ketika kemudian saya merantau ke Yogya, pusatnya Muhammadiyah, organisasi modern yang memurnikan umat Islam dari *bid’ah-bid’ah*, saya mencoba mencari pengganti estetika yang hilang itu, sebab saya yakin Muhammadiyah lebih memiliki kualitas dan keterampilan modern untuk menggarap seni budaya Islam.

Soalnya estetika atau rasa keindahan adalah salah satu anugerah Allah yang luar biasa harus disyukuri. Caranya ialah dengan menumbuhkan, mengkreafkan, dan mewujudkannya dalam kehidupan beragama yang konkret. Bayangkan, kalau kita shalat dengan imam yang sama sekali tidak enak didengarkan ucapan-ucapannya. Bayangkan, kalau azan disampaikan lewat pengeras suara yang memecah kota, tetapi tanpa penggarapan estetika yang memadai. Syukur apabila eksplorasi estetika kaum Muslim tak terbatas pada penerapannya dalam ritus-ritus, tetapi juga dalam peta kebudayaan yang lebih luas. Syukur bisa ikut bersaing dalam perniagaan kaset, siaran teve, teater, dan lain-lain.

Akan tetapi, inilah yang di awal tulisan ini saya sebut sesuatu yang aneh dan agak kurang masuk akal. Khazanah estetika anugerah Allah ini hampir di semua strata: saya mengalami Yogya amat kering di bidang ini.

* * *

Sejauh azan dan ucapan lain dari pengeras suara masjid yang tiba ke rumah kontrakan saya, boleh dikatakan tak ada yang indah. Jangan indah, enak pun kurang. “Terminologi nadanya” tak jelas apa Arab apa Jawa. Ya azannya, ya ucapan-ucapan lainnya.

Beberapa tahun lalu masjid besar alun-alun Yogya punya muazin yang lumayan dan untuk waktu yang lama menjadi favorit saya. Tetapi, dia telah almarhum dan tak ada penggantinya. Muazin yang generasi baru hanya meniru *wadak* lagu-lagunya, tetapi tanpa kualitas yang bisa dibandingkan dengan pendahulunya.

Kalau saya mendengar azan di fajar hari, hati saya berdoa! “Ya Allah, doa hamba hanya sederhana. Dengan tingkat estetika azan seperti ini, hamba tidak berani beranggapan bahwa akan ada orang yang tertarik kepada agama-Mu. Yang hamba mohonkan hanyalah jangan sampai ada orang yang menjadi tak kerasan dalam Islam gara-gara mendengar azan yang demikian.”

Azan termasuk ujung tombak dakwah. Ia sebaiknya digarap sedemikian rupa sehingga mengetuk hati pendengarnya. Kalau tidak, ia terpeleset untuk menjadi gangguan bagi pendengarnya.

Panggilan sahur pun diungkapkan secara mentah: “Sahur! Sahur!” Dulu ada yang namanya *tarhiman*, yakni ucapan-ucapan musikal menjelang imsak. Tetapi, katanya itu *bid'ah*.

Lantas diganti dengan ucapan “*Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni*.” Cara mengucapkannya seperti anak TK melafalkan butir-butir Pancasila. “Wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai pengampunan. Maka, ampunilah hamba.”

Rasanya lucu dan aneh. Seseorang minta ampun kepada Allah untuk dirinya sendiri, tetapi dia ucapkan keras-keras memenuhi kampung. Seandainya dia ganti *fa’fu ‘annâ*—ampunilah kami semua—mungkin lebih etis dan masuk akal.

Kalimat itu sendiri agak memfetakompli Tuhan. “Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan lho, Tuhan ayo, ampuni aku”

Saya menjadi agak bingung. Soalnya Muhammadiyah itu organisasi *tajdid* alias pembaru. Organisasi modern, alias tidak tradisional dan tidak konservatif. Kok, budaya agama di kota pusatnya tak tergarap? Mungkin terlalu sibuk memperhatikan masalah-masalah besar seperti pembangunan nasional, persiapan menjelang abad ke-21, sistem perekonomian Islam, dan seterusnya.

Soal *bid'ah* saya setuju-setuju saja. Cuma kalau *tarhiman* yang indah dibilang *bid'ah* dan mengganggu kekhusyukan berislam, tolong raungan-raungan motor knalpot terbuka yang pada dini hari suka menggergaji telinga dan perasaan, difatwai juga hukumnya apa. Dari Muhammadiyah-lah saya mengetahui bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. []

Puasa, Arak, dan Kekuasaan

Kita segera akan memasuki bulan Ramadhan: hari-hari yang mengasyikkan bagi orang-orang yang mencari kesejatan hidup, saat-saat yang sangat menggiurkan bagi setiap manusia yang sadar melakukan peperangan terhadap dunia, nafsu, milik, kekuasaan, dan kesombongan.

Allah berkali-kali mengiming-imingi surga: sungai susu, kebun hijau, bidadari, dan hidangan-hidangan. Itu adalah idiom tentang surga berdasar kepada konteks pengalaman budaya masyarakat Arab yang pasti berbeda dengan “idiom surga”-nya orang Jawa, misalnya.

Jika orang Jawa mengobsesikan surga, maka formula yang muncul di benaknya bukanlah sungai, karena kita sudah kaya sungai. Bukan pula bidadari, karena alam kita telah menyediakan “bidadari-bidadari”. Surga orang Jawa mungkin juga tidak sama: bergantung pada kondisi masing-masing.

Bagi orang yang sudah terlalu kenyang dengan kekuasaan dan kesejahteraan, surga adalah kemerdekaan dan kesederhanaan. Bagi orang lain yang dihardik-hardik untuk henggang dari tanah nenek moyangnya, surga itu sederhana saja: ketenteraman hidup di rumah keadilan.

Surga itu nilai, surga itu kualitas. Format budayanya bisa berbeda-beda sesuai dengan lokal-lokal persoalan manusia dan masyarakat.

Tuhan berkali-kali mengiming-imingi surga. Tetapi, Dia mengerti dan memang menciptakan demikian, bahwa arti kehidupan antara lain adalah kesanggupan untuk menaklukkan segala iming-iming. Seolah-olah iming-iming surga itu suatu kesengajaan agar manusia melakukan transendensi atasnya, kemudian mencari, merindukan, dan mengejar sesuatu yang lebih hakiki, sejati, serta kebahagiaan yang sebahagia-bahagiaanya.

Allah memberi peluang bagi tiga kemungkinan atau tiga level kemusliman. Terserah kepada manusia akan memilih yang mana. Ada—kalau saya memakai *term* aktual—“Muslim Birokratis”, ada “Muslim Kapitalis”, dan ada “Muslim”.

Yang *pertama*, dalam khazanah tasawuf, disebut “Muslim Rahbani”: manusia yang melakukan peribadahan karena peraturan dan rasa takut. Disebut “birokratis” karena motivasi ibadahnya mirip dengan psikologi pegawai yang berorientasi kepada presensi.

Yang *kedua* disebut “Muslim Hayawani”. Diasosiasikan kepada kapitalisme karena ibadah diposisikan sebagai “kapital”. Dia melakukan shalat, puasa, memberi zakat, dan seterusnya, agar memperoleh laba yang bernama pahala. Muslim jenis ini adalah pedagang yang bernegosiasi kapitalistik dengan Allah.

Terminologi yang dipakai adalah untung-rugi. Surga adalah keuntungan, neraka adalah kerugian. Tidak beribadah, tidak menjalankan perintah Allah, dan melanggar larangan-larangan-Nya berarti merintis kebangkrutan. Jadi, seluruh perilaku keagamaan yang dilaksanakannya menyangkut kepentingan untuk tidak mengalami “defisit akhirat”.

Pada level syariat formal, dua tingkat kemusliman ini masih tetap diterima Allah. Mengucapkan syahadat sudah membuat seseorang berstatus Muslim, meskipun dalam praktik hidupnya belum tentu dia

menomorsatukan Allah. Asal melakukan shalat lima waktu, seseorang sudah bisa disebut *muthi'* atau loyal kepada norma Islam, meskipun belum tentu ada interaksi fungsional antara shalat resminya dan sepak terjang kehidupan konkretnya.

Betapa sayangnya Allah kepada manusia, makhluk yang dibuat-Nya tertinggi dan termulia.

Tetapi, iming-iming “transparan” yang sering dilupakan atau diabaikan Muslimin, oleh fatwa-fatwa ulama, oleh pelajaran mengaji, serta oleh kurikulum persekolahan Islam, baik di pesantren atau di Madrasah Islam Modern, ialah perjumpaan dengan Allah.

Liqâ' rabb. Perjumpaan agung dan indah dengan Si Maha Penyan-tun yang menggembalakan semua gejala hidup manusia. Inilah jenis Muslim *ketiga*, “Muslim Rabbani”.

Penyair Rabbiah Al-Adawiyah menangis—“Kalau ibadahku ini aku lakukan untuk mengharap surga-Mu, ya Rabbi, campakkanlah aku ke dalam api ganas-Mu. Kalau ibadahku ini aku lakukan karena takut kepada neraka-Mu, ya Rabbi, tutuplah pintu surga bagiku”

Rabbiah menginginkan Allah. Hanya Allah. Bukan rindu laba. Dia tidak diperbudak oleh kengerian, terhadap ketidakkuasaan, terhadap kejatuhan ke kerak neraka, apalagi sekadar kejatuhan dari kursi jabatan di dunia.

Seperti telah menjadi bagian dari penghayatan kaum Muslim di segala zaman, bahkan Ibrahim a.s. menunjukkan betapa besar jiwanya tatkala harus mengorbankan putra kesayangannya. Dan Isma'il a.s. sendiri sepenuhnya merelakan nyawanya kepada Allah yang memintanya.

Di atas saya menyebutkan jenis ini dengan kata “Muslim” saja, karena konsep filosofis dan epistemologis kemusliman memuat makna kepasrahan total hanya kepada Allah. Kepasrahan kepada Allah berarti ketidakpasrahan terhadap yang selain Allah. Manusia yang mengabdikan hanya kepada Allah mungkin harus berhadapan dengan kekuatan-

kekuatan yang memusuhi Allah di dunia. Dia mungkin harus berpe-rang, mungkin terpaksa dibenci, disingkirkan, dituduh, difitnah, dan dilemparkan.

Dan yang melempar “Muslim” mungkin tidak harus kekuatan ateis-tik atau kekuatan-kekuatan non-Islam lainnya, tetapi sangat mungkin dia dilemparkan juga nasibnya oleh sesama Muslim yang berada pada level *Rabbani* atau *Hayawani*.

Apa yang “Muslim” peroleh bisa juga kejayaan dan kekayaan. Teta-pi, bisa juga ketiadaan harkat duniawi, kepapaan, dan kehinaan di mata dunia. Namun, memang itulah “biaya” yang harus dia bayarkan untuk memperoleh keabadian bersama Allah, kesejahteraan, dan ke-bahagiaan yang sejati. “Muslim” tak perlu menunggu tua dan turun jabatan untuk menginsafi bahwa kekuasaan dunia, bahwa deposito bermiliar rupiah, bahwa genggamannya senapan di tangan, sungguh-sungguh hanya berlaku sementara. Betul-betul akan luluh hanya dalam beberapa tahun dan alangkah sebetulnya itu!

“Muslim” mengetahui bahwa “kapitalisme peribadahan” pada akhir-nya justru akan menghasilkan defisit dan kebangkrutan *ukhrawi* yang serius dan total. Di dunia pun sudah amat sempit peluang untuk me-nikmati kepalsuan-kepalsuan itu, apalagi di akhirat.

Oleh karena itu, memasuki bulan Ramadhan, sungguh-sungguh meru-pakan momentum yang mengasyikkan untuk bercermin kembali. Untuk meluncurkan sinar “*rontgen*” ruhaniah ke dalam realitas batin dan *kasunyatan* hidup yang kelak dijalani.

Mekanisme dan penghayatan puasa adalah saat-saat paling jernih untuk meneropong hama-hama wereng di dalam batin kita, kutu-kutu loncat di galaksi mentalitas kita, serta cecunguk-cecunguk di dalam kosmos kepribadian kita.

Dengan ditemukannya berbagai virus dan kuman sebar di dalam *kasunyatan* diri itu, otomatis akan tampak juga sumber-sumber yang menyebabkannya. Baik sumber eksternal, yakni segala iming-iming

duniawi struktural sistemik, hedonisme, megalomania, kepalsuan rasa kuasa yang dipompa-pompakan oleh alam sekitar, maupun sumber internal yang berupa natur nafsu-nafsu itu sendiri.

Pada hari-hari pertama puasa, seseorang masih punya “argumentasi” untuk menutup-nutupi atau memaaf-maafkan kuman-kuman itu. Tetapi, sesudah pertengahan Ramadhan, jika puasa dilaksanakannya sungguh-sungguh total lahir-batin, *insya Allah* dia akan lebih *sumeleh*, lebih *lathif*, lembut, jernih, dan kemudian muncul hakikat kebersamaan jiwanya untuk mengaku bersalah di hadapan dirinya sendiri serta di hadapan Allah.

Kecuali, jika manusia memilih kehancuran. Baik kehancuran di mata orang lain, di mata pergaulan, maupun kehancuran yang diam-diam tetapi tajam dan menusuk dari dalam dirinya sendiri.

Puasa sering dilambangkan sebagai “air arak”, *khamr*.

Intinya: proses peragian. Ketela diubah menjadi tape. Manusia berpuasa untuk mengubah dirinya menjadi *sumeleh*. Dan *sumeleh* adalah kemenangan yang sejati atas dirinya sendiri. Sejarah akan mencatatnya dengan tinta yang tidak mengandung kehinaan.

Puasa mempertemukan manusia dengan sejatinya ketiadaan. Puasa mempertemukan manusia dengan dimensi lapar dan dahaga. Dalam pertemuan itu, dia bukan saja bisa menghayati nasib orang yang kelaparan atau yang dibikin kelaparan dan kehausan, melainkan juga membuat para penghayat puasa untuk menemukan “makanan sejati”.[]

Puasa Hayawani

R amadhan telah membayang di ambang langkah kaki kita. Bulan suci itu selalu membuat saya merasa penasaran. Paling tidak karena ia berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan lain dalam hal menyodorkan pertanyaan-pertanyaan.

Ada pertanyaan “ke luar”: Apa kira-kira kata-kata indah yang diberikan para ulama kita untuk menyongsong keagungan puasa?

Biasanya itu-itu juga: Puasa ialah berlatih menahan nafsu. Puasa ialah menghayati penderitaan orang miskin—sehingga kita berkesimpulan bahwa fatwa itu diperuntukkan bagi orang-orang kaya.

Biasanya, maaf seribu maaf, lontaran kalimat saudara-saudara kita di luar Islam ketika mengucapkan “Selamat berpuasa”, biasanya lebih indah dan lebih mendalam dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita sendiri.

Kemudian, ada juga pertanyaan “ke dalam”: Sampai kapan ilmu kita tentang puasa bertahan pada pengetahuan tentang “menahan lapar dari subuh hingga maghrib”? Sampai kapan kita “tidak naik kelas” dari mata pelajaran elementer tentang puasa?

Sayang para pengajar dan penganjur agama terlalu fanatik untuk memberi tahu kita bahwa agama itu dogma, bukan cakrawala. Bahwa

syariat itu aturan, bukan ilmu. Bahwa fiqih itu pakem, bukan “dinamika kata kerja”.

Sayang kita tidak kunjung mengerti bahwa fiqih tidak sama dan sebangun dengan agama. Agama itu karya Allah, fiqih itu karya manusia. Kita punya kecenderungan budaya untuk “menyembah fiqih”, karena ia kita identikkan dengan agama, bahkan dengan Tuhan.

Apakah saya sedang menggugat?

Sama sekali tidak. Saya justru bertanya mengapa relativitas karya-karya manusia menggugat hakikat karya Tuhan. Mengapa kita mempertahankan iklim budaya agama yang memperkenankan fiqih menggantikan hak agama, bahkan hak Tuhan.

Ada tiga jenis “mata” manusia yang dipakai untuk melihat dan memperlakukan agama. Masing-masing dengan orientasi dan targetnya sendiri-sendiri.

Jenis *pertama* disebut Muslim *Rahbani*, *kedua* Muslim *Hayawani*, dan *ketiga* Muslim *Rabbani*.

Tipe *Rahbani* adalah orang yang melakukan ibadah karena “takut”—dan itu berbeda dengan takwa—atau karena semacam “loyalitas birokratis”.

Tipe *Hayawani* bersembahyang atau berpuasa demi memperoleh pahala. Profit akhirat. “Kapitalisme”. Atau juga untuk mendapatkan ampunan dari Allah: konteksnya ialah bahwa dengan ampunan, maka dia tidak “defisit” atau “bangkrut” secara akhirat sehingga harus masuk penjara *Nar Jahannam*.

Tipe terakhir ialah manusia yang melakukan ibadah tidak dengan tujuan pahala, surga, atau takut neraka, tetapi asli untuk Allah saja. Pokoknya mau diapakan saja, mau dijunjung ke singgasana surga atau ke kerak neraka, asal Allah yang menghendaki, dia manut saja.

Model paling populer Muslim *Rabbani* tentulah penyair sufi Rabiah Al-Adawiyah. Tetapi, idola segala idola dalam cakrawala paling indah ini adalah Muhammad sendiri, sang Rasul Pamungkas.

Menangiskah Anda tatkala mengingat apa doa beliau sehabis diusir dan *dibalangi* batu-batu oleh masyarakat Etiopia? “Kepada siapakah

Engkau campakkan diriku yang lemah dan hina dina ini, ya Allah? Kepada mereka yang membenciku dan meneteskan luka di tubuhku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, wahai Allahku, semua itu tidaklah menjadi persoalan bagiku”

Itu kadar puasa beliau. Sedangkan puasa kita masihlah pra-*Rahbani*. Yang *Hayawani*, masih lumayan.[]

Palestina, 2010

Beberapa malam menjelang lebaran, di ibu kota, seorang pemusik *country rock* menagih saya: “Mana sajak-sajak *Kapak Ibrahim*-nya? Saya sudah siap mengalbumkannya.”

Lantas beberapa menit kemudian dalam kontak telepon dengan seorang tokoh nasional, saya kaget setengah mati karena beliau mem-berondong telinga saya: “Ini *lailatul qadar*! Saya segera datang. Tunggu barang setengah jam! Tapi, tunggu dulu”—beliau kemudian me-nuturkan sejumlah ramalan nasional, dan akhirnya—“Tolong doakan saya masih *menangi* tahun 2010, ketika Negara Palestina berdiri”

Saya terbengong-bengong. Ini, segala sesuatunya, adalah dunia isoterik. Dunia dalam, *swaraning asepi*, *sirrullah*. Ungkapannya penuh simbol, sehingga saya memerlukan daya asosiasi khusus dan untuk menemukan substansinya saya butuh *nge-rewind* berulang-ulang.

Ternyata malam itu adalah *khataman* wirid yang beliau dan *sedulur-sedulur* serta orang-orang di sekitarnya lakukan selama empat tahun berturut-turut.

Wirid. Sesuatu yang kebanyakan orang tak pernah membayangkan, sebab atmosfer tokoh kita ini sama sekali—pada kesan *performance-*

nya—jauh dari urusan-urusan macam ini. Memang betapa menggelikan cara media massa, pengamat, dan para pakar, menggambarkan orang ini serta letaknya dalam lingkup kegiatan nasionalnya. Koran-koran kita terlalu terjebak oleh tradisi *sensation sensitiveness*, sementara dunia ilmiah dan akademik terlalu mengonsentrasikan diri pada pendekatan yang eksotik. Dan malam itu betapa jernih dan menggiurkannya dimensi isoterik yang bukan saja diungkapkannya, melainkan juga merupakan *maqam*-nya yang lebih realistis.

Tampak di depan mata saya (yang saya isoterik-isoterikkan), pada dini hari menjelang makan sahur itu, “Musa yang telah mulai disapa oleh Khidhir”. Maaf, *term* ini tidak saya karang sendiri, tetapi mengikuti bahasa beliau sendiri. Kalau bertemu, tema kami memang agak abstrak, misalnya soal kebenaran dan cinta—hal yang dalam rubrik ini selalu juga saya singgung-singgung. Itulah sebabnya Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, selalu juga tersertakan.

Malam itu tampak makin jelas wajah *al-ilah* (tuhan palsu, makhluk yang menuhankan diri dalam konteks-konteks). Bahkan, menjadi agak lebih jelas mengapa Khidhir “membocorkan kapal” (supaya terhindar dari perampokan yang lebih habis-habisan). Mengapa “pagar itu ditegakkan” (hitunglah aset sejarah hari depan di pendaman tanahnya). Mengapa “anak kecil itu dicekik” (hitungan perjuangan dalam skala “dusun” hingga skala dunia ini harus minimal tiga puluh tahun ke depan).

Saya *haqqul yaqin* bahwa Anda paham sepaham-pahamnya soal ini. Bahkan, saya *‘ainul yaqin* Anda juga mafhum betapa lembaga-lembaga informasi dalam sejarah manusia dewasa ini mengalami *zalzalah*. Keguncangan. Tidak fokus. Diafragma tidak tepat.

Orang-orang dan para peneropong realitas, baik yang *generous* sehari-hari, yang *instant* seperti koran-koran, maupun yang seakan-akan tertata dan cermat seperti dunia pengamatan ilmiah—sedang mengalami ketidakjernihan yang cukup bahkan sangat serius. Kita

semakin tidak sanggup membedakan apa yang pantas diperhatikan dan apa yang tidak pantas. Antara apa yang perlu dicermati dengan yang boleh diabaikan saja. Emas kita pendam, loyang kita junjung-junjung.

Padahal, masyarakat Musa baru bisa terhindar dari otoritas dan megalomania *al-ilah* itu, sesudah tongkat mukzijatnya berhasil membelah lautan: yakni, melakukan pemilihan yang jernih atas realitas sejarah dan nilai-nilai yang berlangsung di dalamnya. Dan masakan ikan bekal pengembaraannya yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya Dzun Nun, tiba-tiba menjadi hidup kembali begitu tiba di *majma'ul bahrain*: di garis pertemuan radikal antara dua air samudra.

Majma'ul bahrain, tanah genting itu sekarang sedang kita dekati. *Manipulated and reduced information* telah hampir mencapai titik optimalnya, sehingga gelap dan terang hampir berbenturan. Telah mulai kita rasakan, alami dan lakukan, sejumlah rintisan kreativitas di segala bidang kehidupan—dari kesenian sampai cara pandang politik dan kenegaraan—sejumlah pemikiran modus penyejajaran alternatif.

Al-Quran mengisahkan masa silam tidak hanya untuk masa silam itu sendiri, tetapi juga untuk kita pada masa kini.

Maka, kita bisa belajar kepada Ibrahim masa kini di muka bumi yang telah hampir selesai melongok-longok langit, matahari, bulan, bintang, dan secara naluriah maupun intelektual telah mendekat ke iklim kapak yang akan mendera berhala-berhala.

Kepada Musa yang “mencabut janggut bapak angkatnya”. Telah pula dibunuh bayi laki-laki di seluruh negeri. Kemudian dikebiri potensi kelelakian di hampir semua sektor kehidupan. Diayamraskan. Ditergantungkan. Namun, tak bisa semua. Sunnah Allah dalam gagasan dan tradisi penciptaan-Nya bisa dilanggar, tetapi hanya sampai batas tertentu. Musa selalu lahir di setiap era, meskipun tidak harus berupa seseorang.

Musa dan potensi-potensi ke-Musa-an *kintir, keli*, di aliran sungai. Namun, ibunda *ummah* menemukannya, merumat, dan membesarkannya. Aspirasi *mughayyirûn* dan *mushlihûn*, para pengubah sejarah yang akan memperbaiki keadaan—muncul tidak hanya dari hutan belantara, tetapi bisa juga dari ranjang para *ilah* itu sendiri.

Maka, pada setiap zaman, sangat mungkin kekuatan-kekuatan oposisi, potensi kritik dan pengubah realitas, lahir dari dalam tubuh kemapanan itu sendiri. Maka, Anda tidak lagi bisa berpikir dikotomis yang membedakan secara baku dan teoretis antara pemerintahan dan rakyat, antara partai substantif dan partai asesoris, antara institusi *mus-tadh'if* (yang melemahkan) dan ketakberaturan mereka yang *mus-tadh'af* (yang dilemahkan).

Dunia isoterik tokoh kita itu dengan gamblang “memfilmkan” es-tafet zaman di depan kita. Ada *waqa'ah al-waqi'ah: Jumenengan*, pengalihan, lima anggota Panitia Negara ... bahkan disebut pula poros Aljazair-Arab Saudi-Iran-Indonesia pada masa datang

Saya menjadi semakin bingung. Tokoh kita ini mengalami *laitul qadar* yang menghampar di langit, dan mata saya tak sampai[]

Seandainya Allah pun Berlebaran

Sebagai umat, kita telah bersama-sama menjalani Idul Fitri, meskipun harinya berbeda. Kita telah berupaya membersihkan diri satu sama lain dengan cara saling memaafkan.

Idul Fitri telah membuat sifat kebersamaan sosial kita menjadi lebih dari sekadar *community* atau *society*: kita menjadi *ummah*.

Ummah atau umat adalah suatu konsep dengan tatanan kuantitatif dan persyaratan kualitatif yang berbeda dengan jenis-jenis perkumpulan manusia lain yang dikenal dalam sejarah. Umat menggadaikan suatu kohesi, perhubungan yang rekat, dan memiliki daya tarik-menarik, yang disifati oleh sejumlah nilai Allah: kesederajatan antarmanusia, kebenaran nilai, keadilan realitas, dan kebaikan akhlak.

Tolok ukur derajat manusia hanya satu bahwa di mata Allah yang paling bertakwalah yang tertinggi. Itu ukuran yang sangat kualitatif, sangat ruhaniah, di mana mata pandang sosial budaya antarmanusia hampir-hampir tak mampu melihatnya.

Kalau di antara suatu komunitas Muslim ada kedudukan dan fungsi-fungsi yang membuat seseorang menindas dan yang lainnya ditindas, maka konsep *ummah* belum terpenuhi. *Wallâhu a'lam*, apakah secara mutu kita telah sungguh-sungguh ber-Idul Fitri atau belum. Tetapi, memang berlalunya hari raya demi hari raya selama ini belum

cukup mengubah perhubungan sosial yang eksploitatif, diskriminatif, dan represif di antara kaum Muslim sendiri.

Kita berbahagia melalui Idul Fitri kali ini, bersama sekalian sanak saudara dan teman-teman sekampung atau seprofesi. Namun, diam-diam kita juga tetap harus memelihara kepekaan terhadap sejumlah hal yang memprihatinkan. Justru, sensibilitas semacam itulah yang mendorong menaikna tingkat Idul Fitri kita.

Oleh karena itu, di samping ber-Idul Fitri sebagai umat, pertanyaan *taffakur* kita adalah seberapa jauh kita—sebagai pribadi-pribadi—telah sungguh-sungguh mengupayakan *konditioning* per-Idul Fitri-an dalam kehidupan kita masing-masing.

Biasanya, pada hari-hari besar dan khusus, terutama Idul Fitri dan Tahun Baru, seharian saya bengong saja dan mengunci pintu di rumah kontrakan saya di Yogya.

Entah mengapa. Mungkin karena saya merasa tidak berhak atas hari besar itu. *Pertama*, tidak berhak secara sosial: di mana-mana orang sibuk dengan sanak saudara dan pesta di lingkungannya masing-masing, sementara di Yogya ini, saya *loro lopo kabur kanginan*. Kata orang Melayu: hidup sebatang kara!

Kalau saya keluar rumah, saya takut orang-orang yang kenal saya akan merasa terfetakompli untuk melibatkan saya dalam kesibukannya. Maka, saya *ngeleng* (sembunyi) saja di balik kumuh lembap saya. Syukur kalau ada sisa makanan dan minuman, sebab pada hari raya biasanya susah cari warung. Kalau tidak, ya saya puasa—artinya, *manngan howo* dan asap rokok.

Kemudian *kedua*, mungkin secara pribadi saya merasa belum lulus untuk ikut ber-Idul Fitri. Dosa-dosa saya terlalu bertumpuk untuk bisa saya *saponi* hanya dengan puasa satu bulan.

Memang, saya boleh bermanja kepada Tuhan seperti Syaikh Abu Nawas: “Hamba ini *‘ndak* cocok masuk surga, tapi kalau Kau masukkan ke neraka, ya jangan dong”

Lantas sehari sesudah Idul Fitri, saya akan pasti beredar ke mana saja menemui siapa pun untuk minta maaf. Tetapi, saya juga tetap saja takut kepada tatapan mata orang. Dari kilatan mata seseorang dan dari guratan urat saraf di wajahnya serta dari cara badannya bergerak di depan saya, sering saya rasakan bahwa di dalam dirinya tetap ada kamar gelap yang saya tak bisa menjamin. Saya sangat takut dan sedih bergaul dengan rasa tak enak di hati orang, apalagi dengan rasa dengki, iri, benci, atau *goro-goro* lain yang termuat di balik sopan santun sikapnya.

Ini bukan sangka buruk. Mungkin ini sekadar efek dari pengalaman hidup saya yang ribuan kali ditikam dari belakang oleh orang-orang yang di depan saya selalu tersenyum.

Saya ungkapkan hal-hal semacam ini justru untuk menyatakan bahwa bagi saya, memaafkan orang lain adalah kontrak seumur hidup. Namun pada saat yang sama, saya takut orang lain tak sungguh-sungguh memaafkan saya, meskipun saya sudah menyatakan permohonan maaf berulang-ulang. Ah, hidup ini memang gampang-gampang susah. Namun, semoga akhirnya bisa berubah menjadi susah-susah gampang.

Maka, pada suatu hari lebaran biasanya saya melampiaskan kepasrahan saya kepada Tuhan. Tetapi, salah satu hasilnya adalah ketakutan yang meningkat kepada-Nya.

Saya bayangkan kalau Allah ikut berlebaran, bagaimana nasib saya dan kita semua. Kalau Tuhan tak berpuasa lagi, habislah kita. Kalau Dia tak menahan diri, mampuslah kehidupan kita.

Kalau Allah tak menahan diri sekarang ini untuk menghukum kekufuran kita, apa jadinya. Bagaimana kalau mendadak mata kita jadi buta. Lumpuh tangan dan kaki kita. Gelombang yang kemarin bisa kita atur, kini memberontaki kita dengan menciptakan ombak-ombaknya sendiri. Jaringan yang selama ini kita kendalikan, bergeser-geser mengepung kita. Dunia dan alam, yang terletak sebagai alam itu sen-

diri maupun yang berlangsung dalam ekosistem masyarakat manusia: *mbalelo* kepada kedaulatan dan kekuatan yang selama ini kita monopoli.

Allah berkata: “*Hamba-hamba-Ku yang dilemahkan di muka bumi, akan Aku tolong, Aku angkat untuk mengambil alih kepemimpinan, dan Aku jadikan mereka ahli waris dari kekuatan-Ku.*”

Ya, *Jalil!* Kalau Allah berbuka dari puasa-Nya hari ini dengan melaksanakan pernyataan-Nya itu, kita akan bagaimana. Kita yang sudah jadi raja, yang ingin jadi raja, baik raja besar maupun raja kecil di lingkungan lokal kita—akan bagaimana. Terjerembaplah kita dari singgasana. Anak-anak sejarah yang jatah makan-minumnya dan hak asasinya kita musnahkan, akan berduyun-duyun menuding. Menagih dan mempermalukan kita. Lidah kita akan menjadi kelu. Lutut kita gemetar. Wajah kita tertunduk. Jantung kita bisa berhenti pada momentum kesengsaraan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya.

Dan anak-anak kita, famili, cucu-cucu, dan handai tolan yang selama ini ikut menjilati kekuasaan kita—betapa nasib mereka!

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah hamba dan kami semua. Bantulah kami meng-Idul Fitri di lutut kuasa-Mu. *Wa la aqwa’ala naril jahim.* Di neraka, *tak koowat* hamba, ya Rabbi![]

Muatan Mudik: Kebahagiaan

Pada hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pejabat, terutama yang memimpin kehidupan di kota-kota besar, memberi nasihat yang amat santun: “Bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, untuk apa mudik? Hendaklah jangan memaksakan diri”

Petuah seperti itu juga terdengar dari jenis pemimpin yang lain, umpamanya kaum cendekiawan, pengamat sosial, atau juga sejumlah pelawak di layar televisi.

Mereka tentu bermaksud baik. Saya teringat, dalam skala kecil, para mubalig Muhammadiyah di desa-desa tak bosan-bosannya menganjurkan agar orang jangan gampang-gampang *slametan* atau selamat-an. Ada pengantin, selamatan. Ada khitanan, selamatan. Ada yang meninggal dunia, selamatan. Sudah kehilangan famili yang dipanggil Tuhan, kok malah utang-utang duit untuk menyuguh sebegitu banyak orang yang datang melayat.

Budaya mudik, seperti juga selamatan, dipandang oleh para pemimpin itu sebagai semacam pesta tradisional. Itu hanya dilakukan oleh jenis “manusia agraris” yang tidak efektif, dan tidak efisien hidupnya. Mudik itu *counter-productive* secara ekonomi maupun dipandang dari sejumlah sisi yang lain. Memboroskan uang, energi, waktu, dan macam-macam lagi.

Kira-kira, menurut kesan saya, nasihat para pemimpin di atas memiliki kecenderungan berpikir seperti itu.

Ada berapa hal yang—saya mungkin bukan tidak setuju—tetapi sekurang-kurangnya merasa tidak *sreg*.

Pertama, logikanya. Apakah kata “mudik” di situ bisa kita ganti umpamanya, dengan kata “makan”? Apakah kepada orang yang susah ekonominya bisa kita nasihatkan: “Kalau memang kurang atau tidak mampu membeli beras, untuk apa makan? Hendaklah jangan memaksakan diri”

Pertanyaannya sekarang: apakah mudik itu padanan dari makan? Apakah mudik itu sedemikian tidak primer bagi manusia sehingga boleh ditiadakan, sementara makan tidak boleh?

Beribu-ribu orang, berjuta-juta orang, berjejal-jejal di stasiun, terminal, di gerbong-gerbong, di kepengapan bus dan berbagai kendaraan lain. Pada umumnya mereka itu hanya setahun sekali bisa pulang kampung, terutama karena kesanggupan ekonomi mereka memang begitu.

Bagi mereka, hari raya adalah sebuah kemewahan. Hari raya adalah “air liur” bagi kebahagiaan budaya mereka yang amat jarang didapatkan sehari-hari. Berjejal-jejal di kendaraan bukanlah siksaan bagi mereka, kalau kita mengetahui bahwa tidak ada siksaan jenis apa pun dalam hidup ini yang terus-menerus disongsong dengan sadar dan pakai biaya besar pula.

Baiklah. Mungkin gerakan mudik massal itu menyiksa, meletihkan, bahwa siapa tahu memuakkan. Tetapi, muatan kebahagiaan di dalam siksaan itu masih jauh lebih besar dibanding siksaan itu sendiri.

Berjuta-juta orang yang menyiksa diri dalam kebahagiaan itu tidak punya kemampuan seperti penghuni “kelas” sosial-ekonomi di atas mereka, yang jumlah uang mereka bisa dipakai mudik kapan saja mereka mau. Bisa seminggu sekali. Sebulan sekali. Bahkan, sehari sekali atau sehari berkali-kali jika waktu dan jarak memungkinkan. Kemampuan membeli tiket pesawat membuat mereka bisa mencipta-

kan hari raya kapan saja dan dengan fasilitas apa pun yang dengan gampang bisa mereka beli.

Semestinya kepada kelas inilah diucapkan kalimat: “Untuk apa mudik? Mengalahlah. Kasihlah ruang yang agak lebih longgar kepada mereka yang hanya setahun sekali mampu mudik.”

Akan lebih dahsyat lagi jika kalimat itu, ditambah pula: “Bagi mereka yang tak mampu, silakan datang ke rumah saya dan rumah beberapa orang yang terdaftar secara sukarela ini, untuk memperoleh tambahan biaya pulang ke kampung”

Apalagi mudik itu bukan sekadar peristiwa budaya. Mudik itu tahap *perjalanan kembali*. Bahasa Arabnya: *ilaihi râji‘ûn*. Kembali ke lumpur kampung, tempat Allah mengawali kehidupan mereka.[]

Idul Fitri dan Rentenir

Bentuk Hari Raya Idul Fitri keluarga kami di Jombang amat sederhana dan hampir tanpa hiasan-hiasan.

Misalnya, kami selalu terlambat menyadari bahwa sebaiknya kami menyiapkan jajan-jajan, kecuali nenek yang memang menjadi langganan penyedia lontong sayur bagi hampir semua famili di dusun. Hampir semua dari 14 saudara saya tergolong rendah inisiatifnya di bidang semacam itu. Dan hal itu bisa memalukan, karena setiap habis shalat Id, belasan kepala plus sebelas keponakan saya selalu merupakan pasukan yang siap beredar dari rumah ke rumah para tetua untuk merampok jajan mereka.

Contoh lain ialah kami tidak memiliki “kesusastraan” yang tinggi untuk ber-Idul Fitri. Kami tidak pernah tahu apa susunan kalimat yang adiluhung untuk memohon maaf dan memaafkan. Janganlah lagi untuk berjongkok, menyembah, mencium lutut, dan seterusnya. Semua golongan dan lapisan masyarakat dusun kami hanya memakai kalimat *Ngaturaken sedaya kalepatan kulo* untuk memohon maaf, dan *Yo wis padha-padha* untuk ber-*thank-back*. Di kalangan anak muda bahkan amat singkat: *Sepurane sing dawa, Rek!*, atau diplesetkan *Sepure sing dawa, Rek!*, atau *Bedhu!* Yang berarti *impas, cok*.

Adapun kami serumah bahkan tak mengenal kata-kata apa pun untuk ungkapan maaf-memaafkan. Juga tidak kepada Ibu-Bapak atau Kakek-Nenek kami. Sehabis shalat Id, di rumah kami—tidak dalam upacara yang dirancang—mencium tangan Ibu dan tetua-tetua kami dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding biasanya. Itu pun terkadang ada satu atau dua di antara kami yang malah bersembunyi karena malu, atau pura-pura.

Entah mengapa begitu. Mungkin ada teori tentang proses budaya dan keagamaan tertentu yang bisa menjelaskannya. Tetapi, mungkin saja kami memang sudah tidak lagi terlalu memerlukan bentuk ungkapan. Kami saling memaafkan, itu sudah pasti, dan tidak bergantung pada ruang atau waktu. Kapan saja tak ada yang tak dimaafkan di antara kami. Seluruh hari adalah Idul Fitri, seluruh usia adalah Hari Raya, seluruh yang ada dalam hidup kami adalah pemaafan. Seperti juga setiap hari kami puasa dan berprihatin. Hidup kami, sudah lama, sangat berat. Dan karena itu tak usah ditambah oleh beban beratnya upacara-upacara.

Mungkin saja, siapa tahu, kami ini masih bukan Muslim yang baik. Idul Fitri adalah momentum yang khusus dan istimewa. Tetapi mengapa kami begitu “dingin”? Mengapa tak begitu ada “romantisme kultural” pada kami dalam berhari raya?

Namun sudah barang tentu, di “luar rumah” kami berusaha lebih beradab dan beradat. Kami meladeni hampir segala apa pun yang menjadi keseyogiaan Hari Raya dalam kultur lingkungan kami. Termasuk adik-adik putri saya yang punya kebiasaan berpuasa enam hari sesudah Idul Fitri: mereka tidak lantas mengumumkan pekerjaannya dan memasang spanduk “Hormatilah kami yang berpuasa”.

Akan tetapi, itu semua lebih bersifat kultural daripada religius. Maksudnya, lebih merupakan mekanisme adat budaya keagamaan dibanding manifestasi nilai-nilai agama itu sendiri.

Misalnya, kalau para penduduk bermaaf-maafan dengan Pak Lurah (dan menurut adat “feodalisme” penduduklah yang meminta maaf

kepada Pak Lurah, padahal banyak kenyataan yang “memerintahkan” sebaliknya): apakah gerangan artinya?

Apakah mereka bermaaf-maafan dalam konteks individu (baca: manusia), ataukah dalam konteks sosialitas (baca: struktural)? Apakah seorang penduduk minta maaf kepada Pak Lurah karena dia pernah *ngrasani* kepala desanya ini? Ataukah, karena dia pernah tidak setuju kepada keputusan-keputusan mengenai Tebu Rakyat, Bimas, atau uang-uang pajak yang “sirna” tanpa kejelasan? Dan, kalau Pak Lurah minta maaf juga kepada penduduk, apakah kemudian penduduk memaafkan segala ketidakberesan tindakannya sebagai Lurah selama ini? Dan, kalau para penduduk tahu persis bahwa dari tahun ke tahun tindakan-tindakan semacam itu diulang-ulang juga oleh Pak Lurah, maka seberapa halalkah permintaan maaf penduduk terhadap tindakan tak benar itu? Bolehkah seorang Muslim tidak melakukan *nahyi munkar*.

Kemudian banyaklah hal-hal, konteks-konteks, dimensi-dimensi di antara hubungan sosial antara manusia, antara golongan atau antara lapisan masyarakat—yang sesungguhnya susah ditemukan relevansinya dalam mekanisme maaf-memaafkan selama Idul Fitri itu.

Kalau konsistensi *amar makruf nahyi munkar* itu sungguh-sungguh dipakai sebagai landasan sebelum akhirnya kita bermaaf-maafan, maka sebelum ber-Idul Fitri tentulah akan terjadi keriuhan tawar-menawar yang bukan main. Karena tanpa itu, Idul Fitri tidak sungguh-sungguh kita peroleh, kecuali sekadar *mupus*, untuk mengulanginya lagi besok pagi.

Dengan demikian, bahaya yang kita hadapi di setiap Hari Raya ialah “keharusan” kita untuk berbasa-basi saling memaafkan; sementara persoalan-persoalan yang terkandung dalam konteks sebelum maaf-memaafkan itu tak pernah diselesaikan secara tuntas.

Bahaya ini akan melanggengkan upacara maaf-memaafkan itu sebagai semacam hiasan, gincu, atau klise-klise yang sebenarnya semu dan tidak sungguh-sungguh. Dan kalau itu terjadi, maka yang kita peroleh bukan Idul Fitri: sebelum kita menuntaskan secara rasional

dan dengan akidah—segala persoalan personal maupun struktur yang harus dimintakan maaf dan dimaafkan.

Sebuah contoh “naif” lain yang ingin saya kemukakan misalnya begini. Sampai memasuki akhir Ramadhan ini keluarga kami itu belum lagi mampu membatasi atau melunasi utang-utang kepada beberapa rentenir. Jumlahnya sedemikian besar untuk ukuran kami, sehingga kami belum tahu apakah nanti di Hari Raya hal itu bisa “bersih”.

Dan nanti di Hari Raya antara kami, para pengutang, dengan para rentenir akan tenggelam dalam lalu-lalang maaf-memaafkan, saling tersenyum dan muka cerah, sambil tetap menyimpan diam-diam persoalan-persoalan utang itu. Apakah kami harus terlebih dulu “menghukum” diri kami sendiri atas dosa kami berutang kepada sistem riba itu; dan lantas berusaha me-*nahyi munkar* kepada kezaliman para rentenir, sehingga kami punya keabsahan untuk akhirnya saling memaafkan?

Sungguh sayang kalau fenomena agung Idul Fitri anugerah Allah itu sekadar hidup sebagai hiasan kebudayaan, dan belum kita usahakan menembus ke dimensi hubungan-hubungan sosial, ekonomi, bahkan politik. Kalau usaha menembus itu tak kita lakukan, maka akan makin jauh lagi dimensi keagamaan dari Idul Fitri ini bisa kita sentuh.[]

Kepompong Ramadhan dan Kupu-Kupu Idul Fitri

Lebaran hari kedua, saya ke Ngawi. Kumpulan mahasiswa dari daerah itu di Yogya, Malang, dan Surabaya, mengundang untuk kasih “pidato halal bihalal”—suatu peran yang saya pribadi masih *gojak-gajeg* sampai hari ini.

Dari Yogya pukul 15.00 tiba di Ngawi pukul 18.30. Ke warung, makan rawon, numpang cuci muka dan ganti baju, lantas naik becak ke gedung acara—tepat pukul 19.00 seperti acara dijadwalkan semula. Dari jauh tampak kursi berderet sepi, beberapa satpam nongkrong di gerbang, dan ada seorang anggota panitia.

“Ini tempat halal bihalal mahasiswa, Mas?” saya bertanya.

“Ya,” jawab mahasiswa berkacamata itu.

“Belum mulai, ya acaranya?”

“Wah, kelihatannya molor ini. Mas dari mana?”

“Saya dari Jalan Kartini ...,” kemudian cepat-cepat saya sambung, “ya, sudah Mas, nanti saya ke sini lagi kalau mulai”

Saya pun *ngeloyor*. Menyeberang ke alun-alun.

Alun-alun yang terbangun rapi dengan pertamanan yang indah dan remang-remang. Satu-dua pemuda duduk menunggu entah apa, sementara beberapa pasang gelandang tampak asyik bercumbu rayu. Saya pun duduk, merebahkan kesunyian hidup saya yang panjang.

Ini Ngawi, kota koma. Kota tempat lewat. Kota yang selalu dilewati oleh orang-orang yang lalu-lalang menuju “masa depan”, sementara para pensiunan yang memenuhi kota ini bagai sedang berduyun-duyun menuju masa silam.

Betapakah kiranya sosok anak muda, pelajar, dan mahasiswa, yang dilahirkan dan dibesarkan oleh lingkungan macam ini?

Setengah jam kemudian saya bangkit. Mahasiswa mulai berdatangan memasuki gedung. Tetapi, saya cukup pemalu untuk ber-*kulonuwun* dan kemudian disambut dipersilakan duduk di kursi paling depan dan mengobrol dengan Pak Kasubdit ini-itu atau Pak Wakil Bupati, di mana saya sebaiknya memilih kata-kata yang lembut, penuh rumbai, dan bungkus

Muka saya meringkuk di sisi salah seorang satpam, yang segera keheranan, kok ada Mas Mahasiswa yang mau-maunya ngobrol dengannya, serta begitu besar perhatian terhadap nasibnya: hidup yang sulit, cari pekerjaan tersakit-sakit, uang sogok ini-itu, anak sudah telanjur empat, sekolah tak kunjung gratis, dan akhirnya tercapai cita-cita menjadi “Jogoboyo modern”.

Sampai akhirnya salah seorang panitia *ngonangi* saya. “Mari, Mas masuk, duduk dan minum-minum, di sana ada Bapak Ketua KNPI yang nanti memberi sambutan”

Gedung olahraga ini dibikin tidak untuk lalu lintas suara. *Sound system* yang bagus ini pasti akan mengambang-ambang gemanya. Dinding pembatas panggung dan penonton amat menciptakan jarak psikologis. Pengaturan *bloking* forum ini sendiri kurang menyediakan kemungkinan untuk situasi karib antarhadirin.

Dan ketika kemudian saya maju ke panggung, segera terasa tidak ada inti Idul Fitri apa pun yang relevan untuk disampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi yang amat berbahagia ini. Ini bulan Rama-

dhan, di mana kebudayaan kaum Muslim sedang khusyuk mengiktikaf, mengepompong, merenung, mendalam, memusat. Ini adalah lebaran; periode kupu-kupu yang berkibar-kibar sayapnya, bernyanyi di antara mereka, *kemriyek*, tak habis-habisnya bertegur sapa. Lebaran. Pesta. Kuda terlepas dari ikatannya.

Mestinya kita selenggarakan semacam *coctail party*, *standing party*. Makan-minum kecil sambil berdiri bergerombol dengan *gang*-nya masing-masing. Ini Idul Fitri, biarlah menjadi urusan pribadi masing-masing.

Tak perlu ada panggung. Mereka sendirilah pemain di atas panggung. Segala sesuatu hanya ilustrasi: musik *rock* itu, wayang *mbeling* itu, tarian itu, apalagi saya ... hanya ketika saya menyentil-nyentil masalah politik: itu bisa menjadi madu yang cepat diisap oleh para kupu-kupu.

Dengan total saya berbicara tentang anatomi konteks halal bihalal, pengertian fitri, puasa sebagai latihan untuk puasa kehidupan yang lebih luas, dosa *'ain* dan dosa *kifayah*, atau dosa individual dan dosa struktural sebagai kriteria untuk memproses kefitrian manusia dan masyarakat

Dengan agak berapi-api bahkan saya teriakkan: “Saudara-Saudara ini orang pilihan! Lihat ada berapa ratus ribu pemuda-pemudi Ngawi yang tak bisa meneruskan sekolah seperti Saudara-Saudara! Jadi, tanggung jawab sosial Saudara-Saudara ini berkali-lipat dibanding tanggung jawab rakyat biasa ...!”

Namun, saya memukuli udara. Mayoritas hadirin ini adalah mahasiswa hasil NKK-BKK. Mereka juga bukan sedang berada di wilayah seperti Yogya, di mana Islam makin menemukan kebangkitannya, gigih mencari dan menemukan bentuk gerak langkahnya.

Saya ingat satu hal: untuk “melayani” proses kebangkitan itu saja mubalig-mubalig kita belum memiliki kesiapan yang maksimal. Maka,

sosok umat mengambang sungguh merupakan tantangan yang lebih besar.

Jadi, inilah bentuk syukur saya atas semua keadaan ini: mengimbau kepada bapak-bapak untuk memaksimalkan fungsi *ra'iyah*, kepemimpinan[]

Nabi Musa, Gunung Kelud, Idul Fitri, dan Dunia Baru

Kita saling mengucapkan Selamat Lebaran, dalam arti harfiah yang mana pun. “Lebar” bahasa Jawa yang berarti *usai*—*usai training* menuju “pertandingan” yang sebenarnya. Sebab, puasa Ramadhan itu sekadar berlatih, agar kita sanggup berpuasa atau “mewajarkan” konsumsi-konsumsi hidup sehari-hari, eksplorasi pembangunan, beberapa banyak minyak dikuras dan kayu hutan ditebang, atau berpuasa apa pun secara mikro maupun makro.

Bisa juga “lebaran” dalam maksud “lebar”—lawan kata sempit. Selama Ramadhan kita menyempitkan kemungkinan, kemudian kini kita lebaran kembali. Tahap “sempit” dan bagaimana yang “pas”. Yang tengah-tengah, yang *sedengan*. ‘*Kan khairul umuri ausathuha*, sebaik-baik urusan itu tengah-tengahnya. Umat Islam juga disebut *ummatan wasathan*. Moderat. Lentur. Bukan kaku, bukan lembek. Tak kurang, tak lebih. Tak radikal, tak kompromis. Tidak foya-foya, tidak menyiksa diri. Tidak hedonis, tidak masokhis. *Sakmadya*.

“Pas” itu yang terbaik. Tidak kekenyangan, tidak kelaparan. Tidak kependekan, tidak kepanjangan. Tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Tidak meratap-ratap, tidak memekik-mekik. Tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih. Biasa-biasa saja.

Berfokus pada Allah

Oleh karena itu, dalam berlebaran ada ucapan *Minal ‘Âidin wal Fâizîn, fi kulli âmin wa antum bikhair*. Sesudah lulus puasa, kita menjadi tergolong dalam kalangan “orang yang kembali (wajar) dan menang, di sepanjang tahun engkau semua terawat dalam kebajikan”.

Orang yang kelaparan dan kekenyangan itu kalah. Yang menang adalah yang biasa-biasa. Juga orang yang terlalu miskin dan terlalu kaya itu kalah, keduanya mudah terpeleset ke kondisi *kufur*. *Kufur* itu artinya ingkar. Ingkar terhadap Allah. Ingkar kepada Allah itu artinya tidak setia kepada apa yang paling sehat, yang paling benar, yang paling baik, serta yang paling indah.

Idul Fitri itu kembali ke fitrah. Kembali dari kekalahan menuju kemenangan. Bukan kemenangan atas orang lain, sanggup mengendalikan diri, menyelesaikan segala kondisi diri kepada apa yang dikehendaki Allah. Idul Fitri itu Idul Bayi. Kalau kita sudah sanggup seperti bayi, menanglah kita. Bayi itu kalau menangis, ya karena dia jujur mau menangis. Kalau dia omong, tak ada jarak atau apalagi pertentangan, antara kata-katanya dan suara hati atau pikirannya. Kalau senang, dia tertawa. Tak ada yang disembunyikan, dalam arti dia jujur sejujur-jujurnya. Bayi tak punya kesanggupan untuk *kufur* terhadap *sunnatullah*.

Salah satu metode sosial untuk mencapai Idul Fitri ialah bermaaf-maafan antarmanusia, dalam strata apa pun atau dalam satuan budaya apa pun. Bermaaf-maafan itu seperti “mandi besar kultural”.

Maka, esai ini juga dalam rangka nyicil bermaaf-maafan. Namun, lebih dulu perlu kita sebut ada ajaran etika dalam hubungan apa pun termasuk maaf-maafan. Misalnya, ajaran melalui *Al-Fâtihah*. Ibu Al-Quran itu terdiri dari tujuh ayat. Tiga ayat pertama berfokus pada Allah, gelar, dan puji-pujian untuk-Nya. Ayat keempat memuat *share* atau negosiasi antara Allah dan berfokus pada kepentingan manusia, di mana dia meminta, mengemis, memohon kepada Allah.

Itu ajaran etika. Kalau kita mau bertamu ke rumah seseorang, kita harus memiliki apresiasi terlebih dahulu terhadap orang yang akan kita datangi. Siapa nama persisnya, bagaimana wataknya, apa kesukaannya, lagak lagunya, seleraanya, serta segala sesuatu tentang kepribadiannya. Kemudian dengan bekal pengetahuan, kita bisa menentukan bagaimana cara kita bertamu, kalimat apa yang kita pilih, pola sopan santun bagaimana yang mesti kita gunakan. Lantas kita mengetuk pintu, melakukan pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan tuan rumah. Pokoknya, menerapkan pola *approach* yang sebaik-baiknya: baru sesudah itu kita kemukakan apa maksud kedatangan kita.

Begitulah Al-Fâtihah: memahami Allah dan memuji-Nya dulu, baru minta sesuatu. Demikian juga dalam “konsep arsitektur”, misalnya kalau Anda bikin rumah, sebisa-bisa ada halaman, ada berandanya. Dengan begitu, ada ruang untuk proses transisi psikologis. Tidak tiba-tiba saja seorang tamu masuk kamar tuan rumahnya dan mengemukakan sesuatu. Demikianlah etika hubungan sosial, itu salah satu kandungan makna dari struktur dan sistematika ayat-ayat Al-Fâtihah.

Kalau pada lebaran ini saya bertemu Anda dan langsung minta maaf, sesungguhnya itu agak aneh dalam pandangan etika sosial. Sebab, saya minta maaf itu fokusnya adalah untuk kepentingan Idul Fitri pribadi saya. Jadi dengan minta maaf, sesungguhnya saya mendahulukan kepentingan pribadi saya dari kepentingan Anda.

Maka, sebelum mohon maafan, terlebih dahulu saya harus menyatakan bahwa saya telah memaafkan Anda, memerdekakan Anda, menyumbangkan proses Idul Fitri Anda. Untuk konteks yang mungkin saya terapkan melalui esai ini, saya menerapkan “tiga ayat Al-Fâtihah yang awal” kepada para kelompok, jamaah, panitia-panitia, dan seterusnya, yang selama bertahun-tahun ini terlibat kerja sama dengan saya. Sebelum saya mohon kemerdekaan, saya wajib lebih dulu memerdekakan.

Maka, perkenalkan saya sampaikan ikrar kemerdekaan atau pemfitrian saya kepada para sahabat, kelompok-kelompok, panitia acara-acara, yang entah dorongan apa—pernah mengklaim nama saya, men-

cantumkan nama saya dalam publikasi tanpa menghubungi dan meminta persetujuan saya, sehingga ketika dalam forum itu saya tak ada, maka hadirin menyalahkan saya. Teman-teman yang menjual tiket acara tanpa bilang-bilang kepada saya. Teman-teman yang merekam ceramah atau pembacaan puisi saya, menggandakan rekaman itu dan menjualnya, entah di Surabaya, Bandung, Jakarta, atau di Yogya sendiri. Teman-teman yang memperlakukan saya hanya sebagai alat dari kepentingan mereka. Teman-teman yang mengingkari akad dengan saya. Teman-teman yang kalau datang ke rumah kediaman saya tak mau menghormati para penghuni di sana karena hanya punya pamrih kepada saya. Teman-teman yang seolah-olah seorang pangeran datang untuk memberi “dawuh” kepada saya. Teman-teman yang tak bersedia menerima saya sebagai manusia biasa yang juga punya kondisi-kondisi normal, yang waktunya dan tenaganya terbatas, yang harus cari nafkah, yang butuh waktu untuk berkarya yang baik, yang butuh istirahat. Dan seterusnya. Dan seterusnya.

Haq

Perkenankan saya menyatakan bahwa sejak detik pertama peristiwa egoistik atau bahkan eksploitatif seperti itu terjadi, saya telah langsung pula memaafkan—meskipun pada saat yang sama saya punya juga kewajiban untuk tidak membiarkan ketidakadilan, sikap amoral, serta ketidakbenaran pemahaman terhadap nilai-nilai.

Maafkan bahwa untuk melakukan *shock therapy* terhadap akibat-akibat dari ideologi cinta model Isa yang saya terapkan bertahun-tahun, saya menyelenggarakan *tajribah* (eksperimen) dengan menerapkan “ideologi *haq* model Musa” yang keras tanpa kompromi. Percayalah bahwa pergeseran dari kutub cinta ekstrem lembeknya Isa menuju kutub kebenaran ekstrem kerasnya Musa, saya berharap sesudahnya bisa menemukan manajemen *hubb* (cinta) dan *haq* (kebenaran) yang seimbang dan tertata sebagaimana kerja sama kita akan insya

Allah lebih etis, penuh pengertian, benar, baik dan indah, serta saling menyayangi secara *haq*.

Mikro maupun Makro

Maafkan juga kalau saya sedemikian rewel—terutama kepada para jamaah kaum Muslim tertentu—untuk memperdebatkan soal keharusan dakwah *bilisanil hal*, dakwah *ihsan* (tak hanya iman), juga tentang skala tugas (Elly Pical tak mungkin bertinju dari kampung ke kampung) sehingga komunikasi kerja sama kita lebih efektif dan efisien; juga tentang *division of labour*, pembagian tugas yang tertata antara mubalig, budayawan, cendekiawan, pekerja sosial, ulama, dan seterusnya, sehingga tidak silang sekarut, menggumpal di beberapa titik tetapi mencair di tempat lainnya; atau juga tentang keperluan penataan organisasional keumatan kita, karena sudah semakin tidak efektifnya institusi-institusi keagamaan yang sudah telanjur kita miliki sekarang ini. Belum lagi—maafkan juga—saya suka *ngeyel* kepada siapa pun soal-soal yang menyangkut kejumudan kita semua ini, kebodohan yang berkepanjangan, sambil berdoa semoga kita tidak termasuk di dalam golongan manusia yang disebut Allah: “*khatamallâhu alâ qulûbihin wa ‘alâ sam‘ihim wa ‘alâ abshârihim ...*”—telah ditutup oleh Allah hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka

Mohon samudra jiwa Anda sehingga kita bisa saling memerdekakan, dan dengan begitu akan lebih lapang jalan untuk memperoleh pengampunan Allah.

Idul Fitri berskala mikro maupun makro. Bisa antarpribadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan kolega, teman sekampung, tetapi berskala luas: sekebudayaan, senegara, sebangsa, seperadaban.

Dalam perjalanan kebudayaan dan peradaban Indonesia dan dunia, selama ini kita dapat melakukan berbagai macam puasa. Ada kelompok sosial di tengah masyarakat kita yang terus-menerus mengalami puasa sosial ekonomi atau sosial politik, sementara kelompok lain terus-menerus melakukan “hari raya”, dalam arti pesta pora.

Akan tetapi, secara keseluruhan, jika kita berbicara tentang peradaban umat manusia abad ke-20 ini di muka bumi; gerbang abad ke-21 akan memasuki “Ramadhan Peradaban”, Idul Fitri di bidang lain. Fasilitas kehidupan kita makin menipis, jumlah penduduk bumi akan sangat membengkak, dan itu makin tak seimbang dengan makin terkurasnya kemampuan bumi untuk memberi kita kesehatan dan kesejahteraan. Belum lagi berbagai kerusakan ekosistem, kekacauan lingkungan hidup. Akan ada suatu kegelisahan besar, dengan skala peradaban; akan kita masuki beberapa bentuk budaya dan justru karena itu sejak sekarang para cerdik pandai telah berusaha keras untuk menemukan kembali Idul Fitri. Artinya, kita mulai mencari kembali apa yang sebenarnya terbaik untuk kehidupan, kita membenahi filsafat hidup, dan menjernihkan pengertian kita tentang mana maju mana mundur, mana sejahtera mana “kapiran”, mana sehat mana sakit. Kita merumuskan kembali sistem-sistem nilai, ideologi, wajah agama, dan seterusnya.

“Kapak Ibrahim”

Menurut beberapa orang pandai, gejala Eropa Timur merupakan rekonstruksi kurun Ratu Bilqis pada zaman Raja Sulaiman, Sosialisme primitif ala Bilqis maupun sosialisme ortodoks Eropa Timur telah lumayan bisa digeser atau “disembuhkan” tanpa terlalu banyak pengorbanan. Di dunia kapitalisme Eropa Barat dan Amerika atau Asia, sedang kita tunggu apa sesungguhnya yang merupakan pemunculan “Ibrahim yang tidak bisa dibakar”—sebab yang berlangsung di sana adalah Namrudisme. Iseng-iseng dengan pemusik Sapto Raharjo atau Debbie Nasution saya pengen bikin album *rock* “Kapak Ibrahim”: itu rupanya sekadar isyarat ilmu tentang *therapy Ibrahimiyah* terhadap “galaksi kapitalisme *rock n’roll* di sana.

Itulah tanda-tanda Idul Fitri Bilqistik maupun Namrudistik di mancanegara. Di negara kita sendiri, kita tak tahu apa-apa. Kita masih sibuk meramal buntut, membaca majalah *Monitor*, dan nonton Ikke

Nurjannah yang *ngeneske ati*. Selebihnya kita sekadar menyaksikan Gunung Kelud meletus bersamaan dengan gerhana matahari: ada udara hangat dari timur. Berarti kita sedang menghayati “era Musa” si anak kesayangan Fir’aun, yang mencabut janggut bapak angkatnya itu, kemudian akhirnya menjadi tonggak sejarah.

Akan tetapi, kita semua awam di bidang semacam begitu. Kita ber-Idul Fitri “normal-normal” saja, tak usah Idul Fitri peradaban segala. Cukup saling kunjung sanak famili, berjejal-jejal di toko-toko, memenuhi pasar, bikin acara halal-bihalal, makan-minum bersama, sambil kita tertawa terbahak-bahak.[]

Hanya yang Fitri yang Kupanggili

Afahasibtum annamâ khalaqnâkum ‘abatsan ...?

(Rumangsamu aku nggawe kowe kabeh iki dilanan ‘po?)

Wahai jiwa yang tenteram, kembalilah ke hadirat-Ku.

(Qala-Allah)

Marilah bersama kita coba temukan titik *fitri* dalam metabolisme kompleks peradaban ini dengan metode melingkar, meskipun medan dan momentum yang tersedia buat gelombang perbincangan di harian ini tidak cukup lebar.

Idul Fitri lebih esensial dari peristiwa bermaaf-maafaan antarhamba Allah. Idul Fitri lebih tinggi derajatnya dari gegap gempita pesta pasca-Ramadhan. Idul Fitri tidak bisa kita hinakan dengan sangkaan-sangkaan tentang pakaian baru dan mercon. Juga, apabila kita mensimplifikasikannya dalam klise-klise syawalan kultural di kampung dan kantor-kantor.

Laisal ‘idu liman labisal jadîd, walâkinna ‘idu liman thâ’atahu tazîd.
Idul Fitri bukan milik orang yang berpakaian baru, melainkan milik hamba Allah yang kepatuhan ilahiahnya menyubur.

Kita berangkat dari pertanyaan Syaikh Jangkung: “Kenapa pertahanan tidak boleh membalikkan serangan?” Yang kemudian dijawab oleh Mas Kalong: “Karena hanya ada satu mata air kekuatan, dan hanya ada satu pula sumber ke mana segala kekuatan harus dikembalikan.”

Dalam biologi, kekuatan adalah kelengkapan fisik dan energi. Dalam ekonomi, kekuatan adalah modal, alat produksi, dan pasar. Dalam

politik, kekuatan bisa berupa ke-akan-an massa, bisa bersenjata, bisa takhayul. Dalam budaya, kekuatan adalah daya magnetik, kecanggihan komunikasi, keunggulan gebyar, estetika, atau sihir.

Dalam pergulatan hidup, manusia saling mempertarungkan kekuatan. Mempersaingkan. Membenturkan. Berperang di antara dua kutub: kalah dan menang. Subjek dari kekalahan dan kemenangan itu, pada umumnya, adalah diri. Ego (sentrisme) seseorang, pihak, kelompok, partai, sayap, kubu, dan sebagainya.

Sampai beratus abad kehidupan berlangsung, umat manusia tetap tidak beranjak dari sifat kekanak-kanakan untuk menang atas orang lain. Politik, nasionalisme, keadikuasaan, kebudayaan, dan peradaban, adalah permainan gundu atau “gobak-sodor” (*go back through the door*)—di mana hakikat kemenangan dan kekalahan hanya lokal, relatif, situasional, momentual. Tidak abadi.

Adapun puncak ilmu dan pelajaran bagi siapa pun yang bernama manusia, ialah *kemenangan sejati*.

Kemenangan sejati sama sekali bukan kemenangan atas orang lain. Bahkan juga bukan kemenangan umat Islam atas umat yang lain, karena Islam tidak dihadirkan ke bumi untuk kekuasaan satu pihak atas pihak lain, melainkan untuk merahmati seluruh alam.

Muhammad Saw. menjelaskan dengan bahasa amat populer bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan atas nafsu diri sendiri.

Orang berhasil menguasai orang lain, memiliki dunia dan barang-barang sejuta kali lipat dibanding yang dimiliki orang lain. Orang sukses mempertahankan kekuasaan. Dan itu benar: itu memang mempertahankan kekuasaan. Tetapi, itu sama sekali tidak sama dengan mencapai dan mempertahankan kemenangan.

Segala yang kita miliki, segala rasionalitas dan takhayul tentang pemilikan tanah, modal, hak asasi, jabatan, nama besar atau nama kecil—dihadang oleh apa yang Mas Kalong kemukakan: “... dan hanya Satu sumber pula ke mana segala kekuatan harus dikembalikan”

Ilaihi râji‘ûn. “Kepada-Nya segala sesuatu akan dan harus kembali”. *Wa-annakum ilainâ lâ turja‘ûn?* “Kalian pikir kepada siapa kalian akan

kembali selain kepada-Ku?” Tak ada tempat kembali, tak ada waktu dan ruang untuk mengangkut kembali segala diri dan embel-embelnya ini—kecuali kepada-Nya.

Akan tetapi, *‘abatsan*. Main-main. Manusia amat suka main-main. Manusia amat sembrono untuk berani melecehkan kandungan rahasia sunyi dalam kesadarannya sendiri di mana Allah menyaksikannya dengan mata ketajaman dan kelembutan yang tak berhingga. Sedemikian rupa sehingga di antara manusia telah makin hilang ukuran untuk mencermati apakah agama sedang diagungkan atautkah sedang dijual eceran, dipakai hanya sebagai aksesoris eksistensi dan embel-embel megalomania yang kerdil.

Lâ burhâna lahû bihî, fa innamâ hisâbuhû ‘inda rabbihî. Tak ada kesejahteraan ruhani yang sejati baginya, dan berada di tangan Allah-segala perhitungannya.

Demikian kata Allah. (Maaf, tidak saya tulis “Demikian firman Allah”. Sebab, Allah tidak feodal. Dia memberi contoh bahwa memanggil-Nya cukup dengan Allah saja. Tak pakai “Panjenenganipun” dan sebagainya. *Ngoko*. Dalam Al-Quran: Nabi berkata, manusia berkata, setan berkata, Tuhan juga berkata).

Maka, yang bernama kesejatan, kesucian, atau kefitrian, bisa kita lihat pada beberapa petala.

Dengan puasa, kita mengendalikan nafsu. Menyaring yang termurni di antara 36 jenis nafsu. Menyesuaikan dan menyatulangkahkan dengan *iradatullâh*. Bangun tidur kita, mandi kita, pakaian kita, keputusan birokrasi kita, bangunan rumah tangga kita, hanya akan fitri apabila berdiri di atas landasan *amrullâh* (perintah Allah), sinkron dengan *arâda syai’an* (Dia menghendaki sesuatu), dan berpedoman pada *anyaqûla lahû* (Dia mengatakan sesuatu). Hanya dengan itu, terjadi *kun fayakûn*. Terjadilah, dan terjadi seperti Allah sendiri menghendakinya terjadi.

Kita menjadi insinyur karena Allah memang menghendaki kita menjadi insinyur. Tetapi, apakah kita menjadi insinyur karena Allah memang menghendaki kita menjadi insinyur? Sebab begitu demokra-

tisnya Allah, setan pun dipersilakan menjadi *decicion maker of his own*.

Jadi, siapakah yang fitri, satu-satunya yang diperkenankan memenuhi panggilan Allah? Ialah hamba-Nya yang *muthma'innah*, yang sanggup memerdekakan diri untuk tidak *digendholi* nafsu ego kecil, status sosial, posisi budaya, pemilikan dunia, kekuasaan yang semu dan sementara. Tinggal Allah yang *tathma'innul qulub*, yang menenteramkan hati sejati.[]

Idul Fitri, “Mandi Besar” Manusia dan Kebudayaan

Untuk membicarakan Idul Fitri, kita bisa memakai acuan firman yang mana pun dari Al-Quran. Artinya—minimal pada cara pendekatan yang saya pakai—bisa memakai ayat mana pun dan surah mana pun. Sebab Al-Quran itu, meskipun terdiri dari mega titik-titik makna, garis-garis, sendi-sendi, sudut-sudut, maupun ornamen-ornamen: namun—atau justru karena itu—adalah suatu kebulatan.

Kebulatan bisa menggambarkan suatu semesta yang tak terhingga, sekaligus ia sekadar sebuah titik. Di dalamnya, arah dan diferensiasi garis-garis dan ruangan berlaku relatif: artinya, semua itu kembali kepada atau menjadi hakikat kebulatan itu sendiri.

Titik, garis, dan ruang itu, tinggal diproyeksi apa artinya secara teologis, secara kosmologis, serta secara filosofis. Ketika pada perhubungan antara ketiganya Anda berjumpa dengan kaitan timbal balik antara *din* dan *ushuluddin*, jarak antara *fiqh* dan *ushulul-fiqh*, atau mungkin rentang pemahaman pengetahuan, kemudian dengan teknologi dan aplikasi kebudayaan dan peradaban—di hadapan mata Anda jadi terhamparkan cakrawala dari yang bernama kebulatan atas titik tersebut di atas.

Kebulatan dan titik itu menggejala ketika kita berpikir tentang strukturalisme yang berlangsung dengan dan dalam sistem-sistem—

seperti lukisan ombak gelombang dengan gerakan-gerakannya secara ruang dan oleh waktu. Kebulatan dan titik itu pulalah yang kita sebut jumbuh dalam konteks transendensi budi daya kemanusiaan, atau tauhid dalam bahasa keagamaan.

Namun, tradisi penciptaan Allah atau hukum alam, juga menentukan hal yang disebut sebagai titik-titik refleksi. Yakni, suatu ambilan yang terefektif dan terefisien, atau wilayah kausalitas yang “pragmatis”. Anda bisa menyembuhkan sakit kepala dengan jungkir balik menggerak-gerakkan seluruh tubuh, tetapi barangkali lebih efektif dan efisien untuk merekayasa kesembuhan itu dari titik-titik refleksi tertentu. Demikian juga untuk memperbincangkan Idul Fitri, Anda bisa mengambil ayat apa saja dan dari surah apa saja, tetapi pasti lebih “ekonomis” apabila dipilih wilayah-wilayah firman tertentu.

Maka, saya ingin mengambil sejumlah “titik refleksi” firman. Pertama, titik fitri atau fitrah.

Idul Fitri berarti telah tibanya suatu “perjalanan kembali” dari kondisi tidak fitri menjadi fitri. Dari palsu menjadi sejati. Perjalanan itu sudah pasti harus melibatkan seluruh dimensi hidup pelakunya. Ya, spiritualitasnya, ya intelektualitasnya, ya moralitasnya, ya estetika-nya, ya pergaulan sosialnya, ya keterlibatan seluruh kesejarahannya. Perjalanan kembali itu, seperti kita ketahui bersama, ditempuh dengan metode puasa.

Kemudian titik yang lain: kondisi fitri itu misalkan kita acukan ke definisi *ahsani taqwîm*. Itu Tuhan yang bikin istilah: artinya “sebaik-baik makhluk yang Dia ciptakan”. Lantas kondisi tidak fitri itu kadar-kadar kepalsuan, penyelewengan, atau pengingkaran—dalam sistem nilai Tuhan—yang disebut *asfala sâfilîn*. Artinya, yang terendah dari yang rendah-rendah. Tentu saja *asfala sâfilîn* ini titik ekstrem dari kepalsuan yang dicapai oleh manusia: kita mengerti bersama bahwa mungkin tidak seorang pun yang benar-benar bisa kita kategorikan

sebagai *asfala sâfilîn*, tetapi sekadar memiliki atau berada pada kadar “aspal” yang berbeda-beda.

Konteks yang terakhir ini bisa kita analogkan dengan kenyataan bahwa tak ada manusia yang sungguh-sungguh Muslim seperti juga tak ada manusia yang sungguh-sungguh kafir. Pendekatannya di sini lebih objektif untuk kita acukan ke “nilai” atau “potensi” yang dimiliki seseorang, bukan pada manusianya. Maksud saya, lebih baik pakai istilah *kufur* atau unsur kekafiran dalam perbuatan seseorang, daripada kafir.

Memang, pada tataran syariat atau hukum formal seseorang bisa disebut Muslim asal dia telah mengucapkan syahadatain, dan disebut kafir begitu dia mencabut ikrarnya. Tetapi, syariat hanyalah salah satu dimensi dari kehidupan yang bulat ini.

Demikianlah, maka acuan palsu dan sejati, perjalanan kembali ke fitri, juga menjauhi kadar *asfala sâfilîn* untuk menemukan kembali *ahsani taqwîm*—bisa kita temukan dan uraikan dalam berbagai kerangka konteks.

Berada di atas taraf materi, tumbuhan, dan hewan, manusia adalah makhluk yang berketumbuhan, bernyawa, memiliki tak kurang dari tiga puluh enam jenis nafsu, serta—atau tetapi juga—dibekali akal budi atau kecerdasan nalar.

Seandainya manusia tak punya daya intelek, maka fitrah manusia cukup ditolakukuri oleh *output* pemuatan fisiknya dan manifestasi nafsu-nafsunya—dan dia sama sekali tak dipersalahkan atau “tak menjadi palsu” apabila hidupnya dikendalikan oleh nafsu-nafsu tersebut. Juga ketika nafsu-nafsu itu mewujud dalam bentuk-bentuk pelaksanaan hidup yang bagus atau indah. Binatang pun memiliki naluri dan intuisi estetika, umpamanya. Artinya, jika pelaksanaan estetika kemanusiaan tidak diimbangi atau ditata bersama dengan daya akal budi, maka dia belum lebih tinggi harkatnya dibanding binatang.

Oleh karena itu, apakah manusia bergeser ke wilayah kepalsuan atau tidak, sesungguhnya ditentukan terutama oleh eksplorasi daya intelek. Daya inilah yang membuat manusia sanggup mengarahkan arah cita rasa keindahannya, membatasi keinginannya, serta mende-wasakan kehendak dan cita-citanya.

Pada kemungkinan lain, jika daya intelek manusia dipakai justru untuk memanjakan nafsu-nafsu, maka muatan kemajuan peradaban manusia justru memiliki arah terbalik dari kutub nilai *ahsani taqwîm*.

Kemudian, kita tinggal membuat “daftar” seberapa jauh manusia memasuki wilayah *asfala sâfilîn*. Misalnya, egoisme, sikap asosial, atau ketidakadilan. Anda tinggal mengisikan di lajur ini: ketidakpedulian sosial, akumulasi kesejahteraan, otoritarianisme politik, sentralisme kekuatan-kekuatan sejarah, dan sebagainya. Artinya, kita bisa memuatkan padanya gejala atau data-data *asfala sâfilîn* dari pergaulan antar-manusia, perhubungan profesional, strukturalisme ekonomi dan politik, dan seterusnya.

Silakan Anda memperhatikan kembali, menjelang Idul Fitri ini, apa saja di lingkungan Anda—termasuk lingkungan internal diri kita sendiri—yang potensial menjadi *asfala sâfilîn*. Anda juga silakan membaca koran, majalah, dan buku-buku, untuk menemukan berpuluh-puluh ribu *asfala sâfilîn* dalam sejarah yang kita selenggarakan bersama ini.

Sesudah itu baru kita perkirakan seberapa mungkin Idul Fitri atau “perjalanan kembali” ke kondisi *ahsani taqwîm* itu kita laksanakan. Insya Allah kita akan menemukan keprihatinan besar di situ. Jangan kan Idul Fitri sosial struktural, sedangkan Idul Fitri personal saja susahnyanya bukan main.

Menjelang Idul Fitri 1411 ini, kita justru sangat gencar mendengar dan membaca berita tentang berbagai jenis perampokan resmi maupun tak resmi, berbagai modus ketidakadilan dan ketidakbenaran; belum lagi apabila kita baca-baca kembali “PR-PR” rutin dari problem negara

dan masyarakat hampir di setiap bidang yang bagai tak akan habis-habisnya.

Diam-diam kita merasa “ampang” dan “risi” kepada Tuhan dalam memasuki hari agung Idul Fitri ini, karena sedemikian banyak kasus-kasus *asfala sâfilin* di bidang hukum, politik, ekonomi, bahkan kebudayaan.

* * *

Pada judul tulisan ini, saya memilih istilah mandi besar untuk menggambarkan perjalanan memperoleh kembali kondisi fitri manusia dan kebudayaannya.

Para ilmuwan sejak lama sepakat bahwa Idul Fitri atau “mandi besar” untuk mencuci sejarah kita dari problem-problem dan penyakitnya adalah dengan “penyelesaian struktural”. Maka, mari bayangkan Idul Fitri macam apa yang bisa kita capai dewasa ini?

Pertanyaan itu paralel dengan pertanyaan sebelumnya: Puasa macam apa yang bisa kita lakukan dalam mekanisme sosial kita? Sejauh ini puasa kita baru tingkat elementer: tidak makan dari subuh hingga maghrib; alangkah sederhananya.

Kita pura-pura percaya bahwa puasa adalah metode untuk menempuh perjalanan kembali ke kefitrian, adalah cara untuk “mandi besar” atau untuk membersihkan diri dari dosa-dosa besar maupun kecil. Tetapi, kita mengongkosi kepercayaan itu dengan dekadensi pemahaman metode puasa: begitu berbuka ketika maghrib, kita merasa telah sukses berpuasa.

Padahal, tolok ukur keberhasilan puasa adalah pada kefitrian perilaku sosial, kefitrian tatanan sistem, kefitrian manajemen dunia politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Mohon maaf saya tampak “pesimistik”, tetapi itu semata-mata karena saya ngeri dimarahi oleh Tuhan.[]

Kepantasan untuk Dimaafkan

Barangkali Anda pernah membaca sebuah Hadis Qudsi yang menggambarkan betapa *nranyak* makhluk yang bernama manusia. Itu pun tak hanya di antara sesama manusia, tetapi juga terhadap Tuhan-nya.

Allah menggambarkan hamba-hamba-Nya melakukan dosa dan dosa, menumpuknya dari hari ke hari, sampai pada akhirnya tiba pada suatu keadaan—mungkin penyesalan, mungkin rasa jijik pada dirinya sendiri—sehingga membutuhkan permintaan maaf Allah. Dan Allah, Yang Mahabaik itu, sudah barang tentu memaafkannya.

Akan tetapi, kemudian kesalahan-kesalahan ditumpuknya lagi, dan akhirnya cemas dan memohon ampun lagi, dan Allah lagi-lagi mengampuninya pula. Hal demikian terulang terus-menerus dalam kehidupan. Sampai akhirnya sang hamba tiba-tiba meninggal dunia sebelum sempat melakukan pertobatan kepada-Nya.

Namun, apa kata-Nya? “Aku pun tetap juga memaafkannya.”

Bukankah memang Allah memiliki tak kurang dari lima sifat pemaaf atau pengampun? Mengapa tak satu saja? Bukankah dengan cukup satu pengampunan seluruh dosa besar dan dosa kecil umat manusia menjadi leleh, menguap, dan sirna?

Mungkin karena masing-masing sifat pemaaf-Nya memiliki aksentuasi fungsionalnya sendiri. Atau, barangkali itu merupakan sindiran Allah, betapa manusia bukan saja “tempat kesalahan dan kekhilafan”, melainkan bahkan punya kecenderungan untuk memelihara, bernikmat-nikmat, dan membanggakan kesalahan secara berlebihan—secara substantif, secara ruang, maupun secara waktu.

Sedemikian tinggi potensi manusia untuk melakukan kesalahan, dosa, penyelewengan, penindasan, pembudakan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan; sehingga rasanya tak cukup “dilayani” hanya dengan satu sifat pemaaf Allah.

Penyair Abu Nawas melawak pula: “Dosa-dosa hamba bagaikan timbunan pasir di sepanjang pantai. Maka, siapa lagi yang pantas mengampuni hamba selain Engkau, ya Rabbi?” “Hamba ini tak cocok menjadi penghuni surga, ya Allah, tetapi kalau harus masuk neraka, ya jangan dong”

Manusia bersikap sedemikian manja kepada Allah, mentang-mentang dia adalah *ahsani taqwīm*, sebaik-baik ciptaan-Nya. Karya *master-piece* amat cemerlang yang amat Dia cintai.

Perilaku Biadab

Ketika gunung-gunung, samudra, dan langit mengajukan protes ke langit tentang banyak perilaku biadab umat manusia yang terus saja merusakkan alam dan merusakkan diri manusia sendiri, dan kemudian gunung itu minta izin agar diperbolehkan meledakkan diri dan mengalirkan lahar panas dan batu-batu api untuk menghancurkan kota-kota manusia, Allah menjawab bahwa memang tolong benar manusia berse-dia dijadikan khalifah di bumi, padahal gunung, jin, badai, dan lain-lainnya menolak. Celaknya sang khalifah ini, berbuat tidak lebih baik dari bintang-bintang dan pepohonan yang senantiasa bersujud kepada-Nya.

Manusia mentradisikan kesembronoan ruhani, berlebihan konsumsi, menuruti kemerdekaan sampai tingkat mabuk, mengambil apa

yang bukan haknya, dan tidak menyampaikan apa yang seharusnya disalurkan—baik uang, harta, kambing, maupun hak asasi. Mentang-mentang Allah tidak pernah membuat mata mereka buta sebelah, rambut rontok, dan bibir tiba-tiba “ndower” ketika bangun pada pagi hari. Mentang-mentang Allah amat setia menjaga nikmat-nikmat-Nya untuk selalu berlaku pada manusia, meskipun hamba-Nya ini tidak mematuhi-Nya, bahkan membohongi-Nya dalam berbagai hal.

Memang Allah amatlah mencintai hamba-hamba-Nya. Bacalah firman-firman-Nya. Terkadang Dia tampak begitu bersusah payah berusaha meyakinkan agar manusia memercayai-Nya. Pada saat lain, Dia seolah-olah murka karena Dia tak dinomorsatukan, tetapi dipersekutukan dengan benda-benda dan nilai-nilai yang remeh dan sepele, sehingga seandainya Dia adalah manusia, maka akan tumbuh rasa cemburu dan sakit hati yang mendalam.

Keterlaluan

Atau, tak jarang pula Dia seakan-akan bertanya: “Apa lagikah yang engkau dustakan dari nikmat-nikmat-Ku?” “Utusan-Ku itu bukanlah seorang pembohong, kenapa engkau tak juga percaya kepadanya?” “Bukankah telah Aku lapangkan dadamu? Bukankah telah kuletakkan engkau di tempat yang lebih berderajat? Kenapa sekadar menyan-tuni fakir dan yatim saja engkau berkeberatan?”

Manusia memang keterlaluan. Allah tak habis-habisnya memberi, sementara manusia tak habis-habisnya menuntut. Allah tak jera-jera-nya mencintai, sementara manusia tak kapok-kapoknya membelakangi.

Sementara itu, di antara sesama manusia saja pun diperlukan pengertian tentang kelayakan pada setiap orang untuk dimaafkan. Suatu keadaan yang relevan untuk dikutuk dan keadaan lain pantas untuk dimaafkan.

Tatkala mengajarkan Al-Fâtihah, Allah menuntut manusia untuk pertama-tama mengapresiasi dan memuji-Nya, baru kemudian minta

tolong dan perlindungan. Tak ada Al-Fâtihah yang berbunyi: “*Iyyâka na’budu wa iyyâka nasta’in*”, baru kemudian “*alhamdulillâhi rabbil ‘âlamîn*”.

Manusia baru layak mohon ampun, minta pertolongan, dan perlindungan, kepada siapa pun—apalagi kepada Tuhan—apabila dia telah menunjukkan bukti apresiasi atau penghargaan kepada pihak yang dimintai ampun dan pertolongan.

Keadaan hidup kita, personal maupun sistemik, sampai sejauh ini masih menunjukkan sangat banyak ketidaklayakan empirik untuk di-maafkan oleh Allah.[]

Pertobatan dan Kemuliaan

Musim haji tahun depan merupakan momentum yang khas bagi bangsa Indonesia. Jenis “peradaban” yang berlaku sistemik serta model perikemanusiaan yang sedang diarungi dalam peradaban tertentu membuat makna haji di depan kita itu *khusushan*. Tidak dalam konteks syariat formal, tetapi dalam kaitan tata moral ketuhanan dengan sejumlah modus “keterbudakan” manusia serta peluang-peluang yang tetap tersedia untuk menanam kemuliaan hidup.

Oleh karena itu, meskipun sampai hari ini belum bisa dilahirkan keputusan yang terbijak tentang bagaimana, di mana, kapan *coblosan* Pemilu 1992 sebaiknya dilakukan para jamaah haji nanti: saya memberanikan diri turut menganjurkan agar sebanyak mungkin orang sejak sekarang mendaftarkan diri untuk *brangkat kaji*.

Anak-anak kecil di desa saya, entah karena kebetulan (betul = benar, maka kebetulan = kebenaran) atau karena secara instingtif mematuhi tahap “metabolisme sejarah” tertentu, bernyanyi-nyanyi: ... *brangkat kaji ayo ji ... jimat rojo ayo jo ... joko penthil thelo-thelo ayo lo ... lapis mambu ayo mbu ... mbukak tenong ayo brang ... brangkat kaji ayo ji*

Anjuran ini berlaku untuk mereka yang membutuhkan pertobatan maupun yang ingin mempertinggi *karamah* kepribadiannya. Sejumlah

dukun dan kiai berkata amat serius kepada klien-kliennya, “Berangkatlah berhaji. Niatlah secara khusus kali ini. Bagi kalian yang merasa telah dan sedang melakukan berbagai jenis perampokan yang terang-terangan maupun tersembunyi atau yang personal maupun sistemik, naik haji tak bisa ditunda-tunda lagi, kecuali kalau kalian menginginkan tubuh kalian diinjak-injak atau mayat kalian diseret-seret dengan penuh kutukan oleh orang banyak. Haji kalian kali ini akan setidaknya mengurangi *walat-walat* dahsyat yang mungkin tak bisa kalian tangungkan.”

Sejumlah doktor pengamat kehidupan membungkam mulutnya sambil hatinya bergumam, “Tidak ada sepetah kata pun lagi yang pantas kuucapkan. Tidak ada kata kebenaran yang tidak mati sesudah terlontar dari lidahku. Jumlah dan frekuensi ketidakbenaran sedang mencapai puncaknya.”

Maka, pergi bertamulah ke *Baitullah*. Bertelanjang dan menangislah. Siapa pun engkau: orang biasa-biasa saja, para pendusta yang merindukan *taubah nashûhâ*, para perancang kecurangan yang ingin membuktikan betapa luasnya ampunan Allah, para Abu Bakar penebus nasib Bilal, “para Abu Lahab penumpuk harta” yang tidak menghendaki hidupnya akan keropos *ka’asyfin ma’kûl*, seperti daun-daun kering dimakan ulat, para Abrahah yang ingin menghindari *tarmîhim bihijâ-ratin min sijjîl*. Atau, engkau para “Abu Dzar yang menempuh pengembaraan sunyi”, para Muhammad yang terluka oleh lemparan batu, atau para Zahid yang mengharamkan diri untuk diborgol oleh segala tipu-lamis keduniaan.

Lima manusia *aulia* melayangkan doa yang sama, “Ya Allah, tolong jangan terlalu banyak korban dari orang kecil. Hindarkan sebanyak mungkin umat-Mu yang lemah dari keharusan untuk membayar perubahan ini dengan nyawanya”

Manusia-manusia penuh *karamah* Allah yang jumlahnya amat sedikit ini betapa mulia hidupnya. Mereka penjaga *mizan* peradaban. Engkau tentu bertanya: kenapa aset-aset sakti ini tidak meletakkan diri integral dan produktif dalam proses-proses melawan Abu Jahal,

Abu Lahab, dan Musailamah Al-Kadzdab? Jawabannya adalah pertanyaan balik: kenapa bukan Khidhir yang melawan Fir'aun, kenapa harus Musa? Bukankah kalau Khidhir yang mengerjakan, segala sesuatunya akan sedemikian enteng? Tentulah karena Khidhir adalah "warga negara alam semesta" sehingga rumus dan dimensi integritasnya berbeda.

Mereka yang tersihir tidak pernah tahu bahwa mereka tersihir. Mereka yang mabuk tercampak dari kesadaran yang memungkinkan mereka tahu bahwa mereka mabuk. Mereka yang tenggelam tidak bisa melihat lautan. Maka, siapa pun, *sowan*-lah kepada-Nya. Bertamulah ke rumah-Nya. Jika tembok-tembok tebal menutup jalanmu kepada-Nya, ketahuilah bahwa tak ada jalan tertutup sambil memejamkan mata: ia selalu menantikan cintamu, dekat dalam dirimu sendiri, lebih dekat dari urat lehermu sendiri.[]

Antara Manusia Memiliki dan Manusia Dipinjami

Islam mengenal dua hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Keduanya sama-sama dan bekerja sama menerjemahkan konsep tauhid sebagai satu-satunya kemungkinan tempat kembali ujung hari setiap manusia dan makhluk hidup lainnya.

Istilah “hari raya” sesungguhnya merupakan penerjemahan kultural, sehingga tidak tepat betul secara epistemologi. Arti “raya” menjadi tegas ketika diucapkan perayaan. Ia menunjuk ke suatu keadaan dan perilaku riang gembira karena suatu kemenangan, yang diwujudkan dalam bentuk “pesta” atau bahkan hura-hura tertentu.

Oleh karena itu, Idul Fitri yang diselenggarakan oleh masyarakat kita didominasi oleh aksesori kulturalnya. Padahal, substansinya Idul Fitri dan Idul Adha bukanlah itu semua. Kedua-duanya adalah *Hari Kembali*, atau kalau kita lengkapi: Hari kembali ke keadaan fitrah (sejati), serta kembali dari *qurban*, sebagaimana puasa Ramadhan juga membawa efek yang sama.

Kata *qurban* itu sendiri tidak bermakna sama dengan korban seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Korban berkonotasi negatif, mengandalkan pelepasan sesuatu dari seseorang kepada orang lain melalui suatu peristiwa yang sebenarnya tak dikehendaki. Korban perang, korban perkosaan, atau korban bencana alam, dan seterusnya,

tak didukung oleh *haq* nilai. Sementara *qurban* berlainan sama sekali. Ia berarti menyampaikan (bukan memberikan) sesuatu yang merupakan “milik” (dengan tanda petik) kita kepada sesuatu, orang, atau Tuhan, yang memang sebenarnya berhak (*haq*) atas sesuatu itu.

Ketika Ibrahim menyembelih Isma‘il, putranya, dan ketika sang anak itu merelakan nyawanya, tidaklah berarti Ibrahim mengorbankan anaknya dan Isma‘il mengorbankan hidupnya. Yang mereka lakukan adalah keikhlasan menyampaikan kembali milik Allah kepada Allah.

Penyerahan kembali itu—yang nanti bisa kita terjemahkan dalam berbagai skala—merupakan metode untuk melebur, menyatu, atau bertauhid kepada, dengan, bersama, dan bahkan “menjadi” Allah. Saya harus torehkan tanda petik pada kata menjadi itu, karena pemahaman semua makhluk terbentur pada biasanya belaka.

Manusia tidak pernah tahu-menahu mengenai kelahiran dan hakikat azanya. Dia tak pernah merancang, bahkan juga tak pernah meniatkan bahwa dia akan lahir dan menjadi seorang anak manusia, menjadi putra ibu dan bapaknya, yang kemudian oleh kebudayaan dia dirumuskan menjadi “Soeharto, Presiden Republik Indonesia”

Dia, manusia, dengan demikian juga tak pernah—dalam arti yang sesungguhnya—memiliki dirinya sendiri serta apa pun yang lain dalam kehidupannya. Dia ada karena ada sesuatu yang memungkinkan dan mengizinkannya untuk ada. Dia “memiliki” sesuatu dalam keberadaannya itu bukan karena *haq*-nya adalah memiliki sesuatu, melainkan karena ada sesuatu yang meminjamkan kepadanya. Dia bisa berjalan dan menggerakkan tubuhnya bukan karena sejak semula dia merencanakan dan menentukan bahwa dia bisa berjalan dan menggerakkan badan, melainkan karena ada sesuatu yang memungkinkan dan mengizinkan-Nya bisa berjalan dan menggerakkan badan.

Sesuatu dengan “S” besar itu, yakni satu-satunya yang ada dan pasti ada, yang sejati dan pasti sejati, memiliki hak seratus persen untuk menagih atau meminta kembali segala milik-Nya, kapan pun

dan di mana pun, serta dengan cara yang bagaimanapun. Hak Tuhan itu gugur apabila ada seseorang yang mampu menciptakan dirinya sendiri.

Dalam pemahaman seperti itu, maka yang dilakukan oleh Ibrahim dan Isma'il "hanyalah" mengembalikan hak Allah kepada Allah, tak ada apa pun yang hilang dari keduanya dengan penyembelihan itu, karena memang aslinya mereka tidak pernah ada dan tidak memiliki apa pun, juga "diri"-nya sendiri.

Yang menjadi pangkal persoalan dalam sejarah umat manusia adalah bahwa sesudah melahirkan dan ada, setiap manusia memahami "barang pinjaman" itu sebagai "barang milik"-nya. Seorang Ibrahim bisa merasa posesif terhadap Isma'il karena dia anaknya dan sangat dicintainya. Isma'il juga dihindangi "rasa memiliki" atas dirinya sendiri, atas nyawanya, atas seluruh kehidupannya, bahkan atas segala sesuatu yang bisa dinikmatinya.

Maka, ketika kemudian mereka mengikhlaskan "milik" itu diminta kembali oleh Yang Maha Empunya, Ibrahim dan Isma'il mencapai tingkat *fithri* dan sukses menghayati makna *qurban*, sambil sama sekali tidak merasa sedang "mengorbankan diri".

Dari titik pemahaman ini, kita bisa menghimpun pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan hal historis apa kumpulan manusia menganggap diri dan bumi ini milik mereka sehingga lantas mereka lahirkan sistem-sistem yang "mengatur hak milik". Tidak cukup kita hanya membedakan bahwa idiom "pemilikan" itu adalah "bahasa negara" atau "bahasa hukum formal", sementara "pinjaman" adalah "bahasa agama".

Ada bahaya besar apabila agama terlalu diletakkan hanya dalam pemahaman sosiologis seperti itu. Ketika pertengkaran tentang "pemilikan" itu berkepanjangan merusakkan dunia dan meledakkan perang demi perang, umat manusia kehilangan cakrawala untuk mengadakan penderitaannya. Apalagi mereka sesungguhnya diam-diam—melalui modernitas ilmu di kampus-kampus, bahkan pun melalui tradisi-tradisi

sehari-hari—mereka makin lama makin kehilangan kepercayaan terhadap Idul Fitri dan Idul Adha. Orang menyelenggarakan penyembuhan kepada Allah sekadar merupakan usaha menempelkan katup mental yang melindungi mereka dari kecemasan-kecemasan asing dalam diri mereka di ujung petualangan dosa, kekeliruan ilmu, dan kerakusan budaya. Mereka tidak memahami Tuhan dan agama sebagai *huwal awâlu wal âkhiru*, sebagai pangkal dan ujung pengembaraan setiap dan semua manusia; dari mana dan kepada apa segala pemikiran, rekayasa, ideologi, keputusan-keputusan pergaulan kecil maupun pergaulan besar bersumber.

Kehidupan umat manusia dewasa ini terletak di tempat yang sudah berjarak amat jauh dari keseyogiaan yang bisa kita pahami melalui agama tentang kehidupan ini.

Misalnya, semangat Idul Fitri maupun Idul Adha bertolak belakang dengan “egosentrisisme” kekuasaan atau monopoli ekonomi. Bahkan, juga segala bentuk primordialitas, eksklusivisme, dan kesepihakan yang lain dalam berbagai dimensi kehidupan. Ibrahim diperintah oleh Allah—secara substantif—bukan untuk menyembelih Isma‘il, melainkan untuk menaklukkan dan memusnahkan kesepihakan dan egosentrisisme rasa memiliki diri sendiri dan rasa memiliki anaknya. Diri Ibrahim dan diri anaknya adalah milik Allah dan harus disampaikan kembali kepada-Nya.

Allah itu, pengejawantahan atau perwujudan atau penjelmaannya dalam kehidupan (tak hanya penjelmaan-Nya di bumi) adalah berupa kesatuan dan kebersamaan seluruh makhluk, atau dalam perspektif yang lebih sempit; kebersamaan antarmanusia—yang dari pemikiran seperti demokrasi atau egalitarianisme dilahirkan.

Seluruh alam dan penghuninya adalah penjelmaan Allah. Juga kita. Tatkala Allah meminta kembali Isma‘il dari Ibrahim, Allah bukan sedang melakukan monopoli. Sebab dengan kesetiaan bapak-anak itu kepada-Nya, berlangsung proses penyatuan antara kehendak manusia

dan kehendak Allah. Hasil dari setiap penyatuan adalah menjelmannya “dua” menjadi “satu”. Itulah tauhid. Dan tentulah, sesudah penyatuan itu, di “satu” bukanlah manusia, melainkan Allah. Maka, di dalam “Kesatuan” atau “Satu” itu tak ada monopoli: Isma‘il kembali menjadi miliknya sendiri di dalam Allah.

Sesungguhnya betapa relevan dan “historis” seluruh sumber nilai yang kita kenali melalui agama itu terhadap segala yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Di sekitar kita, juga pada diri kita sendiri, betapa terdapat amat banyak Ibrahim yang tak bersedia menyembelih kesepihakan, egoisme, monopoli, oligopoli, eksklusivisme, subjektivisme beserta saudara-saudari sekandungnya. Betapa banyak juga Isma‘il-Isma‘il yang menipu diri sendiri dengan tak bersedia disembelih “rasa memiliki secara sepihak”-nya, sehingga mereka atau kita akan pada akhirnya menjadi “kambing yang tersembelih” oleh kekuatan kebenaran dalam sejarah atau oleh keterjebakan hidup kita sendiri yang baru kita sadari beberapa hari menjelang ajal.

Mereka-mereka yang naik haji di setiap bulan haji, juga tak bisa dijamin bahwa mereka akan membawa pentas egalitarianisme di sepuntar Ka‘bah itu ke kampungnya. Tak bisa diharapkan bahwa mereka akan mencopot pakaian-pakaian semu, pangkat-derajat-kekayaan keduniawian sebagaimana mereka diajari berdemokrasi selama berihram. Tak bisa didambakan juga sepulang naik haji mereka akan setiap saat membawa batu untuk melempari potensi dosa dan keserakahan mereka sebagai dicontohkan tatkala melakukan Jumrah.

Orang-orang yang naik haji tidak otomatis “membawa madu” ke kampung halamannya sebagaimana jenis makanan-minuman itu melambangkan makna haji. Mereka tak bisa dijamin akan berperilaku madu, berkata-kata madu dan ber-SK-SK madu. Bahkan, di antara mereka sibuk mengulang-ulang naik haji, sementara tetangga-tetangganya (pada era informasi ini, tetangga bukan lagi sekadar kawan sebelah rumah) membutuhkan santunan dari kemelaratan, ketertin-

dasan, dan kesengsaraan. Lebih celaka lagi, mereka yakin bahwa haji mereka insya Allah mabrur. Allah begitu digampangkan.[]

Antara Kambing dan “Kambing”

Banyak orang tak merasa lagi kagum terhadap kisah agung Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Isma‘il, putra terkasihnya. Banyak orang tak lagi merasa tersentuh. Mungkin karena ilmu dan pengetahuan kita tentang kehidupan tidak semakin berkembang—kalau tidak boleh kita bilang semakin menyempit—tentang kehidupan dan kehidupan, sehingga kita tak memiliki kesadaran intelektual dan imajinasi untuk memasuki dimensi keagungan itu.

Atau, mungkin karena Ibrahim dan Isma‘il itu nabi.

“Mereka itu Nabi, utusan Allah yang berkomunikasi langsung dengan-Nya,” mungkin demikian kita berkata. “Kalau mereka memperoleh perintah, segalanya gamblang bagi mereka. Dan mereka tinggal menjalankan perintah itu, karena sesudah itu segala jaminan dan harapan dari Allah tak perlu diragukan. Sementara kita semua ini manusia biasa. Tidak istimewa dan tidak diistimewakan oleh-Nya. Kita jauh dari-Nya. Tuhan tidak memberikan perintah langsung kepada kita sebagaimana kepada Nabi”

Atau, bermacam-macam lagi.

Padahal kepada kita pun, Allah memberi perintah langsung. Padahal, segala jaminan dan harapan-Nya pun gamblang bagi kita. Padahal,

kita pun diberi perkenan untuk berkomunikasi langsung dengan-Nya serta memahami bahasa-Nya.

Tiap saat Allah mengomunikasikan kemauan-kemauan-Nya kepada kita. Melalui firman-firman literernya dalam Al-Quran, melalui keagenan hadis dan Sunnah Rasul, melalui daun-daun, angin, hukum dan gejala-gejala alam, melalui rumus-rumus kejadian pada diri kita sendiri dan orang lain. Serta melalui apa saja yang termuat dalam keseharian kita.

Persoalannya, apakah kita *titen* atau tidak terhadap bahasa-Nya, gaya-Nya, tradisi-tradisi “perilaku”-Nya.

Kita tidak bisa berkata, misalnya, “Ibrahim bersedia menyembelih anaknya dan Isma‘il ikhlas melepas nyawanya, sementara kita belum bersedia melepas uang seribu rupiah buat seorang pengemis, apalagi melepas jabatan atau sesuatu yang lebih penting dari itu bagi hidup kita”

Alasan kita adalah, “Kita bukan nabi.”

Sering saya *angen-angen* kisah Syaikh Jangkung. Ketika dia datang berguru kepada Sunan Kudus, wali *sareh* itu menyuruhnya mengucapkan Kalimah Syahadat. Tetapi, yang calon santri ini lakukan adalah justru berlari menghampiri sebatang pohon kelapa. Dia lantas memanjatnya sampai ke puncak, kemudian menjatuhkan dirinya ke tanah.

Ndilalah kersaning Allah, Syaikh Jangkung tak kurang suatu apa, sekadar satu-dua luka kecil.

Para santri jadi bingung, atau di antara mereka ambil jalan pintas dengan menganggap lelaki itu sinting. Sunan Kudus bertanya kepadanya, “Kenapa itu yang kau lakukan?”

Syaikh Jangkung tidak menjawab. Dia duduk saja di beranda masjid. Sehingga kemudian Sunan Kudus-lah yang menjelaskan kepada santri-santrinya, “Alangkah gampangya mengucapkan syahadat di mulut. Anak tiga tahun pun bisa dengan fasih melakukannya. Tetapi, syahadat adalah persaksian. Adakah ikrar. Ikrar itu sederhana: hidup

atau mati. Apakah kalian bersedia mati untuk mempertahankan nilai Allah dan Muhammad itu utusan Allah, maka kita memilih mati tatkala ada suatu keadaan atau kekuasaan lain yang mendorong kita untuk ingkar terhadap prinsip itu. Kalau kita sudah mengucapkan syahadat, maka dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita nomorsatukan adalah tingkat jabatan, jumlah uang atau nama besar diri sendiri, dengan sendirinya syahadat itu gugur maknanya. Kita mencari kekayaan, meniti kepangkatan dan membina nama baik pribadi, tetapi itu semua kita arahkan untuk menomorsatukan Allah dan Muhammad. Si Jangkung ini bersedia mati untuk Allah dan Muhammad, dan cara dia bersyahadat adalah melakukan sesuatu yang bisa membuktikan kesediaannya itu. Menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa adalah bukti kepasrahan dan kerelaannya terhadap kenomorsatuan Allah dan Muhammad.”

Mungkin ini kisah romantik dan ditertawakan oleh “manusia modern”. Saya juga tidak menyarankan secara bodoh dan tidak relevan agar Anda segera mencopot diri dari jabatan Anda, misalnya agar rakyat tidak terlalu lama jijik dan para atasan Anda merasa pusing dan risi. Silakan terus jadi pejabat, jadi orang terkenal, jadi orang kaya, jadi orang di atas orang-orang lain secara ekonomi, politik, dan budaya. Tetapi persoalannya, apakah Anda mendayagunakan posisi dan fasilitas yang Anda miliki itu untuk menomorsatukan iradah-Nya atau tidak.

Kisah itu amat bersahaja, *ndesit*, di tengah dunia modern yang tidak membutuhkan dongeng-dongeng. Tetapi, kita tidak bisa berlaku terlalu munafik untuk menganggap bahwa kita-kita yang pada abad gegap gempita dan *keminter* ini punya kualitas lebih tinggi dibanding manusia Syaikh Jangkung.

Kesediaan Ibrahim untuk menyembelih anaknya adalah kemenangan seorang manusia atas ego kecilnya. Ego kecil, romantisme kepentingan pribadi, sentimentalisme cinta kasih lokal, atau kesepihakan.

Keikhlasan Isma‘il untuk ditumpas nyawanya oleh bapaknya sendiri adalah kesanggupan seorang anak manusia untuk mengalahkan nafsu pemusatan “diri kecil”. Peleburan dari dimensi *ahad* menuju dimensi *wahid*. *Ahad* itu ketika Allah berdiri sebagai diri-Nya sendiri yang sendiri. *Wahid* itu tatkala Dia telah melalui proses (yang ditakdirkan-Nya sendiri) penyatuan dengan makhluk-makhluk-Nya yang Dia ciptakan sendiri dan dari “suku cadang” diri-Nya sendiri.

Dari mana Allah *kulakan* bahan untuk membuat manusia dan alam, juga jin, setan, dan malaikat, kalau tidak dari diri-Nya sendiri? Tidak ada apa-apa selain Allah, karena memang hanya Allah yang memiliki kepastian untuk ada. Yang lainnya, kita-kita semua ini, tidak pernah ada, melainkan sekadar diadakan alias diselenggarakan. Kita semua, juga gunung dan burung-burung, adalah penjelmaan Allah di muka bumi, melalui konsep dan konfigurasi budaya yang diizinkan-Nya. Bahkan, bumi dan seluruh alam semesta ini pun penjelmaan-Nya. Apalagi Ibrahim, Isma‘il, Musa, Isa, dan Muhammad. Dari mana asal nabi kalau tak dari padi? Dari mana asalnya kita kalau tak dari Tuhan?

Maka, Idul Adha, Idul Qurban, adalah contoh soal pelajaran bagaimana mengorbankan “diri kecil” kita masing-masing agar bergabung kembali dengan “diri besar” yang asli. Diri kecil itu semu. Tidak asli. Aslinya tidak ada.

Menyembelih ego dan kesepihakan dalam kehidupan sosial ialah bagaimana kita menggagas dan mewujudkan suatu eksistensi yang ditransformasikan dari “aku sebagai diri sendiri” menjadi “aku orang banyak”. Kalau engkau ditanya siapa engkau, engkau menjawab, “Aku bukan Polan, aku adalah orang banyak.” Artinya, segala perilaku hidupmu dipertimbangkan berdasarkan kepentingan kebersamaan.

“Aku orang banyak”, “aku rakyat”, “aku masyarakat”, “aku kehidupan ini seluruhnya”, adalah tahap perjalanan menuju “Aku ...” yang merupakan satu-satunya kepastian sejati.

Oleh karena itu, pemerintah, partai politik, organisasi sosial, dan sebagainya meletakkan diri—seyogianya—pada dimensi “aku masyarakat”. Makna Idul Adha bagi pemerintah adalah menyembelih (ber-

kurban) egosentrisisme politisnya, subjektivisme kekuasaannya, atau kesepihakan kepentingannya.

Kalau dimensi-dimensi itu disembelih, maka Allah akan menentukan bahwa ia justru memperoleh “kehidupan sejati bersama-Nya”, dan yang terpenggal lehernya adalah kambing. Dengan demikian, kalau hal-hal itu tak disembelih, maka yang ia hidupkan bukanlah diri sejati, melainkan kambing-kambing. Sehingga jadilah ia kambing, setidaknya berderajat sama dengan kambing.

Demikian juga pada skala-skala lain dalam kehidupan kita—dalam bergaul di kampung, dalam mekanisme sosial yang besar—kita begitu sering menjadikan diri sebagai kambing-kambing. Kita lupa, bahwa pada akhirnya kambing-kambing itu akan tersembelih, terpenggal lehernya, dan mengucur darah darinya.

Dan alangkah dungunya kita ini: setiap datang Idul Adha kita amat bersibuk hanya dengan menyembelih kambing-kambing dan lembu, sungguh-sungguh hanya kambing-kambing dan lembu, bukan kambing-kambing egoisme dalam diri kita, bukan lembu-lembu kesepihakan dalam posisi kekuasaan dan kekayaan kita.[]

Sumber Tulisan

Anugerah Adam Malik untuk Emha (*Jawa Pos*, 5 September 1991).
Genggamlah Tanah agar jadi Emas (*Surabaya Post*, 7 September 1991).

Emha di Mata Kuntowijoyo (*Jawa Pos*, 10 September 1991).
Surat kepada Kanjeng Nabi (*Surabaya Post*, 8 September 1992).

Surat Pertama

1. *Bernas*, 26 Januari 1991.
2. *Bernas*, 2 Maret 1991.
3. *Yogya Post*, 30 November 1990.
4. *Yogya Post*, 27 Juli 1990.
5. *Yogya Post*, 20 Juli 1990.
6. *Editor*, No. 4/V, 12 Oktober 1991.
7. *Yogya Post*, 10 Mei 1991.
8. *Masa Kini*, 3 Juli 1988.
9. *Surya*, 2 Desember 1991.
10. Ditulis pada Oktober 1983.
11. *Yogya Post*, 31 Agustus 1990.
12. *Yogya Post*, 16 Februari 1990.

13. *Masa Kini*, 4 Juli 1987.
14. *Wawasan*, 1 Mei 1991.
15. *Yogya Post*, 3 Januari 1992.
16. *Suara Merdeka*, 31 Oktober 1992.
17. *Suara Merdeka*, 30 Oktober 1991.
18. *Surya*, 3 Februari 1992.
19. *Suara Merdeka*, 25 Januari 1991.
20. *Jawa Pos*, 14 Februari 1991.
21. *Bernas*, 23 Februari 1991.
22. *Bernas*, 6 Januari 1990.
23. *Yogya Post*, 6 April 1990.
24. Dipublikasikan pada 28 September 1983.
25. *Yogya Post*, 10 Januari 1991.
26. *Yogya Post*, 18 Mei 1990.
27. *Suara Merdeka*, 11 Januari 1992.
28. *Yogya Post*, 19 September 1990.
29. *Suara Merdeka*, 21 November 1992.
30. *Matra*, 6 April 1990.
31. *Yogya Post*, 6 November 1989.
32. *Yogya Post*, 5 Oktober 1990.
33. *Suara Merdeka*, 8 Agustus 1993.
34. *Suara Merdeka*, 18 Juli 1992.
35. *Yogya Post*, edisi terbitan tak terlacak.

Surat Kedua

1. *Yogya Post*, 8 Maret 1991.
2. *Yogya Post*, 15 Maret 1991.
3. *Pelita*, 27 Januari 1991.
4. *Bernas*, Maret 1991.
5. *Yogya Post*, 9 Maret 1990.
6. *Editor*, No. 34/V, 9 Mei 1992.
7. *Suara Merdeka*, 8 Februari 1992.

8. *Masa Kini*, 26 Juni 1988.
9. *Yogya Post*, 9 November 1990.
10. *Yogya Post*, 29 September 1990.
11. *Yogya Post*, 12 Oktober 1990.
12. *Masa Kini*, 20 Maret 1988.
13. *Suara Merdeka*, 25 September 1992.
14. *Suara Merdeka*, 16 April 1992.
15. *Yogya Post*, 2 Februari 1990.
16. *Yogya Post*, 16 Maret 1990.
17. *Yogya Post*, 21 Desember 1990.
18. *Minggu Pagi*, Minggu ke-2 Desember 1991.
19. *Minggu Pagi*, Minggu ke-3 Desember 1991.
20. *Minggu Pagi*, Minggu ke-4 Desember 1991.
21. *Minggu Pagi*, Minggu ke-5 Desember 1991.
22. *Minggu Pagi*, Minggu ke-1 Januari 1992.
23. *Yogya Post*, 3 Mei 1991.
24. *Surya*, 21 Oktober 1992.
25. *Masa Kini*, 20 Juni 1987.
26. *Bernas*, 6 Januari 1991.
27. *Masa Kini*, 10 April 1988.
28. *Masa Kini*, 23 April 1987.

Surat Ketiga

1. *Yogya Post*, 3 Agustus 1990.
2. *Yogya Post*, 31 Desember 1990.
3. *Masa Kini*, 24 Maret 1987.
4. *Bernas*, 21 Januari 1991.
5. *Surabaya Post*, 27 November 1991.
6. *Salam*, No. 16/V, 23-29 Rabi' Al-Tsani 1412 H.
7. *Suara Merdeka*, 24 Mei 1991.
8. *Surya*, 9 Desember 1991.
9. *Suara Merdeka*, 25 Februari 1991.

10. *Suara Merdeka*, 16 Februari 1991.
11. *Bernas*, 22 Februari 1991.
12. *Suara Merdeka*, 16 Juli 1993.
13. *Yogya Post*, 22 Maret 1991.
14. *Suara Merdeka*, 10 April 1991.
15. *Berita Buana*, 8 April 1991.
16. *Yogya Post*, 12 April 1991.
17. *Suara Merdeka*, 2 Mei 1991.
18. *Surya*, 24 Februari 1992.
19. *Pelita*, 10 Februari 1990.
20. *Surya*, 27 Januari 1992.
21. *Yogya Post*, 14 Desember 1990.
22. *Masa Kini*, 5 Juni 1988.
23. *Masa Kini*, 29 Mei 1988.
24. *Yogya Post*, 19 April 1991.
25. *Surya*, 25 Januari 1993.
26. *Surya*, 1 Februari 1993.
27. *Surya*, 8 Februari 1993.
28. *Masa Kini*, 17 April 1988.
29. *Yogya Post*, 19 Januari 1990.
30. *Suara Merdeka*, 18 September 1990.

Surat Keempat

1. *Amanah*, No. 7-20, September 1990.
2. *Suara Merdeka*, 30 November 1992.
3. *Yogya Post*, 2 Maret 1990.
4. *Minggu Pagi*, Februari 1993.
5. *Masa Kini*, 3 April 1988.
6. *Suara Merdeka*, 7 Februari 1991.
7. *Bernas*, 1 Maret 1991.
8. *Jawa Pos*, 10 Februari 1991.
9. *Yogya Post*, 15 Februari 1991.

10. *Yogya Post*, 9 Februari 1991.
11. *Yogya Post*, 8 Desember 1989.
12. *Yogya Post*, 4 Mei 1990.
13. *Masa Kini*, 22 Mei 1988.
14. *Suara Pembaruan*, 27 Maret 1991.
15. *Suara Merdeka*, 13 Maret 1991.
16. *Bernas*, 9 Maret 1991.
17. *Suara Merdeka*, 18 April 1992.
18. *Surya*, 7 April 1992.
19. *Suara Karya*, 23 Maret 1993.
20. *Masa Kini*, 15 Mei 1988.
21. *Masa Kini*, 12 Juni 1987.
22. *Masa Kini*, 25 April 1990.
23. *Suara Merdeka*, 4 April 1992.
24. *Bernas*, 13 April 1991.
25. *Suara Merdeka*, 14 April 1991.
26. *Suara Karya*, 15 September 1991.
27. *Bernas*, 22 Juni 1991.
28. *Suara Merdeka*, 22 Juni 1991.

Di negeri kami ini, umatmu berjumlah terbanyak dari penduduknya. Di negeri ini, kami punya Muhammadiyah, punya NU, Persis, punya ulama-ulama dan MUI, ICMI, punya bank, punya HMI, PMII, IMM, Anshor, Pemuda Muhammadiyah, IPM, PII, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, kelompok-kelompok studi Islam intensif, yayasan-yayasan, mubalig-mubalig, budayawan, seniman, cendekiawan, dan apa saja.

Yang tak kami punya hanyalah kesediaan, keberanian, dan kerelaan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti jejakmu.

Demikian tulis Kiai Mbeling—“julukan” budayawan Emha Ainun Nadjib—dalam “surat”-nya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw. Sudah sampai di manakah langkah kita dalam meneladani kiprah Nabi Suci Saw.?

“Dalam diri Emha terwakili suatu sensibilitas pemuda.

Yaitu pemuda yang kritis, suka protes, tapi sekaligus religius.”

—Kuntowijoyo

Emha Ainun Nadjib lahir di Jombang, Jatim, 27 Mei 1953. Dia adalah seorang budayawan multitalenta: penyair, esais, pegiat teater, pemusik, dan lain-lain. Sebagai seorang penulis, Emha sangat produktif, telah menghasilkan puluhan buku. Di antara karya-karya emasnya yang diterbitkan Mizan adalah *Dari Pojok Sejarah* (1985), *Seribu Masjid Satu Jumlahnya* (1990), *Secangkir Kopi Jon Pakir* (1992), *Markesot Bertutur* (1993), *Markesot Bertutur Lagi* (1994), *Slilit sang Kiai*, dan *Surat kepada Kanjeng Nabi*. Selain berkiprah di dunia tulis-menulis, Emha juga merupakan motor penggerak di balik kelompok musik Kiai Kanjeng dan pengajian komunitas Jamaah Maiyah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.